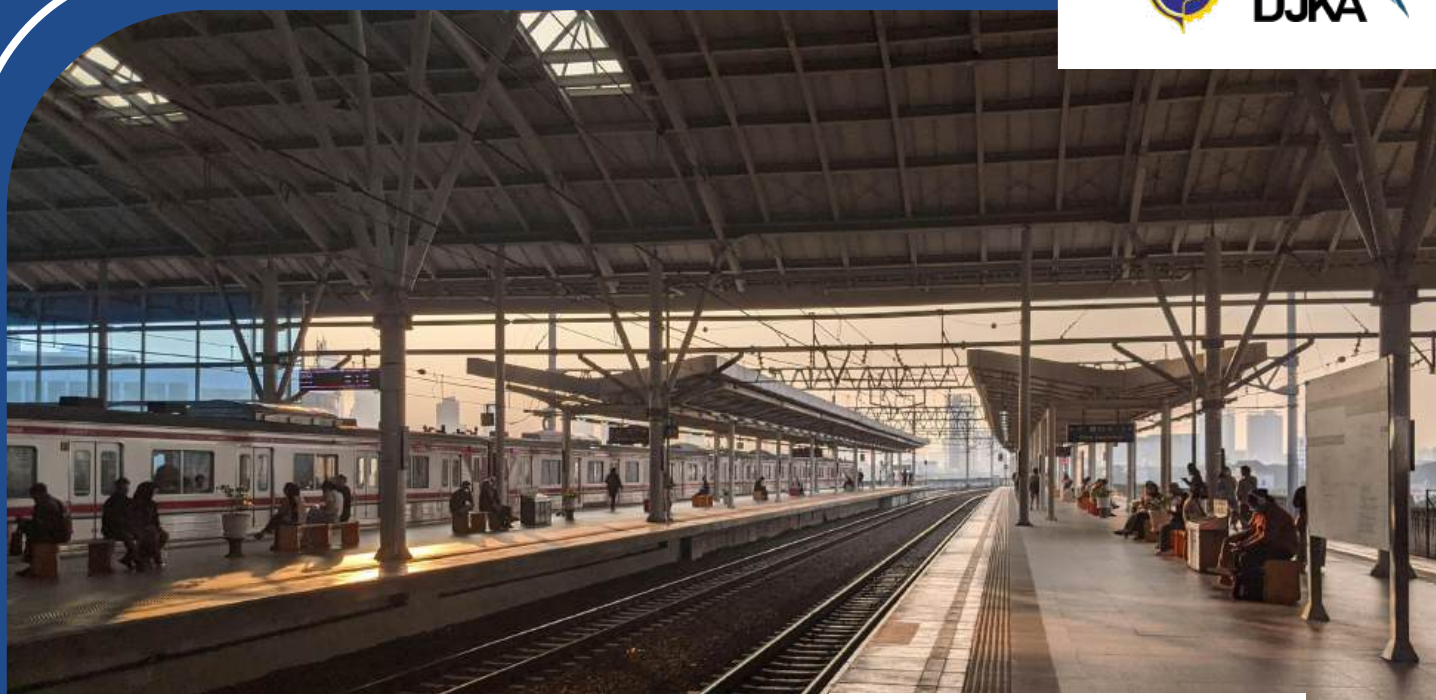


LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA

TRIWULAN IV 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

KATA PENGANTAR

Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator melaksanakan fungsi pembinaan meliputi pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian serta melaksanakan pembangunan infrastruktur perkeretaapian sesuai prioritas pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Penyelenggaraan perkeretaapian dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan transportasi massal perkeretaapian yang handal dan berdaya saing baik pada layanan perkotaan maupun antar kota.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai regulator, ditetapkan Indikator Kinerja Program yang menjadi tolok ukur keberhasilan/kegagalan. Pencapaian Indikator Kinerja Program secara berkala dilakukan pemantauan kinerja dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan pemantauan kinerja dituangkan dalam Laporan Monitoring Kinerja Triwulan yang mencakup informasi realisasi kinerja dalam periode triwulan terhadap target kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Selain informasi kinerja, juga diidentifikasi permasalahan/kendala serta uraian rekomendasi sebagai upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan IV Tahun 2025.

Jakarta, Januari 2026

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

ALLAN TANDIONO

NIP 198801182025211023

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan IV Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Monitoring Kinerja menggambarkan pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Program serta progres kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2025 mengacu pada target Perjanjian Kinerja Tahun 2025. ***Rata-rata capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025 diperoleh sebesar 100,310%*** yang secara ringkas disampaikan pada Tabel berikut.

Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan IV Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IKP1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460	0,453	98,478
2	SP2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IKP2 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	93,500	93,506	100,006
		IKP3 Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api	%	96,200	97,703	101,562
		IKP4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	19,000	19,596	103,137
3	SP3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKP5 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	%	100,000	99,073	99,073
4	SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100,000	99,604	99,604
Rata-rata Capaian Kinerja						**103,310**

Selain itu, dilaporkan pula realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2025 diperoleh sebesar Rp5.465.737.775.844,00 dengan persentase sebesar 69,74% terhadap pagu total sebesar Rp7.837.236.554.000,00 atau sebesar 70,58% dari pagu efektif sebesar Rp7.744.260.945.000,00. Terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2025 sebesar Rp2.022.678.845.172,00 atau 162,291% dari target Tahun 2025 sebesar Rp1.246.326.325.000,00 mencakup pendapatan fungsional dan non fungsional.

Dengan penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Triwulan IV Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi kinerja dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan untuk menjadi acuan dalam peningkatan kinerja periode selanjutnya termasuk memastikan target pada akhir tahun dapat terpenuhi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
DAFTAR TABEL ..... **v**
DAFTAR GAMBAR ..... **vii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **viii**
BAB 1 PENDAHULUAN **1-1**
1.1 LATAR BELAKANG 1-1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN 1-2
1.3 TUGAS DAN FUNGSI 1-2
1.4 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA 1-3
1.5 PERJANJIAN KINERJA 1-7
1.5.1 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 1-8
1.5.2 ALOKASI ANGGARAN 1-16
BAB 2 CAPAIAN KINERJA TRIWULAN **2-1**
2.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA 2-1
2.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 2-4
2.2.1 MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN 2-4
2.2.2 MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN 2-17
2.2.3 MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN 2-46
2.2.4 MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN 2-61
2.3 DUKUNGAN CAPAIAN INDIKATOR RPJMN 2025-2029 2-79
2.4 CAPAIAN KINERJA LAINNYA 2-85
2.5 REALISASI ANGGARAN 2-98
2.5.1 REALISASI ANGGARAN UNIT KERJA 2-98
2.5.2 REALISASI PENDAPATAN UNIT KERJA 2-1
2.5.3 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA 2-2
BAB 3 PENUTUP **3-1**
3.1 TINDAK LANJUT REKOMENDASI PADA PELAPORAN KINERJA SEBELUMNYA 3-1
3.2 KESIMPULAN 3-11
3.3 REKOMENDASI 3-12
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1- 1 Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 1-9
Tabel 1-2 Target Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2025 1-13
Tabel 1- 3 Perubahan/Revisi Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 1-14
Tabel 1- 4 Alokasi Anggaran Per Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 1-16
Tabel 1- 5 Alokasi Anggaran Per Indikator Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 1-18
Tabel 2-1 Pengukuran Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2-2
Tabel 2-2 Target dan Realisasi Lokasi PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional/Simpul Transportasi yang Terhubung Jaringan Jalur Kereta Api pada Tahun 2025 2-5
Tabel 2- 3 Target dan Realisasi Frekuensi Perjalanan Kereta Api pada Tahun 2025 2-8
Tabel 2- 4 Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2025 2-9
Tabel 2- 5 Realisasi Penanganan Risiko IKP Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian s.d. Tahun 2025 2-15
Tabel 2-6 Nilai Rasio Konektivitas Antar Wilayah 2-15
Tabel 2-7 Kategori Kinerja Nilai IKM 2-18
Tabel 2-8 Hasil Survey Nilai IKM Bulan Januari s.d Desember Tahun 2025 2-18
Tabel 2-9 Capaian Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2025 2-19
Tabel 2- 10 Realisasi Penanganan Risiko IKP Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perkeretaapian s.d. Tahun 2025 2-23
Tabel 2-11 Perbandingan Nilai IKM 2-23
Tabel 2-12 Realisasi Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu Tahun 2025 2-25
Tabel 2-13 Capaian Kinerja Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api Per Triwulan Tahun 2025 2-26
Tabel 2- 14 Realisasi Penanganan Risiko IKP On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api Tahun 2025 2-31
Tabel 2- 15 Keterjadian Peristiwa Risiko Pada IKP On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api Tahun 2025 2-31
Tabel 2-16 Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Per Triwulan Tahun 2025 2-37
Tabel 2-17 Realisasi Penanganan Risiko IKP Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api s.d Triwulan IV 2025 2-43
Tabel 2- 18 Keterjadian Peristiwa Risiko IKP Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Tahun 2025 2-43
Tabel 2-19 Perbandingan Kinerja Angkutan Penumpang Kereta Api 2-44

Tabel 2-20 Perbandingan Kinerja Angkutan Barang Kereta Api....2-45
Tabel 2- 21 Jumlah Kejadian Kecelakaan per Jenis Kejadian Tahun 2025 2-47
Tabel 2- 22 Jumlah Kejadian Kecelakaan per Wilayah Balai Tahun 2025 2-47
Tabel 2- 23 Capaian Kinerja Rasio Konektivitas antar Wilayah Per Triwulan Tahun 2025 2-48
Tabel 2- 24 Realisasi Penanganan Risiko IKK Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian s.d Triwulan IV 2025....2-56
Tabel 2- 25 Keterjadian Peristiwa Risiko IKK Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2025 2-56
Tabel 2- 26 Kejadian Kecelakaan Perkeretaapian....2-57
Tabel 2-27 Uraian Target Triwulanan IKP Persentase Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Per-Komponen Penilaian Tahun 2025 2-61
Tabel 2-28 Perolehan Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian Per-Komponen Penilaian Tahun 2024-2025....2-63
Tabel 2- 29 Realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 2-64
Tabel 2-30 Monitoring Indeks Profesional ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025....2-67
Tabel 2-31 Capaian Kinerja Persentase Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2025 2-68
Tabel 2-32 Realisasi Penanganan Risiko IKP Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 2-74
Tabel 2- 33 Keterjadian Peristiwa Risiko Pada IKP Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 2-75
Tabel 2-34 Perolehan Nilai AKIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025 2-75
Tabel 2- 35 Realisasi NKA Per-Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025....2-76
Tabel 2-36 Realisasi PNBP Per-Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan Periode Tahun 2025 2-76
Tabel 2-37 Perolehan Nilai AKIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025 2-87
Tabel 2- 38 Target Program Padat Karya Per Unit Kerja Tahun 2025 2-89
Tabel 2- 39 Realisasi Program Padat Karya Per Unit Kerja Tahun 2025....2-89
Tabel 2- 40 Progres Proyek Strategis Nasional Tahun 2025....2-92
Tabel 2- 41 Progres fisik pekerjaan dukungan Asta Cita Presiden....2-94
Tabel 2- 42 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Jenis Belanja Tahun 2025....2-1
Tabel 2- 43 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Kegiatan Tahun 2025 ...2-1
Tabel 2- 44 Alokasi Anggaran Per Sasaran dan Indikator Kinerja Program Tahun 2025 2-3
Tabel 2-45 Realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 2-1
Tabel 2-46 Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran Tahun 2025 2-63
Tabel 3-1 Tindak Lanjut Rekomendasi Pelaporan Kinerja Periode Sebelumnya 3-1
Tabel 3-2 Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan IV Tahun 2025....3-11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 1-5
Gambar 1-2 Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Unit Kerja 1-7
Gambar 2-1 Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2025 2-9
Gambar 2-2 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2025 2-19
Gambar 2-3 Capaian Kinerja Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api Per Triwulan Tahun 2025 2-26
Gambar 2-4 Perbandingan On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api dengan Beberapa Negara 2-32
Gambar 2-5 Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Per Triwulan Tahun 2025 2-37
Gambar 2-6 Capaian Kinerja Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Per Triwulan 2025 2-49
Gambar 2-7 Perbandingan Jumlah Kejadian Kecelakaan KA dengan Beberapa Negara 2-58
Gambar 2-8 Uraian Target Triwulanan IKP Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Per-Komponen Penilaian Tahun 2025 2-62
Gambar 2-9 Capaian Kinerja Persentase Pencapaian Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2025 2-68
Gambar 2-10 Capaian Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api Periode Tahun 2025 2-80
Gambar 2- 11 Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan Berbasis Rel Tahun 2025 2-81
Gambar 2- 12 Capaian Jumlah Perjalanan Kereta Api Periode Tahun 2025 2-82
Gambar 2- 13 Capaian Panjang Jalur KA yang Beroperasi Tahun 2025 2-83
Gambar 2- 14 Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik Tahun 2025 2-84
Gambar 2- 15 Kondisi jalur KA sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2 Tahun 2025 2-84
Gambar 2- 16 Capaian Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel Tahun 2025 2-85
Gambar 2- 17 Dokumentasi Pelaksanaan Program Padat Karya 2-88
Gambar 2- 18 Proyek Strategis Nasional 2-91
Gambar 2- 19 Dokumentasi Proyek Yang Menjadi Pantauan KSP 2-94
Gambar 2- 20 Peresmian Stasiun Tanah Abang Tahap I 2-97

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Lampiran 2. Rekomendasi Peningkatan Kinerja

Lampiran 3. Realisasi dan Rincian Analisis Efisiensi Anggaran Triwulan IV Tahun 2025

Lampiran 4. Monitoring Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2025

Lampiran 5. Data Dukung Capaian Kinerja Masing-Masing Indikator Kinerja

Lampiran 6. Dokumentasi dan Laporan Pembahasan Capaian Kinerja serta Data Pendukung Lainnya

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Saat ini transportasi perkeretaapian terus berupaya meningkatkan pelayanan baik dalam bentuk pembangunan prasarana, sarana dan SDM maupun regulasi bidang perkeretaapian. Program pembangunan perkeretaapian selaras dengan tujuan penyelenggaraan perkeretaapian yang mempunyai peran dan andil untuk meningkatkan serta mendorong perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang kemudian dituangkan dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) serta Rencana Strategis bidang perkeretaapian.

Dalam rangka mewujudkan transportasi perkeretaapian yang handal, diperlukan investasi yang relatif besar untuk meningkatkan daya saing serta daya dukung prasarana dan sarana perkeretaapian. Mengingat transportasi perkeretaapian merupakan salah satu bentuk pelayanan publik, maka Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam menyediakan transportasi tersebut baik melalui mekanisme pembiayaan APBN, APBD, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dukungan BUMN/BUMD, maupun Swasta sepenuhnya.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian diberikan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan meliputi pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian termasuk memberikan layanan kepada masyarakat umum (publik) yang didalamnya terdapat aspek pertanggungjawaban (*accountability*) terhadap pelaksanaan tugas Pemerintah baik secara administratif maupun manajerial sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut disampaikan bahwa setiap instansi Pemerintah wajib untuk mempertanggungjawabkan dan menginformasikan kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tersebut ditindaklanjuti di lingkungan Kementerian

Perhubungan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan aspek pertanggungjawaban (*accountability*) pelaksanaan tugas Pemerintah tersebut, maka disusunlah Laporan Monitoring Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 sebagai laporan pertanggungjawaban dan informasi capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Hal ini sesuai dengan komitmen yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 (revisi terakhir). Komitmen dimaksud merupakan amanat dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk mencapai target kinerja yang tertuang dalam rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan IV Tahun 2025 dilaksanakan dengan maksud:

1. Penyediaan informasi kinerja dan pelaksanaan evaluasi capaian kinerja yang juga mencakup gambaran kemajuan pelaksanaan program/kegiatan pendukung;
2. Identifikasi permasalahan/kendala dalam pencapaian target kinerja;
3. Penyusunan rekomendasi untuk upaya peningkatan kinerja pada periode berikutnya guna memastikan pencapaian target yang ditetapkan pada perencanaan/perjanjian kinerja.

Tujuan penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai tolok ukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka pertanggungjawaban melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.3 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, tugas Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi

Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jederal Perkeretaapian; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai struktur organisasi terdiri dari :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
3. Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
4. Direktorat Sarana Perkeretaapian; dan
5. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;

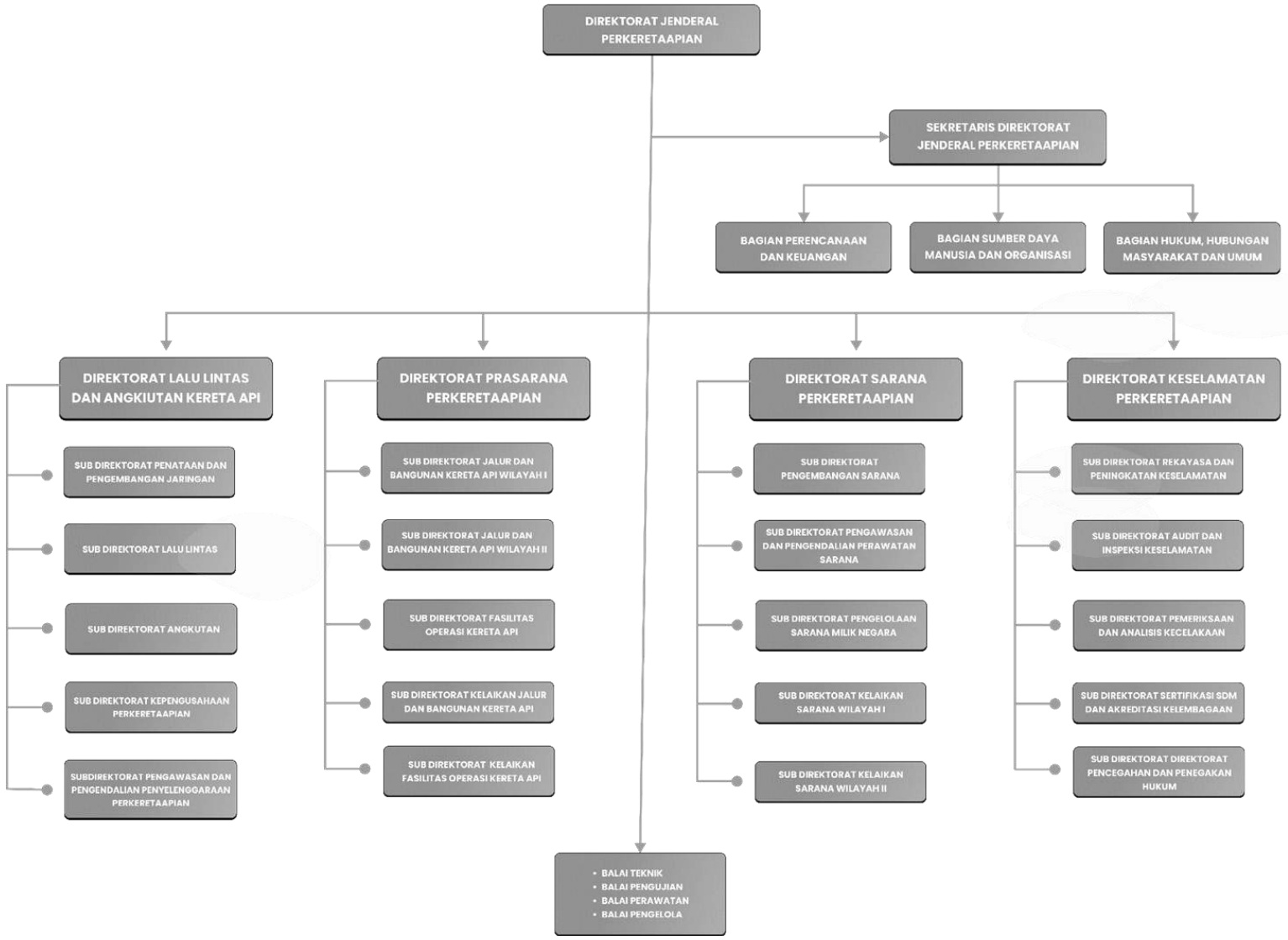
6. Unit Kerja Mandiri/Unit Pelaksana Teknis/Balai setingkat Eselon III, dengan rincian :

   a. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
   b. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
   c. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
   d. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya ;
   e. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
   f. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
   g. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
   h. Balai Pengujian Perkeretaapian (Badan Layanan Umum);
   i. Balai Perawatan Perkeretaapian;
   j. Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (Badan Layanan Umum);
   k. Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Organisasi dan tata kerja Balai Teknik Perkeretaapian, Balai Pengujian Perkeretaapian, Balai Perawatan Perkeretaapian serta Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan diatur melalui peraturan tersendiri yaitu:

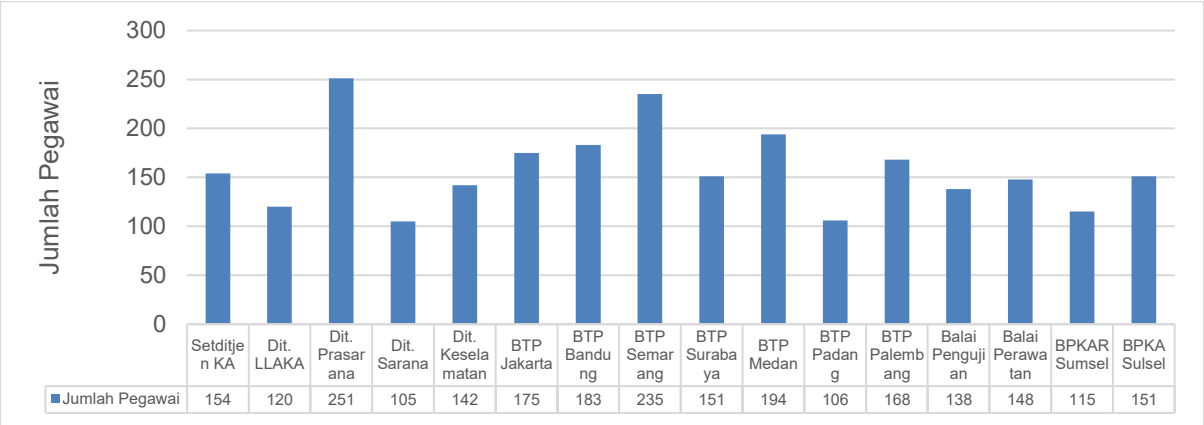
1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perawatan Perkeretaapian;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian.

Adapun struktur organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara umum dapat dilihat sebagaimana pada Gambar berikut:



Gambar 1-1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Sumber Daya Manusia pada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada periode Triwulan IV Tahun 2025 berjumlah sebanyak 2.536 pegawai yang terdiri dari 1.836 PNS dan 700 PPPK yang tersebar pada Kantor Pusat (Sekretariat dan 4 Direktorat Teknis) dan pada 11 Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Jumlah pegawai untuk masing-masing unit kerja diuraikan sebagaimana pada Gambar berikut.



Gambar 1-2 Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian Berdasarkan Unit Kerja

1.5 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan penetapan terhadap target kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Program (IKP) mengacu pada sumber daya yang tersedia serta memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian Tahun 2025-2029.

Pada Tahun 2025, telah dilaksanakan penetapan sasaran dan indikator kinerja termasuk manual perhitungan mengacu pada cascading sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 162 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian tersebut selanjutnya ditindaklanjuti pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan 4 sasaran program dan 6 indikator kinerja program serta dukungan Program Infrastruktur Konektivitas.

1.5.1 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Mengacu pada hal di atas, Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian diuraikan sebagaimana analisa indikator terhadap kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound*) sebagai berikut

Tabel 1- 1 Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	***MEASURABLE (M)***	***ACHIEVABLE (A)***	***RELEVANT (R)***	***TIME-BOUND (T)***
Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Konektivitas Transportasi Perkeretaapian diukur melalui keterhubungan infrastruktur perkeretaapian terhadap lokasi strategis dikalikan dengan faktor pemanfaatan infrastruktur berupa jumlah perjalanan kereta api terhadap program perjalanan kereta api yang ditetapkan pada Grafik Perjalanan Kereta yang berlaku	Perbandingan antara jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Strategis lainnya yang terhubung infrastruktur perkeretaapian s.d tahun berjalan dibandingkan dengan rencana jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/ Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Strategis lainnya yang terhubung dengan infrastruktur perkeretaapian sesuai RIPNAS 2030 dikalikan dengan faktor pemanfaatan infrastruktur perkeretaapian. $\textbf{Rasio Konektivitas Infrastruktur Perkeretaapian } (RK_{IP}) = \frac{\text{Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/ Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Strategis lainnya yang terhubung Infrastruktur Perkeretaapian s.d Tahun Berjalan}}{\text{Rencana Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/ Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Strategis Lainnya yang Terhubung dengan Infrastruktur Perkeretaapian sesuai RIPNAS Tahun 2030}} \times \text{Faktor Pemanfaatan Infrastruktur Perkeretaapian}$ Keterangan: Faktor pemanfaatan infrastruktur perkeretaapian merupakan perbandingan realisasi perjalanan kereta api baik penumpang maupun barang terhadap program perjalanan kereta api yang ditetapkan pada Grafik Perjalanan Kereta Api.	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan, selaras dengan RIPNAS 2030 serta Tugas dan Fungsi termasuk *Core Bussiness* Ditjen Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan publik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator perkeretaapian	Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari aplikasi 3AS *Case Survey Management System* yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 –100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus: IKM = SKM Unit Pelayanan x 25	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan, selaras dengan Tugas dan Fungsi serta *Core Bussiness* Ditjen Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

<table>
<tr><th rowspan="2">INDIKATOR KINERJA</th><th colspan="5">ANALISIS SMART</th></tr>
<tr><th>SPECIFIC (S)</th><th>MEASURABLE (M)</th><th>ACHIEVABLE (A)</th><th>RELEVANT (R)</th><th>TIME-BOUND (T)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1.00 – 2.5996</td><td>25.00 – 64.99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2.60 – 3.064</td><td>65.00 – 76.60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr>
<tr><td>3</td><td>3.0644 – 3.532</td><td>76.61 – 88.30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>4</td><td>3.5324 – 4.00</td><td>88.31 – 100.00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr>
</table>
Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017
</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api</td><td>Salah satu parameter untuk mengukur tingkat pelayanan transportasi kereta api melalui rata-rata ketepatan waktu kedatangan dan keberangkatan KA untuk angkutan penumpang dan barang</td><td>Jumlah kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang yang tepat waktu pada tahun berjalan dibandingkan jumlah keseluruhan kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang pada periode tersebut
$\text{Persentase } \textit{On Time Performance} \text{ (OTP) Transportasi Perkeretaapian} = \frac{\textit{Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang tepat waktu pada tahun berjalan}}{\textit{Jumlah Keseluruhan Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang pada tahun berjalan}} \times 100\%$</td><td>Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan RIPNAS 2030, mengacu kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia</td><td>Salah satu parameter kemanfaatan hasil pembangunan/ peningkatan prasarana dan sarana perkeretaapian, selaras dengan Tugas dan Fungsi serta Core Bussiness Ditjen Perkeretaapian</td><td>Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029</td></tr>
<tr><td>Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api</td><td>Jumlah angkutan kereta api penumpang (orang) dan barang (ton) merupakan ukuran kemanfaatan prasarana dan sarana perkeretaapian dimana diharapkan dengan peningkatan angkutan penumpang dan</td><td>Penjumlahan antara pemenuhan target angkutan kereta api penumpang dan pemenuhan target angkutan kereta api barang periode 2025-2029 sesuai dokumen RPJMN/Rencana Strategis Ditjen Perkeretaapian dalam mendukung target RIPNAS.
$\textit{Persentase Pemenuhan Target Angkutan KA} = \textit{Persentase Pemenuhan Target Angkutan KA Penumpang} + \textit{Persentase Pemenuhan Target Angkutan KA Barang}$
Pemenuhan target angkutan penumpang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan penumpang kereta api pada Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan</td><td>Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan pendukung serta</td><td>Salah satu parameter kemanfaatan hasil pembangunan/ peningkatan prasarana dan sarana perkeretaapian</td><td>Target ditetapkan secara bertahap pertahun s.d Tahun 2029</td></tr>
</table>

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	***MEASURABLE (M)***	***ACHIEVABLE (A)***	***RELEVANT (R)***	***TIME-BOUND (T)***
	barang kereta api dapat memberikan manfaat ekonomi, finansial, sosial, dan aspek lainnya termasuk mengurangi jumlah kepadatan lalu lintas jalan raya termasuk pengurangan emisi.	target angkutan penumpang kereta api periode 2025-2029 sesuai RPJMN/Rencana Strategis. $\text{Persentase } \textit{Pemenuhan Target Angkutan Penumpang} = \frac{\textit{Jumlah Realisasi Angkutan Penumpang Kereta Api dari Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan}}{\textit{Target Angkutan Penumpang Kereta Api Periode 2025-2029 sesuai Dokumen Renstra}} X\ 50\%$ Pemenuhan target angkutan barang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan barang kereta api pada Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan barang kereta api periode 2025-2029 sesuai Rencana Strategis Ditjen Perkeretaapian. $\text{Persentase } \textit{Pemenuhan Target Angkutan Barang} = \frac{\textit{Jumlah Realisasi Angkutan Barang Kereta Api dari Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan}}{\textit{Target Angkutan Barang Kereta Periode 2025-2029 sesuai Dokumen Renstra}} X\ 50\%$	alokasi anggaran yang tersedia	yang berkorelasi dengan semakin banyaknya jumlah angkutan kereta api. Selain itu, juga selaras dengan target pada RIPNAS 2023 dan Renstra 2025-2029	
Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Parameter untuk mengetahui tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian mengacu pada jumlah kejadian kecelakaan dengan perbandingan jumlah keberangkatan kereta api	Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian diperoleh dari selisih nilai maksimal tingkat keselamatan (100%) dengan persentase jumlah kejadian kecelakaan kereta api (anjlokan, terguling, tabrakan KA dengan KA dan lain-lain/terbakar) pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah keberangkatan kereta api di pada tahun berjalan $\text{Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA} = \left[1 - \frac{\text{Jumlah Kejadian Kecelakaan KA pada Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Keberangkatan Kereta Api pada Tahun Berjalan}} X\ 1.000\right] X\ 100\%$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya, target Renstra dan mengacu pada kegiatan pendukung serta alokasi anggaran yang tersedia	Selaras dengan Indikator Kinerja Utama pada level Kementerian Perhubungan, selaras dengan Tugas dan Fungsi serta *Core Bussiness* Ditjen Perkeretaapian	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029
Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat	Parameter untuk mengukur kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang mencakup Nilai AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian dan Nilai	Persentase Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan rata-rata dari persentase pencapaian kinerja mencakup Nilai Evaluasi AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian dan Nilai Kualitas ASN Ditjen Perkeretaapian. $AKIP_{DJKA} + NKA_{DJKA} + NKA_{PNBP} + ASN_{DJKA} / 4$	Target ditetapkan memperhatikan capaian tahun sebelumnya serta kegiatan pendukung pada tahun berjalan	Komponen memperhatikan dan selaras dengan Indikator Kinerja pada level Kementerian Perhubungan	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d Tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	***MEASURABLE (M)***	***ACHIEVABLE (A)***	***RELEVANT (R)***	***TIME-BOUND (T)***
Jenderal Perkeretaapian	Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian	$AKIP_{DJKA}$ = Tingkat pencapaian Nilai AKIP DJKA NKA_{DJKA} = Tingkat pencapaian Nilai Kinerja Anggaran DJKA $PNBP_{DJKA}$ = Tingkat pencapaian realisasi PNBP bidang perkeretaapian ASN_{DJKA} = Nilai Kualitas ASN Ditjen Perkeretaapian		dan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan guna mengukur keberhasilan terhadap pelaksanaan program Dukungan Manajemen	

Pada Tahun 2025, Direktorat Jenderal Perkeretaapian melakukan dua kali revisi Perjanjian Kinerja dikarenakan perubahan kebijakan strategi dan kebijakan optimalisasi/pergeseran/luncuran sumber daya anggaran yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan, serta perubahan pimpinan Kementerian Perhubungan. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi terakhir), Direktorat Jenderal Perkeretaapian memiliki 4 Sasaran Program dan 6 Indikator Kinerja Program.

Target kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 diuraikan per periode triwulan sebagai berikut :

Tabel 1-2 Target Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	K1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460
SP2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IK2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	93,500	93,500	93,500	93,500	93,500
	IK3 Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api	%	96,200	96,100	96,100	96,100	96,200
	IK4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	19,000	4,465	9,125	14,785	19,000
SP3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IK5 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	%	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IK6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100,000	19,035	20,555	40,000	100,00

Tabel 1- 3 Perubahan/Revisi Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	*Baseline* 2024	Target Renstra	Target PK 2025	Target Revisi I PK 2025	Target Revisi II PK 2025	Keterangan
SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IKP1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460	0,460	0,460	0,460	**0,460**	• ***Target tetap*** (terdapat penyesuaian komponen pembentuk perhitungan/formulasi). • *Baseline*: Jumlah lokasi yang terkoneksi dengan jaringan jalur dan layanan perkeretaapian sebanyak 69 lokasi (PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional 52 lokasi, simpul bandara 6 lokasi, simpul pelabuhan 10 lokasi, simpul Terminal Tipe A 1 lokasi) dibandingkan target RIPNAS 2030 sebanyak 150 lokasi. • Pada Tahun 2025, tidak terdapat kegiatan pembangunan jalur KA baru yang direncanakan selesai sehingga belum terdapat penambahan jumlah PKN/PKW/KSN dan simpul transportasi yang terhubung dengan jaringan jalur dan layanan perkeretaapian. • Kegiatan pendukung mayoritas berupa penyiapan perencanaan teknis dan pengadaan lahan untuk mendukung rencana pembangunan jalur kereta api baru/reaktivasi menuju PKN/PKW/KSN/simpul transportasi. • Menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Jenderal terkait penyempurnaan formulasi tidak hanya terkait infrastruktur jaringan jalur kereta api yang terhubung PKN/PKWkawasan strategis/simpul transportasi namun juga perlu memperhatikan pemanfaatan jalur kereta api melalui pengoperasian/pelayanan kereta api, maka dilaksanakan penyempurnaan formulasi dengan penambahan faktor pembentuk berupa realisasi perjalanan kereta api baik penumpang maupun barang berdasarkan grafik perjalanan keeta api yang telah ditetapkan.
SP2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IKP2 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	93,250 (konversi 3,730)	93,500	93,500 (konversi 3,740)	93,500 (konversi 3,740)	**93,500**	• ***Target tetap*** (terdapat konversi nilai indeks kepuasan masyarakat menyesuaikan target pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan). • Merupakan nilai rata-rata capaian dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan regulator bidang perkeretaapian berupa perizinan, sertifikasi, pengujian, dan lainnya (Direktorat LLAKA, Direktorat Prasarana, Direktorat Sarana, Direktorat Keselamatan, Balai Pengujian, Balai Perawatan) serta layanan kereta api yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan dan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan. • Survei dilaksanakan menggunakan aplikasi serta secara manual dengan survei langsung ke masyarakat/ stakeholder terkait dengan penilaian dari perhitungan rata-rata hasil survei per bulan (skala 100***).***
	IKP3 Persentase On Time	%	96,190	96,190	96,100	96,200	**96,200**	• ***Target berubah/ditingkatkan (***update target dengan penetapan target lebih tinggi dari baseline guna memenuhi kriteria penetapan target).

Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	*Baseline* 2024	Target Renstra	Target PK 2025	Target Revisi I PK 2025	Target Revisi II PK 2025	Keterangan
	Performance (OTP) Transportasi Kereta Api							• Rata-rata kedatangan dan keberangkatan KA penumpang dan barang tepat waktu dari keseluruhan kedatangan dan keberangkatan KA penumpang dan barang.
	IKP4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	-	19,000	19,000	19,000	**19,000**	• ***Target tetap*** • Pemenuhan angkutan penumpang dan angkutan barang masing-masing ditargetkan 19,00% dari target angkutan kereta api periode Tahun 2025-2029 baik angkutan KA penumpang maupun KA barang dengan memperhatikan target pada dokumen RPJMN dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dalam rangka pemenuhan target RIPNAS 2030.
SP3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKP5 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	%	99,41	100,00	100,00	100,00	**100,00**	• ***Target tetap (***mandatori mendukung zero accident). • Pada Tahun 2025 ditargetkan tidak ada kejadian kecelakaan kereta api, namun sampai dengan periode Triwulan III 2025, telah terjadi 7 kecelakaan kereta api.
SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	-	100,00	100,00	100,00	**100,00**	• ***Target tetap (***penyesuaian beberapa nilai komponen pembentuk) • Target mencakup pemenuhan kinerja Tahun 2025 sebagai berikut: • Nilai AKIP: 83,00 (target tidak berubah, baseline 82,95). • Nilai NKA: 84,00 (update menyesuaikan baseline sebesar 83,52). • Target PNBP: 100,00% (update nilai perolehan PNBP menjadi sebesar Rp 1.997.791.885.590,00). • Nilai Kualitas ASN: 89,00 (target tidak berubah).

1.5.2 ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran efektif Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi terakhir) sebesar Rp6.796.111.662.000,00 dengan rincian alokasi anggaran sebagai berikut.

Tabel 1- 4 Alokasi Anggaran Per Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Kegiatan	Alokasi Anggaran PK Awal (Rp)	Alokasi Anggaran Revisi I PK (Rp)			Alokasi Anggaran Revisi II PK (Rp)		
			Alokasi Anggaran	Blokir/Efisiensi	Alokasi Anggaran Efektif	Alokasi Anggaran	Blokir/Efisiensi	Alokasi Anggaran Efektif
1.	**Program Infrastruktur Konektivitas**	**4.424.660.689.000**	**7.412.546.024.000**	**1.308.086.335.000**	**6.104.459.689.000**	**7.010.572.014.000**	**645.305.927.000**	**6.365.266.087.000**
	a. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	813.226.191.000	2.051.708.470.000	546.646.219.000	1.505.062.251.000	1.977.174.647.000	247.235.579.000	1.729.939.068.000
	b. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	895.248.757.000	2.617.514.514.000	367.255.140.000	2.250.259.374.000	2.317.048.969.000	170.288.692.000	2.146.760.277.000
	c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	2.670.022.802.000	2.697.160.101.000	366.046.789.000	2.331.113.312.000	2.666.492.135.000	200.558.469.000	2.465.933.666.000
	d. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	46.162.939.000	46.162.939.000	28.138.187.000	18.024.752.000	49.856.263.000	27.223.187.000	22.633.076.000
2.	**Program Dukungan Manajemen**	**694.634.445.000**	**694.634.445.000**	**318.123.020.000**	**376.511.425.000**	**722.216.908.000**	**291.371.333.000**	**430.845.575.000**
	a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	22.069.026.000	22.099.026.000	18.026.792.000	4.072.234.000	22.064.026.000	18.026.792.000	4.037.234.000

No	Kegiatan	Alokasi Anggaran PK Awal (Rp)	Alokasi Anggaran Revisi I PK (Rp)			Alokasi Anggaran Revisi II PK (Rp)		
			Alokasi Anggaran	Blokir/Efisiensi	Alokasi Anggaran Efektif	Alokasi Anggaran	Blokir/Efisiensi	Alokasi Anggaran Efektif
	b. Pengelolaan Perencanaan. Keuangan. BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	637.851.276.000	637.821.276.000	273.854.334.000	363.966.942.000	667.910.104.000	250.044.012.000	417.866.092.000
	c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	17.498.737.000	17.498.737.000	10.970.124.000	6.528.613.000	15.457.372.000	8.928.759.000	6.528.613.000
	d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	14.149.348.000	14.149.348.000	12.856.362.000	1.292.986.000	14.619.348.000	12.856.362.000	1.762.986.000
	e. Legislasi dan Litigasi Transportasi	3.066.058.000	3.066.058.000	2.415.408.000	650.650.000	2.166.058.000	1.515.408.000	650.650.000
	Jumlah	**5.119.295.134.000**	**8.107.180.469.000**	**1.626.209.355.000**	**6.480.971.114.000**	**7.732.788.922.000**	**936.677.260.000**	**6.796.111.662.000**

Tabel 1- 5 Alokasi Anggaran Per Indikator Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target PK 2025	Target Revisi I PK 2025	Target Revisi II PK 2025	Alokasi Anggaran PK Awal (Rp)	Alokasi Anggaran Revisi I PK (Rp)	Alokasi Anggaran Efektif Revisi I PK (Rp)	Alokasi Anggaran Revisi II PK (Rp)	Alokasi Anggaran Efektif Revisi II PK (Rp)
SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IKP1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,46	0,46	0,46	813.226.191.000	2.051.708.470.000	1.505.062.251.000	1.977.174.647.000	1.729.939.068.000
SP2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IKP2 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,74	3,74	93,50 (konversi skala 100)	895.248.757.000	2.617.514.514.000	2.250.259.374.000	2.441.620.822.000	2.146.760.277.000
	IKP3 Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api	%	96,10	96,20	96,20					

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target PK 2025	Target Revisi I PK 2025	Target Revisi II PK 2025	Alokasi Anggaran PK Awal (Rp)	Alokasi Anggaran Revisi I PK (Rp)	Alokasi Anggaran Efektif Revisi I PK (Rp)	Alokasi Anggaran Revisi II PK (Rp)	Alokasi Anggaran Efektif Revisi II PK (Rp)
	IKP4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	19,00	19,00	19,00					
SP3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKP5 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	%	100,00	100,00	100,00	2.716.185.741.000	2.743.323.040.000	2.349.138.064.000	2.716.348.398.000	2.488.566.742.000 (termasuk penunjang teknis)
SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP5 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100,00	100,00	100,00	694.634.445.000	694.634.445.000	376.511.425.000	722.216.908.000	430.845.575.000
Jumlah						**5.119.295.134.000**	**8.107.180.469.000**	**6.480.971.114.000**	**7.857.360.775.000**	**6.796.111.662.000**

BAB 2 CAPAIAN KINERJA TRIWULAN

2.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran pencapaian kinerja pada Laporan Kinerja menggunakan formula sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Formula perhitungan persentase capaian kinerja sebagai berikut:

1. Kondisi pertama, apabila makin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja, maka formula yang dipergunakan adalah:

$$Capaian\ Kinerja = \left[\frac{Realisasi}{Target}\right] \times 100\%$$

2. Kondisi kedua, apabila makin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka formula yang dipergunakan adalah:

$$Capaian\ Kinerja = \frac{(Target - (Realisasi - Target))}{Target} \times 100\%$$

3. Nilai capaian kinerja minimal adalah 0%.

Tahapan yang dilakukan dalam pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dan realiasi kinerja per Triwulan Tahun 2025.
2. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target kinerja awal Tahun 2025 dan revisi akhir.
3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
4. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis unit kerja.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan capaian kinerja termasuk *benchmarking* kinerja, informasi *croscutting* serta dukungan penanganan/mitigasi risiko.
6. Rekomendasi atau alternatif solusi sebagai upaya peningkatan kinerja.
7. Realisasi anggaran pada periode Tahun 2025 termasuk analisa efisiensi sumber daya anggaran dan sumber daya manusia.
8. Menguraikan capaian keberhasilan lainnya.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 162 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, tata cara pengukuran capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai berikut:

Tabel 2-1 Pengukuran Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian

No	Indikator Kinerja Program	Pengukuran
1	IKP1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian merupakan perbandingan antara jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Strategis lainnya yang terhubung infrastruktur perkeretaapian s.d tahun berjalan dibandingkan dengan rencana jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/ Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Strategis lainnya yang terhubung dengan infrastruktur perkeretaapian sesuai RIPNAS Tahun 2030 dikalikan dengan faktor pemanfaatan infrastruktur perkeretaapian. $\textbf{Rasio Konektivitas Infrastruktur Perkeretaapian } (RK_{IP}) = \frac{\text{Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/ Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Strategis lainnya yang terhubung Infrastruktur Perkeretaapian s.d Tahun Berjalan}}{\text{Rencana Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/ Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Strategis Lainnya yang Terhubung dengan Infrastruktur Perkeretaapian sesuai RIPNAS Tahun 2030}} \times \text{Faktor Pemanfaatan Infrastruktur Perkeretaapian}$ Keterangan: Faktor pemanfaatan infrastruktur perkeretaapian merupakan perbandingan realisasi perjalanan kereta api baik penumpang maupun barang terhadap program perjalanan kereta api yang ditetapkan pada Grafik Perjalanan Kereta Api.
2	IKP2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari aplikasi 3AS Case Survey. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Ditjen Perkeretaapian diperoleh dari rata-rata nilai IKM Direktorat LLAKA, Direktorat Prasarana, Direktorat Sarana, Direktorat Keselamatan, BPKA Ringan Sumatera Selatan, Balai Pengujian diperoleh dari aplikasi 3AS Case Survey Management System yang dikelola oleh Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Kementerian Perhubungan dan nilai IKM BPKA Ringan Sumatera Selatan dan BPKA Sulawesi Selatan. *Management System* yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.

<table>
<tr><th>No</th><th>Indikator Kinerja Program</th><th>Pengukuran</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
$IKM_{DJKA} = (IKM_{Dit\ LLAKA} + IKM_{Dit\ Prasarana} + IKM_{Dit\ Sarana} + IKM_{Dit\ Keselamatan} + IKM_{Balai\ Pengujian} + IKM_{Balai\ Perawatan} + IKM_{BPKA\ Sulawesi\ Selatan} + IKM_{BPKAR\ Sumatera\ Selatan})/8$
Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 –100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus: IKM = SKM Unit Pelayanan x 25
<table>
<tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1.00 – 2.5996</td><td>25.00 – 64.99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2.60 – 3.064</td><td>65.00 – 76.60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr>
<tr><td>3</td><td>3.0644 – 3.532</td><td>76.61 – 88.30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>4</td><td>3.5324 – 4.00</td><td>88.31 – 100.00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr>
</table>
Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017
</td></tr>
<tr><td>3</td><td>IKP3 Persentase Capaian On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api</td><td>
Rata-rata jumlah kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang yang tepat waktu pada tahun berjalan dibandingkan jumlah keseluruhan kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang
Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Perkeretaapian = $\frac{\text{Rata-rata Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang tepat waktu pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang pada tahun berjalan}} \times 100\%$
</td></tr>
<tr><td>4</td><td>IKP4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api</td><td>
Penjumlahan antara pemenuhan target angkutan kereta api penumpang dan pemenuhan target angkutan kereta api barang periode 2025-2029 sesuai dokumen RPJMN/Rencana Strategis Ditjen Perkeretaapian dalam mendukung target RIPNAS.
Persentase Pemenuhan Target Angkutan KA = Persentase Pemenuhan Target Angkutan KA Penumpang + Persentase Pemenuhan Target Angkutan KA Barang
Pemenuhan target angkutan penumpang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan penumpang kereta api pada Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan penumpang kereta api periode 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis.
Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang = $\frac{\textit{Jumlah Realisasi Angkutan Penumpang Kereta Api dari Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan}}{\textit{Target Angkutan Penumpang Kereta Api s.d 2029 sesuai Rencana Strategis}} \times 50\%$
Pemenuhan target angkutan barang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan barang kereta api pada Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan barang kereta api periode 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis.
Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang = $\frac{\textit{Jumlah Realisasi Angkutan Barang Kereta Api dari Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan}}{\textit{Target Angkutan Penumpang Kereta Api s.d 2029 sesuai Rencana Strategis}} \times 50\%$
</td></tr>
<tr><td>5</td><td>IKP5 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian</td><td>
Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian diperoleh dari selisih nilai maksimal tingkat keselamatan (100%) dengan persentase jumlah kejadian kecelakaan kereta api (anjlokan, terguling, tabrakan KA dengan KA dan lain-lain/terbakar) pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah keberangkatan kereta api di pada tahun berjalan
Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian = $\left[1 - \frac{\text{Jumlah Kejadian Kecelakaan KA pada Tahun Berjalan} \times 1.000}{\text{Jumlah Keberangkatan Kereta Api pada Tahun Berjalan}}\right] \times 100\%$
</td></tr>
<tr><td>6</td><td>IKP6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan</td><td>
Persentase Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan rata-rata dari persentase pencapaian kinerja mencakup Nilai Evaluasi AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian dan Nilai Kualitas ASN Ditjen Perkeretaapian.
$TKTKP_{KA} = (AKIP_{DJKA} + NKA_{DJKA} + PNBP_{DJKA} + NKASN_{DJKA})/4$
</td></tr>
</table>

No	Indikator Kinerja Program	Pengukuran
	di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	AKIPDJKA = Tingkat pencapaian Nilai AKIP DJKA NKADJKA = Tingkat pencapaian Nilai Kinerja Anggaran DJKA PNBPDJKA = Tingkat pencapaian Realisasi PNBP DJKA NKASNDJKA = Tingkat pencapaian Nilai Kualitas ASN

2.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Direktorat Jenderal Perkeretaapian melaksanakan tugas dan pokok untuk mendukung 4 (empat) Sasaran Program dan 6 (enam) Indikator Kinerja Program melalui Program Infrastruktur Konektivitas dan Program Dukungan Manajemen. Berikut uraian pengukuran capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian periode Tahun 2025.

2.2.1 MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian merupakan perbandingan antara jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Strategis lainnya yang terhubung infrastruktur perkeretaapian s.d tahun berjalan dibandingkan dengan rencana jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/ Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Strategis lainnya yang terhubung dengan infrastruktur perkeretaapian sesuai RIPNAS Tahun 2030 (disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional) dikalikan dengan faktor pemanfaatan infrastruktur perkeretaapian.

Untuk Kawasan Strategis Nasional mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang diubah terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Lokasi-lokasi tersebut disandingkan dengan jaringan kereta api terhubung

(*eksisting*) maupun yang akan terhubung dengan jaringan kereta api sesuai dokumen Rencana Induk Perkeretaapian Nasional Tahun 2030 sebagaimana Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 2128 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional yang diubah terakhir melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 296 Tahun 2020.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (revisi terakhir) Tahun 2025, ditetapkan target rasio konektivitas antar wilayah transportasi perkeretaapian sebesar 0,460 dimana nilai tersebut masih sama dengan *baseline* periode sebelumnya dikarenakan belum terdapat rencana penambahan pembangunan/perpanjangan prasarana perkeretaapian baru yang selesai dan beroperasi pada Tahun 2025. Rincian target PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional yang terhubung dengan jaringan kereta api pada Tahun 2025 sebanyak 69 lokasi terdiri dari 52 lokasi PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional, 6 lokasi simpul bandara, 10 lokasi simpul pelabuhan dan 1 lokasi simpul terminal tipe A. Jumlah tersebut dibandingkan dengan target keterhubungan jaringan kereta api berdasarkan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional sebanyak 150 lokasi terdiri dari 104 lokasi PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional, 16 lokasi simpul bandara, 29 lokasi simpul pelabuhan dan 1 lokasi simpul terminal tipe A.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pada Tahun 2025 realisasi lokasi PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional/simpul transportasi yang terhubung dengan jaringan kereta api masih sama dengan *baseline* periode sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2-2 Target dan Realisasi Lokasi PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional/Simpul Transportasi yang Terhubung Jaringan Jalur Kereta Api pada Tahun 2025

No.	PKN/PKW/Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional	Tahun 2025	
		Target PK	Realisasi
Pusat Kegiatan Nasional / Pusat Kegiatan Wilayah/ Kawasan Strategis Nasional (KSN)			
1	Mebidangro	√	√
2	Perkotaan Padang – Lubuk Agung – Pariaman	√	√
3	Patungraya Agung	√	√
4	Bandar Lampung	√	√
5	Serang	√	√
6	Cilegon	√	√

No.	PKN/PKW/Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional	Tahun 2025	
		Target PK	Realisasi
7	Jabodetabek	√	√
8	Cirebon	√	√
9	Bandung Raya	√	√
10	Kedungsepur	√	√
11	Cilacap	√	√
12	Surakarta	√	√
13	Yogyakarta	√	√
14	Malang	√	√
15	Gebangkertosusila	√	√
16	Rantau Prapat	√	√
17	Pematang Siantar	√	√
18	Tebing Tinggi	√	√
19	Kisaran	√	√
20	Pariaman	√	√
21	Lubuklinggau	√	√
22	Muara enim	√	√
23	Baturaja	√	√
24	Prabumulih	√	√
25	Lahat	√	√
26	Kotabumi	√	√
27	Rangkasbitung	√	√
28	Cikampek	√	√
29	Sukabumi	√	√
30	Indramayu	√	√
31	Tasikmalaya	√	√
32	Cikampek-cikopo	√	√
33	Tegal	√	√
34	Pekalongan	√	√
35	Cepu	√	√
36	Purwokerto	√	√
37	Kebumen	√	√
38	Klaten	√	√
39	Sleman	√	√
40	Bojonegoro	√	√
41	Madiun	√	√

No.	PKN/PKW/Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional	Tahun 2025	
		Target PK	Realisasi
42	Jember	√	√
43	Banyuwangi	√	√
44	Probolinggo	√	√
45	Blitar	√	√
46	Pasuruan	√	√
47	Tulungagung	√	√
48	Kediri	√	√
49	Barru	√	√
50	Pangkajene	√	√
51	Maros/Mamminasata	√	√
52	Muara Satu	√	√
Simpul Transportasi Bandara			
1	Bandar Udara Kualanamu	√	√
2	Bandar Udara Internasional Minangkabau	√	√
3	Bandar Udara Soekarno Hatta	√	√
4	Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II	√	√
5	Bandar Udara Adi Soemarmo	√	√
6	Bandar Udara NYIA	√	√
Simpul Transportasi Pelabuhan			
1	Pelabuhan Tj. Priok	√	√
2	Pelabuhan Kuala Tanjung	√	√
3	Pelabuhan Merak	√	√
4	Pelabuhan Sungai Kertapati	√	√
5	Pelabuhan Teluk Bayur	√	√
6	Pelabuhan Cilacap	√	√
7	Pelabuhan Tarahan	√	√
8	Pelabuhan Garongkong	√	√
9	Pelabuhan Tanjung Mas	√	√
10	Pelabuhan Tanjung Perak	√	√
Simpul Transportasi Terminal Tipe A			
1	Terminal Kampung Rambutan	√	√
TOTAL		**69**	**69**

Berdasarkan Tabel di atas, rasio konektivitas infrastruktur perkeretaapian pada

Tahun 2025 diperoleh sebesar 0,453 dengan jumlah PKN/PKW/Kawasan Strategis Nasional/simpul transportasi sebanyak 68 lokasi (51 lokasi PKN/PKW/KSN, 6 lokasi simpul bandara, 10 lokasi simpul pelabuhan dan 1 lokasi simpul terminal tipe A) dibandingkan target Rencana Induk Perkeretaapian Nasional sebanyak 150 lokasi (104 lokasi PKN/PKW/KSN, 16 lokasi simpul bandara, 29 lokasi simpul pelabuhan dan 1 lokasi simpul terminal tipe A)

Mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor KP-DJKA 144 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 – 2029 dan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor KP-DJKA 162 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian bahwa dalam perhitungan Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian juga memperhitungkan faktor pemanfaatan infrastruktur perkeretaapian merupakan perbandingan realisasi perjalanan kereta api baik penumpang maupun barang terhadap program perjalanan kereta api yang ditetapkan pada GAPEKA. Realisasi Perjalanan Kereta Api berdasarkan GAPEKA diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2- 3 Target dan Realisasi Frekuensi Perjalanan Kereta Api pada Tahun 2025

Bulan	Target	Program	Kum. Program	Frekuensi				Capaian	
				Ka. Pnp	Ka. Brg	Total	Kum. Total	Bulanan	Kumulatif
Januari	95,60%	91.895	91.895	82.002	6.398	88.400	88.400	0,962	0,962
Februari	95,60%	82.684	174.579	76.090	5.958	82.048	170.448	0,992	0,976
Maret	**95,60%**	**91.401**	**265.980**	**84.652**	**6.068**	**90.720**	**261.168**	**0,993**	**0,982**
April	95,60%	89.175	355.155	81.933	6.124	88.057	349.225	0,987	0,983
Mei	95,60%	90.652	445.807	84.030	6.728	90.758	439.983	1,001	0,987
Juni	**95,60%**	**88.748**	**534.555**	**81.676**	**6.270**	**87.946**	**527.929**	**0,991**	**0,988**
Juli	95,60%	92.240	626.795	85.939	6.519	92.458	620.387	1,002	0,990
Agustus	95,60%	91.318	718.113	85.453	6.744	92.197	712.584	1,010	0,992
September	**95,60%**	**89.212**	**807.325**	**82.834**	**6.532**	**89.366**	**801.950**	**1,002**	**0,993**
Oktober	95,60%	92.228	899.553	86.826	7.010	93.836	895.786	1,017	0,996
November	95,60%	88.984	988.537	82.992	6.788	89.780	985.566	1,009	0,997
Desember	**95,60%**	**92.113**	**1.080.650**	**86.659**	**6.641**	**93.300**	**1.078.866**	**1,013**	**0,998**

Catatan:

*) Data pada program GAPEKA menyesuaikan dengan penambahan frekuensi Perjalanan KA pada pelayanan LRT Jabodebek, LRT Sumatera Selatan

Uraian perhitungan Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian sebagai berikut :

$$\text{Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian} = \frac{\text{68 Lokasi PKN/ PKW/ Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional}}{\text{150 PKN/ PKW/ Simpul Transportasi/ Kawasan Strategis Nasional}} \times \frac{1.078.866\ realisasi\ perjalanan\ KA}{1.080.650\ program\ perjalanan\ KA}$$

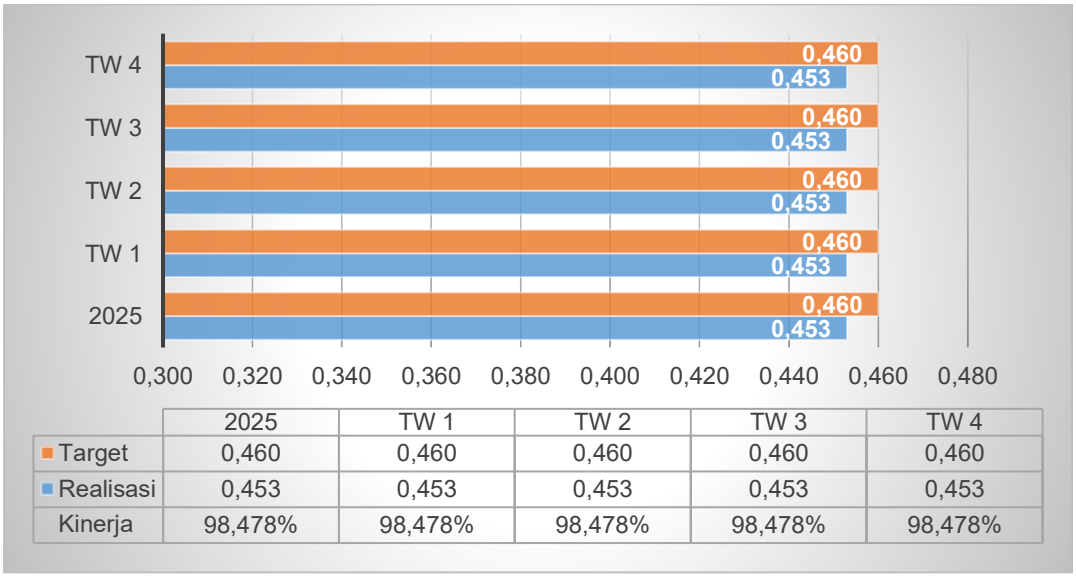
Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian = 0,453 X 0,998 = 0,453

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi rasio konektivitas transportasi perkeretaapian pada Tahun 2025 sebesar 0,453, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 99,478% dari target yang ditetapkan pada Triwulan IV maupun Tahun 2025 sebesar 0,460. Realisasi kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2- 4 Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,453	100	100	100	98,478	98,478



	2025	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Target	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460
Realisasi	0,453	0,453	0,453	0,453	0,453
Kinerja	98,478%	98,478%	98,478%	98,478%	98,478%

Gambar 2-1 Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2025

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Pada Tahun 2025 jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/ Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Strategis sebanyak 69 lokasi namun pada bulan November 2025 terjadi bencana alam banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera yang mengakibatkan terputusnya konektivitas di PKN/PKW/KSN/simpul transportasi di Lhokseumawe/Muara Satu. Beberapa lintas yang mengalami kerusakan/ terganggu diantaranya:

a. Lintas Medan – Binjai;
b. Lintas Medan – Belawan;
c. Lintas Binjai – Besitang;
d. Lintas Kuta Blang – Muara Satu.

Sehingga pada Triwulan IV Tahun terdapat pengurangan 1 lokasi konektivitas infrastruktur perkeretaapian.

Telah dilakukan beberapa upaya penanganan bencana alam diantaranya

a. Melakukan monitoring rutin terkait kondisi curah hujan tinggi yang masih berpotensi berlangsung ke depan dan dapat menimbulkan risiko kerusakan yang lebih luas dan/atau lebih parah;
b. Penilaian Prasarana Perkeretaapian yang terdampak Bencana Alam dengan *joint inspection* antara Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Inspektorat Jenderal II, Biro LPPBMN, dan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan dan PT. KAI DIVRE I. Selain itu, juga telah ditetapkan Surat Keputusan Direktur Prasarana nomor SK-K3DJKA 72 Tahun 2025 tentang Tim Penilai Infrastruktur Prasarana Perkeretaapian berdasar Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat, Bencana Hidrometeorologi, bencana alam banjir, banjir bandang dan tanah longsor di wilayah BTP Kelas I Medan dan BTP Kelas II Padang Tahun 2025;
c. Telah dilakukan beberapa perbaikan seperti pembersihan pada lintas terdampak, penambahan ballast, pemadatan dengan MTT dan profil balast menggunakan PBR.

Selain itu, pada Tahun 2025 belum ditargetkan penambahan konektivitas dikarenakan belum terdapat rencana penambahan pembangunan/ perpanjangan prasarana perkeretaapian baru menghubungkan PKN/ PKW/

kawasan strategis nasional/simpul transportasi yang selesai dan beroperasi pada Tahun 2025.

Kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2025 mayoritas berupa kegiatan lanjutan yang fokus pada pengembangan kapasitas/kehandalan prasarana perkeretaapian eksisting. Hal tersebut didorong juga dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang membatasi ruang fiskal kegiatan pembangunan prasarana perkeretaapian baru yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Di sisi lain, pembangunan prasarana perkeretaapian baru oleh badan usaha/swasta masih minim dan beberapa masih dalam proses penjajakan investasi serta persiapan dokumen perencanaan teknis.

Pada Tahun 2025, terdapat beberapa kegiatan pendukung konektivitas transportasi perkeretaapian yang berprogres antara lain:

a. Kegiatan lanjutan pembangunan jalur KA Rantauprapat – Pondok S5 – Kotapinang yaitu pengoperasian KA perintis segmen Rantauprapat – Pondok S5 saat ini telah dibuatkan *cover letter* sesuai arahan Dirjen Perkeretaapian dan telah ditandatangani oleh Plt. Direktur Prasarana namun masih menunggu legalitas dari Sekretaris Ditjen Perkeretaapian. Selain itu masih diperlukan pengujian jembatan yang akan dilakukan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian atau Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ). Sedangkan untuk segmen lanjutan Pondok S5 – Kota Pinang masih berprogres pengadaan lahan melalui anggaran LMAN (progress 93,30% yaitu 710 dari 762 bidang telah dibebaskan), dimana terdapat kendala habisnya masa berlaku penetapan lokasi dan tidak tersedia anggaran BOPP Tahun 2025.
b. Kegiatan pembangunan MRT Jakarta *East-West Phase* I untuk mendukung konektivitas di wilayah perkotaan Jabodetabek, posisi saat ini konsultan *tender assistance* telah berkontrak pada 9 Juli 2025 dan selanjutnya dalam proses persiapan pelelangan konsultan supervisi dan paket konstruksi. Pengadaan lahan di wilayah DKI Jakarta dilaksanakan oleh Pemerintah DKI Jakarta dan saat ini masih berproses penetapan lokasi. Untuk pengadaan

lahan di luar wilayah DKI Jakarta (Bekasi) telah terbit penetapan lokasi dan proses pengadaan lahannya dilaksanakan oleh Ditjen Perkeretaapian dengan pembiayaan LMAN namun masih menunggu pelaksanaan BOPP yang diusulkan di Tahun 2026 (BOPP Tahun 2025 terkendala efisiensi anggaran). Selain itu terdapat isu perubahan stasiun/trase dari Pemerintah Daerah yang terdampak kebutuhan reviu studi kelayakan dan trase (perlu pertimbangan lanjut terhadap potensi risiko). Saat ini proses verifikasi DPPT masih berlangsung dan sedang dilakukan proses Re-Baseline untuk mengakomodir perubahan durasi konstruksi hasil market sounding dan pembaruan pada proses pengadaan lahan dan proses *tender*.

c. Pengoptimalan konektivitas Pelabuhan Tanjung Emas untuk mendukung intramoda logistik, dimana terdapat kendala berupa banyaknya terjadi vandalisme sehingga diperlukan perbaikan infrastruktur. Untuk melaksanakan perbaikan tersebut, diperlukan penyelesaian skema sewa (s.d Rp0) untuk aset di Pelabuhan Tanjung Mas dengan koordinasi KSOP, Otoritas Pelabuhan dan Pelindo dimana saat ini masih dalam proses penyusunan MoU antar pihak terkait. Setelah penyelesaian skema sewa aset dan perbaikan infrastruktur, diperlukan beberapa tahapan guna pengoptimalan konektivitas Pelabuhan Tanjung Emas antara lain tindak lanjut hasil uji pertama, *safety assesment*, uji rangkaian dan ijin kelaikan prasarana serta ijin operasi sarana.
d. Kegiatan lanjutan pembangunan prasarana perkeretaapian untuk mendukung pengoperasian KA Makassar - Pare Pare antara Mandai – Palanro yang bersumber dari pembiayaan SBSN dengan progres 96,38%, dimana masih terdapat 1 kegiatan yaitu pembangunan *overpass* Tonasa yang masih belum dapat dilanjutkan karena membutuhkan penetapan lokasi dari Gubernur Sulawesi Selatan untuk tahapan lanjut penyiapan lahan dan konstruksi. Selain itu, juga terdapat pengadaan lahan dengan menggunakan sumber dana LMAN yang saat ini masih terkendala oleh (Biaya Operasional dan Biaya Pendukung) BOBP yang terkena efisiensi anggaran.

Faktor pemanfaatan infrastruktur perkeretaapian pada Tahun 2025 diperoleh sebesar 105,90% atau 1,059 realisasi diperoleh lebih dari 100% dikarenakan:

a. Penambahan frekuensi LRT Jabodebek yang sebelumnya diprogramkan sebanyak 158 KA, sejak 11 November 2025 beroperasi sebanyak 430 KA saat *weekday* dan 270 KA saat *weekend*;
b. Penambahan frekuensi LRT Sumsel yang sebelumnya diprogramkan sebanyak 88 KA, saat ini beroperasi sebanyak 94 KA saat *weekday* dan 102 KA saat *weekend*; dan
c. Pengoperasian KA Tambahan pada masa libur Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026.

Berdasarkan hal di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain:

a. Konsolidasi dalam penyelesaian dokumen perencanaan teknis, pelaksanaan pembangunan perkeretaapian sampai tahapan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian, diantaranya dengan koordinasi pihak internal (Direktorat LLAKA, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan, Balai Pengujian, dan lainnya) dan pihak eksternal (badan usaha/operator, Pemerintah Daerah, pengelola simpul transportasi moda lain).
b. Konsolidasi dalam penyiapan lahan mendukung pembangunan perkeretaapian dengan melibatkan LMAN/Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah dan instansi lainnya.
c. Koordinasi dengan Kemenko Infraswil, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi dan badan usaha/swasta terkait pembiayaan alternatif pembangunan perkeretaapian mendukung konektivitas wilayah.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target rasio konektivitas transportasi perkeretaapian, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung IKP yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025, terdapat 19 risiko yang diidentifikasi dari 4 proses bisnis terkait IKP rasio konektivitas transportasi perkeretaapian. Dari 19 risiko tersebut, terdapat 14 risiko yang penilaiannya di atas selera risiko dan memerlukan penanganan risiko dimana telah direncanakan 19 kegiatan penanganan risiko pada Tahun 2025.

Pada periode sampai dengan Tahun 2025, penanganan risiko telah terealisasi sebanyak 19 kegiatan atau sebesar 100% dari 19 rencana penanganan risiko pada Tahun 2025. Adapun rincian realisasi rencana penanganan risiko yang telah dilakukan pada Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Pemberian bimbingan teknis pembangunan prasarana perkeretaapian kepada pegawai;
b. Usulan revisi relaksasi anggaran Tahun 2025 dan/atau pengusulan kembali kegiatan dan anggaran penyusunan dokumen perencanaan teknis pada periode berikutnya;
c. Peningkatan pengawasan pembangunan prasarana dilengkapi penyampaian rekomendasi hasil pengawasan;
d. Usulan relaksasi anggaran/usulan anggaran pengadaan tanah;
e. Penyampaian surat rekomendasi hasil pengawasan dengan dilengkapi *deadline* penyelesaian tindak lanjut dan melaporkan kembali hasil tindak lanjut pada surat rekomendasi;
f. Penetapan hasil kajian *single tarif*/peningkatan utilisasi jalur kereta api pelayanan angkutan barang yang terhubung dengan pusat logistik (3 kegiatan penanganan).
g. Pelaporan pengawasan terkait gratifikasi termasuk pemanfaatan WBS (3 kegiatan penanganan).
h. Melakukan koordinasi rutin terkait penyusunan dokumen perencanaan teknis dan merencanakan jadwal kegiatan dengan tepat, pendampingan tim teknis serta penetapan hasil penyusunan (2 kegiatan penanganan).
i. Konsinyasi melalui Pengadilan Negeri/Tinggi setempat.
j. Pelaksanan inspeksi/pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di lapangan termasuk monitoring rekomendasi hasil inspeksi/pengawasan
k. Pendampingan tim teknis.
l. Pemberian bimbingan teknis pembangunan prasarana perkeretaapian kepada pegawai
m. Membuat Perjanjian Kerjasama Pemrakarsa, Operator, dan Pemerintah Daerah dengan kewenangan antar pihak dengan jelas.

Tabel 2- 5 Realisasi Penanganan Risiko IKP Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian s.d. Tahun 2025

No	Proses Bisnis	Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)					
			Risiko	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	TW III	TW IV	Kumulatif (s.d TW IV)	%
1	Rute Jaringan Perkeretaapian (Prasarana)	10	9	14	0	1	4	9	14	100,00
2	Rute Jaringan Perkeretaapian (Lalu Lintas dan Angkutan KA)	2	1	1	0	0	0	1	1	100,00
3	Sistem Jaringan Logistik Perkeretaapian	3	3	3	0	0	3	0	3	100,00
4	Aksesibilitas Moda Kereta Api	4	1	1	0	0	0	1	1	100,00
Jumlah		**19**	**14**	**19**	**0**	**1**	**7**	**11**	**19**	**100,00**

3. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Analisa perbandingan kinerja dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah bidang perkeretaapian dengan Rasio Konektivitas level Kementerian Perhubungan/Nasional. Nilai Rasio Konektivitas Nasional dihitung berdasarkan bobot rasio konektivitas yang tertuang pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 meliputi transportasi perkotaan bobot 5% dan transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara dan transportasi perkeretaapian dengan masing-masing bobot 23,75%. Perbandingan nilai rasio konektivitas antar wilayah Tahun 2024 diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 2-6 Nilai Rasio Konektivitas Antar Wilayah

No	Level / Moda	Rasio Konektivitas
1	Nasional (Seluruh Moda)	0,772
2	Perkeretaapian	0,460

Berdasarkan Tabel di atas, diperoleh bawah rasio konektivitas transportasi perkeretaapian masih lebih rendah apabila dibandingkan pada level nasional sehingga perlu peningkatan dengan prioritas pengembangan jaringan dan layanan kereta api di wilayah Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. Terkait perbandingan titik yang terkoneksi, transportasi perkeretaapian memberikan

dukungan konektivitas wilayah sebanyak 68 titik (6,36%) dari jumlah 1.069 titik yang terhubung secara nasional (134 titik Kawasan Strategis Nasional, Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan dan Pusat Kegiatan Nasional, 636 Pelabuhan serta 299 Bandar Udara).

4. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya peningkatan kinerja terhadap indikator rasio konektivitas antar wilayah pada periode berikutnya diantaranya:

a. Penyesuaian Strategi/Kebijakan:

1) Melaksanakan kajian inventarisasi serta pemeriksaan detail terhadap jumlah kerusakan dan/atau kehilangan akibat bencana, termasuk penyusunan dokumen teknis perencanaan apabila diperlukan untuk penanganan permanen;
2) Melakukan penanganan terhadap kerusakan akibat bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera;
3) Tindak lanjut terhadap persiapan pengoperasian lintas Semarang Tawang - Pelabuhan Tanjung Emas (pengajuan skema sewa aset dan tindak lanjut hasil pengujian kelaikan prasarana);
4) Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kegiatan pendukung konektivitas transportasi perkeretaapian, diantaranya terkait penyelesaian pemenuhan lahan pendukung konektivitas melalui LMAN, koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait penetapan lokasi, serta monitoring tahapan pengadaan barang/jasa (MRT Jakarta *East-West Phase* I).

b. Penyesuaian Aktivitas/Anggaran:

Penyusunan data dukung revisi anggaran untuk penyusunan DED rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana perkeretaapian pasca bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera.

c. Penyesuaian organisasi/penempatan jabatan/pegawai:

Optimalisasi pegawai sesuai Surat Keputusan Direktur Prasarana nomor SK-K3DJKA 72 Tahun 2025 tentang Tim Penilai Infrastruktur Prasarana Perkeretaapian berdasar Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat, Bencana Hidrometeorologi, bencana alam banjir, banjir bandang dan tanah

longsor di wilayah BTP Kelas I Medan dan BTP Kelas II Padang Tahun 2025.

Adapun pencapaian kinerja Rasio Konektivitas Antar Wilayah dengan penambahan keterhubungan jaringan jalur dan layanan kereta api diharapkan dapat menghasilkan *outcome* diantaranya:

a. Peningkatan mobilitas penduduk berupa kemampuan masyarakat untuk bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan lebih mudah dan efisien.
b. Pengurangan biaya logistik dengan pengiriman barang yang efisien dan distribusi cepat dengan dukungan integrasi antar moda transportasi.
c. Peningkatan ekonomi wilayah dan kualitas hidup Masyarakat dengan kemudahan mengakses lebih banyak pilihan dan layanan, seperti pendidikan, kesehatan, dan pariwisata.

2.2.2 MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

Sasaran program kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang terpercaya dan sesuai kebutuhan diukur dengan 3 Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian, Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) dan Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api.

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian meliputi layanan administrasi Pemerintahan sebagai regulator penyelenggaraan perkeretaapian (perijinan, sertifikasi, pengujian, dan lainnya) serta layanan angkutan kereta api yang diselenggarakan oleh unit kerja termasuk Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Balai Pengujian Perkeretaapian, Balai Pengelola Kereta Api Ringan (BPKAR) Sumatera Selatan dan Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan. Adapun nilai IKM dibagi menjadi 4 kategori, yaitu:

Tabel 2-7 Kategori Kinerja Nilai IKM

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,000 – 2,599	D	Tidak Baik
2	2,600 – 3,064	C	Kurang Baik
3	3,065 – 3,532	B	Baik
4	3,533 – 4,000	A	Sangat Baik

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi terakhir), ditetapkan target nilai IKM Tahun 2025 sebesar 93,500 (konversi dari target skala 1-4 yaitu 3,740). Adapun hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan pada Tahun 2025 diperoleh nilai rata-rata IKM sebesar 3,740 dan rincian per unit kerja dan per bulan sebagai berikut:

Tabel 2-8 Hasil Survey Nilai IKM Bulan Januari s.d Desember Tahun 2025

Unit Kerja	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
Dit LLAKA	3,730	3,940	3,810	3,830		3,660	4,000	3,400	3,660	4,000	3,760	3,750
Dit Prasarana	3,750	4,000	3,910	4,000	3,800	3,840	3,870	3,970	3,730	3,980	4,000	
Dit Sarana	4,000	4,000	3,340	4,000	4,000	3,600	3,600	3,770	3,830	4,000	4,000	3,540
Dit Keselamatan	3,640	4,000	3,700	3,400	3,840	4,000	3,870		3,580	3,940	3,810	4,000
BPKARS	3,580	3,580	3,570	3,580	3,570	3,580	3,580	3,590	3,600	3,580	3,570	3,700
BPKARS PPTB	3,970	3,940	4,000	3,970		3,890	3,900	3,950	3,900	3,900	3,920	3,920
Balai Pengujian	3,880	3,880	3,800	3,850	3,830	3,830	3,840	3,830	3,840	3,840	3,820	3,850
Balai Perawatan												3,880
BPKA SS	3.37	3.28	3.38	3,430	3,460	3,300	3,310	3,480	3,230	3,160	3,170	3,120
Average	3,740	3,828	3,689	3,758	3,750	3,713	3,746	3,713	3,671	3,800	3,756	3,720
Realisasi	**3,740**	**3,784**	**3,752**	**3,753**	**3,753**	**3,746**	**3,746**	**3,742**	**3,734**	**3,741**	**3,736**	**3,740**
Konversi Nilai Skala 0-100	**93,500**	**94,594**	**93,802**	**93,836**	**93,819**	**93,651**	**93,652**	**93,548**	**93,352**	**93,517**	**93,407**	**93,506**

Data dukung capaian dan perhitungan kinerja pada Lampiran 5.

Konversi ke Skala 0-100

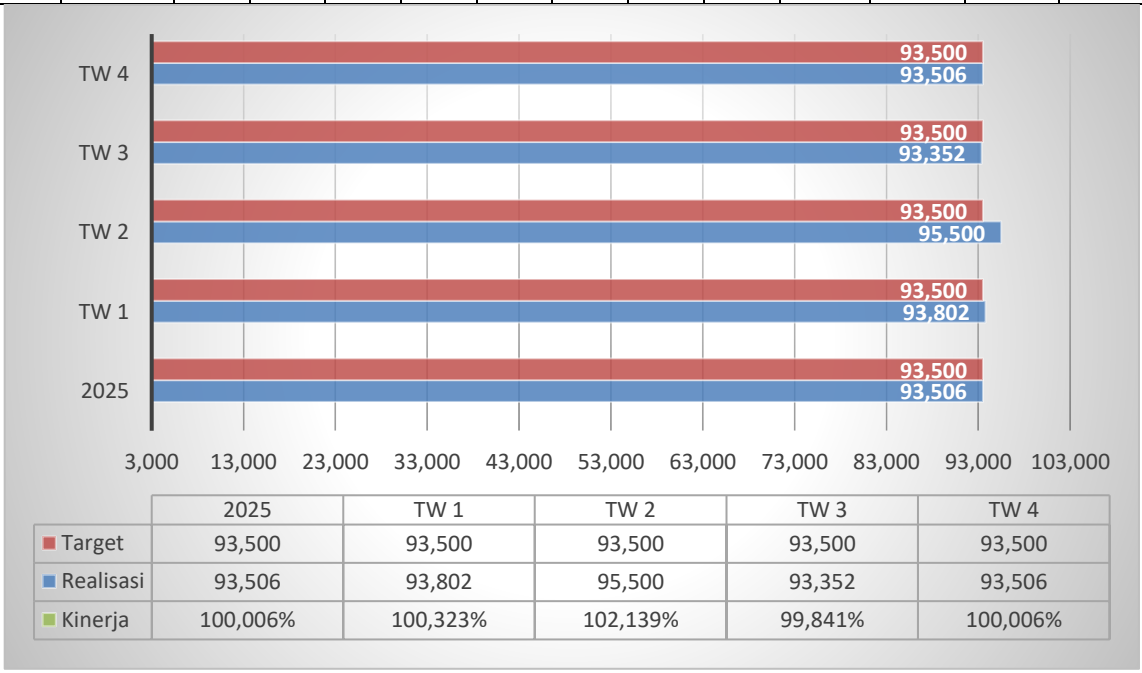
Nilai IKM = Nilai IKM (Skala 1-4) x 25

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Berdasarkan rata-rata hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik bidang perkeretaapian Tahun 2025, diperoleh nilai IKM sebesar 93,506. Nilai tersebut dibandingkan dengan target nilai IKM berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi terakhir) yaitu 93,500 (konversi dari target Perjanjian Kinerja awal skala 1-4 yaitu 3,740), maka diperoleh capaian kinerja sebesar 100,006%. Pada Tahun 2025, nilai IKM per triwulan cenderung mengalami penurunan dari 95,262 (Triwulan I) menjadi 94,221 (Triwulan IV). Realisasi kumulatif per triwulan sebagaimana dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-9 Capaian Kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perkeretaapian	Nilai	93,500	93,500	93,500	93,500	93,500	93,802	93,651	93,352	93,506	100,323	102,139	99,841	100,006	100,006



	2025	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Target	93,500	93,500	93,500	93,500	93,500
Realisasi	93,506	93,802	95,500	93,352	93,506
Kinerja	100,006%	100,323%	102,139%	99,841%	100,006%

Gambar 2-2 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2025

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan nilai rata-rata IKM setiap bulan dari masing-masing unit kerja selama periode Triwulan I-IV Tahun 2025 sehingga diperoleh nilai 93,506 atau dapat diintrepretasikan bahwa kinerja unit pelayanan telah sangat baik. Pelayanan publik bidang perkeretaapian meliputi layanan administrasi Pemerintahan sebagai regulator (perijinan, sertifikasi, pengujian, perawatan dan lainnya) serta layanan angkutan kereta api yang diselenggarakan oleh unit kerja termasuk badan layanan umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pada Tahun 2025, pelaksanaan survey IKM dilaksanakan secara parsial menggunakan aplikasi 3A IPK yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan serta dilengkapi dengan penggunaan *google form* pada beberapa unit kerja seperti Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan dan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Adapun beberapa faktor keberhasilan dalam pencapaian kinerja diantaranya:

a. Pelayanan sertifikasi kelaikan/kompetensi pada Tahun 2025 telah dilaksanakan yaitu:
    1) Pelayanan sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian sebanyak 95 sertifikat terdiri dari 43 penetapan sertifikat kelaikan jalur dan bangunan serta 52 sertifikat kelaikan fasilitas operasi;
    2) Pelayanan sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian sebanyak 12.513 sertifikat;
    3) Pelayanan sertifikasi kompetensi SDM Perkeretaapian sebanyak 8.271 sertifikat.
b. Pelayanan perizinan pada Tahun 2025 telah dilaksanakan yaitu:
    1) Pelayanan izin usaha/operasi sebanyak 18 perizinan;
    2) Pelayanan izin perpotongan dan/atau persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain sebanyak 1 perizinan;
    3) Pelayanan izin pembangunan prasarana perkeretaapiansebanyak 65 perizinan.
c. Peningkatan pelayanan penumpang kereta api khususnya yang dikelola Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan dan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan, dengan beberapa upaya diantaranya:

1) Tindak lanjut terhadap aduan yang disampaikan pada beberapa kanal (*chat centre*, surel, SP4N, Media Sosial, Survei Kepuasan);
2) Penyesuaian harga khusus pada momen-momen tertentu seperti Kemerdekaan Republik Indonesia;
3) Kehandalan SDM dalam memberikan layanan serta pemenuhan kualitas dan tahapan pelayanan sesuai proses bisnis/SOP yang telah ditetapkan, diantaranya pelatihan bahasa isyarat di BPKAR Sumatera Selatan yang dilaksanakan secara berkala setiap triwulan, pada triwulan IV Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 24 s.d. 26 November 2025;
4) Pelaksanaan beberapa program oleh LRT Sumatera Selatan diantaranya pelaksanaan sosialisasi ke beberapa sekolah, pelaksanaan forum konsultasi publik, pelaksanaan LRT Festival.
5) Pemberlakukan sistem pemesanan tiket *online* mulai H-7 sebelum keberangkatan pada BPKA Sulawesi Selatan;
6) Melakukan sosialisasi tiket *infant* pada sistem penjualan tiket KA Makassar-Parepare.

d. Pelaksanaan sosialisasi layanan dan survei IKM kepada *stakeholder*, termasuk upaya penambahan jumlah responden dengan perluasan pelaksanaan survei melalui *google form* untuk mempermudah pengisian responden.
e. Pemanfaatan sistem informasi diantaranya pada layanan pengujian, sertifikasi kelaikan sarana serta sertifikasi kompetensi SDM perkeretaapian, sehingga penyelesaian layanan dapat tepat waktu serta menjaga kualitas pelayanan sesuai prosedur dan alur yang telah ditetapkan. Adapun beberapa upaya pengembangan sistem informasi yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025:
    1) Pengembangan fitur perizinan *online* pada Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian dimana telah dilakukan Sosialisasi dan Uji Coba Penggunaan Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian;
    2) Penyempurnaan fitur perizinan *crossing* pada Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan dan pelaksanaan survei IKM diantaranya:

a. Kendala pada saat pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat diantaranya kurangnya responden survey dan kesulitan beberapa responden dalam mengakses *link* survei dikarenakan alat/media komunikasi responden yang kurang mendukung;
b. Gangguan/*error* sistem informasi yang menyebabkan tertundanya persetujuan dan penerbitan sertifikat diantaranya sertifikat kompetensi SDM perkeretaapiaan.

Dalam penyelenggaraan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain hubungan kerja dengan badan usaha/operator perkeretaapian/Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan layanan regulator bidang perkeretaapian serta melibatkan masyarakat/publik sebagai pengguna kereta api dan sektor terkait lainnya seperti sektor industri perkeretaapian.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik bidang perkeretaapian, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung IKP yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025, terdapat 7 risiko yang diidentifikasi dari 2 proses bisnis terkait IKP Indeks Kepuasan Masyarakat. Dari 7 risiko tersebut, terdapat 3 risiko yang penilaiannya di atas selera risiko dan memerlukan penanganan risiko dimana telah direncanakan 3 kegiatan penanganan risiko pada Tahun 2025.

Pada Tahun 2025, penanganan risiko telah terealisasi sebanyak 2 kegiatan atau sebesar 66,67% dari 3 rencana penanganan risiko pada Tahun 2025. Realisasi rencana penanganan risiko yang telah dilakukan pada Tahun 2025 adalah

a. Koordinasi/*sharing knowledge* dengan Badan Usaha Penyelenggara Sarana terkait data dukung sesuai dengan ketentuan;
b. Pengoptimalan anggaran yang tersedia/pemanfaatan pembiayaan PNBP.

Sedangkan satu penanganan yang tidak terealisasi yaitu Koordinasi/penyusunan rancangan PM tentang standar spesifikasi teknis perkeretaapian dengan teknologi baru.

Tabel 2- 10 Realisasi Penanganan Risiko IKP Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perkeretaapian s.d. Tahun 2025

No	Proses Bisnis	Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)					
			Risiko	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	TW III	TW IV	Kumulatif (s.d TW IV)	%
1	Pelayanan Transportasi Sarana Perkeretaapian	2	2	2	0	0	0	1	1	50,00
2	Pelayanan Transportasi Keselamatan Perkeretaapian	5	1	1	0	1	0	0	1	100,00
Jumlah		**19**	**14**	**19**	**0**	**1**	**7**	**11**	**19**	**100,00**

3. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Terkait analisa perbandingan dilakukan terhadap capaian kinerja IKM dibandingkan dengan level Kementerian Perhubungan/Nasional selama Tahun 2025 dengan uraian sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 2-11 Perbandingan Nilai IKM

No	Unit Kerja	Nilai IKM
1	Kementerian Perhubungan	96,000
2	Ditjen Perkeretaapian	93,506

Catatan: Nilai IKM dihitung kumulatif pada Triwulan II Tahun 2025

Berdasarkan data di atas, diperoleh bahwa nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian masih lebih rendah dibandingkan nilai IKM Kementerian Perhubungan sehingga diperlukan peningkatan/perbaikan kinerja untuk memenuhi capaian di level Kementerian Perhubungan/Nasional.

4. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang meliputi beberapa langkah antara lain:

a. Penyesuaian strategi/kebijakan:

1) Pengelolaan sistem terkait layanan regulator perkeretaapian (perizinan, sertifikasi, pengujian, lainnya) untuk mencegah terjadinya gangguan pada layanan serta lanjutan pengembangan fitur Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai *superapps* yang terpadu dan terintegrasi*;*
2) Memfasilitasi serta menindaklanjuti layanan pengaduan pelayanan angkutan penumpang khususnya pada layanan kereta api yang dikelola oleh BPKAR Sumatera Selatan dan BPKA Sulawesi Selatan diantaranya melalui *barcode* pada *area boarding* dan sosial media;
3) Berpartisipasi dalam monitoring dan evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perhubungan serta dukungan pelaksanaan penilaian kepatuhan pelayanan publik Tahun 2025 oleh Ombudsman;
4) Melakukan identifikasi dan penilaian risiko untuk dukungan indikator kinerja kegiatan dan target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perkeretaapian;
5) Melakukan pembinaan kepada petugas pelayanan yang berada di stasiun maupun yang bertugas di dalam kereta secara periodik.

b. Penyesuaian aktivitas dan anggaran:

Mempersiapkan dokumen pengusulan pada RKA Pagu Kebutuhan Anggaran Tahun 2027 berdasarkan skala prioritas layanan regulator dan angkutan perintis perkeretaapian.

c. Penyesuaian organisasi/penempatan jabatan/pegawai:

Pelaksanaan layanan sertifikasi/pengujian didukung dengan penyesuaian penugasan pegawai fungsional tertentu perkeretaapian sesuai bidang tugas dan kompetensinya (penguji, asisten penguji, lainnya).

Pencapaian target kinerja untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik bidang perkeretaapian diharapkan menghasilkan *outcome* berupa peningkatan kepercayaan publik yang menggambarkan bahwa masyarakat merasa puas terhadap layanan penyelenggaraan perkeretaapian.

PERSENTASE CAPAIAN *ON TIME PERFORMANCE* (OTP)

Target *On Time Performance* (OTP) transportasi kereta api yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi terakhir) sebesar 96,200%, baik untuk angkutan kereta api penumpang dan barang serta juga mencakup keberangkatan dan kedatangan perjalanan kereta api.

Pada Tahun 2025, diperoleh jumlah realisasi perjalanan kereta api penumpang dan barang (kedatangan dan keberangkatan) yang tepat waktu sesuai jadwal sebanyak 1.054.081 KA dibandingkan dengan total perjalanan kereta api baik kedatangan dan keberangkatan sebanyak 1.078.866 KA. Secara rinci realisasi perjalanan kereta api sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 2-12 Realisasi Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Tepat Waktu Tahun 2025

Bulan	Realisasi Perjalanan		Realisasi KA Datang Tepat Waktu		Realisasi KA Berangkat Tepat Waktu		Rata-Rata		Persentase Capaian	
	Bulanan	Akumulatif	Bulanan	Akumulatif	Bulanan	Akumulatif	Bulanan	Akumulatif	Bulanan	Akumulatif
Jan	88.400	88.400	84.977	84.977	87.471	87.471	86.224	86.224	97,538%	97,538%
Feb	82.048	170.448	78.216	163.193	80.941	168.412	79.579	165.803	96,990%	97,275%
Mar	90.720	261.168	87.414	250.607	89.785	258.197	88.600	254.402	97,663%	97,409%
Apr	88.057	349.225	85.441	336.048	87.236	345.433	86.339	340.741	98,048%	97,570%
Mei	90.758	439.983	88.663	424.711	90.174	435.607	89.419	430.159	98,524%	97,767%
Jun	87.946	527.929	86.072	510.783	87.404	523.011	86.738	516.897	98,626%	97,910%
Jul	92.458	620.387	90.179	600.962	91.680	614.691	90.930	607.827	98,347%	97,975%
Agu	92.197	712.584	88.859	689.821	90.902	705.593	89.881	697.707	97,487%	97,912%
Sep	89.366	801.950	86.874	776.695	88.638	794.231	87.756	785.463	98,198%	97,944%
Okt	93.836	895.786	89.628	866.323	91.612	885.843	90.620	876.083	96,573%	97,800%
Nov	89.780	985.566	86.471	952.794	88.582	974.425	87.527	963.610	97,490%	97,770%
Des	**93.300**	**1.078.866**	**89.537**	**1.042.331**	**91.405**	**1.065.830**	**90.471**	**1.054.081**	**96,968%**	**97,703%**

Dengan realisasi perjalanan kereta api tepat waktu sebanyak 1.054.081 KA dibandingkan jumlah keseluruhan perjalanan kereta api pada Tahun 2025 sebanyak 1.078.866 KA, maka diperoleh realisasi persentase *On Time Performance* (OTP) sebesar 97,703%, dengan uraian perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase } \textit{On Time Performance} \text{ (OTP) Transportasi Kereta Api} = \frac{1.054.081 \text{ KA}}{1.078.866 \text{ KA}} \times 100\%$$

Data dukung perhitungan pada Lampiran 5.

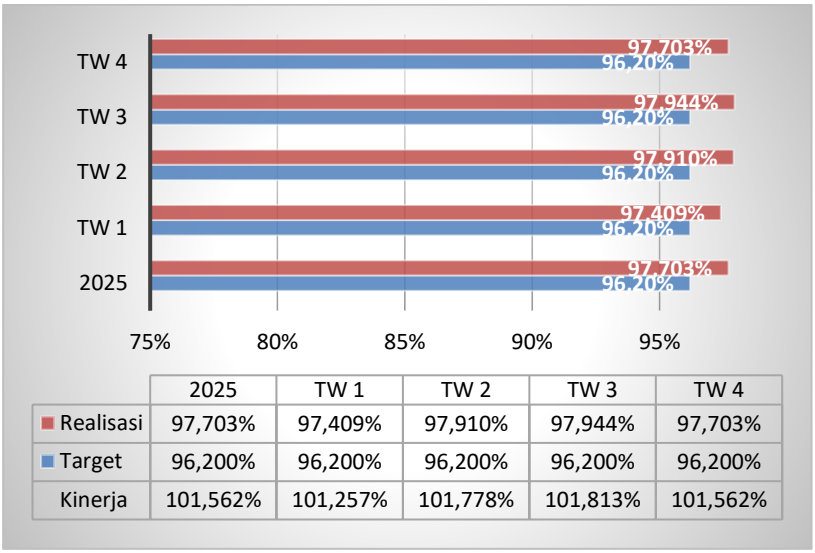
1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi *On Time Performance* (OTP) transportasi kereta api pada Tahun 2025 sebesar 97,703%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 101,562% dari target Tahun 2025 sebesar 96,200%. Perolehan nilai *On Time Performance* per triwulan pada periode Tahun 2025 cenderung fluktuatif di setiap triwulannya, dengan nilai *On Time Performance* kumulatif terendah sebesar 97,409% pada Triwulan I dan kumulatif tertinggi sebesar 97,944% pada Triwulan IV. Apabila dirinci per bulan, *On Time Performance* bulanan tertinggi terjadi pada periode Juni – September 2025 yang memperoleh OTP sebesar 97,900% ke atas.

Realisasi kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-13 Capaian Kinerja Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api	%	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	97,409	97,910	97,944	97,703	101,257	101,778	101,813	101,562	101,562



	2025	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Realisasi	97,703%	97,409%	97,910%	97,944%	97,703%
Target	96,200%	96,200%	96,200%	96,200%	96,200%
Kinerja	101,562%	101,257%	101,778%	101,813%	101,562%

Gambar 2-3 Capaian Kinerja Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api Per Triwulan Tahun 2025

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Beberapa faktor tercapainya target kinerja pada Tahun 2025 diantaranya:

a. Terpenuhinya target *on time performance* pada beberapa jenis pelayanan kereta api (khususnya angkutan KA perkotaan) seperti LRT Jakarta (99,98%), LRT Sumatera Selatan (99,92%), MRT Jakarta (99,81%), dan LRT Jabodebek (98,74%) yang secara signifikan berkontribusi terhadap capaian OTP nasional;

b. Dilaksanakannnya evaluasi harian kinerja operasi pada jaringan jalur kereta api nasional di Kereta Api Ringan Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, serta Kereta Api Kecepatan Tinggi Jakarta - Bandung guna memastikan kelancaran operasi dan ketepatan waktu perjalanan;

c. Dilaksanakannya evaluasi terhadap pelaksanaan Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) pada jaringan jalur Kereta Api Nasional di wilayah Jawa dan Sumatera sebagai dasar penyesuaian operasional dan perbaikan pola perjalanan;

d. Terjalinnya koordinasi aktif dengan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Balai Teknik Perkeretaapian terkait identifikasi penyebab serta penanganan kejadian keterlambatan perjalanan kereta api, termasuk langkah antisipatif terhadap potensi rintang jalan. Sebagai contoh, pada masa Angkutan Lebaran, libur Iduladha Tahun 2025, serta angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, telah dilakukan koordinasi teknis dengan para pemangku kepentingan (PT KAI, PT MRT Jakarta, PT KCI, dan PT KCIC) yang mencakup perencanaan operasi, kesiapan sarana dan prasarana, kesiapan SDM, serta identifikasi daerah rawan beserta langkah pencegahan dan mitigasinya;

e. Secara rutin melaksanakan evaluasi berkala (triwulan) terhadap realisasi perjalanan kereta api sesuai GAPEKA yang berlaku sehingga kesesuaian jadwal perjalanan dapat terjaga dan tingkat keterlambatan dapat diminimalisir.

Namun demikian, dalam pencapaian kinerja *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api selama Tahun 2025 masih dihadapkan pada sejumlah

kendala dan hambatan operasional di berbagai wilayah. Beberapa peristiwa menonjol yang memengaruhi capaian OTP antara lain sebagai berikut:

a. Kejadian kecelakaan kereta api sepanjang Tahun 2025 sebanyak 10 kejadian seperti halnya insiden anjloknya KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Pegadenbaru, Subang, pada awal Agustus 2025 yang menyebabkan gangguan signifikan pada jalur utama lintas utara serta berdampak sistemik terhadap jadwal perjalanan kereta jarak jauh;
b. kecelakaan di perlintasan sebidang masih menjadi penyumbang terbesar terhadap keterlambatan perjalanan, terutama akibat tabrakan dengan kendaraan berukuran besar seperti truk dan alat berat yang menimbulkan kerusakan sarana maupun prasarana serta memerlukan waktu penanganan yang cukup lama;
c. Gangguan teknis pada sarana perkeretaapian, seperti permasalahan pada kereta pembangkit, juga turut menyebabkan keterlambatan dan penurunan efisiensi jadwal operasi;
d. Faktor cuaca ekstrem dan bencana alam, khususnya kejadian banjir di beberapa wilayah seperti Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang memberikan dampak signifikan terhadap operasional layanan perkeretaapian, baik berupa gangguan perjalanan, keterlambatan layanan, maupun kerusakan prasarana pada wilayah terdampak.

Secara keseluruhan, berbagai gangguan tersebut menunjukkan bahwa capaian *On Time Performance* masih dipengaruhi oleh kombinasi faktor eksternal dan internal, termasuk aspek keselamatan di perlintasan sebidang, kesiapan dan keandalan sarana dan prasarana cadangan, serta ketahanan jalur terhadap kondisi cuaca ekstrem dan keterjadian bencana alam. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui peningkatan pengamanan perlintasan sebidang, penguatan mitigasi dan penanganan risiko bencana, optimalisasi pemeliharaan sarana dan prasarana, serta penguatan sistem manajemen operasi dan kesiapsiagaan darurat guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan ketepatan waktu perjalanan kereta api pada periode berikutnya.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) melalui berbagai

bentuk koordinasi lintas sektor dan sinergi antar-pemangku kepentingan di bidang perkeretaapian. Koordinasi teknis dilaksanakan secara berkelanjutan antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan badan usaha penyelenggara sarana dan prasarana, antara lain PT KAI, PT KCI, PT MRT Jakarta, PT KCIC, dan operator lainnya, dalam rangka pemantauan dan pengendalian kinerja operasi harian jaringan kereta api nasional. Bentuk koordinasi tersebut mencakup pembahasan dan evaluasi kinerja operasional pada layanan kereta api yang dilaksanakan secara rutin sepanjang Tahun 2025 dan diperkuat melalui kegiatan evaluasi operasi di lapangan. Koordinasi juga difokuskan pada upaya antisipasi dan penanganan gangguan perjalanan, khususnya yang disebabkan oleh kejadian anjlokan, kecelakaan di perlintasan sebidang, gangguan teknis sarana dan prasarana, serta dampak kondisi cuaca ekstrem dan bencana alam di sejumlah wilayah operasi.

Selain itu, koordinasi lintas bidang turut dilaksanakan dalam pengelolaan dan evaluasi berkala Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) dengan melibatkan masukan dari badan usaha/operator perkeretaapian, Balai Teknik Perkeretaapian, Pemerintah Daerah, serta pemangku kepentingan terkait lainnya, guna memastikan kesesuaian pola operasi dengan kondisi lapangan dan kebutuhan layanan. Pelaksanaan berbagai bentuk koordinasi lintas bidang tersebut memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas dan pencapaian target OTP, khususnya pada layanan kereta api perkotaan seperti MRT Jakarta, LRT Jakarta, LRT Sumatera Selatan, dan LRT Jabodebek yang secara konsisten mampu mempertahankan tingkat ketepatan waktu perjalanan pada kategori sangat tinggi sepanjang Tahun 2025.

Dalam mendukung pencapaian target *On Time Performance*, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung IKP yang dilakukan secara berkala setiap Triwulan. Berdasarkan profil risko unit kerja Ditjen Perkeretaapian Tahun 2025, terdapat 8 risiko yang dapat mengancam pencapaian target IKP tersebut dimana seluruh risiko tersebut memerlukan penanganan risiko lanjutan melalui 14 rencana penanganan. Hingga akhir Tahun 2025, seluruh penanganan risiko telah terlaksana atau capaian sebesar 100,000% dari total 14 rencana

penanganan risiko yang akan dilaksanakan. Rincian penanganan risiko yang telah dilaksanakan s.d akhir Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Memastikan kesiapan *readiness criteria* sesuai ketentuan sebelum diprogramkan/dianggarkan (perencanaan teknis, perizinan, kesiapan lahan);
b. Sosialiasi anti gratifikasi melalui media sosial;
c. Penyusunan SOP Mikro terkait perizinan pemanfaatan prasarana;
d. Pengawasan pembangunan prasarana perkeretaapian umum/khusus yang dibangun oleh Badan Usaha;
e. Inventarisasi data pemanfaatan prasarana/lokasi utilitas di sepanjang jalur KA yang tidak memiliki izin;
f. Surat pemberitahuan/teguran untuk pemanfaatan prasarana/lokasi sudah terbangun namun belum memiliki izin;
g. Sinkronisasi data izin pemanfaatan prasarana perkeretaapian;
h. Pengoptimalan fungsi supervisi/pendampingan oleh tenaga ahli yang kompeten dalam pelaksanaan kegiatan;
i. Mengintensifkan pengawasan sebagai fungsi supervisi/pendampingan kegiatan konstruksi oleh Inspektur Perkeretaapian dan tenaga ahli yang kompeten dalam pelaksanaan kegiatan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan;
j. Arahan pimpinan secara rutin berkala terkait dengan larangan penerimaan gratifikasi;
k. Pemanfaatan sistem TIK dalam pengelolaan perizinan;
l. Optimalisasi *tools*/modul layanan perizinan pemanfaatan prasarana secara online pada portal layanan DJKA;
m. Monitoring izin pemanfaatan prasarana perkeretaapian termasuk koordinasi/bersurat himbauan perpanjangan perizinan;
n. Sosialisasi peraturan dan SOP perizinan bidang prasarana perkeretaapian.

Adapun rincian realisasi rencana penananan risiko yang telah dilakukan s.d akhir Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2- 14 Realisasi Penanganan Risiko IKP On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api Tahun 2025

No	Proses Bisnis	Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)					
			Risiko	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	TW III	TW IV	Kumulatif (s.d TW IV)	%
1	Pelayanan Transportasi Prasarana Perkeretaapian	8	8	14	1	3	3	7	14	100,00
Jumlah		**8**	**8**	**14**	**1**	**3**	**3**	**7**	**14**	**100,00**

Selama Tahun 2025, juga terdapat beberapa keterjadian peristiwa risiko terkait IKP Persentase *Capaian On Time Performance* (*OTP*) Transportasi Kereta Api, diantaranya:

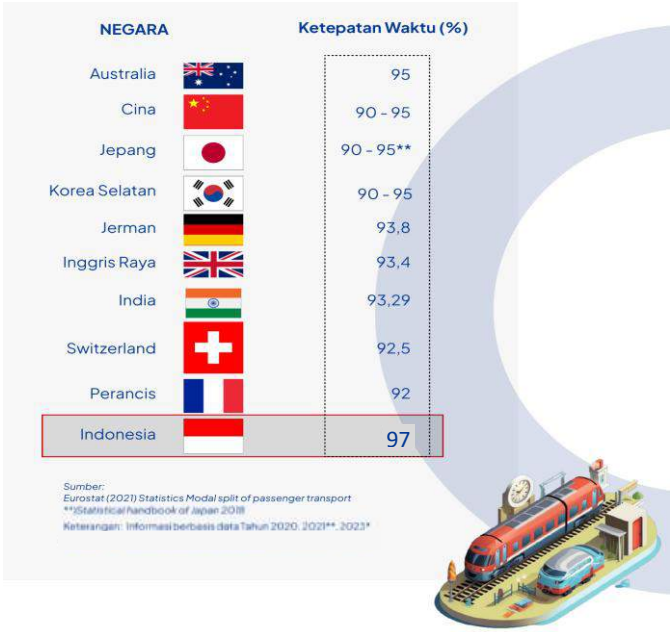
Tabel 2- 15 Keterjadian Peristiwa Risiko Pada IKP On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api Tahun 2025

No	Risiko	Penyebab	Frekuensi Kejadian	Pemicu Peristiwa
1	Gangguan Operasional Perjalanan KA	• Tata kelola lalu lintas KA tidak optimal, diantaranya SOP pengoperasian tidak dilaksanakan dengan baik	3 Kejadian	• Tata kelola lalu lintas KA tidak optimal/aspek operasi KA.
2	Gangguan keamanan di perlintasan sebidang jalur kereta api	• Ketidaklengkapan peralatan keamanan perlintasan sebidang • Kerusakan peralatan keamanan perlintasan sebidang • Kondisi perlintasan sebidang yang tidak sesuai standar teknis	4 Kejadian	• Perlintasan tanpa palang pintu dan kondisi jalan raya yang menanjak; • Tidak adanya palang pintu perlintasan sebidang; • Perlintasan tanpa palang pintu dan kondisi jalan raya yang menanjak.
3	Gangguan Operasional Perjalanan KA	• Gangguan alam/cuaca, kejadian pelemparan, pencurian/vandalisme, pengrusakan terhadap aset sarana dan prasarana perkeretaapian	17 Kejadian	• Gangguan alam / cuaca / banjir / longsoran / pohon tumbang; • Vandalisme masyarakat.
4	Gangguan keamanan di perlintasan sebidang jalur kereta api	• Ketidakpatuhan masyarakat terhadap rambu atau marka	33 Kejadian	• Temperan kendaraan/orang di perlintasan sebidang akibat kelalaian pengguna jalan, kendaraan mogok/muatan berlebihan, dll.
5	Gangguan Operasional Perjalanan KA	• Gangguan teknis sarana dan prasarana perkeretaapian	50 Kejadian	• Gangguan teknis sarana dan prasarana perkeretaapian.

3. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Perbandingan capaian kinerja *On Time Performance* (OTP) dilakukan dengan membandingkan OTP di beberapa negara lain diantaranya mengacu pada publikasi *Eurostat* (*Statistics Modal Split of Passenger Transport*) dan *Statistical Handbook of Japan*. Berdasarkan data tersebut, diperoleh bahwa

kinerja OTP perjalanan kereta api di Indonesia cukup baik dan setara apabila dibandingkan dengan OTP layanan perkeretaapian di negara-negara Eropa, Jepang, Cina, Korea Selatan, India dan Australia yang mencapai kinerja 90-95%. Data kinerja OTP di beberapa negara disampaikan sebagaimana pada Gambar berikut.



*Keterangan: *) kinerja Indonesia Triwulan IV 2025 dibandingkan kinerja negara lain 2021-2024*

Gambar 2-4 Perbandingan *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api dengan Beberapa Negara

Dengan capaian OTP Indonesia yang cukup tinggi sebesar 97,703% pada Tahun 2025 menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat kompetitif secara global. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas operasional, pengelolaan infrastruktur, dan manajemen layanan yang diterapkan oleh badan usaha/operator perkeretaapian dengan pembinaan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini, penting untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, serta mengadopsi praktik terbaik dari negara lain dengan performa OTP yang tinggi.

4. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya mempertahankan dan meningkatan kinerja pada periode berikutnya diantaranya:

a. Penyesuaian strategi/kebijakan:

1) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna menjafa agar perjalanan kereta api sesuai dengan yang telah diprogramkan pada GAPEKA dan perjalanan di luar GAPEKA;
2) Melakukan inspeksi/pemantauan berkala terhadap perjalanan kereta api pada lokasi rawan bencana/banjir/longsoran/amblesan/lokasi taspat dan rawan gangguan keamanan di perlintasan sebidang serta memastikan peralatan penanganan kecelakaan/rintang jalan tersedia dan ditempatkan sesuai kebutuhan;

b. Penyesuaian aktivitas dan anggaran:

Penyiapan anggaran dan kegiatan Tahun 2026 untuk pelaksanaan kegiatan pendukung pencapaian kinerja *On Time Performance*.

c. Penyesuaian organisasi/penempatan jabatan/pegawai:

Penyesuaian penugasan inspektur prasarana dan sarana perkeretaapian serta anggota Satuan Pelayanan pada masing-masing wilayah Balai Teknik Perkeretaapian berdasarkan kompetensi dalam pelaksanaan pengawasan perjalanan kereta api.

Adapun pencapaian target *On Time Performance* (OTP) diharapkan dapat menghasilkan *outcome* sebagai berikut:

a. Peningkatan kepercayaan publik, dimana dengan layanan dan perjalanan kereta api yang tepat waktu maka dapat meningkatkan kepercayaan penumpang terhadap perkeretaapian serta meningkatkan daya saing dengan moda transportasi lain.
b. Mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum massal kereta api sehingga dapat menurunkan kemacetan lalu lintas dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Ketepatan waktu perjalanan merupakan salah satu aspek yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih moda transportasi untuk mobilitas keseharian.

PERSENTASE PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN KERETA API

Persentase pemenuhan target angkutan kereta api diukur melalui perbandingan antara realisasi jumlah angkutan kereta api penumpang dan barang dibandingkan dengan jumlah angkutan kereta api penumpang dan barang yang ditargetkan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 termasuk mempertimbangkan target pada Rencana Induk Perkeretaapian Nasional. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi terakhir), ditetapkan persentase pemenuhan target angkutan kereta api baik penumpang dan barang untuk Tahun 2025 sebesar 19,00%

Realisasi jumlah penumpang terangkut dengan kereta api pada Tahun 2025 diperoleh sebanyak **551.737.151** penumpang dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah penumpang kereta api komersial yang meliputi KA jarak Jauh eksekutif, bisnis, *priority*, ekonomi non PSO, KA lokal eksekutif, KA lokal bisnis dan KA Wisata Ambarawa sebanyak 42.088.700 penumpang;
2. Jumlah penumpang kereta api ekonomi/PSO (KA ekonomi jarak jauh, jarak menengah, jarak dekat, KRD ekonomi, KA lokal dan KA ekonomi lebaran/non KRL) sebanyak 57.801.192 penumpang;
3. Jumlah penumpang PSO KRL sebanyak 358.327.019 penumpang (KRL Jabodetabek sebanyak 349.311.251 penumpang dan KRL Yogya sebanyak 9.015.768 penumpang);
4. Jumlah penumpang kereta api perintis sebanyak 5.259.724 penumpang;
5. Jumlah penumpang MRT Jakarta sebanyak 46.449.629 penumpang;
6. Jumlah penumpang LRT Jakarta sebanyak 1.335.698 penumpang;
7. Jumlah penumpang kereta api *Railink* (kereta api Bandara Kualanamu, KA Bandara YIA, dan KA Srilelawangsa) sebanyak 5.456.033 penumpang;
8. Jumlah penumpang LRT Jabodebek sebanyak 28.816.787 penumpang;
9. Jumlah penumpang Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebanyak 6.202.369 penumpang.

Dengan realisasi angkutan penumpang kereta api sebanyak **551.737.151** penumpang pada Tahun 2025 dibandingkan target angkutan penumpang kereta api berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 sebanyak

2.798.554.050 penumpang, maka diperoleh nilai sebesar **9,858%** (pembobotan 50%). Adapun rincian perhitungan diuraikan sebagai berikut:

Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	=	$\frac{\text{Jumlah angkutan penumpang tahun 2025}}{\text{Target angkutan penumpang 2025} - 2029} \times 50\%$

Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	=	$\frac{551.737.151}{2.798.554.050} \times 50\% = 9{,}858\ \%$

Data dukung capaian dan perhitungan kinerja pada Lampiran 5.

Untuk jumlah barang terangkut dengan kereta api pada tahun 2025, diperoleh realisasi angkutan barang kereta api sebesar **69.908.773 ton** dengan uraian realisasi per wilayah sebagai berikut:

a. Angkutan barang kereta api di pulau Jawa sebanyak **8.199.284** ton, dengan rincian per komoditi sebagai berikut:
   1) BBM sebanyak 1.786.399 ton;
   2) Pupuk sebanyak 21.060 ton;
   3) Semen sebanyak 1.074.827 ton;
   4) Peti kemas sebanyak 4.788.056 ton;
   5) Retail (ONS parcel, BHP) sebanyak 203.102 ton;
   6) Limbah B3 sebanyak 12.687 ton;
   7) Lainnya (Bank Indonesia, Bea KLB, angkutan dinas, angkutan Satuan Kerja, Motis, Bea langsir) sebanyak 313.153 ton.

b. Angkutan barang kereta api di pulau Sumatera sebanyak **61.709.489** ton, dengan rincian per komoditi sebagai berikut:
   1) BBM sebanyak 895.548 ton;
   2) Semen sebanyak 1.355.794 ton;
   3) Batu bara sebanyak 57.726.800 ton;
   4) Hasil perkebunan (CPO, pulp, kayu, latex) sebanyak 577.799 ton;
   5) Peti kemas sebanyak 609.606 ton;
   6) Karet dan klinker sebanyak 438.200 ton;
   7) Retail (ONS Parcel, BHP) sebanyak 5.305 ton;
   8) Limbah B3 sebanyak 751 ton;

9) Lainnya (Bank Indonesia, Bea KLB, angkutan dinas, angkutan Satuan Kerja, Motis, Bea langsir) sebanyak 99.686 ton;

Dengan realisasi angkutan barang kereta api sebanyak **69.908.773 ton** pada Tahun 2025 dibandingkan target angkutan barang kereta api berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 sebanyak **358.912.917 ton**, maka diperoleh nilai sebesar **9,739%** (pembobotan 50%). Rincian perhitungan diuraikan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api} = \frac{\text{Jumlah angkutan barang t}ahun\ 2025}{\text{Target angkutan barang } 2025-2029} \times 50\%$$

$$\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api} = \frac{69.908.773}{358.912.917} \times 50\% = 9{,}739\%$$

Data dukung capaian dan perhitungan kinerja pada Lampiran 5.

Dengan pemenuhan target angkutan kereta api penumpang sebesar 9,858% dan angkutan kereta api barang sebesar 9,739%, maka diperoleh ***Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api secara total sebesar 19,596%*** dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api} = \text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang KA} + \text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang KA}$$

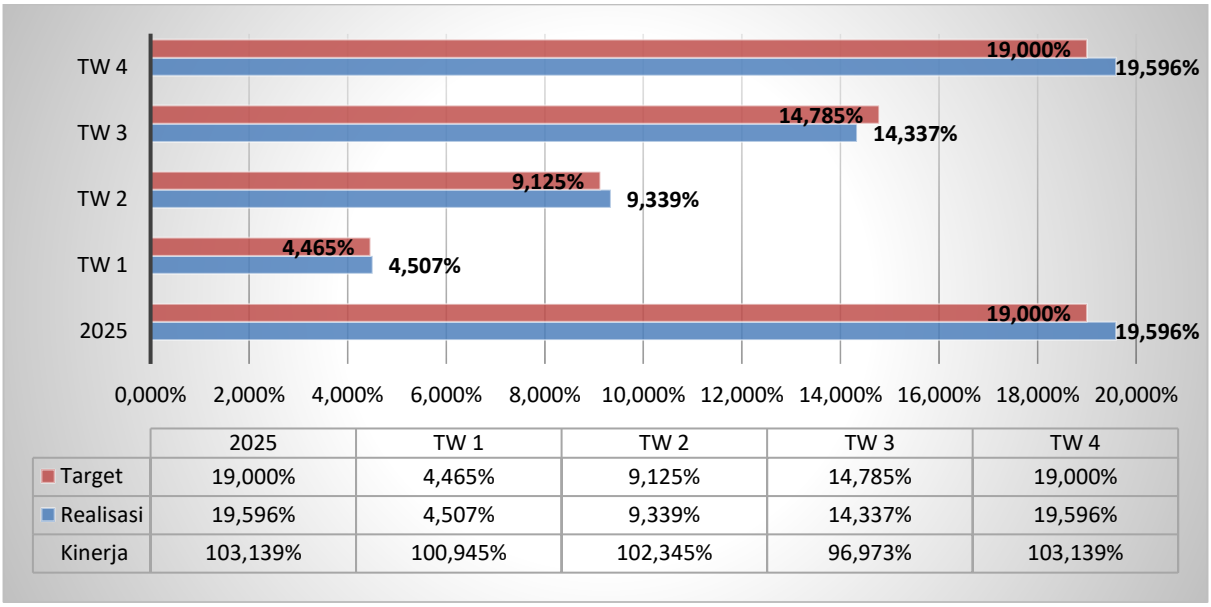
$$\text{Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api} = 9{,}858\% + 9{,}739\% = 19{,}596\%$$

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi pemenuhan target angkutan penumpang Tahun 2025 sebesar 19,596%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 103,139% terhadap target Tahun 2024 sebesar 19,00%. Pada Tahun 2025, produksi angkutan penumpang cenderung mengalami kenaikan signifikan dengan pengoperasian beberapa lintas pelayanan baru serta masifnya penggunaan angkutan KA perkotaan. Realisasi kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-16 Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	19,000	4,465	9,125	14,785	19,000	4,507	9,339	14,337	19,596	100,945	102,345	96,973	103,139	103,139



	2025	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Target	19,000%	4,465%	9,125%	14,785%	19,000%
Realisasi	19,596%	4,507%	9,339%	14,337%	19,596%
Kinerja	103,139%	100,945%	102,345%	96,973%	103,139%

Gambar 2-5 Capaian Kinerja Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Per Triwulan Tahun 2025

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Faktor yang menyebabkan keberhasilan pada capaian kinerja Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api diantaranya:

Angkutan Penumpang:

a. Realisasi Angkutan Penumpang KRL Jabodetabek Selama Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 349.311.251 penumpang dengan rata-rata penumpang *weekday* sebesar 1.098.911 penumpang.
b. Realisasi Angkutan Penumpang Kereta Cepat Jakarta Bandung Selama Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 6.202.393 penumpang dengan rata-rata penumpang sebesar 16.995 penumpang;

c. Realisasi Angkutan penumpang LRT Jabodebek Selama Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 28.816.787 penumpang dengan rata-rata penumpang *weekday* sebesar 105.671 penumpang;
d. Meningkatnya animo masyarakat terhadap layanan angkutan penumpang kereta dengan adanya dukungan pemerintah melalui pemberian subsidi dengan rincian:
    - Pemberian stimulus dengan realisasi sebesar Rp. 352.875.256.000,- atau 83,88% dari pagu/kebutuhan sebesar Rp. 420.682.092.000,- yang diselenggarakan pada periode Liburan Sekolah pada tanggal 5 Juni 2025 s.d. 31 Juli 2025 dan periode Natal dan Tahun Baru pada tanggal 22 Desember 2025 s.d 10 Januari 2026 dengan realisasi penumpang sebanyak 5.283.249 penumpang atau capaian sebesar 104,85% dari target sebanyak 5.038.692 tempat duduk
    - Pemberian subsidi angkutan perintis dengan realisasi anggaran sebesar Rp.131.318.422.708,- atau 90,88% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 144.497.839.000,- dan dapat memberikan manfaat penumpang terangkut sebanyak 5.259.724 penumpang
    - Pemberian subsidi PSO tahun 2025 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.735.594.377.745,- atau 98,72% dari pagu sebesar Rp.4.797.057.860.000,- dan memberikan manfaat penumpang terangkut sebanyak 5.259.724 penumpang
e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPM pelayanan angkutan penumpang kereta api

Telah dilakukan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja dengan melakukan koordinasi dengan unit kerja lain (*crosscutting*) yaitu:

a. Melaksanakan pembahasan Rencana Pengoperasian Kereta Api di Wilayah Sumatera Bagian Barat pada tanggal 8 Oktober 2025.
b. Telah dilaksanakan Rapat Verifikasi Administrasi Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) Bulan November dan Triwulan III TA 2025 pada tanggal 16 Desember 2025.
c. Telah dilaksanakan Rapat Verifikasi Administrasi Subsidi Penyelenggaraan Sarana Kereta Api Ringan (*Light Rail Transit*)

Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi Bulan November dan Triwulan III TA 2025 pada tanggal 16 Desember 2025.

d. Melakukan koordinasi dan pembahasan terkait Perencanaan dan Pengembangan Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi di Stasiun LRT Jabodebek pada tanggal 8 Desember 2025 bersama Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda

Terdapat beberapa kegiatan pendukung diantaranya berupa kegiatan peningkatan stasiun kereta api yang dilaksanakan pada Tahun 2025 dengan tujuan mendukung peningkatan layanan angkutan penumpang kereta api, diantaranya:

a. Peningkatan Stasiun Rangkasbitung dengan progres 98,80% (perpanjangan waktu penyelesaian pada tahun 2026);
b. Peningkatan Stasiun Tanah Abang Tahap I dengan progres 100,00% atau telah selesai dan telah dioperasikan pada tanggal 29 Juni 2025.

Selain itu, telah dilakukan juga pembahasan terkait peningkatan pelayanan kereta api yang dapat meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan tansportasi kereta api, diantaranya adalah:

a. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Integrasi Stasiun Karet dan Stasiun BNI City pada tanggal 9 Oktober 2025.
b. Telah dilaksanakan High Level Meeting Implementasi QRIS TAP fitur Tap *In Tap Out* di Moda Transportasi pada tanggal 27 Oktober 2025.
c. Telah dilakukan Rapat pembahasan usulan perpanjangan KA Bandara Internasional Yogyakarta (KA YIA) ke Stasiun Maguwo pada tanggal 21 November 2025.
d. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan permohonan Perpanjangan Pelayanan KA Supas Sampai Stasiun Probolinggo pada tanggal 11 Desember 2025.

Angkutan Barang:

Analisa terkait pendukung keberhasilan antara lain telah dilaksanakan kegiatan antara lain :

a. Telah dilakukan sosialisasi pada media sosial dengan memberikan informasi kelebihan angkutan barang dengan moda KA untuk meningkatkan pengguna transportasi angkutan barang dengan moda KA.
b. Telah melakukan Pembahasan Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden terkait Penguatan Logistik Nasional dalam upaya peningkatan angkutan barang dengan KA pada tanggal 1 Oktober 2025.
c. Telah melakukan Pembahasan Rencana Operasi Angkutan Motor Gratis dengan Kereta Api pada Masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 pada tanggal 10 Oktober 2025
d. Telah melakukan Rapat Koordinasi dan Penyelarasan Data Kinerja Angkutan Barang dengan Kereta Api pada tanggal 24 Oktober 2025
e. Telah melakukan Bimbingan Teknis Pengawasan Angkutan Motor Gratis dengan KA pada Masa Angkutan Natal Tahun 2025 pada tanggal 18 Desember 2025

Telah dilakukan juga beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja dengan melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain (*crosscutting*), yaitu:
Melakukan pembahasan terkait kebutuhan dan rencana pembaruan data Intensitas Konsumsi Energi (IKE) pada tanggal 23 Oktober 2025 bersama Pusat Pengelola Transportasi Berkelanjutan, Kemenhub.

a. Melakukan Pembahasan Integrasi Tranportasi Logistik Multimoda Sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah pada tanggal 30 Oktober 2025 bersama Kementerian Bidang Perekonomian.
b. Melakukan Pembahasan Laporan Akhir Studi *Basic Engineering Design* Angkutan Barang Berbasis Rel pada tanggal 31 Oktober 2025 bersama Pemprov Dishub DKI Jakarta.
c. Melakukan Rapat Koordinasi Implementasi Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi-Lebih Muatan/ODOL Bulan November dan Desember 2025 pada tanggal 25 November 2025 bersama Kementerian Koordinator Infrastruktur Wilayah.
d. Menghadiri *Kick-Off Meeting Due Diligence Logistics Railway Transformation* pada tanggal 9 Desember 2025 bersama Kementerian PPN/Bappenas

Selain itu, terdapat beberapa kegiatan pendukung prasarana perkeretaapian diantaranya berupa kegiatan peningkatan stasiun kereta api yang dilaksanakan

pada Tahun 2025 dengan tujuan mendukung peningkatan layanan angkutan penumpang kereta api, diantaranya:

c. Peningkatan Stasiun Rangkasbitung dengan progres 98,80%;
d. Peningkatan Stasiun Tanah Abang Tahap I dengan progres 100,00% atau telah selesai dan telah dioperasikan pada tanggal 29 Juni 2025.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain hubungan kerja/*crosscutting* terkait peningkatan angkutan penumpang kereta api dengan koordinasi BUPS/operator perkeretaapian melalui kegiatan pengawasan SPM dan pelaksanaan sosialisasi untuk meningkatkan minat masyarakat. Upaya peningkatan akses stasiun dan integrasi antar moda juga terdapat keterhubungan kinerja dengan Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD/operator moda lain. Selain itu juga terdapat hubungan kerja dan data dalam penyediaan/penyelenggaraan subsidi perintis serta pengelolaan *Public Service Obigation* yang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target persentase pemenuhan target angkutan kereta api, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung IKP yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025, terdapat 22 risiko yang diidentifikasi dari 3 proses bisnis terkait IKP persentase pemenuhan target angkutan kereta api. Dari 22 risiko tersebut, terdapat 13 risiko yang penilaiannya di atas selera risiko dan memerlukan penanganan risiko dimana telah direncanakan 18 kegiatan penanganan risiko pada Tahun 2025.

Pada periode Tahun 2025, penanganan risiko telah terealisasi sebanyak 18 kegiatan atau sebesar 100,00% dari target 18 rencana penanganan risiko pada Tahun 2025. Adapun rincian realisasi rencana penanganan risiko yang telah dilakukan pada tahun 2025 sebagai berikut:

a. Koordinasi badan usaha/operator untuk peningkatan pemeriksaan/perawatan sarana dan prasarana yang handal termasuk menggunakan *Predictive Maintenance System*;
b. Pemenuhan ketersediaan sarana pengganti sesuai spektek;

c. Penyebutan dalam klausul kontrak agar penerima penugasan harus menyediakan sarana pengganti dan jika memang tidak tersedia, penerima penugasan harus menyediakan angkutan moda darat lainnya dengan pelayanan kelas yang sama dan tidak melebihi biaya pengoperasian;
d. Usulan relaksasi/revisi anggaran untuk mendukung pengadaan tanah;
e. Pelaksanaan sosialisasi keselamatan di lokasi perlintasan sebidang;
f. Melakukan rapat koordinasi dengan penyedia dan pihak pabrikasi;
g. Pemeriksaan bersama sebelum penggunaan SMN/peralatan khusus;
h. Mediasi/konsinyasi melalui Pengadilan Negeri/Tinggi setempat (sebanyak 2 realisasi rencana penanganan);
i. Konsultasi publik/sosialisasi terkait angkutan barang dengan kereta api/analisis penyelenggaraan angkutan logistik terintegrasi dengan moda KA;
j. Koordinasi aktif dengan berbagai stakeholders diantaranya Pemda, Aparat Penegak Hukum (terkait penegakan hukum dan pencegahan aksi pencurian, vandalisme, dll), serta Badan Usaha/Operator (terkait alam/cuaca, perawatan dan pemeliharaan aset sarana dan prasarana perkeretaapian);
k. Menggerakkan Satpel/Balai untuk pengawasan berkala terhadap kondisi aset/prasarana perkeretaapian serta mendeteksi perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi kondisi aset/prasarana perkeretaapian termasuk penggunaan sistem deteksi bencana untuk memantau banjir, longsor, dan gempa;
l. Koordinasi dengan operator/Badan Usaha untuk penyediaan peralatan/AMUS untuk antisipasi penanganan kecelakaan/bencana alam;
m. Koordinasi dengan Pemda/Dinas Perhubungan/Operator serta pelibatan Balai Teknik Perkeretaapian/Balai Pengelola KA untuk dapat melengkapi rambu dan marka/penutupan di perlintasan sebidang serta monitoring tindak lanjut rekomendasi peningkatan keamanan;
n. Mengintensifkan pelaksanaan sertifikasi penjaga perlintasan sebidang termasuk dengan dukungan pemanfaatan database perlintasan sebidang;

o. Integrasi data dengan badan usaha/operator perkeretaapian dengan Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk mendukung pengawasan kelaikan prasarana dan sarana perkeretaapian berbasis teknologi informasi;

p. Pelaksanaan addendum kontrak angkutan KA Perintis yang disesuaikan berdasarkan demand dan ketersediaan anggaran tanpa menghilangkan layanan esensial;

q. Pengoptimalan pengawasan prasarana perkeretaapian oleh Satpel/Balai.

Tabel 2-17 Realisasi Penanganan Risiko IKP Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api s.d Triwulan IV 2025

No	Proses Bisnis	Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)					
			Risiko	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	TW III	TW IV	Kumulatif (s.d TW IV)	%
1	Pelayanan Transportasi Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	14	10	15	0	2	3	15	15	100,00
2	Pengelolaan Prasarana Transportasi Perkeretaapian	4	1	1	0	0	0	1	1	100,00
3	Pengelolaan Sarana Transportasi Perkeretaapian	4	2	2	1	1	0	2	2	100,00
Jumlah		**22**	**13**	**18**	**1**	**3**	**3**	**18**	**18**	**100,00**

Pada Tahun 2025, terdapat 3 keterjadian peristiwa risiko terkait IKK Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api yaitu:

Tabel 2- 18 Keterjadian Peristiwa Risiko IKP Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Tahun 2025

No	Risiko	Penyebab	Frekuensi Kejadian	Pemicu Peristiwa
1	Berhentinya pengoperasian KA perintis/penugasan	• Tidak beroperasinya KA Perintis Cut Meutia dikarenakan sarana mengalami permasalahan. • Terjadi bencana alam Hidrometeorologi yang terjadi di Kota Lhokseumawe yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada prasarana perkeretaapian pada Lintas Muara Satu – Kutablang sehingga tidak dapat dioperasikannya KA Perintis Cut meutia.	3 kejadian	• Sarana KA dalam tahap perawatan, tidak tersedianya sarana cadangan, • Cuaca ekstrem/banjir/kondisi alam yang terjadi di wilayah Sumatera Utara dan Aceh

3. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Analisa kinerja angkutan penumpang dan barang di Indonesia dilakukan perbandingan dengan Malaysia, Singapura dan Britania Raya sesuai referensi pada Tahun 2024-2025. Perbandingan jumlah angkutan penumpang dan barang diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel 2-19 Perbandingan Kinerja Angkutan Penumpang Kereta Api

No	Negara	Panjang Jalur KA (Km)	Rata-Rata Jumlah Penumpang per Bulan (orang)	Rata-Rata Jumlah Penumpang/ Panjang Jalur KA per Bulan
1	Britania Raya	31.258	149.111.111	4.770
2	Malaysia	1.799	27.513.392	15.290
3	Singapura	271	15.789.000	58.198
4	Indonesia	6.915	45.978.096	6.649*

Sumber No.1 : Office of Rail and Road Publication (diolah, rata-rata per bulan)
Sumber No.2 : Portal Prasarana Malaysia Berhad (diolah, rata-rata per bulan)
Sumber No.3 : Website Departement of Statistics Singapore (diolah, rata-rata per bulan)
**) Rata-rata jumlah penumpang per bulan pada Tahun 2025*

Berdasarkan data di atas, diperoleh bahwa jumlah angkutan penumpang kereta api rata-rata per bulan di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan Britania Raya namun lebih tinggi dari Singapura dan Malaysia. Apabila jumlah angkutan penumpang dibandingkan dengan panjang jalur kereta api masing-masing negara, terlihat bahwa kinerja angkutan kereta api penumpang di Indonesia masih lebih tinggi dari dari Britania Raya namun lebih rendah dari Singapura dan Malaysia. Hal tersebut menunjukkan tingkat utilitas/penggunaan jalur kereta api di Indonesia masih rendah berbeda dengan Singapura dan Malaysia yang sangat optimal mengangkut jumlah penumpang.

Analisa kinerja angkutan barang kereta api dibandingkan dengan kinerja negara lain yaitu Britania Raya mengacu pada jurnal publikasi *Office of Rail and Road*. Perbandingan jumlah angkutan barang menggunakan kereta api diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2-20 Perbandingan Kinerja Angkutan Barang Kereta Api

No	Negara	Panjang Jalur KA (Km)	Jumlah Angkutan Barang per Bulan(Ton)	Rata-Rata Jumlah Angkutan Barang Per Bulan/ Panjang Jalur KA per Bulan
1	Britania Raya	31.258	6.011.111	192
2	Indonesia	6.915	5.825.731	842

Sumber No. 1 : Office of Rail and Road Publication (diolah, rata-rata per bulan)
**) Rata-rata jumlah barang per bulan pada Tahun 2025*

Berdasarkan data di atas, diperoleh bahwa rata-rata produksi angkutan barang kereta api di Indonesia per bulan lebih rendah apabila dibandingkan dengan Britania Raya. Namun apabila dibandingkan dengan panjang jalur KA yang beroperasi, kinerja angkutan kereta api barang di Indonesia lebih baik dibandingkan Britania Raya dengan rata-rata mencapai 842 Ton/Km per bulan. Hal tersebut menunjukkan tingkat utilitas/penggunaan jalur kereta api di Indonesia untuk angkutan barang cukup optimal dan juga didukung kekayaan sumber daya alam (terutama angkutan batubara di Sumatera Bagian Selatan) yang sudah secara masif menggunakan kereta api baik angkutan logistik/batubara keperluan dalam negeri maupun keperluan luar negeri/ekspor.

4. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang diantaranya:

a. Percepatan perbaikan prasarana perkeretaapian di wilayah Sumatera Utara yang terdampak bencana alam (kegiatan persiapan)
b. Penyelenggaraan layanan subsidi KA perintis sesuai kebutuhan dan layanan terus berkelanjutan, serta pengelolaan PSO Tahun 2026 yang mencakup KA Perkotaan dan KA antar kota termasuk pelaksanaan verifikasinya
c. Evaluasi dan pemantauan kinerja layanan KA secara *realtime* serta pengawasan penerapan SPM secara berkala guna memastikan layanan sesuai ketentuan
d. Percepatan kajian pendukung angkutan barang antara lain penyusunan tarif angkutan logistik kereta api dan Penyusunan studi komprehensif

mengenai perbandingan tarif angkutan kereta dengan angkutan barang truk;

e. Penyelesaian Peningkatan Stasiun Rangkasbitung.

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan dan aktivitas/anggaran diantaranya:

a. ***Penyesuaian Strategi/Kebijakan***:
   Penyusunan Reviu Rencana Induk Perkeretaapian termasuk Reviu Masterplan Kereta Api di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi guna selanjutnya menjadi referensi dan acuan dalam penyesuaian/penetapan target jumlah angkutan penumpang maupun barang pada masing-masing layanan/lokasi.
b. ***Penyesuaian Aktivitas/Anggaran***:
   Antisipasi kegiatan pendukung peningkatan layanan angkutan KA (termasuk subsidi perintis) yang terdampak kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) atau blokir dengan optimalisasi anggaran dan/atau pengusulan kembali pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.

2.2.3 MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian merupakan salah satu ukuran untuk mengkaji kinerja perkeretaapian di Indonesia dengan analisa mengacu pada jumlah kecelakaan kereta api dalam 1.000 keberangkatan kereta api baik penumpang maupun barang pada periode tertentu. Kategori kecelakaan kereta api meliputi anjlokan, terguling, tabrakan KA dengan KA, dan terbakar. Selain itu, terdapat pengecualian kategori kecelakaan kereta api khususnya yang disebabkan oleh keterjadian/pelanggaran pada perpotongan/perlintasan sebidang yang tidak dihitung sebagai kecelakaan kereta api sebagaimana ketentuan:

1. PP 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Pasal 110 Ayat (3) yaitu “Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang menyebabkan kecelakaan, maka hal ini bukan merupakan kecelakaan perkeretaapian”, dimana:

a. Ayat (1) yaitu Pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan yang selanjutnya disebut dengan perpotongan sebidang yang digunakan untuk lalu lintas umum atau lalu lintas khusus, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.
b. Ayat (2) yaitu Pemakai jalan wajib mematuhi semua rambu-rambu jalan di perpotongan sebidang.

2. PM Nomor 69 Tahun 2018 dimana Kecelakaan KA adalah peristiwa atau kejadian pengoperasian sarana kereta api yang mengakibatkan kerusakan sarana kereta api, korban jiwa, dan/atau kerugian harta benda.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Revisi Terakhir), ditargetkan tidak terjadi kecelakaan kereta api (*zero accident*) dengan nilai tingkat keselamatan 100,00%. Namun sampai dengan akhir Desember 2025 telah terjadi kecelakaan kereta api sebanyak 10 kejadian kecelakaan sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2- 21 Jumlah Kejadian Kecelakaan per Jenis Kejadian Tahun 2025

No	Jenis Kecelakaan	Jumlah Kejadian
1	Tabrakan KA dengan KA	-
2	Anjlokan	10
3	Terguling	-
4	Lain-lain (Terbakar)	-
Jumlah		**10**

Tabel 2- 22 Jumlah Kejadian Kecelakaan per Wilayah Balai Tahun 2025

Wilayah Balai	Daop/ Divre	Bulan												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	
BTP Jakarta	Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	**2**
BTP Bandung	Bandung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2**
	Cirebon	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	**0**
BTP Semarang	Semarang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**
	Purwokerto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**
	Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**
BTP Surabaya	Madiun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**
	Surabaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	**1**
	Jember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**
Pulau Jawa		-	-	-		-	-	-	**2**	-	**2**	**1**	**0**	**5**

Wilayah Balai	Daop/ Divre	Bulan												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	
BTP Medan	Aceh dan Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
BTP Padang	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**
BTP Palembang	Sumatera Selatan	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	**0**
	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	**0**
Pulau Sumatera		-	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	5
Jumlah (Jawa + Sumatera)		-	-	1	-	-	1	2	3	-	2	1	0	10

Dengan jumlah kejadian kecelakaan kereta api s.d akhir Desember 2025 sebanyak 10 kejadian serta jumlah keberangkatan kereta api sampai dengan sebanyak 1.078.866 KA, maka diperoleh tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian per 1.000 jumlah keberangkatan KA pada Tahun 2025 sebesar 99,073% dengan uraian perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian} = \left[1 - \frac{10}{1.078.866} \text{ X } 1.000 \right] \text{ X } 100\%$$

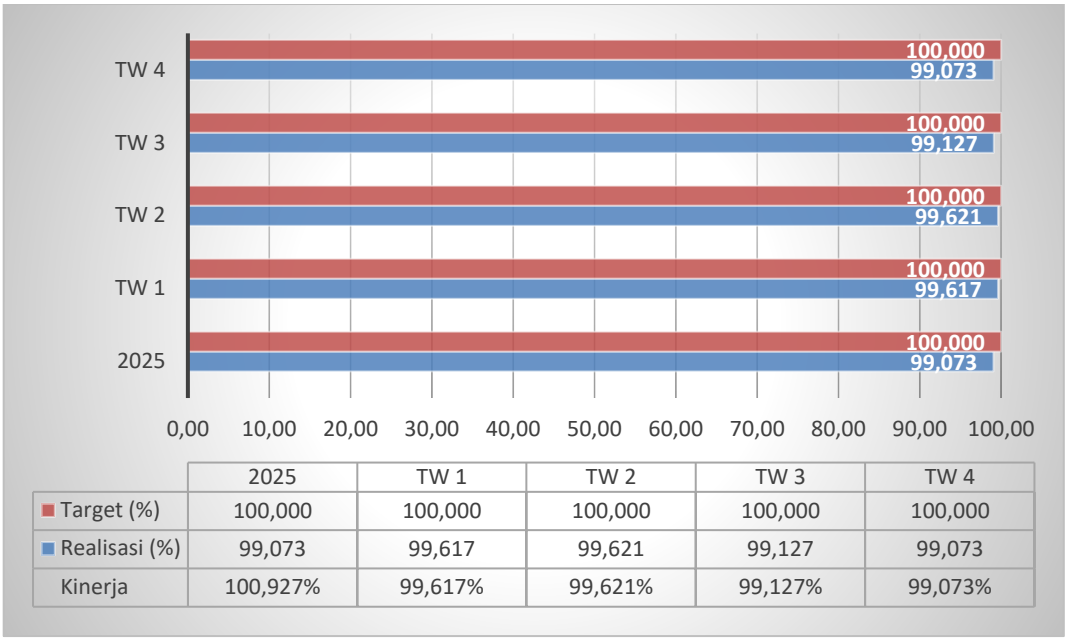
Data dukung capaian dan perhitungan kinerja pada Lampiran 5.

1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Berdasarkan realisasi tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian per 1.000 jumlah keberangkatan kereta api, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 99,073% dari target yang ditetapkan pada tahun 2025 dan Tahun 2025 sebesar 100%. Kejadian kecelakaan kereta api mayoritas terjadi pada lokasi di wilayah Sumatera Bagian Selatan khususnya terhadap kereta api layanan angkutan barang. Realisasi kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2- 23 Capaian Kinerja Rasio Konektivitas antar Wilayah Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100	99,617	99,621	99,127	99,073	99,617	99,621	99,127	99,073	99,073



	2025	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Target (%)	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Realisasi (%)	99,073	99,617	99,621	99,127	99,073
Kinerja	100,927%	99,617%	99,621%	99,127%	99,073%

Gambar 2-6 Capaian Kinerja Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Per Triwulan 2025

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Sampai dengan akhir Desember tahun 2025, terjadi 10 kejadian anjlokan yaitu:

a. Anjlokan KA barang pada emplasemen Stasiun Ujan Mas Sumatera Selatan:

Pada tanggal 15 Maret 2025 pukul 22:30 WIB terjadi kecelakaan anjlokan KA 3100 (Barapati) rangkaian gerbong barang nomor 458905 nomor urut 17 dari lokomotif anjlok 1 As pada pukul 22:30 WIB di KM 381+9/0 jalur II emplasemen Stasiun Ujan Mas (Ujm) wilayah DIVRE III Palembang. Dampak kejadian kecelakaan KA tidak terdapat korban jiwa, namun terdapat gangguan operasional pada 10 KA dengan andil keterlambatan 21 jam 45 menit. Penyebab kejadian kecelakaan KA masih dalam tahap penelitian.

b. Anjlokan KA barang (Bara Simpang) pada emplasemen Stasiun Banjarsari:

Pada tanggal 23 Juni 2025 pukul 11.10 WIB terjadi anjlokan 4 as pada rangkaian gerbong barang nomor 4212427 nomor urut 1 dari lokomotif. Penyebab kejadian kecelakaan KA masih dalam tahap penelitian.

c. **Anjlokan KA Barang (Linggapati):**

Pada tanggal 27 Juli 2025 pukul 23:10 WIB KA 3992 terjadi anjlok 5 As pada rangkaian KA barang 3992 Linggapati di KM 389+426 jalur hulu Muaraenim (Me) - Muaragula (Mrl) DIVRE III Palembang.

d. **Anjlokan Kereta barang (Barapati) batu bara:**

Pada tanggal 29 Juli 2025 pukul 03:40 WIB terjadi anjlok 2 As pada rangkaian KA barang 3106 (Barapati/Isian) di KM 377+821 jalur hulu Ujanmas (Ujm) - Penanggiran (Png) DIVRE III Palembang.

e. **Anjlokan Kereta Penumpang (Argo Bromo Anggrek) pada Emplasement Stasiun Pegaden Baru:**

Pada tanggal 1 Agustus 2025 pukul 15:47 WIB terjadi anjlok 5 kereta pada rangkaian KA penumpang Argo Bromo Anggrek di emplasemen Stasiun Pegaden Baru DAOP 3 Cirebon.

f. **Anjlokan kereta penumpang Commuter Line di emplasemen Stasiun Jakarta Kota:**

Pada tanggal 5 Agustus 2025 pukul 07:17 WIB terjadi anjlok 3 As pada rangkaian KA 1189 *Commuter Line* di emplasemen Stasiun Jakarta Kota DAOP 1 Jakarta.

g. **Anjlokan Kereta penumpang Kuala Stabas:**

Pada tanggal 5 Agustus 2025 pukul 16:29 WIB terjadi anjlok 2 As pada rangkaian kereta penumpang S5 Kuala Stabas di KM 141+2 jalur hilir Negeriagung - Tulungbuyut DIVRE IV Tanjungkarang.

h. **Anjlokan Kereta penumpang KA 1689 Commuter Line Rangkasbitung – Tanah Abang**

Pada tanggal 22 Oktober 2025 terjadi anjlok di KM 79+330 s/d 79+291 Emplasemen Stasiun Rangkasbitung

i. **Anjlokan Kereta penumpang KA Purwojaya:**

Pada tanggal 25 Oktober 2025 terjadi anjlok di KM 55+9 Jalur Hulu antara Stasiun Kedunggedeh – Stasiun Lemahabang

j. **Anjlokan Kereta Barang Aksa Cargo:**

Pada tanggal 19 November 2025 terjadi anjlok KA barang Aksa Cargo relasi Kalimas - Tanjung Priok di KM 0+.378 petak jalan Mesigit - Surabaya Pasarturi.

Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan keselamatan perkeretaapian pada Tahun 2025 diantaranya:

a. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi kelaikan prasarana, sarana dan kompetensi SDM perkeretaapian dengan rincian:
   - Pengujian prasarana perkeretaapian sebanyak 287 unit dan 421,948 km dengan sertifikasi prasarana perkeretaapian sebanyak 95 sertifikat jalur dan bangunan serta sertifikasi fasilitas operasi;
   - Pengujian sarana perkeretaapian sebanyak 13.836 unit serta sertifikasi sebanyak 12.513 sertifikat;
   - Pengujian SDM perkeretaapian sebanyak 9.310 orang dengan sertifikasi sebanyak 8.271 sertifikasi.

b. Pengawasan kondisi prasarana dan sarana perkeretaapian diantaranya melalui inspeksi keselamatan oleh inspektur perkeretaapian termasuk pengawasan oleh Satuan Pelayanan masing-masing wilayah Balai Teknik Perkeretaapian.

c. Pelaksanaan *Rampcheck* sarana perkeretaapian guna mendukung operasional angkutan lebaran, Idul Adha (liburan sekolah), dan Nataru 2025/2026

d. Pengawasan keselamatan perkeretaapian secara periodik dan tindaklanjut rekomendasi keselamatan diantaranya:
   - Surat Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta nomor: KA.201/1/5/BTP-JKT/2025 tanggal 28 Februari 2025 perihal Penyampaian Laporan Aspek Keselamatan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta.
   - Surat Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung nomor: KA.201/1/2/BTP-BDG/2025 tanggal 28 Februari 2025 perihal Penyampaian Laporan Aspek Keselamatan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung.
   - Surat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) nomor: KS.101/IX/2/KA-2025 tanggal 11 September 2025 perihal Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Penilaian Sistem Keselamatan Perkeretaapian Sarana Kereta New Generation.

- Surat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) nomor: KC.207/IX/3/KA-2025 tanggal 2 September 2025 perihal Tindak Lanjut PT Kereta Api Indonesia (Persero) Atas Rekomendasi Keselamatan Kejadian KA 1 Argo Bromo Anggrek di Emplasemen Stasiun Pegadenbaru, Daop 3 CirebonTanggal Kejadian 1 Agustus2025.

e. Pelaksanaan pemantauan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) kepada Badan Usaha Perkeretaaoian meliputi :

- Surat PT MRT Jakarta (Perseroda) nomor: 454/BOD-MRT/KK.01 tanggal 1 Juli 2025 perihal Laporan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian Penyelenggara Perkeretaapian PT MRT Jakarta
- Surat PT LRT Jakarta nomor: 021/DRU/110/VI/2025 tanggal 31 Juli 2025 perihal Laporan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian Penyelenggara Perkeretaapian PT LRT
- Surat PT Railink nomor: RL/DIR/715/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Pra-Audit Internal Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) Tahun 2024
- Surat PT Angkasa Pura Indonesia nomor: API.3982/KB.02.11/2025/HO-B tanggal 6 Agustus 2025 perihal Laporan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) PT Angkasa Pura Indonesia

f. Pemantauan tindak lanjut rekomendasi peningkatan keselamatan perkeretaapian yang dihasilkan antara lain :

- Penyampaian Tindak Lanjut Pelaksanaan Relokasi Bangunan Gardu JPL 184 Km 80+350 Petak jalan Rangkasbitung – Jambu Baru melalui surat Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta nomor: UM.207/3/25/BTP-JKT/2025 tanggal 5 Maret 2025 perihal acara pendinasan gardu JPL 184 beserta pintu perlintasan.
- Surat Kepala Balai Tkenik Perkeretaapian Kelas I Bandung nomor; KA.401/2/17/BTP-BDG/2025 tanggal 5 November 2025 perihal Penyampaian Tindak Lanjut Surat Rekomendasi Pengoperasian JPL di Wilayah BTP Kelas I Bandung.

- Surat Kepala Dinas Kabupaten Karawang Nomor: 500.11.28/2300/Dishub Hal Tindak Lanjut Surat Rekomendasi Keselamatan Pembangunan Pos Jaga dan Pemasangan Pintu Perlintasan di Wilayah Kabupaten Karawang.

g. Pelaksanaan *Safety Assessment* dan pemantauan tindaklanjutnya antara lain :

- Surat Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta nomor: KA.605/1/14/BTP-JKT/2025 tanggal 22 Juli 2025 perihal Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Penilaian Sistem Keselamatan (*Safety Assesment*) Pekerjaan Peningkatan Stasiun Tanah Abang (Tahap I)
- Surat Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang nomor: KA.402/1/4/BTP -SMG/2025 tanggal 10 September 2025 perihal Tindak Lanjut Hasil Penilaian Sistem Keselamatan (Safety Assesment)
- Surat Balai Teknik Perkeretaapian kelas I Jakarta nomor: KA.403/1/10/BTP-JKT/2025 tanggal 23 Juli 2025 perihal Penyampaian Tindak Lanjut hasil Penilaian Sistem Keselamatan (Safety Assessment) Peningkatan Pekerjaan Fasilitas Operasi (Gardu Traksi) Jakarta Kota - Tanjung Priok Tahap 1

h. Penyampaian himbauan keselamatan mengacu pada hasil Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko (IBPPR), termasuk pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi keselamatan perkeretaapian

i. Evaluasi Manajemen Tanggap Darurat dan pemantauan tindaklanjutnya antara lain :

- Surat PT. Kereta Api Indonesia (persero) DIVRE III Palembang nomor: KS.202/VI/1/DV.3-2025 tanggal 2 Juni 2025 perihal Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Manajemen Tanggap Darurat PT. Kereta Api Indonesia (persero) DIVRE III Palembang.
- Surat PT Kereta Api Indonesia (persero) Daop 6 Yoyakarta nomor : KS.202/VI/7/DO.6-2025 tanggal 13 Juni 2025 perihal Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Manajemen Tanggap Darurat PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 6 Yogyakarta.

- Surat PT Kereta Api Indonesia nomor: KS.202/VIII/1/DO.2-2025 tanggal 15 Agustus 2025 perihal Penyampaian Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Ketanggapdaruratan Perkeretaapian terkait Kesiapsiagaan Peralatan Pengaganan Kecelakaan Kereta Api dalam menghadapi Keadaan Darurat
- Surat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) nomor: KS.202/VII/1/DV.1-2025 tanggal 14 Juli 2025 perihal Tanggapan Penyampaian Hasil dan Permintaan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Manajemen Tanggap Darurat PT Kereta Api Indonesia di Divrel Sumatera Utara oleh DJKA.

j. Peningkatan kompetensi SDM regulator melalui bimbingan teknis/pelatihan bidang keselamatan perkeretaapian untuk mendukung pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian.

Selain itu, juga terdapat beberapa kendala/permasalahan yang perlu penyelesaian diantaranya:

a. Adanya bencana alam/*force major* di wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat sehingga menyebabkan beberapa ruas prasarana/jalur perkeretaapian rusak
b. Keterbatasan anggaran akibat efisiensi untuk penanganan daerah rawan kecelakaan dan bencana alam/longsoran/amblesan serta keterbatasan dukungan anggaran pengawasan terhadap kondisi dan perawatan prasarana/sarana perkeretaapian.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain pelaksanaan pengujian, sertifikasi dan inspeksi keselamatan yang memiliki hubungan kerja dengan badan usaha penyelenggara prasarana/sarana/ operator perkeretaapian. Selain itu, juga dilakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait penyelesaian kendala keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi anggaran dengan relaksasi khususnya untuk kegiatan pendukung keselamatan transportasi perkeretaapian.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target kinerja tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan dan pelaksanaan penanganan risiko terhadap kegiatan

pendukung IKP yang dilakukan secara berkala/triwulan. Berdasarkan profil risiko unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025, terdapat 16 risiko yang diidentifikasi dari 3 proses bisnis terkait IKP tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian. Dari 16 risiko tersebut, terdapat 11 risiko yang penilaiannya di atas selera risiko dan memerlukan penanganan risiko dimana telah direncanakan 18 kegiatan penanganan risiko pada Tahun 2025.

Pada Tahun 2025, penanganan risiko telah terealisasi sebanyak 18 kegiatan atau sebesar 100% dari target 18 rencana penanganan. Adapun rincian realisasi rencana penanganan risiko yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Persiapan pembentukan BUPP;
2. Perbaikan tata kelola IMO;
3. Penyampaian surat himbauan terkait dengan kondisi cuaca ekstrim dan daerah rawan bencana (banjir dan longsor);
4. Koordinasi usulan program prioritas perawatan di lokasi yang rawan terjadi kegagalan sistem persinyalan;
5. Bersurat kepada badan usaha, Balai Teknik, Balai Pengelola untuk menginventaris prasarana yang belum disertifikasi guna selanjutnya sebagai dasar pengajuan pengujian kelaikan prasarana;
6. Menentukan jadwal/timeline pelaksanaan pengujian dam sertifikasi yang disepakati oleh Badan usaha;
7. Pengembangan metode pelaksanaan Bimtek dengan penerapan praktek di lapangan;
8. Koordinasi dengan operator terkait pelaksanaan pengujian dan sertifikasi sarana sesuai jadwal yang telah ditentukan termasuk melalui sistem TIK;
9. Melakukan monev ke perlintasan secara terpadu dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk memastikan perintasan sesuai dengan spesifikasi teknis;
10. Pengoptimalan modul database perlintasan sebidang guna penyamaan data kondisi/status dan rekomendasi peningkatan keamanan perlintasan sebidang yang dapat digunakan oleh stakeholder terkait (Kemendagri, Pemda, PUPR, badan usaha/operator, dll);
11. Monitoring tindak lanjut terhadap pemantauan kondisi prasarana akibat cuaca ekstrim dan daerah rawan;

12. Koordinasi penggunaan TIK/integrasi data dalam peningkatan pengawasan prasarana;
13. Monitoring balai/satpel termasuk di lokasi titik interface antara persinyalan mekanik dan elektrik;
14. Peningkatan sistem persinyalan dari mekanik ke elektrik;
15. Melakukan pengawasan terhadap tim teknis di lapangan;
16. Monitoring pemenuhan data dukung sertifikasi;
17. Melakukan reviu secara berjenjang terhadap hasil pengujian guna minimalisir ketidakvalidan/kesalahan hasil uji;
18. Penyampaian surat kepada operator/badan usaha terkait sertifikasi sarana

Tabel 2- 24 Realisasi Penanganan Risiko IKK Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian s.d Triwulan IV 2025

No	Proses Bisnis	Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)					
			Risiko	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	TW III	TW IV	Kumulatif (s.d TW IV)	%
1	Pengelolaan Keselamatan Perkeretaapian	6	6	10	2	1	1	6	10	100,00
2	Keselamatan dan Keamanan Bidang Prasarana Perkeretaapian	3	3	6	1	1	1	3	6	100,00
3	Keselamatan dan Keamanan Bidang Sarana Perkeretaapian	7	2	2	1	0	0	1	2	100,00
Jumlah		**16**	**11**	**18**	**4**	**2**	**2**	**10**	**18**	**100,00**

Pada tahun 2025, terdapat 4 keterjadian peristiwa risiko terkait IKK tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian yaitu:

Tabel 2- 25 Keterjadian Peristiwa Risiko IKK Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Tahun 2025

No	Risiko	Penyebab	Frekuensi Kejadian	Pemicu Peristiwa
1	Kondisi jalur kereta api tidak sesuai spesifikasi teknis/rusak/rel aus/putus	• Kondisi prasarana/jalur kereta api	2 kejadian	• Kondisi prasarana/jalur kereta api
2	Kegagalan sistem persinyalan, serta	• Kemungkinan kegagalan sistem peralihan (wesel) atau sinyal. Posisi saat ini dalam investigasi untuk mengetahui penyebab pasti dari insiden ini.	1 kejadian	• Kemungkinan kegagalan sistem peralihan (wesel) atau sinyal. Posisi saat ini dalam investigasi untuk mengetahui penyebab pasti dari insiden ini.

No	Risiko	Penyebab	Frekuensi Kejadian	Pemicu Peristiwa
3	Tidak terpenuhi kebutuhan sarana milik negara dalam pelaksanaan pengawasan/ inspeksi/ lainnya.	• Pihak ketiga tidak memiliki progres tindak lanjut yang signifikan sebagai bagian dari proses penyelesaian paket Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) *unit Railways Crane* untuk Wilayah Sumatera Selatan (MYC 2022 – 2024).	1 kejadian	• Berdasarkan hasil pemantauan atas rencana penyelesaian yang diajukan oleh Pihak ketiga, PPK menilai bahwa Pihak ketiga gagal dengan tidak mencapai prestasi pekerjaan sesuai kesepakatan, serta telah diberikan surat peringatan pertama dan kedua; • Berdasarkan *show cause meeting* ketiga pada tanggal 27 Agustus 2025, bahwa PPK tidak mendapatkan keyakinan yang cukup dari Pihak ketiga untuk dapat menyelesaikan pekerjaan sampai akhir kontrak tanggal 31 Agustus 2025.
4	Terjadinya longsoran/penu runan tanah di lokasi jalur kereta api	• Cuaca ekstrem/ banjir/ tanah longsor yang terjadi di wilayah Sumatera Utara.	kejadian	• Cuaca ekstrem/ banjir/ tanah longsor yang terjadi di wilayah Sumatera Utara

3. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

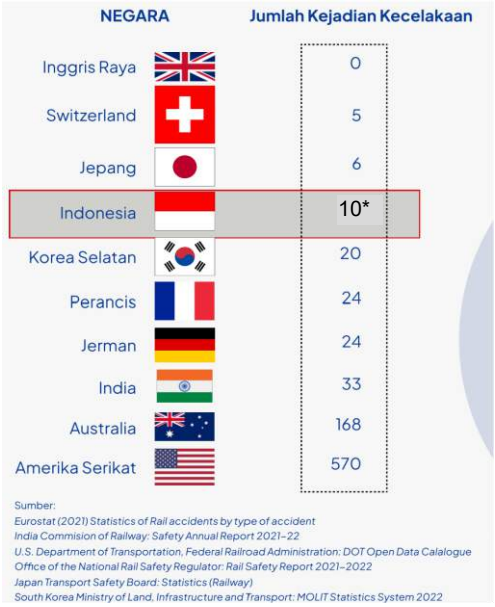
Jumlah kejadian kecelakaan dilakukan perbandingan dengan beberapa negara lain mengacu pada publikasi Pemerintah Amerika Serikat dan Belgia dengan kejadian kecelakaan kereta api yang dihitung berupa *derailment* (anjlokan) dan *collision* (tabrakan). Dikarenakan keterbatasan data *benchmarking*, perbandingan kinerja dilakukan antara data beberapa negara lain periode Tahun 2024 dengan data Indonesia periode Tahun 2025. Berdasarkan data tersebut, diperoleh bahwa kejadian kecelakaan kereta api di Indonesia masih jauh lebih rendah dibandingkan Amerika Serikat namun lebih tinggi dibandingkaan dengan Belgia. Demikian juga apabila mempertimbangkan panjang jalur kereta api, maka kinerja Indonesia masih lebih baik dari Amerika Serikat namun lebih buruk dari Belgia.

Tabel 2- 26 Kejadian Kecelakaan Perkeretaapian

No	Negara	Panjang Jalur KA (Km)	Kejadian Kecelakaan	Jumlah Kecelakaan/ Panjang Jalur KA
1	Amerika Serikat	148.574	498	0,0034
2	Belgia	8.298	1	0,0001
3	Indonesia	6.936	10	0,0014

Sumber No.1 : Website U.S. Department of Transportation
Sumber No.2 : Portal Open Data Infrabel

Mengacu beberapa sumber lain, juga diperoleh perbandingan jumlah kejadian kecelakaan KA dengan beberapa negara sebagaimana Gambar berikut.



*Keterangan: *) kinerja Indonesia Tahun 2025 dibandingkan kinerja negara lain 2021-2024*

Gambar 2-7 Perbandingan Jumlah Kejadian Kecelakaan KA dengan Beberapa Negara

Selain itu, juga dilakukan perbandingan kinerja di level nasional dengan sub sektor transportasi lainnya yaitu transportasi laut dan udara pada Triwulan III Tahun 2025. Untuk transportasi laut sampai dengan periode Triwulan III Tahun 202 diperoleh jumlah kejadian kecelakaan sebanyak 80 kejadian dan dibandingkan dengan jumlah Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebanyak 957.003 keberangkatan sehingga diperoleh tingkat keselamatan sebesar 99,991%. Sedangkan untuk transportasi udara diperoleh nol kejadian kecelakaan (*zero accident*) dan dibandingkan dengan jumlah keberangkatan penerbangan pesawat sebanyak 158.531 keberangkatan sehingga diperoleh tingkat keselamatan sebesar 100,00%.

Berdasarkan data di atas, maka diperoleh kinerja tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian masih lebih rendah dibandingkan transportasi laut dan udara sehingga diperlukan upaya peningkatan keselamatan perkeretaapian yang lebih intensif sesuai dengan faktor penyebab terjadinya kecelakaan kereta api (khususnya anjlokan).

4. Upaya Peningkatan Kinerja

Upaya peningkatan kinerja terhadap rasio kejadian kecelakaan kereta api pada periode berikutnya diantaranya:

a. Melanjutkan pengawasan keselamatan perkeretaapian secara periodik sebagai regulator, termasuk pelaksanaan inspeksi/pemeriksaan/ *rampcheck* guna memastikan kehandalan sarana dan prasarana dalam mendukung penyelenggaraan angkutan Lebaran Tahun 2026.
b. Pelaksanaan verifikasi Tindak Lanjut Hasil Audit SMKP Penyelenggara Perkeretaapian di PT KAI Divisi LRT Jabodebek;
c. Pelaksanaan kegiatan observasi dokumen dan tinjauan lapangan untuk Penilaian Sistem Keselamatan Perkeretaapian Prasarana;
d. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi SDM, Sarana dan Prasarana Perkeretaapian;
e. Identifikasi daerah rawan bencana alam dengan kondisi cuaca ekstrim di beberapa wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian serta menugaskan Satuan Pelayanan untuk melakukan pengawasan intensif termasuk koordinasi penyelesaian penanganan rintang jalan/amblesan dan penggantian jembatan yang kritis yang telah terdampak.
f. Koordinasi persiapan penyelenggaraan IMO Tahun 2026 yang kemungkinan terdampak kebijakan penghematan anggaran.
g. Percepatan penanganan prasarana yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat

Selain itu, diusulkan juga beberapa hal penyesuaian terhadap strategi/kebijakan, aktivitas/anggaran, serta penempatan jabatan/pegawai untuk mendukung pencapaian kinerja, diantaranya:

a. ***Penyesuaian Strategi/Kebijakan***:
    1) Pelaksanaan inspeksi/*rampcheck* kondisi prasarana dan sarana perkeretaapian sebagai persiapan penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2026 termasuk upaya pencegahan terjadinya risiko jalur kereta api tidak sesuai spesifikasi teknis/rusak/rel aus/putus dan kegagalan sistem persinyalan yang dapat berdampak pada kejadian kecelakaan kereta api;

2) Monitoring percepatan pelaksanaan perbaikan prasarana pasca bencana alam di wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat

b. Penyesuaian Aktivitas/Anggaran:

Antisipasi kegiatan pendukung peningkatan keselamatan yang terdampak kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) atau blokir dengan optimalisasi anggaran dan/atau pengusulan kembali pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2027.

c. ***Penyesuaian penempatan jabatan/pegawai***:

Penyesuaian penugasan inspektur prasarana dan sarana perkeretaapian serta anggota Satuan Pelayanan pada masing-masing wilayah Balai Teknik Perkeretaapian berdasarkan kompetensi dalam pelaksanaan pengawasan/inspeksi keselamatan perkeretaapian.

Kinerja tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian diharapkan dapat semaksimal mungkin menghasilkan *outcome* sebagai berikut:

a. Peningkatan keselamatan perjalanan angkutan penumpang, dimana penumpang dapat merasa lebih aman dan nyaman selama perjalanan dengan meminalkan risiko kecelakaan.
b. Peningkatan kepercayaan publik, dimana masyarakat akan lebih cenderung memilih kereta api sebagai moda transportasi yang handal dan selamat.
c. Peningkatan produktivitas dan efisiensi pelayanan angkutan kereta api, dimana diketahui kejadian kecelakaan akan mengakibatkan jalur kereta api tidak dapat dilalui sehingga menganggu operasional kereta api dan mengakibatkan keterlambatan perjalanan kereta api. Selain itu, juga berbanding lurus dengan minimnya anggaran yang diperlukan guna perbaikan prasarana dan sarana kereta api sehingga terjadi penghematan biaya pemeliharaan dan perbaikan operasional kereta api.

2.2.4 MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Pencapaian kinerja tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu instansi pemerintah telah mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam aspek tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Persentase ini bisa digunakan untuk mengevaluasi akuntabilitas, efektivitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pencapaian kinerja tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian diperoleh dari rata-rata persentase tingkat pencapaian kinerja yang mencakup Nilai Evaluasi AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian dan Nilai Kualitas ASN. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi terakhir), pencapaian kinerja tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian ditargetkan sebesar 100,000% pada Tahun 2025. Adapun uraian target sebagaimana Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-27 Uraian Target Triwulanan IKP Persentase Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Per-Komponen Penilaian Tahun 2025

No	Komponen Penilaian	Target							
		TW 1		TW 2		TW 3		TW 4	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
1	Nilai AKIP	-	-	-	-	-	-	83,000	100,000
2	Nilai Kinerja Anggaran	43,043	53,140	46,348	57,220	57,510	71,000	84,000	100,000
3	Perolehan PNBP	286,655M	23,000	311,582M	25,000	1.109,230M	89,000	1.997,792M	100,000
4	Nilai Kualitas ASN	-	-	-	-	-	-	89,000	100,000
Rata-Rata Target		**19,035%**		**20,555%**		**40,000%**		**100,000%**	

Data dukung perhitungan pada Lampiran 5.



	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
AKIP	-	-	-	100,000%
NKA	53,140%	57,220%	71,000%	100,000%
PNBP	23,000%	25,000%	89,000%	100,000%
Kualitas ASN	-	-	-	100,000%
Rata2 Target	19,035%	20,555%	40,000%	100,000%

Gambar 2-8 Uraian Target Triwulanan IKP Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Per-Komponen Penilaian Tahun 2025

Tingkat Pencapaian Nilai AKIP

Evaluasi AKIP dilakukan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Variabel-variabel dalam LKE tersebut, diuraikan sebagai berikut:

1. ***Komponen*** terdiri dari Perencanaan Kinerja (bobot 30), Pengukuran Kinerja (bobot 30), Pelaporan Kinerja (bobot 15), dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (bobot 25).
2. ***Sub-komponen*** dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen.
3. ***Kriteria*** merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap subkomponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

Pada Tahun 2025 ditetapkan target Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 83,000 dan pada Triwulan III (tanggal 15 s.d 18 Juli 2025) telah dilakukan evaluasi atas implementasi AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian oleh Tim Evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Evaluasi dilaksanakan dengan menggabungkan nilai LKE Instansi (Eselon I) dengan LKE Unit Utama dimana untuk LKE Unit Utama mengambil *sampling* pada 5 unit kerja diantaranya Direktorat Prasarana

Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya, dan Balai Pengujian Perkeretaapian yang kemudian dituangkan dalam bentuk nilai mulai dari 0 s.d 100. Berdasarkan surat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PS.302/5/4/ITJEN/2025 tanggal 20 Agustus 2025 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian, diperoleh bahwa hasil penilaian AKIP untuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 83,720 (Kategori A). Adapun detail hasil penilaian per komponen diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2-28 Perolehan Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian Per-Komponen Penilaian Tahun 2024-2025

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30,00	23,61	24,90
2	Pengukuran Kinerja	30,00	25,83	25,53
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,50	12,41
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	21,00	20,88
	Nilai Hasil Evaluasi		**82,95**	**83,72**
	Predikat		**A**	**A**

Dengan realisasi sebesar 83,720, maka diperoleh tingkat pencapaian kinerja Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 100,867% dari target Tahun 2025 sebesar 83,000 ***(Tingkat Pencapaian = 100,867%).***

Tingkat Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran (skala 0-100) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan perhitungannya merupakan penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, yang nilainya dapat diperoleh pada *Dashboard* Aplikasi Monev Kementerian Keuangan. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dikelompokkan pada kategori:

1. Lebih dari 90: Kategori Sangat Baik;
2. 80 - 90: Kategori Baik;
3. 60 - 80: Kategori Cukup;

4. 50 - 60: Kategori Kurang;
5. Kurang dari 50: Kategori Sangat Kurang.

Target Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 sebesar 84,000. Adapun realisasi Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2025 yang diperoleh melalui aplikasi Monev Kemenkeu sebesar 83,640 dengan rincian:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: 83,970;
2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran: 83,300.

Dengan realisasi sebesar 83,640, maka diperoleh tingkat pencapaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 sebesar 99,571% dari target Tahun 2025 sebesar 84,000 ***(Tingkat Pencapaian = 99,571%).***

Tingkat Pencapaian Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Tingkat pencapaian realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar realisasi penerimaan PNBP dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi terakhir), target PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 sebesar Rp1.997.791.885.590,00. Berdasarkan data pada aplikasi SPAN dan SIMPONI Kementerian Keuangan, diperoleh realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2025 sebesar Rp2.022.678.845.172,00.

Adapun rincian realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2025 berdasarkan jenis pendapatannya sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 2- 29 Realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

No	Jenis Pendapatan		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	**Pendapatan Fungsional (Sesuai PP No.15 Tahun 2016)**		**1.527.281.469.733**	**1.528.474.226.901**	**100,078**
	a.	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	629.174.132	776.881.300	123,476
	b.	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Perhubungan	3.255.380.000	3.935.430.000	120,890
	c.	Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/*Track Access Charge*	1.519.124.995.601	1.519.124.995.601	100,000
	d.	Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	4.271.920.000	4.636.920.000	108,544

No	Jenis Pendapatan		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2	**Pendapatan BLU**		**76.718.817.485**	**87.630.587.915**	**114,223**
	a.	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	73.648.552.635	81.868.115.275	111,161
	b.	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	1.108.409.547	1.939.210.772	174,954
	c.	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	1.528.440.317	2.110.837.905	138,104
	d.	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	276.350.000	1.146.750.800	414,963
	e.	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	1.100.000	361.900.000	32.900
	f.	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	2.075.037	2.075.037	100,000
	g.	Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	1.578.799	1.578.799	100,000
	h.	Pendapatan Lain-Lain BLU	152.311.150	200.119.327	131,388
3	**Pendapatan Non Fungsional**		**393.791.598.372**	**406.574.030.356**	**103,246**
	a.	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	836.938.500	837.800.500	100,103
	b.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	26.846.194.948	26.846.194.948	100,000
	c.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	87.706.792.667	87.911.079.667	100,233
	d.	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	26.630.675.737	26.709.886.737	100,297
	e.	Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin	-	-	-
	f.	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	4.087.950.999	10.980.723.262	268,612
	g.	Pendapatan Denda Lainnya	90.322.315.495	90.322.315.495	100,000
	h.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	3.942.059	3.942.059	100,000
	i.	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	98.150.223.864	102.986.905.461	104,928
	j.	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	55.895.276.873	55.897.345.245	100,004
	k.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	3.311.287.230	4.077.836.982	123,150
Jumlah			**1.997.791.885.590**	**2.022.678.845.172**	**101,246**

Dengan realisasi sebesar Rp2.022.678.845.172,00, maka diperoleh tingkat pencapaian kinerja PNBP Tahun 2025 sebesar 101,246% dari target Tahun 2025 sebesar Rp1.997.791.885.590,00 ***(Tingkat Pencapaian = 101,246%)***.

Tingkat pencapaian Indeks Profesional ASN

Untuk mengetahui dan memetakan kualitas ASN, pengukuran Nilai Kualitas ASN dilakukan dengan mengadopsi metodologi perhitungan Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran ini bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai tingkat kualitas ASN berdasarkan kriteria standar yang mencakup kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas jabatan.

Hasil pengukuran Nilai Kualitas ASN diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan peta kualitas ASN serta rujukan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN secara lebih terarah. Selain itu, pengukuran ini juga berfungsi sebagai instrumen pendukung dalam peningkatan kualitas manajemen SDM serta kontribusi terhadap peningkatan nilai Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Nilai Kualitas ASN dikelompokkan pada kategori:

1. 91 – 100: Kategori Sangat Tinggi;
2. 81 – 90: Kategori Tinggi;
3. 71 – 80: Kategori Sedang;
4. 61 – 70: Kategori Rendah;
5. 60 ke bawah: Kategori Sangat Rendah.

Penilaian kualitas ASN terdiri dari 4 aspek utama yang pengukurannya dilakukan secara mandiri dengan rincian:

1. ***Aspek disiplin (bobot 5%),*** diukur dari jumlah ASN yang tidak diberikan hukuman disiplin dibandingkan dengan total ASN Ditjen Perkeretaapian;
2. ***Aspek kualifikasi (bobot 25%),*** diukur berdasarkan kualifikasi pendidikan formal ASN yang diperoleh dari database internal/aplikasi SIK;
3. ***Aspek kinerja (bobot 30%),*** diukur dari rata-rata penilaian kinerja individu ASN berdasarkan SKP yang diperoleh dari aplikasi e-Kinerja;
4. ***Aspek kompetensi (bobot 40%),*** diukur dari jumlah ASN yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian (teknis dan umum/manajerial) dibandingkan dengan jumlah total ASN Ditjen Perkeretaapian.

Pada Tahun 2025 ditargetkan Nilai Kualitas ASN sebesar 89,000. Adapun realisasi pada Tahun 2025 mengacu pada hasil penilaian yang dilakukan oleh Biro SDM dan Organisasi pada tanggal 29 November 2025, diperoleh nilai akhir

kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 86,090 dari nilai 100 atau kategori ”Tinggi”. Nilai tersebut secara bertahap mengalami peningkatan dari di setiap periodenya yakni sebesar 64,36 pada Triwulan I, 82,09 pada Triwulan II, dan 85,18 pada Triwulan III. Dengan realisasi sebesar 86,09, diperoleh capaian kinerja sebesar 96,73% dari target Tahun 2025 sebesar 89,00. Rincian perubahan/peningkatan Nilai Kualitas ASN pada Triwulan I s.d Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2-30 Monitoring Indeks Profesional ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

No	Kriteria	Bobot	Triwulan I (7 Mar 2025)	Triwulan II (26 Jun 2025)	Triwulan III (23 Sep 2025)	Triwulan IV (29 Nov 2025)
1	Kualifikasi	25,00	23,73	23,47	23,50	23,56
2	Kompetensi	40,00	18,74	28,93	30,38	31,12
3	Kinerja	30,00	17,48	25,16	26,30	26,41
4	Disiplin	5,00	4,99	4,99	5,00	5,00
Nilai Kualitas ASN			**64,36**	**82,09**	**85,18**	**86,09**

Dengan realisasi sebesar 86,090, maka diperoleh tingkat pencapaian kinerja kualitas ASN Tahun 2025 sebesar 96,730% dari target Tahun 2025 sebesar 89,000. ***(Tingkat Pencapaian = 96,730%)***.

Mengacu pada perolehan tingkat pencapaian kinerja dari masing-masing komponen penilaian di atas (AKIP, NKA, PNBP, Nilai Kualitas ASN), maka diperoleh realisasi persentase pencapaian tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2025 sebesar 99,604% yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

% Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	=	$(TP\ AKIPDJKA + TP\ NKADJKA + TP\ PNBP + TP\ ASNDJKA) / 4$ *(100,867% + 99,571% + 101,246% + 96,730%) / 4*

. Data dukung perhitungan pada Lampiran 5.

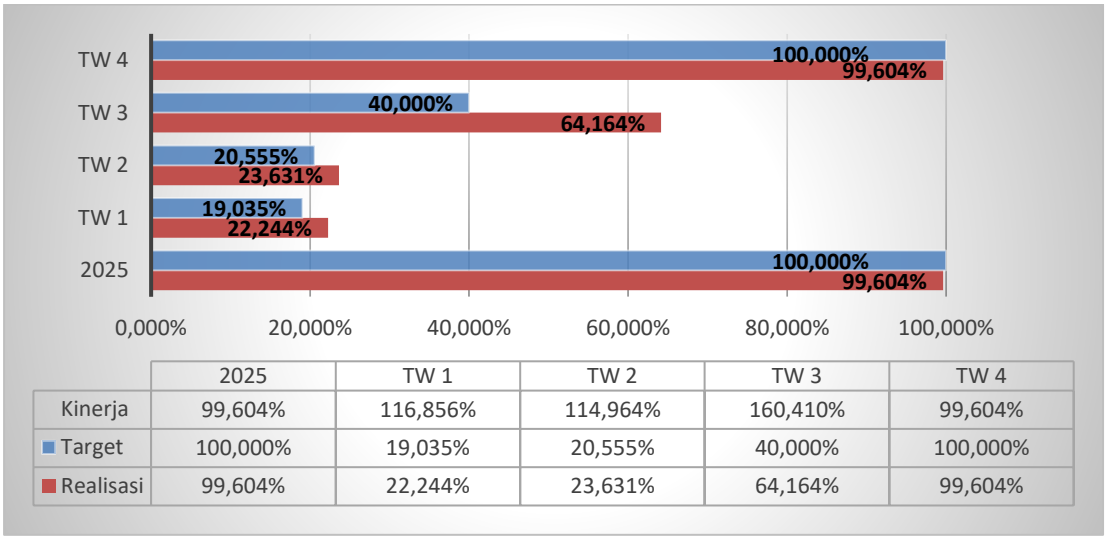
1. Perbandingan Target Triwulan dan Tahunan dengan Realisasi Kinerja

Dengan realisasi pencapaian kinerja tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar 99,604%, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 99,604% terhadap target Tahun 2025 sebesar 100,000%. Walaupun secara target tahunan belum terpenuhi, capaian kinerja Tahun 2025 tersebut

masih dalam kriteria *on the right track* (90-110%) diantaranya karena peningkatan signifikan pada pencapaian kinerja PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta pencapaian kinerja nilai AKIP yang melampaui target. Realisasi kumulatif per triwulan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 2-31 Capaian Kinerja Persentase Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Realisasi Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan (%)				Capaian Kinerja Tahunan (%)
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan	%	100,000	19,035	20,555	40,000	100,000	116,856	114,964	160,410	99,604	146,825	144,622	199,485	99,604	99,604



	2025	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Kinerja	99,604%	116,856%	114,964%	160,410%	99,604%
Target	100,000%	19,035%	20,555%	40,000%	100,000%
Realisasi	99,604%	22,244%	23,631%	64,164%	99,604%

Gambar 2-9 Capaian Kinerja Persentase Pencapaian Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Triwulan Tahun 2025

2. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan merupakan bagian strategi memperkuat prinsip-prinsip *good governance* di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efisien, dan profesional melalui pembenahan menyeluruh terhadap sistem manajemen kinerja, pengelolaan anggaran, pelayanan publik, serta kompetensi dan integritas aparatur sipil negara.

Pada Tahun 2025, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menunjukkan capaian yang belum optimal dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, ditandai dengan tidak tercapainya target pada dua dari

empat komponen penilaian, yaitu komponen NKA dan Nilai Kualitas ASN. Namun demikian, dua komponen lainnya, yakni nilai AKIP dan PNBP, menunjukkan capaian yang signifikan sehingga mampu menjaga capaian IKP tetap berada pada kriteria *on the right track* (90%-110%). Kondisi ini mengindikasikan bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah berada pada jalur yang tepat dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional, namun tetap memerlukan upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan khususnya pada komponen Nilai Kinerja Anggaran dan Nilai Kualitas ASN pada periode berikutnya.

Pemutakhiran data, peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kinerja, serta penguatan kompetensi ASN perlu terus menjadi fokus prioritas untuk memastikan pencapaian target pada periode berikutnya secara menyeluruh. Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja diantaranya:

a. Faktor penyelenggaraan SAKIP secara komprehensif:
    1) Penetapan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor KP-DJKA 144 Tahun 2025 termasuk penetapan seluruh Rencana Strategis masing-masing unit eselon II dan III mandiri (Balai) pada Desember 2025;
    2) Penetapan Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 162 Tahun 2025;
    3) Perencanaan dan penetapan target kinerja termasuk pada dokumen revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah disusun dengan memperhatikan realisasi kinerja Tahun 2024, arah kebijakan 2025-2029 berdasarkan Rencana Strategis, analisa mendalam diantaranya ketersediaan sumber daya (anggaran, SDM) termasuk telah dilakukan sinkronisasi target kinerja sub unit kerja (Bagian, Direktorat, Balai);
    4) Perencanaan kinerja unit kerja telah menjadi acuan dalam penyusunan PK berjenjang dan SKP masing-masing pegawai termasuk *update*/revisi dengan adanya penyesuaian struktur organisasi melalui

aplikasi e-Kinerja yang selanjutnya diacu dalam pelaporan kinerja pegawai setiap bulan;

5) Pada Laporan Monitoring Kinerja Triwulanan telah tercantum/dijelaskan seluruh informasi capaian kinerja mencakup tata cara perhitungan capaian kinerja, analisa keberhasilan/kegagalan, analisa penyesuaian kebijakan/strategi/kegiatan maupun anggaran, analisa hubungan kerja/*crosscutting* termasuk perbandingan di level nasional/internasional, perubahan budaya kinerja, analisa dukungan terhadap pencapaian target RPJMN 2025-2029, serta penjelasan keberadaan sumber data dukung capaian kinerja pada lampiran laporan;
6) Publikasi/*updating*/pembaharuan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja melalui e-SAKIP Reviu dan *website* Ditjen Perkeretaapian (*official*), diantaranya laporan monitoring kinerja triwulan serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 – 2029;
7) Koordinasi internal yang efektif terlihat dari pembahasan yang mengikutsertakan seluruh unit kerja terkait (Direktorat, Balai dan Bagian) dalam pengukuran dan pelaporan kinerja serta evaluasi internal yang sinergis;
8) Pelaksanaan evaluasi dan penilaian SAKIP Tahun 2025, meliputi penilaian mandiri di tingkat unit kerja yang dilanjutkan dengan evaluasi tingkat Eselon I serta Evaluasi Implementasi SAKIP Unit Eselon I Ditjen Perkeretaapian bersama Inspektorat Jenderal dengan hasil predikat “A” dan nilai meningkat dari Tahun sebelumnya (83,72);
9) Penyampaian surat tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian kepada Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan melaui surat Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor PS.306/1/2/DJKA/2025 tanggal 17 Oktober 2025.
10) Finalisasi dan penyampaian hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 pada 11 unit kerja *non-sampel* yang telah disesuaikan dengan rekomendasi hasil penilaian Inspektorat Jenderal pada 5 unit kerja *sampel*.

b. Faktor pengelolaan/pelaksanaan anggaran:
    1) Pelaksanaan relaksasi/buka blokir anggaran untuk mendukung kegiatan prioritas keselamatan, pemenuhan belanja pegawai serta penyelesaian kekurangan pembayaran (*backlog*) kegiatan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO) Tahun 2023 sebagai bentuk upaya menjamin keberlangsungan operasional perkeretaapian serta menjaga kesinambungan program strategis keselamatan dan pelayanan penyelenggaraan perkeretaapian;
    2) Pelaksanaan *tagging*/penandaan pada 52 Rincian *Output* (RO) Tahun 2025 yang termasuk dalam kategori SBKU sebagaimana diatur pada PMK Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2025;
    3) Efektivitas dan ketepatan pelaksanaan anggaran melalui penyusunan dan revisi DIPA, penyesuaian RPD, dan pelaporan *output* yang rutin/berkala dan tepat waktu;
    4) Kemampuan adaptasi terhadap efisiensi fiskal, menunjukkan bahwa organisasi harus fleksibel dan tetap menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai ketentuan.

c. Faktor optimalisasi PNBP:
    1) Secara bertahap telah dilakukan perbaikan tata kelola pelaksanaan PNBP TAC dan hal tersebut dapat dilihat dengan perolehan realisasi PNBP yang signifikan yang diperoleh dari pembayaran TAC periode Tahun 2024 serta pembayaran TAC Tahun 2025 sebanyak 2 Badan Usaha (Railink dan KCI). Adapun total penerimaan pembayaran TAC Tahun 2025 mencapai Rp1.519.124.995.601,00;
    2) Perolehan realisasi PNBP yang signifikan dari pembayaran sewa atas pemanfaatan aset/BMN termasuk adanya persetujuan dari instansi terkait seperti Kementerian Keuangan dalam pemanfaatan aset/BMN yang turut mempengaruhi realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

d. Faktor manajerial SDM:
    1) Penurunan nilai pada aspek kualifikasi dikarenakan penilaian di Tahun 2024 hanya mencakup pegawai PNS sedangkan penilaian di Tahun 2025 turut memperhitungkan pegawai PPPK (ASN secara keseluruhan) sehingga mempengaruhi nilai kualifikasi secara *aggregat*;
    2) Penurunan nilai pada aspek kompetensi dikarenakan terdapat pegawai yang belum melakukan unggah/*upload* data kompetensi Tahun 2024 dan 2025 ke aplikasi SIK Kementerian Perhubungaan berupa sertifikat/bukti dukung lain dari keikutsertaan pendidikan/pelatihan/ bimbingan teknis/sosialisasi/pelatihan lainnya sehingga mempengaruhi rendahnya nilai kompetensi;
    3) Penurunan nilai pada aspek kinerja dikarenakan terdapat 6 pegawai yang belum melakukan ”Terima Penilaian” pada aplikasi e-Kinerja Kementerian Perhubungaan terhadap penilaian kinerja individu Tahun 2024 serta terdapat 2 pegawai (PPPK) yang telah mengundurkan diri namun masih terdata di aplikasi SIASN BKN. Oleh karena itu, data kinerja ASN pada 8 pegawai belum terkonfirmasi dan nilai menjadi rendah (nol). Selain itu, terdapat 3 pegawai yang mendapat nilai kinerja di bawah kategori ”Baik” karena menerima hukuman disiplin yang mempengaruhi rendahnya perolehan nilai kinerja secara keseluruhan;
    4) Terdapat kendala dalam sinkronisasi data dari aplikasi SIK ke aplikasi SIASN BKN (gagal *post* data SKP/*error*) sehingga menghambat proses peningkatan nilai kualitas ASN.

e. Faktor tata laksana termasuk pemanfaatan teknologi/digitalisasi:
    1) Ketepatan dan ketertiban pelaporan melalui aplikasi seperti e-SAKIP Reviu, SAKTI, e-Monitoring, e-*Performance*, e-Kinerja, Portal Layanan DJKA dan lainnya menunjukkan bahwa sistem pelaporan yang terintegrasi dan disiplin administratif turut mempengaruhi pencapaian kinerja pada beberapa komponen penilaian;
    2) Kapasitas SDM dalam pengelolaan aplikasi/sistem informasi dimana minimnya pemahaman atau keterlambatan *input* oleh *admin* berdampak pada rendahnya nilai kualitas ASN dan organisasi termasuk pelaporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) baik secara internal maupun eksternal. Pada lingkup internal, hal ini tercermin dalam sinergi antara Direktorat, Bagian dan Balai dalam proses perencanaan dan pelaporan kinerja, serta pelaksanaan kegiatan strategis lainnya yang membutuhkan koordinasi lintas unit termasuk unit di lingkungan Kementerian Perhubungan seperti Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dan lainnya. Pada lingkup eksternal, kerja sama dan hubungan dengan instansi seperti Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, Bappenas, Badan Kepegawaian Nasional, Kementerian ATR/BPN, badan usaha dan lembaga terkait lainnya menjadi faktor krusial dalam mendukung keberhasilan kinerja diantaranya pensertifikatan aset, optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), integrasi dan sinkronisasi data kepegawaian, serta pemanfaatan aplikasi pelaporan kinerja keuangan dan organisasi. Kolaborasi ini menunjukkan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang berkualitas, efisien dan akuntabel.

Selain itu, dalam mendukung pencapaian target Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung IKP yang dilakukan secara berkala setiap Triwulan. Berdasarkan profil risko unit kerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025, terdapat 14 risiko yang dapat mengancam pencapaian target IKP tersebut dimana sebanyak 7 risiko diantaranya memerlukan penanganan risiko lanjutan dengan 11 rencana penanganan. Hingga akhir Tahun 2025, seluruh penanganan risiko telah terlaksana atau capaian sebesar 100,000% dari total 11 rencana penanganan risiko yang akan dilaksanakan. Rincian penanganan risiko yang telah dilaksanakan s.d akhir Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Percepatan/akselerasi proses pengadaan barang dan jasa pada awal tahun anggaran agar kegiatan prioritas dapat diselesaikan tepat waktu dengan *output* maksimal (sebanyak 2 realisasi rencana penanganan);
b. Melakukan percepatan proses revisi anggaran luncuran SBSN Tahun 2024 ke Tahun 2025 pada 11 kegiatan dengan dilengkapi data dukung sesuai PMK 107 Tahun 2024 (sebanyak 2 realisasi rencana penanganan);

c. Rapat pembahasan khusus mengenai sinkronisasi/penyelarasan kebijakan, strategi, sasaran dan indikator antara Renstra DJKA dengan Rensta unit kerja di atasnya (Renstra K/L dan RPJMN);
d. Melakukan koordinasi/asistensi intensif dengan Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan/Bappenas/Kementerian PANRB/Tim SAKIP;
e. Usulan penetapan Renstra/indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART;
f. Koordinasi identifikasi potensi penambahan perolehan PNBP termasuk dari pengoptimalan aset;
g. Percepatan penyesuaian/*update* regulasi terkait PNBP TAC;
h. Pemutakhiran RPD/Halaman III DIPA seluruh unit kerja secara berkala setiap triwulan;
i. Melakukan pelaporan realisasi *output* pada aplikasi SAKTI secara rutin dan berkala guna meningkatkan nilai rata-rata NKA Satker serta nilai efisiensi penggunaan anggaran.

Adapun rincian realisasi rencana penananan risiko yang telah dilakukan selama Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2-32 Realisasi Penanganan Risiko IKP Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

No	Proses Bisnis	Jumlah/ Populasi Risiko (Form 5)	Jumlah Penanganan Risiko (Form 8)		Realisasi Penanganan Risiko (Form 9)					
			Risiko	Kegiatan Penanganan	TW I	TW II	TW III	TW IV	Kumulatif (s.d TW IV)	%
1	Pelaksanaan Anggaran	3	3	6	0	4	0	2	6	100,00
2	Pengelolaan Kinerja Organisasi	5	2	3	0	0	3	0	3	100,00
3	Pengelolaan PNBP dan BLU	4	2	2	1	1	0	0	2	100,00
4	Pengembangan SDM	2	0							
Jumlah		**14**	**7**	**11**	**1**	**5**	**3**	**2**	**11**	**100,00**

Selama Tahun 2025, juga terdapat beberapa keterjadian peristiwa risiko terkait IKP Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan, diantaranya:

Tabel 2- 33 Keterjadian Peristiwa Risiko Pada IKP Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

No	Risiko	Penyebab	Frekuensi Kejadian	Pemicu Peristiwa
1	Tidak tercapainya nilai kinerja anggaran Ditjen Perkeretaapian	• Penyerapan anggaran dan capaian *output* rendah	2 Kejadian	• Blokir kebijakan efisiensi anggaran; • Terlambatnya pelaksanaan kegiatan sehingga berdampak terhadap penyerapan anggaran; • Rendahnya pencapaian *output* kegiatan; • Nilai kinerja perencanaan anggaran relatif rendah karena rendahnya penyerapan anggaran pada RO SBK (SBKK/SBKU)

3. Perbandingan Kinerja di Level Nasional/Internasional

Terkait analisa perbandingan dilakukan terhadap capaian dari seluruh komponen penilaian yaitu Nilai AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, perolehan PNBP dan Nilai Kualitas ASN. Untuk komponen Nilai AKIP, perbandingan kinerja dilakukan terhadap realisasi antar unit eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan mengacu pada surat Inspektur Jendeal Kementerian Perhubungan Nomor KP.904/5/22/ITJEN/2025 tanggal 24 September 2025 perihal Ikhtisar Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Untuk perbandingan kinerja pada komponen Nilai Kinerja Anggaran dan perolehan PNBP, dilakukan perbandingan terhadap realisasi antar unit eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan yang diperoleh dari aplikasi Monev Kemenkeu (terkait NKA) dan OMSPAN (terkait PNBP). Untuk perbandingan kinerja pada komponen Nilai Kualitas ASN diperoleh dari hasil monitoring penilaian yang dilakukan oleh Biro SDM dan Organisasi pada tanggal 29 November 2025. Adapun rincian perbandinganya sebagai berikut:

Tabel 2-34 Perolehan Nilai AKIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025

No	Unit Kerja	Capaian Kinerja per Komponen Tahun 2025				Penilaian Kinerja	
		Perencanaan Kinerja (30%)	Pengukuran Kinerja (30%)	Pelaporan Kinerja (15%)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	2025	2024
1	Sekretariat Jenderal	23,61	24,90	11,85	20,50	80,87	80,15
2	Inspektorat Jenderal	25,20	25,20	12,60	19,50	82,50	82,30
3	Ditjen Perhubungan Darat	25,47	24,87	12,93	19,88	83,16	82,69

No	Unit Kerja	Capaian Kinerja per Komponen Tahun 2025				Penilaian Kinerja	
		Perencanaan Kinerja (30%)	Pengukuran Kinerja (30%)	Pelaporan Kinerja (15%)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	2025	2024
4	Ditjen Perhubungan Laut	23,05	25,05	12,29	22,25	82,79	80,82
5	Ditjen Perhubungan Udara	23,07	24,60	13,01	20,13	80,80	80,79
6	**Ditjen Perkeretaapian**	**24,90**	**25,53**	**12,41**	**20,88**	**83,72**	**82,95**
7	Badan Kebijakan Transportasi	22,20	25,35	12,45	20,00	80,01	79,14
8	BPSDM Perhubungan	23,82	24,60	11,25	20,38	80,06	77,90
9	Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda	25,13	23,70	11,83	19,38	80,04	77,50

Tabel 2- 35 Realisasi NKA Per-Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025

No	Unit Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	Sekretariat Jenderal	94,52	97,81	96,17
2	Inspektorat Jenderal	84,91	100,00	92,46
3	Ditjen Perhubungan Darat	65,88	92,40	79,14
4	Ditjen Perhubungan Laut	86,72	95,55	91,14
5	Ditjen Perhubungan Udara	60,95	96,67	78,81
6	**Ditjen Perkeretaapian**	**83,97**	**83,30**	**83,64**
7	Badan Kebijakan Transportasi	98,18	98,35	98,27
8	BPSDM Perhubungan	93,66	95,21	94,44
9	Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda/BPTJ	94,14	95,88	95,01

Tabel 2-36 Realisasi PNBP Per-Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan Periode Tahun 2025

No	Unit Kerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Sekretariat Jenderal	3.510.000.000	4.006.918.397	114,16%
2	Inspektorat Jenderal	0	234.928.455	-
3	Ditjen Perhubungan Darat	1.403.542.549.000	1.267.812.919.320	90,33%
4	Ditjen Perhubungan Laut	5.339.533.810.000	6.557.883.593.488	122,82%
5	Ditjen Perhubungan Udara	1.834.852.348.000	2.150.566.966.443	117,21%
6	**Ditjen Perkeretaapian**	**1.246.326.325.000**	**2.022.678.845.172**	**162,29%**
7	Badan Kebijakan Transportasi	0	306.341.062	-
8	BPSDM Perhubungan	1.534.049.394.000	2.062.548.968.458	134,45%
9	Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda/BPTJ	13.770.000.000	5.986.269.332	43,47%

Untuk capaian nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 menduduki peringkat ke-7 dari 9 unit kerja eselon I dengan realisasi sebesar 83,640. Untuk itu, diperlukan upaya perbaikan/peningkatan komponen perencanaan dan pelaksanaan anggaran termasuk peningkatan penyerapan anggaran dan pencapaian *output* khususnya pada RO dengan kategori SBK baik SBKU maupun SBKK di periode berikutnya.

Untuk capaian perolehan PNBP antar unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan dari sisi capaian kinerja berdasarkan target yang ditetapkan pada DIPA Tahun 2025, diperoleh bahwa perolehan PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian menduduki peringkat ke-1 dari 9 unit kerja eselon I dengan persentase capaian sebesar 162,290% (realisasi sebesar Rp2.022.678.845.172,00 dari target Tahun 2025). Hal tersebut didorong dengan telah selesainya seluruh pembayaran TAC Tahun 2024 dari seuruh badan usaha/operator perkeretaapian yang terbayarkan pada Triwulan I-III Tahun 2025 serta pembayaran TAC Tahun 2025 dari 2 badan usaha/operator (KCI dan Railink), selanjutnya pencapaian ini perlu dipertahankan dan tetap melakukan peningkatan perolehan PNBP lainnya di periode beirkutnya.

Sedangkan untuk perolehan nilai kualitas ASN, diperoleh bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian menempati peringkat ke-4 dari 9 unit eselon I dengan perolehan Nilai Kualitas ASN sebesar 86,09. Hal tersebut menunjukan bahwa capaian Nilai Kualitas ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian masih perlu ditingkatkan apabila dibandingkan dengan unit kerja lainnya di lingkungan Kementerian Perhubungan, walaupun secara rata-rata sudah di atas nilai pada tingkat Kementerian Perhubungan.

4. Upaya Peningkatan Kinerja

Beberapa upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang diantaranya:

a. Penyesuaian strategi/kebijakan:

1) Melakukan persiapan penyelenggaraan SAKIP Tahun 2026 seperti penyusunan konsep SK Tim Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Tahun 2026 serta penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang dilengkapi dengan rencana aksi;

2) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SAKIP Tahun 2026 untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi seluruh pegawai masing-masing unit kerja;
3) Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (PSP BMN) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2026;
4) Koordinasi dan telaah terkait revisi penentuan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2026 untuk masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna memperoleh target PNBP yang valid/sesuai kemampuan dan potensi perolehan PNBP masing-masing unit kerja.

b. Penyesuaian aktivitas dan anggaran:

1) Melakukan penginputan manual dan capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2025 pada aplikasi SAKTI guna meningkatkan nilai kinerja perencanaan anggaran;
2) Melakukan *assessment* terhadap rincian *output* seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada aplikasi Monev Kemenkeu dalam rangka peningkatan kualitas data kinerja melalui pengisian informasi data pra-pelaporan;
3) Melakukan pemutakhiran/*update* data kinerja (sasaran, indikator dan target) pada aplikasi KRISNA-Renja sebagai upaya penyesuaian dan sinkronisasi data kinerja dengan dokumen Rencana Strategis;
4) Penyiapan *tools*/manual perhitungan nilai kualitas ASN mengingat di Tahun 2026 pelaksanaan penilaian/perhitungan dilakukan secara mandiri;
5) Penyiapan anggaran dan kegiatan Tahun 2026 untuk pelaksanaan kegiatan pendukung tata kelola pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

c. Penyesuaian organisasi/penempatan pegawai:

1) Lanjutan pembinaan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mencakup sosialisasi/*workshop*/bimbingan teknis terkait peningkatan disiplin dan kinerja kepegawaian implementasi penilaian kinerja pegawai dan organisasi sesuai kebijakan Kementerian PANRB terbaru;

2) Koordinasi intensif dengan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi serta Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Kementerian Perhubungan untuk penyiapan peraturan turunan dari Rancangan Peraturan Menteri PAN-RB tentang Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi, guna mendukung proses penyederhanaan Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian dan Inspektur Prasarana Perkeretaapian;
3) Pendampingan penyusunan kajian penataan organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta kajian *review* proses bisnis dan SOP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk mendukung penyelarasan kelembagaan dengan kebijakan reformasi birokrasi, meningkatkan kejelasan alur kerja dan pembagian peran antarunit kerja, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Adapun pencapaian target Tata Kelola Pemerintahan diharapkan dapat menghasilkan *outcome* sebagai berikut:

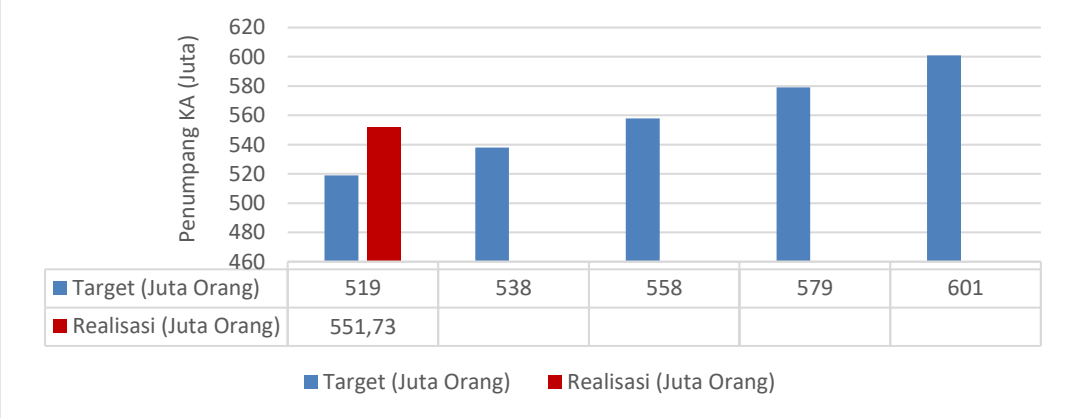
a. Peningkatan efektivitas organisasi, efisiensi penggunaan sumber daya, dan akuntabilitas pelayanan publik di sektor perkeretaapian;
b. Penguatan sistem manajemen kinerja dan pelaksanaan prinsip *good governance* melalui penerapan SAKIP yang semakin terintegrasi dan berkualitas;
c. Optimalisasi pengelolaan anggaran, penerimaan PNBP, serta pelaksanaan kegiatan prioritas yang mendukung peningkatan keselamatan dan layanan perkeretaapian;
d. Peningkatan profesionalisme, kompetensi, dan integritas ASN dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi hasil.

2.3 DUKUNGAN CAPAIAN INDIKATOR RPJMN 2025-2029

A. Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api

Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa pengguna transportasi perkeretaapian, Kementerian Perhubungan terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan diantaranya melalui Peningkatan Infrastruktur

perkeretaapian, Pengembangan KA Penumpang antar kota dan Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, jumlah penumpang angkutan kereta api telah mencapai 551,737 juta orang. Hal tersebut sekitar 106,31% dari target Tahun 2025 pada RPJMN sebesar 519 Juta penumpang. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin mempercayai kereta api sebagai moda transportasi utama yang aman dan nyaman. Namun terkait dengan kondisi saat ini, diperlukan dukungan Pemerintah dalam hal pemenuhan sarana perkeretaapian khususnya pada angkutan perintis (cadangan) dan *Public Service Obligation* (perkotaan), dimana sarana angkutan perintis yang ada saat ini belum memberikan layanan yang optimal kepada Masyarakat



Gambar 2- 10 Capaian Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api Periode Tahun 2025

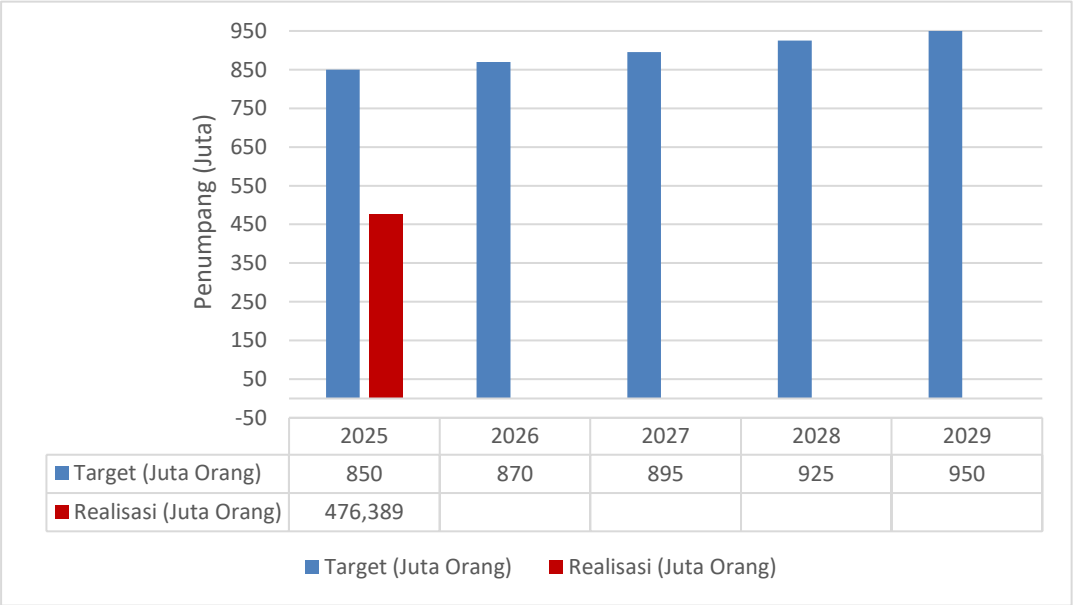
B. Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan Berbasis Rel dan Darat

Target dan capaian pada Tahun 2025 – 2029 merupakan gabungan dari angkutan perkotaan berbasis rel dan angkutan darat dengan target tahunan sebesar 850 juta penumpang. Adapun realisasi tahun 2025 untuk jumlah penumpang angkutan perkotaan berbasis rel di 10 kota metropolitan mencapai 476,389 juta penumpang atau 56,05% khusus untuk angkutan rel dari target keseluruhan (angkutan rel dan darat). Dengan rincian realisasi jumlah penumpang kereta perkotaan sebagai berikut:

1) Kereta perkotaan Jakarta realisasi sebanyak 432.724.177 penumpang;
2) Kereta perkotaan Bandung sebanyak 18.727.224 penumpang;

3) Kereta perkotaan Medan sebanyak 4.115.669 penumpang;
4) Kereta perkotaan Surabaya sebanyak 16.016.534 penumpang;
5) Kereta perkotaan Palembang sebanyak 4.626.481penumpang;
6) Kereta perkotaan Semarang sebanyak 179.696 penumpang.

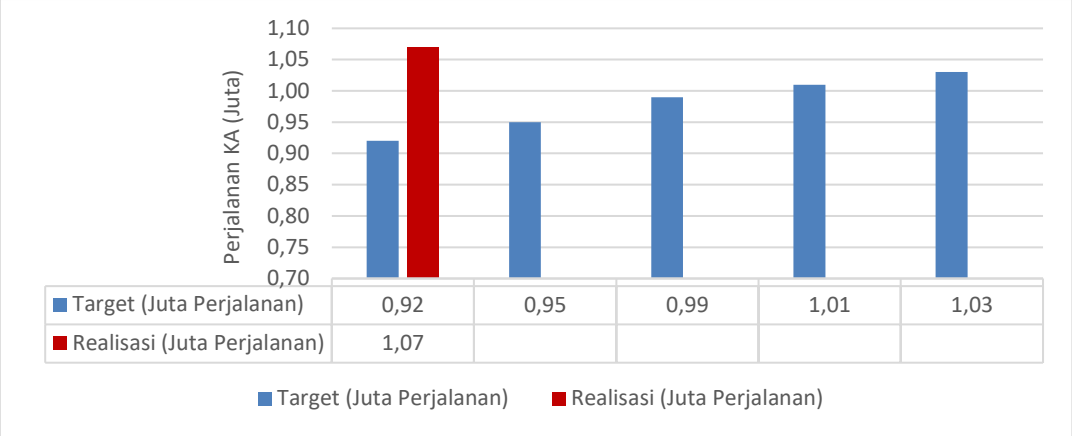
Hal tersebut menggambarkan cukup tingginya preferensi masyarakat perkotaan terhadap transportasi massal berbasis rel khususnya di wilayah perkotaan yang terus perlu diperkuat dari sisi layanan, frekuensi, dan integrasi. Direktorat Jenderal Perkeretaapian terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan fasilitas angkutan perkotaan yang memadai termasuk integrasi antar moda, penyelenggaraan subsidi keperintisan dan PSO serta kegiatan pembangunan/peningkatan prasarana perkeretaapian di wilayah Jawa, Sumatera dan Sulawesi.



Gambar 2- 11 Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan Berbasis Rel Tahun 2025

C. Jumlah Perjalanan Kereta Api

Dalam rangka memenuhi kebutuhan mobilisasi masyarakat, layanan perjalanan kereta api yang telah disediakan Ditjen Perkeretaapian sebesar 1,07 juta perjalanan atau sebesar 116,30%, dari target Tahun 2025 sebesar 0,92 juta perjalanan. Tercapainya target jumlah perjalanan kereta api salah satunya dipengaruhi tingginya mobilitas masyarakat terutama di wilayah Perkotaan dalam penggunaan transportasi massal kereta api.

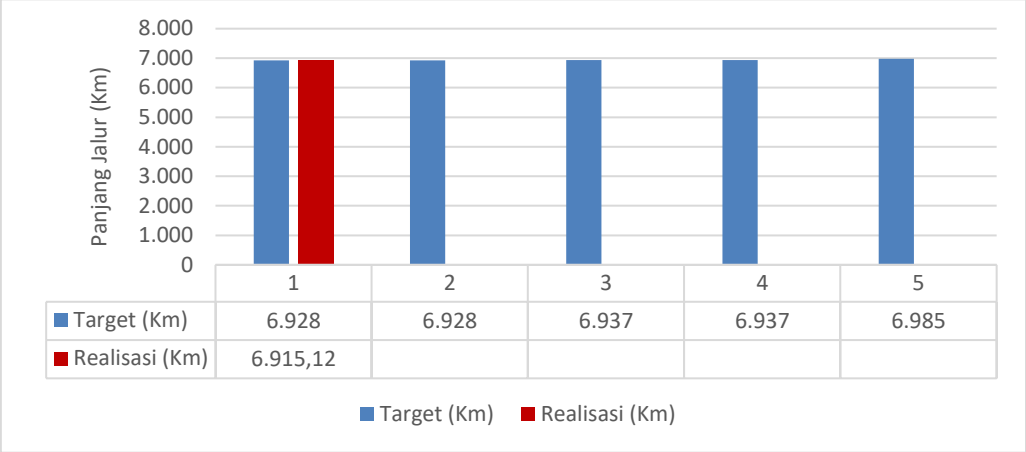


Gambar 2- 12 Capaian Jumlah Perjalanan Kereta Api Periode Tahun 2025

D. Panjang Jalur KA yang Beroperasi

Dalam rangka mendukung sasaran pembangunan konektivitas nasional dalam RPJMN tahun 2025-2029, Direktorat Jenderal Perkeretaapian memprioritaskan pembangunan infrastruktur perkeretaapian sebagai moda transportasi andalan baik wilayah perkotaan maupun antar kota. Berdasarkan RPJMN tahun 2025-2029 telah ditetapkan target panjang jalur kereta api yang beroperasi sepanjang 6.928 Km'sp dan realisasi sepanjang 6915,12 Km'sp atau capaian sebesar 99,81%. Terdapat sinkronisasi dan *updating* data panjang jalur dengan seluruh Balai Teknik Perkeretaapian dengan hasil terdapat pengurangan lintas tidak aktif pada lintas Muaro Kalaban - Sawah Lunto dan Cipatat - Padalarang sepanjang 21 Km. Disamping itu juga terdapat kendala atau tantangan sebagai berikut :

1) *Force Major*/bencana alam di wilayah Sumatera Utara mengakibatkan potensi pengurangan panjang rel beroperasi (perlu dilaksanakan perbaikan pada lintas Muara Satu-Kuta Blang
2) Kendala dalam proses pembebasan lahan di gudang gilingan pekerjaan pembangunan jalur ganda KA solo balapan - kalioso

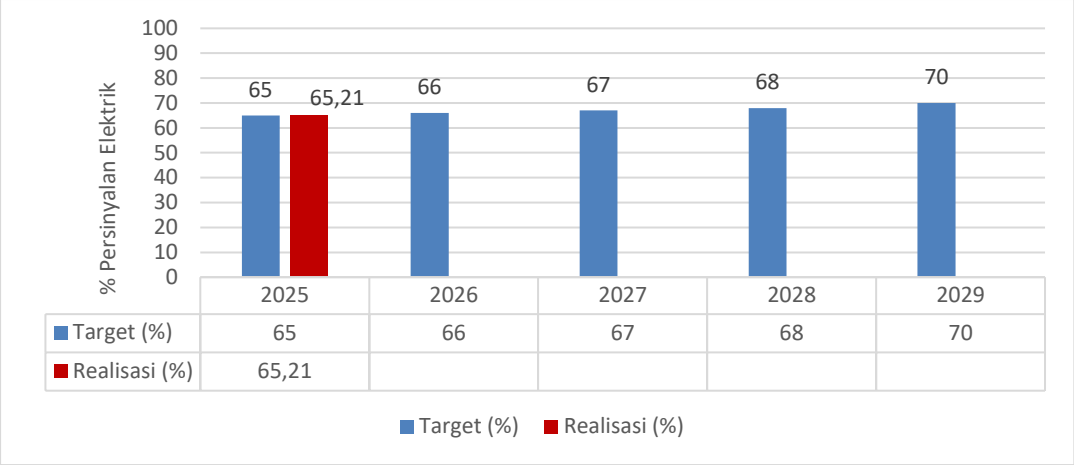


Gambar 2- 13 Capaian Panjang Jalur KA yang Beroperasi Tahun 2025

E. Jalur KA yang Menggunakan Persinyalan Elektrik

Direktorat Jenderal Perkeretaapian berkomitmen mendukung program peningkatan kehandalan perjalanan kereta api diantaranya dengan upaya peningkatan sistem persinyalan mekanik ke elektrik dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kehandalan dan keselamatan perjalanan kereta api serta mendukung peningkatan waktu tempuh sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat termasuk meingkatkan shitfing Moda dari angkutan pribadi ke angkutan kereta api. Pada Tahun 2025, jalur kereta api yang menggunakan sistem persinyalan elektrik adalah sebanyak 65,21% atau capaian sebesar 100,32% dari target Tahun 2025 sebesar 65,00%.

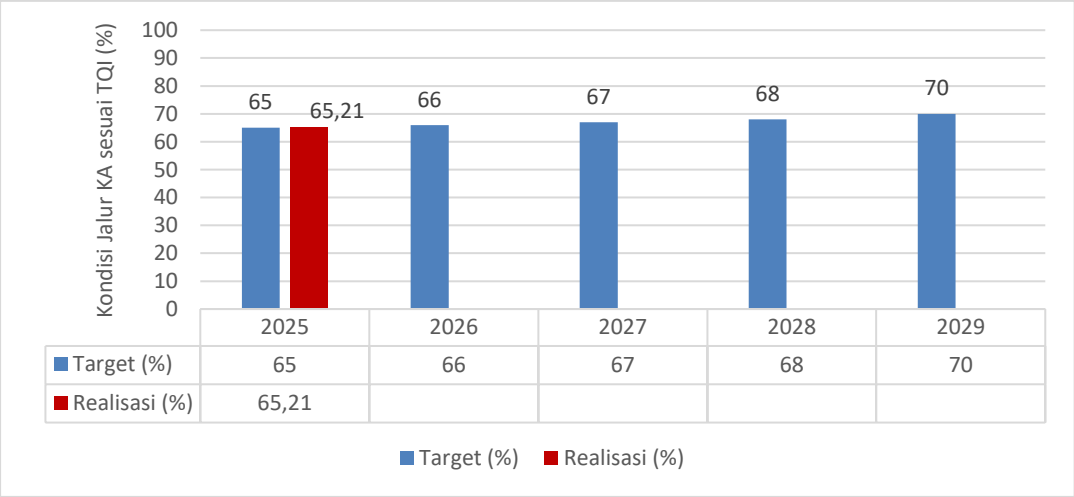
Baseline persinyalan elektrik pada tahun 2024 sebanyak 398 unit dan terdapat penambahan sebanyak 5 sinyal elektrik pada tahun 2025 sehingga total sinyal elektrik sampai dengan akhir tahun 2025 sebanyak 403 sinyal elektrik.



Gambar 2- 14 Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik Tahun 2025

F. Kondisi Jalur KA sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2

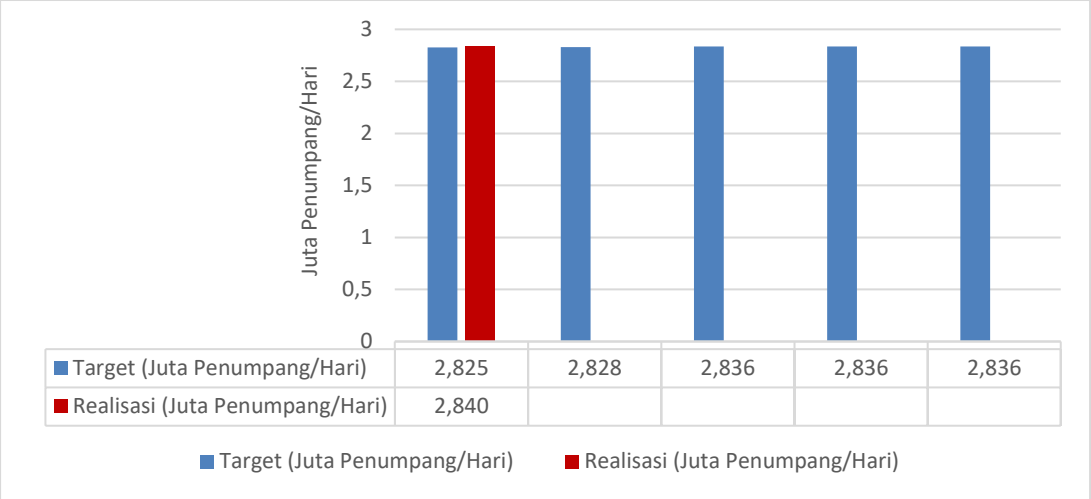
Dalam rangka menjamin keselamatan serta meningkatkan kenyamanan dan kelancaran perjalanan kereta api diperlukan upaya peningkatan dan perawatan jalur kereta api. Hasil pengukuran Track Quality Index (TQI) dapat digunakan dalam penentuan titik petak atau koridor jalan rel yang diprioritaskan untuk ditingkatkan dan dirawat. Capaian kondisi jalur kereta api sesuai dengan TQI Kategori 1 dan 2 pada periode Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 94,64% atau capaian sebesar 100,68% dari target 94,00%. Realisasi hasil TQI periode IV Tahun 2025 Kategori I dan II sepanjang 5.686,18 Km dari total panjang jalur keseluruhan 6.008,01 Km.



Gambar 2- 15 Kondisi jalur KA sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2 Tahun 2025

G. Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel

Realisasi Ketersediaan angkutan massal perkotaan berbasis rel pada tahun 2025 sebanyak 2,84 juta penumpang/hari dari target sebesar 2,825 penumpang/hari atau sebesar 100,53 %. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan angkutan umum massal berbasis rel berada pada kategori sangat baik, mencerminkan tingginya tingkat pemanfaatan layanan oleh masyarakat serta efektivitas kebijakan pengembangan transportasi massal perkotaan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengurangan kemacetan dan peningkatan keberlanjutan transportasi perkotaan.



Gambar 2- 16 Capaian Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel Tahun 2025

2.4 CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Pada periode Triwulan IV Tahun 2025, Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh beberapa capaian kinerja lainnya diantaranya:

A. Program Stimulus Diskon Tarif NATARU 2025/2026

Stimulus pertumbuhan ekonomi sektor transportasi melalui diskon tarif angkutan penumpang kereta api diselenggarakan dengan tujuan antara lain :

1. Meningkatkan daya beli dan minat masyarakat dalam menggunakan layanan kereta api;

2. Mendorong peningkatan mobilitas orang yang berdampak pada penguatan aktivitas ekonomi dan pariwisata;
3. Mengoptimalkan tingkat okupansi dan pemanfaatan kapasitas angkutan kereta api; serta
4. Mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan kinerja sektor transportasi.

Pada tahun 2025 diselenggarakan 2 (dua) kali pada masa liburan sekolah dan masa angkutan Nataru 2025/2026 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Stimulus KA Pada Masa Angkutan Libur Sekolah 2025

   Diselenggarakan pada periode Liburan Sekolah pada tanggal 5 Juni 2025 s.d. 31 Juli 2025 dengan rincian:
   a. Alokasi anggaran sebesar Rp300.000.000.000,-
   b. Jumlah perjalanan KA sebanyak 166 KA/hari
   c. Besaran diskon 30% untuk seluruh KA Ekonomi Non Penugasan (Non PSO/Non Perintis)
   d. Total kapasitas sebanyak 3.529.612 seat dengan realisasi penumpang sebanyak 3.583.098 penumpang atau capaian sebesar 102%
   e. Total Realisasi diskon tarif tiket sebesar **Rp230.161.151.000,-**

2. Stimulus KA pada Masa Angkutan Natal 2025 & Tahun Baru 2026

   Diselenggarakan pada periode Natal dan Tahun Baru pada tanggal 22 Desember 2025 s.d 10 Januari 2026 dengan rincian:
   a. Alokasi anggaran sebesar Rp120.682.092.000,-
   b. Jumlah perjalanan KA sebanyak 182 KA yang teridiri dari 156 KA Reguler & 26 KA Tambahan
   c. Besaran diskon 30% untuk seluruh KA Ekonomi Non Penugasan (Non PSO/Non Perintis)
   d. Total kapasitas sebanyak 1.509.080 *seat* dengan realisasi penumpang sebanyak 1.700.151 penumpang atau capaian sebesar 113%
   e. Total Realisasi diskon tarif tiket sebesar **Rp122.714.105.000,-**

B. Capaian Penilaian Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun

Berdasarkan surat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP.904/5/22/ITJEN/2025 tanggal 24 September 2025 perihal Ikhtisar Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 di lingkungan Kementerian Perhubungan, diperoleh bahwa perolehan nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian menduduki peringkat ke-1 dari 9 unit eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan perolehan nilai sebesar 83,72. Rincian hasil penilaian unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

Tabel 2-37 Perolehan Nilai AKIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2025

No	Unit Kerja	Capaian Kinerja per Komponen Tahun 2025				Penilaian Kinerja	
		Perencanaan Kinerja (30%)	Pengukuran Kinerja (30%)	Pelaporan Kinerja (15%)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	2025	2024
1	Sekretariat Jenderal	23,61	24,90	11,85	20,50	80,87	80,15
2	Inspektorat Jenderal	25,20	25,20	12,60	19,50	82,50	82,30
3	Ditjen Perhubungan Darat	25,47	24,87	12,93	19,88	83,16	82,69
4	Ditjen Perhubungan Laut	23,05	25,05	12,29	22,25	82,79	80,82
5	Ditjen Perhubungan Udara	23,07	24,60	13,01	20,13	80,80	80,79
6	**Ditjen Perkeretaapian**	**24,90**	**25,53**	**12,41**	**20,88**	**83,72**	**82,95**
7	Badan Kebijakan Transportasi	22,20	25,35	12,45	20,00	80,01	79,14
8	BPSDM Perhubungan	23,82	24,60	11,25	20,38	80,06	77,90
9	Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda	25,13	23,70	11,83	19,38	80,04	77,50

C. Capaian Program Padat Karya

Padat karya merupakan sebuah program yang dicanangkan oleh Pemerintah dengan melibatkan tenaga kerja orang (tidak memerlukan keahlian khusus) pada kegiatan pembangunan/peningkatan infrastruktur transportasi dengan tujuan penciptaan lapangan kerja guna mengurangi angka kemiskinan. Pada Tahun 2025 Padat Karya masuk kedalam paket kebijakan ekonomi dan program akselerasi melalui kegiatan Program Padat Karya Tunai *(cash for work).*

Direktorat Jenderal Perkeretaapian berkomitmen mendukung program tersebut dengan melibatkan tenaga kerja orang/lokal pada kegiatan pembangunan/peningkatan infrastruktur perkeretaapian dan tidak memerlukan keahliasn khusus/*unskill*. Adapun jenis kegiatan padat karya yang dilaksanakan meliputi:

1. Pekerjaan persiapan/pra konstruksi prasarana perkeretaapian;
2. Pekerjaan non konstruksi prasarana perkeretaapian (jalur dan bangunan serta fasilitas operasi);
3. Pekerjaan pasca konstruksi prasarana perkeretaapian;
4. Pekerjaan pendukung lainnya (*security/safetyman*/penjaga malam/penjaga semboyan/keamanan lokasi kerja, Juru masak/kebersihan kantor, Kegiatan pendukung pengukuran/survey dan lainnya yang tidak perlu keahlian khusus);



Gambar 2- 17 Dokumentasi Pelaksanaan Program Padat Karya

Saat ini padat karya dilaksanakan pada kegitan pembangunan/peningkatan prasarana perkeretaapian termasuk kegiatan swakelola lainnya yang tersebar di 6 wilayah unit kerja/balai teknik perkeretaapian dan meliputi 6 provinsi, 17 kabupaten/kota, 28 desa/kelurahan dengan target besaran upah terserap sebesar Rp3.534.558.000,00,00 dengan pelibatan tenaga kerja orang/OH sebanyak 358 orang/33.375 OH.

Tabel 2- 38 Target Program Padat Karya Per Unit Kerja Tahun 2025

No	Unit Kerja	Target Biaya Upah (Rp)	Target Tenaga Kerja (Orang)	Target Tenaga Kerja (OH)
1.	BTP Kelas I Jakarta	409.058.000	38	3.049
2.	BTP Kelas I Bandung	117.000.000	6	936
3.	BTP Kelas I Semarang	742.000.000	202	8.480
4.	BTP Kelas I Surabaya	753.000.000	55	7.530
5.	BTP Kelas I Medan	1.345.500.000	50	11.700
6.	BPKA Sulawesi Selatan	168.000.000	7	1.680
Total		**3.534.558.000**	**358**	**33.375**

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, 2025

Realisasi Program Padat Karya di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp6.766.466.946,00 (191,44%), 381 orang (106,42%) dan 47.220 OH (141,48%)

Tabel 2- 39 Realisasi Program Padat Karya Per Unit Kerja Tahun 2025

No	Unit Kerja	Realisasi		
		Biaya Upah (Rp)	Tenaga Kerja (Org)	Tenaga Kerja (OH)
1.	BTP Jakarta	431.370.000	27	3.250
2.	BTP Bandung	120.449.000	8	759
3.	BTP Semarang	535.200.000	34	6.060
4.	BTP Surabaya	921.900.000	65	9.219
5.	BTP Medan	1.685.119.750	120	11.168
6.	BPKA Sulawesi Selatan	3.072.428.196	127	16.764
Total		**6.766.466.946**	**381**	**47.220**

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, 2025

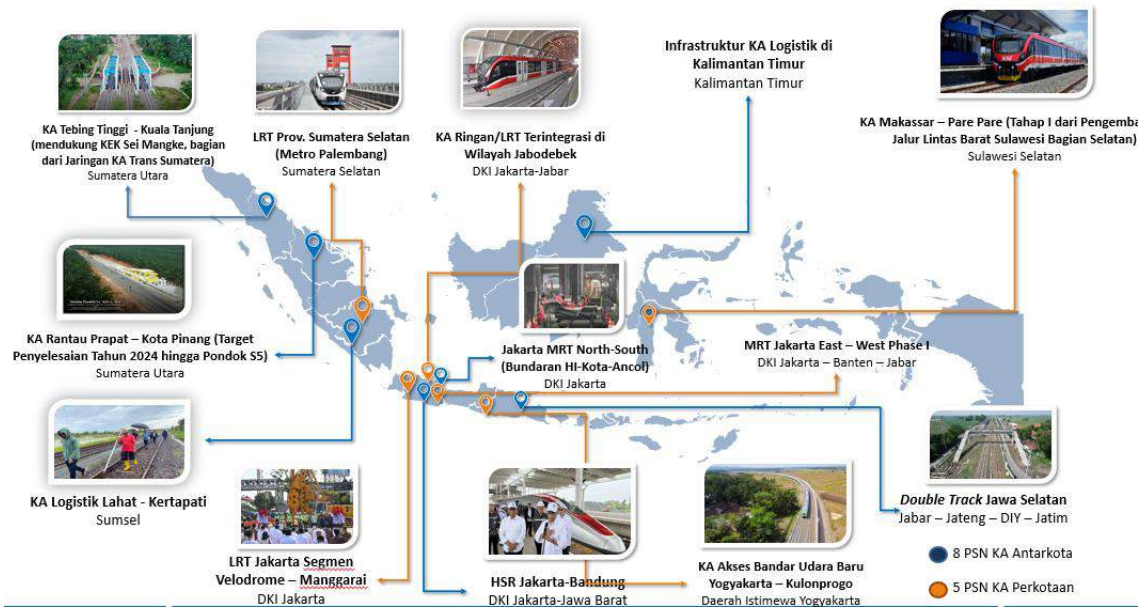
Capaian melampaui target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya arahan/instruksi dari Inpres 8 Tahun 2025 perihal Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagai tindak lanjut dari adanya paket kebijakan ekonomi dan program akselerasi melalui kegiatan Program Padat Karya Tunai (cash for work). Selain itu pada

pelaksanaan pembangunan/peningkatan prasarana perkeretaapian ditemukenali beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan pada Tahun 2025 (tambah waktu,pencabutan penlok,dll) sehingga kegiatan pendukung padat karya tidak terlaksana, untuk itu dilakukan upaya optimalisasi dengan mengidentifikasi terhadap kegiatan swakelola lainnya yang dapat dilakukan implementasi program padat karya.

D. CAPAIAN PROGRAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN)

Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek dan/atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Proyek Strategis Nasional (PSN) ditetapkan melalui Peraturan Presiden dan dilaksanakan dengan memprioritaskan integrasi konektivitas antar infrastruktur dan/atau pusat kegiatan ekonomi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan dengan memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang dimuat dalam perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan Permenko Perekonomian 2/2025 untuk PSN Bidang Perkeretaapian terdapat *13* Proyek Strategis Nasional bidang perkeretaapian yang terdiri dari perkeretaapian antar kota sebanyak 8 proyek (selesai 6 proyek, on progres 1 proyek, belum mulai 1 proyek) dan perkeretaapian perkotaan sebanyak 5 proyek (selesai 2 proyek, on progress 3 proyek) dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 2- 18 Proyek Strategis Nasional

Berikut merupakan dukungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) bidang perkeretaapian yang dilaksanakan pada Tahun 2025:

1. **PSN dengan status selesai s.d Tahun 2025 dan masih perlu dukungan PSN untuk pengadaan lahan,penyelesaian aset antara lain:**
   a. LRT Provinsi Sumatera Selatan (KA Perkotaan, selesai pada 2018);
   b. KA Tebing Tinggi – Kuala Tanjung (KA Antarkota, selesai pada 2020);
   c. KA Akses Bandara Udara Bari Yogyakarta – Kulonprogo (KA Antar Kota, selesai pada 2021);
   d. KA Makasar – Parepare Tahap I Segmen Barru – Pangkep – Maros (KA Antar Kota, selesai pada 2023);
   e. KA Ringan/LRT Terintegrasi di Wilayah Jabodebek (KA Perkotaan, selesai pada 2023);
   f. *High Speed Railway* Jakarta – Bandung (KA Antar Kota, selesai pada 2023);
   g. *Double Track* Selatan Jawa (KA Antar Kota, selesai pada 2024);
   h. KA Rantau Prapat – Kota Pinang (KA Antar Kota, selesai pada 2024 hingga Pondok S5).
2. **PSN dengan status on progres pada Tahun 2025 antara lain:**

Tabel 2- 40 Progres Proyek Strategis Nasional Tahun 2025

No	Kegiatan	Status
1	Infrastruktur KA Logistik di Kalimantan Timur	Telah dilaksanakan audiensi dengan PT Bayan Laju Trans Kalimantan pada 11 Juni 2025 perihal persyaratan penyelenggaraan perkeretaapian khusus. PT Bayan Laju Trans Kalimantan masih berprogses penyusunan studi kelayakan/dokumen perencanaan.
2	KA Logistik Lahat-Kertapati	Pekerjaan *double track* telah selesai dan beroperasi, namun terdapat peningkatan fasilitas berupa Pembangunan Coal Terminal Unloading System dengan progress saat ini sebesar 37,19%
3	LRT Velodrome-Manggarai	*a. Groundbreaking Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B pada tanggal 30 Oktober 2023.* *b. Capaian progress fisik sebesar 89,22%. Telah dilakukukan uji coba lintasan atau Test Track menunggunakan kereta MRV (Maintenance Rail Vehicle) dari Fase 1A menuju ke Fase 1B.*
4	Jakarta MRT *North-South Phase 2*	a. **Fase 2A**: 55,89 % (segmen 1 BHI – Monas 77,03%, Segmen 2 Harmoni – Kota 45,73%). Target *commercial operation* pada Maret 2028 serta segmen II (*partial & full operation*) pada Tahun 2030. **b. Fase 2B:** • MRT FASE 2B masih dalam tahapan proses *Feasibility Study* dan akan dilanjutkan ke tahapan pelaksanaan *Basic Engineering Study.* • Telah terbit Keputusan Gubernur atas Trase MRT Fase 2B Koridor Kota – AncoLine pada 3 Januari 2026. • Saat ini dalam proses pemenuhan prasarat sebelum pelaksanaan BED.
5	MRT Jakarta *East-West Phase* I	a. Penandatanganan *Minutes of Discussion* (MoD) kegiatan *appraisal* untuk *Loan* Konstruksi oleh JICA, Kemenhub, Bappenas dan Pemprov DKI. b. Dokumen *Loan Agreement* JICA telah ditandatangani oleh Dirjen PPR Kemenkeu dan Chief *Representative JICA Indonesia Office* pada tanggal 13 Mei 2024 c. Loan Agreement ADB : Telah dilaksanakan *pre fact – finding* untuk persiapan Loan ADB, sudah diusulkan kedalam *Greenbook* 2024 (target penandatanganan LA Q4 tahun 2025) d. Pencanangan oleh Presiden RI pada 11 September 2024. e. Perjanjian Hibah Daerah telah ditandatangani Gubernur DKI Jakarta dan Kemenkeu

No	Kegiatan	Status
		(Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) pada 2 Juli 2025. f. Saat ini proses verifikasi DPPT masih berlangsung dan sedang dilakukan proses Re-Baseline untuk mengakomodir perubahan durasi konstruksi hasil *market sounding* dan pembaruan pada proses pengadaan lahan & proses tender.

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, 2025

E. PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DALAM APLIKASI SISMONEV KSP

Program Prioritas Nasional merupakan program yang ditetapkan pemerintah sebagai pendukung agenda utama pembangunan nasional untuk dilaksanakan secara terarah, terintegrasi, dan terukur oleh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah guna mencapai sasaran strategis nasional sesuai dengan arah kebijakan nasional. Dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional Direktorat Jenderal Perkeretaapian berkomitmen melakukan upaya tersebut dengan sasaran berupa rasio konektivitas transportasi perkeretaapian. Rasio konektivitas transportasi perkeretaapian diperoleh dari keterhubungan jaringan dan layanan kereta api dengan wilayah Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) simpul transportasi (pelabuhan, bandara, terminal tipe A) dan Kawasan Strategis Nasional.

Untuk mendukung tercapainya program pemerintah pengendalian dan pengelolaan isu strategis terhadap Program Prioritas Nasional Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menjadi tugas dari Kantor Staf Presiden sebagai *delivery assurance agency* terhadap Program Prioritas Nasional menuju Asta Cita Presiden. Adapun pada Tahun 2025 Kementerian Perhubungan telah mengusulkan sebanyak 20 rencana aksi dimana terdapat 3 rencana aksi yang menjadi pantaun Kantor Staf Presiden untuk sub sektor perkeretaapian, diantaranya:

1. Pengembangan/Peningkatan Jalur KA Komuter (Medan-Binjai-Besitang), dimana progress fisik kumulatif saat ini telah terealisasi sebesar 80,69% atau capaian sebesar 97,21% dari target B.12 sebesar 83% (MYC 2022 -

2025). Pekerjaan terkendala adanya pengadaan lahan yang masih dalam proses.

2. Pembangunan Jalur Ganda Solo Semarang Fase I (Kalioso – Kadipiro – Solo Balapan) dimana progress fisik kumulatif saat ini telah terealisasi sebesar 96,63% atau capaian sebesar 96,63% dari target B.12 sebesar 100% (MYC 2022 - 2025). Pekerjaan terkendala adanya *addendum* pekerjaan/tambah waktu untuk mendukung pengoperasian *ultimate*.
3. Peningkatan Jalur KA lintas Surabaya - Banyuwangi Segmen Jember – Kalisat dimana progress fisik kumulatif saat ini telah terealisasi sebesar 100% atau capaian sebesar 100% dari target B.12 sebesar 100% (MYC 2023 - 2025).



Gambar 2- 19 Dokumentasi Proyek Yang Menjadi Pantauan KSP

F. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL (PN)

Dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional Direktorat Jenderal Perkeretaapian berkomitmen melakukan upaya tersebut melalui sasaran berupa rasio konektivitas transportasi perkeretaapian. Rasio konektivitas transportasi perkeretaapian diperoleh dari keterhubungan jaringan dan layanan kereta api dengan wilayah Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) simpul transportasi (pelabuhan, bandara, terminal tipe A) dan Kawasan Strategis Nasional. Pada Tahun 2025 terdapat Program Prioritas dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden, diantaranya:

Tabel 2- 41 Progres fisik pekerjaan dukungan Asta Cita Presiden

No.	Rincian Output / Proyek	Realisasi Fisik	Keterangan
1	Penyelenggaraan Layanan Perintis LRT Sumatera Selatan - Kota Palembang	100%	Kegiatan penyelenggaraan perintis telah dilaksanakan

No.	Rincian Output / Proyek	Realisasi Fisik	Keterangan
2	Surabaya Regional Railway Line (Phase I) - Pusat	73%	Progres fisik merupakan progres kumulatif sampai dengan Penandatanganan Kontrak Paket Pekerjaan Jasa Konsultan dalam Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Railway Design Consultant Surabaya Regional Railway Line (Phase 1). Saat ini masih dalam proses penyusunan draft kontrak sehingga belum ada realisasi anggaran pada Tahun 2025
3	Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I - Provinsi DKI Jakarta	67,6%	1.Progres fisik kumulatif dari tahun 2021 sebesar 67,6% (48 dokumen dari target keseluruhan sebanyak 71 dokumen); 2. Belum terdapat penyerapan keuangan hingga triwulan IV Tahun 2025 dikarenakan sebelumnya terdapat rencana amandemen kontrak namun dengan adanya keputusan pengerjaan dilanjutkan hingga konstruksi Jabodetabek Railway Capacity Enhancement (IP-563) maka amandemen ditahan terlebih dahulu dan penyelesaian desain sesuai ruang lingkup awal
4	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Makassar - Parepare - Kota Makassar	100%	Kegiatan penyelenggaraan perintis telah dilaksanakan
5	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Muara Satu - Kutablang - Kab. Bireuen	91%	Penyelenggaraan Perintis lintas Muara Satu - Kutablang tidak beroperasi pada tanggal 26 November 2025 sampai dengan Desember 2025 dikarenakan terdampak bencana alam
6	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Binjai - Besitang - Sei Liput - Kota Binjai	0	Belum beroperasi
7	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Lubuk Alung - Kayu Tanam - Kab. Padang Pariaman	100%	Kegiatan penyelenggaraan perintis telah dilaksanakan
8	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Purwosari - Wonogiri - Provinsi Jawa Tengah	100%	Kegiatan penyelenggaraan perintis telah dilaksanakan
9	Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis antara Rantauprapat - Pondok S5 - Kab. Labuhanbatu	0	Belum beroperasi
10	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) - Pusat	0	Pelaksanaan IMO saat ini sudah dilaksanakan oleh masing-masing Balai
11	Penanganan Rintang Jalan KM 299 + 900 Antara Prupuk - Linggapura Lintas Cirebon - Kroya - Provinsi Jawa Tengah	90%	Kegiatan berkontrak pada 12 September 2025 dan akan berlanjut dengan menggunakan skema penyelesaian pekerjaan selama 90 hari

No.	Rincian Output / Proyek	Realisasi Fisik	Keterangan
12	Penggantian Bangunan Jembatan BH 1109 Km.303+680 dan BH 1164 Km.314+769 Lintas Cirebon - Kroya -Provinsi Jawa tengah	0	Kegiatan Penggantian Jembatan BH 1109 dan BH 1164 tidak dapat terelalisasi di tahun ini atau mundur pelaksanaannya sehingga membutuhkan penambahan waktu/skema dari SYC menjadi MYC, namun dikarenakan pada Register SBSN dari Kemenkeu tidak ada anggaran/pelaksanaan kegiatan SBSN pada Tahun 2026 sehingga akan dilakukan usulan ulang untuk TA 2026-2027 dengan anggaran RM
13	Penggantian Jembatan Pada BH 46 Km 21+918 dan BH 59 Km 27+920 Antara Brumbung - Gubug - Provinsi Jawa Tengah	0	Kegiatan Penggantian Jembatan Kegiatan Penggantian Jembatan BH 46 dan 59 tidak dapat terelalisasi di tahun ini atau mundur pelaksanaannya sehingga membutuhkan penambahan waktu/skema dari SYC menjadi MYC, namun dikarenakan pada Register SBSN dari Kemenkeu tidak ada anggaran/pelaksanaan kegiatan SBSN pada Tahun 2026 sehingga akan dilakukan usulan ulang untuk TA 2026-2027 dengan anggaran RM
14	Penanganan Amblesan / Longsoran Badan Jalan KA Kawungaten - Kroya Lintas Banjar - Kroya - Provinsi Jawa Tengah	0	Kegiatan tidak dilaksanakan dan sudah dikeluarkan dari DPP SBSN dan berproses permohonan revisi DIPA
15	Kewajiban Pembayaran atas Ketersediaan Layanan (Availability Payment) (Dukungan/Pendamping KPBU) - Kota Makassar	100%	
16	Pembangunan Jalur KA Elevated antara Solo Balapan - Kadipiro - Provinsi Jawa Tengah	100%	
17	Studi Penyusunan Dokumen Identifikasi Untuk Jalur Kereta Api Perkotaan Yang Menghubungkan Wilayah Perencanaan KIPP - IKN Barat - IKN Timur 1 - IKN Timur 2 - IKN Utara dan yang Menghubungkan Wilayah Perencanaan IKN Barat - IKN Timur 2 - Pusat	0	Terdampak kebijakan efisiensi anggaran
18	Peningkatan Stasiun Tanah Abang Tahap I - Provinsi DKI Jakarta	97,91%	Telah dilakukan peresmian pada tanggal 4 November 2025 dan saat ini dalam proses penyempurnaan Stasiun Tanah Abang Tahap I
19	Engineering Services For Jakarta Mass Rapid Transit East-West Line Project Phase I Stage I - Pusat	100%	- Kegiatan Phase I Stage I sudah selesai dilaksanakan pada Tahun 2024. - Kegiatan Stage II diusulkan pada Bluebook 2025-2029 dengan nomenklatur kegiatan "Engineering Services of Jakarta Mass Rapid

No.	Rincian Output / Proyek	Realisasi Fisik	Keterangan
			Transit East - West Line Project Phase I Stage II and Phase II". Posisi saat ini masih tahap pengusulan bluebook 2025-2029 sehingga realisasi anggaran 0.

Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, 2025

G. PERESMIAN INFRASTRUKTUR PERKERETAAPIAN

Berdasarkan Visi dan Misi pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian tahun 2025-2029, Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas untuk meningkatkan konektivitas jaringan pelayanan transportasi perkeretaapian yang efisien dan efektif serta meningkatkan keselamatan transportasi perkeretaapian. Untuk itu, Direktorat Jenderal Perkeretaapian melaksanakan program dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana perkeretaapian, pengelolaan lalu lintas dan angkutan kereta api serta upaya peningkatan keselamatan perkeretaapian. Pada Tahun 2025 telah dilakukan peresmian Peningkatan Stasiun Tanah Abang Tahap I (MYC 2023 – 2025) oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 4 November 2025. Ini merupakan komitmen pemerintah sebagai bentuk/upaya pengembangan perkeretaapian di Indonesia.



Gambar 2- 20 Peresmian Stasiun Tanah Abang Tahap I

2.5 REALISASI ANGGARAN

2.5.1 REALISASI ANGGARAN UNIT KERJA

Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar Rp5.119.295.134000,00 sedangkan untuk posisi akhir Tahun 2025 terdapat perubahan jumlah anggaran menjadi sebesar Rp 7.732.788.922.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

1. Revisi lanjutan/luncuran pelaksanaan kegiatan/proyek SBSN tahun sebelumnya (TA. 2024) yang dilanjutkan ke TA. 2025 di 4 Satker sebesar Rp36.199.983.000,00 pada tanggal 20 Februari 2025;
2. Revisi anggaran TA. 2025 lingkup Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka memenuhi kewajiban efisiensi belanja Kementerian Perhubungan berupa pencantuman catatan halaman IVA DIPA/blokir sebesar Rp3.807.993.637.000,00 pada tanggal 21 Februari 2025 (tidak merubah pagu);
3. Revisi anggaran TA. 2025 lingkup Direktorat Jenderal Perkeretaapian berupa revisi administrasi ralat kode blokir sebesar Rp6.300.340.000,00 pada tanggal 16 Maret 2025 (tidak merubah pagu);
4. Revisi anggaran TA. 2025 lingkup Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tanggal 24 Maret 2025 berupa buka blokir catatan halaman IVA DIPA dalam rangka relaksasi blokir efisiensi anggaran untuk pemenuhan anggaran kegiatan prioritas (tidak merubah pagu) sebagai berikut:
   a. Subsidi Perintis sebesar Rp96.186.766.000,00;
   b. Mudik Gratis, Angkutan Lebaran, dan Nataru sebesar Rp10.548.315.000,00;
   c. Kebutuhan IMO sebesar Rp2.130.635.381.000,00.
5. Revisi anggaran berupa revisi lanjutan/luncuran pelaksanaan kegiatan/proyek bersumber dana SBSN Tahun Anggaran sebelumnya (TA 2024) yang dilanjutkan ke TA 2025 tersebar di 6 satker sebesar Rp2.951.685.352.000,00.
6. Penambahan pagu DIPA Petikan BLU dalam penggunaan saldo awai kas sebesar Rp11.337.699.000,00.
7. Penambahan pagu DIPA Petikan BLU dalam Penggunaan Saldo Awai Kas sebesar Rp 3.545.738.000,00.

8. Revisi anggaran TA 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan berupa:
    a. Revisi anggaran pembukaan blokir pada catatan halaman IV A DIPA dalam rangka relaksasi blokir efisiensi sebesar Rp186.186.612.000,- yang digunakan untuk pemenuhan belanja pegawai sebesar Rp48.713.863.000,- dan Kegiatan Prioritas Dukungan Keselamatan Transportasi sebesar Rp137.472.749.000,00;
    b. Revisi pergeseran anggaran belanja pegawai dari satker Balai Pengujian Perkeretaapian dan satker Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan ke satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp2.358.995.000,00;
    c. Revisi anggaran pembukaan blokir kode 2 pada catatan halaman IV A DIPA pada satuan kerja Pengembangan Lalu Lintas dan Peningkatan Angkutan Kereta Api sebesar Rp444.780.000,00.
9. Penambahan pagu DIPA Petikan BLU dalam Penggunaan Saldo Awal Kas sebesar Rp. 5.499.237.000,-
10. Revisi anggaran TA 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan berupa:
    a. Revisi anggaran dalam rangka pencatatan atas pengadaan lahan dari Lembaga Manajemen Aset Negara pada PSN di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Periode Semester I Tahun 2025satuan kerja Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan untuk pekerjaan Kereta Api Makassar - Parepare sebesar Rp82.762.039.365,00; dan
    b. Revisi pembukaan blokir anggaran sumber dana PLN (blokir kode 3) pada satuan kerja Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian untuk pembangunan Surabaya Regional Railway Line (Phase I) sebesar Rp15.000.000.000,00.
11. Revisi anggaran TA 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan berupa:
    a. Pergeseran anggaran antar Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk penyelesaian sebagian kekurangan pembayaran (backlog) Kegiatan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Milik Negara (IMO) TA 2023 sebesar Rp1.455.953.044.000,00; dan

b. Pengurangan pagu anggaran sumber dana SBSN sebesar Rp356.609.124.000,00.

12. Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap berupa pergeseran anggaran pada satker Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta untuk pembayaran tunggakan Pekerjaan Peningkatan Jalur Kereta Api dan Fasilitas Operasi Lintas Jakarta Kota - Tanjung Priok TA 2024 sebesar Rp2.519.272.000,00.
13. Revisi anggaran TA 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan berupa pengurangan pagu anggaran SBSN kegiatan Peningkatan Jalur Kereta Api Lintas Surabaya - Banyuwangi Segmen Jember - Kalisat pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya sebesar Rp124.571.853.000,00.
14. Revisi pembukaan blokir pada Catatan Halaman IV DIPA berupa relaksasi blokir efisiensi guna pembayaran tunggakan pekerjaan Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) di Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp81.066.626.000,00.
15. Revisi anggaran TA 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan berupa:
    a. Revisi anggaran pembukaan blokir pada catatan halaman IV A DIPA dalam rangka relaksasi blokir efisiensi sebesar Rp843.701.651.000,00 yang digunakan untuk penyelesaian sebagian kekurangan pembayaran (backlog) Kegiatan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO) TA 2023 sebesar Rp841.966.251.000,00 dan kegiatan pemantauan dan evaluasi untuk meningkatkan keselamatan transportasi bidang perkeretaapian sebesar Rp1.735.400.000,00; dan
    b. Revisi anggaran dalam rangka pembayaran tunggakan sumber dana SBSN pekerjaan Penanganan Rintang Jalan dan Peningkatan 2 Unit Jembatan KA Lintas Tarahan - Tanjung Enim sebesar Rp1.896.593.382,00."

16. Revisi anggaran dalam rangka pencatatan atas pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional Kereta Api Makassar - Parepare oleh Lembaga Manajemen Aset Negara Periode Semester II TA 2025 sebesar Rp104.447.631.032,00.
17. Adapun untuk realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2025 diperoleh sebesar Rp 5.465.737.775.844 (69,74% dari pagu total atau 70,58% dari pagu efektif), dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 2- 42 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Jenis Belanja Tahun 2025

No.	Jenis Belanja / Pembiayaan	Pagu (Rp)					Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran Thd Pagu Efektif	
		Pagu Sesuai PK 2025	Pagu Sesuai PK (Revisi Terakhir)	Pagu Terakhir	Blokir Efisiensi	Pagu Efektif	Nilai (Rp)	% Thd Pagu Efektif	Nilai (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	203.084.303.000	255.258.712.000	255.258.712.000	-	255.258.712.000	246.698.649.707	96,65	8.560.062.293	3,35
2	Belanja Barang	3.612.244.204.000	3.794.168.911.000	4.189.982.723.000	64.775.431.000	4.125.207.292.000	4.010.596.700.774	97,22	114.610.591.226	2,78
3	Belanja Modal	1.303.966.627.000	3.683.361.299.000	3.391.995.119.000	28.200.178.000	3.363.794.941.000	1.208.442.425.363	35,92	2.155.352.515.637	64,08
Total		**5.119.295.134.000**	**7.732.788.922.000**	**7.837.236.554.000**	**92.975.609.000**	**7.744.260.945.000**	**5.465.737.775.844**	**70,58**	**2.278.523.169.156**	**29,42**

Tabel 2- 43 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Per Kegiatan Tahun 2025

No	Kegiatan	Pagu (Rp)					Realisasi Anggaran	
		Pagu Sesuai PK 2025	Pagu Sesuai PK (Revisi Terakhir)	Pagu Terakhir	Blokir Efisiensi	Pagu Efektif	Nilai (Rp)	% Thd Pagu Efektif
1.	**Program infrastruktur konektivitas**	**4.424.660.689.000**	**7.010.572.014.000**	**7.373.705.906.000**	**61.720.436.000**	**7.311.985.470.000**	**5.046.260.834.904**	**69,01**
	a. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	813.226.191.000	1.977.174.647.000	1.839.623.900.000	5.237.200.000	1.834.386.700.000	799.291.548.422	43,57
	b. Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	895.248.757.000	2.317.048.969.000	2.149.823.051.000	3.062.774.000	2.146.760.277.000	1.032.237.330.135	48,08

No	Kegiatan	Pagu (Rp)					Realisasi Anggaran	
		Pagu Sesuai PK 2025	Pagu Sesuai PK (Revisi Terakhir)	Pagu Terakhir	Blokir Efisiensi	Pagu Efektif	Nilai (Rp)	% Thd Pagu Efektif
	c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	2.670.022.802.000	2.666.492.135.000	3.336.274.796.000	28.069.379.000	3.308.205.417.000	3.195.725.652.055	96,60
	d. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	46.162.939.000	49.856.263.000	47.984.159.000	25.351.083.000	22.633.076.000	19.006.304.292	83,98
2.	**Program Dukungan Manajemen**	**694.634.445.000**	**722.216.908.000**	**463.530.648.000**	**31.255.173.000**	**432.275.475.000**	**419.476.940.940**	**97,04**
	a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	22.069.026.000	22.064.026.000	4.037.234.000	-	4.037.234.000	4.021.209.028	99,60
	b. Pengelolaan Perencanaan. Keuangan. BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	637.851.276.000	667.910.104.000	450.551.105.000	31.255.113.000	419.295.992.000	406.724.563.604	97,00
	c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	17.498.737.000	15.457.372.000	6.528.673.000	60.000	6.528.613.000	6.325.136.894	96,88
	d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	14.149.348.000	14.619.348.000	1.762.986.000	-	1.762.986.000	1.757.227.218	99,67
	e. Legislasi dan Litigasi Transportasi	3.066.058.000	2.166.058.000	650.650.000	-	650.650.000	648.804.196	99,72
Total		**5.119.295.134.000**	**7.732.788.922.000**	**7.837.236.554.000**	**92.975.609.000**	**7.639.813.313.000**	**5.465.737.775.844**	**70,58**

Tabel 2- 44 Alokasi Anggaran Per Sasaran dan Indikator Kinerja Program Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Pagu (Rp)					Realisasi Anggaran	
		Pagu Sesuai PK 2024	Pagu Sesuai PK (Revisi Terakhir)	Pagu Terakhir	Blokir Efisiensi	Pagu Efektif	Nilai (Rp)	% Thd Pagu Efektif
SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IKP1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	813.226.191.000	1.977.174.647.000	1.839.623.900.000	5.237.200.000	1.834.386.700.000	799.291.548.422	43,57
SP2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IKP2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	895.248.757.000	2.317.048.969.000	2.149.823.051.000	3.062.774.000	2.146.760.277.000	1.032.237.330.135	48,08
	IKP3 Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api							
	IKP4 Persentase Pemenuhan Target							

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Pagu (Rp)					Realisasi Anggaran	
		Pagu Sesuai PK 2024	Pagu Sesuai PK (Revisi Terakhir)	Pagu Terakhir	Blokir Efisiensi	Pagu Efektif	Nilai (Rp)	% Thd Pagu Efektif
	Angkutan Kereta Api							
SP3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKP5 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA	2.716.185.741.000	2.488.566.742.000	3.384.258.955.000	53.420.462.000	3.330.838.493.000	3.214.731.956.347	96,51
SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	694.634.445.000	722.216.908.000	463.530.648.000	31.255.173.000	432.275.475.000	419.476.940.940	97,04
Total		**5.119.295.134.000**	**7.732.788.922.000**	**7.837.236.554.000**	**92.975.609.000**	**7.744.260.945.000**	**5.465.737.775.844**	**70,58**

Keterangan: IKK 5 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA anggaran merupakan penjumlahan kegiatan keselamatan dan penunjang teknis)

2.5.2 REALISASI PENDAPATAN UNIT KERJA

Realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp 2.022.678.845.172,00 atau 162,291% dari target Tahun 2025 sebesar Rp 1.246.326.325.000,00 baik pendapatan fungsional maupun non fungsional. Rincian realisasi PNBP pada Tahun 2025 berdasarkan jenis pendapatannya sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 2-45 Realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	**Pendapatan Fungsional (Sesuai PP No.15 Tahun 2016)**	**1.028.700.863.000**	**1.528.474.226.901**	**148,58**
	a. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan TUSI	1.528.160.000	776.881.300	50,84
	b. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi Bidang Perhubungan	2.789.250.000	3.935.430.000	141,09
	c. Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/*Track Access Charge*	1.023.132.453.000	1.519.124.995.601	148,48
	d. Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	1.251.000.000	4.636.920.000	370,66
2	**Pendapatan BLU**	**89.826.325.000**	**87.630.587.915**	**97,56**
	a. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	79.097.734.000	81.868.115.275	103,50
	b. Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	9.546.423.000	1.939.210.772	20,31
	c. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU		2.110.837.905	-
	d. Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu		2.075.037	-
	e. Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu		1.578.799	-
	f. Pendapatan Lain-lain BLU		200.119.327	-
	g. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	1.182.168.000	1.146.750.800	97,00
	h. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin		361.900.000	-
3	**Pendapatan Non Fungsional**	**127.799.137.000**	**406.574.030.356**	**318,14**
	a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	150.000.000	837.800.500	558,53
	b. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	3.065.000.000	26.846.194.948	875,90
	c. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	98.335.137.000	87.911.079.667	89,40
	d. Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	26.249.000.000	26.709.886.737	101,76
	e. Pendapatan Jasa Lainnya		0	
	f. Pendapatan Bunga Lainnya			

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	g. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		10.980.723.262	
	h. Pendapatan Denda Lainnya		90.322.315.495	
	i. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		3.942.059	
	j. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu		102.986.905.461	
	k. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu		55.897.345.245	
	l. Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu		0	
	m. Pendapatan Jasa Perbendaharaan			
	n. Pendapatan Anggaran Lain-lain		4.077.836.982	
	Jumlah	**1.246.326.325.000**	**2.022.678.845.172**	**162,29**

2.5.3 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian membutuhkan dukungan dari berbagai sumber daya agar sistem dapat berjalan dengan baik. Pemanfaatan sumber daya mencakup sumber daya manusia dan sumber daya anggaran diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada setiap unit di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

A. Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian membutuhkan dukungan dari berbagai sumber daya agar sistem dapat berjalan dengan baik. Pemanfaatan kekuatan secara tepat guna dengan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada setiap unit di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Kinerja suatu organisasi dikatakan baik apabila penggunaan sumber daya dan dana yang tersedia lebih efektif dan efisien.

Dari sisi ketersediaan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), merupakan hal penting dalam pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja unit kerja sehingga perlu untuk dipenuhi sesuai kebutuhan dan didukung dengan kompetensi/keahlian yang memadai. Pada Tahun 2025, jumlah pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebanyak 2.536 pegawai yang terdiri dari 1.836 PNS dan 700 PPPK yang tersebar pada Kantor Pusat (Sekretariat dan 4 Direktorat Teknis) dan pada

11 Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Untuk kebutuhan pegawai berdasarkan Analisa Kebutuhan Kerja (ABK) Ditjen Perkeretaapian Tahun 2025 s.d 2029 sebanyak 1.516 pegawai sehingga kebutuhan SDM Ditjen Perkeretaapian s.d 2029 sebesar 4.052 pegawai dan diperoleh Efisiensi SDM sebesar 59,72%, dengan rincian sebagai berikut :

$$\textbf{Efisiensi SDM} = \left(\frac{\text{SDM Tersedia}}{\text{Kebutuhan SDM sesuai ABK}} x \frac{Ouput\ \text{Aktual}}{\text{Target Output}}\right) x\ 100\%$$

Efisiensi SDM = $\frac{2.536}{4.024}$ x 0,954* x 100%

Efisiensi SDM = 0,626 x 0,954* x 100% = 59,72%

**) Perhitungan Output Aktual dibagi Target Output (Rasio Output) diperoleh dari aplikasi Monev Kemenkeu*

Selain itu, sebagai tindak lanjut atas hasil pengukuran kinerja periode sebelumnya (Triwulan III Tahun 2025) terdapat beberapa upaya penyesuaian penempatan/penghapusan jabatan struktural dan/atau fungsional pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang telah dilaksanakan pada periode pada Tahun 2025 antara lain:

1. Pelaksanaan mutasi pegawai sebanyak 62 orang dengan rincian 49 diterima, 5 ditolak, dan 8 masih dalam menunggu keputusan baik internal maupun eksternal Direktorat Jenderal Perkeretaapian (keluar atau masuk) untuk memenuhi kebutuhan pegawai dan/atau penyegaran organisasi yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil pengukuran kinerja serta kompetensi pegawai yang bersangkutan;
2. Pelaksanaan pemberhentian jabatan fungsional sebanyak 6 pegawai karena menduduki jabatan struktural di internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian maupun karena peralihan ke jabatan fungsional lainnya;
3. Pelaksanaan pelantikan dan pengangkatan jabatan fungsional analis SDM aparatur sebanyak 3 orang dan arsiparis sebanyak 2 orang;
4. Pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional bidang perkeretaapian tanggal 18-19 September 2025 yang dilakukan dalam rangka program alih jenjang dan pengembangan karir SDM di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

5. Penataan ulang terhadap 847 formasi jabatan fungsional bidang perkeretaapian berdasarkan analisis beban kerja pada masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi serta Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Kementerian Perhubungan nomor KP.107/1/12/K1/DJKA/2025 tanggal 17 September 2025 tentang Penyampaian Hasil Penataan Ulang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Perkeretaapian;
6. Telah disulkan dan diikuti uji kompetensi Kenaikan Jenjang JF APKAPBN untuk 1 pegawai telah dinyatakan lulus;
7. Mengusulkan Uji Kompetensi JF Analis Kebijakan untuk 9 pegawai sedang menunggu pemanggilan uji kompetensi;
8. Telah diterbitkan Surat Tugas Perbantuan bagi 12 (dua belas) pegawai yang diusulkan perpanjangan perbantuan sebagai Pejabat Fungsional Bidang Perkeretaapian;
9. Telah dilakukan pemrosesan usulan pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional terhadap 4 (empat) pegawai. Dari jumlah tersebut, 2 (dua) pegawai telah diproses melalui aplikasi SiJAGOIMUT dan saat ini sedang menunggu pelantikan;
10. Telah dilaksanakan pengambilan sumpah PNS terhadap 14 CPNS Calon Pejabat Fungsional;

    Telah diusulkan pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Perkeretaapian terhadap 61 (enam puluh satu) pegawai. Dari jumlah tersebut, sebanyak 38 (tiga puluh delapan) pegawai dinyatakan lulus seleksi administrasi dan dilanjutkan ke tahap uji kompetensi teknis dan manajerial, dengan hasil 27 (dua puluh tujuh) pegawai dinyatakan lulus uji kompetensi.

B. Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran

Dari sisi penggunaan sumber daya anggaran, Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah melakukan efisiensi anggaran dimana beberapa target Indikator Kinerja Program dapat tercapai dengan capaian lebih dari 100%. Terdapat 2 pendekatan perhitungan analisis efisiensi anggaran, yang pertama pendekatan perbandingan antara capaian indikator kinerja program dengan sisa realisasi anggaran mengacu Rencana Penyerapan Dana (RPD) pada Tahun 2025. Pendekatan yang kedua mengacu perhitungan pada PMK No. 22/PMK.02/2021.

Realisasi penyerapan anggaran pada Tahun 2025 diperoleh sebesar Rp 5.465.737.775.844,- dengan persentase 69,74% dari pagu Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau 70,58% dari pagu efektif. Adapun efisiensi anggaran Tahun 2025 terhadap sasaran/indikator kinerja yang tercapai sebagaimana pendekatan pertama diperoleh sebesar 2,17% dengan uraian pada Tabel berikut.

Tabel 2-46 Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Keuangan Tahun 2025				Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA x CIKP	(AA x CIKP) - RA	
Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460	0,453	98,478%	1.839.623.900.000	799.291.548.422	-	-	Pada indikator Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian, target kinerja tidak tercapai sehingga tidak terdapat efisiensi sumber daya
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perkeretaapian	Nilai	93,500	93,506	100,006%	3.384.258.955.000	3.214.731.956.347	3.384.476.126.698	169.744.170.351	Pada Sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian diperoleh realisasi kinerja tercapai 100% dengan sisa anggaran/ efisiensi sebesar Rp169,74M.
Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api	%	0,962	0,977	101,562%					
Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	19,000	19,596	103,137%					
Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Rasio	100,000	99,073	99,073%	2.149.823.051.000	1.032.237.330.135	-	-	Pada indikator Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian, target kinerja

Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2025			Keuangan Tahun 2025				Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA x CIKP	(AA x CIKP) - RA	
									tidak tercapai sehingga tidak terdapat efisiensi sumber daya
Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100,000	99,604	99,604%	463.530.648.000	419.476.940.940	-	-	Pada indikator Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, target kinerja tidak tercapai sehingga tidak terdapat efisiensi sumber daya
Jumlah					**7.837.236.554.000**	**5.465.737.775.844**	**3.384.476.126.698**	**169.744.170.351 (2,17%)**	

Untuk pendekatan kedua dilakukan analisis efisiensi anggaran berdasarkan PMK No. 22/PMK.02/2021 dengan menggunakan perhitungan Capaian Rincian *Output* (CRO) dan realisasi anggaran Tahun 2025 dari kompilasi masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan perhitungan:

$$\textbf{Efisiensi } \boldsymbol{RO} \textbf{ Satker} = \frac{\sum(Alokasi\ Anggaran\ RO\ x\ Capaian\ RO) - Realisasi\ Anggaran\ RO)}{\sum(\text{Alokasi Anggaran RO})} \times 100\%$$

Adapun dari hasil analisis diperoleh efisiensi sumber daya anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2025 sebesar 15,32% atau 1.200.996.050.189. Rincian perhitungan secara lengkap disampaikan pada Lampiran 3.

BAB 3 PENUTUP

3.1 TINDAK LANJUT REKOMENDASI PADA PELAPORAN KINERJA SEBELUMNYA

Tindak lanjut terhadap rekomendasi pada pelaporan kinerja periode sebelumnya (Laporan Monitoring Kinerja Triwulan III Tahun 2025) sebagai berikut:

Tabel 3-1 Tindak Lanjut Rekomendasi Pelaporan Kinerja Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
IKP1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah	▪ Penyelesaian/finalisasi dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 khususnya substansi kegiatan pendukung konektivitas perkeretaapian mengacu perkembangan kebijakan pada RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan; ▪ Koordinasi persiapan pengoperasian hasil pembangunan konektivitas diantaranya usulan penetapan skema perintis Tahun 2026 (Rantauprapat Baru-Pondok S5, Binjai - Besitang dan perpanjangan perintis KA Aceh), pengajuan skema sewa aset dan perbaikan infrastruktur (konektivitas Pelabuhan Tanjung Emas); ▪ Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kegiatan pendukung konektivitas transportasi perkeretaapian, diantaranya terkait penyelesaian pemenuhan lahan pendukung konektivitas melalui LMAN, koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait penetapan lokasi, serta monitoring tahapan pengadaan barang/jasa; ▪ Pengoptimalan sisa anggaran Tahun 2025 secara selektif untuk kegiatan pendukung, serta mempersiapkan dokumen pengusulan pada RKA Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026 berdasarkan skala prioritas RPJMN dan Rencana Strategis guna pemenuhan *readiness criteria*, penyelesaian pengadaan lahan, dan kegiatan-kegiatan pendukung konektivitas lainnya;	▪ Telah ditetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 melalui Keputusan Dirjen Perkeretaapian No. KP-DJKA 144 Tahun 2025 tanggal 12 Desember 2025 dan telah mengakomodir substansi kegiatan pendukung konektivitas perkeretaapian mengacu perkembangan kebijakan pada RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan; ▪ Perbaikan jalur KA konektivitas Pelabuhan Tanjung Emas akibat vandalisme dan tindaklanjut rekomendasi hasil pengujian akan dilaksanakan pada tahun 2026 melalui Revisi Kegiatan ▪ Progress pengadaan lahan untuk segmen lanjutan Pondok S5 – Kota Pinang masih berprogres pengadaan lahan melalui anggaran LMAN (progress 93,30% yaitu 710 dari 762 bidang telah dibebaskan), dimana terdapat kendala habisnya masa berlaku penetapan lokasi dan tidak tersedia anggaran BOPP Tahun 2025 ▪ Telah dilaksanakan pengoptimalan sisa anggaran tahun 2025 termasuk revisi buka blokir efisiensi untuk kegiatan penyelesaian kekurangan pembayaran (*backlog*) Kegiatan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Milik Negara (IMO) TA 2023 dan Telah ditetapkan Pagu Alokasi Anggaran dan DIPA Tahun 2026 pada tanggal 1 Desember 2026 dengan mengakomodir kegiatan berdasarkan skala prioritas RPJMN dan

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	▪ Pengoptimalan peran inspektur prasarana dan sarana perkeretaapian untuk pelaksanaan pengawasan/inspeksi secara berkala dalam pembangunan prasarana perkeretaapian mendukung konektivitas.	Rencana Strategis guna pemenuhan *readiness criteria*, penyelesaian pengadaan lahan, dan kegiatan-kegiatan pendukung konektivitas mencakup antara lain : o Penyusunan *readiness criteria* antara lain Studi Kelayakan (FS) Pengembangan Jalur Kereta Api Padang - Padang Panjang - Solok - Sawahlunto – Muaro, lintas Padang - Padang Panjang - Bukit Tinggi – Payakumbuh dan Padang -Sungai Limau - Pasaman Barat, DED Reaktivasi Lintas Kerenceng – Anyerkidul o Pengadaan lahan terkait kegiatan BOBP Pengadaan Tanah Jalur KA Lintas Rantau Prapat-Kota Pinang Tahap II (Segmen Pondok S5-Kota Pinang) dan kegiatan lainnya ▪ Telah dilaksanakan pengoptimalan peran dan fungsi inspektur prasarana dan sarana perkeretaapian untuk pelaksanaan pengawasan/inspeksi secara berkala dalam pembangunan prasarana perkeretaapian mendukung konektivitas serta mendukung pelakasnaan angkutan nataru
IKP2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	▪ Peningkatan keamanan sistem terkait layanan regulator perkeretaapian (perizinan, sertifikasi, pengujian, lainnya) untuk mencegah terjadinya gangguan pada layanan serta lanjutan pengembangan fitur Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai superapps yang terpadu dan terintegrasi; ▪ Memfasilitasi serta menindaklanjuti layanan pengaduan pelayanan angkutan penumpang khususnya pada layanan kereta api yang dikelola oleh BPKAR Sumatera Selatan dan BPKA Sulawesi Selatan diantaranya melalui barcode pada area boarding dan sosial media; ▪ Berpartisipasi dalam monitoring dan evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perhubungan serta dukungan pelaksanaan penilaian	▪ Telah dilaksanakan upaya peningkatan keamanan sistem dengan melakukan instalasi Endpoint Detection and Response (EDR) pada server aplikasi di Data Center Kementerian Perhubungan serta penyesuaian arsitektur/update teknologi pada modul layanan perizinan penyelenggaraan perkeretaapian yang semula monolithic menjadi microservices sesuai standar Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dalam rangka meningkatkan keamanan, fleksibilitas, mendukung kebijakan penyederhanaan aplikasi, serta mendukung pengembangan Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai superapps yang terpadu, terintegrasi, aman, dan andal. ▪ Layanan pengaduan pelayanan angkutan penumpang, khususnya pada

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	kepatuhan pelayanan publik Tahun 2025 oleh Ombudsman; ▪ Pengoptimalan sisa anggaran Tahun 2025 secara selektif untuk kegiatan pendukung termasuk memastikan pemenuhan anggaran angkutan perintis sampai akhir Tahun 2025, serta mempersiapkan dokumen pengusulan pada RKA Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026 berdasarkan skala prioritas layanan regulator dan angkutan perintis perkeretaapian; ▪ Pelaksanaan layanan sertifikasi/pengujian didukung dengan penyesuaian penugasan pegawai fungsional tertentu perkeretaapian sesuai bidang tugas dan kompetensinya (penguji, asisten penguji, lainnya).	layanan kereta api, telah difasilitasi dan ditindaklanjuti oleh BPKAR Sumatera Selatan melalui penyediaan barcode pada area boarding serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyampaian pengaduan masyarakat ▪ ▪ Anggaran untuk layanan perintis kereta api tahun 2025 masih mencukupi dan untuk tahun 2026 telah dialokasikan dalam pagu anggaran sebanyak 7 (tujuh) layanan. ▪ Telah dilaksanakan pengujian sarana,prasarana, dan SDM dengan melibatkan penugasan kepada penguji sarana, penguji prasarana, dan assesor SDM
IKP3 Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api	▪ Melakukan evaluasi pelaksanaan GAPEKA termasuk verifikasi dan validasi data capaian harian kinerja operasi pada jaringan jalur kereta api nasional sebagai acuan penetapan GAPEKA Tahun 2026 serta upaya peningkatan OTP perjalanan kereta api; ▪ Melakukan inspeksi/pemantauan berkala terhadap perjalanan kereta api pada lokasi rawan bencana/banjir/longsoran/amblesan/lokasi taspat dan rawan gangguan keamanan di perlintasan sebidang serta memastikan peralatan penanganan kecelakaan/rintang jalan tersedia dan ditempatkan sesuai kebutuhan; ▪ Lanjutan pembangunan jalur ganda kereta api (jalur ganda KA elevated Medan – Binjai, Solo-Semarang, lainnya) dan peningkatan jalur/jembatan/fasilitas operasi kereta api (Jember – Kalisat, Jabodetabek, lainnya) untuk meningkatkan kapasitas lintas dan kecepatan operasional kereta api serta memudahkan pengaturan operasional kereta api agar tepat waktu. ▪ Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan pendukung yang telah direlaksasi dengan pemanfaatan sisa waktu hingga akhir tahun serta mengusulkan perpanjangan kontrak tahun jamak untuk kegiatan pembangunan jalur	▪ Telah dilaksanakan evaluasi GAPEKA melalui pelaksanaan kegiatan : o Telah dilaksanakan evaluasi pelaksanaan Gapeka pada jaringan jalur KA Nasional Jawa dan Sumatera pada tanggal 8 Oktober 2025 dan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Wilayah Daop 3 Cirebon Triwulan I dan II Tahun 2025 pada tanggal 29 Oktober 2025; o Telah dilaksanakan pemeriksaan kelengkapan dokumen data dukung penetapan Gapeka pada: – Kereta Api Ringan /Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Hasil pemeriksaan disampaikan melalui Surat Direktur Lalu Lintas Nomor: KA.407/1/15/K2/DJKA/2025; – Kereta LRT Sumatera Selatan disampaikan melalui Surat Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Nomor 0015/K2.2/I/2025 o Telah diterbitkan Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian perihal Penetapan Perjalanan Kereta Api di Luar Grafik Perjalanan Kereta Api >30 hari berturut-turut pada tanggal 28 November 2025 dengan Nomor:

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	ganda/peningkatan jalur/jembatan/fasilitas operasi yang terkendala dan tidak dapat selesai pada akhir Tahun 2025 dilengkapi data dukung dan justifikasi yang memadai; ▪ Penyesuaian penugasan inspektur prasarana dan sarana perkeretaapian serta anggota Satuan Pelayanan pada masing-masing wilayah Balai Teknik Perkeretaapian berdasarkan kompetensi dalam pelaksanaan pengawasan perjalanan kereta api.	KA.407/1/5/DJKA/2025 dan tanggal 9 Desember 2025 dengan Nomor: KA.407/1/6/DJKA/2025; ▪ Telah dilaksanakan pemantauan dan rapat monev secara berkala terhadap prasarana perkeretaapian yang terdampak *force major* di wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat ▪ Lanjutan pembangunan jalur ganda KA dengan progres: o Segmen Medan-Binjai sebesar 80,69%; o Segmen Solo Balapan-Kalioso sebesar 96,63%; o Segmen Jember-Kaliasat sebesar 99,58%; o Segmen perkeretaapian di Jabodetabek sebesar 100%. ▪ Telah dilakukan pengusulan perpanjangan kontrak tahun jamak pada bulan Desember 2025, dan telah dilaksanakan kegiatan relaksasi blokir efisiensi untuk mendukung kegiatan antara lain:blokir efisiensi untuk mendukung kegiatan antara lain: o Kebijakan Stimulus Ekonomi Triwulan II TA 2025 melalui Diskon Tarif Transportasi Angkutan Kereta Api sebesar Rp229.639.776,000 pada 23 Oktober 2025; o Pembayaran tunggakan pekerjaan Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) di Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp81.066.626.000,00 pada 8 Desember 2025; ▪ Relaksasi blokir efisiensi sebesar Rp843.701.651.000,00 yang digunakan untuk penyelesaian sebagian kekurangan pembayaran (backlog) Kegiatan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO) TA 2023 sebesar Rp841.966.251.000,00 dan kegiatan pemantauan dan evaluasi untuk meningkatkan keselamatan transportasi bidang perkeretaapian sebesar Rp1.735.400.00,00 pada 19 Desember 2025.

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		▪ Telah dilaksanakan penugasan inspektur prasarana dan sarana perkeretaapian serta anggota Satuan Pelayanan pada masing-masing wilayah Balai Teknik Perkeretaapian dalam pelaksanaan pengawasan perjalanan kereta api termasuk pada periode nataru serta pengecekan prasarana perkeretaapian pasca bencana alam Sumatera Utara dan Sumatera Barat
IKP4 Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	▪ Koordinasi dan penyiapan rencana operasi penyelenggaran angkutan kereta api pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 termasuk mendukung penyelenggaraan angkutan motor gratis menggunakan kereta api; ▪ Penyusunan rancangan peraturan terkait penetapan tarif angkutan barang dengan kereta api; ▪ Integrasi data dan pelaporan angkutan kereta api yang *update* dan valid untuk peningkatan pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian dalam sistem yang terintegrasi (Strategi Kementerian Perhubungan, Portal Layanan Ditjen Perkeretaapian); ▪ Penyelesaian kegiatan peningkatan stasiun kereta api Rangkasbitung dalam upaya peningkatan layanan angkutan penumpang. ▪ Pengoptimalan sisa anggaran Tahun 2025 secara selektif untuk kegiatan pendukung diantaranya pemenuhan anggaran angkutan perintis sampai akhir Tahun 2025, serta kebutuhan pelaksanaan *rampcheck* pemenuhan standar pelayanan minimum untuk persiapan penyelenggaran angkutan kereta api pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. ▪ Pengoptimalan Satuan Pelayanan didukung peningkatan kompetensi SDM di masing-masing wilayah Balai Teknik Perkeretaapian untuk pengawasan penyelenggaraan angkutan penumpang dan barang sesuai standar pelayanan minimum.	▪ Telah dilaksanakan penyelenggaraan posko angkutan kereta api pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 pada 18 Desember 2025 sampai dengan 4 Januari 2026 dan guna mendukung penyelenggaraan angkutan motor gratis telah dilaksanakan : o Telah melakukan Pembahasan Rencana Operasi Angkutan Motor Gratis dengan Kereta Api pada Masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 pada tanggal 10 Oktober 2025 o Telah melakukan Bimbingan Teknis Pengawasan Angkutan Motor Gratis dengan KA pada Masa Angkutan Natal Tahun 2025 pada tanggal 18 Desember 2025 ▪ Telah dilaksanakan Pembahasan Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden terkait Penguatan Logistik Nasional dalam upaya peningkatan angkutan barang dengan KA pada tanggal 1 Oktober 2025. ▪ Telah dilakukan optimalisasi integrasi data penumpang badan usaha perkeretaapian melalui Strategi Kementerian Perhubungan dan terintegrasi dengan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Selain itu, tersedianya fitur pelaporan bagi badan usaha perkeretaapian pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang memungkinkan penyampaian data secara berkala, terintegrasi, serta meningkatkan akurasi dan validitas data guna memperkuat fungsi pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian.

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		▪ Progress kegiatan peningkatan stasiun kereta api Rangkasbitung s.d akhir Desember 2025 sebesar 98,80% (perpanjangan waktu penyelesaian s.d tahun 2026) ▪ Telah dilaksanakan revisi anggaran relaksasi blokir efisiensi guna mendukung kebijakan Stimulus Ekonomi melalui Diskon Tarif Transportasi Angkutan Kereta Api sebesar Rp229.639.776,000,00 ▪ Melaksanakan *survey On-time Performance (OTP)* dengan mengoptimalkan pelaksanaan tugas Satuan Pelayanan pada BTP Kelas I Medan.
IKP5 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	▪ Pelaksanaan inspeksi/*rampcheck* kondisi prasarana dan sarana perkeretaapian sebagai persiapan penyelenggaraan angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 termasuk upaya pencegahan terjadinya risiko jalur kereta api tidak sesuai spesifikasi teknis/rusak/rel aus/putus dan kegagalan sistem persinyalan yang dapat berdampak pada kejadian kecelakaan kereta api; ▪ Monitoring dan evaluasi terhadap manajemen tanggap darurat serta tindak lanjut rekomendasi peningkatan keselamatan perkeretaapian khususnya penanganan pasca kejadian kecelakaan kereta api sebagai acuan dalam tindakan preventif dan korektif periode berikutnya; ▪ Usulan perbaikan mekanisme pelaporan badan usaha dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi guna mempermudah pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian. ▪ Percepatan penyiapan dokumen teknis serta pelaksanaan kegiatan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara Tahun 2025 sesuai skema pemilihan penyedia berdasarkan ketentuan; ▪ Usulan revisi anggaran untuk pemanfaatan sisa kontrak/sisa anggaran yang potensi tidak terserap s.d akhir Tahun 2025 untuk pemenuhan pembayaran backlog IMO periode sebelumnya dan/atau penanganan rintang jalan/daerah rawan	• Telah dilaksanakan inspeksi/*rampcheck* kondisi prasarana dan sarana perkeretaapian sebagai persiapan penyelenggaraan angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 diantaranya: o Kegiatan Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian dalam rangka Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 pada BTP Kelas I Surabaya, BTP Kelas I Medan, BTP Kelas II Palembang, BTP Kelas II Padang, BTP Kelas II Palembang, BTP Kelas I Bandung, BTP Kelas I Jakarta, wilayah kerja PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi I Jakarta tanggal 12 s.d. 14 November 2025, BTP Kelas I Semarang, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya, BTP Kelas I Surabaya yang dimulai pada 20 Oktober s.d 14 November 2025; o Telah dilaksanakan *Rampcheck* sarana perkeretaapian pada 3 s.d 14 November 2025 ▪ Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Manajemen Tanggap Darurat Perkeretaapian pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero), diantaranya: o Daop 8 Surabaya pada tanggal 17 – 20 Juni 2025; o Daop 4 Semarang pada tanggal 15 – 18 Juli 2025;

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	kecelakaan/bencana alam/longsoran/ amblesan; ▪ Penyesuaian penugasan inspektur prasarana dan sarana perkeretaapian serta anggota Satuan Pelayanan pada masing-masing wilayah Balai Teknik Perkeretaapian berdasarkan kompetensi dalam pelaksanaan pengawasan/inspeksi keselamatan perkeretaapian.	o Daop 9 Jember pada tanggal 29 – 31 Oktober 2025. ▪ Kegiatan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara tahun 2025 dialihkan untuk pembayaran tahap ke 2 backlog IMO tahun 2023 ▪ Telah dilaksanakan revisi anggaran untuk pemanfaatan sisa kontrak/sisa anggaran yang potensi tidak terserap s.d akhir Tahun 2025 untuk pemenuhan pembayaran backlog IMO periode sebelumnya dan/atau penanganan rintang jalan/daerah rawan kecelakaan/bencana alam/longsoran/ amblesan pada : o 29 Oktober 2025 berupa Pergeseran anggaran antar Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk penyelesaian sebagian kekurangan pembayaran (backlog) Kegiatan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Milik Negara (IMO) TA 2023 sebesar Rp1.455.953.044.000,00; o 19 Desember 2025 berupa Revisi anggaran pembukaan blokir pada catatan halaman IV A DIPA dalam rangka relaksasi blokir efisiensi sebesar Rp843.701.651.000,00 yang digunakan untuk penyelesaian sebagian kekurangan pembayaran (backlog) Kegiatan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO) TA 2023 sebesar Rp841.966.251.000,00 dan kegiatan pemantauan dan evaluasi untuk meningkatkan keselamatan transportasi bidang perkeretaapian sebesar Rp1.735.400.000,00; dan Revisi anggaran dalam rangka pembayaran tunggakan sumber dana SBSN pekerjaan Penanganan Rintang Jalan dan Peningkatan 2 Unit Jembatan KA Lintas Tarahan - Tanjung Enim sebesar Rp1.896.593.382,00. ▪ Telah dilaksanakan penugasan inspektur prasarana dan sarana perkeretaapian

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		serta anggota Satuan Pelayanan pada masing-masing wilayah Balai Teknik Perkeretaapian dalam pelaksanaan pengawasan/inspeksi keselamatan perkeretaapian yang mendukung angkutan nataru termasuk pengecekan jalur KA pasca bencana alam Sumatera Utara dan Sumatera Barat
IK6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	▪ Pelaksanaan forum pembahasan untuk finalisasi Rencana Strategis Ditjen Perkeretaapian Tahun 2025-2029 termasuk sinkronisasi RPJMN Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis tingkat Kementerian Perhubungan serta seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; ▪ Penyusunan revisi Perjanjian Kinerja 2025 sesuai hasil monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan capaian kinerja dapat memenuhi kategori on the right track (capaian 90-110%). ▪ Percepatan penyerapan anggaran Tahun 2025 serta pemantauan pelaksanaan anggaran unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, termasuk dukungan revisi anggaran apabila diperlukan untuk pemenuhan backlog/selisih anggaran penyelenggaraan IMO periode sebelumnya; ▪ Pelaksanaan tagging/penandaan Rincian Output SBKU/SBKK pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026 sebagaimana diatur pada PMK Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2025; ▪ Koordinasi dengan KPKNL untuk percepatan persetujuan pemanfaatan aset/BMN guna mendukung perolehan PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian. ▪ Lanjutan pembinaan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk peningkatan kompetensi dan pengelolaan jenjang karir jabatan fungsional tertentu mencakup sosialisasi/bimbingan teknis/pendidikan/pelatihan/uji kompetensi terkait kepegawaian, manajerial dan teknis bidang perkeretaapian;	▪ Telah dilakukan pelaksanaan forum pembahasan Laporan Final Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025 – 2029 pada tanggal 10 Desember 2025 dengan dihadiri oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Serta telah ditetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 melalui Kepdirjen Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 144 Tahun 2025 Tentang Rencana Srategis DIrektorat Jenderal Perkeretaapian; ▪ Telah dilaksanakan revisi Perjanjian Kinerja 2025 pada bulan Desember 2025 dengan pertimbangan penyesuaian Renstra 2025-2029, penyesuaian sumber daya anggaran,dan menindaklanjuti rekomendasi dan hasil evaluasi monitoring periode Triwulan III. ▪ Telah.. ▪ Telah ditetapkan SBKK dan dilakukan tagging/penandaan Rincian Output SBKU/SBKK pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026 pada 1 November 2025; ▪ Penyiapan anggaran guna pelaksanaan peninjauan pemanfaatan aset/BMN tahun 2026; ▪ Telah dilakukan beberapa usulan uji kompetensi selama periode 2025, diantaranya JF Arsiparis, JF Analis Hukum, JF Perancangan Peraturan Perundang0unangan, JF Analis SDM Aparatur, JF APKAPBN, JF Analis Kebijakan, JF Bidang Perkeretaapian; ▪ Telah dilaksanakan kegiatan penyelarasan dan penyederhanaan Jabatan Fungsional yang dilakukan melalui koordinasi dan rapat bersama Biro

Indikator Kinerja	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	▪ Pembahasan usulan penyelarasan dan penyederhanaan jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta koordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Kementerian Perhubungan	Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) serta Pejabat Pembina Jabatan Fungsional Tertentu (PPJFT) di lingkungan Kementerian Perhubungan

Selain itu juga dilaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendorong perbaikan budaya kinerja organisasi diantaranya:

Tabel 3-1 Perubahan Budaya Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025

No.	Substansi/ Aspek	Semula	Menjadi	Dampak/Manfaat
1	Orientasi Kerja	Berorientasi pada pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran tanpa melihat dampak/hasil	Berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat (*outcome–impact*) sesuai fokus dalam peningkatan konektivitas, keselamatan dan pelayanan transportasi perkeretaapian	Peningkatan kualitas layanan publik transportasi perkeretaapian
2	Kepemimpinan dan Akuntabilitas Kinerja	Arahan pimpinan masih bersifat umum dan administrasi, belum menekankan aspek akuntabilitas individu terhadap hasil kerja	Pimpinan memberikan arahan langsung dan konsisten dengan rapat staf berkala untuk peningkatan akuntabilitas, disiplin, dan integritas pegawai. Kepedulian pimpinan terhadap penyelenggaran manajemen kinerja dan manajemen risiko juga menjadi komitmen pimpinan.	• Meningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai terhadap capaian kinerja organisasi; • Memperkuat budaya integritas dan profesionalisme.
3	Inovasi/Transformasi Digital dan Tata Kelola Data	Pemanfaatan sistem informasi dan layanan digital masih terpisah-pisah antar unit kerja	• Pengembangan Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian sebagai *superapps* yang terintegrasi antar layanan termasuk dalam tata kelola data; • Penggunaan aplikasi umum yaitu SRIKANDI untuk mendukung transformasi digital tata kelola administrasi.	• Meningkatkan efisiensi kerja, transparansi, dan kemudahan akses data serta layanan; • Mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan digital.

No.	Substansi/ Aspek	Semula	Menjadi	Dampak/Manfaat
4	Efisiensi dan Produktivitas Kerja	Pelaksanaan rapat dan koordinasi masih didominasi pertemuan tatap muka yang membutuhkan biaya besar dan waktu lama	• Pemanfaatan rapat daring / secara *online* (*Zoom, MS Teams*, dan lainnya) sebagai bentuk adaptasi kebijakan efisiensi anggaran; • Peningkatan produktivitas dengan mendorong inovasi pegawai dan kolaborasi lintas *stakeholder (crosscutting)*.	• Efisiensi anggaran perjalanan dinas; • Proses pengambilan keputusan lebih cepat; • Produktivitas dan komunikasi antar unit kerja internal dan eksternal tetap terjaga.
5	Perbaikan Berkelanjutan Manajemen Kinerja	• Belum terintegrasi optimal antara manajemen kinerja dengan manajemen penganggaran dan manajemen risiko; • Pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja organisasi tidak selaras dengan pengukuran kinerja individu; • Evaluasi SAKIP dilaksanakan secara *manual* melalui *excel* atau *spreadsheet*.	• Perbaikan berkelanjutan terus dilakukan dengan sinkronisasi kegiatan dan anggaran yang selaras mendukung pencapaian target kinerja pada Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja, serta juga dilakukan pengendalian berkala melalui pengendalian/ penanganan risiko setiap triwulan; • Pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja di tingkat pimpinan unit kerja telah disusun terstruktur dan berbasis *cascading* dari level unit kerja tertinggi hingga individu yang tertuang dalam SKP; • Evaluasi SAKIP dilaksanakan secara berjenjang dengan dukungan sistem informasi melalui fitur pada Portal Layanan Ditjen Perkeretaapian	• Peningkatan capaian kinerja unit kerja; • Efisiensi kegiatan dan anggaran yang memberikan dampak terhadap kinerja unit kerja dan berorientasi hasil (*outcome*); • Pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja efektif dan menjadi dasar dalam *reward and punishment* serta perbaikan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan; • Efektifitas pelaksanaan kegiatan evaluasi akuntabilitas kinerja secara terpadu.

3.2 KESIMPULAN

Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan IV Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Monitoring Kinerja tersebut menggambarkan pencapaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2025 mengacu pada target Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Rata-rata capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 100,310% yang secara ringkas disampaikan pada Tabel berikut.

Tabel 3-2 Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan IV Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IKP1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460	0,453	98,478
2	SP2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IKP2 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	93,500	93,506	100,006
		IKP3 Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api	%	96,200	97,703	101,562
		IKP4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	19,000	19,596	103,137
3	SP3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKP5 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	%	100,000	99,073	99,073
4	SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100,000	99,604	99,604
Rata-rata Capaian Kinerja						**100,310**

3.3 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Triwulan IV Tahun 2025, diperlukan upaya peningkatan kinerja guna memastikan target dapat terpenuhi pada periode berikutnya. Untuk itu, berikut disampaikan beberapa rekomendasi untuk masing-masing Indikator Kinerja Program:

1. IKP1 Rasio Konektivitas Antar Wilayah:

a. Melaksanakan kajian inventarisasi serta pemeriksaan detail terhadap jumlah kerusakan dan/atau kehilangan akibat bencana, termasuk penyusunan dokumen teknis perencanaan apabila diperlukan untuk penanganan permanen

b. Melakukan penanganan terhadap kerusakan akibat bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera;

c. Tindak lanjut terhadap persiapan pengoperasian lintas Semarang Tawang - Pelabuhan Tanjung Emas (pengajuan skema sewa aset dan tindak lanjut hasil pengujian kelaikan prasarana);

d. Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kegiatan pendukung konektivitas transportasi perkeretaapian, diantaranya terkait penyelesaian pemenuhan lahan pendukung konektivitas melalui LMAN, koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait penetapan lokasi, serta monitoring tahapan pengadaan barang/jasa (MRT Jakarta *East-West Phase* I).

e. Penyusunan data dukung revisi anggaran untuk penyusunan DED rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana perkeretaapian pasca bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera.

f. Optimalisasi pegawai sesuai Surat Keputusan Direktur Prasarana nomor SK-K3DJKA 72 Tahun 2025 tentang Tim Penilai Infrastruktur Prasarana Perkeretaapian berdasar Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat, Bencana Hidrometeorologi, bencana alam banjir, banjir bandang dan tanah longsor di wilayah BTP Kelas I Medan dan BTP Kelas II Padang Tahun 2025

2. **IKP2 Indeks Kepuasan Masyarakat (ikm) Terhadap Pelayanan Perkeretaapian:**

a. Pengelolaan sistem terkait layanan regulator perkeretaapian (perizinan, sertifikasi, pengujian, lainnya) untuk mencegah terjadinya gangguan pada layanan serta lanjutan pengembangan fitur Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai superapps yang terpadu dan terintegrasi;

b. Memfasilitasi serta menindaklanjuti layanan pengaduan pelayanan angkutan penumpang khususnya pada layanan kereta api yang dikelola oleh BPKAR Sumatera Selatan dan BPKA Sulawesi Selatan diantaranya melalui *barcode* pada area *boarding* dan sosial media;

c. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko untuk dukungan indikator kinerja kegiatan dan target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perkeretaapian;

d. Melakukan pembinaan kepada petugas pelayanan yang berada di stasiun maupun yang bertugas di dalam kereta secara periodik.

e. Mempersiapkan dokumen pengusulan pada RKA Pagu Kebutuhan Anggaran Tahun 2027 berdasarkan skala prioritas layanan regulator dan angkutan perintis perkeretaapian

f. Pelaksanaan layanan sertifikasi/pengujian didukung dengan penyesuaian penugasan pegawai fungsional tertentu perkeretaapian sesuai bidang tugas dan kompetensinya (penguji, asisten penguji, lainnya).

3. IKP3 Persentase Capaian *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api:

a. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna menjafa agar perjalanan kereta api sesuai dengan yang telah diprogramkan pada GAPEKA dan perjalanan di luar GAPEKA;

b. Melakukan inspeksi/pemantauan berkala terhadap perjalanan kereta api pada lokasi rawan bencana/banjir/longsoran/amblesan/lokasi taspat dan rawan gangguan keamanan di perlintasan sebidang serta memastikan peralatan penanganan kecelakaan/rintang jalan tersedia dan ditempatkan sesuai kebutuhan;

c. Penyiapan anggaran dan kegiatan Tahun 2026 untuk pelaksanaan kegiatan pendukung pencapaian kinerja *On Time Performance*.

d. Penyesuaian penugasan inspektur prasarana dan sarana perkeretaapian serta anggota Satuan Pelayanan pada masing-masing wilayah Balai Teknik Perkeretaapian berdasarkan kompetensi dalam pelaksanaan pengawasan perjalanan kereta api.

4. IKP4 Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api:

a. Percepatan perbaikan prasarana perkeretaapian di wilayah Sumatera Utara yang terdampak bencana alam (kegiatan persiapan)

b. Penyelenggaraan layanan subsidi KA perintis sesuai kebutuhan dan layanan terus berkelanjutan, serta pengelolaan PSO Tahun 2026 yang mencakup KA Perkotaan dan KA antar kota termasuk pelaksanaan verifikasinya

c. Evaluasi dan pemantauan kinerja layanan KA secara *realtime* serta pengawasan penerapan SPM secara berkala guna memastikan layanan sesuai ketentuan

d. Percepatan kajian pendukung angkutan barang antara lain penyusunan tarif angkutan logistik kereta api dan Penyusunan studi komprehensif mengenai perbandingan tarif angkutan kereta dengan angkutan barang truk;

e. Penyelesaian Peningkatan Stasiun Rangkasbitung.

5. IKP5 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian:

a. Melanjutkan pengawasan keselamatan perkeretaapian secara periodik sebagai regulator, termasuk pelaksanaan inspeksi/pemeriksaan/ *rampcheck* guna memastikan kehandalan sarana dan prasarana dalam mendukung penyelenggaraan angkutan Lebaran Tahun 2026.

b. Pelaksanaan verifikasi Tindak Lanjut Hasil Audit SMKP Penyelenggara Perkeretaapian di PT KAI Divisi LRT Jabodebek;

c. Pelaksanaan kegiatan observasi dokumen dan tinjauan lapangan untuk Penilaian Sistem Keselamatan Perkeretaapian Prasarana;

d. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi SDM, Sarana dan Prasarana Perkeretaapian;

e. Identifikasi daerah rawan bencana alam dengan kondisi cuaca ekstrim di beberapa wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian serta menugaskan Satuan Pelayanan untuk melakukan pengawasan intensif termasuk koordinasi penyelesaian penanganan rintang jalan/amblesan dan penggantian jembatan yang kritis yang telah terdampak.

f. Koordinasi persiapan penyelenggaraan IMO Tahun 2026 yang kemungkinan terdampak kebijakan penghematan anggaran.

g. Percepatan penanganan prasarana yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat

6. IKP6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan

a. Melakukan persiapan penyelenggaraan SAKIP Tahun 2026 seperti penyusunan konsep SK Tim Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Tahun 2026 serta penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang dilengkapi dengan rencana aksi;

b. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SAKIP Tahun 2026 untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi seluruh pegawai masing-masing unit kerja;

c. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (PSP BMN) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2026;

d. Koordinasi dan telaah terkait revisi penentuan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2026 untuk masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna memperoleh target PNBP yang valid/sesuai kemampuan dan potensi perolehan PNBP masing-masing unit kerja.

e. Melakukan penginputan manual dan capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2025 pada aplikasi SAKTI guna meningkatkan nilai kinerja perencanaan anggaran;

f. Melakukan *assessment* terhadap rincian *output* seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada aplikasi Monev Kemenkeu dalam rangka peningkatan kualitas data kinerja melalui pengisian informasi data pra-pelaporan;

g. Melakukan pemutakhiran/*update* data kinerja (sasaran, indikator dan target) pada aplikasi KRISNA-Renja sebagai upaya penyesuaian dan sinkronisasi data kinerja dengan dokumen Rencana Strategis;

h. Penyiapan *tools*/manual perhitungan nilai kualitas ASN mengingat di Tahun 2026 pelaksanaan penilaian/perhitungan dilakukan secara mandiri;
i. Penyiapan anggaran dan kegiatan Tahun 2026 untuk pelaksanaan kegiatan pendukung tata kelola pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
j. Lanjutan pembinaan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mencakup sosialisasi/*workshop*/bimbingan teknis terkait peningkatan disiplin dan kinerja kepegawaian implementasi penilaian kinerja pegawai dan organisasi sesuai kebijakan Kementerian PANRB terbaru;
k. Koordinasi intensif dengan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi serta Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Kementerian Perhubungan untuk penyiapan peraturan turunan dari Rancangan Peraturan Menteri PAN-RB tentang Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi, guna mendukung proses penyederhanaan Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian dan Inspektur Prasarana Perkeretaapian;
l. Pendampingan penyusunan kajian penataan organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta kajian *review* proses bisnis dan SOP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk mendukung penyelarasan kelembagaan dengan kebijakan reformasi birokrasi, meningkatkan kejelasan alur kerja dan pembagian peran antarunit kerja, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Selanjutnya dengan disusunnya Laporan Monitoring Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian Triwulan IV Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi kinerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk menjadi acuan dalam peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

LAMPIRAN

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN IV 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

LAMPIRAN I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Mohamad Risal Wasal
Jabatan	:	Direktur Jenderal Perkeretaapian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	:	Dudy Purwagandhi
Jabatan	:	Menteri Perhubungan

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua, Menteri Perhubungan	Pihak Pertama, Direktur Jenderal Perkeretaapian
DUDY PURWAGANDHI	MOHAMAD RISAL WASAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
SP1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IKP1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460
SP2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKP2	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA	%	100,000
SP3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IKP3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,740
		IKP4	Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api	%	96,100
		IKP5	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	19,000
SP4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP6	Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100,000

Kegiatan			Anggaran
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rp	813.226.191.000
2.	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	Rp	895.248.757.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	Rp	2.670.022.802.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	Rp	46.162.939.000
5.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	Rp	22.069.026.000
6.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Rp	637.851.276.000
7.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	Rp	17.498.737.000
8.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	Rp	14.149.348.000
9.	Legislasi dan Litigasi Transportasi	Rp	3.066.058.000

Disetujui
Menteri Perhubungan

DUDY PURWAGANDHI

Jakarta, Januari 2025
Direktur Jenderal Perkeretaapian

MOHAMAD RISAL WASAL

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Allan Tandiono
Jabatan	:	Direktur Jenderal Perkeretaapian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	:	Dudy Purwagandhi
Jabatan	:	Menteri Perhubungan

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2025

Pihak Kedua, Menteri Perhubungan	Pihak Pertama, Direktur Jenderal Perkeretaapian
DUDY PURWAGANDHI	ALLAN TANDIONO

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
SP1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IKP1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,460
SP2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKP2	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian per 1.000 Jumlah Keberangkatan KA	%	100,000
SP3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IKP3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	3,740
		IKP4	Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api	%	96,200
		IKP5	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	19,000
SP4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP6	Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100,000

Kegiatan			Anggaran Efektif
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rp	1.505.062.251.000
2.	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	Rp	2.250.259.374.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	Rp	2.331.113.312.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	Rp	18.024.752.000
5.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	Rp	4.072.234.000
6.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Rp	363.966.942.000
7.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	Rp	6.528.613.000
8.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	Rp	1.292.986.000
9.	Legislasi dan Litigasi Transportasi	Rp	650.650.000

Disetujui
Menteri Perhubungan

DUDY PURWAGANDHI

Jakarta, Juni 2025
Direktur Jenderal Perkeretaapian

ALLAN TANDIONO

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Allan Tandiono
Jabatan	:	Direktur Jenderal Perkeretaapian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	:	Dudy Purwagandhi
Jabatan	:	Menteri Perhubungan

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2025

Pihak Kedua, Menteri Perhubungan	Pihak Pertama, Direktur Jenderal Perkeretaapian
DUDY PURWAGANDHI	ALLAN TANDIONO

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
SP1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IKP1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,46
SP2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IKP2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	93,50
		IKP3	Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api	%	96,20
		IKP4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	19,00
SP3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKP5	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	%	100,00
SP4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP6	Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100,00

Kegiatan			Anggaran Efektif
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rp	1.729.939.068.000
2.	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	Rp	2.146.760.277.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	Rp	2.465.933.666.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	Rp	22.633.076.000
5.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	Rp	4.037.234.000
6.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Rp	417.866.092.000
7.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	Rp	6.528.613.000
8.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	Rp	1.762.986.000
9.	Legislasi dan Litigasi Transportasi	Rp	650.650.000

Disetujui
Menteri Perhubungan

DUDY PURWAGANDHI

Jakarta, Desember 2025
Direktur Jenderal Perkeretaapian

ALLAN TANDIONO

INDIKATOR KINERJA PROGRAM
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
TAHUN 2025

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	
SP1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IKP1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Nilai)
SP2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IKP2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian (Nilai)
		IKP3	Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api (%)
		IKP4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api (%)
SP3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKP5	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian (%)
SP4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKP6	Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (%)

Jakarta, Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN



ALLAN TANDIONO
NIP 198801182025211023

RENCANA AKSI PADA REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN EFEKTIF (Rp.)	PENANGGUNG JAWAB
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
SP1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	IK1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Rasio	0,46	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (pembangunan jalur KA baru,reaktivasi jalur KA, termasuk penyiapan dokumen perencanaan teknis, lahan, dan lainnya)	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	1.648.872.442.000	Setditjen Perkeretaapian, Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA
SP2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	IK2 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian	Nilai	93,50	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda kereta api dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian baik jalur kereta api dan fasilitas operasi dan lainnya)	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	93,50	2.271.332.130.000	Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian,Dit. Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA
	IK3 Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api	%	96,20		96,10	96,10	96,10	96,20	96,20	96,20	96,20	96,20	96,20	96,20	96,20	96,20		
	IK4 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	%	19,00		1,55	3,01	4,49	6,07	7,72	9,31	11,02	12,67	14,29	15,69	17,24	19,00		
SP2 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IK5 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	%	100,00	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (pengujian dan sertifikasi kelaikan sarana, prasarana dan kompetensi SDM, perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara, pembinaan dan pengaturan/pengendalian/ pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian, dan lainnya)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2.488.566.742.000	Dit. Keselamatan Perkeretaapian, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, Balai Pengujian, Balai Perawatan, BTP, BPKA
SP4 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IK6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	100,00	Penyelenggaraan AKIP, monitoring pelaksanaan anggaran, monitoring PNBP dan penyelenggaraan pembinaan SDM	9,37	15,07	22,24	22,48	22,64	26,04	39,69	65,20	64,38	100,00	100,00	100,00	430.845.575.000	Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

Jakarta, Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

ALLAN TANDIONO

NIP 198801182025211023

MANUAL INDIKATOR

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN
NOMOR: KP-DJKA TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

TATA CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

A. TATA CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

INDIKATOR KINERJA	TATA CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA
IKP1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	Definisi: Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian merupakan perbandingan antara jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Strategis lainnya yang terhubung infrastruktur perkeretaapian s.d tahun berjalan dibandingkan dengan rencana jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/ Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Strategis lainnya yang terhubung dengan infrastruktur perkeretaapian sesuai RIPNAS Tahun 2030 dikalikan dengan faktor pemanfaatan infrastruktur perkeretaapian.
	Satuan: Rasio
	Sumber Data: Direktorat Prasarana/ BTP/ BPKA/ Badan Usaha

INDIKATOR KINERJA	TATA CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA
	Formulasi: $\textbf{Rasio Konektivitas Infrastruktur Perkeretaapian } (RK_{IP}) = \frac{\textit{Jumlah PKN/ PKW/ Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/ Kawasan Strategis Nasional/ Kawasan Strategis lainnya yang terhubung Infrastruktur Perkeretaapian s.d Tahun Berjalan}}{\textit{Rencana Jumlah PKN/ PKW/ Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/ Kawasan Strategis Nasional/ Kawasan Strategis Lainnya yang Terhubung dengan Infrastruktur Perkeretaapian sesuai RIPNAS Tahun 2030}} \times \textit{Faktor Pemanfaatan Infrastruktur Perkeretaapian}$ Keterangan: Faktor pemanfaatan infrastruktur perkeretaapian merupakan perbandingan realisasi perjalanan kereta api baik penumpang maupun barang terhadap program perjalanan kereta api yang ditetapkan pada Grafik Perjalanan Kereta Api.
IKP2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perkeretaapian	Definisi: Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari aplikasi 3AS Case Survey Management System yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.
	Satuan: Nilai
	Sumber Data: Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi, BPKAR Sumatera Selatan, BPKA Sulawesi Selatan
	Formulasi: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Ditjen Perkeretaapian diperoleh dari rata-rata nilai IKM Direktorat LLAKA, Direktorat Prasarana, Direktorat Sarana, Direktorat Keselamatan, BPKA Ringan Sumatera Selatan, Balai Pengujian diperoleh dari aplikasi 3AS Case Survey Management System yang dikelola oleh Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Kementerian Perhubungan dan nilai IKM BPKA Ringan Sumatera Selatan dan BPKA Sulawesi Selatan. $\textbf{IKM}_{\textbf{DJKA}} = (\textbf{IKM}_{\textbf{Dit LLAKA}} + \textbf{IKM}_{\textbf{Dit Prasarana}} + \textbf{IKM}_{\textbf{Dit Sarana}} + \textbf{IKM}_{\textbf{Dit Keselamatan}} + \textbf{IKM}_{\textbf{Balai Pengujian}} + \textbf{IKM}_{\textbf{Balai Perawatan}} + \textbf{IKM}_{\textbf{BPKA Sulawesi Selatan}} + \textbf{IKM}_{\textbf{BPKAR Sumatera Selatan}})/8$

<table>
<tr><td>INDIKATOR KINERJA</td><td>TATA CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA</td></tr>
<tr><td></td><td>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 –100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus: IKM = SKM Unit Pelayanan x 25
<table>
<tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1.00 – 2.5996</td><td>25.00 – 64.99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2.60 – 3.064</td><td>65.00 – 76.60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr>
<tr><td>3</td><td>3.0644 – 3.532</td><td>76.61 – 88.30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>4</td><td>3.5324 – 4.00</td><td>88.31 – 100.00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr>
</table>
Sumber: Peraturan MENPAN-RB No. 14 Tahun 2017</td></tr>
<tr><td rowspan="4">IKP 4
Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api</td><td>Definisi:
Rata-rata jumlah kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang yang tepat waktu pada tahun berjalan dibandingkan jumlah keseluruhan kedatangan dan keberangkatan angkutan KA penumpang dan barang</td></tr>
<tr><td>Satuan: Persen</td></tr>
<tr><td>Sumber Data: Direktorat LLAKA/ BTP/ BPKA/ Badan Usaha</td></tr>
<tr><td>Formulasi:
$$\textbf{\textit{Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Perkeretaapian}} = \frac{\textit{Rata-rata Jumlah Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang tepat waktu pada tahun berjalan}}{\textit{Jumlah Keseluruhan Kedatangan dan Keberangkatan KA Penumpang dan Barang pada tahun berjalan}} \times 100\%$$</td></tr>
</table>

INDIKATOR KINERJA	TATA CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA
IKP 5 Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	Definisi: Penjumlahan antara pemenuhan target angkutan kereta api penumpang dan pemenuhan target angkutan kereta api barang periode 2025-2029 sesuai dokumen RPJMN/Rencana Strategis Ditjen Perkeretaapian dalam mendukung target RIPNAS. Satuan: Persen Sumber Data: Direktorat LLAKA/ BTP/ BPKA/ Badan Usaha Formulasi: **Persentase Pemenuhan Target Angkutan KA** = **Persentase Pemenuhan Target Angkutan KA Penumpang** + **Persentase Pemenuhan Target Angkutan KA Barang** Pemenuhan target angkutan penumpang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan penumpang kereta api pada Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan penumpang kereta api periode 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis. $\textbf{Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang} = \frac{\textbf{Jumlah Realisasi Angkutan Penumpang Kereta Api dari Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan}}{\textbf{Target Angkutan Penumpang Kereta Api s.d 2029 sesuai Rencana Strategis}} \times 50\%$ Pemenuhan target angkutan barang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan barang kereta api pada Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan barang kereta api periode 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis. $\textbf{Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang} = \frac{\textbf{Jumlah Realisasi Angkutan Barang Kereta Api dari Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan}}{\textbf{Target Angkutan Penumpang Kereta Api s.d 2029 sesuai Rencana Strategis}} \times 50\%$

INDIKATOR KINERJA	TATA CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA
IKP 2 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	Definisi: Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian diperoleh dari selisih nilai maksimal tingkat keselamatan (100%) dengan persentase jumlah kejadian kecelakaan kereta api (anjlokan, terguling, tabrakan KA dengan KA dan lain-lain/terbakar) pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah keberangkatan kereta api di pada tahun berjalan
	Satuan: %
	Sumber Data: Direktorat Keselamatan/ Direktorat LLAKA/ BTP/ BPKA/ Badan Usaha
	Formulasi: $\textbf{\textit{Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian}} = \left[1 - \frac{\text{Jumlah Kejadian Kecelakaan KA pada Tahun Berjalan} \times 1.000}{\text{Jumlah Keberangkatan Kereta Api pada Tahun Berjalan}} \right] \times 100\%$
IKP6 Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Definisi: Persentase Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan rata-rata dari persentase pencapaian kinerja mencakup Nilai Evaluasi AKIP, Nilai Kinerja Anggaran, Realisasi PNBP Bidang Perkeretaapian dan Nilai Kualitas ASN Ditjen Perkeretaapian.
	Satuan: Persen
	Sumber Data: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian
	Formulasi: $TKTKP_{KA} = (AKIP_{DJKA} + NKA_{DJKA} + PNBP_{DJKA} + NKASN_{DJKA})/4$ $AKIP_{DJKA}$ = Tingkat pencapaian Nilai AKIP DJKA NKA_{DJKA} = Tingkat pencapaian Nilai Kinerja Anggaran DJKA $PNBP_{DJKA}$ = Tingkat pencapaian Realisasi PNBP DJKA $NKASN_{DJKA}$ = Tingkat pencapaian Nilai Kualitas ASN

LAMPIRAN II

REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA

KOMITMEN REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA
BERDASARKAN LAPORAN MONITORING KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
TRIWULAN IV TAHUN 2025

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
A	**SASARAN : Meningkatnya Konektivitas Transportasi Perkeretaapian** **INDIKATOR KINERJA: Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian**		
1	Melaksanakan kajian inventarisasi serta pemeriksaan detail terhadap jumlah kerusakan dan/atau kehilangan akibat bencana, termasuk penyusunan dokumen teknis perencanaan apabila diperlukan untuk penanganan permanen	Triwulan I s.d II Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Direktorat Keselamatan Perkeretaapian • BTP Kelas I Medan
2	Melakukan penanganan terhadap kerusakan akibat bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera	Triwulan I s.d IV Tahun 2026	• Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Direktorat Keselamatan Perkeretaapian • BTP Kelas I Medan dan BTP Kelas II Padang
3	Tindak lanjut terhadap persiapan pengoperasian lintas Semarang Tawang - Pelabuhan Tanjung Emas (pengajuan skema sewa aset dan tindak lanjut hasil pengujian kelaikan prasarana	Triwulan I s.d TW IV Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • BTP Kelas I Semarang
4	Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kegiatan pendukung konektivitas transportasi perkeretaapian, diantaranya terkait penyelesaian pemenuhan lahan pendukung konektivitas melalui LMAN, koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait penetapan lokasi, serta monitoring tahapan pengadaan barang/jasa (MRT Jakarta East-West Phase I).	Triwulan I s.d TW IV Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat Prasarana Perkeretaapian
5	Penyusunan data dukung revisi anggaran untuk penyusunan DED rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana perkeretaapian pasca bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera	Triwulan I s.d TW II Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • BTP Kelas I Medan
6	Optimalisasi pegawai sesuai Surat Keputusan Direktur Prasarana nomor SK-K3DJKA 72 Tahun 2025 tentang Tim Penilai Infrastruktur Prasarana Perkeretaapian berdasar Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat, Bencana Hidrometeorologi, bencana alam banjir, banjir bandang dan tanah longsor di wilayah BTP Kelas I Medan dan BTP Kelas II Padang Tahun 2025	Triwulan I s.d TW IV Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • BTP Kelas I Medan dan BTP Kelas II Padang

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
B.	**SASARAN : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian** **INDIKATOR KINERJA: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian**		
1	Pengelolaan sistem terkait layanan regulator perkeretaapian (perizinan, sertifikasi, pengujian, lainnya) untuk mencegah terjadinya gangguan pada layanan serta lanjutan pengembangan fitur Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai superapps yang terpadu dan terintegrasi	Triwulan I s.d TW IV Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat terkait
2	Memfasilitasi serta menindaklanjuti layanan pengaduan pelayanan angkutan penumpang khususnya pada layanan kereta api yang dikelola oleh BPKAR Sumatera Selatan dan BPKA Sulawesi Selatan diantaranya melalui barcode pada area boarding dan sosial media	Triwulan I s.d TW IV Tahun 2026	• BPKAR Sumsel • BPKA Sulsel
3	Berpartisipasi dalam monitoring dan evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perhubungan serta dukungan pelaksanaan penilaian kepatuhan pelayanan publik Tahun 2025 oleh Ombudsman;	Triwulan I Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat Teknis • Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
4	Melakukan identifikasi dan penilaian risiko untuk dukungan indikator kinerja kegiatan dan target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perkeretaapian	Triwulan I Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat Teknis terkait • Balai Pengujian • BPKARS • BPKA Sulawesi Selatan
5	Melakukan pembinaan kepada petugas pelayanan yang berada di stasiun maupun yang bertugas di dalam kereta secara periodik	Triwulan I Tahun 2026	• Dit LLAKA
6	Mempersiapkan dokumen pengusulan pada RKA Pagu Kebutuhan Anggaran Tahun 2027 berdasarkan skala prioritas layanan regulator dan angkutan perintis perkeretaapian	Triwulan I Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat Teknis • Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
7	Pelaksanaan layanan sertifikasi/pengujian didukung dengan penyesuaian penugasan pegawai fungsional tertentu perkeretaapian sesuai bidang tugas dan kompetensinya (penguji, asisten penguji, lainnya).	Triwulan I Tahun 2026	• Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Direktorat Sarana Perkeretaapian • Direktorat Keselamatan Perkeretaapian • Balai Pengujian

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
C.	**SASARAN : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian** **INDIKATOR KINERJA: Persentase *On Time Performance* (OTP) Transportasi Kereta Api**		
1	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna menjaga agar perjalanan kereta api sesuai dengan yang telah diprogramkan pada GAPEKA dan perjalanan di luar GAPEKA	Triwulan I s.d TW IV Tahun 2026	• Direktorat LLAKA • Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
2	Melakukan inspeksi/pemantauan berkala terhadap perjalanan kereta api pada lokasi rawan bencana/banjir/longsoran/amblesan/lokasi taspat dan rawan gangguan keamanan di perlintasan sebidang serta memastikan peralatan penanganan kecelakaan/rintang jalan tersedia dan ditempatkan sesuai kebutuhan	Triwulan I s.d TW IV Tahun 2026	• Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Direktorat Keselamatan Perkeretaapian • Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
3	Penyiapan anggaran dan kegiatan Tahun 2026 untuk pelaksanaan kegiatan pendukung pencapaian kinerja *On Time Performance*.	Triwulan I s.d TW II Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat LLAKA • Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
4	Penugasan inspektur prasarana dan sarana perkeretaapian serta anggota Satuan Pelayanan pada masing-masing wilayah Balai Teknik Perkeretaapian berdasarkan kompetensi dalam pelaksanaan pengawasan perjalanan kereta api.	Triwulan I s.d. IV Tahun 2026	• Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Direktorat Sarana Perkeretaapian • Direktorat Keselamatan • Balai terkait
D.	**SASARAN : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian** **INDIKATOR KINERJA: Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api**		
1	Percepatan perbaikan prasarana perkeretaapian di wilayah Sumatera Utara yang terdampak bencana alam (kegiatan persiapan)	Triwulan I s.d TW IV Tahun 2026	• Direktorat LLAKA • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Direktorat Keselamatan Perkeretaapian • BTP Kelas I Medan
2	Penyelenggaraan layanan subsidi KA perintis sesuai kebutuhan dan layanan terus berkelanjutan, serta pengelolaan PSO Tahun 2026 yang mencakup KA Perkotaan dan KA antar kota termasuk pelaksanaan verifikasinya	Triwulan I s.d TW IV Tahun 2026	• Direktorat LLAKA • Balai terkaityang menyelenggarakan angkutan Perintis
3	Evaluasi dan pemantauan kinerja layanan KA secara *realtime* serta pengawasan penerapan SPM secara berkala guna memastikan layanan sesuai ketentuan	Triwulan I Tahun 2026	• Direktorat LLAKA • Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian (Satpel)

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
4	Percepatan kajian pendukung angkutan barang antara lain penyusunan tarif angkutan logistik kereta api dan Penyusunan studi komprehensif mengenai perbandingan tarif angkutan kereta dengan angkutan barang truk;	Triwulan I s.d TW III Tahun 2026	• Direktorat LLAKA
5	Penyelesaian Peningkatan Stasiun Rangkasbitung	Triwulan I Tahun 2026	• Direktorat Prasarana Perkeretaapian • BTP Kelas I Jakarta
6	Penyusunan Reviu Rencana Induk Perkeretaapian termasuk Reviu *Masterplan* Kereta Api di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi guna selanjutnya menjadi referensi dan acuan dalam penyesuaian/penetapan target jumlah angkutan penumpang maupun barang pada masing-masing layanan/lokasi	Triwulan I s.d TW IV Tahun 2026	Sekretariat Ditjen Perkeretaapian
7	Antisipasi kegiatan pendukung peningkatan layanan angkutan KA (termasuk subsidi perintis) yang terdampak kebijakan *Automatic Adjustmen*t (AA) atau blokir dengan optimalisasi anggaran dan/atau pengusulan kembali pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2027.	Triwulan I Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat LLAKA • Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
E.	**SASARAN : Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian** **INDIKATOR KINERJA: Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian**		
1	Melanjutkan pengawasan keselamatan perkeretaapian secara periodik sebagai regulator, termasuk pelaksanaan inspeksi/pemeriksaan/ r*ampcheck* guna memastikan kehandalan sarana dan prasarana dalam mendukung penyelenggaraan angkutan Lebaran Tahun 2026.	Triwulan I Tahun 2026	• Direktorat Sarana Perkeretaapian • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Direktorat Keselamatan Perkeretaapian • BTP Semarang • Balai Pengujian Perkeretaapian
2	Pelaksanaan verifikasi Tindak Lanjut Hasil Audit SMKP Penyelenggara Perkeretaapian di PT KAI Divisi LRT Jabodebek	Triwulan I Tahun 2026	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
3	Pelaksanaan kegiatan observasi dokumen dan tinjauan lapangan untuk Penilaian Sistem Keselamatan Perkeretaapian Prasarana	Triwulan I Tahun 2026	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
4	Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi SDM, Sarana dan Prasarana Perkeretaapian	Triwulan I s.d TW 4 Tahun 2026	• Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Direktorat Sarana Perkeretaapian • Direktorat Keselamatan Perkeretaapian • Balai Pengujian

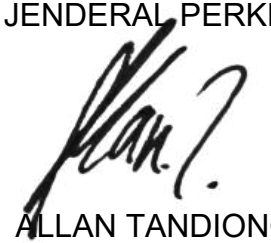
NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
5	Identifikasi daerah rawan bencana alam dengan kondisi cuaca ekstrim di beberapa wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian serta menugaskan Satuan Pelayanan untuk melakukan pengawasan intensif termasuk koordinasi penyelesaian penanganan rintang jalan/amblesan dan penggantian jembatan yang kritis yang telah terdampak.	Triwulan I Tahun 2026	• Direktorat Keselamatan Perkeretaapian • Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian • Satuan Pelayanan di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
6	Koordinasi persiapan penyelenggaraan IMO Tahun 2026 yang kemungkinan terdampak kebijakan penghematan anggaran	Triwulan I Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • BTP Terkait
7	Percepatan penanganan prasarana yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat	Triwulan I s.d TW IV Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat Prasarana • Direktorat Keselamatan Perkeretaapian • Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
8	Pelaksanaan inspeksi/rampcheck kondisi prasarana dan sarana perkeretaapian sebagai persiapan penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2026 termasuk upaya pencegahan terjadinya risiko jalur kereta api tidak sesuai spesifikasi teknis/rusak/rel aus/putus dan kegagalan sistem persinyalan yang dapat berdampak pada kejadian kecelakaan kereta api;	Triwulan I Tahun 2026	• Direktorat Sarana Perkeretaapian • Direktorat Prasarana Perkeretaapian • Direktorat Keselamatan Perkeretaapian • Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
F.	**SASARAN : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian** **INDIKATOR KINERJA: Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian**		
1	Melakukan persiapan penyelenggaraan SAKIP Tahun 2026 seperti penyusunan konsep SK Tim Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Tahun 2026 serta penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang dilengkapi dengan rencana aksi	Triwulan I Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
2	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SAKIP Tahun 2026 untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi seluruh pegawai masing-masing unit kerja	Triwulan I Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian
3	Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (PSP BMN) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Tahun 2026	Triwulan I Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
4	Koordinasi dan telaah terkait revisi penentuan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2026 untuk masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian guna memperoleh target PNBP yang valid/sesuai kemampuan dan potensi perolehan PNBP masing-masing unit kerja.	Triwulan I Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian • Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
5	Melakukan penginputan manual dan capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2025 pada aplikasi SAKTI guna meningkatkan nilai kinerja perencanaan anggaran	Triwulan I Tahun 2026	Sekretariat Ditjen Perkeretaapian
6	Melakukan *assessment* terhadap rincian *output* seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada aplikasi Monev Kemenkeu dalam rangka peningkatan kualitas data kinerja melalui pengisian informasi data pra-pelaporan	Triwulan I Tahun 2026	Sekretariat Ditjen Perkeretaapian
7	Melakukan pemutakhiran/*update* data kinerja (sasaran, indikator dan target) pada aplikasi KRISNA-Renja sebagai upaya penyesuaian dan sinkronisasi data kinerja dengan dokumen Rencana Strategis	Triwulan I Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian
8	Penyiapan tools/manual perhitungan nilai kualitas ASN mengingat di Tahun 2026 pelaksanaan penilaian/perhitungan dilakukan secara mandiri	Triwulan I Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian
9	Penyiapan anggaran dan kegiatan Tahun 2026 untuk pelaksanaan kegiatan pendukung tata kelola pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Triwulan I Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
10	Lanjutan pembinaan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian mencakup sosialisasi/workshop/bimbingan teknis terkait peningkatan disiplin dan kinerja kepegawaian implementasi penilaian kinerja pegawai dan organisasi sesuai kebijakan Kementerian PANRB terbaru	Triwulan I Tahun 2026	Sekretariat Ditjen Perkeretaapian
11	Koordinasi intensif dengan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi serta Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Kementerian Perhubungan untuk penyiapan peraturan turunan dari Rancangan Peraturan Menteri PAN-RB tentang Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi, guna mendukung proses penyederhanaan Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian dan Inspektur Prasarana Perkeretaapian	Triwulan I Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian

NO	REKOMENDASI PENINGKATAN KINERJA	WAKTU PELAKSANAAN	PIC
12	Pendampingan penyusunan kajian penataan organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta kajian *review* proses bisnis dan SOP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk mendukung penyelarasan kelembagaan dengan kebijakan reformasi birokrasi, meningkatkan kejelasan alur kerja dan pembagian peran antarunit kerja, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja organisasi secara berkelanjutan	Triwulan I s.d TW IV Tahun 2026	• Sekretariat Ditjen Perkeretaapian • Direktorat Teknis • Balai terkait di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

Jakarta, Januari 2026

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,



ALLAN TANDIONO

NIP 198801182025211023

LAMPIRAN III

REALISASI DAN ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN TRIWULAN IV TAHUN 2025

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

REALISASI BELANJA PER SUMBER DANA

NO	(Kode) Sumber Dana	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	(A) RUPIAH MURNI	PAGU	255,258,712,000	4,110,303,735,000	340,132,828,000	0	0	0	0	0	0	4,705,695,275,000
		REALISASI	246,698,649,707 (96.65%)	3,967,614,532,797 (96.53%)	329,010,668,141 (96.73%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4,543,323,850,645 (96.55%)
		SISA	8,560,062,293	142,689,202,203	11,122,159,859	0	0	0	0	0	0	162,371,424,355
2	(B) PINJAMAN LUAR NEGERI	PAGU	0	0	148,519,217,000	0	0	0	0	0	0	148,519,217,000
		REALISASI	0.00%	0.00%	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(0.00%)
		SISA	0	0	148,519,217,000	0	0	0	0	0	0	148,519,217,000
3	(D) PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PAGU	0	12,887,211,000	3,331,540,000	0	0	0	0	0	0	16,218,751,000
		REALISASI	0.00%	6,812,615,185 (52.86%)	2,754,228,692 (82.67%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9,566,843,877 (58.99%)
		SISA	0	6,074,595,815	577,311,308	0	0	0	0	0	0	6,651,907,123
4	(F) BADAN LAYANAN UMUM	PAGU	0	55,460,317,000	22,866,413,000	0	0	0	0	0	0	78,326,730,000
		REALISASI	0.00%	24,900,753,046 (44.90%)	338,780,884 (1.48%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25,239,533,930 (32.22%)
		SISA	0	30,559,563,954	22,527,632,116	0	0	0	0	0	0	53,087,196,070
5	(I) HIBAH LUAR NEGERI	PAGU	0	0	5,237,190,000	0	0	0	0	0	0	5,237,190,000
		REALISASI	0.00%	0.00%	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(0.00%)
		SISA	0	0	5,237,190,000	0	0	0	0	0	0	5,237,190,000
6	(S) SALDO AWAL BLU	PAGU	0	11,331,460,000	8,594,449,000	0	0	0	0	0	0	19,925,909,000
		REALISASI	0.00%	11,268,799,746 (99.45%)	6,211,019,699 (72.27%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	17,479,819,445 (87.72%)
		SISA	0	62,660,254	2,383,429,301	0	0	0	0	0	0	2,446,089,555
7	(T) SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA	PAGU	0	0	2,863,313,482,000	0	0	0	0	0	0	2,863,313,482,000
		REALISASI	0.00%	0.00%	870,127,727,947 (30.39%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	870,127,727,947 (30.39%)
		SISA	0	0	1,993,185,754,053	0	0	0	0	0	0	1,993,185,754,053

tanggal cetak : 26-01-26 10:32:37 oleh : E02208

GRAND TOTAL	**PAGU** **REALISASI**	**255,258,712,000** **246,698,649,707** **(96.65%)**	**4,189,982,723,000** **4,010,596,700,774** **(95.72%)**	**3,391,995,119,000** **1,208,442,425,363** **(35.63%)**	**0** **(0.00%)**	**0** **(0.00%)**	**0** **(0.00%)**	**0** **(0.00%)**	**0** **(0.00%)**	**0** **(0.00%)**	**7,837,236,554,000** **5,465,737,775,844** **(69.74%)**
	SISA	**8,560,062,293**	**179,386,022,226**	**2,183,552,693,637**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,371,498,778,156**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

NO	Kode | Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja								Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	4600 | Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	4,037,234,000	0	0	0	0	0	0	0	4,037,234,000
		REALISASI	0.00%	4,021,209,028 (99.60%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4,021,209,028 (99.60%)
		SISA	0	16,024,972	0	0	0	0	0	0	0	16,024,972
2	4601 | Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	PAGU	255,258,712,000	190,655,754,000	4,636,639,000	0	0	0	0	0	0	450,551,105,000
		REALISASI	246,698,649,707 (96.65%)	155,444,110,426 (81.53%)	4,581,803,471 (98.82%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	406,724,563,604 (90.27%)
		SISA	8,560,062,293	35,211,643,574	54,835,529	0	0	0	0	0	0	43,826,541,396
3	4602 | Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	6,318,673,000	210,000,000	0	0	0	0	0	0	6,528,673,000
		REALISASI	0.00%	6,122,991,395 (96.90%)	202,145,499 (96.26%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6,325,136,894 (96.88%)
		SISA	0	195,681,605	7,854,501	0	0	0	0	0	0	203,536,106
4	4603 | Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	1,762,986,000	0	0	0	0	0	0	0	1,762,986,000
		REALISASI	0.00%	1,757,227,218 (99.67%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1,757,227,218 (99.67%)
		SISA	0	5,758,782	0	0	0	0	0	0	0	5,758,782
5	4604 | Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	650,650,000	0	0	0	0	0	0	0	650,650,000
		REALISASI	0.00%	648,804,196 (99.72%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	648,804,196 (99.72%)
		SISA	0	1,845,804	0	0	0	0	0	0	0	1,845,804
6	4641 | Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	430,771,018,000	1,719,052,033,000	0	0	0	0	0	0	2,149,823,051,000
		REALISASI	0.00%	411,740,401,599 (95.58%)	620,496,928,536 (36.10%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1,032,237,330,135 (48.01%)
		SISA	0	19,030,616,401	1,098,555,104,464	0	0	0	0	0	0	1,117,585,720,865
7	4642 | Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	PAGU	0	3,246,694,273,000	89,580,523,000	0	0	0	0	0	0	3,336,274,796,000
		REALISASI	0.00%	3,150,738,578,250 (97.04%)	44,987,073,805 (50.22%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3,195,725,652,055 (95.79%)
		SISA	0	95,955,694,750	44,593,449,195	0	0	0	0	0	0	140,549,143,945

tanggal cetak : 26-01-26 10:31:12 oleh : E02208

8	4643 | Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	PAGU REALISASI	0 0.00%	267,354,365,000 261,577,935,274 (97.84%)	1,572,269,535,000 537,713,613,148 (34.20%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	1,839,623,900,000 799,291,548,422 (43.45%)
		SISA	0	5,776,429,726	1,034,555,921,852	0	0	0	0	0	0	1,040,332,351,578
9	4644 | Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	PAGU REALISASI	0 0.00%	41,737,770,000 18,545,443,388 (44.43%)	6,246,389,000 460,860,904 (7.38%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	47,984,159,000 19,006,304,292 (39.61%)
		SISA	0	23,192,326,612	5,785,528,096	0	0	0	0	0	0	28,977,854,708
GRAND TOTAL		**PAGU REALISASI**	**255,258,712,000 246,698,649,707 (96.65%)**	**4,189,982,723,000 4,010,596,700,774 (95.72%)**	**3,391,995,119,000 1,208,442,425,363 (35.63%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**7,837,236,554,000 5,465,737,775,844 (69.74%)**
		SISA	**8,560,062,293**	**179,386,022,226**	**2,183,552,693,637**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,371,498,778,156**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

Bulan : 10 s.d. 12

NO	Kode | Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	445572 | PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	PAGU	0	10,835,086,000	0	0	0	0	0	0	0	10,835,086,000
		REALISASI	0.00%	3,874,679,441 (35.76%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3,874,679,441 (35.76%)
		SISA	0	6,960,406,559	0	0	0	0	0	0	0	6,960,406,559
2	467005 | BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	PAGU	7,350,340,000	231,372,522,000	4,586,233,000	0	0	0	0	0	0	243,309,095,000
		REALISASI	1,283,811,042 (17.47%)	93,841,498,452 (40.56%)	221,023,254 (4.82%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	95,346,332,748 (39.19%)
		SISA	6,066,528,958	137,531,023,548	4,365,209,746	0	0	0	0	0	0	147,962,762,252
3	467006 | BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	PAGU	15,099,567,000	346,993,536,000	265,006,954,000	0	0	0	0	0	0	627,100,057,000
		REALISASI	3,615,557,020 (23.94%)	161,106,418,848 (46.43%)	200,041,159,604 (75.49%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	364,763,135,472 (58.17%)
		SISA	11,484,009,980	185,887,117,152	64,965,794,396	0	0	0	0	0	0	262,336,921,528
4	467309 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	PAGU	16,496,951,000	212,043,019,000	1,114,734,878,000	0	0	0	0	0	0	1,343,274,848,000
		REALISASI	4,402,314,082 (26.69%)	170,135,057,065 (80.24%)	182,111,165,740 (16.34%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	356,648,536,887 (26.55%)
		SISA	12,094,636,918	41,907,961,935	932,623,712,260	0	0	0	0	0	0	986,626,311,113
5	467321 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	PAGU	20,538,115,000	143,611,344,000	969,896,733,000	0	0	0	0	0	0	1,134,046,192,000
		REALISASI	5,110,743,930 (24.88%)	122,610,834,760 (85.38%)	90,508,525,547 (9.33%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	218,230,104,237 (19.24%)
		SISA	15,427,371,070	21,000,509,240	879,388,207,453	0	0	0	0	0	0	915,816,087,763
6	467337 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	PAGU	15,541,045,000	161,561,903,000	123,364,288,000	0	0	0	0	0	0	300,467,236,000
		REALISASI	3,770,570,005 (24.26%)	143,796,959,821 (89.00%)	41,020,607,320 (33.25%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	188,588,137,146 (62.76%)
		SISA	11,770,474,995	17,764,943,179	82,343,680,680	0	0	0	0	0	0	111,879,098,854
7	467345 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	PAGU	17,028,649,000	57,445,731,000	562,965,835,000	0	0	0	0	0	0	637,440,215,000
		REALISASI	4,106,385,900 (24.11%)	28,193,981,684 (49.08%)	127,370,708,997 (22.62%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	159,671,076,581 (25.05%)
		SISA	12,922,263,100	29,251,749,316	435,595,126,003	0	0	0	0	0	0	477,769,138,419

tanggal cetak : 30-01-26 14:18:12 oleh : E02208

8	467352 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	PAGU REALISASI	8,982,713,000 2,147,406,427 (23.91%)	38,789,298,000 16,518,663,089 (42.59%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	47,772,011,000 18,666,069,516 (39.07%)
		SISA	6,835,306,573	22,270,634,911	0	0	0	0	0	0	0	29,105,941,484
9	467364 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	PAGU REALISASI	13,121,685,000 3,116,458,756 (23.75%)	91,491,635,000 73,937,383,844 (80.81%)	22,058,699,000 1,896,593,382 (8.60%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	126,672,019,000 78,950,435,982 (62.33%)
		SISA	10,005,226,244	17,554,251,156	20,162,105,618	0	0	0	0	0	0	47,721,583,018
10	467373 | BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	PAGU REALISASI	15,757,103,000 5,342,105,624 (33.90%)	25,604,320,000 14,806,722,639 (57.83%)	2,481,540,000 2,425,339,021 (97.74%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	43,842,963,000 22,574,167,284 (51.49%)
		SISA	10,414,997,376	10,797,597,361	56,200,979	0	0	0	0	0	0	21,268,795,716
11	467385 | BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	PAGU REALISASI	14,024,437,000 3,485,659,730 (24.85%)	49,953,651,000 12,809,920,761 (25.64%)	26,874,629,000 4,693,156,000 (17.46%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	90,852,717,000 20,988,736,491 (23.10%)
		SISA	10,538,777,270	37,143,730,239	22,181,473,000	0	0	0	0	0	0	69,863,980,509
12	467462 | PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	PAGU REALISASI	0 0.00%	259,555,027,000 238,957,056,373 (92.06%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	259,555,027,000 238,957,056,373 (92.06%)
		SISA	0	20,597,970,627	0	0	0	0	0	0	0	20,597,970,627
13	467478 | PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	PAGU REALISASI	0 0.00%	24,387,687,000 12,272,868,672 (50.32%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	24,387,687,000 12,272,868,672 (50.32%)
		SISA	0	12,114,818,328	0	0	0	0	0	0	0	12,114,818,328
14	467484 | PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	PAGU REALISASI	0 0.00%	2,317,756,184,000 2,303,230,235,927 (99.37%)	234,823,033,000 81,066,625,655 (34.52%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	2,552,579,217,000 2,384,296,861,582 (93.41%)
		SISA	0	14,525,948,073	153,756,407,345	0	0	0	0	0	0	168,282,355,418
15	467504 | KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PAGU REALISASI	92,585,048,000 22,202,736,629 (23.98%)	35,498,558,000 12,720,324,325 (35.83%)	4,520,614,000 3,072,123,937 (67.96%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	132,604,220,000 37,995,184,891 (28.65%)
		SISA	70,382,311,371	22,778,233,675	1,448,490,063	0	0	0	0	0	0	94,609,035,109

16	467515 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	PAGU REALISASI	18,733,059,000 4,426,419,790 (23.63%)	183,083,222,000 149,174,252,537 (81.48%)	60,681,683,000 34,028,070,805 (56.08%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	262,497,964,000 187,628,743,132 (71.48%)
		SISA	14,306,639,210	33,908,969,463	26,653,612,195	0	0	0	0	0	0	74,869,220,868
GRAND TOTAL		**PAGU REALISASI**	**255,258,712,000 63,010,168,935 (24.68%)**	**4,189,982,723,000 3,557,986,858,238 (84.92%)**	**3,391,995,119,000 768,455,099,262 (22.65%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**7,837,236,554,000 4,389,452,126,435 (56.01%)**
		SISA	**192,248,543,065**	**631,995,864,762**	**2,623,540,019,738**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,447,784,427,565**

PERHITUNGAN EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
Periode Triwulan IV Tahun 2025

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (10) x (9)	(13) = (12) - (11)
1	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4600 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	001 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal. (Layanan)	1,00	1,00	100,00%	406.980.000	406.043.693	406.980.000	936.307
2	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4600 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	EBC Layanan Manajemen SDM Internal (Orang, Layanan, Rekomendasi)	001 Layanan SDM (Orang)	1045,00	1045,00	100,00%	725.000.000	720.243.289	725.000.000	4.756.711
3	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan, Kajian)	001 Kebijakan Perencanaan (Rekomendasi Kebijakan)	1,00	1,00	100,00%	1.570.483.000	1.553.490.510	1.570.483.000	16.992.490
4	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	957 Layanan Hukum (Layanan)	1,00	1,00	100,00%	450.300.000	446.382.601	450.300.000	3.917.399
5	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	1,00	1,00	100,00%	1.706.434.000	1.695.214.705	1.706.434.000	11.219.295
6	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	1,00	1,00	100,00%	109.226.861.000	105.376.584.566	109.226.861.000	3.850.276.434
7	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit, m2, Paket)	951 Layanan Sarana Internal (Unit)	23,00	23,00	100,00%	2.596.814.000	2.547.500.000	2.596.814.000	49.314.000
8	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit, m2, Paket)	971 Layanan Prasarana Internal (Unit)	1,00	1,00	100,00%	1.923.800.000	1.921.173.937	1.923.800.000	2.626.063
9	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	871.704.000	859.365.986	871.704.000	12.338.014
10	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	1.356.121.000	1.345.119.974	1.356.121.000	11.001.026
11	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	6.673.160.000	6.666.646.744	6.673.160.000	6.513.256
12	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4602 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	963 Layanan Data dan Informasi (Layanan)	1,00	1,00	100,00%	187.293.000	181.262.895	187.293.000	6.030.105
13	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4602 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	FAB Sistem Informasi Pemerintahan (Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan)	001 Sistem Informasi (Layanan)	1,00	1,00	100,00%	2.637.000.000	2.447.938.500	2.637.000.000	189.061.500
14	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4603 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	1,00	1,00	100,00%	1.621.620.000	1.619.582.008	1.621.620.000	2.037.992

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
15	Setditjen Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4604 Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	957 Layanan Hukum (Layanan)	1,00	1,00	100,00%	650.650.000	648.804.196	650.650.000	1.845.804
16	Dit. LLAKA	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan, Kajian)	001 Studi Perencanaan Teknis Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Rekomendasi Kebijakan)	3,00	3,00	100,00%	1.048.004.000	1.040.964.325	1.048.004.000	7.039.675
17	Dit. LLAKA	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	BAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik)	001 Perintis Perkeretaapian (layanan)	1,00	1,00	100,00%	229.639.776.000	228.538.609.365	229.639.776.000	1.101.166.635
18	Dit. LLAKA	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	BAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik)	002 Angkutan Sepeda Motor Melalui Kereta Api (layanan)	1,00	1,00	100,00%	15.053.457.000	13.605.382.127	15.053.457.000	1.448.074.873
19	Dit. LLAKA	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	003 Operasi Prasarana Perkeretaapian (Paket)	1,00	1,00	100,00%	59.064.000	-	59.064.000	59.064.000
20	Dit. LLAKA	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4644 Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	2,00	2,00	100,00%	1.785.000.000	1.781.493.390	1.785.000.000	3.506.610
21	Dit. LLAKA	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	1,00	1,00	100,00%	886.377.000	762.166.008	886.377.000	124.210.992
22	Dit. LLAKA	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	1,00	1,00	100,00%	4.615.584.000	3.251.903.863	4.615.584.000	1.363.680.137
23	Dit. LLAKA	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	61.387.000	61.369.692	61.387.000	17.308
24	Dit. LLAKA	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	2.814.748.000	2.387.879.218	2.814.748.000	426.868.782
25	Dit. LLAKA	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	28.713.000	28.713.000	28.713.000	-
26	Dit. LLAKA	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	961 Layanan Reformasi Kinerja (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	68.597.000	68.546.625	68.597.000	50.375
27	Dit. LLAKA	WA Program Dukungan Manajemen	4602 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	CDS OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi)	001 OM Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Titik/Lokasi)	1,00	1,00	100,00%	3.494.320.000	3.493.790.000	3.494.320.000	530.000
28	Dit. Prasarana Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	035 Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I (Paket)	1,00	1,00	100,00%	93.279.566.000	-	93.279.566.000	93.279.566.000
29	Dit. Prasarana Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) (Paket)	1,50	2,00	100,00%	2.430.411.000	1.434.519.730	2.430.411.000	995.891.270
30	Dit. Prasarana Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	RDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) (Paket)	1,00	1,00	100,00%	2.297.919.295.000	2.297.919.295.000	2.297.919.295.000	-
31	Dit. Prasarana Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	CBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	001 Jalur Kereta Api (km)	1,00	1,00	100,00%	81.066.626.000	81.066.625.655	81.066.626.000	345
32	Dit. Prasarana Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	CBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	008 Infrastruktur Perkeretaapian (km)	1,00	1,00	100,00%	1.456.860.000	1.456.860.000	1.456.860.000	-
33	Dit. Prasarana Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	PBF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan, Kajian)	001 Engineering Services For Jakarta Mass Rapid Transit East-West Line Project Phase I Stage I (Rekomendasi Kebijakan)	1,00	1,00	100,00%	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
34	Dit. Prasarana Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	019 Surabaya Regional Railway Line (Phase I) (Paket)	1,00	1,00	100,00%	60.376.841.000	-	60.376.841.000	60.376.841.000
35	Dit. Prasarana Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	1,00	1,00	100,00%	1.550.945.000	1.508.007.772	1.550.945.000	42.937.228
36	Dit. Prasarana Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	1,00	1,00	100,00%	12.320.058.000	8.860.243.365	12.320.058.000	3.459.814.635
37	Dit. Prasarana Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	359.993.000	348.490.114	359.993.000	11.502.886
38	Dit. Prasarana Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	1.539.010.000	1.510.611.503	1.539.010.000	28.398.497
39	Dit. Prasarana Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	179.612.000	173.649.280	179.612.000	5.962.720
40	Dit. Sarana Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	CCK OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (Unit, Paket)	001 Operasi Sarana Perkeretaapian (Unit)	15,00	15,00	100,00%	983.435.000	983.433.487	983.435.000	1.513
41	Dit. Sarana Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	CCK OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (Unit, Paket)	004 Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian (Unit)	29,00	29,00	100,00%	14.570.065.000	14.570.029.823	14.570.065.000	35.177
42	Dit. Sarana Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	1,00	1,00	100,00%	2.642.781.000	2.642.672.498	2.642.781.000	108.502
43	Dit. Sarana Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	6.045.028.000	4.132.831.350	6.045.028.000	1.912.196.650
44	Dit. Sarana Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	146.378.000	146.376.500	146.378.000	1.500
45	Dit. Keselamatan Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	1,00	1,00	100,00%	626.335.000	625.529.216	626.335.000	805.784
46	Dit. Keselamatan Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	1,00	1,00	100,00%	4.931.517.000	4.614.914.119	4.931.517.000	316.602.881
47	Dit. Keselamatan Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	5.223.073.000	4.356.954.284	5.223.073.000	866.118.716
48	Dit. Keselamatan Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	54.161.000	53.710.060	54.161.000	450.940
49	BTP Jakarta	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan, Kajian)	008 Studi Evaluasi Hasil/Manfaat Proyek (Kajian)	1,00	1,00	100,00%	250.000.000	97.957.500	250.000.000	152.042.500
50	BTP Jakarta	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	CBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	008 Infrastruktur Perkeretaapian (km)	1,00	1,00	100,00%	850.000.000	254.862.550	850.000.000	595.137.450
51	BTP Jakarta	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	078 Peningkatan Stasiun Tanah Abang Tahap I (Unit)	1,00	1,00	100,00%	114.171.345.000	95.285.959.253	114.171.345.000	18.885.385.747

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
52	BTP Jakarta	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	037 Peningkatan Stasiun Rangkasbitung (Unit)	1,00	1,00	100,00%	111.467.239.000	99.467.981.108	111.467.239.000	11.999.257.892
53	BTP Jakarta	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	046 Peningkatan Sistem Elektrifikasi Perkeretaapian di Jabodetabek (Paket)	1,00	1,00	100,00%	200.936.955.000	135.878.917.607	200.936.955.000	65.058.037.393
54	BTP Jakarta	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	049 Peningkatan Jalur KA dan Fasilitas Operasi Jakarta Kota - Tanjung Priok (km)	1,00	1,00	100,00%	2.519.272.000	2.519.271.310	2.519.272.000	690
55	BTP Jakarta	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) (Paket)	25,00	25,00	100,00%	30.018.788.000	28.491.169.822	30.018.788.000	1.527.618.178
56	BTP Jakarta	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	RDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) (Paket)	1,00	1,00	100,00%	163.987.864.000	141.046.290.000	163.987.864.000	22.941.574.000
57	BTP Jakarta	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan, Kajian)	007 Rancangan Rinci (Detailed Design/Engineering Design) (Rekomendasi Kebijakan)	2,00	2,00	100,00%	2.549.580.000	2.547.751.100	2.549.580.000	1.828.900
58	BTP Jakarta	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan, Kajian)	008 Studi Evaluasi Hasil/Manfaat Proyek (Rekomendasi Kebijakan)	1,00	0,00	0,10%	5.000	-	5	5
59	BTP Jakarta	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	CBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	008 Infrastruktur Perkeretaapian (km)	1,00	0,00	0,10%	5.000	-	5	5
60	BTP Jakarta	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	030 Pembangunan Fasilitas Perkeretaapian untuk Manggarai - Jatinegara (Paket A Tahap III) (km)	1,00	1,00	100,00%	683.000.457.000	46.840.722.774	683.000.457.000	636.159.734.226
61	BTP Jakarta	WA Program Dukungan Manajemen	4600 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	1,00	1,00	100,00%	36.370.000	36.370.000	36.370.000	-
62	BTP Jakarta	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	16,00	16,00	100,00%	644.263.000	644.028.937	644.263.000	234.063
63	BTP Jakarta	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	1,00	1,00	100,00%	30.061.755.000	29.757.921.492	30.061.755.000	303.833.508
64	BTP Jakarta	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit, m2, Paket)	951 Layanan Sarana Internal (Unit)	1,00	1,00	100,00%	90.020.000	89.269.534	90.020.000	750.466
65	BTP Jakarta	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit, m2, Paket)	971 Layanan Prasarana Internal (Unit)	1,00	0,00	0,10%	5.000	-	5	5
66	BTP Jakarta	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen)	2,00	2,00	100,00%	1.016.000	1.015.900	1.016.000	100
67	BTP Jakarta	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	6,00	6,00	100,00%	2.659.964.000	695.183.049	2.659.964.000	1.964.780.951
68	BTP Jakarta	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	2,00	2,00	100,00%	26.075.000	25.908.000	26.075.000	167.000
69	BTP Jakarta	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	961 Layanan Reformasi Kinerja (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	3.810.000	3.810.000		
70	BTP Jakarta	WA Program Dukungan Manajemen	4602 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	BMA Data dan Informasi Publik (layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi)	001 Pengelolaan Data dan Informasi (layanan)	1,00	1,00	100,00%	60.000	-	60.000	60.000

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
71	BTP Bandung	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	CBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	002 Jembatan Kereta Api (km)	1,00	1,00	100,00%	14.641.526.000	14.636.436.005	14.641.526.000	5.089.995
72	BTP Bandung	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	CBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	008 Infrastruktur Perkeretaapian (km)	1,00	1,00	100,00%	870.474.000	47.392.000	870.474.000	823.082.000
73	BTP Bandung	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	080 Pembangunan Prasarana Perkeretaapian pada Jalur Ganda KA Segmen Padalarang - Bandung Lintas Bogor - Yogyakarta Tahap II (Paket)	1,00	0,00	50,89%	46.019.683.000	21.120.192.812	23.419.416.679	2.299.223.867
74	BTP Bandung	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) (Paket)	2,00	2,00	100,00%	2.821.566.000	2.420.883.360	2.821.566.000	400.682.640
75	BTP Bandung	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	003 Operasi Prasarana Perkeretaapian (Paket)	1,00	1,00	100,00%	697.252.000	211.335.500	697.252.000	485.916.500
76	BTP Bandung	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	RDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) (Paket)	1,00	1,00	100,00%	163.683.174.000	142.479.774.000	163.683.174.000	21.203.400.000
77	BTP Bandung	WA Program Dukungan Manajemen	4600 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	1,00	1,00	100,00%	370.591.000	367.733.194	370.591.000	2.857.806
78	BTP Bandung	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	6,00	6,00	100,00%	1.266.294.000	1.240.099.027	1.266.294.000	26.194.973
79	BTP Bandung	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	1,00	1,00	100,00%	29.438.368.000	26.449.845.602	29.438.368.000	2.988.522.398
80	BTP Bandung	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen)	2,00	2,00	100,00%	30.691.000	28.551.000	30.691.000	2.140.000
81	BTP Bandung	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	9,00	9,00	100,00%	2.206.482.000	1.946.807.035	2.206.482.000	259.674.965
82	BTP Bandung	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	6,00	6,00	100,00%	157.637.000	137.978.400	157.637.000	19.658.600
83	BTP Bandung	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	961 Layanan Reformasi Kinerja (Dokumen)	2,00	2,00	100,00%	225.580.000	225.083.529	225.580.000	496.471
84	BTP Bandung	WA Program Dukungan Manajemen	4603 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	2,00	2,00	100,00%	68.646.000	65.083.210	68.646.000	3.562.790
85	BTP Semarang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	CBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	008 Infrastruktur Perkeretaapian (km)	0,10	1,00	100,00%	4.250.000.000	2.313.405.609	4.250.000.000	1.936.594.391
86	BTP Semarang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	QAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik)	009 Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Purwosari - Wonogiri (layanan)	2,50	2,00	100,00%	11.302.949.000	11.302.949.000	11.302.949.000	-
87	BTP Semarang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	025 Pembangunan Jalur KA Elevated antara Solo Balapan - Kadipiro (km)	1,00	1,00	100,00%	1.100.000.000	1.057.177.875	1.100.000.000	42.822.125
88	BTP Semarang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	008 Pembangunan Jalur Ganda KA antara Solo - Semarang Tahap I Segmen Solo Balapan - Kalioso (km)	2,00	2,00	100,00%	139.648.336.000	98.223.952.080	139.648.336.000	41.424.383.920
89	BTP Semarang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	042 Peningkatan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Lintas Cirebon - Kroya segmen Prupuk - Purwokerto (km)	56,60	0,00	0,07%	314.489.609.000	-	220.142.726	220.142.726

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
90	BTP Semarang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	044 Peningkatan Sistem Persinyalan dan Telekomunikasi Lintas Cirebon - Semarang segmen Tegal - Pekalongan (km)	60,06	0,00	0,08%	468.841.977.000	-	375.073.582	375.073.582
91	BTP Semarang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) (Paket)	3,00	3,00	100,00%	3.951.395.000	3.050.571.793	3.951.395.000	900.823.207
92	BTP Semarang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	003 Operasi Prasarana Perkeretaapian (Paket)	1,00	1,00	100,00%	123.700.000	120.949.900	123.700.000	2.750.100
93	BTP Semarang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	RDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) (Paket)	1,00	1,00	100,00%	112.486.732.000	106.860.398.100	112.486.732.000	5.626.333.900
94	BTP Semarang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	RDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	003 Penanganan Rintang Jalan KM 299 + 900 Antara Prupuk - Linggapura Lintas Cirebon - Kroya (Paket)	1,00	1,00	100,00%	37.034.622.000	31.707.275.000	37.034.622.000	5.327.347.000
95	BTP Semarang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	RDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	006 Penanganan Rintang Jalan Segmen Kawunganten-Jeruklegi lintas Banjar-Kroya dan Peningkatan 2 Unit Jembatan KA Segmen Prupuk-Linggapura Lintas Prupuk-Purwokerto (Paket)	1,00	1,00	100,00%	5.172.189.000	5.172.185.724	5.172.189.000	3.276
96	BTP Semarang	WA Program Dukungan Manajemen	4600 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	1,00	1,00	100,00%	460.000.000	457.870.636	460.000.000	2.129.364
97	BTP Semarang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	957 Layanan Hukum (Layanan)	1,00	1,00	100,00%	44.100.000	40.796.667	44.100.000	3.303.333
98	BTP Semarang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	1,00	1,00	100,00%	1.671.960.000	1.633.791.489	1.671.960.000	38.168.511
99	BTP Semarang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	1,00	1,00	100,00%	30.832.315.000	30.038.771.337	30.832.315.000	793.543.663
100	BTP Semarang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	40.100.000	39.536.046	40.100.000	563.954
101	BTP Semarang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	2.203.708.000	873.483.910	2.203.708.000	1.330.224.090
102	BTP Semarang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	119.300.000	99.406.420	119.300.000	19.893.580
103	BTP Semarang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	961 Layanan Reformasi Kinerja (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	63.200.000	56.259.127	63.200.000	6.940.873
104	BTP Semarang	WA Program Dukungan Manajemen	4602 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Unit)	001 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Unit)	40,00	40,00	100,00%	210.000.000	202.145.499	210.000.000	7.854.501
105	BTP Surabaya	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	CBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	008 Infrastruktur Perkeretaapian (km)	1,00	1,00	100,00%	1.350.000.000	1.339.017.118	1.350.000.000	10.982.882
106	BTP Surabaya	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	084 Peningkatan 2 Unit Jembatan KA Segmen Kras-Ngadiluwih dan Segmen Temuguruh-Singojuruh (Unit)	1,00	1,00	100,00%	6.825.962.000	6.825.961.725	6.825.962.000	275
107	BTP Surabaya	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	038 Peningkatan Jalur KA lintas Surabaya - Banyuwangi Segmen Jember - Kalisat (km)	17,00	17,00	100,00%	116.038.326.000	103.111.193.150	116.038.326.000	12.927.132.850
108	BTP Surabaya	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CCK OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (Unit, Paket)	004 Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian (Unit)	1,00	1,00	100,00%	200.000.000	30.000.000	200.000.000	170.000.000

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
109	BTP Surabaya	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) (Paket)	3,00	3,00	100,00%	3.754.611.000	2.543.879.715	3.754.611.000	1.210.731.285
110	BTP Surabaya	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	RDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) (Paket)	1,00	1,00	100,00%	143.787.388.000	138.069.156.005	143.787.388.000	5.718.231.995
111	BTP Surabaya	WA Program Dukungan Manajemen	4600 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	1,00	1,00	100,00%	706.417.000	706.153.600	706.417.000	263.400
112	BTP Surabaya	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	1,00	1,00	100,00%	1.877.704.000	1.876.313.821	1.877.704.000	1.390.179
113	BTP Surabaya	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	1,00	1,00	100,00%	25.560.638.000	23.465.931.014	25.560.638.000	2.094.706.986
114	BTP Surabaya	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	23.200.000	23.199.800	23.200.000	200
115	BTP Surabaya	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	282.303.000	282.198.925	282.303.000	104.075
116	BTP Surabaya	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	49.207.000	48.605.000	49.207.000	602.000
117	BTP Surabaya	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	961 Layanan Reformasi Kinerja (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	11.480.000	11.480.000	11.480.000	-
118	BTP Medan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	CBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	008 Infrastruktur Perkeretaapian (km)	1,00	0,50	21,21%	5.564.880.000	1.180.576.129	1.180.311.048	(265.081)
119	BTP Medan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	QAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik)	001 Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Muara Satu-Kutablang (layanan)	3,34	2,00	83,67%	18.687.760.000	12.296.445.352	15.636.048.792	3.339.603.440
120	BTP Medan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	QAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik)	010 Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis antara Rantauprapat - Pondok S5 (layanan)	2,50	0,00	7,00%	4.125.000.000	-	288.750.000	288.750.000
121	BTP Medan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	076 Peningkatan Jambatan BH 343 Segmen Kisaran - Tanjung Balai (Unit)	1,00	0,00	97,10%	2.169.133.000	-	2.106.228.143	2.106.228.143
122	BTP Medan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) (Paket)	2,34	1,00	57,80%	3.737.397.000	2.160.170.947	2.160.215.466	44.519
123	BTP Medan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	RDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) (Paket)	1,00	1,00	100,00%	16.785.264.000	14.019.640.304	16.785.264.000	2.765.623.696
124	BTP Medan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	CCK OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (Unit, Paket)	002 Perawatan Sarana Perkeretaapian (Unit)	2,00	2,00	100,00%	100.000.000	93.954.576	100.000.000	6.045.424
125	BTP Medan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	012 Pembangunan Jalur KA Antara Medan-Binjai (km)	6,80	3,96	39,92%	555.581.822.000	217.716.052.971	221.788.263.342	4.072.210.371
126	BTP Medan	WA Program Dukungan Manajemen	4600 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	1,00	1,00	100,00%	554.299.000	553.649.983	554.299.000	649.017
127	BTP Medan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	1,00	1,00	100,00%	1.555.989.000	1.546.163.248	1.555.989.000	9.825.752

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
128	BTP Medan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	1,00	1,00	100,00%	25.216.866.000	21.990.242.229	25.216.866.000	3.226.623.771
129	BTP Medan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	135.118.000	135.027.951	135.118.000	90.049
130	BTP Medan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	2.751.047.000	2.388.099.682	2.751.047.000	362.947.318
131	BTP Medan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	182.054.000	182.009.710	182.054.000	44.290
132	BTP Medan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	961 Layanan Reformasi Kinerja (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	293.586.000	293.583.687	293.586.000	2.313
133	BTP Padang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	CBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	008 Infrastruktur Perkeretaapian (km)	1,00	1,00	100,00%	850.000.000	73.402.620	850.000.000	776.597.380
134	BTP Padang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	QAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik)	004 Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Lubuk Alung - Kayu Tanam (layanan)	3,00	3,00	100,00%	12.168.740.000	11.764.775.000	12.168.740.000	403.965.000
135	BTP Padang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) (Paket)	8,50	9,00	100,00%	1.808.603.000	1.093.358.936	1.808.603.000	715.244.064
136	BTP Padang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	002 Perawatan Prasarana Perkeretaapian (Paket)	127,00	127,00	100,00%	418.162.000	372.225.525	418.162.000	45.936.475
137	BTP Padang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	003 Operasi Prasarana Perkeretaapian (Paket)	1,00	1,00	100,00%	7.770.260.000	5.284.827.671	7.770.260.000	2.485.432.329
138	BTP Padang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	RDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) (Paket)	1,00	1,00	100,00%	8.728.187.000	3.581.049.000	8.728.187.000	5.147.138.000
139	BTP Padang	WA Program Dukungan Manajemen	4600 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	1,00	1,00	100,00%	245.217.000	243.100.785	245.217.000	2.116.215
140	BTP Padang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	1,00	1,00	100,00%	536.842.000	533.161.949	536.842.000	3.680.051
141	BTP Padang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	1,00	1,00	100,00%	13.490.034.000	12.058.280.428	13.490.034.000	1.431.753.572
142	BTP Padang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	104.768.000	99.621.378	104.768.000	5.146.622
143	BTP Padang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	1.131.421.000	815.764.340	1.131.421.000	315.656.660
144	BTP Padang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	423.457.000	394.155.551	423.457.000	29.301.449
145	BTP Padang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	961 Layanan Reformasi Kinerja (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	96.320.000	80.148.121	96.320.000	16.171.879

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
146	BTP Palembang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	CBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	008 Infrastruktur Perkeretaapian (km)	1,00	1,00	100,00%	850.000.000	179.911.000	850.000.000	670.089.000
147	BTP Palembang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) (Paket)	4,21	4,00	99,99%	6.857.045.000	1.227.533.420	6.856.359.296	5.628.825.876
148	BTP Palembang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	RDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) (Paket)	1,00	1,00	100,00%	75.004.997.000	70.004.997.000	75.004.997.000	5.000.000.000
149	BTP Palembang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	RDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	005 Peningkatan Jalur KA, Penanganan Rintang Jalan, dan Peningkatan 2 unit Jembatan KA lintas Tarahan - Tanjung Enim (Paket)	1,00	1,00	100,00%	22.032.699.000	1.896.593.382	22.032.699.000	20.136.105.618
150	BTP Palembang	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	CCK OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (Unit, Paket)	002 Perawatan Sarana Perkeretaapian (Unit)	2,00	2,00	100,00%	90.000.000	88.370.000	90.000.000	1.630.000
151	BTP Palembang	WA Program Dukungan Manajemen	4600 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	1,00	1,00	100,00%	235.109.000	234.262.333	235.109.000	846.667
152	BTP Palembang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	7,00	7,00	100,00%	432.880.000	430.836.505	432.880.000	2.043.495
153	BTP Palembang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	2,00	2,00	100,00%	18.937.638.000	16.722.065.777	18.937.638.000	2.215.572.223
154	BTP Palembang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	93.473.000	87.230.788	93.473.000	6.242.212
155	BTP Palembang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	1.723.938.000	1.620.412.813	1.723.938.000	103.525.187
156	BTP Palembang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	259.749.000	239.187.930	259.749.000	20.561.070
157	BTP Palembang	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	961 Layanan Reformasi Kinerja (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	154.491.000	131.515.160	154.491.000	22.975.840
158	Balai Pengujian Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	ADC Sertifikasi Produk (produk, Sertifikat)	001 Sertifikasi Sarana Perkeretaapian (produk)	1,00	1,00	100,00%	20.075.414.000	9.199.532.084	20.075.414.000	10.875.881.916
159	Balai Pengujian Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	ADC Sertifikasi Produk (produk, Sertifikat)	002 Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian (produk)	3,00	3,00	100,00%	18.958.608.000	11.052.757.727	18.958.608.000	7.905.850.273
160	Balai Pengujian Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	ADI Sertifikasi Profesi dan SDM (Orang, Sertifikat)	001 Sertifikat Kompetensi SDM Perkeretaapian (Orang)	1,00	1,00	100,00%	16.293.545.000	7.818.699.472	16.293.545.000	8.474.845.528
161	Balai Pengujian Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CCK OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (Unit, Paket)	004 Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian (Unit)	14,00	14,00	100,00%	1.771.584.000	1.771.576.000	1.771.584.000	8.000
162	Balai Pengujian Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4644 Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Unit)	001 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (Unit)	1,00	1,00	100,00%	666.000.000	-	666.000.000	666.000.000
163	Balai Pengujian Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4644 Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	5,00	5,00	100,00%	13.187.469.000	2.967.254.452	13.187.469.000	10.220.214.548
164	Balai Pengujian Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4644 Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit, m2, Paket)	951 Layanan Sarana Internal (Unit)	1,00	1,00	100,00%	867.616.000	-	867.616.000	867.616.000

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
165	Balai Pengujian Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	7,00	7,00	100,00%	358.845.000	358.280.879	358.845.000	564.121
166	Balai Pengujian Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	1,00	1,00	100,00%	18.096.435.000	17.984.817.902	18.096.435.000	111.617.098
167	Balai Pengujian Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	39.166.000	38.928.298	39.166.000	237.702
168	Balai Pengujian Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	130.810.000	130.683.334	130.810.000	126.666
169	Balai Pengujian Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	315.158.000	311.450.742	315.158.000	3.707.258
170	Balai Pengujian Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	961 Layanan Reformasi Kinerja (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	19.347.000	19.208.300	19.347.000	138.700
171	Balai Pengujian Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4603 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (Layanan)	1,00	1,00	100,00%	72.720.000	72.562.000	72.720.000	158.000
172	Balai Perawatan Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CCK OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (Unit, Paket)	003 Operasi Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian (Unit)	3,00	3,00	100,00%	12.264.493.000	11.932.884.618	12.264.493.000	331.608.382
173	Balai Perawatan Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CCK OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (Unit, Paket)	004 Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian (Unit)	21,00	21,00	100,00%	2.223.488.000	2.212.278.042	2.223.488.000	11.209.958
174	Balai Perawatan Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	CAK Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (Unit, Paket)	001 Sarana Kerja Bidang Konektivitas Perkeretaapian (Unit)	1,00	1,00	100,00%	2.955.000.000	2.901.706.089	2.955.000.000	53.293.911
175	Balai Perawatan Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4644 Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit, m2, Paket)	951 Layanan Sarana Internal (Unit)	1,00	1,00	100,00%	126.540.000	122.080.020	126.540.000	4.459.980
176	Balai Perawatan Perkeretaapian	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4644 Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	563.176.000	561.736.064	563.176.000	1.439.936
177	Balai Perawatan Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	1,00	1,00	100,00%	588.095.000	586.413.207	588.095.000	1.681.793
178	Balai Perawatan Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	2,00	2,00	100,00%	24.544.093.000	23.368.574.997	24.544.093.000	1.175.518.003
179	Balai Perawatan Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	8.634.000	8.633.100	8.634.000	900
180	Balai Perawatan Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	532.863.000	532.481.957	532.863.000	381.043
181	Balai Perawatan Perkeretaapian	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	36.581.000	36.580.240	36.581.000	760
182	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	QAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik)	007 Penyelenggaraan Layanan Perintis LRT Sumatera Selatan (layanan)	2,50	2,00	99,99%	99.311.986.000	97.479.401.119	99.302.054.801	1.822.653.682

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
183	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) (Paket)	65,91	66,00	100,00%	7.500.000.000	6.457.430.123	7.500.000.000	1.042.569.877
184	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	002 Perawatan Prasarana Perkeretaapian (Paket)	50,00	50,00	100,00%	6.000.000.000	5.786.490.384	6.000.000.000	213.509.616
185	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	003 Operasi Prasarana Perkeretaapian (Paket)	8,15	9,00	100,00%	89.295.913.000	89.104.961.117	89.295.913.000	190.951.883
186	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4644 Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	30.788.358.000	13.551.137.866	30.788.358.000	17.237.220.134
187	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4600 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	001 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal. (Layanan)	1,00	1,00	100,00%	284.801.000	283.338.395	284.801.000	1.462.605
188	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4600 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	EBC Layanan Manajemen SDM Internal (Orang, Layanan, Rekomendasi)	001 Layanan SDM (Orang)	239,00	239,00	100,00%	12.450.000	12.443.120	12.450.000	6.880
189	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan, Kajian)	001 Kebijakan Perencanaan (Rekomendasi Kebijakan)	2,00	2,00	100,00%	10.000.000	9.000.000	10.000.000	1.000.000
190	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	1,00	1,00	100,00%	9.461.691.000	8.528.578.900	9.461.691.000	933.112.100
191	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	9.200.000	9.109.000	9.200.000	91.000
192	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	4,00	4,00	100,00%	587.176.000	152.193.923	587.176.000	434.982.077
193	Balai Pengelola KA Ringan Sumatera Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	955 Layanan Manajemen Keuangan (Dokumen)	2,00	2,00	100,00%	47.520.000	47.287.472	47.520.000	232.528
194	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	CBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	008 Infrastruktur Perkeretaapian (km)	1,00	0,00	75,70%	850.000.000	328.889.671	643.450.000	314.560.329
195	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	QAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik)	008 Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis lintas Makassar - Parepare (layanan)	2,50	2,00	100,00%	33.733.346.000	33.678.331.364	33.733.346.000	55.014.636
196	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4641 Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	050 Pembangunan Prasarana Perkeretaapian untuk Mendukung Pengoperasian Kereta Api Makassar - Parepare antara Mandai - Palanro (Paket)	1,00	0,00	75,20%	76.917.750.000	38.588.015.361	57.842.148.000	19.254.132.639
197	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	001 Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO) (Paket)	1,00	1,00	100,00%	1.631.024.000	1.631.023.700	1.631.024.000	300
198	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4642 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CDA OM Prasarana Bidang Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	003 Operasi Prasarana Perkeretaapian (Paket)	4,00	4,00	100,00%	48.990.062.000	46.867.888.390	48.990.062.000	2.122.173.610
199	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	CBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	008 Infrastruktur Perkeretaapian (km)	1,00	1,00	100,00%	187.239.204.000	187.239.201.647	187.239.204.000	2.353
200	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	GA Program Infrastruktur Konektivitas	4643 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	RBA Prasarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian (km, Paket, Unit)	018 Kewajiban Pembayaran atas Ketersediaan Layanan (Availability Payment) (Dukungan/Pendamping KPBU) (Paket)	60,00	60,00	100,00%	249.554.000.000	243.786.840.300	249.554.000.000	5.767.159.700
201	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (Layanan)	1,00	1,00	100,00%	74.828.000	74.826.300	74.828.000	1.700

No.	Unit Kerja	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Persentase Capaian Per RO	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO) - RARO
202	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	1,00	1,00	100,00%	27.937.088.000	16.813.990.004	27.937.088.000	11.123.097.996
203	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen)	2,00	2,00	100,00%	4.015.000	4.014.300	4.015.000	700
204	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	162.710.000	156.436.872	162.710.000	6.273.128
205	Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan	WA Program Dukungan Manajemen	4601 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	961 Layanan Reformasi Kinerja (Dokumen)	1,00	1,00	100,00%	6.030.000	6.030.000	6.030.000	-
Jumlah									**7.837.236.554.000**	**5.464.904.908.701**	**6.665.897.148.890**	**1.200.996.050.189**

EFISIENSI RO ESELON I → **15,32%**

"Efisiensi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 15,32% atau Rp 1.200.996.050.189,00"

LAMPIRAN IV

MONITORING RENAKSI PERIODE OKTOBER-DESEMBER 2025

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Bulan: Oktober, Tahun: 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10				Realisasi Bulan 10				Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output		Realisasi Anggaran		Capaian Output		Capaian Anggaran				
							Volume	%	Volume	%	Volume	%	Volume	%	%		%				
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	Rasio	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian			0,46	-	577.688.492.520	12,82	0,46		224.614.611.132		100%		33,14%		a. Penyelesaian/finalisasi dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 khususnya substansi kegiatan pendukung konektivitas perkeretaapian mengacu perlembangan kebijakan pada RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan b. Koordinasi penisapan pengoperasian hasil pembangunan konektivitas diantaranya usulan penetapan skema perintis Tahun 2026 (Tambasprapati Baru-Pondok 55, Binjai - Besitang dan perpanjangan perintis KA Aceh), pengajuan skema sewa aset dan perbaikan infrastruktur (konektivitas Pelabuhan Tanjung Emas) c. Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kegiatan pendukung konektivitas transportasi perkeretaapian, diantaranya terkait penyelesaian permerahan lahan pendukung konektivitas melalui LMAN, koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait penetapan lokasi, serta monitoring tahapan pengadaan barang/jasa (MRT Jakarta East West Phase I). d. Pengoptimalan sisa anggaran Tahun 2025 secara selektif untuk kegiatan pendukung, serta mempersiapkan dokumen pengusulan pada RKA Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026 berdasarkan skala prioritas RPJMN dan Rencana Strategis guna pemenuhan readiness criteria, penyelesaian pengadaan lahan, dan kegiatan-kegiatan pendukung konektivitas lainnya. e. Pengoptimalan peran inspektur prasarana dan sarana perkeretaapian untuk pelaksanaan pengawasan/inspeksi secara berkala dalam pembangunan prasarana perkeretaapian mendukung konektivitas	Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Lalu Lintas dan Angkutan KA, Dit Sarana Perkeretaapian dan Balai Teknik di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Penambaan Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Jaringan Jalur KA dan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian)		11	74	11,53	15,58	-	-	11,54	239.750.074		100,09%		-		● Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha, dan pihak internal Kementerian Perhubungan untuk memastikan keterkaitan dan kesellarasan terkait usulan dokumen perencanaan yang diajukan, diantaranya: a. Dokumen penataptaan trase MRT Jakarta Fase 2B (Kota – Ancol); b. Dokumen Trase Jalur Kereta Api MRT East West Line (Cikarang-Balaraja); c. Dokumen Hasil Evaluasi Penubahan Nama Stasiun Pakih menjadi Stasiun Muara. ● Selain itu juga telah dilakukan crosscutting kinerja yaitu: a. Melakukan pembahasan tindak lanjut perundalangannan Loan Agreement Proyek SRRL Fase 1 pada tanggal 1 Juli 2025 bersama unit kerja Bidang Koordinasi Konektivitas, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Wilayah Pembangunan; b. Melakukan konsultasi Dalam Rangka Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tahun 2025-2044 dengan Kementerian Dalam Negeri; c. Melakukan Pembahasan Rencana Pelaksanaan Proyek Kerja Sama Teknis Penyusunan Masterplan Pengembangan Tiga Kota (Ibu Kota Nusantara Samarinda – Balikpapan) pada tanggal 25 Juli 2025 bersama Kementerian PPN/Bappenas. ● Telah dilakukan Pemutakhiran Budaya Kinerja, yaitu: a Melakukan koordinasi pembahasan terhadap dokumen perencanaan teknis melalui daring/zoom meeting dikarenakan adanya keterbatasan anggaran atau kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2025; b Menyusun Surat Keputusan Tim Penyusunan Buku Profil Pengembangan dan Penataan Jaringan Kereta Api Tahun 2025 guna melakukan penyusunan buku yang dapat memudahkan pegawai dalam melakukan evaluasi program kerja dan memantau progres capaian pekerjaan yang sedang dilakukan pada Subdit Penataan dan Pengembangan Jaringan; c Melakukan rapat internal/ weekly meeting setelum berkoordinasi dengan pihak eksternal guna memperlancar proses evaluasi dokumen perencanaan.	● Melakukan koordinasi intens dengan stakeholder meliputi pembahasan laporan dan pelaksanaan rapat koordinasi terkait dokumen perencanaan lahirs bidang jaringan jalur kereta api dan jaringan perkeretaapian. ● Melakukan koordinasi dengan Biro Hukum Kementerian Perhubungan terkait Surat Keputusan Tim Evaluasi Trase Jalur Kereta Api Tahun 2025.	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Penambaan Penyelesaian Kerjasama Pengembangan Infrastruktur Perkeretaapian)		12	92	12	13,04			12	12		100%				● Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha, instansi lain dan pihak internal Kementerian Perhubungan untuk memastikan keterkaitan dan kesellarasan terkait usulan dokumen kerja sama yang telah diajukan. ● Hingga Triwulan III 2025, terdapat 3 perjanjian kerjasama pembangunan perkeretaapian yang disahkan, yaitu: a Pembangunan Stasiun Bekasi eksisteni di TOD Hub Summarecon. b Penetapan PT KAI sebagai Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum berupa Stasiun di KM 57+00 - KM 57+400 Antara Stasiun Tenjo - Stasiun Tigaraksa. c Draft Perjanjian Konsesi atas Pemrohonan Pembangunan Stasiun Bekasi Eksisteni di TOD HUB Summarecon Bekasi. ● Kegiatan/ crosscuting yang dilaksanakan selama Triwulan III Tahun 2025: a Melakukan pembahasan update progress Tindak Lanjut Percepatan Amandemen Konsesi dan perizinan membangun Stasiun Tenjo Baru dengan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada tanggal 2 Juli 2025; b Melakukan Rapat Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan PT KAI sebagai Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum berupa Stasiun di KM5700 - KM57+100 Stasiun Tenjo - Stasiun Tigaraksa dengan Biro Hukum Kementerian Perhubungan pada tanggal 18 Juli 2025; b Melakukan Konsinyering Evaluasi Dokumen Teknis Izin Pembangunan dan perizinan membangun Stasiun Tenjo Baru dengan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada tanggal 2 Juli 2025; c Melakukan Pembahasan Hasil Revisi BPKP dan Finalisasi Perjanjian Konsesi Penyelenggaraan Prasarana Kereta Api RinganLight Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi dengan Setditjen Perkeretaapian pada tanggal 24 Juli 2025; e Melakukan Pembahasan Hasil Kajian Trase dan Potensi Penumpang Rencana Proyek KPBU Perkeretaapian Metropolitan Bandung dengan Dishub Provinsi Jabar pada tanggal 14 Agustus 2025; ● Telah dilakukan Perubahan Budaya Kinerja, yaitu dengan melakukan rapat ringgan internal Audiens Direktur Jenderal Perkeretaapian bersama pemrakarsan pihak BPKP guna memperoleh proses revisi dokumen kerja sama bidang perkeretaapian.	Upaya penyusunan aktivitas yaitu dengan melakukan koordinasi bersama stakeholder melalui pembahasan teknis dan hukum secara paralel untuk memastikan percapaian target, dengan menyajikan dukungan legal dan teknis seperti surat keterangan, draft perjanjian dan revisi BPKP.	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Penambaan Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana)		62	742	63,57	8,57	-	-	62,66	145.686.000		98,88%		-		● Jumlah perkejaan dokumen perencanaan teknis bidang prasarana perkeretapian s.d Triwulan III 2025 sebanyak 88 dokumen dibandingkan kebutuhan dokumen perencanaan teknis s.d 2025 sebanyak 140 dokumen. Rincian perencapaan dokumen s.d Triwulan III 2025 sebagai berikut: a DED Prasarana sebanyak 65 Dokumen; b BED Prasarana sebanyak 4 Dokumen, dan c STD prasarana sebanyak 3 Dokumen. ● Penyelesaian dokumen perencanaan teknis yang ditetapkan pada Triwulan III 2025: a BED Beautifikasi Stasiun Padalarang; b DED Jembatan Lintas Lubuk Alung – Kayutanam. ● Direktorat Prasarana Perkeretaapian telah berunat kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian perihal Permohonan Penetujuan usulan buka blokir anggaran sesuai dengan surat Kuasa Pengguna Anggaran nomor PR.005/19/SPPPPK/KAJDKA/2025, dengan hasil tidak dapat dipertimbangkan untuk dilakukannan. Memindahlanjut hal tersebut untuk penyesuaian anggaran periode Triwulan IV terhadap kegiatan anggaran yang tidak bisa dilaksanakan karena terblokir, akan diusulkan untuk buka blokir untuk kegiatan pembayaran Backlog IMO. ● Pada kegiatan Surabaya Regional Railway Line (Phase I) Loan telah ditandatangani dan untuk procurement RDC telah berproses dan sampai dengan triwulan III akan dilakukan usulan efektif Loan. ● Kendala/hambatan antara lain: a Pelerjaan Penyusunan DED yang telah ditetapkan melalui DIPA TA 2025 tidak bisa dilaksanakan karena seluruh anggaran untuk kegiatan tersebut terblokir; a Konsultan belum menyerahkan MEP Gedung Balai Yasa dan Depo serta bangunan pendukung lainnya pada DED Pembangunan Balai Yasa KRL untuk mendukung Elektrifikasi Jalur KA Lintas Padalarang – Cicalengka sehingga belum dapat dilakukan asistensi lebih lanjut. a Perhitungan target kinerja tahun 2025 sebagaimana ditetapkan didalam PK masih mengacu kepada konsep Rencana Startegis, dimana terdapat penambahan indikator kinerja terkait dengan penyusunan DED/SID/BED sesuai dengan bidangnya yaitu konektivitas atau pelayanan, sehingga mempengaruhi baseline dan perhitungan target 2025-2029. Sehingga terhadap Perjanjian Kinerja yang ditetapkan akan berbeda dengan penetapan Rencana Strategis periode 2025-2029.	● Penyesuaian aktivitas/anggaran: a Akan dilakukan pengawasan terhadap proses perbaikan gambar desain oleh Konsultan terhadap kegiatan Penyusunan dan Pengesahan Dokumen DED; b Akan dilakukan percepatan proses pengecekan dan asistensi DED; c Perlu pemantauan PIC untuk pemerikasaan gambar untuk percepatan pengesahan DED; d Akan dilakukan usulan efektif Loan dan usulan buka blokir pada kegiatan Surabaya Regional Railway Line (Phase I); e Pengusulan buka blokir anggaran lahap ke II dalam kegiatan DED yang akan dilakukan untuk pembayaran Backlog IMO; a Akan dilakukan evaluasi target kinerja berdasarkan penetapan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian Periode 2025-2029.	Dit Prasarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian (Penambaan Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian)		7	792	58,67	8,42	-	-	7,14			10,71%		-		● Pada Tahun 2025 tidak terdapat kegiatan yang mendukung kinerja Penambaan Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian, sehingga target dan capaian mengacu pada baseline Tahun 2024. ● Realisasi kinerja berdasarkan baseline periode sebelumnya terdiri dari pengesahan dokumen perencanaan teknis bidang sarana perkeretaapian: a Kebijakan fasilitas sarana KRL Lintas Yogyakarta-Solo; a Kebijakan fasilitas Sarana Milik Negara di Sumatera Utara; a Kebijakan DED Balai Yasa Kereta Rel Listrik Yogyakarta- Solo. ● Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 berdasarkan dokumen kebijakan yang sudah disahkan yaitu Kebijakan DED Depo Cikarang KRL dan SMN.	● Koordinasi terkait pengesahan 3 studi/kebijakan yang telah selesai dilaksanakan. ● Penyesuaian Strategi/Kebijakan Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian perlu adanya penyesuaian strategi kedepannya yaitu Melakukan evaluasi dan pemantauan lanjutan atas tindak lanjut hasil rekomendasi kebijakan periode 2020 - 2023. ● Penyesuaian Aktivitas dan Anggaran a Mengingat pada Tahun 2025 tidak terdapat kegiatan dalam DIPA dan POK Tahun Anggaran 2025 yang mendukung Indikator kinerja kegiatan Presentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian, sehingga dilakukan kegiatan yang bersifat rutin yaitu Melakukan koordinasi untuk memastikan rekomendasi kebijakan yang telah selesai dilakukan penyusunan untuk ditindaklanjuti pengesahan. ● Penyesuaian Penempatan Jabatan/ Pegawai a Pada IKK Presentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian pada Direktorat Sarana Perkeretaapian dilakukan oleh jabatan fungsional analis kebijakan dan dikoordinasikan dengan PPK Satker Pengembangan dan Pengkajian Sarana Perkeretaapian.	Dit Sarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (pengujian dan sertifikasi kelaikan sarana, prasarana dan komponen SDM, penanaman dan pengawasan prasarana perkeretaapian milik negara, pembinaan dan pengaturan/pengendalian/pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian)		105	1200	100	8,33	2.263.488.117.500	12,82	105,24	2.189.448.316		105,24%		0,1%		● Realisasi kumulatif perjalanan KA penumpang dan barang pada Triwulan III 2025 sebesar 802.240 KA dengan rincian KA Penumpang 744.609 KA dan KA Barang 57.631 KA. ● Pemanfaatan frekuensi LRT Jabodebek yang sebelumnya dipropramkan sebanyak 158 KA, saat ini beroperasi sebanyak 396 KA saat weekday dan 270 KA saat weekend. • Penambahan frekuensi LRT Sumsel yang sebelumnya dipropramkan sebanyak 88 KA, saat ini beroperasi sebanyak 94 KA saat weekday, 102 KA saat weekend. • Penggunaan KA bahan pada masa libur panjang periode Juli s.d. September 2025. • Telah dilaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Gapeka pada jalringan jalur KA nasional: a LRT Jabodebek pada tanggal 22 Agustus 2025; a Jawa dan Sumatera pada tanggal 8 s.d. 10 Oktober 2025. • Telah dilaksanakan penyusunan ketentuanpun dokumen data dukung penetapan Gapeka Kereta Api Ringan/ LRT Jabodebek. Hasil pemeriksaan disampaikan melalui Surat Direktur Lalu Lintas Nomor: KA.407/1/15/KJDKA/2025 tanggal 8 Oktober 2025. • Telah diterbitkan Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian perihal Penetapan Perjalanan Kereta Api di Luar Grafik Perjalanan Kereta Api >30 hari berturut-turut pada tanggal 18 Juli 2025 dengan Nomor: KA.407/1/2/DJKA/2025 dan tanggal 27 Agustus 2025 dengan Nomor: KA.407/1/3/DJKA/2025. • Kegiatan/ crosscutting yang dilaksanakan selama Triwulan III Tahun 2025: a Melakukan koordinasi rencana Evaluasi Kereta Lalu Lintas Kereta Api TW I dan TW II Tahun 2025 di Wilayah Daop 2 Bandung dan Daop 3 Cirebon terhadap Pelaksanaan Gapeka Pada Jalringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 dengan BTP Bandung pada tanggal 5 Agustus 2025; a Melakukan Evaluasi Perjalanan KA Lintas Makassar-Parepare dengan UPT Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (BPKASS) pada tanggal 29 Agustus 2025. a Telah dilakukan Penetapan Sarana Kereta Api, yaitu dengan melakukan koordinasi evaluasi perjalanan kereta api berkelanjutan Grafik Perjalanan KA secara berkala per triwulanan untuk memperoleh data valid dari Operator dan BTP serta BPKA.	● Penyesuaian aktivitas: a Akan dilakukan koordinasi dengan Setditjen Perkeretaapian terkait dengan penetapan sertifikasi prasarana perkeretapian yang masih berproses pada tahun 2025. a Berkoordinasi dengan Setditjen Perkeretaapian terkait dengan rencana integrasi aplikasi sertifikasi prasarana perkeretapian; a Akan dilaksanakan Kick Off Meeting Penyelesaian Sebuh Kekurangan Pemenuhan Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara Tahun Anggaran 2024; a Akan dilakukan evaluasi target kinerja berdasarkan penetapan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian Periode 2025-2029; a Monitoring pengujian berkala bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api lintas Ngawi-Surabaya; dan a Akan dilakukan optimalisasi sisa anggaran sebagai langkah-langkah akhir tahun.	Dit Prasarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Penambaan Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian)		68	567	67,67	8,41	-	-	46,83	236.262.186		102,43%		-		● Target kinerja 2025 sebanyak 85 sertifikasi telah dan 25 sertifikasi kelaikan prasarana jalur dan bangunan serta 50 sertifikasi kelaikan prasarana fasilitas operasi, dengan total sertifikasi s.d 2025 sebanyak 3.084 sertifikasi. ● Penyelesaian sertifikasi prasarana pada periode Triwulan III sebanyak 36 sertifikasi terdiri dari 12 sertifikasi kelaikan jalur dan bangunan dan 24 sertifikasi kelaikan fasilitas operasi. ● Kegiatan pendukung antara lain: a Bimbingan Teknis Bidang Kelaikan Prasarana Perkeretaapian; a Monitoring atau Pengawasan Bidang Kelaikan Prasarana Perkeretaapian; a Pengoperasian dan Perawatan/rehabilitasi jalur jembatan stasiun dan fasilitas operasi kereta api; a Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian. ● Analisis keberhasilan: dilaksanakan penyesuaian aktivitas dan sebagai tahapan penerapan inovasi kinerja Telah dilaksanakan koordinasi formal dengan bagian hukum terkait dengan penetapan sertifikasi prasarana perkeretaapian yang masih berproses di Setditjen Perkeretaapian; ● Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dengan Perwakilan Japan Consultants Manajemen Pelaksanaan IMO dengan Nomor: PL.107/70/SPPPPK/KAJDKA/2025 tanggal 24 September, yang selanjutnya akan dilakukan penarikan yang maka pada periode triwulan selanjutnya. ● Kendala dalam pelaksanaan kegiatan: a Terdapat sertifikasi yang masih dalam proses penyelesaiaan; a Untuk aplikasi sertifikasi prasarana perkeretaapian belum bisa di terapkan pada tahun 2025, dikarenakan untuk tindak lanjut integrasi yang dilakukan Setditjen perkeretaapian akan dilakukan pada tahun 2026; c Perhitungan target kinerja tahun 2025 sebagaimana ditetapkan didalam Perjanjian Kinerja masih mengacu kepada konsep Rencana Strategis, sebagaimana progress penyusunan rencana strategis Direktorat Prasarana Perkeretaapian perhitungan baseline dengan tahun 2024.	● Mempercepat sertifikasi sarana, mempercepat progres pekerjaan rutin yang belum sesuai target. ● Meningkatkan koordinasi dengan Operator Sarana Perkeretaapian (KAI, Railink,dll) agar sarana yang diusulkan untuk dilakukan sertifikasi tersedia saat Tim Penguji datang ke lokasi, serta diharapkan dapat memaksimalkan penguijan sarana. ● Penyesuaian Strategi/Kebijakan a Menggunakan aplikasi SISAKA a Dilakukan koordinasi dengan pemohon/operator terkait kelengkapan data dukung proses sertifikasi seperti checklisheet perawatan. Kemudian melakukan koordinasi dan monitoring secara berkala dengan melakukan simkronisasi data sertifikasi (data pengujian sarana yang sudah diuji dan telah diupload aplikasi) dengan Balai Pengujian Perkeretaapian serta. a Melakukan koordinasi dengan Balai Pengujian Perkeretaapian, Setditjen dan pengembangan aplikasi terkait perbaikan aplikasi SISAKA dan SIAPKA milik Balai Pengujian Perkeretaapian. ● Penyesuaian Aktivitas dan Anggaran Akan dilakukan perhitungan yang lebih matang dengan memperhitungkan rencana yang realistis dapat tercapai. ● Penempatan pegawai guna mendukung IKK Pemenuhan Sertifikat Kelaikan Sarana Perkeretaapian antara lain : a Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Madya; a Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Muda; a Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama.	Dit Sarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Penerbitan Sarana Perkeretaapian yang Telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck)		100	910	91	10	-	-	100	211.262.155		109,89%		-		● Terdapat 2 kegiatan yaitu pelaksanaan rampcheck angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru di bidang sarana serta rampcheck pemeriksaan kelaikan angkutan barang batubara. ● Berdasarkan hasil pelaksanaan rampcheck sarana angkutan lebaran Tahun 2025, sarana yang dilakukan rampcheck sebesar 2.462 unit. Selain itu, temuan yang didapat sebanyak 171 unit sarana dan telah ditindaklanjuti oleh pihak operator sehingga realisasi sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil rampcheck sebesar 100%. ● Pelaksanaan crosscutting yaitu a Melakukan kegiatan rampcheck bersama dengan BTP terhadap sarana yang berada di Depo yang tersbapat di wilayah kerja BTP. b Operator Perkeretaapian yaitu PT.KAI, PT.KCI, MRT, LRT, Railink, wajib memindahlanjuti hasil rampcheck dengan perbaikan teknis dan pelaporan hasil koreksi.	● Penyusunan Strategi/Kebijakan a Evaluasi terhadap hasil rampcheck yang sudah dilakukan untuk mempertahankan kinerja yang sudah baik. a Pengawasan dan monitoring terhadap kondisi sarana. ● Penyesuaian Penempatan Jabatan/Pegawai antara lain : a Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Madya; a Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Muda; a Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama.	Dit Sarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Penambaan Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian)		15	126	18,49	14,67	-	-	15,81	1.061.599.190		85,51%		-		Direktorat Kesellamatan Perkeretaapian melalui Subdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Lembaga telah melaksanakan kegiatan sertifikasi kepada operator perkeretaapian dan kepada stakeholder terkait diantaranya oleh PT.Kereta Api Indonesia (persero) dan juga Dinas Perhubungan, pada bulan Januari sampai dengan bulan September 2025 Direktorat Kesellamatan Perkeretaapian telah mengeluarkan sertifikasi kepada operator dan stakeholder perkeretaapian, sejumlah 5.691 sertifikasi. Target pada triwulan III tahun 2025 belum tercapai dikarenakan penyelenggara perkeretaapian (operator dan dinas perhubungan) belum semua mengajukan permohonan sertifikasi baru maupun perpanjangan. Pelaksanaan kegiatan yang mendukung sertifikasi kompetensi SDM regulator dan operator perkeretaapian adalah Pendidikan dan Pelatihan dimana pelaksanaannya bekerja sama dengan Lembaga pendidikan seperti Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun dan Politeknik Transportr Darat Indonesia – Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi, sedangkan untuk proses ujian sertifikasi pelaksanaannya bekerja sama dengan Balai Pengujian Perkeretaapian. Hal tersebut merupakan program crosscutting Direktorat Kesellamatan Perkeretaapian dalam upaya mencapai target sasaran kinerja organisasi.	Direktorat kesellamatan melalui subdit Audit dan Inspeksi perkeretaapian sedang melaksanakan audit SMKP pada PT.LRT Jabodebek dan melaksanakan bimbingan teknis dan pengawasan pemenuhan SMKP kepada PT. Bukitasam. Pada perencanaan selanjutnya subdit Audit dan Inspeksi Perkeretaapian akan melaksanakan audit perenapan SMKP pada PT.KCIC.	Dit Kesellamatan Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Penambaan Pemenuhan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) yang ditindaklanjuti/ditimanfaatkan)		16	102	13,88	13,61	-	-	16,66	251.771.925		120,03%		-		Direktorat Kesellamatan Perkeretaapian khususnya subdit Audit dan Inspeksi Kesellamatan Perkeretaapian pada bulan Februari 2025 telah menyampaikan surat kepada kepada PT.LRT Jakarta, PT.KCIC dan PT.Celebes Railways Indonesia telah melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Sistem Manajemen Perkeretaapian (SMKP). Subdit Audit dan Inspeksi Kesellamatan Pada bulan Mei 2025 telah menyampaikan surat kepada Manager Unit Makassar-Parepare PT.KAI (Persero) dan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (BPKASS) perihal Progress Tindak Lanjut Khusus SMKP Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Makassar – Parepare dan kepada PT. CRI (Celebes Railways Indonesia) perihal Penyampaian Hasil Audit Sistem Manajemen Kesellamatan Perkeretaapian (SMKP). Surat tersebut kemudian telah ditindaklanjuti oleh Manager Unit Makassar-Parepare PT.KAI (Persero) dan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (BPKASS) pada bulan Juni 2025 serta oleh PT.CRI (Celebes Railways Indonesia) pada bulan Juli 2025. Dengan ditindaklanjutinya 3 (tiga) Hasil audit SMKP tersebut maka realisasi pada TW III Tahun 2025 dapat tercapai. Kegiatan Audit Penerapan Sistem Manajemen Perkeretaapian (SMKP) melibatkan berbagai unit kerja atau stakeholder terkait, baik secara internal maupun eksternal, untuk mencapai tujuan organisasi yang sama. Ini adalah pendekatan kolaboratif di mana berbagai bagian organisasi bekerja bersama untuk mencapai hasil yang diinginkan, bukan hanya satu unit kerja, hal ini juga sebagai bentuk crosscutting kinerja dari kegiatan audit penerapan SMKP.		
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Penambaan Pemenuhan Penguijan Kompetensi SDM Perkeretaapian)		15	106	16,259	15,34	-	-	15,433	5.432.732.490		94,92%		-		kelemedaan anggaran BLU dan sumber daya manusia yang memadai.	memastikan ketsiapan peralatan penguijan SDM sebelum pelaksanaan penguijan; melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya,; dan update Materi Uji Kompetensi untuk seluruh kompetensi.	Balai Pengujian Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Penambaan Pemenuhan Penguijan Kelaikan Sarana Perkeretaapian)		15	89	12,849	14,44	-	-	15,323	5.378.732.595		119,25%		-		Banyaknya permohonan sehingga agar dapat mencapai target yang ditetapkan telah dilakukan beberapa hal sebagai berikut : a. kelemedaan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai; dan c. melakukan evaluasi secara berkala realisasi pengujian sarana perkeretaapian tahun 2025 terhadap rencana kerja dan target penguijan sarana perkeretaapian tahun 2025.	a. melakukan kaditnasi pelaksanaan penguijan sarana perkeretaapian sebanyak 7 unit; dan b. melakukan monitoring terhadap penguijan yang telah dilaksanakan pada triwulan IV bersama Direktorat Sarana Perkeretaapian.	Balai Penguijan Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10		Realisasi Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Penentukan Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian)	10	104	15.097	14.52	-	-	19.839	4.935.468.933	131,41%	-	1. ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai; 2. melakukan monitoring terhadap pemohon terkait kesiapan pelaksanaan pengujian (dokumen dan fisik); 3. melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun pada awal tahun; dan 4. perlu memastikan perbaikan perujuhan yang akan digunakan tersedia dan telah dilakukan kalibrasi agar pelaksanaan pengujian berjalan lancar.	1. melakukan perawatan dan kalibrasi peralatan pengujian prasarana perkeretaapian; 2. melakukan monitoring terhadap rencana pengujian prasarana perkeretaapian pada triwulan IV agar mencapai target; 3. melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun pada awal tahun; 4. menyusun rencana pengujian prasarana perkeretaapian yang akan dilaksanakan pada tahun 2026; dan 5. perlu adanya revisi perjanjian kinerja dan rencana aksi agar capaian tetap on the right track.	Balai Pengujian Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penelepan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda kereta api dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian baik jalur kereta api dan fasilitas operasi dan lainnya)	3	36	3.74	10.39	746.040.630.833	12,82	3.772	426.723.687.293	100,86%	57,2%	a. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 telah diterbitkan 34 penomian perpotongan dan/atau persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain dan 15 penzinan usaha/operasi. b. Pelayanan sertifikasi hingga triwulan III telah dilaksanakan oleh unit kerja meliputi: 1) Pelayanan sertifikasi prasarana perkeretaapian sebanyak 36 sertifikat oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian terdiri dari 12 peretapan sertifikat jalur dan bangunan serta 24 sertifikat fasilitas operasi. 2) Pelayanan sertifikasi sarana perkeretaapian sebanyak 7.232 sertifikat sarana oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian. 3) Pelayanan sertifikasi SDM Perkeretaapian sebanyak 5.661 sertifikat sarana oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian. c. Peningkatan pelayanan penumpang pada BPKAB Sumatera Selatan dan BPKA Sulawesi Selatan diantaranya: 1) Pelatihan bahasa isyarat di BPKAR Sumatera Selatan yang dilaksanakan pada 9 s.d. 11 Juli 2025. 2) Tindak lanjut terhadap aduan yang disampaikan pada beberapa kanal (chat centre, surel, SP4N, Media Sosial, Survei Kepuasan). 3) Penyesuaian harga pada momen-momen tertentu seperti HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. 4) Pemotambahkan Sistem Pemesanan Tiket Online Mulai H-7 sebelum keberangkatan pada BPKA Sulawesi Selatan; 5) Melakukan sosialisasi tiket infant pada sistem penjualan tiket KA Makassar-Parepare. d. Kehandalan SDM dalam memberikan layanan serta pemenuhan kualitas dan tahapan pelayanan sesuai proses bisnis/SOP yang telah ditetapkan. e. Pelaksanaan sosialisasi layanan dan survei IKM kepada stakeholder, termasuk upaya pemambahan jumlah responden dengan perluasan pelaksanaan survei melalui google form untuk mempermudah pengisian responden. f. Pemanfaatan sistem informasi diantaranya pada layanan pengujian, sertifikasi kelaikan sarana serta sertifikasi kompetensi SDM perkeretapian, sehingga penyelesaian layanan dengan tepat waktu serta meningkat kualitas pelayanan sesuai dengan prosedur dan alur yang telah ditetapkan. Adapun beberapa upaya pengembangan sistem informasi yang sedang dilaksanakan antara lain: 1) Pengembangan fitur perizinan online pada Portal Layanan dan Data Dijlen Perkeretaapian dengan progres pada Triwulan II Tahun 2025 sudah dilakukan pembahasan laporan antara. 2) Ujicoba penggunaan fitur perizinan crossing pada Portal Layanan dan Data Dijlen Perkeretaapian dengan dilakukan sinkronisasi SSO. Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan dan pelaksanaan survei IKM diantaranya: a. Kendala pada saat pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat diantaranya kesulitan beberapa responden dalam mengakses link survei dikarenakan alat/media komunikasi responden yang kurang mendukung. b. Gangguan/error sistem informasi yang menyebabkan ketundanya penerjaan dan penerbitan sertifikat diantaranya sertifikat kelaikan sarana.	a. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun pada awal tahun; dan b. perlu memastikan rencana penggunaan anggaran yang sesuai dengan target dan dilaksanakan pada bulan 2026; dan	Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian,Dit. Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA)	3	36	3.71	10.31	-	-	3.75	-	101,08%	-	■ Terdapat 8 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat IKM yaitu Informasi, Persyaratan, Prosedur/Alur, Waktu Penyelesaian, Tarif/Biaya, Sarana Prasarana, Unsur Respon, Konsultasi dan Pengaduan yang seluruhnya memperoleh Kategori Baik dan Sangat Baik. ■ Berdasarkan analisis hasil kualitas pelayanan di lingkungan Direktorat LLAKA terdapat kategori pelayanan berupa waktu penyelesaian dan tarif/biaya yang memiliki nilai survei dua terlinggi, yang dapat diartikan bahwa waktu penyelesaian dan tarif/biaya terkait proses pelayanan izin usaha dan izin operasi perkeretaapian dilakukan sesuai dengan standarisasi dan proses bisnis yang telah ditentukan pada peraturan terkait sehingga proses pengajuan izin usaha dan izin operasi dapat terfaksana tepat waktu. ■ Kegiatan/ crosscutting yang dilaksanakan selama Triwulan III Tahun 2025 o Melakukan rapat audiensi terhadap pelaku usaha eksternal baru yang belum mempunyai informasi terkait usaha di bidang perkeretaapian untuk menyampaikan proses yang harus dilakukan dan apa yang perlu dipersiapkan untuk memperoleh izin usaha yang dilaksanggarkan pada tanggal 27 Agustus 2025 dengan PT Bukit Asam (Tbk); o Menghadiri Entry Meeting Survei Kepuasan Pengawasan Inspektorat Jederal Tahun 2025 pada tanggal 4 September 2025 dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.	a. Melakukan audiensi terhadap pelaku usaha eksternal baru yang belum mempunyai informasi terkait usaha di bidang perkeretaapian untuk menyampaikan proses/prosedur yang harus dilakukan dan apa yang perlu dipersiapkan untuk memperoleh izin usaha b. Melakukan pemantauan agar survei terkait IKM di lingkungan Direktorat LLAKA dilaksanakan setiap tahun.	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian)	3	36	3.7	10.28	-	-	3.79	-	102,43%	-	■ Pada pelaksanaan survei periode Januari s.d September 2025, Direktorat Sarana secara agregat atau nala-rata memperoleh nilai 3,79 dalam skala 4 atau 18,59 dalam skala 17,50 dengan rincian nilai IKM: a Januari 4 dari skala 4 dengan responden sebanyak 4 orang b Februari 4 dari skala 4 dengan responden sebanyak 5 orang c Maret 3,24 dari skala 4 dengan responden sebanyak 7 orang d April 4,00 dari skala 4 dengan responden sebanyak 5 orang e Mei 4,00 dari skala 4 dengan responden sebanyak 2 orang f. Juni 3,62 dari skala 4 dengan responden sebanyak 6 orang g Juli 3,60 dari skala 4 dengan responden sebanyak 6 orang h Agustus 3,77 dari skala 4 dengan responden sebanyak 20 orang i. September 3,83 dari skala 4 dengan responden sebanyak 7 orang ■ Terdapat 8 unsur yang menjadi nilai agregat atau nata-rata IKM pada periode Januari s.d September 2025 dengan memperoleh kategori Sangat Baik, mencakup: a Unsur Informasi. a Unsur Persyaratan. a Unsur Prosedur/Alur. a Unsur Waktu Penyelesaian. a Unsur Tarif/Biaya. a Unsur Sarana Prasarana. a Unsur Respon. a Unsur Konsultasi dan Pengaduan.	a. Melakukan sosialisasi berkelanjutan agar jumlah responden bertambah supaya hasil nata-rata capaiannya lebih representative. b Menyediakan nomor help desk yang siaga dalam menjawab kebutuhan informasi penggunna layanan c Menciptakan konten informasi pelayanan yang menarik di media sosial d Semua jenis konsultasi dan pengaduan yang dilayani dituangkan kedalam sebuah daftar/matriks, sebagai prioritas perbaikan layanan dan peningkatan kualitas layanan e Melakukan telaahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kepada pimpinan terkait konsultasi dan laporan pengaduan yang telah ditindaklanjuti. f. Memastikan pengumuman tentang informasi pelayanan mudah diakses oleh masyarakat g. Sinkronisasi penyarasan yang dimuat pada website atau pun media sosial lainnya dengan penyarasan yang ada di tempat layanan	Dit Sarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian)	3	36	3.89	10.81	-	-	3.87	-	99,49%	-	■ Rerilasai capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian dengan kategori penilaian Sangat Baik dengan jumlah responden s.d September 2025 sebanyak 53 orang. ■ Analisis keberhasilan didukung legitalan a Penyelesaian proses perizinan sebanyak 38 pelayanan bidang prasarana yang telah selesai/diterbitkan; a Pelayanan sertifikasi komponen prasarana perkeretaapian sebanyak 36 sertifikasi. a Penyesuaian aktivitas dan sebagai tahapan perencayan inovasi kinerja. Launching Aplikasi telah dilaksanakan monitoring terhadap pembangunan aplikasi Perpotongan dan persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain progress untuk perbaikan pada temuan bug/error telah selesai dan aplikasi siap digunakan. a Komunikasi yang baik dengan pemohon untuk memberikan asistensi terkait penyarahan dan perihal teknis serta kelcurangan data teknis yang harus dilengkapi secara resmi oleh pemohon serta unit kerja sehingga penyelesaian layanan (perizinan dan sertifikasi) bisa selesai tepat waktu. ■ Kendala: aplikasi sertifikasi prasarana perkeretaapian belum bisa di terapkan pada Tahun 2025, dikarenakan untuk tindak lanjut integrasi yang dilakukan Setditjen perkeretapian akan dilakukan pada tahun 2026.	a. melakukan dokumentasi pendampingan kepada responden pada saat pengisian link survei; b. menyusun laporan triwulan IV yang dilaporkan kepada PPTB.	Dit Prasarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian)	3	36	3.86	10.72	-	-	3.84	72.562.000	99,48%	-	Pelayanan publik bidang perkeretaapian meliputi layanan Balai Pengujian Perkeretaapian sebagai Badan Layanan Umum dalam hal ini adalah Pengujian Sarana Perkeretaapian, Pengujian Prasarana Perkeretaapian dan Pengujian SDM Perkeretaapian. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan menggunakan aplikasi SKM dari PPTB secara rutin setiap selesai pelaksanaan pengujian. Jumlah responden selama triwulan III yaitu sebanyak 3.498 orang. Keberhasilan dalam pencapaian kinerja didukung dengan sosialisasi layanan dan pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM) kepada penguna layanan perkeretaapian termasuk peningkatan layanan tim pengujI dengan berperan aktif dalam melakukan penyebaran kuesioner survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada penerima layanan untuk mesambah responden, pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi diantara terkait layanan pengujian perkeretaapian, ketepatan waktu penyelesaian layanan, kehandalan SDM dalam memberikan layanan termasuk menjaga kualitas pelayanan sesuai dengan prosedur dan alur yang telah ditetapkan. Berdasarkan unsiari di atas, terdapat beberapa hal yang telah memerlukan data/kerjasama/tindunhungan dengan bidang lain (crosscutting) antara lain hubungan kerja dengan Badan Usaha/Operator Perkeretaapian/Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan layanan bidang perkeretaapian, serta juga melibatkan sektor industri perkeretapian. Beberapa kesulitan yang dihadapi pada saat pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat diantaranya adalah beberapa responden mengalami kesulitan dalam mengakses link survei dikarenakan alat komunikasi responden yang kurang mendukung.	a. melakukan dokumentasi pendampingan kepada responden pada saat pengisian link survei; b. menyusun laporan triwulan IV yang dilaporkan kepada PPTB.	Dit Keselamatan Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian)	3	36	3.86	10.72	-	-	3.84	72.562.000	99,48%	-	Pelayanan publik bidang perkeretaapian meliputi layanan Balai Pengujian Perkeretaapian sebagai Badan Layanan Umum dalam hal ini adalah Pengujian Sarana Perkeretaapian, Pengujian Prasarana Perkeretaapian dan Pengujian SDM Perkeretaapian. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan menggunakan aplikasi SKM dari PPTB secara rutin setiap selesai pelaksanaan pengujian. Jumlah responden selama triwulan III yaitu sebanyak 3.498 orang. Keberhasilan dalam pencapaian kinerja didukung dengan sosialisasi layanan dan pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM) kepada penguna layanan perkeretaapian termasuk peningkatan layanan tim pengujI dengan berperan aktif dalam melakukan penyebaran kuesioner survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada penerima layanan untuk mesambah responden, pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi diantara terkait layanan pengujian perkeretaapian, ketepatan waktu penyelesaian layanan, kehandalan SDM dalam memberikan layanan termasuk menjaga kualitas pelayanan sesuai dengan prosedur dan alur yang telah ditetapkan.	a. melakukan dokumentasi pendampingan kepada responden pada saat pengisian link survei; b. menyusun laporan triwulan IV yang dilaporkan kepada PPTB.	Balai Pengujian Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan)	3	36	3.58	9.94	-	-	3.58	82.987.945	100%	-	Berdasarkan data nata-rata penumpang harian LRT Sumatera Selatan pada bulan Juli, Agustus, dan September diperoleh angka masingmassing sebesar 12.933 penumpang pada bulan Juli, 12.047 penumpang pada bulan Agustus, dan 12.826 penumpang pada bulan September. Mengacu pada Tabel Morgan dan Krejcie, jumlah responden yang dibutuhkan sudah memenuhi target untuk masing-masing bulan tersebut, sebanyak 371 responden pada bulan Juli, 372 responden pada bulan Agustus, dan 372 responden pada bulan September.	a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada penguna; b. Menjangkau lebih banyak responden dan memperoleh data yang representatif dengan menyediakan tautan survei online melalui website, media sosial, dan QR Code yang dipasang di area strategis stasiun; c. Meningkatkan respons terhadap aduan pelanggan; d. Melakukan pemblnasan kepada petugas pelayanan yang berada di stasiun maupun yang bertugas di dalam kereta; dan e. Menjalin koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa masalah dan hasil survei dapat ditindaklanjuti secara konkret.	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan)	3	36	3.23	8.97	-	-	3.36	824.867.320	104,02%	-	1) Balai Pengelola Kereta Api Semantiasa meningkatkan standar pelayanan minimum yang ada di stasiun, dan juga meningkatkan mutu pelayanan serta berkoordinasi dengan APS selaku pihak ketiga dalam pelayanan; 2) Melakukan peningkatan fasilitas baik di kereta ataupun di Stasiun; 3) Melakukan Sosialisasi tiket infant pada sistem penjualan tiket KA Makassar Parepare.	1) Melakukan koordinasi dengan PT. Angkasa Pura Support selaku penyedia jasa layanan di kereta api Makassar – Parepare untuk melakukan peningkatan kualitas layanan yang rarnah dan profesional; 2) Memfasilitasi Layanan Pengaduan melalui Barcode yang dlempel pada Area Boarding dan Sosial Media.	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	96,100	Pelayanan Transportasi Perkeretapian	97	1152	96.1	8.34	-	-	97.945	-	101,92%	-	a. Terpenuhinya target perdelean on time performance pada beberapa jenis pelayanan kereta api (khususnya angkutan KA perkotaan) seperti MRT Jakarta (99,98%), LRT Jakarta (99,98%), LRT Sumatera Selatan (99,82%), dan LRT Jabodebek (98,55%). b. Telah dilaksanakan evaluasi harian kinerja operasi pada jaringan jalur kereta api nasional di Kereta Api Ringan Terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, serta Kereta Api Kecepatan Tinggi Jakarta - Bandung pada tanggal 22 Agustus 2025. c. Koordinasi secara aktif dengan Badan Usaha Penyelenggaraa Prasarana dan Balai Teknik Perkeretaapian terhadap penyebab dan penanganan kejadian kelambatan perjalanan kereta api serta pelaksanaan evaluasi perjalanan Gapeka pada jaringan jalur KA nasional: a LRT Jabodebek pada tanggal 22 Agustus 2025; a Jawa dan Sumatera pada tanggal 8 s.d. 10 Oktober 2025. • Telah dilaksanakan pemerikssaan kelengkapan dokumen data dukung penetapan Gapeka Kereta Api Ringan/ LRT Jabodebek. Hasil pemeriksaan disampaikan melalui Surat Direktur Lalu Lintas Nomor: KA.407/21/5/KDJKA/2025 tanggal 8 Oktober 2025. • Telah diterbitkan Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian perihal Penetapan Perjalanan Kereta Api di Luar Grafik Perjalanan Kereta Api >30 hari berturut-turut pada tanggal 18 Juli 2025 dengan Nomor: KA.407/12/DJKA/2025 dan tanggal 27 Agustus 2025 dengan Nomor: KA.407/13/DJKA/2025. • Kegiatan/ crosscutting yang dilaksanakan selama Triwulan III Tahun 2025: o Melakukan koordinasi rencana Evaluasi Kinerja Lalu Lintas Kereta Api TW I dan TW II Tahun 2025 di Wilayah Daop 2 Bandung dan Daop 3 Cirebon terhadap Pelaksanaan Gapeka Pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 dengan BTP Bandung pada tanggal 5 Agustus 2025; o Melakukan Evaluasi Perjalanan KA Lintas Makassar-Parepare dengan UPT Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (BPKASS) pada tanggal 29 Agustus 2025. • Telah dilakukan Penuhatan Budaya Kinerja, yaitu dengan melaksanakan koordinasi evaluasi perjalanan kereta api berdasarkan Grafik Perjalanan KA secara berkala per triwulanan untuk memperoleh data valid dari Operator dan BTP serta BPKA	a. Melakukan evaluasi pelaksanaan GAPEKA untuk verifikasi dan validasi data capaian harian kinerja operasi pada jaringan jalur kereta api nasional yang direncanakan pelaksanaannya pada tanggal 6-10 Oktober 2025; b. Lanjutan pembangunan jalur ganda kereta api (jalur ganda KA elevated Medan – Binjai, Solo-Semarang, lainnya) dan peningkatan jalur/pembaharuan/balas operasi kereta api (Jember – Kalibaut, Jabodebek, lainnya) untuk meningkatkan kapasitas lintas dan kecepatan operasional kereta api serta memudahkan pengaturan operasional kereta api agar tepat waktu; c. Pelaksanaan penerbitan perjalanan perjalanan kereta api di luar GAPEKA melalui Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian.	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	96,100	Pelayanan Transportasi Perkeretapian (Penerintase Realisasi Perjalanan KA berdasarkan GAPEKA)	105	1140	95.42	8.37	-	-	105.24	2.189.468.316	110,29%	-	■ Realisasi kumulatif perjalanan KA penumpang dan barang pada Triwulan III 2025 sebesar 802.240 KA dengan rincian KA Penumpang 744.609 KA dan KA Barang 57.631 KA. ■ Penambahan frekuensi LRT Jabodebek yang sebelumnya dipropramkan sebanyak 158 KA, saat ini beroperasi sebanyak 366 KA saat weekday dan 270 KA saat weekend. • Penambahan frekuensi LRT Sumsel yang sebelumnya dipropramkan sebanyak 88 KA, saat ini beroperasi sebanyak 94 KA saat weekday, 102 KA saat weekend. • Pengoperasian KA tambahan pada masa libur panjang periode Juli s.d. September 2025. • Telah dilaksanakan evaluasi perjalanan Gapeka pada jaringan jalur KA nasional: a LRT Jabodebek pada tanggal 22 Agustus 2025; a Jawa dan Sumatera pada tanggal 8 s.d. 10 Oktober 2025. • Telah dilaksanakan pemerikssaan kelengkapan dokumen data dukung penetapan Gapeka Kereta Api Ringan/ LRT Jabodebek. Hasil pemeriksaan disampaikan melalui Surat Direktur Lalu Lintas Nomor: KA.407/21/5/KDJKA/2025 tanggal 8 Oktober 2025. • Telah diterbitkan Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian perihal Penetapan Perjalanan Kereta Api di Luar Grafik Perjalanan Kereta Api >30 hari berturut-turut pada tanggal 18 Juli 2025 dengan Nomor: KA.407/12/DJKA/2025 dan tanggal 27 Agustus 2025 dengan Nomor: KA.407/13/DJKA/2025. • Kegiatan/ crosscutting yang dilaksanakan selama Triwulan III Tahun 2025: o Melakukan koordinasi rencana Evaluasi Kinerja Lalu Lintas Kereta Api TW I dan TW II Tahun 2025 di Wilayah Daop 2 Bandung dan Daop 3 Cirebon terhadap Pelaksanaan Gapeka Pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 dengan BTP Bandung pada tanggal 5 Agustus 2025; o Melakukan Evaluasi Perjalanan KA Lintas Makassar-Parepare dengan UPT Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (BPKASS) pada tanggal 29 Agustus 2025. • Telah dilakukan Penuhatan Budaya Kinerja, yaitu dengan melaksanakan koordinasi evaluasi perjalanan kereta api berdasarkan Grafik Perjalanan KA secara berkala per triwulanan untuk memperoleh data valid dari Operator dan BTP serta BPKA	■ Meningga agar perjalanan kereta api sesuai dengan yang telah dipropramkan pada Gapeka dan Perjalanan di Luar Gapeka; ■ Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Gapeka pada jaringan jalur kereta api nasional secara berkala setiap 3 bulan sekali; ■ Melakukan penyesuaian program perjalanan KA pada jaringan jalur KA nasional Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (KA LRT Jabodebek) dan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan; ■ Melakukan Revisi Perjanjian Kinerja dengan menyesuaian target kinerja berdasarkan hasil pemberahasan hasil evaluasi dan monitoring capaian kinerja untuk mengantisipasi capaian kinerja yang tidak memenuhi kriteria on the right track (90%-110%).	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	96,100	Pelayanan Transportasi Perkeretapian (Penyentase Kualitas Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II)	63	1140	65.02	8.34	-	-	93.71	-	98,62%	-	■ Kualitas TQI Jalur Kereta Api Kategori I dan II sepanjang 5.584,19 Km di wilayah Jawa dan Sumatera terdiri dari Kategori I (kecepatan >100 s.d 120 Km/Jam) sepanjang 3.864,324 Km dan Kategori II (kecepatan > 80 s.d 100 Km/Jam) sepanjang 1.979,865 Km. ■ Kegiatan Pendukung: a Bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalur dan bangunan KA; a Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalur dan bangunan KA; dan a Pemeriksaan jalan rel dengan KA Ukur di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. ■ Analisa kegagalan/kendala dikarenakan masih terdapat faktor yang mengalami penurunan TQI sehawkat 4 Lintas wilayah BTP Padang dan BTP Jakarta sebanyak 20 Lintas serta BTP Bandung sebanyak 1 Lintas.	■ Penyesuaian aktivitas: a Akan bersurat ke PT KAI terkait dengan permintaan data pengukuran Jalan Rel dengan KA Ukur Periode III dan kelengkapan hasil pengukuran TQI dengan KA Ukur di Jawa dan Sumatera; b Evaluasi hasil pengukuran TQI Periode III Tahun 2025 dengan BTP dan PT. KAI (bersero); c Berkoordinasi dengan BTP dan PT. KAI terkait dengan perpanjangan kontrak Penawalan/IM pada BTP.	Dit Prasarana Perkeretaapian dan Balai Teknik Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	96,100	Pelayanan Transportasi Perkeretapian (Persentase Fasilitas Operasi/ Kereta Api dengan Teknologi Handal)	64	756	63.92	8.46	-	-	64.43	109.661.768	100,8%	-	■ Jumlah unit persinyalan yang berbasis elektrik sebanyak 364 unit dengan jumlah unit persinyalan berbasis elektrik dan mekanik (eksisting dan rencana pembangunan fasilitas operasi elektrik pada Tahun 2025 s.d. 2029) sebanyak 596 unit. ■ Kegiatan pendukung antara lain: a Bimbingan Teknis Bidang Fasilitas Operasi Kereta Api; a Jabodebek Railway Capacity Enhancement Phase I; a Pemerikssaan dan Pengawasan Prasarana Fasilitas Operasi Kereta Api. ■ Telah dilakukan Audemsi terkait Percepatan Penyelesaian Dokumen Teknis Fasilitas Operasi Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum Segmen 1 Lintas Lahat– Kertapati Sumatera Selatan pada tanggal 30 September 2025 dengan pembahasan terkait ruang lingkup isi dan Kajian Kelaikan Teknis Penggunaan Bangunan E-House. ■ Telah dilakukan sinkronisasi data fasilitas operasi KA dengan BTP Jakarta. ■ Dokumen teknis bidang jalur kereta api untuk lintas Lahat – Kertapati masih dilakukan evaluasi internal Direktorat Prasarana Perkeretapian. ■ Kendala/hambatan: belum bisa dilakukan monitoring dan evaluasi perjalanan fasilitas operasi KA yang dibangun oleh BUPP dalam hal ini yaitu PT KAI (Persero).	■ Penyesuaian aktivitas: a Akan bersurat kepada BTP Palembang untuk perugasan monitoring perawalan fasilitas operasi di lintas prabumulih simpang serta revisi anggaran untuk Rampcheck prasarana perkeretaapian pada wilayah BTP untuk penilapan pelaksanaan anglukan Nataru bersama dengan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian. ■ Penyesuaian aktivitas yaitu dengan tinjauan Lapangan Permohonan Izin Pembangunan Prasarana Perkeretapian Umum Segmen I Lahat s.d. Kertapati oleh PT KAI (Persero).	Dit Prasarana Perkeretaapian dan Balai Teknik Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN KERETA API	%	19,000	Pelayanan Transportasi Perkeretapian	14	118	16.34	13.85	-	-	14.337	-	87,74%	-	a. Realisasi angkutan penumpang secara bulanan mengalami penurunan pada periode triwulan 3 dengan rincian: 1) Realisasi angkutan penumpang KRL Jabodebek secara bulanan mengalami penurunan, realisasi angkutan pada bulan Juli sebanyak 35.775.610 penumpang turun sebanyak 2.972.963 penumpang (-8,31%) pada bulan berikutnya dan turun sebanyak 3.194.619 penumpang (-8,93) pada bulan September 2025 atau nata-rata penurunan pada TW 3 sebesar -8,62% dari jumlah penumpang di bulan Juli 2025 2) Realisasi angkutan penumpang MRT Jakarta secara bulanan mengalami penurunan, realisasi angkutan pada bulan Juli sebanyak 4.419.821 penumpang turun sebanyak 418.180 penumpang (-9,46%) pada bulan berikutnya dan turun sebanyak 503.641 penumpang (-10,43) pada bulan September 2025 atau nata-rata penurunan pada TW 3 sebesar -8,62% dari jumlah penumpang di bulan Juli 2025 3) Realisasi angkutan penumpang LRT Jabodebek secara bulanan mengalami penurunan, realisasi angkutan pada bulan Juli sebanyak 2.732.235 penumpang turun sebanyak 184.263 penumpang (-4,17%) pada bulan berikutnya dan turun sebanyak 282.931 penumpang (-6,40) pada bulan September 2025 atau nata-rata penurunan pada TW 3 sebesar -5,29% dari jumlah penumpang di bulan Juli 2025 4) Penurunan juga terjadi pada kereta api komersial, dimana realisasi angkutan pada bulan Juli sebanyak 4.126.713 penumpang turun sebanyak 787.688 penumpang (-19,09%) pada bulan berikutnya dan turun sebanyak 861.596 penumpang (-20,88) pada bulan September 2025 atau nata-rata penurunan pada TW 3 sebesar -19,98% dari jumlah penumpang di bulan Juli 2025 b. Penurunan jumlah penumpang pada bulan Agustus dan September 2025 dikarenakan pada periode tersebut mobilitas masyarakat berkurang, seiring berakhirnya masa libur dan kembalinya aktivitas rutin masyarakat termasuk karena preferensi masyarakat sebagian lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi daring karena pertimbangan waktu dan fleksibilitas c. Layanan Public Service Obligation (PSO) dan angkutan perintis belum sepen

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 10				Realisasi Bulan 10		Realisasi Bulan 10		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume		%	%			
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	%	100,000	Program Dukungan Manajemen (Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretapian, Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretapian, Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretapian, Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretapian & Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretapian)	79	379	40.96	10.81	578,662,237,500	12.82	79.794	295,813,093,126	194.83%	51.1%	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan merupakan bagian strategi memperkuat prinsip-prinsip good governance di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretapian. Hal ini berlangsung untuk mencapai sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efisien, dan profesional melalui pemberlakuan menyeluruh terhadap sistem manajemen kinerja, pengelolaan keuangan, dan pelayanan publik yang berorientasi pada hasil dan dampak. Pada Triwulan III Tahun 2025, Direktorat Jenderal Perkeretapaian memungkinkan capaian yang sangat positif dalam pelaksanaan program peningkatan tata kelola pemerintahan. Terlepas dari belum dilaksanakannya pengukuran terhadap Indeks Profesional ASN, pencapaian signifikan pada realisasi PNBP serta nilai AKIP telah mampu mendorong capaian IKP di atas target triwulan. Hal ini mengindikasikan bahwa Direktorat Jenderal Perkeretapaian berada pada jalur yang tepat dalam memperkuat tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional, serta perlu mempertahankan capaian dengan optimalisasi dua komponen lainnya (Nilai Kinerja Anggaran dan Indeks Profesional ASN) pada periode berikutnya. Pemutakhiran data, peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kinerja, serta pengisutan kompetensi ASN perlu terus menjadi fokus prioritas untuk memastikan pencapaian target tahunan secara menyeluruh. Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja diantaranya: a. Faktor penyelenggaraan SAKIP secara komprehensif : 1) Perencanaan dan penetapan target kinerja termasuk pada dokumen revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah disusun dengan memperhatikan realisasi kinerja Tahun 2024, arah kebijakan 2025-2029, analisa mendalam diantaranya ketersediaan sumber daya (anggaran, SDM) termasuk telah dilakukan sinkronisasi target kinerja sub unit kerja (Bagian) dan unit kerja lainnya (Direktorat, Balai); 2) Publikasi/updating/pembahasan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja melalui e-SAKIP Revisi dan website Ditjen Perkeretaapian (official), diantaranya laporan monitoring kinerja triwulan serta update rancangan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 – 2029; 3) Pada Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2025 telah tercantum/dijelaskan seluruh informasi capaian kinerja mencakup tata cara perhitungan capaian kinerja, analisa keberhasilan/kegagalan, analisa penyesuaian kebijakan/strategi/kegiatan maupun anggaran, analisa hubungan kerja/crosscutting termasuk perbandingan di level nasional/internasional, perubahan budaya kinerja, analisa dukungan terhadap pencapaian target RP.IMN 2025-2029, serta penyelesaian keberadaan sumber data dukung capaian kinerja pada lampiran laporan; 4) Perencanaan kinerja unit kerja telah menjadi acuan dalam penyusunan PK berjenjang dan SKP masing-masing pegawai termasuk update/revisi dengan adanya penyesuaian struktur organisasi melalui aplikasi e-Kinerja yang selanjutnya disu dalam pelaporan kinerja pegawai setiap bulan; 5) Koordinasi internal yang efektif terlihat dari pembahasan yang mengikutsertakan seluruh unit kerja terkait (Direktorat, Balai dan Bagian) dalam pengukuran dan pelaporan kinerja serta evaluasi internal yang sinergis; 6) Pelaksanaan evaluasi dan penilaian SAKIP Tahun 2025, meliputi penilaian mandiri di tingkat unit kerja Setditjen yang dilanjutkan dengan evaluasi tingkat Eselon I serta Evaluasi Implementasi SAKIP Unit Eselon I Ditjen Perkeretaapian bersama Inspektorat Jenderal dengan hasil predikat 'A' dan nilai meningkat dari Tahun sebelumnya (83,72); 7) Konsolidasi hasil evaluasi SAKIP melalui rapat penyamaan persepsi penilaian unit kerja non-sampel, guna menyeragamkan pemahaman dan memastikan tindak lanjut hasil pemblain Inspektorat Jenderal secara terkoordinasi di seluruh unit kerja termasuk membahas terkait penyesuaian manual perhitungan beberapa indikator kinerja di beberapa Direktorat/Balai agar selaras dengan amanah RP.IMN Tahun 2025-2029. b. Faktor pengelolaan/pelaksanaan anggaran: 1) Pelaksanaan relaksasi/buka blokir anggaran sebesar Rp105,30 miliar untuk mendukung kegiatan prioritas keselamatan dan Rp48,71 miliar untuk pemenuhan belanja pegawai sebagai bentuk upaya menjaga keamanbungan program strategis keselamatan dan pelayanan penyelenggaraan perkeretaapian; 2) Pelaksanaan tagging/penandaan pada Rincian Output (RO) Tahun 2025 yang termasuk dalam kategori SBKU sebagaimana diatur pada PMK Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2025. Sebagai tindak lanjut hal tersebut, telah dilakukan tagging terhadap 52 RO yang tersebar di seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; 3) Efektivitas dan ketepatan pelaksanaan anggaran melalui penyusunan dan revisi DIPA, penyesuaian RPD, dan pelaporan output yang rutin/berkala dan tepat waktu; 4) Kemampuan adaptasi terhadap efisiensi fiskal, menunjukkan bahwa organisasi harus fleksibel dan tetap menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai ketentuan. c. Faktor optimalisasi PNBP: 1) Secara bertahap telah dilakukan perbaikan tata kelola pelaksanaan PNBP TAC dan hal tersebut dapat dilihat dengan penolehan realisasi PNBP yang signifikan dan pembayaran TAC periode Tahun 2024 serta pembayaran TAC Tahun 2025 sebanyak 2 Badan Usaha (Railink dan KCI). Adapun terhadap pembayaran TAC Tahun 2025 dari PT. KAI saat ini masih menunggu penyelesaian pencatan dana dari kegiatan IMO; 2) Penolehan realisasi PNBP yang signifikan dari pembayaran sewa atas pemanfaatan aset/BMN termasuk adanya pensetujuan dari instansi terkait seperti Kementerian Keuangan dalam pemanfaatan aset/BMN yang turut mempengaruhi realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian. d. Faktor manajerial SDM : 1) Pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan mengikuti pendidikan/pelatihan/workshop berkoordinasi dengan BPSDMP, Setjen Kemenhub (Biro SDMO), serta lembaga pelatihan/penyelenggara pendidikan/pelatihan lainnya baik teknis perkeretaapian maupun manajerial; 2) Pelaksanaan monitoring pengembangan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk dapat melakukan pengawasan dan pembinaan disiplin pegawai di masing-masing unit kerja melalui surat Setditjen Perkeretaapian Nomor KP.405/1/12/K1/DJKA/2025 tanggal 29 Juli 2025 perihal Peningkatan Kinerja dan Disiplin; 3) Himbauan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan penyelesaian disparitas data ASN di masing-masing unit kerja guna peningkatan kualitas layanan manajemen ASN melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor KP.001/11/3/K1/DJKA/2025 tanggal 13 Agustus 2025 perihal Penyelesaian Disparitas Data ASN; 4) Himbauan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan pemutakhiran data pegawai secara berkala pada aplikasi SIK Kementrhub melalui surat Setditjen Perkeretaapian Nomor KP.001/1/23/K1/2025 tanggal 29 Agustus 2025 perihal Pemutakhiran Data Pegawai pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) Kemenhub; 5) Penyampaian hasil monitoring penilaian indeks profesional ASN kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara berkala setiap; e. Faktor lain laksana termasuk permanfaatan teknologi/digitalisasi : 1) Ketepatan dan ketertiban pelaporan melalui aplikasi seperti e-SAKIP Revisi, SAKTI, e-Monitoring, e-Performance, e-Kinerja, Portal Layanan DJKA dan lainnya menunjukkan bahwa sistem pelaporan yang terintegrasi dan disiplin administrasif sud mempengaruhi pencapaian kinerja pada beberapa komponen penilaian. 2) Kapasitas SDM dalam pengelolaan aplikasi/sistem informasi dimana minimnya pemahaman atau keterlambatan input oleh admin berdampak pada rendahnya nilai kinerja ASN dan organisasi termasuk pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan usian di atas, terdapat beberapa hal yang telah mempengaruhi data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (crosscutting) baik secara internal maupun eksternal. Pada lingkup internal, hal ini tercermin dalam sinergi antara Direktorat, Bagian dan Balai dalam proses perencanaan dan pelaporan kinerja, serta pelaksanaan kegiatan strategis lainnya yang membutuhkan koordinasi lintas unit termasuk unit di lingkungan Kementerian Perhubungan seperti Setjen Kemenhub, Itjen Kemenhub, dan lainnya. Pada lingkup eksternal, kerja sama dan hubungan dengan instansi seperti Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, Bappenas, Badan Kepegawaian Nasional, Kementerian ATR/BPN, badan usaha dan lembaga terkait lainnya menjadi faktor krusial dalam mendukung keberhasilan kinerja dan/atau pemenuhan aset, optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), integrasi dan sinkronisasi data kepegawaian, serta pemanfaatan aplikasi pelaporan kinerja keuangan dan organisasi. Kolaborasi ini menunjukkan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang berkualitas, efisien dan akuntabel. Selain itu, dalam mendukung pencapaian target Tingkat Pencapaian Tata Kelola Pemerintahan, juga dilakukan pengelolaan kinerja berbasis risiko melalui pemantauan penanganan risiko terhadap kegiatan pendukung IKP yang dilakukan secara berkala setiap Triwulan. Berdasarkan profil risiko unit kerja Ditjen Perkeretaapian Tahun 2025, terdapat 14 risiko yang dapat mengancam pencapaian target IKP tersebut dimana sebanyak 7 risiko diantaranya memerlukan penanganan risiko lanjutan dengan 11 rencana penanganan. Hingga Triwulan III 2025 telah terealisasi 9 penanganan risiko atau sebesar 81,82% dari target 11 rencana penanganan risiko yang akan dilaksanakan. Rincian penanganan risiko yang telah dilaksanakan s.d Triwulan III sebagai berikut : a. Percepatan/akselerasi proses pengadaan barang dan jasa pada awal tahun anggaran agar kegiatan prioritas dapat direalisasikan tepat waktu dengan output maksimal; b. Melakukan percepatan proses revisi anggaran luncuran SBSN Tahun 2024 ke Tahun 2025 pada 11 kegiatan dilengkapi data dukung sesuai PMK 107 Tahun 2024; c. Percepatan/akselerasi proses pengadaan barang dan jasa pada awal tahun anggaran agar kegiatan prioritas dapat direalisasikan tepat waktu dengan output maksimal; d. Melakukan percepatan proses revisi anggaran luncuran SBSN Tahun 2024 ke Tahun 2025 pada 11 kegiatan dilengkapi data dukung sesuai PMK 107 Tahun 2024; e. Rapat pembahasan khusus mengenai sinkronisasi/penyelarasan kebijakan, strategi, sasaran dan indikator antara Remsis DJKA dengan Renstra KL dan RP.IMN); f. Melakukan koordinasi/asistensi internsif dengan Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan/Bappenas/Kementerian PANRB/Tim SAKIP; g. Usulan penetapan renstra/indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART; h. Koordinasi identifikasi potensi pemanfaatan pendirhan PNBP termasuk dan pengoptimalan aset; i. Percepatan penyelesaian permasalahan terkait PNBP TAC.	● Setditjen telah berkoordinasi dengan unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian dalam kegiatan penyusunan dan/atau revisi terkait peraturan/regulasi guna pelaksanaan yang lebih efektif dan efisien. Koordinasi/pembahasan dilaksanakan secara berjenjang dengan seluruh pihak terkait (Direktorat Teknis, Badan Usaha, Biro Hukum, Kementerian Hukum, Sekretariat Negara, dan lainnya) termasuk dalam pelaksanaan harmonisasi dengan peraturan perundangan lainnya ● Pada Triwulan III 2025 juga telah dilaksukan beberapa kegiatan pendukung antara lain penyusunan rekomendasi kebijakan dalam bidang perencanaan (finalisasi rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, penyusunan revisi PM 112 Tahun 2017, dan lainnya), serta dukungan penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah terkait Kereta Api Cepat yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. ● Dalam proses penyusunan dan penerbitan regulasi, terdapat kendala/hambatan diantaranya substansi teknis pada rancangan regulasi belum siap dan masih membutuhkan pembahasan lanjutan, kebutuhan keterlibatan Kementerian/Lembaga lain, kendala sinkronisasi jadwal pembahasan, serta adanya efisiensi anggaran yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pendukung. Hal ini juga disebabkan oleh faktor eksternal dengan banyaknya regulasi yang sedang menunggu penyelesaian. ● Rancangan peraturan/kegiatan bidang perkeretaapian yang masih berproses pentide Triwulan III Tahun 2025 diantaranya: a Rancangan Permenhub Tentang Standar, Tata Cara Pengujian & Sertifikasi Kelaikan KA Otomatis dengan Pengarah; a Revisi PM 54 Tahun 2018 tentang Penyelenggaran Kewiladanan Perkeretaan Setidaing Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan; a Revisi PM 121 Tahun 2017 Tentang Lalu Lintas Kereta Api; a Revisi PM 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KA Cepat terkait Safety Protection Zone; a Revisi PM 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api; a Revisi PM 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase; a Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Tata Cara, Standar Peralatan dan SDM Petugas Penanganan Kecelakaan Kereta Api; a Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Tata Cara, Standar Peralatan dan SDM Petugas Pemeriksa dan Analisis Kecelakaan Kereta Api; a Revisi PM 14 Tahun 2011 tentang Tata cara dan Standar Pengujian Lokomotif; a Revisi PM 39 Tahun 2011 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Penugasan Tarif Angkutan Orang dengan KA; a Revisi PM 43 Tahun Perkeretaapian Tentang Sertifikasi Pengemudi Derek Usaha;	● Penyesuaian strategi/kebijakan : 1 Koordinasi internsif dengan Sekjend Kemenhub untuk percepatan pengundangan peraturan yang sudah dilakukan harmonisasi (Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Pengendali Distribusi Listrik), percepatan pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan perundangan dengan Kementerian Hukum (Revisi PM 14 Tahun 2011 tentang Pengujian Lokomotif, Revisi PM 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan KA) serta memantau progres revisi peraturan perundangan lainnya (revisi PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Penerbitan di lingkungan Kementerian Perhubungan); 2 Berpartisipasi aktif dalam koordinasi dengan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan stakeholders lainnya terkait pembahasan rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden terkait kereta api cepat; 3 Penyelesaian/finalisasi dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 baik secara substansi maupun dalam proses pengesahan/penetapan. ● Penyesuaian aktivitas dan anggaran: Penyusunan jadwal/ timeline pembahasan terhadap seluruh agenda penyusunan rancangan peraturan/ legislasi sebagai tools monitoring penyelesaian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. ● Penyesuaian organisasi/ penempatan pegawai/ jabatan: Koordinasi dengan Sekjend Kemenhub terkait pembinaan dan dukungan penempatan pegawai jabatan fungsional tertentu khususnya bidang hukum seperti analis hukum, analis perancang peraturan perundang-undangan, dan lainnya.	Setditjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	%	100,000	Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian (Pensentase Pencapaian Target Regulasi/Legislasi (Jumlah Rancangan Dan Peraturan Perundangan) Di Bidang Perkeretaapian)	8	110	15	13.64	-	-	8	1.474.941.953	53.33%	-			
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Nilai	100,000	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian (Indeks Profesional ASN)	89	-	-	-	-	-	-	492.706.871	-	-	● Pada Triwulan II 2025 belum dilaksanakan target serta belum terdapat realisasi untuk indeks profesional ASN karena hasil penilaian dimencanakan terbit pada Triwulan IV 2025. Posisi saat ini masih dalam upaya peningkatan nilai indeks profesional ASN Ditjen Perkeretaapian. ● Berdasarkan pendefinisian nilai sementara indeks profesional ASN Ditjen Perkeretaapian (posisi 23 September 2025), diperoleh bahwa 2 dari 4 kriteria masih bernilai rendah yaitu kriteria kompetensi (nilai 20,38 dari 40) dan kriteria kinerja (nilai 26,30 dari 30). Beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lain: a. Terdapat 15 pegawai yang belum melaksukan "Tertma Pentaan" pada aplikasi e-Kinerja Kementerian Perhubungan terhadap penilaian kinerja individu Tahun 2024 sehingga data kinerja ASN belum terkonfirmasi dan nilai menjadi rendah (nol); b. Terdapat pegawai yang belum melakukan upload/upload data kompetensi Tahun 2024 dan 2025 ke aplikasi SIK Kementerian Perhubungan berupa sertifikat/bukti diklusng lain dari kelikutertsan pelatihan/ bimbingan teknis/ sosialisasi/ pelatihan/ lainnya sehingga mempengaruhi rendahnya nilai kompetensi; c Terdapat kendala dalam sinkronisasi data dari aplikasi SIK ke aplikasi SIASN BKN (gagal post data SK/Horror) sehinggga menghambat proses peningkatan Indeks Profesional ASN; d. Terdapat pegawai yang sehingga belum masuk dalam perhitungan Indeks Profesional ASN karena pegawai tersebut bukan tagi menjadi bagian dari Ditjen Perkeretaapian (resign, hukuman disiplin, dan lainnya) sehinggga mempengaruhi perolehan nilai Indeks Profesional ASN. Kendala tersebut sudah disampaikan kepada Biro SDM dan Organisasi guna perubahan status kepegawaian pada data BKN (menjadi non-aktif). ● Secara berkala telah dilakukan beberapa upaya guna meningkatkan indeks profesional ASN diantaranya: a. Penyampaian hasil monitoring penilaian Indeks Profesional ASN kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara berkala setiap bulan (pada 21 Juli, 21 Agustus dan 23 September 2025); b Himbauan kepada seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian untuk melakukan pengawasan dan pembinaan disiplin pegawai di masing-masing unit kerja melalui surat Setditjen Perkeretaapian nomor KP.405/1/12/K1/DJKA/2025 tanggal 29 Juli 2025 perihal Peningkatan Kinerja dan Disiplin; c Himbauan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian untuk melakukan penyelesaian disparitas data ASN di masing-masing unit kerja guna peningkatan kualitas layanan manajemen ASN melalui surat Setditjen Perkeretaapian nomor KP.001/1/13/K1/DJKA/2025 tanggal 13 Agustus 2025 perihal Penyelesaian Disparitas Data ASN; d Himbauan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian untuk melakukan pemutakhiran data pegawai secara berkala pada aplikasi SIK Kementerian Perhubungan melalui surat Setditjen Perkeretaapian nomor KP.001/1/3/SK/2025 tanggal 29 Agustus 2025 perihal Pemutakhiran Data Pegawai pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) Kemenhub; e Mendorong peningkatan kompetensi SDM Ditjen Perkeretaapian dengan mengikuti pendidikan/pelatihan berkoordinasi dengan BPSDMP, Setjen Kemenhub (Biro SDMO), serta lembaga pendidikan/pelatihan lainnya baik kompetensi teknis perkeretaapian maupun kompetensi manajerial. f. Koordinasi dengan administrator SIK dan e-Kinerja Kementerian Perhubungan untuk pemutakhiran data kompetensi dan kinerja termasuk melakukan pendampingan ke unit kerja terkait apabila terdapat kendala dalam proses sinkronisasi.	● Penyesuaian strategi/kebijakan : a Penyampaian pengembangan Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian sebagai superapps Ditjen Perkeretaapian yang terintegrasi dengan pemanfaatan Ruc/modul layanan sesuai prioritas termasuk pengembangan modul layanan pengaduan pelayanan; b Pemenuhan data dukung pengukuran Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik di lingkungan Ditjen Perkeretaapian dengan fokus utama aspek layanan publik seiktoral. c Peningkatan/penguatan standar keamanan informasi sesuai kebijakan di lingkungan Kemenhub termasuk update sistem/framework dan koordinasi dengan Pusdatin Kemenhub untuk pelaksanaan penetration testing/vulnerability assessment secara berkala guna mencegah serangan cyberhacker. ● Penyesuaian aktivitas dan anggaran: Pembahasan/finalisasi lingkup usulan kegiatan TIK Tahun 2026 dan usulan revisi lingkup II kepada Pusdatin Kementerian Perhubungan sesuai dengan arsitektur dan peta rencana pemerintah digital Kemenhub serta kebijakan penyederhanaan aplikasi guna dalam clearance oleh Tim SPBE Nasional. ● Penyesuaian organisasi/penempatan pegawai/jabatan: Usulan pengopitimalan/ penyelarasan/ penambahan pegawai jabatan fungsional pranata komputer dan statistisi pada unit kerja Setditjen Perkeretaapian guna mendukung pengelolaan data dan teknologi informasi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.	Setditjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Nilai	100,000	Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal (Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian)	3	-	-	-	-	-	-	1.499.288.570	-	-	● Pada Triwulan III 2025, belum terdapat realisasi Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik dilaksanakan masih menunggu informasi lanjut terkait penggunaan indikator untuk evaluasi kinerja digital instansi pemerintah dari Sekjend Kemenhub. Adapun hasil penilaian ditargetkan dapat terpenuhi pada Triwulan IV Tahun 2025. ● Beberapa kegiatan pendukung diantaranya: a Pembahasan progres kegiatan TIK Tahun 2025 di lingkungan Ditjen Perkeretaapian yang dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Teknis, Bagian dan Balai dengan beberapa topik pembahasan yaitu: 7 Pembahasan laporan pendahuluan dan progres pengembangan Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian. 7 Pembahasan laporan antara pengembangan Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian. 7 Pembahasan laporan kemajuan pengembangan Portal Layanan Ditjen Perkeretaapian sebagai Superapps. b Penyesuaian tampilan landing page dan optimalisasi single sign on (SSO) HUBNET Kemenhub pada Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian sesuai standar tingkat Kemenhub. c Koordinasi dengan Pusdatin Kementerian Perhubungan terkait finalisasi struktur penyederhanaan aplikasi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian dengan menyesuaikan struktur Portal Layanan dan Data mengacu KM.8 Tahun 2024 tentang Peta Proses, Peta Subproses, dan Peta Relasi di lingkungan Kemenhub. a Koordinasi dengan Pusdatin Kementerian Perhubungan terkait pendaftaran Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian sebagai sistem elektronik lingkup publik di lingkungan Kemenhub dalam rangka dukungan terhadap kebijakan pengelolaan aplikasi dan sistem informasi serta penyederhanaan aplikasi di lingkungan Pemerintah. a Koordinasi kebutuhan integrasi data teknis terkait pemenuhan pelaporan badan usaha biding perkeretaapian agar terintegrasi pada Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian guna mempermudah pengawasan sebagai regulator dan mendukung terciptanya Satu Data Transportasi Perkeretaapian. a Koordinasi dan tindak lanjut perbaikan atas kejadian insiden keamanan temuan Pusdatin Kemenhub terkait hasil forensik digital/keamanan modul layanan sertifikasi SDM perkeretaapian pada Portal Layanan dan Data Perkeretaapian. a Koordinasi pengelolaan domain dan penggunaan server di lingkungan Ditjen Perkeretaapian. a Penyiapan data dukung usulan kegiatan TIK Tahun 2026 di lingkungan Ditjen Perkeretaapian guna proses revisi tinglat II oleh Pusdatin Kementerian Perhubungan dan tahapan clearance oleh Tim SPBE Nasional.	● Penyesuaian strategi/kebijakan : a Koordinasi rencana pelaksanaan visitasi oleh Tim Penilai dari Komisi Informasi Pusat dan Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub dalam rangka persiapan langsung pelayanan informasi publik yang direncanakan pada Minggu IV Oktober 2025; a Pelaksanaan press conference terkait pemberitaan penggunaan anglikan pentide Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 termasuk layanan tambahan mentor gratis (mobi) serta penerapan GAPEKA Tahun 2026. ● Penyesuaian aktivitas dan anggaran: Pemingkatan kualitas fasilitas layanan informasi publik di Lantai 14 Gedung Karya Kantor Pusat Kementerian Perhubungan termasuk penyediaan ruangan PPID tersendiri sesuai standar pelayanan informasi publik. ● Penyesuaian organisasi/ penempatan pegawai/ jabatan: Usulan pengoptimalan/ penyelarasan/ penambahan pegawai jabatan fungsional pranata humas di masing-masing unit kerja guna mendukung pengelolaan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.	Setditjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Nilai	100,000	Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian (Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian)	90	-	-	-	-	-	-	918.817.767	-	-	● Pada Triwulan III 2025 belum dilaksanakan target dan tidak terdapat realisasi nilai keterbukaan informasi publik (pemblain direncanakan pada pentide Triwulan IV 2025). ● Upaya pada Triwulan III 2025, diantaranya: a Kegiatan monitoring dan evaluasi PPID pemenuhan sosialisasi dan coaching pemisapan pentilan AKIP Tahun 2025 kepada seluruh PPID Pelaksana UPT/Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada bulan Agustus s.d September 2025; b Penyelesaian proses pentilan dengan metode Self Assesment Questionnaire (SAQ) atau kuesioner pentilan mandiri AKIP Tahun 2025 termasuk pemenuhan kebutuhan data dukung yang telah dilaksanakan pada 26 Agustus s.d 26 September 2025; c Penyediaan meja layanan informasi publik di Lantai 14 Gedung Karya Kantor Pusat Kementerian Perhubungan termasuk penyediaan link permohonan informasi yang dapat diakses pada website Ditjen Perkeretaapian; d Pemenuhan permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi pada periode Triwulan III 2025 (sebanyak 1 permohonan) secara langsung kepada PPID Pelaksana Setditjen Perkeretaapian yang telah terselesaikan. e Monitoring media sebagi hari dengan kategori isu negatif, netral dan positif, termasuk melakukan update berkala "Top Issue Perkeretaapian" dengan publikasi/pemberitahuan melalui media sosial maupun media elektronik lainnya. ● Kendala dalam pencapaian kinerja a Terdapat beberapa dokumen yang tidak dapat dipenuhi sebagaimana dipersyaratkan akibat adanya perbedaan karakteristik kegatan yang dijadikan sampel dengan checklist kebutuhan data dukung. Terkait kendala tersebut telah disampaikan saat penyataan Setditjen Perkeretaapian selaku atasan PPID Pelaksana kepada Biro KIP melalui surat Setditjen Perkeretaapian Nomor: IP.10/01/10/K1/DJKA/2025 tanggal 23 September 2025. b Keterbatasan anggaran mengakibatkan penundaan penunjang kelayakan suang pemrosikan informasi yang dipersyaratkan dalam pentilan KIP tersedia dengan minimalterbatas.	● Penyesuaian strategi/kebijakan : a Koordinasi dan penerapan target kinerja termasuk pada dokumen revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah disusun dengan memperhatikan realisasi kinerja Tahun 2024, arah kebijakan 2025-2029, analisa mendalam diantaranya ketersediaan sumber daya (anggaran, SDM) termasuk telah dilakukan sinkronisasi target kinerja sub unit kerja (Bagian) dan unit kerja lainnya (Direktorat, Balai); b Publikasi/updating/pembahasan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja melalui e-SAKIP Revisi dan website Ditjen Perkeretaapian (official), diantaranya laporan monitoring kinerja triwulan serta update rancangan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 – 2029; c Pada Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2025 telah tercantumdijelaskan seluruh informasi capaian kinerja mencakup tata cara perhitungan capaian kinerja, analisa keberhasilan/kegagalan, analisa penyesuaian kebijakan/strategi/kegiatan maupun anggaran, analisa hubungan kerja/crosscutting termasuk perbandingan di level nasional/internasional, perubahan budaya kinerja, analisa dukungan terhadap pencapaian target RP.IMN 2025-2029, serta penyelesaian keberadaan sumber data dukung capaian kinerja pada lampiran laporan; d Perencanaan kinerja unit kerja telah menjadi acuan dalam penyusunan PK berjenjang dan SKP masing-masing pegawai termasuk update/revisi dengan adanya penyesuaian struktur organisasi melalui aplikasi e-Kinerja yang selanjutnya disu dalam pelaporan kinerja pegawai setiap bulan; e Koordinasi internal yang efektif terlihat dari pembahasan yang mengikutsertakan seluruh unit kerja terkait (Direktorat, Balai dan Bagian) dalam pengukuran dan pelaporan kinerja serta evaluasi internal yang sinergis; f Pelaksanaan evaluasi dan penilaian SAKIP Tahun 2025, meliputi penilaian mandiri di tingkat unit kerja Setditjen yang dilanjutkan dengan evaluasi tingkat Eselon I serta Evaluasi Implementasi SAKIP Unit Eselon I Ditjen Perkeretaapian bersama Inspektorat Jenderal dengan hasil predikat 'A' dan nilai meningkat dari Tahun sebelumnya (83,72); g Konsolidasi hasil evaluasi SAKIP melalui rapat penyamaan persepsi penilaian unit kerja non-sampel, guna menyeragamkan pemahaman dan memastikan tindak lanjut hasil penilaian Inspektorat Jenderal secara terkoordinasi di seluruh unit kerja termasuk membahas terkait penyesuaian manual perhitungan beberapa indikator kinerja di beberapa Direktorat/Balai agar selaras dengan amanah RP.IMN Tahun 2025-2029.	a. Lanjutan finalisasi penilaian evaluasi SAKIP pada seluruh unit non-sampel di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyesuaikan hasil evaluasi dan rekomendasi dari Tim Evaluator Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan; b. Melaksanakan identifikasi dan penyusunan rencana tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun 2025, serta memindaklanjutinya melalui perbaikan penyelenggaraan SAKIP Tahun 2025–2026. Kegiatan ini juga mencakup penyusunan surat Direktur Jenderal Perkeretaapian terkait tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun 2025;	Seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	%	100,000	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian (Tingkat Pencapaian Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian)	83	400	100

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Bulan: November, Tahun: 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 11			Realisasi Bulan 11		Realisasi Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran	Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume		%	%			
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	Rasio	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretapian	-	-	0.46	-	745,457,341,750	14.1	0.46	408,943,517,065	100%	54.86%	Pada Tahun 2025 belum ditargetkan penambahan konektivitas dikarenakan belum terdapat rencana penambahan pembangunan/perpanjangan prasarana perkeretapian baru menghubungkan PKN/PKW/kawasan strategis nasional/simpul transportasi yang selesai dan beroperasi pada Tahun 2025. Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perkeretapian pada Tahun 2025 mayoritas berupa kegiatan lanjutan yang fokus pada pengembangan kapasitas/kehandalan prasarana perkeretapian eksisting. Hal tersebut didorong juga dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang membatasi ruang fiskal kegiatan pembangunan prasarana perkeretapian baru yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkeretapian. Di sisi lain, pembangunan prasarana perkeretapian baru oleh badan usaha/swasta masih minim dan beberapa masih dalam proses penjajakan investasi serta persiapan dokumen perencanaan teknis. Pada Triwulan III Tahun 2025, terdapat beberapa kegiatan pendukung konektivitas transportasi perkeretapian yang berprogres antara lain: a. Konektivitas PKW Lhokseumawe (Kecamatan Muara Satu) dengan kegiatan pendukung berupa pembangunan jalur kereta api lintas Krueng Geukeuh – Muara Satu telah selesai 100% berupa pembangunan jalur KA sepanjang 8 km'sp dengan lebar spoor 1.435 mm. Posisi Triwulan III Tahun 2025, bahwa telah dilakukan tindak lanjut terhadap hasil temuan pengujian dan berdasarkan Berita Acara (BA) pengujian lanjutan atas hasil tindak lanjut uji pertama fasilitas operasi berupa pintu perlintasan kereta api pada tanggal 19 September 2025 dinyatakan seluruh temuan sudah terselesaikan. b. Kegiatan lanjutan pembangunan jalur KA Rantauprapat – Pondok SS – Kotapinang masih dalam tahap persiapan penggoperasian KA perintis segmen Rantauprapat – Pondok SS (penyelesaian sertifikasi kelaikan prasarana, serta koordinasi kesiapan sarana), namun diperkirakan penggoperasianya baru bisa terlaksana pada Triwulan I Tahun 2026. Sedangkan untuk segmen lanjutan Pondok SS – Kota Pinang masihberprogres pengadaan lahan melalui anggaran LMAN (progress 93,30% yaitu 710 dari 762 bidang telah dibebaskan), dimana terdapat kendala habisnya masa berlaku penetapan lokasi dan tidak tersedia anggaran BOPP Tahun 2025. c. Kegiatan pembangunan MRT Jakarta East-West Phase I untuk mendukung konektivitas di wilayah perkotaan Jabodetabek, posisi saat ini konsultan tender assistance telah berkontrak pada 9 Juli 2025 dan selanjutnya dalam proses persiapan pelelangan konsultan supervisi dan paket konstruksi. Pengadaan lahan di wilayah DKI Jakarta dilaksanakan oleh Pemerintah DKI Jakarta dan saat ini masih berproses penetapan lokasi (ditargetkan November 2025). Untuk pengadaan lahan di luar wilayah DKI Jakarta (Bekasi) telah terbit penetapan lokasi dan proses pengadaan lahannya dilaksanakan oleh Ditjen Perkeretapian dengan pembiayaan LMAN namun masih menunggu pelaksanaan BOPP yang diusulkan di Tahun 2026 (BOPP Tahun 2025 terkendala efisiensi anggaran). Selain itu terdapat isu perubahan stasiun/trase dari Pemerintah Daerah yang terdampak kebutuhan reviu studi kelayakan dan trase (perlu pertimbangan lanjut terhadap potensi risiko). d. Penggotimalan konektivitas Pelabuhan Tanjung Emas untuk mendukung intramoda logistik, dimana terdapat kendala berupa banyaknya terjadi vandalisme sehingga diperlukan perbaikan infrastruktur. Untuk melaksanakan perbaikan tersebut, diperlukan penyelesaian skema sewa (s.d Rp0) untuk aset di Pelabuhan Tanjung Mas dengan koordinasi KSOP, Otoritas Pelabuhan dan Pelindo termasuk apabila diperlukan penyiapan MoU antar pihak terkait. Setelah penyelesaian skema sewa aset dan perbaikan infrastruktur, diperlukan beberapa tahapan guna penggotimalan konektivitas Pelabuhan Tanjung Emas antara lain tindak lanjut hasil uji pertama, safety assesment, uji rangkaian (in kelaikan prasarana serta in operasi sarana. e. Kegiatan lanjutan pembangunan prasarana perkeretapian untuk mendukung penggoperasian KA Makassar - Pare Pare antara Mandai Palanro yang bersumber dari pembiayaan SBSN dengan progres 96,36%, dimana masih terdapat 1 kegiatan yaitu pembangunan overpass Tonasa yang masih belum dapat dilanjutkan karena membutuhkan persetujuan lokasi dari Gubernur Sulawesi Selatan untuk tahapan lanjut penyiapan lahan dan konstruksi.	a. Penyelesaian/finalisasi dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretapian Tahun 2025-2029 khususnya substansi kegiatan pendukung konektivitas perkeretapian mengacu perkembangan ketiganan pada RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan b. Koordinasi persiapan pengoperasian hasil pembangunan konektivitas diantaranya usulan penetapan skema perintis Tahun 2026 (Rantauprapat Baru-Pondok SS, Binjai - Besitang dan perpanjangan perintis KA Aceh), pengajuan skema sewa aset dan perbaikan infrastruktur (konektivitas Pelabuhan Tanjung Emas) c. Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kegiatan pendukung konektivitas transportasi perkeretapian, diantaranya terkait penyelesaian pemenuhan lahan pendukung konektivitas melalui LMAN, koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait penetapan lokasi, serta monitoring tahapan pengadaan barang/jasa (MRT Jakarta East West Phase I). d. Penggotimalan sisa anggaran Tahun 2025 secara selektif untuk kegiatan pendukung, serta mempersiapkan dokumen pengusulan pada RKA Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026 berdasarkan skala prioritas RPJMN dan Rencana Strategis guna pemenuhan readiness criteria, penyelesaian pengadaan lahan, dan kegiatan-kegiatan pendukung konektivitas lainnya. e. Penggotimalan peran inspektur prasarana dan sarana perkeretapian untuk pelaksanaan pengawasan/inspeksi secara berkala dalam pembangunan prasarana perkeretapian mendukung konektivitas	Dit. Prasarana Perkeretapian, Dit. Lalu Lintas dan Angkutan KA, Dit Sarana Perkeretapian dan Balai Teknik di lingkungan Ditjen Perkeretapian
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretapian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Jaringan Jalur KA dan Jaringan Pelayanan Perkeretapian)	11	74	11.53	15.58	-	-	11.54	-	100.09%	-	Tercapainya 4 dokumen perencanaan teknis bidang jaringan jalur dan pelayanan perkeretapian	Upaya/rekomendasi peningkatan kinerja berupa Upaya Penyesuaian Strategi, sebagai berikut: a. Melakukan koordinasi interes dengan stakeholder meliputi pembahasan laporan dan pelaksanaan rapat koordinasi terkait dokumen perencanaan teknis bidang jaringan jalur kereta api dan jaringan perkeretapian; b. Melakukan koordinasi dengan Biro Hukum Kementerian Perhubungan terkait Surat Keputusan Tim Evaluasi Trase Jalur Kereta Api Tahun 2025.	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretapian (Persentase Penyelesaian Kerjasama Pengembangan Infrastruktur Perkeretapian)	12	92	12	13.04	-	-	12	-	100%	-	Telah terpenuhinya 3 dokumen kerja sama pengembangan infrastruktur perkeretapian	Upaya Penyesuaian Strategi/Kebijakan yaitu dengan melakukan koordinasi bersama stakeholder melalui pembahasan teknis dan hukum secara paralel untuk memastikan pencapaian target, dengan menyiapkan dukungan legal dan teknis seperti Surat Keterangan, Draft Perjanjian dan Reviu BPKP	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretapian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana)	62	742	63.57	8.57	-	-	62.86	-	98.88%	-	Pada Tahun 2025 sesuai dengan penetapan perjanjian kinerja direncanakan terdapat 5 DED yang akan diletakpan pada tahun 2025 dengan progress sampai dengan bulan November tahun 2025 Dokumen Teknis BED / DED. 1. BED St. Padalarang - Telah dilakukan pengesahan untuk BED Stasiun Padalarang pada 30 September 2025 yaitu 1 album gambar BED Beautifikasi St Padalarang yang terdiri dari tampak depan Stasiun, Parkir, dan Interior Stasiun 2. BED Beautifikasi St. Klaten Tahap II - Telah dilakukan pemeriksaan final terhadap gambar teknis BED Beautifikasi Stasiun Klaten Tahap II pada 14 Oktober 2025, seluruh aspek gambar teknis telah memenuhi persyaratan dan siap diajukan untuk tahap persetujuan akhir. - Konsultan telah melakukan perbaikan terakhir yang meliputi: - 1) Penambahan penjelasan pada perencanaan prespektif desain - 2) Penyesuaian hirarki penomoran, keterangan gambar dan tabel - 3) Penambahan penjelasan regulasi pada dasar teori dan penambahan dasar hukum - 4) Penyesuaian RAB dengan menambahkan PPN serta acuan harga dan AHS 3. DED Penanganan Daerah Rawan Jalur Kereta Api di KM.227+300/500, KM.228+100/300, KM.237+100/200, KM.240+600./900, KM.243+700 - KM.244+300 Lintas Bandung - Banjar - Telah dilakukan pemeriksaan final terhadap gambar teknis BED Beautifikasi Stasiun Klaten Tahap II pada 14 Oktober 2025, seluruh aspek gambar teknis telah memenuhi persyaratan dan siap diajukan untuk tahap persetujuan akhir. - Konsultan telah melakukan perbaikan terakhir yang meliputi: - 1) Penambahan penjelasan pada perencanaan prespektif desain - 2) Penyesuaian hirarki penomoran, keterangan gambar dan tabel - 3) Penambahan penjelasan regulasi pada dasar teori dan penambahan dasar hukum - 4) Penyesuaian RAB dengan menambahkan PPN serta acuan harga dan AHS 4. DED Balai Yasa KRL Cicalengka - Telah dilakukan pemeriksaan final terhadap gambar teknis BED Beautifikasi Stasiun Klaten Tahap II pada 14 Oktober 2025, seluruh aspek gambar teknis telah memenuhi persyaratan dan siap diajukan untuk tahap persetujuan akhir. - Konsultan telah melakukan perbaikan terakhir yang meliputi: - 1) Penambahan penjelasan pada perencanaan prespektif desain - 2) Penyesuaian hirarki penomoran, keterangan gambar dan tabel - 3) Penambahan penjelasan regulasi pada dasar teori dan penambahan dasar hukum - 4) Penyesuaian RAB dengan menambahkan PPN serta acuan harga dan AHS 5. DED Peningkatan Jembatan Kereta Api Antara Lubuk Alung - Kayu Tanam a. Telah dilaksanakan persetujuan/pengesahan dokumen DED Peningkatan Jembatan Kereta Api antara Lubuk Alung - Kayu Tanam pada bulan Juli 2025; b. Telah disampaikan Berkas Softfile DED Peningkatan Jembatan Kereta Api antara Lubuk Alung - Kayu Tanam kepada Kepala Balai Teknik Perkeretapian Kelas II Padang melalui Surat Plt. Direktur Prasarana Perkeretapian Nomor PR.005/21/K3/DJKA/2025 Tanggal 11 Agustus 2025 perihal Penyampaian Berkas Softfile DED dengan rincian sebagai berikut : 1. Buku 1 : Laporan Akhir; 2. Buku 2 : Ringkasan Eksekutif; 3. Buku 3 : Lpaoran Teknik Desain; 4. Buku 4 : Album Gambar Perencanaan; 5. Buku 5 : Spesifikasi Teknis dan RKS; 6. Buku 6 : BOQ, RAB dan AHS 7. Buku 7 : Laporan Survei Hidrologi dan Hidrolika; 8, Buku 8 : Laporan Survei Topografi; 9. Buku 9 : Album Gambar Topografi; 10. Buku 10 : Laporan Penyelidikan Tanah dan Laboratorium.		Dit Prasarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretapian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretapian)	7	792	66.67	8.42	-	-	7.14	-	10.71%	-	Pada Tahun 2025 tidak terdapat kegiatan dalam DIPA dan POK Tahun Anggaran 2025 yang mendukung Indikator kinerja kegiatan Presentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretapian, target dan capaian mengacu pada pengesahan 3 kebijakan yaitu : 1. Kebijakan fasilitas sarana KRL Lintas Yogyakarta-Solo (2020) 2. Kebijakan fasilitas Sarana Milik Negara di Sumatera Utara (2020) 3. Kebijakan DED (Detail Engineering Design) Balai Yasa Kereta Rel Listrik Yogyakarta- Solo (2022)	1) Penyesuaian Strategi/Kebijakan untuk meningkatkan IKK Presentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretapian perlu adanya penyesuaian strategi kedepannya yaitu Melakukan evaluasi dan pemantauan lanjutan atas tindak lanjut hasil rekomendasi kebijakan periode 2020 2023. Penyesuaian Aktivitas dan Anggaran Mengingat pada Tahun 2025 tidak terdapat kegiatan dalam DIPA dan POK Tahun Anggaran 2025 yang mendukung Indikator kinerja kegiatan Presentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretapian, sehingga dilakukan kegiatan yang bersifat rutin yaitu Melakukan koordinasi untuk memastikan rekomendasi kebijakan yang telah selesai dilakukan penyusunan untuk mendapatkan pengesahan. Penyesuaian Penempatan Jabatan/Pegawai Pada IKK Presentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretapian pada Direktorat Sarana Perkeretaapian dilakukan oleh jabatan fungsional analis kebijakan dan dikoordinasikan dengan PPK Satker Pengembangan dan Peningkatan Sarana Perkeretaapian.	Dit Sarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretapian (pengujian dan sertifikasi kelaikan sarana, prasarana dan kompetensi SDM, perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretapian milik negara, pembinaan dan pengaturan/pengendalian/pengawasan penyelenggaraan perkeretapian)	99	1200	100	8.33	2.489.836.929.250	14.1	99.127	408.943.517.065	99.13%	16.42%	Sampai dengan Nov 2025, terjadi 7 kejadian anjlokan yaitu: a. Anjlokan KA barang pada emplasemen Stasiun Ujan Mas Sumatera Selatan b. Anjlokan KA barang (Bara Simpang) pada emplasemen Stasiun Banjarsari c. Anjlokan KA Barang (Lunggadai) d. Anjlokan Kereta barang (Barapati) batu bara e. Anjlokan Kereta Penumpang (Argo Bromo Anggrek) pada Emplasement Stasiun Pegaden Baru f. Anjlokan kereta penumpang Commuter Line di emplasemen Stasiun Jakarta Kota g. Anjlokan Kereta penumpang Kuala Stabas Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan keselamatan perkeretaapian pada Triwulan III Tahun 2025 diantaranya: a. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi kelaikan prasana, sarana dan kompetensi SDM perkeretaapian dengan rincian: 1) Pengujian prasarana perkeretaapian sebanyak 168 unit dan 319,078 km dengan sertifikasi prasarana perkeretaapian sebanyak 12 sertifikat jalur dan bangunan serta 24 sertifikasi fasilitas operasi; 2) Pengujian sarana perkeretaapian sebanyak 10.776 unit serta sertifikasi sebanyak 7.232 sertifikat; 3) Pengujian SDM perkeretaapian sebanyak 6.735 orang dengan sertifikasi sebanyak 5.691 sertifikasi. b. Pengawasan kondisi prasarana dan sarana perkeretaapian diantaranya melalui inspeksi keselamatan oleh inspektur perkeretaapian termasuk pengawasan oleh Satuan Pelayanan masing-masing wilayah Balai Teknik Perkeretaapian. Selain itu, juga terdapat beberapa kendala/permasalahan yang perlu penyelesaian diantaranya: a. Pelaksanaan kegiatan perawatan prasarana (infrastructure maintenance/IM) Tahun 2025 belum terlaksana dan sebagian alokasi anggaran yaitu sebesar Rp1.392.084.389.000 terkait dengan reviu untuk pembayaran backlog IMO Tahun 2023 dan sisa alokasi pada masing masing Balai Teknik Perkeretaapian akan digunakan untuk kegiatan IM yang saat ini masih dalam tahap persiapan dokumen teknis (KAK dan RAB) dikarenakan terdapat penyesuaian terhadap skema pemilihan penyedia. Keterbatasan anggaran akibat efisiensi untuk penanganan daerah rawan kecelakaan dan bencana alam/longsoran/amblesan serta keterbatasan dukungan anggaran pengawasan terhadap kondisi dan perawatan prasarana/sarana perkeretaapian.	a. Pelaksanaan inspeksi/rampcheck kondisi prasarana dan sarana perkeretapian sebagai persiapan penyelenggaraan angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 termasuk upaya pencegahan terjadinya risiko jalur kereta api tidak sesuai spesifikasi teknis/rusak/el ausjustus dan kegagalan sistem persinyalan yang dapat berdampak pada kejadian kecelakaan kereta api. b. Monitoring dan evaluasi terhadap manajemen tanggap darurat serta tindak lanjut rekomendasi peningkatan keselamatan perkeretapian khususnya penanganan pasca kejadian kecelakaan kereta api sebagai acuan dalam tindakan preventif dan korektif periode berikutnya. c. Usulan perbaikan mekanisme pelaporan badan usaha dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi guna mempermudah pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian (prasarana, sarana, lalu lintas, angkutan, keselamatan, SDM, lainnya). d. Percepatan penyiapan dokumen teknis serta pelaksanaan kegiatan perawatan prasarana perkeretapian milik negara Tahun 2025 sesuai skema pemilihan penyedia berdasarkan ketentuan. e. Usulan revisi anggaran untuk pemanfaatan sisa kontrak/sisa anggaran yang potensi tidak terserap s.d akhir Tahun 2025 untuk pemenuhan pembayaran backlog IMO periode sebelumnya dan/atau penanganan rintang jalan/daerah rawan kecelakaan/bencana alam/longsoran/amblesan. f. Penyesuaian penugasan inspektur prasarana dan sarana perkeretapian serta anggota Satuan Pelayanan pada masing-masing wilayah Balai Teknik Perkeretaapian berdasarkan kompetensi dalam pelaksanaan pengawasan/inspeksi keselamatan perkeretapian	Dit. Keselamatan Perkeretaapian, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretapian, Balai Pengujian Perkeretapian dan Balai Teknik di lingkungan Ditjen Perkeretapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretapian (Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretapian)	50	567	47.67	8.41	-	-	50.39	-	105.71%	-	Pada Tahun 2025 sesuai dengan penetapan perjanjian kinerja direncanakan terdapat target Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretaapian sebesar 50,340 % yang akan diletakpkan pada tahun 2025 dengan realisasi bulan November sebesar 49,35% dengan target bulan Oktober sebesar 47,67% dengan progress sampai dengan bulan Desember tahun 2025 yaitu : 1. Subdit Kelaikan Jalur dan Bangunan KA - Telah terbit 41 Sertifikat dengan rincian sebagai berikut : a. Telah terbit 1 SK dengan 1 Sertifikat Uji Komponen Bantalan Beton Monoblok Untuk Jalur KA Ballasted Lebar Jalan Rel 1067 mm Produksi PT Wijaya Karya Beton, Tbk pada tanggal 21 Januari 2025 b. Telah terbit 1 SK dengan 4 Sertifikat Uji Pertama Prasarana Perkeretapian berupa Bangunan Stasiun Kereta Api(Kampung Juar dan Pauh Lima) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Kereta Api Padang - Bukit Putus - Pauh Lima Hasil Pekerjaan Balai Teknik Perkeretapian Kelas II Padang pada tanggal 20 februari 2025 c. Telah terbit 1 SK dengan 1 Sertifikat Uji Komponen Bantalan Beton (Jalur Kereta Api Ballasted) untuk Lebar Jalan Rel 1067 mm Beban Gandar 18 Ton Produksi PT Balton Kurnia Abadi Menggunakan Sistem Penambat Elastic Rail Clip Tipe Material 60S2MN Produksi PT Dibya Upaya Persada pada tanggal 14 februari 2025 d. Telah terbit 1 SK dengan 1 Sertifikat berdasarkan KP-DJKA 73 Tahun 2025 tanggal 13 Juni 2025 tentang Pengesahan dan Sertifikasi Uji Komponen Bantalan Beton Monoblok untuk Jalur Kereta Api Ballasted Lebar Jalan Rel 1435 mm Produksi PT Wijaya Karya Beton Tbk e. Telah terbit 1 SK dengan 1 Sertifikat berdasarkan KP-DJKA 86 Tahun 2025 tanggal 24 Juli 2025 tentang Pengesahan dan Sertifikasi Uji Pertama Prasarana Perkeretapian Khusus berupa Jalur Kereta Api Rel Lingkar (Rail Loop) pada Train Loading Station (TLS) 5 Hasil Pekerjaan PT Bukit Asam Tbk f. Telah terbit 1 SK dengan 2 Sertifikat berdasarkan KP-DJKA 94 Tahun 2025 tanggal 8 Agustus 2025 tentang Pekerjaan dan Sertifikasi Uji Pertama Prasarana Perkeretapian berupa Jalur Kereta Api (Jalan Rel Km. 171+800 s.d. 172+500 antara Stasiun Blambangan Umpu - Stasiun Giham dan Jembatan BH 309 Km. 172+147 Bentang Total 103 m terdiri dari Bentang 76,5 m Tipe Rangka Baja WTP) hasil Pekerjaan Balai Teknik Perkeretapian Kelas II Palembang g. Telah terbit 1 SK dengan 2 Sertifikat berdasarkan KP-DJKA 95 Tahun 2025 tanggal 8 Agustus 2025 tentang Pengesahan dan Sertifikasi Uji Pertama Prasarana Perkeretapian berupa Jalur Kereta Api (Jalan Rel Km. 164+000 s.d 165+110 antara Stasiun Blambangan Umpu - Stasiun Giham dan Jembatan BH 289 Km. 164+640, Bentang 42 m Tipe Rangka Baja WTP) Hasil Pekerjaan Balai Teknik Perkeretapian Kelas II Palembang h. Telah terbit 1 SK dengan 2 Sertifikat berdasarkan KP - DJKA 124 Tahun 2025 tanggal 29 Oktober 2025 hal Pengesahan dan Sertifikasi Uji Pertama Prasarana Perkeretapian berupa Stasiun Kereta Api (Emplasemen dan Peron Stasiun Tanah Abang) pada Peningkatan Stasiun Tanah Abang (Tahap I) Hasil Pekerjaan Balai Teknik Perkeretapian Kelas I Jakarta i. Telah terbit 1 SK dengan 1 Sertifikat berdasarkan KP - DJKA 127 Tahun 2025 tanggal 6 November 2025 hal Pengesahan dan Sertifikasi Uji Komponen Bantalan Beton Monoblok untuk Jalur Kereta Api Ballasted Lebar Jalan Rel 1067 mm Produksi PT Jaya Beton Indonesia j. Telah terbit 1 SK dengan 1 Sertifikat berdasarkan KP - DJKA 128 Tahun 2025 tanggal 6 November 2025 hal Pengesahan dan Sertifikasi Uji Berkala Prasarana Perkeretapian berupa Bangunan Depo Penggaguan Dua Light Rail Transit (LRT) Jakarta milik PT Jakarta Propertindo (Perseroda) k. Telah terbit 1 SK dengan 25 Sertifikat berdasarkan KP - DJKA 129 Tahun 2025 tanggal 6 November 2025 hal Pengesahan dan Sertifikasi Uji Berkala Prasarana Perkeretapian berupa Jalur Kereta Api pada Depo Penggaguan Dua Light Rail Transit (LRT) Jakarta milik PT Jakarta Propertindo (Perseroda) 2. Subdit Kelaikan Fasilitas Operasi KA - Telah terbit 43 Sertifikat dengan rincian sebagai berikut : a. 4 sertifikat Uji Pertama JPL Solo-Wonogiri nomor: KP-DJKA 6 Tahun 2025 Tanggal 9 Januari 2025 b. 7 Sertifikat Uji Pertama Radio Telekomunikasi JABODETABEK nomor : KP DJKA tanggal 9 Tahun 2025 tangggal 16 Januari 2025 c. 3 Sertifikasi Uji Berkala Listrik Aliran Bawah APMS Bandara Internasional Soekarno - Hatta : KP-DJKA 33 Tahun 2025 tanggal 6 Maret 2025 d. 2 Sertifikat Uji Pertama JPL 172a Dan JPL 173 antara Stasiun Haurpugur - Stasiun Cicalengka di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretapian Kelas I Bandung Nomor KP-DJKA 48 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 e. 8 Sertifikat Uji Berkala Gardu Traksi pada Lintas Solo - Yogyakarta di Wilayah Balai Teknik Perkeretapian Kelas I Semarang Nomor KP-DJKA 110 Tahun 2025 tanggal 29 September 2025 f. 12 Uji Berkala Peralatan Persinyalan dan Telekomunikasi di Solo Jebres - Kedung Banteng (30 September 2025) g. 1 Uji Pertama Fasilitas Operasi Kereta Api berupa peralatan LAA Stasiun Tanah Abang (7 Oktober 2025) h. 1 Uji Pertama Fasilitas Operasi Kereta Api berupa peralatan Persinyalan Tanah Abang (7 Oktober 2025) i. 1 Uji Pertama Gardu Traksi Tanjung Priok (7 November 2025) j. 4 Uji Pertama JPL Krueng Geukeuh - Muara Satu Medan (18 November 2025) - Telah dilakukan monitoring terhadap target sertifikasi kelaikan fasilitas operasi KA dengan hasil : a. telah dilakukan Pengujian Berkala LRT Jakpro area Depo b. telah dilakukan Pengujian Pertama JPL Elektrik Lintas Jakarta - Bogor dan Jakarta - Padalarang	Dit Prasarana Perkeretapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretapian (Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretapian)	55	279	51.92	18.61	-	-	55.5	-	106.9%	-	● Target jumlah sertifikasi kelaikan sarana perkeretapian Tahun 2025 yang telah diletakpan pada naskah Rencana Strategis sebanyak 8.000 sertifikat dari target kebutuhan sertifikat kelaikan sarana perkeretapian (13.030 sertifikat) dengan presentase sebesar 61,39%. Dengan rincian 4.000 sertifikat oleh Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I dan 4.000 sertifikat oleh Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II. ● Realisasi s.d Nov 2025, realisasi penerbitan sertifikat sebanyak 7.232 sertifikat (3.782 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I dan 3.450 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II).	● Mempercepat sertifikasi sarana, mempercepat progres pekerjaan rutin yang belum sesuai target. ● Meningkatkan Koordinasi dengan Operator Sarana Perkeretapian (KAI, Railink,dll) agar sarana yang diusulkan untuk dilakukan sertifikasi tersedia saat Tim Penguji datang ke lokasi, serta diharapkan dapat memaksimalkan pengujian sarana. ● Penyesuaian Strategi/Kebijakan o Menggunakan aplikasi SISAKA o Dilakukan koordinasi dengan pemohon/operator terkait kelengkapan data dukung proses sertifikasi seperti checksheet perawatan. Kemudian melakukan koordinasi dan monitoring secara berkala dengan melakukan sinkronisasi data sertifikasi (data pengujian sarana yang sudah diuji dan telah dan telah diupload aplikasi) dengan Balai Pengujian Perkeretapian serta o Melakukan koordinasi dengan Balai Pengujian Perkeretapian, Sesditjen dan pengembangan aplikasi terkait perbaikan aplikasi SISAKA dan SIAPKA milik Balai Pengujian Perkeretaapian. o Penyesuaian Aktivitas dan Anggaran Akan dilakukan perhitungan yang lebih matang dengan memperhitungkan rencana yang realistis dapat tercapai. ● Penempatan pegawai guna mendukung IKK Pemenuhan Sertifikat Kelaikan Sarana Perkeretaapian antara lain : o Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Madya; o Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Muda; o Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama.	Dit Sarana Perkeretapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretapian (Persentase Sarana Perkeretapian yang Telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck)	100	910	91	10	-	-	100	-	109.89%	-	● Terdapat 2 kegiatan yaitu pelaksanaan rampcheck angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru di bidang sarana serta rampcheck pemeriksaan kelaikan angkutan barang batubara. ● Berdasarkan hasil pelaksanaan rampcheck sarana angkutan lebaran Tahun 2025, sarana yang dilakukan rampcheck sebesar 2.462 unit. Selain itu, temuan yang didapat sebanyak 171 unit sarana dan telah ditindaklanjuti oleh pihak operator sehingga realisasi sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil rampcheck sebesar 100%. ● Pelaksanaan crosscutting yaitu o Melakukan kegiatan rampcheck bersama dengan BTP terhadap sarana yang berada di Depo yang terdapat di wilayah kerja BTP. o Operator Perkeretaapian yaitu PT.KAI, PT.KCI, MRT, LRT, Railink, wajib menindaklanjuti hasil rampcheck dengan perbaikan teknis dan pelaporan hasil koreksi.	● Penyesuaian Strategi/Kebijakan o Evaluasi terhadap hasil rampcheck yang sudah dilakukan untuk mempertahankan kinerja yang sudah baik. o Pengawasan dan monitoring terhadap kondisi sarana. ● Penyesuaian Penempatan Jabatan/Pegawai antara lain : o Inspektur Sarana Perkeretapian Ahli Madya; o Inspektur Sarana Perkeretapian Ahli Muda; o Inspektur Sarana Perkeretapian Ahli Pertama	Dit Sarana Perkeretapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 11				Realisasi Bulan 11		Realisasi Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian)	18	126	19.27	15.29	-	-	18.39	-	95.43%	-	sampai dengan bulan November 2025 telah diterbitkan sertifikasi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian sebanyak 6.621 sertifikat	Direktorat keselamatan akan berkoordinasi dengan operator perkeretaapian (PT. KAI Persero dan PT. KCIC) dan para stakeholder agar dapat segera mengajukan perpanjangan untuk sertifikat yang mendekati batas masa berlakunya (satu bulan sebelum berakhir masa berlaku sertifikat), serta melakukan percepatan proses penerbitan bagi sertifikat yang telah lulus proses verifikasi	Dit Keselamatan Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Hasil Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan)	16	102	15.27	14.97	-	-	16.66	-	109.1%	-	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian telah melaksanakan audit penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) tahap Awal pada Divisi LRT Jabodebek	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian akan melaksanakan audit penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) tahap Transisi pada Divisi LRT Jabodebek	Dit Keselamatan Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian)	18	106	18.038	17.02	-	-	18.549	-	102.83%	-	Telah dilakukan pengujian terhadap SDM perkeretaapian	memastikan kesiapan peralatan pengujian SDM sebelum pelaksanaan pengujian; melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya.; dan update Materi Uji Kompetensi untuk seluruh kompetensi.	Balai Pengujian Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian)	18	89	15.216	17.1	-	-	18.955	-	124.57%	-	Banyaknya permohonan sehingga agar dapat mencapai target yang ditetapkan telah dilakukan beberapa hal sebagai berikut : 1. ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai; dan 2. melakukan evaluasi secara berkala realisasi yang sarana perkeretaapian tahun 2025 terhadap rencana kerja dan target pengujian sarana perkeretaapian tahun 2025.	1. melakukan kalibrasi peralatan pengujian sarana perkeretaapian sebanyak 7 unit; dan 2. melakukan monitoring terhadap pengujian yang telah dilaksanakan pada triwulan IV bersama Direktorat Sarana Perkeretapian.	Balai Pengujian Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian)	16	104	16.84	16.19	-	-	16.517	-	98.08%	-	beberapa hal yang dilaksanakan guna mendukung pengujian prasarana : 1. ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai; 2. melakukan monitoring terhadap pemohon terkait kesiapan pelaksanaan pengujian (dokumen dan fisik); 3. melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun pada awal tahun; dan 4. perlu memastikan peralatan pengujian yang akan digunakan tersedia dan telah dilakukan kalibrasi agar pelaksanaan pengujian berjalan lancar	1. melakukan perawatan dan kalibrasi peralatan pengujian prasarana perkeretaapian; 2. melakukan monitoring terhadap rencana pengujian prasarana perkeretaapian pada triwulan IV agar mencapai target; 3. memaksimalkan anggaran yang tersedia agar target pengujian prasarana perkeretaapian tercapai; 4. menyusun rencana pengujian prasarana perkeretaapian yang akan dilaksanakan pada tahun 2026; dan 5. perlu adanya revisi perjanjian kinerja dan rencana aksi agar capaian tetap on the right track.	Balai Pengujian Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda kereta api dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian baik jalur kereta api dan fasilitas operasi dan lainnya)	3	36	3.74	10.39	820.644.693.917	14.1	3.772	520.271.446.722	100.86%	63.4%	a. Sampai dengan Nov 2025 telah diterbitkan 34 perizinan perpotongan dan/atau persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain dan 15 perizinan usaha/operasi. b. Pelayanan sertifikasi hingga triwulan III telah dilaksanakan oleh unit kerja melalui: 1) Pelayanan sertifikasi prasarana perkeretaapian sebanyak 36 sertifikat oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian terbit dari 12 penetapan sertifikat jalur dan bangunan serta 24 sertifikat fasilitas operasi. 2) Pelayanan sertifikasi sarana perkeretaapian sebanyak 7.232 sertifikat sarana oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian. 3) Pelayanan sertifikasi SDM Perkeretaapian sebanyak 5.691 sertifikat sarana oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian. c. Peningkatan pelayanan penumpang pada BPKAR Sumatera Selatan dan BPKA Sulawesi Selatan diantaranya: 1) Pelatihan bahasa Inggris di BPKAR Sumatera Selatan yang dilaksanakan pada 9 s.d. 11 Juli 2025. 2) Tindak lanjut terhadap aduan yang disampaikan pada beberapa kanal (chat centre, surel, SP4N, Media Sosial, Survei Kepuasan). 3) Penyesuaian harga pada momen-momen tertentu seperti HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. 4) Pemberlakukan Sistem Pemesanan Tiket Online Mulai H-7 sebelum keberangkatan pada BPKA Sulawesi Selatan; 5) Melakukan sosialisasi tiket infant pada sistem penjualan tiket KA Makassar-Parepare. d. Kehandalan SDM dalam memberikan layanan serta penemuhan kualitas dan tahapan pelayanan sesuai proses bisnis/SOP yang telah ditetapkan. e. Pelaksanaan sosialisasi layanan dan survei IKM kepada stakeholder, termasuk upaya penambahan jumlah responden dengan perluasan pelaksanaan survei melalui google form untuk mempermudah pengisian responden. f. Pemantauan sistem informasi diantaranya pada layanan pengujian, sertifikasi kelaikan sarana serta sertifikasi kompetensi SDM perkeretaapian, sehingga penyelesaian layanan dengan tepat waktu serta menjaga kualitas pelayanan sesuai dengan prosedur dan alur yang telah ditetapkan. Adapun beberapa upaya pengembangan sistem informasi yang sedang dilaksanakan antara lain: 1) Pengembangan fitur perizinan online pada Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian dengan progres pada Triwulan II Tahun 2025 sudah dilakukan pembahasan laporan antara. 2) Uji/coba penggunaan fitur perizinan crossing pada Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian dengan dilakukan sinkronisasi SSO. Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan dan pelaksanaan survei IKM diantaranya: a. Kendala pada saat pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat diantaranya kesulitan beberapa responden dalam mengakses link survei dikarenakan alat/media komunikasi responden yang kurang mendukung. b. Gangguan/error sistem informasi yang menyebabkan tertundanya persetujuan dan penerbitan sertifikat diantaranya sertifikat kelaikan sarana.	a. Lanjutan pengembangan sistem informasi (perizinan online, sistem persetujuan laporuji/sertifikasi, lainnya) untuk mengakomodir layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai regulator perkeretaapian yang terpadu dan terintegrasi melalui Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai superapps. b. Penyiapan laporan berkala/triwulan kepada PPTB Setjen Kementerian Perhubungan untuk mempermudah koordinasi pengelolaan survei kepuasan masyarakat. c. Memfasilitasi Layanan Pengaduan pelayanan angkutan penumpang pada BPKA Sulawesi melalui barcode yang ditempel pada area boarding dan sosial media.	Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian,Dit. Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA)	3	36	3.71	10.31	-	-	3.78	-	101.89%	-	Nilai kepuasan masyarakat pada pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA pada bulan November sangt baik dengan nilai indeks 3,78	Meningkatkan kualitas pelayanan	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian)	3	36	3.7	10.28	-	-	3.79	-	102.43%	-	● Pada pelaksanaan survei periode Januari s.d Nov 2025, Direktorat Sarana secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3,79 dalam skala 4 atau 16,59 dalam skala 17,50 dengan rincian nilai IKM: o. Januari 4 dari skala 4 dengan responden sebanyak 4 orang o Februari 4 dari skala 4 dengan responden sebanyak 5 orang o Maret 3,34 dari skala 4 dengan responden sebanyak 7 orang o April 4,00 dari skala 4 dengan responden sebanyak 6 orang o Mei 4,00 dari skala 4 dengan responden sebanyak 2 orang o Juni 3,62 dari skala 4 dengan responden sebanyak 8 orang o Juli 3,60 dari skala 4 dengan responden sebanyak 6 orang o Agustus 3,77 dari skala 4 dengan responden sebanyak 20 orang o September 3,83 dari skala 4 dengan responden sebanyak 7 orang ● Terdapat 8 unsur yang menjadi nilai agregat atau rata-rata IKM pada periode Januari s.d September 2025 dengan memperoleh kategori Sangat Baik, mencakup: o Unsur Informasi. o Unsur Persyaratan. o Unsur Prosedur/Alur. o Unsur Waktu Penyelesaian. o Unsur Tarif/Biaya. o Unsur Sarana Prasarana. o Unsur Respon. o Unsur Konsultasi dan Pengaduan.	● Melakukan sosialisasi berkelanjutan agar jumlah responden bertambah supaya hasil rata-rata capaiannya lebih representative. ● Menyediakan nomor help desk yang sigap dalam menjawab kebutuhan informasi pengguna layanan ● Menciptakan konten informasi pelayanan yang menarik di media sosial ● Semua jenis konsultasi dan pengaduan yang dilayani diluangkan kedalam sebuah daftar/matriks, sebagai prioritas perbaikan layanan dan peningkatan kualitas layanan ● Melakukan telaahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kepada pimpinan terkait konsultasi dan laporan pengaduan yang telah ditindaklanjuti. ● Memastikan pengumuman tentang informasi pelayanan mudah diakses oleh masyarakat ● Sinkronisasi persyaratan yang dimuat pada website atau pun media sosial lainnya dengan persyaratan yang ada di tempat layanan	Dit Sarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian)	3	36	3.89	10.81	-	-	3.89	-	100%	-	Sesuai dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 untuk indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yaitu sebesar 3,89, dari hasil pelaksaan survey kepuasan masyarakat dan pemantauan SKM periode Bulan November 2025 Direktorat Prasarana Perkeretaapian terdiri dari : 1. Januari : Nilai IKM sebesar 3,75 dari 5 responden pengguna jasa pelayanan 2. Februari : Nilai IKM sebesar 4 dari 4 responden pengguna jasa pelayanan 3. Maret : Nilai IKM sebesar 3,91 dari 6 responden pengguna jasa pelayanan 4. April : Nilai IKM sebesar 4 dari 4 responden pengguna jasa pelayanan 5. Mei : Nilai IKM sebesar 3,80 dari 3 responden pengguna jasa pelayanan 6. Juni : Nilai IKM sebesar 3,84 dari 5 responden pengguna jasa pelayanan 7. Juli : Nilai IKM sebesar 3,87 dari 10 responden pengguna jasa pelayanan 8. Agustus : Nilai IKM sebesar 3,97 dari 5 responden pengguna jasa pelayanan 9. September : Nilai IKM sebesar 3,73 dari 11 responden pengguna jasa pelayanan 10. Oktober : Nilai IKM sebesar 3,98 dari 15 responden pengguna jasa pelayanan 11. November : Nilai IKM sebesar 4,00 dari 11 responden pengguna jasa pelayanan Sehingga sampai dengan periode Bulan November tahun 2025 nilai rata rata IKM Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebesar 3,89 dari 79 responden dengan target Bulan November sebesar 3,87 sehingga capaian Bulan November sebesar 100,51% dibanding target bulanan dan 100% dibanding tahunan. Telah dilakukan pembahasan 3 indikator terendah IKM bersama dengan tim pengelola SKM unit kerja pada tanggal 13 oktober hasil akan dilakukan tindaklanjut: 1. Unsur Biaya : menginformasikan secara terbuka mengenai tarif/biaya terkait layanan diunit kerja (pembangunan prasarana perkeretaapian, ijin crossing dan sertifikasi prasarana perkeretaapian) kepada pengguna jasa layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Unsur respon/perilaku Petugas : mendorong partisipasi tim pelayanan informasi dalam melakukan pelayanan informasi yang lebih baik. Selain itu, Tim pelayanan informasi memberikan akan penjelasan lebih lanjut terkait aturan, prosedur dan alur dalam proses permohonan perijinan maupun sertifikasi di bidang prasarana perkeretaapian kepada pengguna jasa, sehingga tidak akan muncul kecurigaan tindak kecurangan. 3. Unsur Kecurangan: Meningkatkan transparasi dalam pelayanan informasi dan dalam memproses permohinan ini, yang dajukan oleh pengguna jasa bidang prasarana perkeretaapian. selain itu, tim pelayanan informasi akan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait aturan, prosedur dan alur dalam proses permohonan perijinan maupun sertifikasi di bidang prasarana perkeretaapian kepada pengguna jasa, sehingga tidak akan muncul kecurigaan tindak kecurangan pada terhadap unit kerja Dan atas hasil rapat tersebut telah disampaikan kepada Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan melalui surat Direktur Prasarana Perkeretaapian nomor UM.006/240/KSDJKA/2025 tanggal 14 Oktober 2025 Pada tanggal 31 Juli 2025 telah dilakukan sosialisasi internal pengunaan aplikasi izin perpotongan & persinggungan dalam acara penajaman aplikasi bidang prasarana perkeretaapian dan SOP pengesahan izin teknis pemanfaatan prasarana perkeretaapian Untuk aplikasi crossing saat ini telah selesai progres development, dan saat ini sedang proses pemindahan dari server lokal ke server production Untuk Aplikasi Sertifikasi Penggunaan aplikasi perizinan crossing dan sertifikasi Prasarana Perkeretaapian saat ini telah selesai dilakukan pengembangan integrasi SSO dan telah dapat dilaunching dan digunakan pada tahun 2025 (Inovasi kinerja)	Pelaksanaan Survey IKM Periode Desember 2025	Dit Prasarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktur Keselamatan Perkeretaapian)	3	36	3.86	10.72	-	-	3.43	-	88.86%	-	Sampai dengan bulan November 2025 telah terdapat 56 responden yang mengisi survey kepuasan masyarakat dengan nilai rata-rata 3,43	Direktorat Keselamatan akan berupaya meningkatkan pelayanan kepada stakeholder	Dit Keselamatan Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan)	3	36	3.86	10.72	-	-	3.84	-	99.48%	-	Pelayanan publik bidang perkeretaapian meliputi layanan Balai Pengujian Perkeretaapian sebagai Badan Layanan Umum dalam hal ini adalah Pengujian Sarana Perkeretaapian, Pengujian Prasarana Perkeretaapian dan Pengujian SDM Perkeretaapian. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan menggunakan aplikasi SKM dari PPTB secara rutin setiap selesai pelaksanaan pengujian. Jumlah responden selama triwulan III yaitu sebanyak 3.498 orang. Ketberhasilan dalam pencapaian kinerja didukung dengan pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM) kepada pengguna layanan pengujian perkeretaapian termasuk peningkatan layanan tim pengujian dengan berperan aktif dalam melakukan penyebaran kuesioner survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada penerima layanan untuk menambah responden, pemanfaatan dan pengembangan sistem informasi diantara terkait layanan pengujian perkeretaapian, ketepatan waktu penyelesaian layanan, kehandalan SDM dalam memberikan layanan termasuk menjaga kualitas pelayanan sesuai dengan prosedur dan alur yang telah ditetapkan.	1. melakukan dokumentasi pendampingan kepada responden pada saat pengisian link survei; 2. menyusun laporan triwulan IV yang dilaporkan kepada PPTB.	Balai Pengujian Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan)	3	36	3.58	9.94	-	-	3.58	-	100%	-	sesuai dengan target yang diinginkan	dilaksanakan rapat evaluasi	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan)	3	36	3.23	8.97	-	-	3.32	-	102.79%	-	Perolehan IKM bulan novemper sebesar 3,17 dengan rata IKM 3,32	Pelaksanaan survey IKM bulan Desember	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	96,100	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	97	1152	96.1	8.34	-	-	97.945	-	101.92%	-	Beberapa faktor tercapainya target kinerja s.d Nov Tahun 2025 diantaranya: a. Terpenuhinya target on time performance pada beberapa jenis pelayanan kereta api khususnya angkutan KA perkotaan seperti MRT Jakarta (99,98%), LRT Jakarta (99,98%), LRT Sumatera Selatan (99,82%), dan LRT Jabodebek (99,55%) b. Telah dilaksanakan evaluasi kinerja operasi pada jaringan jalur kereta api nasional pada kereta api ringan terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi, serta kereta api kecepatan tinggi Jakarta - Bandung pada tanggal 22 Agustus 2025 c. Koordinasi secara aktif dengan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Balai Teknik Perkeretaapian terhadap penyebab dan penanganan kejadian kelambatan perjalanan kereta api serta mengantisipasi potensi adanya rintang jalan. Sebagai contoh, pada masa angkutan Lebaran Idul Fitri dan masa libur Idul Adha Tahun 2025 telah dilaksanakan koordinasi teknis dengan stakeholders (PT. KAI, PT. MRT, PT. KCI, PT. KCIC) yang mencakup rencana operasi, kesiapan sarana, prasarana dan SDM termasuk identifikasi daerah rawan dan upaya preventif dan mitigasinya. d. Secara rutin melaksanakan evaluasi perjalanan kereta api sesuai GAPEKA yang berlaku sehingga penggunaan KA dapat sesuai jadwal dan keterlambatan dapat diminimalisir. Selain itu, dalam pencapaian kinerja On Time Performance (OTP) transportasi kereta api selama periode Triwulan III juga mengalami beberapa kendala/hambatan akibat berbagai kendala operasional yang terjadi di sejumlah wilayah operasi dengan beberapa peristiwa menonjol antara lain: a. Insiden anjloknya KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Purwakarta, Subang, pada Agustus 2025 yang menyebabkan gangguan signifikan pada jalur utama serta berdampak sistemik terhadap operasional perjalanan kereta jarak jauh b. Kejadian gangguan keamanan di perlintasan sebidang yang masih menjadi penyumbang terbesar terhadap keterlambatan perjalanan KA, terutama akibat tabrakan dengan kendaraan serta menimbulkan kerusakan sarana maupun prasarana serta memerlukan waktu penanganan yang cukup lama c. Gangguan teknis pada sarana perkeretaapian, seperti pemasalahan pada sistem kelistrikan dan pembangkit, juga turut memberikan keterlambatan dan perubahan jadwal operasi d. Kondisi cuaca ekstrem yang mengakibatkan genangan air pada beberapa titik jalur KA e. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan penyesuaian pola operasi juga turut memengaruhi ketepatan waktu perjalanan KA Secara keseluruhan, berbagai gangguan perjalanan KA tersebut menunjukkan bahwa capaian OTP masih dipengaruhi oleh kombinasi faktor eksternal dan internal termasuk aspek keselamatan dan keamanan, kesiapan sarana dan prasarana, serta kondisi cuaca. Oleh karena itu, diperlukan langkah perbaikan berkelanjutan untuk menjaga stabilitas ketepatan waktu perjalanan kereta api pada periode berikutnya diantaranya peningkatan pengamanan perlintasan sebidang, optimalisasi pemeliharaan sarana dan prasarana, serta penguatan sistem manajemen operasi.	a. Melakukan evaluasi pelaksanaan GAPEKA termasuk verifikasi dan validasi data capaian harian kinerja operasi pada jaringan jalur kereta api nasional sebagai acuan penetapan GAPEKA Tahun 2026 serta upaya peningkatan OTP perjalanan kereta api b. Melakukan inspeksi/pemantauan berkala terhadap perjalanan kereta api pada lokasi rawan bencana/banjir/longsoran/amblesan/lokasi laspat dan rawan gangguan keamanan di perlintasan sebidang serta memastikan peralatan penanganan kecelakaan/rintang jalan tersedia dan ditempatkan sesuai kebutuhan c. Lanjutan pembangunan jalur ganda kereta api (jalur ganda KA elevated Medan – Binjai, Solo-Semarang, lainnya) dan peningkatan jalur/jembatan/fasilitas operasi kereta api (Jember – Kalisat, Jabodetabek, lainnya) untuk meningkatkan kapasitas lintas dan kecepatan operasional serta memberikan redundancy pengaturan operasional kereta api agar tepat waktu d. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan pendukung yang telah direlaksasi dengan pemanfaatan sisa waktu hingga akhir tahun serta mengusulkan perpanjangan kontrak tahun jamak untuk kegiatan pembangunan jalur ganda/peningkatan jalur/jembatan/fasilitas operasi yang terkendala dan tidak dapat selesai pada akhir Tahun 2025 dilengkapi data dukung dan justifikasi yang memadai e. Penyesuaian penugasan inspektur prasarana dan sarana perkeretaapian serta anggota Satuan Pelayanan pada masing-masing wilayah Balai Teknik Perkeretaapian berdasarkan kompetensi dalam pelaksanaan pengawasan perjalanan kereta api	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	96,100	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Realisasi Perjalanan KA berdasarkan GAPEKA)	105	1140	95.42	8.37	-	-	105.55	-	110.62%	-	Realisasi perka bulan Nov 2025 sebesar 895.786 KA dari target tahunan 1.018.781 KA	Meningkatkan pemantauan terhadap perjalanan kereta api agar tepat waktu dan tidak terjadi pembatalan perjalanan KA	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	96,100	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II)	94	1140	95.02	8.34	-	-	84.64	-	99.6%	-	Target tahun 2025 sesuai dengan target PK tahun 2025 sebesar 95,02%, Progres sampai dengan bulan November tahun 2025 Telah dilakukan pengukuran jalur KA periode III tahun 2025 oleh PT.KAI (Persero) dan telah dilaksanakan Evaluasi pengukuran TQI periode III pada tanggal 5 s.d 7 November 2025 antara Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Balai Teknik Perkeretaapian, dan PT KAI dengan hasil : 1. Realisasi hasil TQI periode III Tahun 2025 Kategori I dan II sebesar 94,64% dengan panjang jalur 5.686,18 KM dari total panjang jalur keseluruhan 6.008,01 KM terdiri dari : a. Track Quality Index Kategori I (nyaman) dengan panjang 3.900,059 KM b. Track Quality Index Kategori II (aman) dengan panjang 1.786,116 KM 2. Realisasi hasil TQI periode II Tahun 2025 Kategori III dan IV sebesar 5,36% dengan panjang jalur 321,83 KM dari total panjang jalur keseluruhan 6.008,01 KM terdiri dari : c. Track Quality Index Kategori III (waspada) dengan panjang 277,190 KM d. Track Quality Index Kategori IV (bahaya) dengan panjang 44,640 KM 3. Dari hasil pengukuran periode I dan periode II terdapat Kenaikan kategori sebanyak berikut: Kategori I dan II periode II sepanjang 5.584,19 KM atau 93,71% dan pada periode III menjadi sepanjang 5.686,18 KM atau 94,64%. Kategori III dan IV periode II sepanjang 374,77 KM atau 6,29% dan pada periode III menurun menjadi sepanjang 321,83 KM atau 5,36%. Pada periode triwulan IV telah dilaksanakan pengukuran jalan Rel pada lintas utara Jawa pada 10 s.d 14 November, lintas selatan Jawa pada 17 s.d 22 November, serta lintas Daop 1 pada 25 s.d 28 November.	1. Akan dilakukan pengukuran dengan kereta ukur pada wilayah Sumatera; 2. Akan dilakukan evaluasi hasil pengukuran TQI TW IV pada 2026.	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA dan Balai Teknik Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	96,100	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Fasilitas Operasi/ Kereta Api dengan Teknologi Handal)	64	756	63.92	8.46	-	-	64.43	-	100.8%	-	Pada Tahun 2025 sesuai dengan penetapan perjanjian kinerja direncanakan terdapat target peningkatan sistem persinyalan yang termasuk dalam kategori Fasilitas Operasi dengan teknologi Handal sebesar 65,27 yang akan ditetapkan pada tahun 2025 dengan progres sampai dengan bulan September Tahun 2025: 1.Melaksanakan Kegiatan Evaluasi Pengoperasian dan Perawatan Sistem Centralized Traffic Control (CTC) danSistem Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) pada tanggal 19 s.d. 21 November 2025 di Yogyakarta Hasil dan Rekomendasi a. Agar Satuan Pelayan BTP Semarang dapat menindaklakan temuan/ gangguan sehingga dapat dimasukkan dalam rencana perawatan IMO b. Agar Satuan Pelayan BTP Semarang melaksanakan pengawasan rutin pada area yang telah ditentukan c. Agar DAOP dan kantor pusat PT KAI Menyusun RKA dan mengsinkronisasikan dengan temuan yang dimonitoring oleh Satpel 2. Melaksanakan Kegiatan Evaluasi Pengoperasian dan Perawatan Sistem Centralized Traffic Control (CTC) pada tanggal 27 s.d. 28 November 2025 di Bandung, Jawa Barat Hasil dan Rekomendasi: a. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) meminta penambahan dukungan CTS agar kondisi peralatan dan pergerakan KA dapat termonitor; b. Upgrade perangkat voice recorder dimasukkan dalam daftar Top 10 Prioritas pemeliharaan; c. Hasil kegiatan ini agar diteruskan ke Daop 2 Bandung. Kendala: PT KAI belum menyampaikan dokumen kajian kelaikan teknis penggunaan bangunan e-house yang disusun oleh lembaga independen	Kegiatan Commissioning Test Switch Over 3 Stasiun Rangkasbitung pada tanggal 4 s.d. 5 Desember 2025 di Rangkasbitung, Banten	Dit Prasarana Perkeretaapian dan Balai Teknik Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN KERETA API	%	19,000	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	14	118	17.905	15.17	-	-	14.337	-	80.07%	-	Angkutan Penumpang a. Realisasi angkutan penumpang setiap bulan mengalami penurunan pada periode Triwulan III dengan rincian: 1) Realisasi angkutan penumpang KRL Jabodetabek pada bulan Juli sebanyak 35.775.810 penumpang turun sebanyak 2.972.963 penumpang (-8,31%) pada bulan berikutnya dan turun sebanyak 3.194.619 penumpang (-8,93) pada bulan September 2025 turun rata-rata penurunan pada Triwulan III sebesar -8,62% dari jumlah penumpang di bulan Juli 2025; 2) Realisasi angkutan penumpang MRT Jakarta pada bulan Juli sebanyak 4.419.821 penumpang turun sebanyak 418.180 penumpang (-9,46%) pada bulan berikutnya dan turun sebanyak 503.841 penumpang (-10,43) pada bulan September 2025 atau rata rata penurunan pada Triwulan III sebesar -8,62% dari jumlah penumpang di bulan Juli 2025 3) Realisasi angkutan penumpang LRT Jabodebek pada bulan Juli sebanyak 2.732.235 penumpang turun sebanyak 184.263 penumpang (-4,17%) pada bulan berikutnya dan turun sebanyak 282.931 penumpang (-6,40) pada bulan September 2025 atau rata rata penurunan pada Triwulan III sebesar -5,29% dari jumlah penumpang di bulan Juli 2025; 4) Realisasi kereta api komersial pada bulan Juli sebanyak 4.126.713 penumpang turun sebanyak 787.688 penumpang (-19,09%) pada bulan berikutnya dan turun sebanyak 861.596 penumpang (-20,88) pada bulan September 2025 atau rata-rata penurunan pada Triwulan III sebesar -19,98% dari jumlah penumpang di bulan Juli 2025. Penurunan jumlah penumpang pada bulan Agustus dan September 2025 dikarenakan pada periode tersebut mobilitas masyarakat berkurang seiring berakhirnya masa libur dan kembalinya aktivitas rutin masyarakat termasuk preferensi masyarakat yang sebagian lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi daring dengan pertimbangan waktu dan fleksibilitas. b. Layanan Public Service Obligation (PSO) dan angkutan perintis belum sepenuhnya optimal mendorong peningkatan ridership moda kereta api. Selain itu, khusus layanan perintis di wilayah Sumatera masih terdapat kendala terkait ketersediaan sarana cadangan sehingga apabila terj

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 11				Realisasi Bulan 11		Realisasi Bulan 11		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	%	100,000	Program Dukungan Manajemen (Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian, Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian, Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian, Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian & Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian)	64	379	42.82	11.3	636.748.241.250	14.1	64.57	365.085.588.143	150.79%	57.34%	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan merupakan bagian strategi memperkuat prinsip-prinsip good governance di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efisien, dan profesional melalui pembenahan menyeluruh terhadap sistem manajemen kinerja, pengelolaan anggaran, pelayanan publik, serta kompetensi dan integritas aparatur sipil negara. Pada Triwulan III Tahun 2025, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menunjukkan capaian yang sangat positif dalam pelaksanaan program peningkatan tata kelola pemerintahan. Terlepas dari belum dilaksuknanya pengukuran terhadap Indeks Profesional ASN, pencapaian signifikan pada realisasi PNBP serta nilai AKIP telah mampu mendorong capaian IKP di atas target triwulan. Hal ini mengindikasikan juga bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian berada pada jalur yang tepat dalam memperkuat tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional, serta perlu mempertahankan capaian dengan optimalisasi dua komponen lainnya (Nilai Kinerja Anggaran dan Indeks Profesional ASN) pada periode berikutnya. Pemutakhiran data, peningkatan kualitas pencanaan dan pelaksanaan kinerja dan anggaran, serta penguatan kompetensi ASN terus menjadi fokus prioritas untuk mematikan pencapaian target tahunan secara menyeluruh. Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja diantaranya: a. Penyelenggaraan SAKIP 1) Perencanaan dan penetapan target kinerja termasuk revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah disusun dengan memperhatikan realisasi kinerja Tahun 2024, arah kebijakan 2025-2029, analisa mendalam diantaranya ketersediaan sumber daya (anggaran, SDM) termasuk telah dilakukan sinkronisasi target kinerja sub unit kerja (Bagian) dan unit kerja lainnya (Direktorat, Balai); 2) Publikasi/updating/pembahanuan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja melalui e-SAKIP Reviu dan website Ditjen Perkeretaapian (official), diantaranya Laporan Monitoring Kinerja Triwulan serta update rancangan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 – 2029; 3) Pada Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2025, telah tercantum seluruh informasi capaian kinerja mencakup tata cara perhitungan capaian kinerja, analisa keberhasilan/kegagalan, analisa penyesuaian kebijakan/strategi/kegiatan maupun anggaran, analisa hubungan kerja/crosscutting termasuk perbandingan di level nasional/internasional, perubahan budaya kinerja, analisa dukungan terhadap pencapaian target RPJMN 2025-2029, serta penjelasan sumber data dukung capaian kinerja pada lampiran laporan; 4) Perencanaan kinerja unit kerja telah menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Berjenjang dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) masing-masing pegawai melalui aplikasi e-Kinerja yang selanjutnya diacu dalam pelaporan kinerja pegawai setiap bulan serta dilakukan update/revisi dengan adanya penyesuaian struktur organisasi; 5) Koordinasi internal berkala yang mengikutsertakan seluruh unit kerja terkait (Direktorat, Balai dan Bagian) dalam pengukuran dan pelaporan kinerja serta evaluasi internal yang efektif dan sinergis; 6) Pelaksanaan evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2025 secara berjenjang, meliputi penilaian mandiri pada masing-masing unit kerja (Setditjen, Direktorat, Balai) yang dilanjutkan dengan evaluasi tingkat Eselon I serta evaluasi tingkat Kementerian Perhubungan oleh Inspektorat Jenderal. Untuk hasil evaluasi oleh Inspektorat Jenderal telah disampaikan melalui surat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan nomor PS.3025/4/ITJEN/2025 tanggal 20 Agustus 2025 dengan nilai 83,72 (predikat A) dimana terdapat peningkatan dari Tahun sebelumnya. 7) Konsolidasi evaluasi lanjutan implementasi SAKIP khususnya untuk unit kerja non-sampel melalui rapat penyamaan persepsi penilaian guna menyeragamkan pemahaman dan mematikan tindak lanjut hasil penilaian Inspektorat Jenderal telah dikoordinasikan kepada seluruh unit kerja; 8) Pembahasan terkait penyesuaian manual dan cascading beberapa indikator kinerja kegiatan pada beberapa unit kerja Direktorat/Balai dengan memperhatikan kesetaraan dengan amanah RPJMN Tahun 2025–2029 serta meninddaklanjuti hasil evaluasi/audit kinerja dari Inspektorat Jenderal. b. Perencanaan dan pelaksanaan anggaran: 1) Pelaksanaan relaksasi/buka blokir anggaran sebesar Rp165,30 miliar untuk mendukung kegiatan prioritas keselamatan dan Rp48,71 miliar untuk pemenuhan belanja pegawai sebagai bentuk upaya menjaga kesinambungan program strategis keselamatan dan pelayanan penyelenggaraan perkeretaapian serta dukungan manajemen; 2) Pelaksanaan tagging/penandaan pada Rincian Output (RO) Tahun 2025 yang termasuk dalam kategori SBKU sebagaimana diatur pada PMK Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2025. Sebagai tindak lanjut hal tersebut, telah dilakukan tagging terhadap 52 RO yang tersebar di seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; 3) Efektivitas dan ketepatan pelaksanaan anggaran melalui penyusunan dan revisi DIPA, penyesuaian RPD, dan pelaporan output rutin/berkala dan tepat waktu; 4) Kemampuan adaptasi terhadap efisiensi fiskal menunjukkan bahwa organisasi fleksibel dan tetap menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai ketentuan. c. Optimalisasi PNBP 1) Secara bertahap telah dilakukan perbaikan tata kelola pelaksanaan PNBP TAC dan hal tersebut dapat dilihat dengan perolehan realisasi PNBP yang signifikan dari pembayaran TAC periode Tahun 2024 serta pembayaran TAC Tahun 2025 sebanyak 2 Badan Usaha (PT Railink dan PT KCI). Adapun terhadap pembayaran TAC Tahun 2025 dari PT. KAI saat ini masih menunggu penyelesaian pencairan dana dari kegiatan IMO; 2) Perolehan realisasi PNBP dari pembayaran sewa atas pemanfaatan aset/BMN termasuk adanya persetujuan dari instansi Kementerian Keuangan dalam pemanfaatan aset/BMN turut mempengaruhi realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025. d. Faktor manajerial SDM: 1) Pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan mengikuti pendidikan/pelatihan/workshop berkoordinasi dengan BPSDMP, Setjen Kemenhub (Biro SDMO), serta lembaga pelaksana pendidikan/pelatihan lainnya baik teknis perkeretaapian maupun manajerial; 2) Himbauan kepada seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk dapat melakukan pengawasan dan pembinaan disiplin pegawai di masing-masing unit kerja melalui surat Sesditjen Perkeretaapian nomor KP.405/1/12/K1/DJKA/2025 tanggal 29 Juli 2025 perihal Peningkatan Kinerja dan Disiplin; 3) Himbauan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan penyelesaian disparitas data ASN di masing-masing unit kerja guna peningkatan kualitas layanan manajemen ASN melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian nomor KP.001/1/13/K1/DJKA/2025 tanggal 13 Agustus 2025 perihal Penyelesaian Disparitas Data ASN; 4) Himbauan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan pemutakhiran data pegawai secara berkala pada aplikasi SIK Kemenhub melalui surat Sesditjen Perkeretaapian nomor KP.001/1/3/SK/2025 tanggal 29 Agustus 2025 perihal Pemutakhiran Data Pegawai pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) Kementerian Perhubungan; 5) Penyampaian hasil monitoring penilaian indeks profesional ASN kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara berkala. e. Faktor tata laksana termasuk pemanfaatan teknologi informasi: 1) Ketepatan dan ketertiban pelaporan melalui aplikasi seperti e-SAKIP Reviu, SAKTI, e-Monitoring, e-Performance, e-Kinerja, Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan lainnya menunjukkan bahwa sistem pelaporan yang terintegrasi dan disiplin administratif turut mempengaruhi pencapaian kinerja pada beberapa komponen penilaian; 2) Saat ini dalam proses pengembangan portal layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai superapps untuk mendukung integrasi data dan transformasi digital beberapa layanan strategis bidang perkeretaapian; 3) Kapasitas SDM dalam pengelolaan aplikasi/sistem informasi dimana minimnya pemahaman atau keterlambatan input oleh admin berdampak pada rendahnya nilai kinerja ASN dan pelayanan kesangan, sehingga dibutuhkan pendampingan/pelatihan berkala.	Evaluasi lanjutan implementasi SAKIP khususnya untuk unit kerja non-sampel melalui rapat penyamaan persepsi penilaian guna menyeragamkan pemahaman dan mematikan tindak lanjut hasil penilaian Inspektorat Jenderal telah dikoordinasikan kepada seluruh unit kerja; 8) Pembahasan terkait penyesuaian manual dan cascading beberapa indikator kinerja kegiatan pada beberapa unit kerja Direktorat/Balai dengan memperhatikan kesetaraan dengan amanah RPJMN Tahun 2025–2029 serta meninddaklanjuti hasil evaluasi/audit kinerja dari Inspektorat Jenderal. b. Perencanaan dan pelaksanaan anggaran: 1) Pelaksanaan relaksasi/buka blokir anggaran sebesar Rp165,30 miliar untuk mendukung kegiatan prioritas keselamatan dan Rp48,71 miliar untuk pemenuhan belanja pegawai sebagai bentuk upaya menjaga kesinambungan program strategis keselamatan dan pelayanan penyelenggaraan perkeretaapian serta dukungan manajemen; 2) Pelaksanaan tagging/penandaan pada Rincian Output (RO) Tahun 2025 yang termasuk dalam kategori SBKU sebagaimana diatur pada PMK Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2025. Sebagai tindak lanjut hal tersebut, telah dilakukan tagging terhadap 52 RO yang tersebar di seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; 3) Efektivitas dan ketepatan pelaksanaan anggaran melalui penyusunan dan revisi DIPA, penyesuaian RPD, dan pelaporan output rutin/berkala dan tepat waktu; 4) Kemampuan adaptasi terhadap efisiensi fiskal menunjukkan bahwa organisasi fleksibel dan tetap menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai ketentuan. c. Optimalisasi PNBP 1) Secara bertahap telah dilakukan perbaikan tata kelola pelaksanaan PNBP TAC dan hal tersebut dapat dilihat dengan perolehan realisasi PNBP yang signifikan dari pembayaran TAC periode Tahun 2024 serta pembayaran TAC Tahun 2025 sebanyak 2 Badan Usaha (PT Railink dan PT KCI). Adapun terhadap pembayaran TAC Tahun 2025 dari PT. KAI saat ini masih menunggu penyelesaian pencairan dana dari kegiatan IMO; 2) Perolehan realisasi PNBP dari pembayaran sewa atas pemanfaatan aset/BMN termasuk adanya persetujuan dari instansi Kementerian Keuangan dalam pemanfaatan aset/BMN turut mempengaruhi realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025. d. Faktor manajerial SDM: 1) Pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan mengikuti pendidikan/pelatihan/workshop berkoordinasi dengan BPSDMP, Setjen Kemenhub (Biro SDMO), serta lembaga pelaksana pendidikan/pelatihan lainnya baik teknis perkeretaapian maupun manajerial; 2) Himbauan kepada seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk dapat melakukan pengawasan dan pembinaan disiplin pegawai di masing-masing unit kerja melalui surat Sesditjen Perkeretaapian nomor KP.405/1/12/K1/DJKA/2025 tanggal 29 Juli 2025 perihal Peningkatan Kinerja dan Disiplin; 3) Himbauan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan penyelesaian disparitas data ASN di masing-masing unit kerja guna peningkatan kualitas layanan manajemen ASN melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian nomor KP.001/1/13/K1/DJKA/2025 tanggal 13 Agustus 2025 perihal Penyelesaian Disparitas Data ASN; 4) Himbauan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan pemutakhiran data pegawai secara berkala pada aplikasi SIK Kemenhub melalui surat Sesditjen Perkeretaapian nomor KP.001/1/3/SK/2025 tanggal 29 Agustus 2025 perihal Pemutakhiran Data Pegawai pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) Kementerian Perhubungan; 5) Penyampaian hasil monitoring penilaian indeks profesional ASN kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara berkala. e. Faktor tata laksana termasuk pemanfaatan teknologi informasi: 1) Ketepatan dan ketertiban pelaporan melalui aplikasi seperti e-SAKIP Reviu, SAKTI, e-Monitoring, e-Performance, e-Kinerja, Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan lainnya menunjukkan bahwa sistem pelaporan yang terintegrasi dan disiplin administratif turut mempengaruhi pencapaian kinerja pada beberapa komponen penilaian; 2) Saat ini dalam proses pengembangan portal layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai superapps untuk mendukung integrasi data dan transformasi digital beberapa layanan strategis bidang perkeretaapian; 3) Kapasitas SDM dalam pengelolaan aplikasi/sistem informasi dimana minimnya pemahaman atau keterlambatan input oleh admin berdampak pada rendahnya nilai kinerja ASN dan pelayanan kesangan, sehingga dibutuhkan pendampingan/pelatihan berkala.	a. Finalisasi penilaian terkait evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2025 untuk unit kerja non sample di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta menyampaikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 kepada Inspektorat Jenderal; b. Pelaksanaan forum pembahasan untuk finalisasi Rencana Strategis Ditjen Perkeretaapian Tahun 2025-2029 termasuk sinkronisasi RPJMN Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis tingkat Kementerian Perhubungan serta seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; c. Penyusunan revisi Perjanjian Kinerja 2025 sesuai hasil monitoring dan evaluasi berkala untuk mematikan capaian kinerja dapat memenuhi kategori on the right track (capaian 90-110%). d. Percepatan penyerapan anggaran Tahun 2025 serta pemantauan pelaksanaan anggaran unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, termasuk dukungan terkait evaluasi anggaran apabila diperlukan untuk pemenuhan backlog/selisih anggaran penyelenggaraan IMO periode sebelumnya; e. Pelaksanaan tagging/penandaan Rincian Output SBKU/SBKK pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026 sebagaimana diatur pada PMK Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2025; f. Koordinasi dengan KPKNL untuk percepatan persetujuan pemanfaatan aset/BMN guna mendukung perolehan PNBP. Direktorat Jenderal Perkeretaapian g. Lanjutan pembinaan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk peningkatan kompetensi dan pengelolaan jenjang karir /jabatan fungsional tertentu mencakup sosialisasi/bimbingan teknis/pendidikan/pelatihan/uji kompetensi terkait kepegawaian, manajerial dan teknis bidang perkeretaapian h. Pembahasan usulan penyelarasan dan penyedethanaan jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta koordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Kementerian Perhubungan.	
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	%	100,000	Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislasi (Jumlah Rancangan Dan Peraturan Perundangan) Di Bidang Perkeretaapian)	8	110	15	13.64	-	-	8	-	53.33%	-	a.Setditjen telah berkoordinasi dengan unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian dalam kegiatan penyusunan dan/atau revisi terkait peraturan/regulasi guna pelaksanaan yang lebih efektif dan efisien. Koordinasi/pembahasan dilaksanakan secara berjenjang dengan seluruh pihak terkait (Direktorat Teknis, Badan Usaha, Biro Hukum, Kementerian Hukum, Sekretariat Negara, dan lainnya) termasuk dalam pelaksanaan Harmonisasi dengan peraturan perundangan lainnya b.Pada Triwulan III 2025 juga telah dilakukan beberapa kegiatan pendukung antara lain penyusunan rekomendasi kebijakan dalam bidang perencanaan (finalisasi rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, penyusunan revisi PM 112 Tahun 2017, dan lainnya), serta dukungan penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah terkait Kereta Api Cepat yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. c.Dalam proses penyusunan dan penerbitan regulasi, terdapat kendala/hambatan diantaranya substansi teknis pada rancangan regulasi belum siap dan masih membutuhkan pembahasan lanjutan, kebutuhan keterlibatan Kementerian/Lembaga lain, kendala sinkronisasi jadwal pembahasan, serta adanya efisiensi anggaran yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pendukung. Hal ini juga disebabkan oleh faktor eksternal dengan banyaknya regulasi yang sedang menunggu pengesahan. d.Rancangan peraturan/legislasi bidang perkeretaapian yang masih berproses periode Triwulan III Tahun 2025 diantaranya: 1) Rancangan Permenhub Tentang Standar, Tata Cara Pengujian & Sertifikasi Kelaikan KA Otomatis dengan Pengarah; 2) Revisi PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan; 3) Revisi PM 121 Tahun 2017 Tentang Lalu Lintas Kereta Api; 4) Revisi PM 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KA Cepat terkait Safety Protection Zone; 5) Revisi PM 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api; 6) Revisi PM 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase; 7) Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Tata Cara, Standar Peralatan dan SDM Petugas Penanganan Kecelakaan Kereta Api; 8) Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Tata Cara, Standar Peralatan dan SDM Petugas Pemeriksa dan Analisis Kecelakaan Kereta Api; 9) Revisi PM 14 Tahun 2011 tentang Tata cara dan Standar Pengujian Lokomotif; 10) Revisi PM 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan KA; 11) Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Pengendali Distribusi Listrik.	a. Penyesuaian strategi/kebijakan 1)Koordinasi intensif dengan Sekjend Kemenhub untuk percepatan pengundangan peraturan yang sudah dilakukan harmonisasi (Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Pengendali Distribusi Listrik), percepatan pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan perundangan dengan Kementerian Hukum (Revisi PM 14 Tahun 2011 tentang Tata cara dan Standar Pengujian Lokomotif, Revisi PM 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan KA) serta mematau progres revisi peraturan perundangan lainnya (revisi PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di lingkungan Kementerian Perhubungan); 2)Berpartisipasi aktif dalam koordinasi dengan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan stakeholders lainnya terkait pembahasan rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden terkait kereta api cepat; 3) Penyelesaian/finalisasi dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029 baik secara substansi maupun dalam proses pengesahan/penetapan. b. Penyesuaian aktivitas dan anggaran: Penyusunan jadwal/ timeline pembahasan terhadap seluruh agenda penyusunan rancangan peraturan/ legislasi sebagai tools monitoring penyelesaian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan. c. Penyesuaian organisasi/ penempatan pegawai/ jabatan: Koordinasi dengan Sekjend Kemenhub terkait pembinaan dan dukungan penempatan pegawai jabatan fungsional tertentu khususnya bidang hukum seperti analis hukum, analis perancang peraturan perundang-undangan, dan lainnya.	Setditjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Nilai	100,000	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian (Indeks Profesional ASN)	86	89	-	-	-	-	86.09	-	-	-	Hasil penilaian berdasarkan sistem SiASN BKN sebesar 86,09	● Penyesuaian strategi/kebijakan: o Lanjutan pembinaan ASN di lingkungan Ditjen Perkeretaapian termasuk peningkatan kompetensi dan pengelolaan jenjang karir jabatan fungsional tertentu mencakup sosialisasi/ bimbingan teknis/ pendidikan/ pelatihan/ uji kompetensi terkait kepegawaian, manajerial dan teknis bidang perkeretaapian; o Monitoring kelengkapan data dan pelaporan setiap ASN secara berkala melalui aplikasi SIK dan e-Kinerja Kementerian Perhubungan termasuk mengirimkan surat teguran kepada pegawai yang nilai kinerja masih rendah dan/ atau belum melakukan pengisian data pendidikan/ pelatihan/ kompetensi. ● Penyesuaian aktivitas dan anggaran: Pengoptimalan sisa anggaran Tahun 2025 secara selektif untuk kegiatan pendukung pembinaan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dianteranya kegiatan sidak penerapan aturan kepegawaian secara langsung/on site di lokasi kantor Balai. ● Penyesuaian organisasi/penempatan pegawai/jabatan: Pembahasan usulan penyelarasan dan penyedethanaan jabatan fungsional di lingkungan Ditjen Perkeretaapian serta koordinasi dengan Biro SDMO serta Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Kementerian Perhubungan	Setditjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Nilai	100,000	Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal (Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian)	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1. Sampai dengan bulan Nov 2025, belum terdapat realisasi Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik dikarenakan masih menunggu informasi lanjut terkait penggunaan indikator untuk evaluasi kinerja digital instansi pemerintah dari Sekjend Kemenhub. Adapun hasil penilaian ditargetkan dapat terpenuhi pada Triwulan IV Tahun 2025. 2. Beberapa kegiatan pendukung diantaranya: a. Pembahasan progres kegiatan TIK Tahun 2025 di lingkungan Ditjen Perkeretaapian yang dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Teknis, Bagian dan Balai dengan beberapa topik pembahasan yaitu: 1). Pembahasan laporan pendahuluan dan progres pengembangan Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian. 2). Pembahasan laporan antara pengembangan Modul Layanan Perizinan Penyelenggaraan Perkeretaapian, 3). Pembahasan laporan kemajuan pengembangan Portal Layanan Ditjen Perkeretaapian sebagai Superapps. b. Penyesuaian tampilan landing page dan optimalisasi single sign on (SSO) HUBNET Kemenhub pada Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian sesuai standar tingkat Kemenhub. c. Koordinasi dengan Pusdatin Kementerian Perhubungan terkait finalisasi struktur penyederhanaan aplikasi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian dengan menyesuaikan struktur Portal Layanan dan Data mengacu KM 8 Tahun 2024 tentang Peta Proses, Peta Subproses, dan Peta Relasi di lingkungan Kemenhub. d. Koordinasi dengan Pusdatin Kemenhub terkait pendaftaran Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian sebagai sistem elektronik lingkup publik di lingkungan Kemenhub dalam rangka dukungan terhadap kebijakan pengelolaan aplikasi dan sistem informasi serta penyederhanaan aplikasi di lingkungan Pemerintah. Koordinasi kebutuhan integrasi data teknis terkait pemenuhan pelaporan badan usaha bidang perkeretaapian agar terintegrasi pada Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian guna mempermudah pengawasan sebagai regulator dan mendukung terciptanya Satu Data Transportasi Perkeretaapian. e. Koordinasi dengan Pusdatin Kemenhub terkait hasil forensik digital/kemaanan modul layanan serta hasil forensik digital/kemaanan sertifikasi SDM perkeretaapian pada Portal Layanan dan Data Perkeretaapian. f. Koordinasi pengelolaan domain dan penggunaan server di lingkungan Ditjen Perkeretaapian. g. Penyiapan data dukung usulan kegiatan TIK Tahun 2026 di lingkungan Ditjen Perkeretaapian guna proses reviu tingkat II oleh Pusdatin Kementerian Perhubungan dan tahapan clearance oleh Tim SPBE Nasional.	1. Penyesuaian strategi/kebijakan: a. Penyelesaian pengembangan Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian sebagai superapps Ditjen Perkeretaapian yang terintegrasi dengan penambahan fitur/modul layanan sesuai prioritas termasuk pengembangan modul layanan perizinan penyelenggaraan perkeretaapian. b. Pemenuhan data dukung pengukuran Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik di lingkungan Ditjen Perkeretaapian dengan fokus utama aspek layanan publik sektoral. c. Peningkatan/penerapan standar keamanan informasi sesuai kebijakan di lingkungan Kemenhub termasuk update sistem/framework dan koordinasi dengan Pusdatin Kemenhub untuk pelaksanaan penetration testing/vulnerability assessment secara berkala guna mencegah serangan cyber/hacker. 2. Penyesuaian aktivitas dan anggaran: Pembahasan/finalisasi lingkup usulan kegiatan TIK Tahun 2026 dan usulan reviu tingkat II kepada Pusdatin Kementerian Perhubungan sesuai dengan arsitektur dan peta rencana pemerintah digital Kemenhub serta kebijakan penyederhanaan aplikasi guna tahapan clearance oleh Tim SPBE Nasional. 3. Penyesuaian organisasi/penempatan pegawai/jabatan: Usulan pengoptimalan/ penyelarasan/ penambahan pegawai jabatan fungsional pranata komputer dan statistisi pada unit kerja Setditjen Perkeretaapian guna mendukung pengelolaan data dan teknologi informasi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.	Setditjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Nilai	100,000	Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian (Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian)	96	90	-	-	-	-	96.6	-	-	-	Nilai keterbukaan informasi publik Ditjen Perkeretapian sebesar 96,6 yang dilaksanakan Penilaian Oleh Komisi Informasi Pusat (KIP)		Setditjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	%	100,000	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian (Tingkat Pencapaian Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian)	83	400	100	25	-	-	83.72	-	83.72%	-	1) Perencanaan dan penetapan target kinerja termasuk pada dokumen revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah disusun dengan memperhatikan realisasi kinerja Tahun 2024, arah kebijakan 2025-2029, analisa mendalam diantaranya ketersediaan sumber daya (anggaran, SDM) termasuk telah dilakukan sinkronisasi target kinerja sub unit kerja (Bagian) dan unit kerja lainnya (Direktorat, Balai); 2) Publikasi/updating/pembahanuan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja melalui e-SAKIP Reviu dan website Ditjen Perkeretaapian (official), diantaranya laporan monitoring kinerja triwulan serta update rancangan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 – 2029; 3) Pada Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2025 telah tercantum/dijelaskan seluruh informasi capaian kinerja mencakup tata cara perhitungan capaian kinerja, analisa keberhasilan/kegagalan, analisa penyesuaian kebijakan/strategi/kegiatan maupun anggaran, analisa hubungan kerja/crosscutting termasuk perbandingan di level nasional/internasional, perubahan budaya kinerja, analisa dukungan terhadap pencapaian target RPJMN 2025-2029, serta penjelasan keberadaan sumber data dukung capaian kinerja pada lampiran laporan; 4) Perencanaan kinerja unit kerja telah menjadi acuan dalam penyusunan PK berjenjang dan SKP masing-masing pegawai termasuk update/revisi dengan adanya penyesuaian struktur organisasi melalui aplikasi e-Kinerja yang selanjutnya diacu dalam pelaporan kinerja pegawai setiap bulan; 5) Koordinasi internal yang efektif terlihat dari pembahasan yang mengikutsertakan seluruh unit kerja terkait (Direktorat, Balai dan Bagian) dalam pengukuran dan pelaporan kinerja serta evaluasi internal yang sinergis; 6) Pelaksanaan evaluasi dan penilaian SAKIP Tahun 2025, meliputi penilaian mandiri di tingkat unit kerja Setditjen yang dilanjutkan dengan evaluasi tingkat Eselon I serta Evaluasi Implementasi SAKIP Unit Eselon I Ditjen Perkeretaapian bersama Inspektorat Jenderal dengan hasil predikat "A" dan nilai meningkat dari Tahun sebelumnya (83,72); 7) Konsolidasi hasil evaluasi SAKIP melalui rapat penyamaan persepsi penilaian unit kerja non-sampel, guna menyeragamkan pemahaman dan mematikan tindak lanjut hasil penilaian Inspektorat Jenderal secara terkoordinasi di seluruh unit kerja termasuk membahas terkait penyesuaian manual perhitungan beberapa indikator kinerja di beberapa Direktorat/Balai agar selaras dengan amanah RPJMN Tahun 2025–2029.	a. Lanjutan finalisasi penilaian evaluasi SAKIP pada seluruh unit non-sampel di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyesuaikan hasil evaluasi dan rekomendasi dari Tim Evaluator Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan; b. Melaksanakan identifikasi dan penyusunan rencana tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun 2025, serta meninddaklanjutinya melalui perbaikan penyelenggaraan SAKIP Tahun 2025–2026. Kegiatan ini juga mencakup penyusunan surat Direktur Jenderal Perkeretaapian terkait tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun 2025;	Seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	%	100,000	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian (Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen Perkeretaapian)	160	785	90	11.46	-	-	160.294	-	178.1%	-	Realisasi PNBP s.d Nov 2025 sebesar Rp. 1.997.791.885.590 atau capaian sebesar 160,294% dari target PNBP tahun 2025 sebesar Rp. 1.246.326.325.000	Revisi target	Setditjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	%	100,000	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian (Tingkat Pencapaian Nilai Kin

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Bulan: Desember, Tahun: 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12				Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	Rasio	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretapian	-	-	0.46	-	813.226.191.000	15.38	-	799.291.548.422	-	98.29%	Realisasi kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretapian Tahun 2025 sebesar 0,486 maka capaian kinerja mencapai 105,74%. Pada Tahun 2025 belum ditargetkan penambahan konektivitas dikarenakan belum terdapat rencana penambahan pembangunan/perpanjangan prasarana perkeretapian baru menghubungkan PKN/PKW/kawasan strategis nasional/simpul transportasi yang selesai dan beroperasi pada Tahun 2025. Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perkeretapian pada Tahun 2025 mayoritas berupa kegiatan lanjutan yang fokus pada pengembangan kapasitas/kehandalan prasarana perkeretapian eksisting. Hal tersebut didorong juga dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang membatasi ruang fiskal kegiatan pembangunan prasarana perkeretapian baru yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkeretapian. Di sisi lain, pembangunan prasarana perkeretapian baru oleh badan usaha/swasta masih minim dan beberapa masih dalam proses penjajakan investasi serta persiapan dokumen perencanaan teknis. Pada Triwulan III Tahun 2025, terdapat beberapa kegiatan pendukung konektivitas transportasi perkeretapian yang beprogres antara lain: a. Konektivitas PKW Lhokseumawe (Kecamatan Muara Satu) dengan kegiatan pendukung berupa pembangunan jalur kereta api lintas Krueng Geukeuh – Muara Satu telah selesai 100% berupa pembangunan jalur KA sepanjang 8 km'sp dengan lebar spoor 1.435 mm. Posisi Triwulan III Tahun 2025, bahwa telah dilakukan tindak lanjut terhadap hasil temuan pengujian dan berdasarkan Berita Acara (BA) pengujian lanjutan atas hasil tindak lanjut uji pertama fasilitas operasi berupa pintu perlintasan kereta api pada tanggal 19 September 2025 dinyatakan seluruh temuan sudah terselesaikan. b. Kegiatan lanjutan pembangunan jalur KA Rantauprapat – Pondok SS – Kotapinang masih dalam tahap persiapan pengoperasian KA perintis segmen Rantauprapat – Pondok SS (penyelesaian sertifikasi kelaikan prasarana, serta koordinasi kesiapan sarana), namun diperkirakan pengoperasiannya baru bisa terlaksana pada Triwulan I Tahun 2026. Sedangkan untuk segmen lanjutan Pondok SS – Kota Pinang masihberproges pengadaan lahan melalui anggaran LMAN (progress 93,30% yaitu 710 dari 762 bidang telah dibebaskan), dimana terdapat kendala habisnya masa berlaku penetapan lokasi dan tidak tersedia anggaran BOPP Tahun 2025. c. Kegiatan pembangunan MRT Jakarta East-West Phase I untuk mendukung konektivitas di wilayah perkotaan Jabodetabek, posisi saat ini konsultan tender assistance telah berkontrak pada 9 Juli 2025 dan selanjutnya dalam proses persiapan pelelangan konsultan supervisi dan paket konstruksi. Pengadaan lahan di wilayah DKI Jakarta dilaksanakan oleh Pemerintah DKI Jakarta dan saat ini masih berproses penetapan lokasi (dilargetkan November 2025). Untuk pengadaan lahan di luar wilayah DKI Jakarta (Bekasi) telah terbit penetapan lokasi dan proses pengadaan lahannya dilaksanakan oleh Ditjen Perkeretapian dengan pembiayaan LMAN namun masih menunggu pelaksanaan BOPP yang diusulkan di Tahun 2026 (BOPP Tahun 2025 terkendala efisiensi anggaran). Selain itu terdapat isu perubahan fasum/fasos dari Pemerintah Daerah yang berdampak kebutuhan revisi studi kelayakan dan trase (perlu pertimbangan lanjut terhadap potensi risiko). d. Pengoptimalan konektivitas Pelabuhan Tanjung Emas untuk mendukung intramoda logistik, dimana terdapat kendala berupa banyaknya terjadi vandalisme sehingga diperlukan perbaikan infrastruktur. Untuk melaksanakan perbaikan tersebut, diperlukan penyelesaian skema sewa (s.d Rp5) untuk aset di Pelabuhan Tanjung Mas dengan koordinasi KSOP, Otoritas Pelabuhan dan Pelindo termasuk apabila diperlukan penyiapan MoU antar pihak terkait. Setelah penyelesaian skema sewa aset dan perbaikan infrastruktur, diperlukan beberapa tahapan guna pengoptimalan konektivitas Pelabuhan Tanjung Emas antara lain tindak lanjut hasil uji pertama, safety assesment, uji rangkaian dan ijin kelaikan prasarana serta ijin operasi sarana. e. Kegiatan lanjutan pembangunan prasarana perkeretapian untuk mendukung penggoperasian KA Makassar - Pare Pare antara Mandai Palanro yang bersumber dari pembayaran SBSN dengan progres 96,36%, dimana masih terdapat 1 kegiatan yaitu pembangunan overpass Tonasa yang masih belum dapat dilanjutkan karena membutuhkan penetapan lokasi dari Gubernur Sulawesi Selatan untuk tahapan lanjut penyiapan lahan dan konstruksi.	a. Penyelesaian/finalisasi dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 khususnya substansi kegiatan pendukung konektivitas perkeretapian mengacu perkembangan kebijakan pada RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan b. Koordinasi persiapan penggoperasian hasil pembangunan konektivitas dantaranya usulan penetapan skema perintis Tahun 2026 (Rantauprapat Baru-Pondok SS, Binjai - Bestang dan perpanjangan perintis KA Aceh), pengajuan skema sewa aset dan perbaikan infrastruktur (konektivitas Pelabuhan Tanjung Emas) c. Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kegiatan pendukung konektivitas transportasi perkeretapian, diantaranya terkait penyelesaian pemenuhan lahan pendukung konektivitas melalui LMAN; koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait penetapan lokasi, serta monitoring tahapan pengadaan barang/jasa (MRT Jakarta East West Phase I). d. Pengoptimalan sisa anggaran Tahun 2025 secara selektif untuk kegiatan pendukung, serta mempersiapkan dokumen pengusulan pada RKA Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026 berdasarkan skala prioritas RPJMN dan Rencana Strategis guna pemenuhan readiness criteria, penyelesaian pengadaan lahan, dan kegiatan-kegiatan pendukung konektivitas lainnya. e. Pengoptimalan peran inspektur prasarana dan sarana perkeretapian untuk pelaksanaan pengawasan/inspeksi secara berkala dalam pembangunan prasarana perkeretapian	Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Lalu Lintas dan Angkutan KA, Dit Sarana Perkeretapian dan Balai Teknik di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretapian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Jaringan Jalur KA dan Jaringan Pelayanan Perkeretapian)	23	74	23	31.08	-	-	23	-	100%	-	Capaian kinerja pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 23,00% dengan persentase capaian kinerja triwulan dan tahunan sebesar 100%. Terpenuhinya 6 Dokumen yang telah ditetapkan, dengan rincian : 1. Dokumen Penetapan Trase MRT Jakarta Fase 2B (Kota-Ancol); 2. Dokumen Hasil Evaluasi atas Permohonan Penyesuaian Alinyemen Trase MRT East West Line Phase 1 Stage 1; 3. Dokumen Hasil Evaluasi Perubahan Nama Stasiun sesuai dengan Surat Direktur LLAKA Nomor KA.107/1/1/K2/DJKA/2025 perihal Perubahan Nama Stasiun Paloh menjadi Stasiun Muara Satu; 4. Dokumen Pra Studi Kelayakan dalam Rangka Dukungan Penyediaan Angkutan KA di Wilayah KIPP Ibu Kota Negara; 5. Dokumen Hasil Rekomendasi Tata Ruang Wilayah Kawasan Strategis Nasional (KSN) Selat Sunda, Kabupaten Tabalong, Kota Bekasi dan Kawasan Hulu Lindung Bukit Batabuh; 6. Penyampaian Konsep Policy Brief Studi Kelayakan Jalur Kereta Api Akses Menuju Pelabuhan Makassar New Port (MNP) dan Menuju Bandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin melalui Nota Dinas Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Nomor 0525/K2/XII/2025 ke Direktur Jenderal Perkeretaapian tanggal 31 Desember 2025.	Persiapan kegiatan 2026	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretapian (Persentase Penyelesaian Kerjasama Pengembangan Infrastruktur Perkeretapian)	20	92	20	21.74	-	-	20	-	100%	-	Capaian kinerja pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 20,00% dengan persentase capaian kinerja triwulan dan kinerja tahunan 100,00%. Terpenuhinya 5 dokumen Kerjasama pengembangan infrastruktur perkeretaapian, yaitu 1. Dokumen Draft Perjanjian Konsesi atas Permohonan Pembangunan Stasiun Bekasi Ekstensi di TOD HUB Summarecon Bekasi; 2. Dokumen Draft Addendum Perjanjian Konsesi atas Penyelenggaraan Prasarana Perkeretapian Umum berupa Stasiun Tenjo Baru; 3. Dokumen Draft Perjanjian Konsesi atas Penyelenggaraan Prasarana Perkeretapian Umum berupa Stasiun Lumpang; 4. Dokumen Amandemen ke-6 Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Umum Makassar-Parepare dengan Skema KPBU; 5. Dokumen Hasil Evaluasi Kereta Api Feeder LRT Harjamukti-Mekarsari	Persiapan pelaksanaan kegiatan tahun 2026	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretapian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana)	24	742	64.54	8.7	-	-	24.14	-	37.4%	-	Target Revisi PK ke-III 2025 Indikator Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Prasarana Perkeretapian sebesar 24,14% dengan target penambahan sebanyak 2 Dokumen. Sampai dengan bulan desember 2025 telah tercapai 24,14% dengan capaian sebesar 100% dengan realisasi pengesahan sebanyak 2 dokumen yaitu : 1. DED Balai Yasa KRL Cicalengka a. Telah ditandatangani gambar teknis Gedung Balai Yasa (Album Struktur dan Album Arsitektur) oleh Kepala Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I: b. Telah ditandatangani gambar teknis Gedung Depo (Album Struktur dan Album Arsitektur) oleh Koordinator/ketua Tim Kelompok Jembatan dan Bangunan Kereta Api Wilayah I; c. Album MEP Gedung Balai Yasa dan Depo saat ini akan dijadwalkan kembali proses asistensi. 2. Telah dilakukan pengesahan Gambar Teknis Perencanaan Prasarana MRT Jakarta Jalur Utara Selatan Fase 2A (Bundaran HI - Kota)	1. akan berkoordinasi dengan Biro Hukum untuk dilakukan pembahasan bendapat hukum terhadap draft kontrak RDC pada bulan januari 2026 antara Direktorat Prasarana Perkeretapian dengan Biro Hukum 2. Akan dilakukan penyusunan PK 2026	Dit Prasarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	%	0,460	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretapian (Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretapian)	77	792	66.67	8.42	-	-	77.78	-	116.66%	-	Tidak terdapat kegiatan DED dalam DIPA dan POK Tahun Anggaran 2025 terkait Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretapian sehingga capaian berdasarkan pengesahan spektek, rancang bangun dan rekayasa. Realisasi kinerja Tahun 2025 antara lain : DED : 0 dokumen Spesifikasi teknis : 11 dokumen Rancang Bangun : 16 dokumen Rekayasa : 8 dokumen Sehingga terdapat 35 perencanaan teknis di bidang sarana perkeretapian pada Tahun 2025	Rencana penyusunan kegiatan pada tahun 2026	Dit Sarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretapian (pengujian dan sertifikasi kelaikan sarana, prasarana dan kompetensi SDM, perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretapian milik negara, pembinaan dan pengaturan/pengendalian/pengawasan penyelenggaraan perkeretapian)	98	1200	100	8.33	2.716.185.741.000	15.38	98.985	3.195.725.652.055	98.99%	117.65%	Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terjadi 10 kejadian anjlokan yaitu: a. Anjlokan KA barang pada emplasemen Stasiun Ujan Mas Sumatera Selatan b. Anjlokan KA barang (Bara Simpang) pada emplasemen Stasiun Banjarsari c. Anjlokan KA Barang (Linggapati) d. Anjlokan Kereta barang (Barapati) batu bara e. Anjlokan Kereta Penumpang (Argo Bromo Anggrek) pada Emplasemen Stasiun Pegaden Baru f. Anjlokan Kereta penumpang Commuter Line di emplasemen Stasiun Jakarta Kota g. Anjlokan Kereta penumpang Kuala Stabas Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan keselamatan perkeretapian pada Triwulan III Tahun 2025 diantaranya: a. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi kelaikan prasarana, sarana dan kompetensi SDM perkeretapian dengan rincian: 1) Pengujian prasarana perkeretapian sebanyak 168 unit dan 319,078 km dengan sertifikasi prasarana perkeretapian sebanyak 12 sertifikat jalur dan bangunan serta 24 sertifikasi fasilitas operasi; 2) Pengujian sarana perkeretapian sebanyak 10.776 unit serta sertifikasi sebanyak 7.232 sertifikat; 3) Pengujian SDM perkeretapian sebanyak 6.735 orang dengan sertifikasi sebanyak 5.691 sertifikasi. b. Pengawasan kondisi prasarana dan sarana perkeretapian diantaranya melalui inspeksi keselamatan oleh inspektur perkeretapian termasuk pengawasan oleh Satuan Pelayanan masing-masing wilayah Balai Teknik Perkeretaapian. Selain itu, juga terdapat beberapa kendala/permasalahan yang perlu penyelesaian diantaranya: a. Pelaksanaan kegiatan perawatan prasarana (infrastructure maintenance/IM) Tahun 2025 belum terlaksana dan sebagian alokasi anggaran yaitu sebesar Rp1.392.084.389.000 akan dilakukan revisi untuk pembayaran backlog IMO Tahun 2023 dan sisa alokasi pada masing masing Balai Teknik Perkeretapian akan digunakan untuk kegiatan IM yang saat ini masih dalam tahap persiapan dokumen teknis (KAK dan RAB) dikarenakan terdapat penyesuaian terhadap skema pemilihan penyedia. Keterbatasan anggaran akibat efisiensi untuk penanganan daerah rawan kecelakaan dan bencana alam/longsoran/ambles an serta keterbatasan dukungan anggaran pengawasan terhadap kondisi dan perawatan prasarana/sarana perkeretaapian.	Dit. Keselamatan Perkeretaapian, Dit. Prasarana Perkeretaapian, Dit. Sarana Perkeretaapian, Balai Pengujian Perkeretaapian dan Balai Teknik di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretapian (Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Prasarana Perkeretapian)	50	567	50.34	8.88	-	-	50.85	-	101.01%	-	1. Subdit Kelaikan Jalur dan Bangunan KA -Telah terbit 43 Sertifikat dengan rincian sebagai berikut : a. Telah terbit 1 SK dengan 1 Sertifikat Uji Komponen Bantalan Beton Monoblok Untuk Jalur KA Ballasted Lebar Jalan Rel 1067 mm Produksi PT Wijaya Karya Beton, Tbk pada tangga 21 Januari 2025 b. Telah terbit 1 SK dengan 4 Sertifikat Uji Pertama Prasarana Perkeretapian berupa Bangunan Stasiun Kereta Api(K-)tenpung Juar dan Pauh Lima) pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Kereta Api Padang - Bukit Putus - Pauh Lima Hasil Pekerjaan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang pada tanggal 20 februari 2025 c. Telah terbit 1 SK dengan 1 Sertifikat Uji Komponen Bantalan Beton (Jalur Kereta Api Ballasted) untuk Lebar Jalan Rel 1067 mm Beban Gandar 18 Ton Produksi PT Balton Kurnia Abadi Menggunakan Sistem Penambat Elastic Rail Clip Tipe Material 60S2SiMN Produksi PT Dibya Upaya Persada pada tanggal 14 februari 2025 d. Telah terbit 1 SK dengan 1 Sertifikat berdasarkan KP-DJKA 73 Tahun 2025 tanggal 13 Juni 2025 tentang Pengesahan dan Sertifikasi Uji Komponen Bantalan Beton Monoblok untuk Jalur Kereta Api Ballasted Lebar Jalan Rel 1435 mm Produksi PT Wijaya Karya Beton Tbk e. Telah terbit 1 SK dengan 1 Sertifikat berdasarkan KP-DJKA 86 Tahun 2025 tanggal 24 Juli 2025 tentang Pengesahan dan Sertifikasi Uji Pertama Prasarana Perkeretapian Khusus berupa Jalur Kereta Api Rel Lingkar (Rail Loop) pada Train Loading Station (TLS) 5 Hasil Pekerjaan PT Bukit Asam Tbk f. Telah terbit 1 SK dengan 2 Sertifikat berdasarkan KP-DJKA 94 Tahun 2025 tanggal 8 Agustus 2025 tentang Pengesahan dan Sertifikasi Uji Pertama Prasarana Perkeretapian berupa Jalur Kereta Api (Jalan Rel Km. 171+800 s.d. 172+500 antara Stasiun Blambangan Umpu - Stasiun Giham dan Jembatan BH 309 Km. 172+147 Bentang Total 103 m terdiri dari Bentang 76,5 m Tipe Rangka Baja WTP) hasil Pekerjaan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang g. Telah terbit 1 SK dengan 2 Sertifikat berdasarkan KP-DJKA 95 Tahun 2025 tanggal 8 Agustus 2025 tentang Pengesahan dan Sertifikasi Uji Pertama Prasarana Perkeretapian berupa Jalur Kereta Api (Jalan Rel Km. 164+000 s.d 165+110 antara Stasiun Blambangan Umpu - Stasiun Giham dan Jembatan BH 289 Km. 164+640, Bentang 42 m Tipe Rangka Baja WTT) Hasil Pekerjaan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang h. Telah terbit 1 SK dengan 2 Sertifikat berdasarkan KP - DJKA 124 Tahun 2025 tanggal 29 Oktober 2025 hal Pengesahan dan Sertifikasi Uji Pertama Prasarana Perkeretapian berupa Stasiun Kereta Api (Emplasemen dan Peron Stasiun Tanah Abang) pada Peningkatan Stasiun Tanah Abang (Tahap I) Hasil Pekerjaan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta i. Telah terbit 1 SK dengan 1 Sertifikat berdasarkan KP - DJKA 127 Tahun 2025 tanggal 6 November 2025 hal Pengesahan dan Sertifikasi Uji Komponen Bantalan Beton Monoblok untuk Jalur Kereta Api Ballasted Lebar Jalan Rel 1067 mm Produksi PT Jaya Beton Indonesia j. Telah terbit 1 SK dengan 1 Sertifikat berdasarkan KP - DJKA 128 Tahun 2025 tanggal 6 November 2025 hal Pengesahan dan Sertifikasi Uji Berkala Prasarana Perkeretapian berupa Bangunan Depo Pegangsaan Dua Light Rail Transit (LRT) Jakarta milik PT Jakarta Propertindo (Perseroda) k. Telah terbit 1 SK dengan 25 Sertifikat berdasarkan KP - DJKA 129 Tahun 2025 tanggal 6 November 2025 hal Pengesahan dan Sertifikasi Uji Berkala Prasarana Perkeretapian berupa Jalur Kereta Api pada Depo Pegangsaan Dua Light Rail Transit (LRT) Jakarta milik PT Jakarta Propertindo (Perseroda) l. Telah terbit 1 SK dengan 2 Sertifikat berdasarkan KP - DJKA 161 Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025 hal Pengesahan dan Sertifikasi Uji Pertama Prasarana Jalur KA berupa Jembatan BH. 89 Eksisting Km. 14 + 654 (Jalur Hulu) Bentang 35,8 m, tipe Girder Beton dan BH. 107 eksisting Km 17+141 (Jalur Hilir) bentang 35,8 m, tipe Girder Beton antara Stasiun Maseng - Stasiun Cigombong lintas Bogor - Sukabumi Hasil Pekerjaan Balai Teknik Perkeretapian Kelas I Bandung 2. Subdit Kelaikan Fasilitas Operasi KA - Telah terbit 52 Sertifikat dengan rincian sebagai berikut : a. 4 sertifikat Uji Pertama JPL Solo-Wonogiri nomor: KP-DJKA 6 Tahun 2025 Tanggal 9 Januari 2025 b. 7 Sertifikat Uji Pertama Radio Telekomunikasi JABODETABEK nomor : KP DJKA tanggal 9 Tahun 2025 tanggal 16 Januari 2025 c. 3 Sertifikasi Uji Berkala Listrik Aliran Bawah APMS Bandara Internasional Soekarno - Hatta : KP-DJKA 33 Tahun 2025 tanggal 6 Maret 2025 d. 2 Sertifikat Uji Pertama JPL 172a Dan JPL 173 antara Stasiun Haurpugur - Stasiun Cicalengka di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretapian Kelas I Bandung Nomor KP-DJKA 48 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 e. 8 Sertifikat Uji Berkala Gardu Traksi pada Lintas Solo - Yogyakarta di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang Nomor KP-DJKA 110 Tahun 2025 tanggal 29 September 2025 f. 12 Sertifikat Uji Berkala Peralatan Persinyalan dan Telekomunikasi di Solo Jebres - Kedung Banteng (30 September 2025) g. 1 Sertifikat Uji Pertama Fasilitas Operasi Kereta Api berupa peralatan LAA Stasiun Tanah Abang (7 Oktober 2025) h. 1 Sertifikat Uji Pertama Fasilitas Operasi Kereta Api berupa peralatan Persinyalan Tanah Abang (7 Oktober 2025) i. 1 Sertifikat Uji Pertama Gardu Traksi Tanjung Priok (7 November 2025) j. 4 Sertifikat Uji Pertama JPL Krueng Geukeuh - Muara Satu Medan (18 November 2025) k. 6 Sertifikat Uji Pertama JPL Elektrik Lintas Jakarta - Bogor dan Jakarta - Purwakarta (10 Desember 2025) l. 3 Sertifikat Uji Berkala LRT Jakpro area Depo (22 Desember 2025)	Penyusunan rencana aksi dan target 2026	Dit Prasarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretapian (Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretapian)	88	279	73.84	26.47	-	-	88.85	-	120.33%	-	Realisasi sampai bulan Desember 88,85%, dengan capaian Output bulan Desember sebanyak 12.513 sertifikat, dengan rincian 5522 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah I dan 6991 sertifikat dari Subdit Kelaikan Sarana Wilayah II.	Penyusunan Perjanjian Kinerja 2026	Dit Sarana Perkeretapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretapian (Presentase Sarana Perkeretapian yang Telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck)	94	910	91	10	-	-	94.56	-	103.91%	-	Realisasi persentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil rampcheck sebesar 94,56% yang terdiri dari kegiatan rampcheck angkutan lebaran, idul adha (liburan sekolah), dan nataru.	Upaya peningkatan kinerja untuk kegiatan rampcheck yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap hasil rampcheck	Dit Sarana Perkeretapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretapian (Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian)	22	126	19.44	15.43	-	-	22.97	-	118.16%	-	sampai dengan bulan Desember 2025 telah diterbitkan sertifikasi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian sebanyak 8.271 sertifikat	Direktorat Keselamatan akan berkoordinasi kepada para stakeholder terkait dengan permohonan penerbitan sertifikasi baru maupun perpanjangan	Dit Keselamatan Perkeretaapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretapian (Persentase Hasil Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretapian (SMKP) yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan)	16	102	16.66	16.33	-	-	16.66	-	100%	-	Direktorat Keselamatan Perkeretapian telah melaksanakan audit penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) tahap Awal pada Divisi LRT Jabodebek	Direktorat Keselamatan Perkeretapian akan melaksanakan audit penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretapian (SMKP) tahap Transisi pada Divisi LRT Jabodebek	Dit Keselamatan Perkeretapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretapian)	21	106	19.48	18.38	-	-	21.334	-	109.52%	-	Analisis Keberhasilan/kegagalan Kinerja : 1. melaksanakan pengujian berdasarkan permohonan; 2. terpenuhinya target pengujian SDM perkeretapian pada bulan Desember diantaranya adalah : (a) permohonan SDM regulator untuk kompetensi Inspektur Prasarana Perkeretapian, Inspektur Sarana Perkeretapian, dan Auditor Perkeretapian; (b) permohonan oleh Dishub Kab. Asahan, Kab. Tulungagung, Kab. Bojonegoro; (c) permohonan oleh pihak operator PT Adhibrata Sarana Indonesi, PT CRI, dan PT Railnik.	1. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya.; dan 2. update Materi Uji Kompetensi untuk seluruh kompetensi	Balai Pengujian Perkeretapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretapian)	20	89	17.44	19.6	-	-	20.621	-	118.24%	-	Analisis keberhasilan/kegagalan kinerja : 1. memaksimalkan penggunaan aplikasi SIAPKA; 2. memastikan peralatan pengujian yang akan digunakan dalam kondisi baik dan telah terkalibrasi.dan 3. melaksanakan pengujian berdasarkan permohonan yang masuk	1. melakukan perawatan dan kalibrasi peralatan pengujian sarana perkeretapian;dan 2. memastikan proses pengadaan peralatan pengujian sarana perkeretapian dapat terlaksana sesuai timeline yang telah ditentukan.	Balai Pengujian Perkeretapian
MENINGKATNYA KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN PER 1.000 JUMLAH KEBERANGKATAN KA	%	100,000	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretapian (Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretapian)	21	104	17.97	17.28	-	-	21.038	-	117.07%	-	Realisasi triwulan IV adalah 21,038% (287 Unit dan 421,948 km'sp Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja : 1. melaksanakan pengujian berdasarkan permohonan; 2. terpenuhinya target pengujian prasarana perkeretaapian pada bulan Desember diantaranya adalah : (a) pengujian pertama rancang bangun dokumen dan fisik jalbang BH 613 lintas Blitar - Kertosono (BTP Surabaya); (b) pengujian pertama rancang bangun dokumen dan fisik jalbang peningkatan Stasiun Rangkasbitung (BTP Jakarta); serta (c) pengujian pertama fasop jaringan LAA Switch Over III Stasiun Rangkasbitung	Upaya Peningkatan Kinerja 1. menyusun rencana pengujian prasarana perkeretapian yang akan dilaksanakan pada triwulan 1 tahun 2026; dan 2. melakukan monitoring secara berkala terhadap rencana pengujian prasarana perkeretapian pada tahun 2026 agar mencapai target	Balai Pengujian Perkeretapian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (subsidi perintis dan monitoring PSO, penetapan, pemantauan dan evaluasi GAPEKA, pembangunan jalur ganda kereta api dan fasilitas prasarana lainnya, pengembangan perkeretaapian baik jalur kereta api dan fasilitas operasi dan lainnya)	3	36	3.74	10.39	895.248.757.000	15.38	3.772	1.032.237.330.135	100.86%	115.3%	Nilai IKM Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan nilai rata-rata IKM setiap bulan dari masing-masing unit kerja selama periode Triwulan I-III Tahun 2025 sehingga diperoleh nilai 3,772 atau dapat diinterpretasikan bahwa kinerja unit pelayanan telah sangat baik. Pelayanan publik bidang perkeretaapian meliputi layanan administrasi Pemerintahan sebagai regulator (perijinan, sertifikasi, pengujian, dan lainnya) serta layanan angkutan kereta api yang diselenggarakan oleh unit kerja termasuk badan layanan umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Pada Triwulan III Tahun 2025, pelaksanaan survey IKM dilaksanakan secara parsial menggunakan aplikasi 3A PK yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan serta dilengkapi dengan penggunaan google form pada beberapa unit kerja seperti Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan dan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan. Adapun beberapa faktor kebeehasilan dalam pencapaian kinerja diantaranya: a. Pelayanan sertifikasi kelaikan/kompetensi sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 telah dilaksanakan yaitu: 1) Pelayanan sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian sebanyak 36 sertifikat terdiri dari 12 penetapan sertifikat jalur dan bangunan serta 24 sertifikat fasilitas operasi; 2) 3) Pelayanan sertifikasi kelaikan sarana perkeretaapian sebanyak 7.232 sertifikat; Pelayanan sertifikasi kompetensi SDM Perkeretaapian sebanyak 5.691 sertifikat. b. Pelayanan izin usaha/operasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebanyak 15 perizinan serta izin perpotongan dan/atau persinggungan jalur kereta api dengan bangunan lain sebanyak 34 perizinan. c. Peningkatan pelayanan penumpang kereta api khususnya yang dikelola Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan dan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan, dengan beberapa upaya diantaranya: 1) Tindak lanjut terhadap aduan yang disampaikan pada beberapa kanal (chat centre, surel, SP4N, Media Sosial, Survei Kepuasan); 2) Penyesuaian harga khusus pada momen-momen tertentu seperti Kemerdekaan Republik Indonesia; 3) Kehandalan SDM dalam memberikan layanan serta pemenuhan kualitas dan tahapan pelayanan sesuai proses bisnis/SOP yang telah ditetapkan, diantaranya pelatihan bahasa isyarat di BPKAR Sumatera Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 11 Juli 2025; 4) Pemberlakuan sistem pemesanan tiket online mulai H-7 sebelum keberangkatan pada BPKA Sulawesi Selatan; 5) Melakukan sosialisasi tiket infant pada sistem penjualan tiket KA Makassar-Parepare d. Pelaksanaan sosialisasi layanan dan survei IKM kepada stakeholder, termasuk upaya penambahan jumlah responden dengan perluasan pelaksanaan survei melalui google form untuk mempermudah pengisian responden e. Pemanfaatan sistem informasi diantaranya pada layanan pengujian, sertifikasi kelaikan sarana serta sertifikasi kompetensi SDM perkeretaapian, sehingga penyelesaian layanan dapat tepat waktu serta menjaga kualitas pelayanan sesuai prosedur dan alur yang telah ditetapkan. Adapun beberapa upaya pengembangan sistem informasi yang sedang dilaksanakan antara lain: 1) Pengembangan fitur perizinan online pada Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian dengan progres pada Triwulan III Tahun 2025 adalah pembahasan laporan kemajuan/antara; 2) Penyempurnaan fitur perizinan crossing pada Portal Layanan dan Data Ditjen Perkeretaapian untuk persiapan uji/coba penggunaan termasuk telah dilakukan sinkronisasi penggunaan SSO Hubnet Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan layanan dan pelaksanaan survei IKM diantaranya: a. Kendala pada saat pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat diantaranya kurangnya responden survey dan kesulitan beberapa responden dalam mengakses link survei dikarenakan alat/media komunikasi responden yang kurang mendukung. b. Gangguan/error sistem informasi yang menyebabkan tertundanya persetujuan dan penerbitan sertifikat diantaranya sertifikat kompetensi SDM perkeretaapiaan	a. Peningkatan keamanan sistem terkait layanan regulator perkeretaapian (perizinan, sertifikasi, pengujian, lainnya) untuk mencegah terjadinya gangguan pada layanan serta lanjutan pengembangan fitur Portal Layanan dan Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai superapps yang terpadu dan terintegrasi; b. Membasilitasi serta meningkatkan layanan pengaduan pelayanan angkutan penumpang khususnya pada layanan kereta api yang dikelola oleh BPKAR Sumatera Selatan dan BPKA Sulawesi Selatan diantaranya melalui barcode pada area boarding dan sosial media c. Berpartisipasi dalam monitoring dan evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perhubungan serta dukungan pelaksanaan penilaian kepatuhan pelayanan publik Tahun 2025 oleh Ombudsman d. Pengoptimalan sisa anggaran Tahun 2025 secara selektif untuk kegiatan pendukung termasuk memastikan pemenuhan anggaran angkutan perintis sampai akhir Tahun 2025, serta mempersiapkan dokumen pengusulan pada RKA Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026 berdasarkan skala prioritas layanan regulator dan angkutan perintis perkeretapian e. Pelaksanaan layanan sertifikasi/pengujian didukung dengan penyesuaian pengawasi pegawai fungsional tertentu perkeretaapian sesuai bidang tugas dan kompetensinya (penguji, asisten penguji, lainnya).	Dit. LLAKA, Dit. Prasarana Perkeretaapian,Dit. Sarana Perkeretaapian, BTP, BPKA
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA)	36	36	3.71	10.31	-	-	36	-	970.35%	-	Capaian kinerja pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 36,00% dengan persentase capaian kinerja triwulan dan kinerja tahunan 100%.Terpenuhinya 15 dokumen NSPK Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, antara lain:	1. KM 5 Tahun 2025 Tentang Penetapan Lintas Pelayanan Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian 2. KM 6 Tahun 2025 Tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Perintis 3. KP-DJKA 18 Tahun 2025 tentang Persetujuan Penambahan Frekuensi Perjalanan Kereta Api Lintas Pelayanan Yang Sama PT Kereta Api Indonesia (Persero) 4. KP-DJKA 19 Tahun 2025 tentang Persetujuan Penambahan Frekuensi Perjalanan Kereta Api Lintas Pelayanan Yang Sama PT Kereta Commuter Indonesia 5. KP-PHB 206 Tahun 2025 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian 6. KP-DJKA 34 Tahun 2025 tentang Persetujuan Penambahan Frekuensi Perjalanan Kereta Api pada Lintas Pelayanan yang sama kepada PT Railink 7. KP-DJKA 46 Tahun 2025 tentang Persetujuan Penambahan Frekuensi Perjalanan Kereta Api Lintas Pelayanan yang sama PT Kereta Api Indonesia (Persero) 8. KP-PHB 64 Tahun 2025 tentang Pemberian Persetujuan Penambahan Pengoperasian Kereta Api pada Lintas Pelayanan yang berbeda kepada PT KCI 9. KP-DJKA 79 Tahun 2025 tentang Persetujuan Penambahan Frekuensi Perjalanan Kereta Api Lintas Pelayanan yang sama PT KAI 10.KP-DJKA 82 Tahun 2025 tentang Persetujuan Penambahan Frekuensi Kereta Api pada Lintas Pelayanan yang sama PT KCI 11.KP-DJKA 2 Tahun 2025 tentang Gratik Perjalanan Kereta Api Pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Kereta Api Kecepatan Tinggi Jakarta - Bandung Tahun 2025 12.KP PHB 322 Tahun 2025 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perubahan Kedua 13.KP PHB 581 Tahun 2025 Tentang Penetapan Lalu Lintas Perubahan Ketiga 14.KP PHB 267 Tahun 2025 tentang Persetujuan Penambahan Pengoperasian KA pada Linpel yang berbeda pada PT KAI 15.KP PHB 473 Tahun 2025 tentang tentang Persetujuan Penambahan Pengoperasian KA pada Linpel yang Berbeda kepada PT KAI	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian)	3	36	3.7	10.28	-	-	3.81	-	102.97%	-	Pada pelaksanaan survei periode Januari s.d Desember 2025, Direktorat Sarana Perkeretaapian secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.81 dalam skala 4 atau 16.65 dalam skala 17.50 atau 95,25 dalam skala 100. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian telah memperoleh kategori Sangat Baik. Secara lebih rinci, terdapat 8 unsur yang menjadi penyimbang nilai agregat atau rata-rata (IKM) Direktorat Sarana Perkeretaapian pada periode Januari s.d Desember 2025, Unsur Informasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Persyaratan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Prosedur/Alur memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Waktu Penyelesaian memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Tarif/Biaya memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Sarana Prasarana memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Resopn memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Konsultasi dan Pengaduan memperoleh kategori Sangat Baik.	Penyusunan perjanjian kinerja 2026	Dit Sarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian)	3	36	3.89	10.81	-	-	3.9	-	100.26%	-	Sesuai dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 untuk indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik yaitu sebesar 3,89, dari hasil pelaksaan survey kepuasan masyarakat dan pemantauan SKM periode Bulan November 2025 Direktorat Prasarana Perkeretaapian terdiri dari : 1. Januari : Nilai IKM sebesar 3,75 dari 5 responden pengguna jasa pelayanan 2. Februari : Nilai IKM sebesar 4 dari 4 responden pengguna jasa pelayanan 3. Maret : Nilai IKM sebesar 3,91 dari 6 responden pengguna jasa pelayanan 4. April : Nilai IKM sebesar 4 dari 4 responden pengguna jasa pelayanan 5. Mei : Nilai IKM sebesar 3,80 dari 3 responden pengguna jasa pelayanan 6. Juni : Nilai IKM sebesar 3,84 dari 5 responden pengguna jasa pelayanan 7. Juli : Nilai IKM sebesar 3,87 dari 10 responden pengguna jasa pelayanan 8. Agustus : Nilai IKM sebesar 3,97 dari 5 responden pengguna jasa pelayanan 9. September : Nilai IKM sebesar 3,73 dari 11 responden pengguna jasa pelayanan 10. Oktober : Nilai IKM sebesar 3,98 dari 15 responden pengguna jasa pelayanan 11. November : Nilai IKM sebesar 4 dari 11 responden pengguna jasa pelayanan 12. Desember : Nilai IKM sebesar 3,995 dari 11 responden pengguna jasa pelayanan Sehingga sampai dengan periode Bulan Desember tahun 2025 nilai rata rata IKM Direktorat Prasarana Perkeretapian sebesar 3,90 dari 90 responden dengan target sampai dengan Bulan Desember sebesar 3,89 sehingga capaian Bulan Desember sebesar 100,26% Pada tanggal 31 Juli 2025 telah dilaksanakan sosialisasi internal penggunaan aplikasi izin perpotongan & persinggungan dalam acara penajaman aplikasi bidang prasarana perkeretaapian dan SOP pengesahan izin teknis pemanfaatan prasarana perkeretaapian Untuk aplikasi crossing saat ini telah selesai progres development, dan saat ini sedang proses pemindahan dari server lokal ke server production Untuk Aplikasi Sertifikasi Telah dilakukan launching aplikasi perizinan crossing dan sertifikasi Prasarana Perkeretaapian pada tanggal 23 Desember 2025	1. Akan dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat Periode 2026 2. Akan dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja 2026	Dit Prasarana Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian)	3	36	3.86	10.72	-	-	3.48	-	90.16%	-	Sampai dengan bulan Desember 2025 telah terdapat 57 responden yang mengisi survey kepuasan masyarakat dengan nilai rata-rata 3,48	Direktorat Keselamatan akan berupaya meningkatkan pelayanan kepada stakeholder	Dit Keselamatan Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian)	3	36	3.86	10.72	-	-	3.84	-	99.48%	-	Realisasi merupakan rata-rata dari bulan Januari-Desember dengan jumlah responden sebanyak 4.904 Orang	1. melakukan pendampingan kepada responden pada saat pengisian; dan 2. menyusun laporan SKM setiap triwulan	Balai Pengujian Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan)	3	36	3.58	9.94	-	-	3.59	-	100.28%	-	Hasil survey masih menggunakan hasil survey internal BPKARSS, untuk survey dari Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Kementerian Perhubungan sudah berjalan. Jika dirata rata di Triwulan IV IKM BPKARSS mendapatkan nilai 3,62 namun sesuai dari aplikasi e-performance arata rata keseluruhan s.d Desember nilainya 3,59. Upaya: Fokus terhadap tindak lanjut dari aduan yang diterima, Melaksanakan kegiatan pelatihan untuk para petugas di stasiun, guna meningkatkan kenyaman bagi para penumpang.	Persiapan kegiatann tahun 2026	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN	Nilai	3,740	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan)	3	36	3.23	8.97	-	-	3.3	-	102.17%	-	Hasil pelaksanaan survey yang dilaksanakan internal oleh BPKA Sulawesi Selatan	Persiapan kegiatan tahun 2026	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	96,100	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	97	1152	96.1	8.34	-	-	97.77	-	101.74%	-	Beberapa faktor tercapainya target kinerja pada periode Triwulan IV Tahun 2025 diantaranya: a. Terpenuhinya target on time performance pada beberapa jenis pelayanan kereta api khususnya angkutan KA perkotaan seperti MRT Jakarta (99,98%), LRT Jakarta (99,98%), LRT Sumatera Selatan (99,82%), dan LRT Jabodebek (99,55%) b. Telah dilaksanakan evaluasi kinerja operasi pada jaringan jalur kereta api nasional pada kereta api ringan terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi, serta kereta api kecepatan tinggi Jakarta - Bandung pada tanggal 22 Agustus 2025 c. Koordinasi secara aktif dengan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan Balai Teknik Perkeretaapian terhadap penyebab dan penanganan kejadian kelambatan perjalanan kereta api serta mengantisipasi potensi adanya rintang jalan. Sebagai contoh, pada masa angkutan Lebaran Idul Fitri dan masa libur Idul Adha Tahun 2025 telah dilaksanakan koordinasi teknis dengan stakeholders (PT. KAI, PT. MRT, PT. KCI, PT. KCIC) yang mencakup rencana operasi, kesiapan sarana, prasarana dan SDM termasuk identifikasi daerah rawan dan upaya preventif dan mitigasinya d. Secara rutin melaksanakan evaluasi berkala (triwulan) terhadap realisasi perjalanan kereta api sesuai GAPEKA yang berlaku sehingga perjalanan KA dapat sesuai jadwal dan keterlambatan dapat diminimalisir. Selain itu, dalam pencapaian kinerja On Time Performance (OTP) transportasi kereta api selama periode Triwulan III juga mengalami beberapa kendala/hambatan akibat berbagai kendala operasional yang terjadi di sejumlah wilayah operasi dengan beberapa peristiwa menonjol antara lain: a. Insiden anjloknya KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Pegadenbaru, Subang, pada Agustus 2025 yang menyebabkan gangguan signifikan pada jalur utama lintas utara serta berdampak sistemik terhadap jadwal perjalanan kereta jarak jauh b. Kejadian gangguan keamanan di perlintasan sebidang yang masih menjadi penyumbang terbesar terhadap keterlambatan perjalanan KA, terutama akibat tabrakan dengan kendaraan bermotor. Beberapa yang berhasil diidentifikasi antara lain: 1) Kendaraan bermuatan sarana maupun prasarana serta memerlukan waktu penanganan yang cukup lama c. Gangguan teknis pada sarana perkeretaapian, seperti permasalahan pada kereta pembangkit, juga turut menyebabkan keterlambatan dan penurunan efisiensi jadwal operasi d. Kondisi cuaca ekstrem yang mengakibatkan genangan air pada beberapa titik jalur KA e. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan penyesuaian pola operasi juga turut memengaruhi ketepatan waktu perjalanan KA Secara keseluruhan, berbagai gangguan perjalanan KA tersebut menunjukkan bahwa capaian OTP masih dipengaruhi oleh kombinasi faktor eksternal dan internal termasuk aspek keselamatan dan keamanan, kesiapan sarana dan prasarana, serta kondisi cuaca. Oleh karena itu, diperlukan langkah perbaikan berkelanjutan untuk menjaga stabilitas ketepatan waktu perjalanan kereta api pada periode berikutnya diantaranya peningkatan penganan perlintasan sebidang, optimalisasi pemeliharaan sarana dan prasarana, serta penguatan sistem manajemen operasi.	a. Melakukan evaluasi pelaksanaan GAPEKA termasuk verifikasi dan validasi data capaian harian kinerja operasi pada jaringan jalur kereta api nasional sebagai acuan penetapan GAPEKA Tahun 2026 serta upaya peningkatan OTP perjalanan kereta api b. Melakukan inspeksi/pemantauan berkala terhadap perjalanan kereta api pada lokasi rawan bencana/banjir/longsoran/ablasan/lokasi tegal dan rawan gangguan keamanan di perlintasan sebidang serta memastikan peralatan penanganan kecelakaan/rintang jalan tersedia dan ditempatkan sesuai kebutuhan c. Lanjutan pembangunan jalur ganda kereta api (jalur ganda KA elevated Medan – Binjai, Solo-Semarang, lainnya) dan peningkatan jalur/jembatan/fasilitas operasi kereta api (Jember – Kalisat, Jabodetabek, lainnya) untuk meningkatkan kapasitas lintas dan kecepatan operasional kereta api serta memudahkan pengaturan operasional kereta api agar tepat waktu d. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan pendukung yang telah direlakasasi dengan pemanfaatan sisa waktu hingga akhir tahun serta mengusulkan perpanjangan kontrak tahun jamak untuk kegiatan pembangunan jalur ganda/peningkatan jalur/jembatan/fasilitas operasi yang terkendala dan tidak dapat selesai pada akhir Tahun 2025 dilengkapi data dukung dan justifikasi yang memadai e. Penyesuaian penugasan inspektur prasarana dan sarana perkeretaapian serta anggota Satuan Pelayanan pada masing-masing wilayah Balai Teknik Perkeretaapian berdasarkan kompetensi dalam pelaksanaan pengawasan perjalanan kereta api	
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	96,100	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Realisasi Perjalanan KA berdasarkan GAPEKA)	105	1140	95.42	8.37	-	-	105.81	-	110.89%	-	Capaian kinerja pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 105,81% Data realisasi frekuensi perjalanan kereta api antarkota dan perkotaan (penumpang dan barang) yang bersifat komersial dan perusahaan, meliputi: 1. Jawa (PT KAI, PT KCI, PT Railink) 2. Sumatera bagian utara (PT KAI dan PT Railink) 3. Sumatera bagian barat (PT KAI) 4. Sumatera bagian selatan (PT KAI) 5. Sulawesi Selatan (Konsorsium KA Sulsel) 6. Kereta api ringan Sumatera Selatan (PT KAI) 7. Kereta api ringan terintegrasi di wilayah Jabodebek (PT KAI) 8. Kereta api kecepatan tinggi Jakarta-Bandung (PT KCIC) 9. Moda Raya Terpadu di Jakarta (PT MRT Jakarta) 10. Lintas Raya Terpadu di Jakarta (PT LRT Jakarta) Terpenuhinya target dikarenakan adanya: 1. Penambahan frekuensi LRT Jabodebek yang sebelumnya diprogramkan sebanyak 158 KA, sejak 11 November 2025 beroperasi sebanyak 430 KA saat weekday dan 270 KA saat weekend. 2. Penambahan frekuensi LRT Sumsel yang sebelumnya diprogramkan sebanyak 88 KA, saat ini beroperasi sebanyak 94 KA saat weekday dan 102 KA saat weekend; dan 3. Penggoperasian KA Tambahan pada masa libur Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026. 4. Telah dilaksanakan evaluasi pelaksanaan Gapeka pada jaringan jalur ka nasional Jawa dan Sumatera pada tanggal 8 - 10 Oktober 2025.	bersiapan kegiatan tahun 2026	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	96,100	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI Kategori I dan II)	94	1140	95.02	8.34	-	-	94.64	-	99.6%	-	Target tahun 2025 sesuai dengan target PK tahun 2025 sebesar 95,02%, Progres sampai dengan bulan Desember tahun 2025 Telah dilakukan pengukuran jalur KA periode III tahun 2025 oleh PT KAI (Persero) dan telah dilaksanakan Evaluasi pengukuran TQI periode III pada tanggal 5 s.d 7 November 2025 antara Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Balai Teknik Perkeretaapian, dan PT KAI dengan hasil : 1. Realisasi hasil TQI periode III Tahun 2025 Kategori I dan II sebesar 94,64% dengan panjang jalur 5.686,18 KM dari total panjang jalur keseluruhan 6.008,01 KM terdiri dari : a. Track Quality Index Kategori I (nyaman) dengan panjang 3.900,059 KM b. Track Quality Index Kategori II (aman) dengan panjang 1.786,116 KM 2. Realisasi hasil TQI periode II Tahun 2025 Kategori III dan IV sebesar 5,36% dengan panjang jalur 321,83 KM dari total panjang jalur keseluruhan 6.008,01 KM terdiri dari : c. Track Quality Index Kategori III (waspada) dengan panjang 277,190 KM d. Track Quality Index Kategori IV (bahaya) dengan panjang 44,640 KM 3. Dari hasil pengukuran periode II dan periode III terdapat Kenaikan kategori sebagai berikut: Kategori I dan II periode II sepanjang 5.584,19 KM atau 93,71% dan pada periode III meningkat menjadi sepanjang 5.686,18 KM atau 94,64%. Kategori III dan IV periode II sepanjang 374,77 KM atau 6,29% dan pada periode III menurun menjadi sepanjang 321,83 KM atau 5,36%. Pada periode triwulan IV telah dilaksanakan pengukuran jalan Rel pada : 1. lintas utara Jawa pada 10 s.d 14 November, lintas selatan Jawa pada 17 s.d 22 November, serta lintas Daop 1 pada 25 s.d 28 November. 2. Wilayah Divre I Sumatera Utara (Medan) dilaksanakan pada 18 s.d 25 Desember 2025, Divre II Sumatera Barat (Padang) dilaksanakan pada 1 s.d 4 Desember 2025, serta Divre III Palembang dan IV Tanjung Karang dilaksanakan pada 4 s.d 14 Desember 2025.	1. Akan dilaksanakan evaluasi Pengukuran TQI Periode IV pada bulan januari 2026 2. Pembentukan Tim Evaluasi Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Jalan Rel (TQI) dengan KA ukur tahun 2026 3. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	Dit Prasarana Perkeretaapian dan Balai Teknik Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE ON TIME PERFORMANCE (OTP) TRANSPORTASI KERETA API	%	96,100	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (Persentase Fasilitas Operas! Kereta Api dengan Teknologi Handal)	65	756	65.27	8.63	-	-	65.21	-	99.91%	-	Pada Tahun 2025 sesuai dengan penetapan revisi perjanjian kinerja ke III direncanakan terdapat target Jalur KA yang Menggunakan Persinyalan Elektrik sebesar 65,21 realisasi sampai dengan bulan Desember Tahun 2025 telah tercapai 65,21% dengan ditetapkannya izin teknis pembangunan dan pengoperasian fasilitas operasi kereta api dengan sistem persinyalan elektrik di 5 stasiun yang ditargetkan di 2025 yaitu : 1. Stasiun Serdang 2. Stasiun Payakabung 3. Stasiun Gelumbang 4. Stasiun Karangendah 5. Stasiun Lembak	1. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 berdasarkan Renstra DPP tahun 2025-2029	Dit Prasarana Perkeretaapian dan Balai Teknik Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PERSENTASE PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN KERETA API	%	19,000	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	19	118	19	16.1	-	-	19.547	-	102.88%	-	Realisasi penumpang sebesar 551.192.016 orang yang terdiri dari KA PSO sebanyak 450.075.971, KA Komersial sebanyak 95.856.332 dan KA Perintis sebanyak 5.259.713 pnp dan realisasi angkutan barang realisasi angkutan barang sebesar 69.622.072 ton dari target jumlah angkutan barang tahun 2025 adalah sebesar 68.022.903 ton yang didominasi oleh komoditi angkutan batu bara sebesar 52.852.657 ton dan peti kemas sebesar 4.606.649 ton	Persiapan kegiatan tahun 2026	Dit Lalu Lintas dan Angkutan KA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Dalam PK	Kegiatan	Indikator Kinerja Output	Target Kinerja Output	Target Bulan 12				Realisasi Bulan 12		Realisasi Bulan 12		Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
							Target Output		Target Anggaran		Realisasi Output	Realisasi Anggaran	Capaian Output	Capaian Anggaran			
							Volume	%	Volume	%	Volume	Volume	%	%			
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	%	100,000	Program Dukungan Manajemen (Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian, Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian, Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian, Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian & Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian)	98	379	100	26.39	694.634.445.000	15.38	98.985	419.506.238.763	98.99%	60.39%	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan merupakan bagian strategi memperkuat prinsip-prinsip good governance di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efisien, dan profesional melalui pembenahan menyeluruh terhadap sistem manajemen kinerja, pengelolaan anggaran, pelayanan publik, serta kompetensi dan integritas aparatur sipil negara. Pada Triwulan III Tahun 2025, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menunjukkan capaian yang sangat positif dalam pelaksanaan program peningkatan tata kelola pemerintahan. Terlepas dari belum dilaksanakannya pengukuran terhadap Indeks Profesional ASN, pencapaian signifikan pada realisasi PNBP serta nilai AKIP telah mampu mendorong capaian IKP di atas target triwulan. Hal ini mengindikasikan juga bahwa Direktorat Jenderal Perkeretaapian berada pada jalur yang tepat dalam memperkuat tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional, serta perlu mempertahankan capaian dengan optimalisasi dua komponen lainnya (Nilai Kinerja Anggaran dan Indeks Profesional ASN) pada periode berikutnya. Pemutakhiran data, peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kinerja dan anggaran, serta penguatan kompetensi ASN terus menjadi fokus prioritas untuk memastikan pencapaian target tahunan secara menyeluruh. Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja diantaranya: a. Penyelenggaraan SAKIP 1) Perencanaan dan penetapan target kinerja termasuk revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah disusun dengan memperhatikan realisasi kinerja Tahun 2024, arah kebijakan 2025-2029, analisa mendalam dantaranya ketersediaan sumber daya (anggaran, SDM) termasuk telah dilakukan sinkronisasi target kinerja sub unit kerja (Bagian) dan unit kerja lainnya (Direktorat, Balai); 2) Publikasi/updating/pembaharuan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja melalui e-SAKIP Reviu dan website Ditjen Perkeretaapian (official), diantaranya Laporan Monitoring Kinerja Triwulan serta update rancangan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 – 2029; 3) Pada Laporan Monitoring Kinerja Triwulan II Tahun 2025, telah tercantum seluruh informasi capaian kinerja mencakup tata cara perhitungan capaian kinerja, analisa keberhasilan/kegagalan, analisa penyesuaian kebijakan/strategi/kegiatan maupun anggaran, analisa hubungan kerja/crosscutting termasuk perbandingan di level nasional/internasional, perubahan budaya kinerja, analisa dukungan terhadap pencapaian target RPJMN 2025-2029, serta penjelasan sumber data dukung capaian kinerja pada lampiran laporan; 4) Perencanaan kinerja unit kerja telah menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Berjenjang dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) masing-masing pegawai melalui aplikasi e-Kinerja yang selanjutnya diacu dalam pelaporan kinerja pegawai setiap bulan serta dilakukan update/revisi dengan adanya penyesuaian struktur organisasi; 5) Koordinasi internal berkala yang mengikutsertakan seluruh unit kerja terkait (Direktorat, Balai dan Bagian) dalam pengukuran dan pelaporan kinerja serta evaluasi internal yang efektif dan sinergis; 6) Pelaksanaan evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2025 secara berjenjang, meliputi penilaian mandiri pada masing-masing unit kerja (Setditjen, Direktorat, Balai) yang dilanjutkan dengan evaluasi tingkat Eselon I serta evaluasi tingkat Kementerian Perhubungan oleh Inspektorat Jenderal. Untuk hasil evaluasi oleh Inspektorat Jenderal telah disampaikan melalui surat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan nomor PS.302/5/4/ITJEN/2025 tanggal 20 Agustus 2025 dengan nilai 83,72 (predikat A) dimana terdapat peningkatan dari Tahun sebelumnya, 7) Konsolidasi evaluasi lanjutan implementasi SAKIP khususnya untuk unit kerja non-sampel melalui rapat penyamaan persepsi penilaian guna menyeragamkan pemahaman dan memastikan tindak lanjut hasil penilaian Inspektorat Jenderal telah dikoordinasikan kepada seluruh unit kerja; 8) Pembahasan terkait penyesuaian manual dan cascading beberapa indikator kinerja kegiatan pada beberapa unit kerja Direktorat/Balai dengan mempehatikan keselarasan dengan amanah RPJMN Tahun 2025–2029 serta menindaklanjuti hasil evaluasi/audit kinerja dari Inspektorat Jenderal. b. Perencanaan dan pelaksanaan anggaran: 1) Pelaksanaan relaksasi/buka blokir anggaran sebesar Rp165,30 miliar untuk mendukung kegiatan prioritas keselamatan dan Rp48,71 miliar untuk pemenuhan belanja pegawai sebagai bentuk upaya menjaga kesinambungan program strategis keselamatan dan pelayanan penyelenggaraan perkeretaapian serta dukungan manajemen; 2) Pelaksanaan tagging/penandaan pada Rincian Output (RO) Tahun 2025 yang termasuk dalam kategori SBKU sebagaimana diatur pada PMK Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2025. Sebagai tindak lanjut hal tersebut, telah dilakukan tagging terhadap 52 RO yang tersebar di seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; 3) Efektivitas dan ketepatan pelaksanaan anggaran melalui penyusunan dan revisi DIPA, penyesuaian RPD, dan pelaporan output rutin/berkala dan tepat waktu; 4) Kemampuan adaptasi terhadap efisiensi fiskal menunjukkan bahwa organisasi fleksibel dan tetap menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai ketentuan. c. Optimalisasi PNBP 1) Secara bertahap telah dilakukan perbaikan tata kelola pelaksanaan PNBP TAC dan hal tersebut dapat dilihat dengan perolehan realisasi PNBP yang signifikan dari pembayaran TAC periode Tahun 2024 serta pembayaran TAC Tahun 2025 sebanyak 2 Badan Usaha (PT Railink dan PT KCI). Adapun terhadap pembayaran TAC Tahun 2025 dari PT. KAI saat ini masih menunggu penyelesaian pencairan dana dari kegiatan IMO; 2) Perolehan realisasi PNBP dari pembayaran sewa atas pemanfaatan aset/BMN termasuk adanya persetujuan dari instansi Kementerian Keuangan dalam pemanfaatan aset/BMN turut mempengaruhi realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025. d. Faktor manajerial SDM: 1) Pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan mengikuti pendidikan/pelatihan/workshop berkoordinasi dengan BPSDMP, Setjen Kemenhub (Biro SDMO), serta lembaga pelaksana pendidikan/pelatihan lainnya baik teknis perkeretaapian maupun manajerial; 2) Himbauan kepada seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk dapat melakukan pengawasan dan pembinaan disiplin pegawai di masing-masing unit kerja melalui surat Sesditjen Perkeretaapian nomor KP.405/1/12/K1/DJKA/2025 tanggal 29 Juli 2025 perihal Peningkatan Kinerja dan Disiplin; 3) Himbauan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan penyelesaian disparitas data ASN di masing-masing unit kerja guna peningkatan kualitas layanan manajemen ASN melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian nomor KP.001/1/13/K1/DJKA/2025 tanggal 13 Agustus 2025 perihal Penyelesaian Disparitas Data ASN; 4) Himbauan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk melakukan pemutakhiran data pegawai secara berkala pada aplikasi SIK Kemenhub melalui surat Sesditjen Perkeretaapian nomor KP.001/1/3/SKJ/2025 tanggal 29 Agustus 2025 perihal Pemutakhiran Data Pegawai pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) Kementerian Perhubungan; 5) Penyampaian hasil monitoring penilaian indeks profesional ASN kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara berkala. e. Faktor tata laksana termasuk pemanfaatan teknologi informasi: 1) Ketepatan dan ketertiban pelaporan melalui aplikasi seperti e-SAKIP Reviu, SAKTI, e-Monitoring, e-Performance, e-Kinerja, Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan lainnya menunjukkan bahwa sistem pelaporan yang terintegrasi dan disiplin administratif turut mempengaruhi pencapaian kinerja pada beberapa komponen penilaian; 2) Saat ini dalam proses pengembangan portal layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai superapps untuk mendukung integrasi data dan transformasi digital beberapa layanan strategis bidang perkeretaapian; 3) Kapasitas SDM dalam pengelolaan aplikasi/sistem informasi dimana minimnya pemahaman atau keterlambatan input oleh admin berdampak pada rendahnya nilai kinerja ASN dan pelaporan keuangan, sehingga dibutuhkan pendampingan/pelatihan berkala.	Rencana Tindak Lanjut: a. Finalisasi penilaian terkait evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2025 untuk unit kerja non sample di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta menyampaikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 kepada Inspektorat Jenderal; b. Pelaksanaan forum pembahasan untuk finalisasi Rencana Strategis Ditjen Perkeretaapian Tahun 2025-2029 termasuk sinkronisasi RPJMN Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis tingkat Kementerian Perhubungan serta seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; c. Penyusunan revisi Perjanjian Kinerja 2025 sesuai hasil monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan capaian kinerja dapat memenuhi kategori on the right track (capaian 90-110%). d. Percepatan penyerapan anggaran Tahun 2025 serta pemantauan pelaksanaan anggaran unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, termasuk dukungan revisi anggaran apabila diperlukan untuk pemenuhan backlog/selisih anggaran penyelenggaraan IMO periode sebelumnya; e. Pelaksanaan tagging/penandaan Rincian Output SBKU/SBKK pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2026 sebagaimana diatur pada PMK Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2025; f. Koordinasi dengan KPKNL untuk percepatan persetujuan pemanfaatan aset/BMN guna mendukung perolehan PNBP Direktorat Jenderal Perkeretaapian g. Lanjutan pembinaan ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian termasuk peningkatan kompetensi dan pengelolaan jenjang karir jabatan fungsional tertentu mencakup sosialisasi/bimbingan teknis/pendidikan/pelatihan/uji kompetensi terkait kepegawaian, manajerial dan teknis bidang perkeretaapian h. Pembahasan usulan penyelarasan dan penyederhanaan jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta koordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Kementerian Perhubungan.	
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	%	100,000	Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian (Persentase Pencapaian Target Regulasi/Legislasi (Jumlah Rancangan Dan Peraturan Perundangan) Di Bidang Perkeretaapian)	21	110	20	18.18	-	-	21.21	-	106.05%	-	Pada Tahun 2025 regulasi/kebijakan terkait penyelenggaraan perkeretaapian yang selesai diantaranya: o KM 5 Tahun 2025 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian (sudah terbit); o KM 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Perintis (sudah terbit); o PP 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada paragraf 9 pasal 160 sektor transportasi (sudah terbit); o Revisi PP 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (sudah harmonisasi, menunggu pengundangan); o Revisi PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi (sudah harmonisasi, menunggu pengundangan); o Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Pengendali Distribusi Listrik (sudah harmonisasi, menunggu pengundangan); o Kepdirjen tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 (sudah terbit).	Persiapan kegiatan tahun 2026	Setditjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Nilai	100,000	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian (Indeks Profesional ASN)	86	89	89	100	-	-	86.09	-	96.73%	-	Pengukuran mengadopsi perhitungan Indeks Profesionalitas ASN mengacu pada Peraturan MENPANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesional ASN. • Berdasarkan monitoring per-Desember 2025, nilai akhir diperoleh sebesar 86,09.	Persiapan kegiatan tahun 2026	Setditjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Nilai	100,000	Tersedianya Teknologi Informasi Regulator Perkeretaapian yang Andal (Tingkat Kematangan Layanan Publik Berbasis Elektronik Ditjen Perkeretaapian)	1	3	3	100	-	-	1.61	-	53.67%	-	Salah satu aspek dalam penilaian indeks pemerintah digital yakni aspek Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah (aspek 7) dengan fokus evaluasi dari kapabilitas dan kebijakan/hulu ke kinerja, implementasi, dampak dan kepuasan pengguna/hilir (indikator 19-20) dan ditargetkan pemenuhannya pada Desember 2025.	Persiapan kegiatan tahun 2025	Setditjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	Nilai	100,000	Terwujudnya Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian (Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian)	96	90	90	100	-	-	96.6	-	107.33%	-	Penilaian mengacu pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi Pusat (KIP), dimana berdasarkan hasil penilaian oleh KIP diperoleh nilai keterbukaan informasi publik Ditjen Perkeretaapian Tahun 2025 sebesar 96,60.	Persiapan kegiatan tahun 2026	Setditjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	%	100,000	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian (Tingkat Pencapaian Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian)	100	400	100	25	-	-	100.867	-	100.87%	-	Hasil Evaluasi AKIP Ditjen Perkeretaapian memperoleh nilai sebesar 83,72 dari target sebesar 83	Pelaksanaan inovasi dalam pencapaian target	Seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	%	100,000	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian (Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen Perkeretaapian)	162	785	100	12.74	-	-	162.29	-	162.29%	-	Realisasi PNBP Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp. 2.022.678.845.172 dari target sebesar Rp. 1.246.326.325.000	Upaya peningkatan nilai perolehan tahun 2026	Setditjen Perkeretaapian
MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	%	100,000	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian (Tingkat Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perkeretaapian)	65	704	100	14.2	-	-	65.19	-	65.19%	-	Perolehan NKA sesuai https://monev.kemenkeu.go.id/ dengan perolehan NKA 65,19 yang terdiri dari : 1. Nilai Perencanaan Kinerja : 51,39 2. Nilai Pelaksanaan Kinerja : 78,98	Persiapan kegiatan tahun 2026	Seluruh Unit Kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

ALLAN TANDIONO
NIP 198801182025211023

LAMPIRAN V

DATA DUKUNG PER-INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 1

RASIO KONEKTIVITAS TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

DATA PERHITUNGAN RASIO KONEKTIVITAS TAHUN 2025

NO	UNIT KERJA	PKN		PKW / KSN		PELABUHAN		BANDARA		TERMINAL TIPE A		TERHUBUNG	BLM TERHUBUNG	RASIO
		TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	TERHUBUNG	BELUM TERHUBUNG	LOKASI	LOKASI	
1	**BTP Kelas I Medan**	1	3	4	4	2	2	1	1	0	0	8	10	0,44
	Provinsi Aceh		Banda Aceh		Lhokseumawe		Lhokseumawe (NAD)							
					Langsa									
	Provinsi Sumatera Utara	Mebidangro		Rantau Prapat	KSN Danau Toba	Belawan (Sumatera Utara)		Kualanamu						
				Pematang Siantar		Kuala Tanjung (Sumatera Utara)								
				Tebingtinggi										
				Kisaran										
	Provinsi Riau		Dumai		Rengat		Dumai (Riau)		Hang Nadim (Batam)					
			Pekanbaru											
2	**BTP Kelas II Padang**	1	0	1	4	1	0	1	0	0	0	4	4	0,50
	Provinsi Sumatera Barat	Perkotaan Padang - Lubuk Agung -Pariaman		Pariaman	Solok	Teluk Bayur (Sumatera Barat)		Minangkabau						
					Bukit Tinggi									
					Payakumbuh									
					Sawahlunto									
	Provinsi Bengkulu													
3	**BTP Kelas II Palembang**	2	1	6	0	1	3	1	0	0	0	10	4	0,71
	Provinsi Jambi		Jambi											
	Provinsi Sumatera Selatan	Patungraya Agung		Lubuklinggau			Tanjung Api-api (Sumatera Selatan)	SM Badarudin						
				Muara enim										
				Baturaja										
				Prabumulih										
				Lahat										
	Provinsi Lampung	Bandar Lampung		Kotabumi		Tarahan (Lampung)	Panjang (Lampung)							
							Bakauheni (Lampung)							
4	**BTP Kelas I Jakarta**	3	0	2	1	2	3	1	1	1	0	9	5	0,64
	Provinsi Banten	Serang		Rangkasbitung	Pandeglang	Merak (Banten)	Tanjung Lesung (Banten)	Soekarno-Hatta (Banten)	Panimban (Banten)	Kampung Rambutan (Jakarta)				
		Cilegon					Bojanegora (Banten)							
	Provinsi DKI Jakarta	Jabodetabek				Tanjung Priok (DKI Jakarta)	Kali Baru (DKI Jakarta)							
	Provinsi Jawa Barat			Cikampek										
5	**BTP Kelas I Bandung**	2	0	4	2	0	2	0	1	0	0	6	5	0,55
	Provinsi Jawa Barat	Cirebon		Sukabumi	Kadipaten		Cirebon (Jawa Barat)		Kertajati (Jawa Barat)					
		Bandung Raya		Indramayu	Pangandaran		Patimban (Jawa Barat)							
				Tasikmalaya										
				Cikampek-Cikopo										
6	**BTP Kelas I Semarang**	4	4	7	11	2	3	2	3	0	0	15	21	0,42
	Provinsi Jawa Tengah	Kedungsepur		Tegal	Wonosobo	Cilacap (Jawa Tengah)		Adisumarmo (Solo)	Ahmad Yani (Semarang)					
		Cilacap		Pekalongan	Kudus	Tanjung Mas (Jawa Tengah)								
		Surakarta		Cepu	Magelang									
				Purwokerto	KSN Borobudur									
				kebumen										
				klaten										
	Provinsi DIY	Yogyakarta		Sleman				Kulonprogo (Yogyakarta)						
	Kalimantan		Perkotaan Balikpapan, Samarinda, Tenggarong, Bontang		Tanjung Radeb		Banjarmasin (Kalimantan Selatan)		Syamsudin Noor (Kalsel)					
			Perkotaan Banjarmasin,Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut		Sangata		Samarinda (Kalimantan Timur)		Supadio (Kalbar)					
			Palangkaraya		Martapura		Balikpapan (Kalimantan Timur)							
			Pontianak		Mempawah									
					Singkawang									
					Sanggau									
					Muara Teweh									
7	**BTP Kelas I Surabaya**	2	5	9	8	1	4	0	3	0	0	12	20	0,38
	Provinsi Jawa Timur	Malang		Bojonegoro	Tuban	Tanjung Perak (Jawa Timur)			Juanda (Surabaya)					
		Gerbangkertosusila		Madiun	Pamekasan		Tuban (Jawa Timur)							
				Jember	Sumenep		Teluk Lamong (Jawa Timur)							
				Banyuwangi										
				Probolinggo										
				Blitar										
				Pasuruan										
				Tulungagung										
				Kediri										
	Provinsi Bali		Sarbagita		Singaraja				Ngurah Rai (Denpasar)					
					Negara									
	Papua Barat		Sorong		Manokwari		Sorong (Papua Barat)							
	Provinsi Papua		Jayapura		Sarmi		Jayapura (Papua)		Sentani (Papua)					
			Timika		Tanah Merah									
			Merauke											

REKAP DATA PANJANG JALUR
WILAYAH BALAI TEKNIK DAN BALAI PENGELOLA PERKERETAAPIAN SERTA BADAN USAHA PENYELENGGARA

NO	WILAYAH KERJA	LINTAS RAYA TERDATA			PANJANG LINTAS	LINTAS CABANG		PANJANG LINTAS	PANJANG TOTAL
		SINGLE	DOUBLE	DDT		SINGLE	DOUBLE		
1	BTP KELAS I JAKARTA	094+453	547+001	058+612	700+066	000+364	002+000	002+364	702+430
2	BTP KELAS I BANDUNG	287+087	758+392	000+000	1045+479	000+091	000+000	000+091	1045+570
3	BTP KELAS I SEMARANG	312+875	1273+058	000+000	1585+933	003+190	000+000	003+190	1589+123
4	BTP KELAS I SURABAYA	574+558	686+130	000+000	1260+688	007+209	000+000	007+209	1267+897
5	BTP KELAS I MEDAN	572+423	064+178	000+000	636+601	001+964	000+000	001+964	638+565
6	BTP KELAS II PADANG	107+221	003+866	000+000	111+087	000+000	000+000	000+000	111+087
7	BTP KELAS II PALEMBANG	350+510	589+594	000+000	940+104	007+602	000+000	007+602	947+706
8	BPKAR SUMSEL	001+051	044+698	000+000	045+749	003+000	000+000	003+000	048+749
9	BPKA SULSEL	090+132	000+000	000+000	090+132	000+000	000+000	000+000	090+132
10	MRT JAKARTA	000+000	031+400	000+000	031+400	000+687	000+000	000+687	032+087
11	LRT JAKARTA	000+000	011+600	000+000	011+600	000+814	000+000	000+814	012+414
12	LRT JABODEBEK	000+000	098+430	000+000	098+430	000+000	000+000	000+000	098+430
13	KCJB	000+000	304+930	000+000	304+930	000+000	000+000	000+000	304+930
14	FREEPORT	026+000	000+000	000+000	026+000	000+000	000+000	000+000	026+000
TOTAL		***2416+310***	***4413+277***	***058+612***	***6888+199***	***024+921***	***002+000***	***026+921***	***6915+120***

Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian

Catur Wicaksono, A.TD., M.T.
NIP 196507031991032001

REKAPITULASI TRACK QUALITY INDEX (TQI) DI JAWA DAN SUMATERA
Hasil Pengukuran Jalan Rel Menggunakan Kereta Ukur EM-120, Bratasena dan Accelerometer

Realisasi Periode III Tahun 2025

Klasifikasi TQI	Kualifikasi				Panjang Jalur	Jalur Terukur Periode II Tahun	Persentase Dibandingan Panjang Jalur		Persentase Dibandingan Panjang Terukur	
					Km	Km	Km		Km	
TQI (Kecepatan 80 s.d 120 Km/jam)	Kategori 1	Kecepatan	:	100 s.d 120 km/jam	6.008,01	6.008,01	5.686,18	**94,64**	5.686,18	**94,64**
		Kondisi	:	Nyaman						
	Kategori 2	Kecepatan	:	80 s.d 100 km/jam						
		Kondisi	:	Aman						
TQI (Kecepatan 40 s.d 80 Km/jam)	Kategori 3	Kecepatan	:	60 s.d 80 km/jam			321,83	**5,36**	321,83	**5,36**
		Kondisi	:	waspada						
	Kategori 4	Kecepatan	:	40 s.d 60 km/jam						
		kondisi	:	Bahaya						

Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian

Catur Wicaksono, A.TD., M.T.
NIP 196507031991032001

3. PERSENTASE REALISASI PERJALANAN KA DI BANDINGKAN GAPEKA

Target Realisasi Tahun 2025

REALISASI PERJALANAN KERETA API TAHUN 2025

Bulanan			Renaksi	Program		Realisasi					
						Frekuensi				Capaian	
			Bulanan	Bulanan	Kumulatif	KA Penumpang	KA Barang	Total	Total Kumulatif	Bulanan	Kumulatif
TW 1	1	Januari	95,6%	89.201	89.201	82.002	6.398	88.400	88.400	99,10%	99,10%
	2	Februari	95,6%	77.948	167.149	76.090	5.958	82.048	170.448	105,26%	101,97%
	3	Maret	95,6%	86.518	253.667	84.652	6.068	90.720	261.168	104,86%	102,96%
TW 2	4	April	95,6%	83.355	337.022	81.933	6.124	88.057	349.225	105,64%	103,62%
	5	Mei	95,6%	85.963	422.985	84.030	6.728	90.758	439.983	105,58%	104,02%
	6	Juni	95,6%	83.315	506.300	81.676	6.270	87.946	527.929	105,56%	104,27%
TW 3	7	Juli	95,6%	86.359	592.659	85.939	6.519	92.458	620.387	107,06%	104,68%
	8	Agustus	95,6%	86.143	678.802	85.453	6.744	92.197	712.584	107,03%	104,98%
	9	September	95,6%	83.496	762.298	82.834	6.532	89.366	801.950	107,03%	105,20%
TW 4	10	Oktober	95,6%	86.371	848.669	86.826	7.010	93.836	895.786	108,64%	105,55%
	11	November	95,6%	83.452	932.121	82.992	6.788	89.780	985.566	107,58%	105,73%
	12	Desember	95,6%	86.592	1.018.713	86.659	6.641	93.300	1.078.866	107,7%	105,90%

4. PERSENTASE KA TEPAT WAKTU (KEDATANGAN & KEBERANGKATAN)

Target Tahun 2025 :

JUMLAH KEDATANGAN KERETA API TEPAT WAKTU (*ON TIME PERFORMANCE*)

BULAN		RENAKSI	REALISASI		KA BERANGKAT TEPAT				KA DATANG TEPAT				RATA RATA		PERSENTASE CAPAIAN	
		Bulanan	Barang +	Kumulatif	Barang	Penumpang	Barang +	Kumulatif	Barang	Penumpang	Barang +	Kumulatif	Berangkat +	Kumulatif	Bulanan	Kumulatif
TW 1	Januari	96,2%	88.400	88.400	6.035	81.436	87.471	87.471	5.165	79.812	84.977	84.977	86.224	86.224	97,54%	97,54%
	Februari	96,2%	82.048	170.448	5.646	75.295	80.941	168.412	4.361	73.855	78.216	163.193	79.579	165.803	96,99%	97,27%
	Maret	96,2%	90.720	261.168	5.740	84.045	89.785	258.197	4.621	82.793	87.414	250.607	88.600	254.402	97,66%	97,41%
TW 2	April	96,2%	88.057	349.225	5.830	81.406	87.236	345.433	4.937	80.504	85.441	336.048	86.339	340.741	98,05%	97,57%
	Mei	96,2%	90.758	439.983	6.416	83.758	90.174	435.607	5.376	83.287	88.663	424.711	89.419	430.159	98,52%	97,77%
	Juni	96,2%	87.946	527.929	6.059	81.345	87.404	523.011	5.222	80.850	86.072	510.783	86.738	516.897	98,63%	97,91%
TW 3	Juli	96,2%	92.458	620.387	6.214	85.466	91.680	614.691	5.238	84.941	90.179	600.962	90.930	607.827	98,35%	97,98%
	Agustus	96,2%	92.197	712.584	6.350	84.552	90.902	705.593	5.120	83.739	88.859	689.821	89.881	697.707	97,49%	97,91%
	September	96,2%	89.366	801.950	6.146	82.492	88.638	794.231	5.022	81.852	86.874	776.695	87.756	785.463	98,20%	97,94%
TW 4	Oktober	96,2%	93.836	895.786	6.697	84.915	91.612	885.843	5.718	83.910	89.628	866.323	90.620	876.083	96,57%	97,80%
	November	96,2%	89.780	985.566	6.370	82.212	88.582	974.425	5.223	81.248	86.471	952.794	87.527	963.610	97,49%	97,77%
	Desember	96,2%	93.300	1.078.866	6.243	85.162	91.405	1.065.830	5.538	83.999	89.537	1.042.331	90.471	1.054.081	97,0%	97,70%

Awang Meindra

NIP 198105162002121003

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERKERETAAPIAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN

Jl. Palantikang
Kabupaten Maros 90516
Depo Kereta Api Maros

TELP: (0411) 4832272

Email: bpka_sulsel@dephub.go.id
bpka.sulsel@gmail.com

NOTA DINAS
Nomor: 27/K3-BPKASS/I/2026

Yth : Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan
Dari : Kepala Seksi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
Hal : Penyampaian Data Dukung Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 di Lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan
Tanggal : 20 Januari 2026

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Sub Bagian Tata Usaha Nomor: 32/K1-BPKASS/I/2026 tentang Undangan Rapat Pembahasan Capaian Kinerja dan Pembahasan Tugas dan Fungsi Balai TW IV tanggal 19 Januari 2026. Dalam rangka monitoring dan evaluasi serta pelaporan kinerja periode Triwulan IV Tahun 2026 pada unit kerja Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan, Bersama ini terlampir kami sampaikan rekomendasi peningkatan kinerja pada Triwulan IV Tahun 2026, sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Upaya Keberhasilan Kinerja
1.	Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	1. Melakukan Evaluasi terhadap Pelayanan terhadap Penumpang; 2. Melakukan Reservasi untuk pembelian tiket H-7 sebelum keberangkatan; dan 3. Melakukan peningkatan Pelayanan Tiket *Infant* Bagi anak di bawah usia 3 Tahun.
2.	Presentase Kedatangan dan Keberangkatan KA tepat Waktu	1. Menyampaikan Laporan Kendala/Gangguan Perjalanan Akibat Sarana Kepada Satuan Kerja Perintis Untuk Menjadi Dasar Evaluasi Kepada Operator 2. Melakukan Pengawasan Pengoperasian Sarana KRDE
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Melakukan Peningkatan Kualitas Layanan yang ramah dan profesional; 2. Melakukan peningkatan fasilitas baik di kereta ataupun di stasiun. 3. Melakukan sosialisasi tiket *infant* pada sistem penjualan tiket KA Makpar

Selanjutnya, terlampir data dukung angkutan penumpang, realisasi perjalanan Kereta Api dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Rachmat Dalu
NIP. 197006261993031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Nota Dinas:

Nomor : 27/K3-BPKASS/I/2026

Tanggal : 20 Januari 2026

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

No	Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025												Rata-rata
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1.	3.37	3.28	3.38	3.43	3.46	3.30	3.30	3.48	3.23	3.16	3,17	3.12	3.31

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
BADAN LAYANAN UMUM
BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN
Jl. Noerdin Pandji, Jakabaring Selatan, Rambutan, Kabupaten, Banyuasin, Sumatera Selatan 30967
Telp : 0711-5542499
Fax : 0711-5542499
Email : BalailrtsumseI@dephub.go.id

Nomor : UM.006/1/9/BPKAR-SS/2026 Palembang, 12 Januari 2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Periode Oktober - Desember 2025

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Berdasarkan Amanat Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan selaku Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bertanggung jawab melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terlampir disampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Mandiri Persepsi Anti Korupsi dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Periode Oktober - Desember 2025 pada Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan.

Atas perkenan dan arahan lanjut Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Balai,

Rode Paulus G.P, S.Si.T., M.T.
NIP. 197511091999031002

Tembusan:
1. Kasubbag Keuangan dan Umum, BPKARSS;
2. Kepala Seksi Pemanfaatan Sarpras, BPKARSS.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN SURVEI
PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN
SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN
OKTOBER S.D DESEMBER 2025
BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dalam rangka mendukung tugas Kementerian Perhubungan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas, maka berdasarkan amanat Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, Unit Penyelenggara Pelayanan Publik bertanggung jawab melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Kegiatan survei tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Kegiatan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan secara *real time* melalui Aplikasi 3AS *(Transparant, Informative, Great, Action, Actual and Synergy) Case Survey Management System (CSMS)*. Kegiatan survei tersebut dilakukan terhadap penerima pelayanan publik yang telah selesai menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan.

Semoga dengan adanya laporan Survei Kepuasan Masyarakat ini, percepatan program peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan Kementerian Perhubungan menjadi lebih terukur, sehingga perbaikan kualitas layanan lebih tepat sasaran dan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kepala Balai,



Rode Paulus G.P., S.Si.T., M.T.
NIP. 197511091999031002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN

BAB I

KUESIONER SURVEI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, serta menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu sub aksi pada Reformasi Birokrasi adalah pembangunan Zona Integritas (ZI). Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan pegawainya berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) khususnya dalam penegakan integritas dan pelayanan yang berkualitas.

Ketentuan terkait pembangunan Zona Integritas diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah yang setiap pimpinan instansi pemerintah diminta untuk menetapkan unit kerja yang diusulkan meraih predikat WBK/WBBM.

Proses Pembangunan Zona Integritas difokuskan pada enam area perubahan yang salah satunya adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaran pelayanan publik yang ditandai dengan meningkatnya indeks kepuasan masyarat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu dilakukan penilaian kepuasan terhadap pelayanan oleh masing-masing Unit Kerja yang disebut dengan Survei Kepuasan Masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.1 Pengukuran tersebut dilakukan dengan melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) serta Integritas di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan memanfaatkan Aplikasi 3AS *(Transparant, Informative, Great, Action, Actual and Synergy) Case Survey Management System (CSMS)*. Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau *handphone* masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui https://skm.dephub.go.id/.

Kuesioner yang tersedia dalam Aplikasi 3AS *(Transparant, Informative, Great, Action, Actual and Synergy) Case Survey Management System (CSMS)* mengandung setiap unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan peraturan sebagaimana dimaksud, meliputi:

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
3. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman;
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha,pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (komputer,mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Instrumen yang digunakan dalam Aplikasi 3AS *(Transparant, Informative, Great, Action, Actual and Synergy) Case Survey Management System (CSMS)* diadopsi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023. Terdapat 13 pertanyaan yang terdiri dari 8 (delapan) pertanyaan tentang persepsi kualitas layanan dan 5 (lima) pertanyaan tentang persepsi anti korupsi yang secara lengkap dapat dilihat pada Kuesioner berikut:

Kuesioner Survei IKM – IPK

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kementerian Perhubungan melakukan survei pelayanan publik. Mohon kesediaan untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan penilaian yang Bapak/Ibu/Saudara alami selama menggunakan layanan pada

Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan

Harap jawab setiap pertanyaan sejujur mungkin. Semua jawaban dirahasiakan.

Terima kasih atas kerja sama anda.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

I. KUALITAS LAYANAN

Pada bagian ini, kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait kualitas pemberian pelayanan pada unit layanan ini

1. Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sistem informasi pelayanan selalu tersedia dan dapat menjawab kebutuhan pengguna layanan, sistem informasi pelayanan mudah digunakan, serta sistem informasi pelayanan memiliki fasilitas interaktif dan FAQ.]



2. Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi persyaratan layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan persyaratan pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



3. Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi prosedur/alur layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan produk/jenis pelayanan, serta penerapan prosedur/alur pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



4. Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi jangka waktu penyelesaian pelayanan dapat dipahami dengan jelas, jangka waktu penyelesaian pelayanan tersebut wajar, dan jangka waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.]



5. Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi biaya pelayanan dapat dipahami dengan jelas dan biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai dengan yang diinformasikan, termasuk apabila biaya pelayanan diinformasikan gratis memang benar tidak dilakukan pembayaran.]



6. Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan

[Pertanyaan ini disampaikan untuk melihat apakah unit layanan memiliki sarana prasarana pendukung pelayanan seperti ruang khusus pelayanan, ruang tunggu, tempat parkir gratis, ruang bermain anak, ruang ibadah, toilet khusus pengguna layanan dan sarana bagi yang berkebutuhan khusus.]



7. Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah petugas mampu memberikan respon pelayanan dengan cepat kepada pengguna layanan baik melalui tatap muka langsung, maupun melalui aplikasi layanan daring, petugas mudah dikenali (memakai seragam, tanda pengenal, dll), petugas melayani dengan ramah (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun)]



8. Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses

[Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sarana layanan konsultasi dan pengaduan beragam (tempat konsultasi dan pengaduan/hotline/call center/media online), prosedur untuk melakukan konsultasi dan pengaduan mudah, respon konsultasi dan pengaduan cepat serta tindak lanjut proses penanganan konsultasi dan pengaduan jelas.]



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

II. PERILAKU PENYIMPANGAN

Pada bagian ini, kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait perilaku petugas pelayanan yang menyimpang pada unit layanan ini.

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya.]



2. Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.]



3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transpor, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parsel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan.]



4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada Petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (Pungli bisa dikamuflasekan melalui berbagai istilah seperti “uang administrasi”, “uang rokok”, “uang terima kasih”, dsb).]



5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini

[Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui apakah ada praktik percaloan (Pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai).]



III. EVALUASI DAN PERBAIKAN

1. Sebelum menjawab survei ini, apakah ada pegawai/pejabat pada unit layanan ini yang mengarahkan Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban yang bagus-bagus/baik-baik saja?

Pengarahan Petugas/ Pegawai

- ○ Ya
- ○ Tidak

2. Bagaimana penlilaian Bapak/ Ibu terhadap pilihan dibawah ini yang perlu diperbaiki pada unit layanan ini

[Silahkan pilih bagian yang perlu diperbaiki pada unit layanan ini. Jawaban bisa dipilih lebih dari 1 (satu)]

- ☐ Kebijakan Pelayanan
- ☐ Profesionalisme SDM
- ☐ Kualitas Sarana Prasarana
- ☐ Sistem Informasi dan Pelayanan Publik
- ☐ Konsultasi dan Pengaduan
- ☐ Penghilangan Praktik Pungli
- ☐ Penghilangan Praktik Diluar Prosedur
- ☐ Penghilangan Praktik Percaloan
- ☐ Tidak ada yang perlu diperbaiki

Tanda Tangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II

METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara real time dengan memanfaatkan Aplikasi 3AS *(Transparant, Informative, Great, Action, Actual and Synergy) Case Survey Management System (CSMS)*. Penggunaan Aplikasi 3AS *(Transparant, Informative, Great, Action, Actual and Synergy) Case Survey Management System (CSMS)* sebagai tools pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) diharapkan dapat menganalisis data kualitatif secara langsung sehingga perbaikan atas pelayanan publik yang menjadi keluhan di tengah masyarakat dapat ditanggulangi dengan cepat dan tepat.

Pengumpulan data survei kepuasan masyarakat dilaksanakan di seluruh satuan kerja Kementerian Perhubungan baik di tingkat pusat maupun daerah secara periodik setiap bulan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden/masyarakat sebagai penerima atau pengguna layanan, secara daring atau online melalui komputer, laptop, atau *handphone* masing-masing pada laman web e-survei yang tersedia secara real time dan hasilnya otomatis dikirimkan melalui https://skm.dephub.go.id/.

Responden SPAK dan SPKP adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan. Dalam pelaksanaan survei, ditentukan sampel jumlah responden berdasarkan populasi pengguna layanan setiap bulannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, mensyaratkan responden minimal survei berjumlah 30 responden. Apabila penerima layanan dari Unit Kerja kurang dari 30 orang karena memang karakter Unit Kerja yang bukan pelayanan publik, maka tim melaksanakan survei akan menentukan dengan jumlah tertentu sesuai kaidah perhitungan statistik. Jumlah minimal responden SPAK dan SPKP setiap Unit Kerja ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah perhitungan statistik, yakni mengacu pada populasi pengguna layanan dalam satu bulan.

- Contoh perhitungan menggunakan Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = Jumlah sample (responden)

N = Jumlah Populasi (Pengguna layanan Satu Bulan)

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sample yang masih dapat ditolerir (contoh 5%)

Jika dalam satu bulan terdapat 150 pengguna layanan dan margin kesalahan yang ditentukan adalah 5% atau 0,05, maka perhitungannya adalah:

n = N / {1 + (N x e2)}

n = 150 / {1 + (150 x 0,052)}

n = 109,09

Dengan demikian, ukuran responden minimal dari populasi 150 pengguna layanan adalah sebanyak 109 responden.

- Untuk memudahkan perhitungan dapat pula menggunakan tabel sample dari **Krejcie and Morgan** (Permenpan-RB No 14 Tahun 2017):

Tabel Sampel Morgan dan Krejcie

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	340	181	2600	331
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	100000	384

a. Responden SPAK-SPKP Unit Utama Kementerian Perhubungan adalah : Pengguna Layanan di Unit Utama Kementerian Perhubungan.
b. Responden SPAK-SPKP Unit Wilayah
c. Responden SPAK-SPKP Unit Pelaksana Teknis

B. Metode Pencacahan

Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan secara mandiri oleh unit pemberi layanan, baik di tingkat Unit Utama, Unit Wilayah, maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pengisian SKM dilakukan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan atau penerima layanan dilakukan melalui Aplikasi 3AS *(Transparant, Informative, Great, Action, Actual and Synergy) Case Survey Management System (CSMS)*, dengan cara melakukan *scan barcode* pada unit pemberi layanan atau dengan cara mengakses link survei yang diberikan oleh petugas layanan.

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Untuk memperoleh nilai hasil survei dilakukan perhitungan otomatis oleh sistem yang terdapat dalam Aplikasi 3AS *(Transparant, Informative, Great, Action, Actual and Synergy) Case Survey Management System (CSMS)*, dengan berpedoman pada PermenPAN-RB Nomor 14 tahun 2017. Dalam aturan tersebut digunakan pendekatan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian, yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus “Hasil SKM Unit Pelayanan x 25”. Dengan demikian, nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, dan mutu serta kinerja unit pelayanan digambarkan sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

D. Pengolahan Data

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumah Bobot}}{\text{Jumah Unsur}} = \frac{1}{x} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumah Bobot}}{\text{Jumah Unsur}} = \frac{1}{3} = 0{,}07$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Tota Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III

PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

1. Hasil II. KUALITAS PELAYANAN - IKM pada Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan

Data Hasil II. KUALITAS PELAYANAN - IKM Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan

No.	Bulan	Nilai IKM	Jumlah Responden	Informasi	Persyaratan	Prosedur/Alur	Waktu Penyelesaian	Tarif/Biaya	Sarana Prasarana	Respon	Konsultasi dan Pengaduan
1	Oktober	3.90	292	3.87	3.90	3.91	3.90	3.93	3.87	3.91	3.91
2	November	3.92	145	3.91	3.90	3.93	3.91	3.93	3.93	3.91	3.91
3	Desember	3.92	141	3.91	3.93	3.93	3.92	3.94	3.91	3.91	3.90
Nilai Agregat		**3.91**	**578**	**3.90**	**3.91**	**3.93**	**3.91**	**3.94**	**3.90**	**3.91**	**3.91**

Pada pelaksanaan survei periode Oktober s.d Desember 2025, Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.91 dalam skala 4 atau 17.12 dalam skala 17.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan telah memperoleh kategori Sangat Baik.

Secara lebih rinci, terdapat 8 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IKM) Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan pada periode Oktober s.d Desember 2025. Unsur Informasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Persyaratan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Prosedur/Alur memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Waktu Penyelesaian memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Tarif/Biaya memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Sarana Prasarana memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Respon memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Konsultasi dan Pengaduan memperoleh kategori Sangat Baik.

2. Hasil III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK pada Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan

Data Hasil III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan

No.	Bulan	Nilai IPK	Jumlah Responden	Diskriminasi	Kecurangan	Gratifikasi	Pungli	Calo
1	Oktober	3.92	292	3.91	3.92	3.92	3.91	3.93
2	November	3.94	145	3.95	3.95	3.93	3.95	3.93
3	Desember	3.94	141	3.94	3.94	3.94	3.94	3.95
Nilai Agregat		**3.93**	**578**	**3.93**	**3.94**	**3.93**	**3.93**	**3.94**

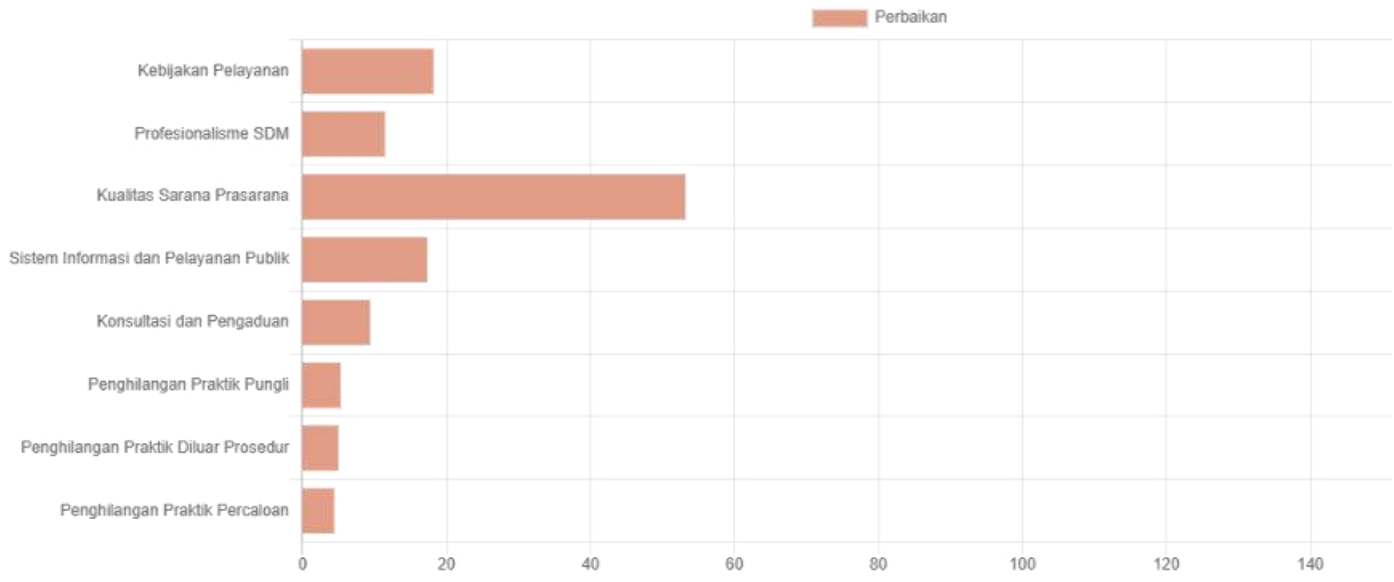
Pada pelaksanaan survei periode Oktober s.d Desember 2025, Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan secara agregat atau rata-rata memperoleh nilai 3.93 dalam skala 4 atau 17.21 dalam skala 17.50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan telah memperoleh kategori Sangat Baik.

Secara lebih rinci, terdapat 5 unsur yang menjadi penyumbang nilai agregat atau rata-rata (IPK) Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan pada periode Oktober s.d Desember 2025. Unsur Diskriminasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Kecurangan memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Gratifikasi memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Pungli memperoleh kategori Sangat Baik, Unsur Calo memperoleh kategori Sangat Baik.

Dengan Perolehan hasil II. KUALITAS PELAYANAN, III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN pada Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan tersebut, Unit Kerja/ Satuan Kerja Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan telah memenuhi syarat nilai minimal pengusulan WBK

3. Aspek Usulan Perbaikan dari Masyarakat dan Indikatornya

Berdasarkan data pada aplikasi Survei 3AS *Case Survey Management System (CSMS)*, terdapat usulan perbaikan yang disampaikan oleh responden, terhadap beberapa aspek indikator penilaian dalam survei yang tergambar dalam diagram berikut:



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Berdasarkan analisa hasil survei, terdapat beberapa indikator yang dilakukan tindak lanjut yaitu sebagai berikut:

1. Informasi

- Menyediakan nomor help desk yang sigap dalam menjawab kebutuhan informasi pengguna layanan;
- Menciptakan konten informasi pelayanan yang menarik di media sosial;
- Memastikan pengumuman tentang informasi pelayanan mudah diakses oleh masyarakat.

2. Sarana Prasarana

- Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Dasar dalam pelaksanaan pemberian layanan, seperti komputer, jaringan internet, dan sarana pendukung lainnya, serta ruangan pelayanan yang memadai (loket pelayananan, ruang tunggu, toilet dan prasarana lainnya);
- Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung dalam pelaksanaan pemberian layanan disediakan/diadakan selama mempercepat dan mendukung kenyamanan penerima layanan;
- Kebersihan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dilakukan secara berkala oleh petugas yang berkompeten.

3. Konsultasi dan Pengaduan

- Adanya loket/segmen khusus konsultasi dan pengaduan didalam tempat pemberian layanan;
- Semua jenis konsultasi dan pengaduan yang dilayani dituangkan kedalam sebuah daftar/matriks, sebagai prioritas perbaikan layanan dan peningkatan kualitas layanan;
- Melakukan telaahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kepada pimpinan terkait konsultasi dan laporan pengaduan yang telah ditindaklanjuti.

4. Respon

- Adanya kejelasan dan ketepatan waktu dalam memberikan layanan, untuk dapat menciptakan kondisi ini diperlukan standar operasional prosedur dan terinternalisasi kepada seluruh petugas sehingga dapat mengerti kebutuhan masyarakat dan tanggap dalam menangani masalah pelanggan (masyarakat);
- Petugas Front Office harus dapat bertindak cepat dan cekatan dalam memberikan layanan dan menangani masalah yang dihadapi pelanggan;
- Petugas diwajibkan untuk memberikan 3S (Senyum, Sapa, Salam) dalam melayani masyarakat, dan menempatkan masyarakat sebagai "orang yang istimewa".

5. Persyaratan

- Persyaratan pelayanan dimuat secara lengkap pada informasi pelayanan;
- Sinkronisasi persyaratan yang dimuat pada website atau pun media sosial lainnya dengan persyaratan yang ada di tempat layanan;
- Persyaratan yang menyulitkan masyarakat perlu dievaluasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Tgl. Survei	Nama	Nomor Handphone	Pekerjaan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Jenis Layanan yang diterima
569	Selasa, 30 Desember 2025 Jam 11:49	Rendi Pangalila	082378913654	Pengadilan agama	18-20 Tahun	Laki-Laki	Strata 1 (S1)	Tidak Memilih Jenis layanan
570	Selasa, 30 Desember 2025 Jam 11:51	Amellia	089661057235	Operator TK	21-30 Tahun	Perempuan	Strata 1 (S1)	Tidak Memilih Jenis layanan
571	Selasa, 30 Desember 2025 Jam 11:53	Siti Aisyah Nadhifah	0895344608656	pelajar	18-20 Tahun	Perempuan	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Tidak Memilih Jenis layanan
572	Selasa, 30 Desember 2025 Jam 12:27	nidy	082175221010	mahasiswa	21-30 Tahun	Perempuan	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Tidak Memilih Jenis layanan
573	Selasa, 30 Desember 2025 Jam 15:46	Ahmad Nurhadi yusuf	85609021747	Pelajar	18-20 Tahun	Laki-Laki	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Tidak Memilih Jenis layanan
574	Selasa, 30 Desember 2025 Jam 17:49	Bela	085832810244	PNS	21-30 Tahun	Perempuan	Strata 2 (S2)	Tidak Memilih Jenis layanan
575	Rabu, 31 Desember 2025 Jam 08:45	nuzula suci	082179204732	mahasiswa	21-30 Tahun	Perempuan	Strata 1 (S1)	Tidak Memilih Jenis layanan
576	Rabu, 31 Desember 2025 Jam 10:29	Wahyudi saputra	088287793284	TNI	21-30 Tahun	Laki-Laki	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Tidak Memilih Jenis layanan
577	Rabu, 31 Desember 2025 Jam 11:28	Fani	082387536073	Swasta	21-30 Tahun	Laki-Laki	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Tidak Memilih Jenis layanan
578	Rabu, 31 Desember 2025 Jam 13:32	KHAUTAL NAYOTTAMA SUSILO	83807517163	Mahasiswa	18-20 Tahun	Laki-Laki	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Tidak Memilih Jenis layanan

B. DATA DUKUNG LAINNYA

1. HASIL AGREGAT SURVEI OKTOBER S.D DESEMBER 2025

Jumlah Responden : 578

II. KUALITAS PELAYANAN - IKM

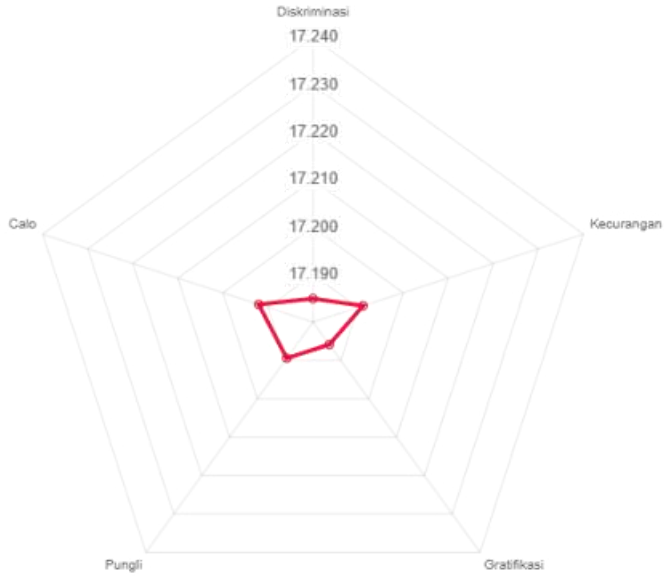
Variabel	Indek	Indek 100	Indek 4	Predikat
Informasi	17.04	97.38	3.90	Sangat Baik
Persyaratan	17.11	97.77	3.91	Sangat Baik
Prosedur/Alur	17.17	98.13	3.93	Sangat Baik
Waktu Penyelesaian	17.11	97.78	3.91	Sangat Baik
Tarif/Biaya	17.22	98.41	3.94	Sangat Baik
Sarana Prasarana	17.08	97.57	3.90	Sangat Baik
Respon	17.11	97.74	3.91	Sangat Baik
Konsultasi dan Pengaduan	17.09	97.64	3.91	Sangat Baik
IKM	**17.12**	**97.80**	**3.91**	**Sangat Baik**



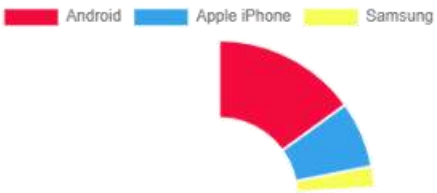
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN - IPK

Variabel	Indek	Indek 100	Indek 4	Predikat
Diskriminasi	17.20	98.27	3.93	Sangat Baik
Kecurangan	17.22	98.39	3.94	Sangat Baik
Gratifikasi	17.20	98.29	3.93	Sangat Baik
Pungli	17.21	98.35	3.93	Sangat Baik
Calo	17.22	98.41	3.94	Sangat Baik
IPK	**17.21**	**98.34**	**3.93**	**Sangat Baik**

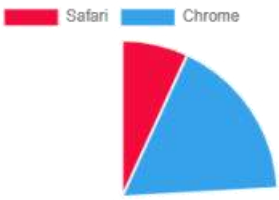


2. Penggunaan Perangkat



Android : 360
Apple iPhone : 165
Samsung : 53

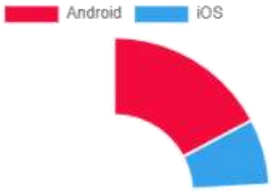
3. Penggunaan Peramban (*Browswer*) Perangkat



Safari : 165
Chrome : 413

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Penggunaan (*Platform Operating System*)



Android	:	413
iOS	:	165

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK OKTOBER 2025

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN

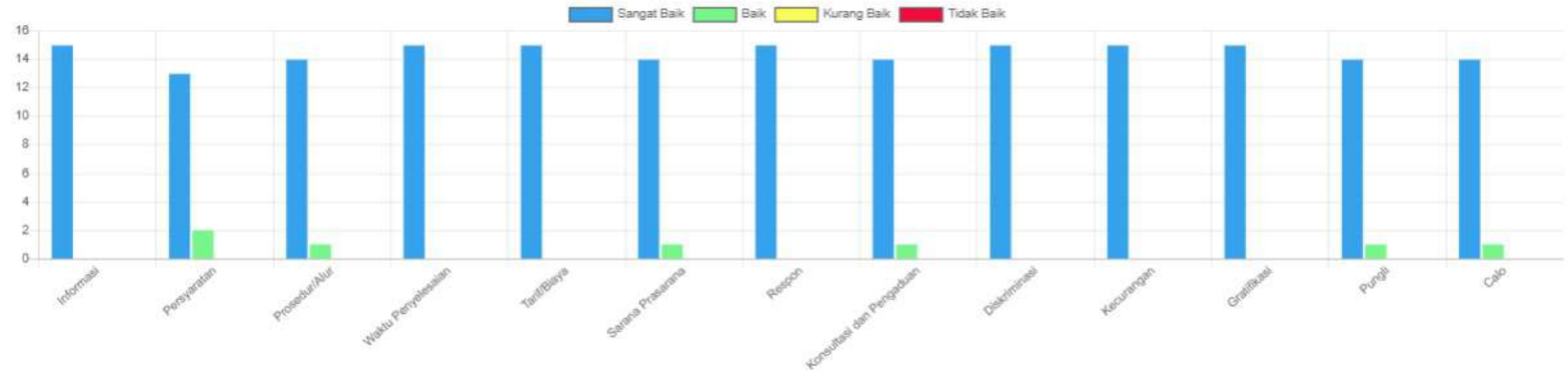
II. KUALITAS PELAYANAN
(IKM)
17.39/17.50
99.38/100 3.98/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN
(IPK)
17.43/17.50
99.60/100 3.98/4

Responden
15

Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik

IKM/ IPK



Dashboard

skm.dephub.go.id/survey/dashboard#

ABSEN DJKA | ABSEN SKEMARAJA | Sertifikasi SDM Perk... | Daftar nama kesetar... | Generator Ringkasa... | Tactiq | Meeting not...

3AS Case Survey Management System | Log out

Deni Fathurahman
Penyusun Bahan Evaluasi dan Laporan Akreditasi Kelembagaan/Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

- Laman
- Survei

Dashboard

Survei / Hasil / Dashboard

SURVEI

- IKM/ IPK — IKM-IPK Januari 2026
- IKM/ IPK — IKM-IPK Desember 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK November 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK Oktober 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK September 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK Agustus 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK Juli 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK Juni 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK Mei 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK April 2025
- IKM/ IPK

< > 1 - 20 dari ?

Copy | Share Infografis

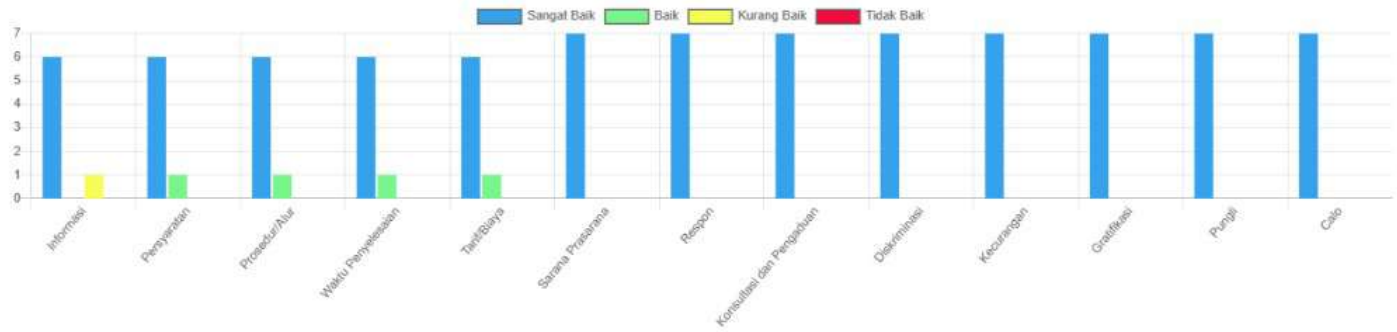
SURVEI IKM-IPK OKTOBER 2025
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
17.22/17.50	17.50/17.50
98.39/100 · 3.94/4	100/100 · 4/4

Responden: 7

Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik

IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

17.22/17.50 | 98.39/100 | 3.94/4



Exposure & Habits | Internal Portal | SRIKANDI | (200) Idgitaf - Sedia Aku Se | Dashboard

skm.depHub.go.id/survey/dashboard#

3AS Case Survey Management System | Log out

Akbarani Cantika
Pranata Hubungan Masyarakat

- Laman
- Survei

Dashboard

Survei / Hasil / Dashboard

SURVEI

- **IKM/ IPK** IKM-IPK Januari 2026
- **IKM/ IPK** IKM-IPK Desember 2025
- **IKM/ IPK** IKM-IPK November 2025
- **IKM/ IPK** IKM-IPK Oktober 2025
- **IKM/ IPK** IKM-IPK September 2025
- **IKM/ IPK** IKM-IPK Agustus 2025
- **IKM/ IPK** IKM-IPK Juli 2025
- **IKM/ IPK** IKM-IPK Juni 2025

Copy | Share Infografis

SURVEI IKM-IPK OKTOBER 2025

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

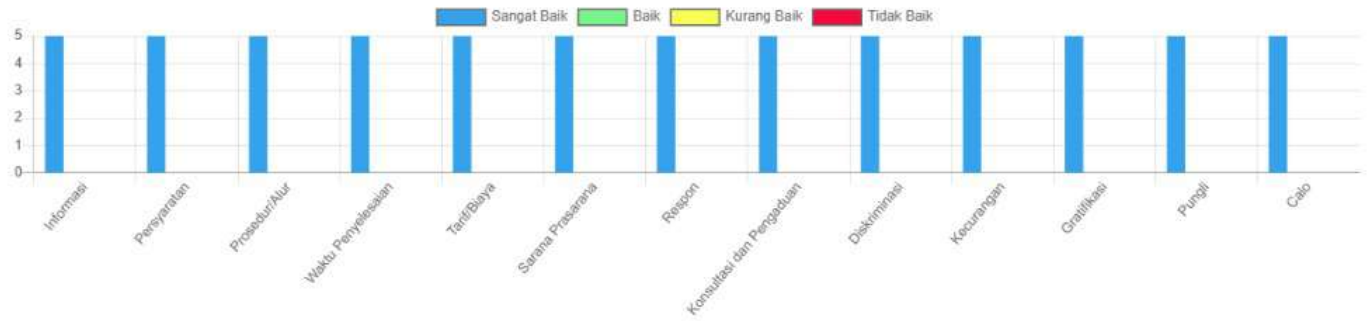
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
17.50/17.50
100/100 4/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
17.50/17.50
100/100 4/4

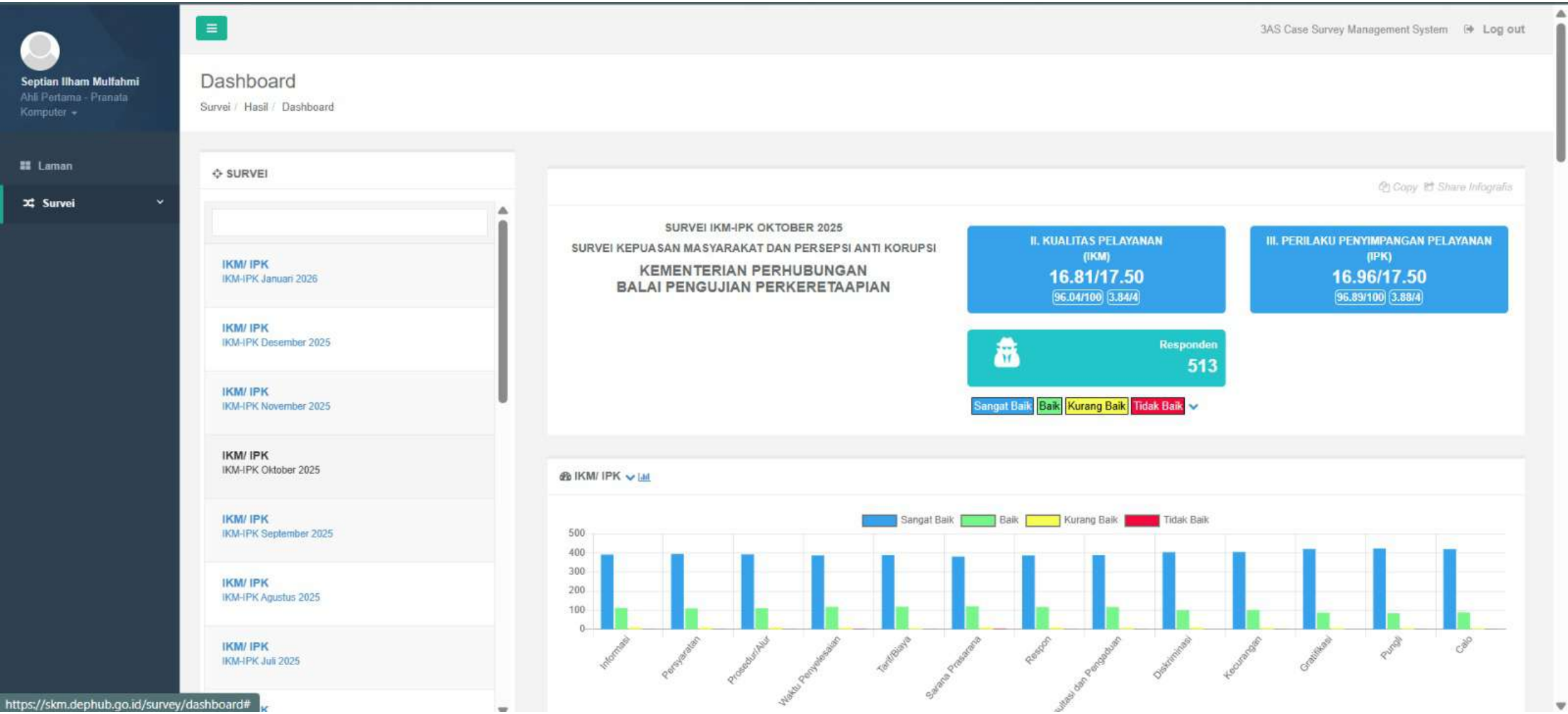
Responden
5

Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik

IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL


Septian Ilham Mulfahmi
Ahli Pertama - Pranata Komputer
Laman
Survei
3AS Case Survey Management System
Log out
Dashboard
Survei / Hasil / Dashboard
SURVEI
IKM/ IPK
IKM-IPK Januari 2026
IKM/ IPK
IKM-IPK Desember 2025
IKM/ IPK
IKM-IPK November 2025
IKM/ IPK
IKM-IPK Oktober 2025
IKM/ IPK
IKM-IPK September 2025
IKM/ IPK
IKM-IPK Agustus 2025
IKM/ IPK
IKM-IPK Juli 2025
Copy
Share Infografis
SURVEI IKM-IPK OKTOBER 2025
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
16.81/17.50
96.04/100
3.84/4
III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
16.96/17.50
96.89/100
3.88/4
Responden
513
Sangat Baik
Baik
Kurang Baik
Tidak Baik
IKM/ IPK
Sangat Baik
Baik
Kurang Baik
Tidak Baik
500
400
300
200
100
0
Informasi
Persyaratan
Prosedur/Alur
Waktu Penyelesaian
Tarif/Biaya
Sarana Prasarana
Respon
Diskriminasi
Kecurangan
Gratifikasi
Pungli
Calo
https://skm.dephub.go.id/survey/dashboard#

Dashboard | 3AS Case Survey Manageme | 3AS Case Survey Manageme | Histori Download

skm.dephub.go.id/survey/dashboard#

3AS Case Survey Management System | Log out

Septyana Wisnu Riyatama
Pemroses Data dan Laporan

- Laman
- Survei

Dashboard

Survei / Hasil / Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK Januari 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Desember 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK November 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Oktober 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK September 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Agustus 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Juli 2025

Copy | Share Infografis

SURVEI IKM-IPK OKTOBER 2025

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN

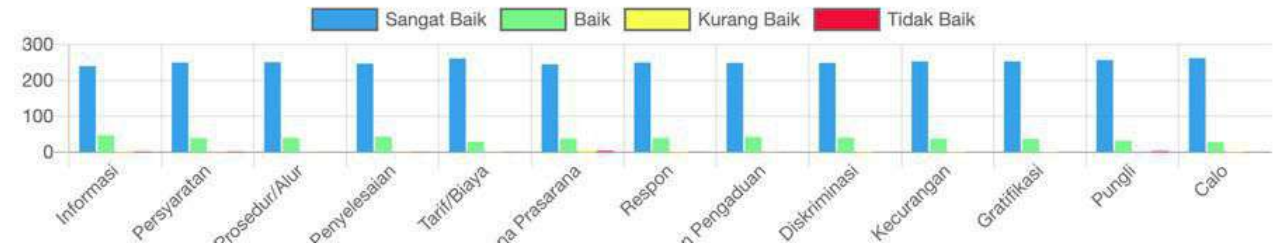
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
17.06/17.50
97.50/100 | 3.90/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
17.13/17.50
97.89/100 | 3.92/4

Responden
292

Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik

IKM/ IPK



Andre Budi Dharmawan
Pengelola Kepegawaian

Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK Januari 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Desember 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK November 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Oktober 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK September 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Agustus 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Juli 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Juni 2025

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK OKTOBER 2025

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

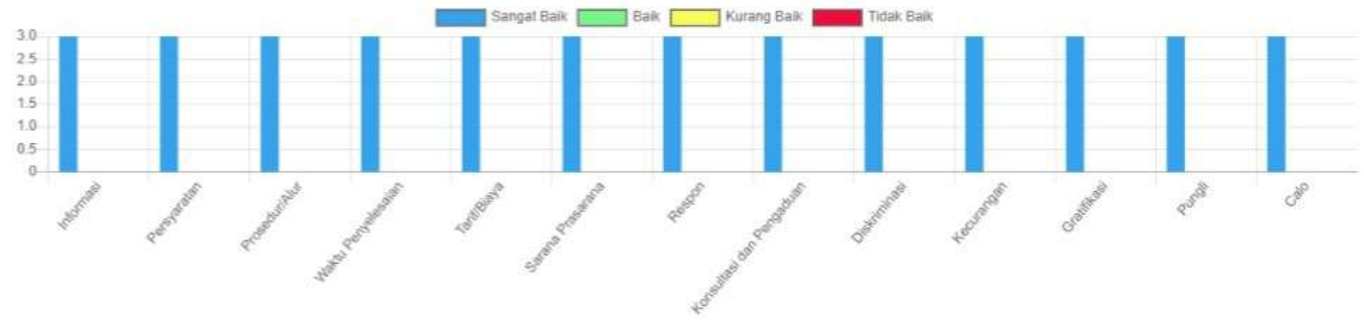
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
17.50/17.50
100/100 4/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
17.50/17.50
100/100 4/4

Responden
3

Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik

IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

Dashboard

Survei / Hasil / Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK Januari 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Desember 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK November 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Oktober 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK September 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Agustus 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Juli 2025

1 - 20 dari 7

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK NOVEMBER 2025

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

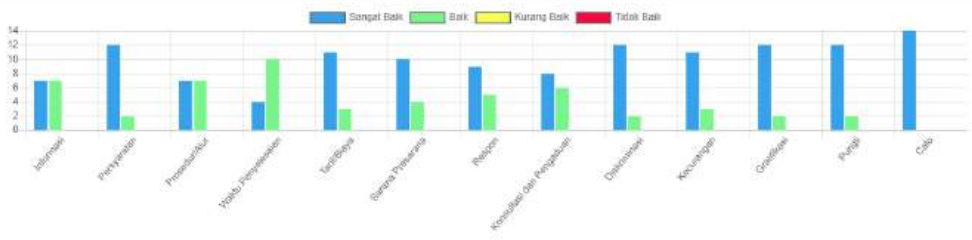
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
16.47/17.50
94.11/100 3.76/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
17.16/17.50
98.07/100 3.92/4

Responden
14

Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik

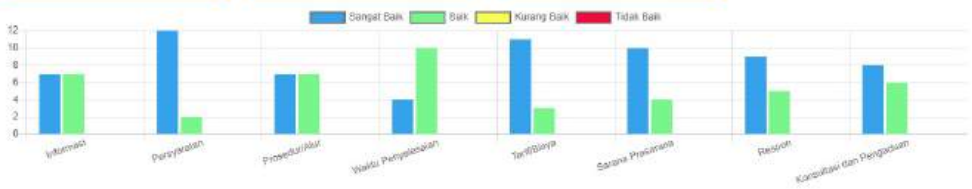
IKM/ IPK



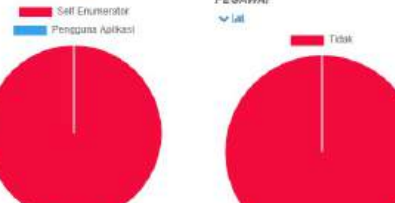
UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

16.47/17.50 | 94.11/100 | 3.76/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Se
Informasi	16.19	16.77	-0.58	16.97	-0.78	16.91	-0.72	16.97	-
Persyaratan	17.13	16.76	0.37	17.13	0	16.98	0.15	17.13	-
Prosedur/Alur	16.19	16.79	-0.60	16.98	-0.79	16.96	-0.77	16.98	-
Waktu Penyelesaian	15.63	16.72	-1.09	16.77	-1.14	16.80	-1.17	16.77	-
Tarif/Biaya	16.94	16.80	0.14	17.11	-0.17	17	-0.06	17.11	-
Sarana Prasarana	16.75	16.63	0.12	17.19	-0.44	16.99	-0.24	17.19	-
Respon	16.56	16.79	-0.23	16.94	-0.38	16.94	-0.38	16.94	-
Konsultasi dan Pengaduan	16.38	16.75	-0.37	16.89	-0.51	16.92	-0.54	16.89	-

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.16/17.50 | 98.07/100 | 3.92/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

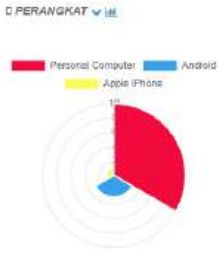


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Se
Diskriminasi	17.13	16.87	0.26	17.18	-0.05	17.06	0.07	17.18	-
Kecurangan	16.94	16.87	0.07	17.15	-0.21	17.12	-0.18	17.15	-
Gratifikasi	17.13	16.87	0.26	17.18	-0.05	17.12	0.01	17.18	-
Pungli	17.13	16.90	0.23	17.16	-0.03	17.18	-0.05	17.16	-
Calo	17.50	16.87	0.63	17.24	0.26	17.15	0.35	17.24	-

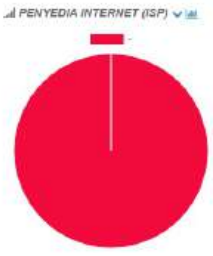
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

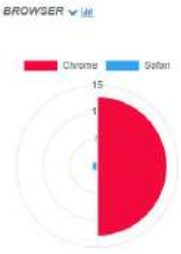
PERANGKAT



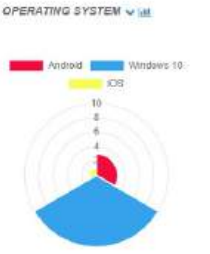
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER



OPERATING SYSTEM

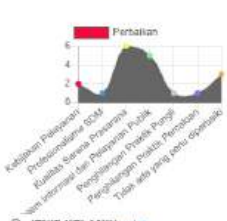


PROFIL RESPONDEN

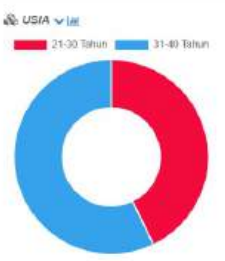
PENCACAHAN

PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI

PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

Survei / Hasil / Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK Januari 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Desember 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK November 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Oktober 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK September 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Agustus 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Juli 2025

1 - 20 dari 7

Copy | Share Infografis

SURVEI IKM-IPK NOVEMBER 2025
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN

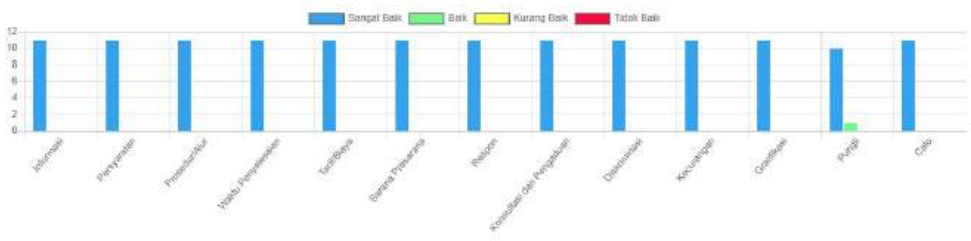
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
17.50/17.50
100/100 | 4/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
17.45/17.50
99.73/100 | 3.99/4

Responden
11

Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik

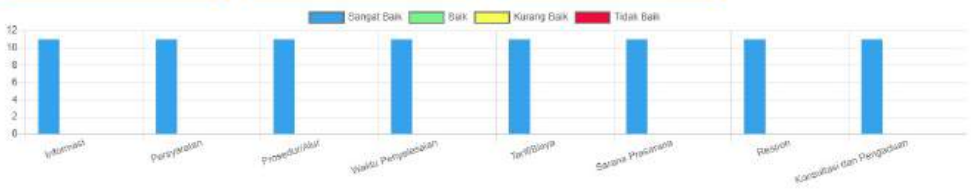
IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

17.50/17.50 | 100/100 | 4/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	S
Informasi	17.50	16.77	0.73	16.97	0.53	16.91	0.59	16.97	
Penyiaratan	17.50	16.76	0.74	17.13	0.37	16.98	0.52	17.13	
Prosedur/Alur	17.50	16.79	0.71	16.98	0.52	16.96	0.54	16.98	
Waktu Penyelesaian	17.50	16.72	0.78	16.77	0.73	16.80	0.70	16.77	
Tarif/Biaya	17.50	16.80	0.70	17.11	0.39	17	0.50	17.11	
Sarana Prasarana	17.50	16.63	0.87	17.19	0.31	16.99	0.51	17.19	
Respon	17.50	16.79	0.71	16.94	0.56	16.94	0.56	16.94	
Konsultasi dan Pengaduan	17.50	16.75	0.75	16.89	0.61	16.92	0.58	16.89	

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.45/17.50 | 99.73/100 | 3.99/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

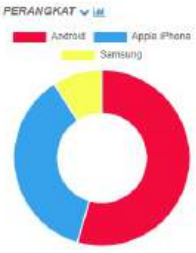


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Se
Diskriminasi	17.50	16.87	0.63	17.18	0.32	17.06	0.44	17.18	
Kecurangan	17.50	16.87	0.63	17.15	0.35	17.12	0.38	17.15	
Gratifikasi	17.50	16.87	0.63	17.18	0.32	17.12	0.38	17.18	
Pungli	17.26	16.90	0.36	17.16	0.10	17.18	0.08	17.16	
Calo	17.50	16.87	0.63	17.24	0.26	17.15	0.35	17.24	

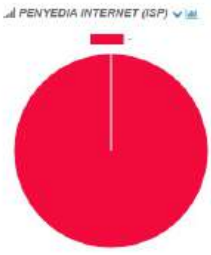
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

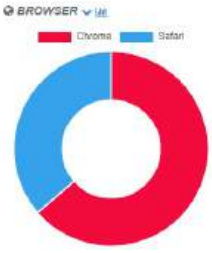
PERANGKAT



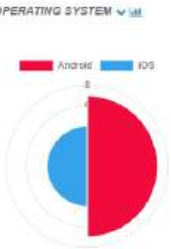
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER

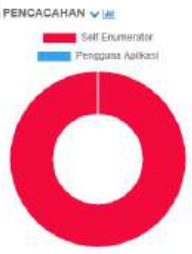


OPERATING SYSTEM



PROFIL RESPONDEN

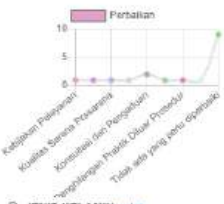
PENCACAHAN



PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



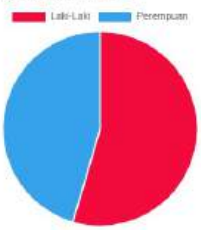
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

Survei / Hasil / Dashboard

SURVEI

- IKM/ IPK — IKM-IPK Januari 2026
- IKM/ IPK — IKM-IPK Desember 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK November 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK Oktober 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK September 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK Agustus 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK Juli 2025

1 - 20 dari 7

Copy | Share Infografis

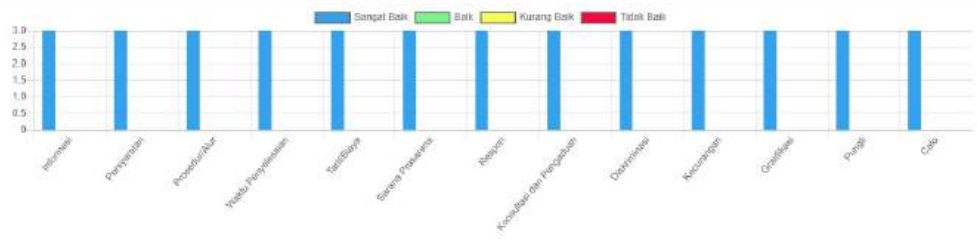
SURVEI IKM-IPK NOVEMBER 2025
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
17.50/17.50	17.50/17.50
100/100 4/4	100/100 4/4

Responden: 3

Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik

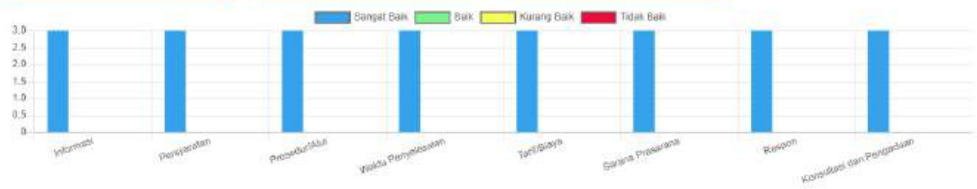
IKM/ IPK — List



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM) — List

17.50/17.50 | 100/100 | 4/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP — List
ANALISIS GAP INDEKS 100 — List
ANALISIS GAP INDEKS 4 — List
ANALISIS GAP VARIABEL — List



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Informasi	17.50	16.77	0.73	16.97	0.53	16.91	0.59	16.97	
Penyesatan	17.50	16.76	0.74	17.13	0.37	16.98	0.52	17.13	
Prosedur/Alur	17.50	16.79	0.71	16.98	0.52	16.96	0.54	16.98	
Waktu Penyelesaian	17.50	16.72	0.78	16.77	0.73	16.80	0.70	16.77	
Tarif/Biaya	17.50	16.80	0.70	17.11	0.39	17	0.50	17.11	
Sarana Prasarana	17.50	16.63	0.87	17.19	0.31	16.99	0.51	17.19	
Respon	17.50	16.79	0.71	16.94	0.56	16.94	0.56	16.94	
Konsultasi dan Pengaduan	17.50	16.75	0.75	16.89	0.61	16.92	0.58	16.89	

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100 — List
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4 — List

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK) — List

17.50/17.50 | 100/100 | 4/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP — List
ANALISIS GAP INDEKS 100 — List
ANALISIS GAP INDEKS 4 — List
ANALISIS GAP VARIABEL — List

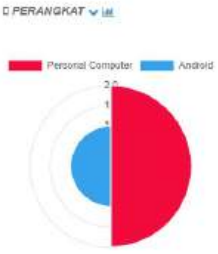


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Diskriminasi	17.50	16.87	0.63	17.18	0.32	17.06	0.44	17.18	
Kecurangan	17.50	16.87	0.63	17.15	0.35	17.12	0.38	17.15	
Gratifikasi	17.50	16.87	0.63	17.18	0.32	17.12	0.38	17.18	
Pungli	17.50	16.90	0.60	17.16	0.34	17.18	0.32	17.16	
Calo	17.50	16.87	0.63	17.24	0.26	17.15	0.35	17.24	

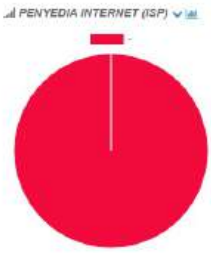
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100 — List
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4 — List

PENGGUNAAN PERANGKAT

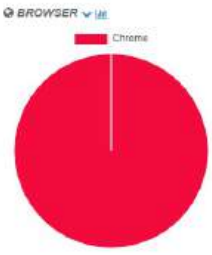
PERANGKAT — List



PENYEDIA INTERNET (ISP) — List



BROWSER — List



OPERATING SYSTEM — List

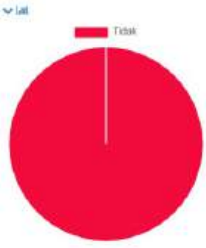


PROFIL RESPONDEN

PENCACAHAN — List



PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI — List



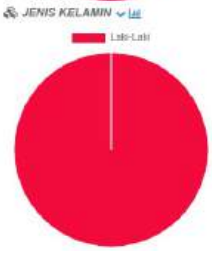
PERBAIKAN — List



USIA — List



JENIS KELAMIN — List



Dashboard

Survei / Hasil / Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK Januari 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Desember 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK November 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Oktober 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK September 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Agustus 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Juli 2025

1 - 20 dari 7

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK NOVEMBER 2025
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

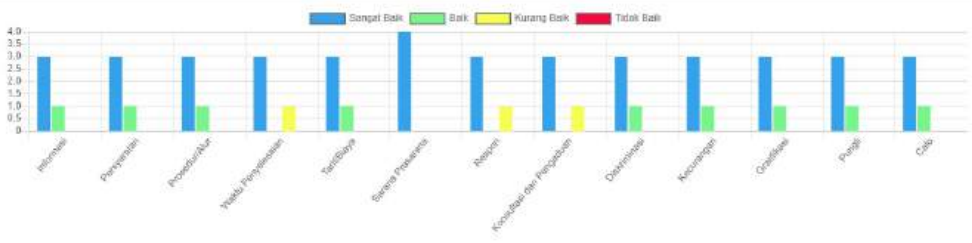
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
16.68/17.50
95.31/100 3.81/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
16.84/17.50
96.25/100 3.85/4

Responden
4

Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik

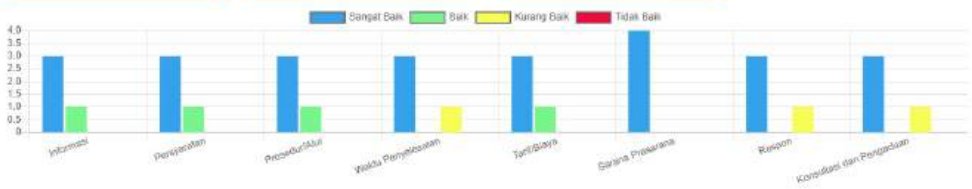
IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

16.68/17.50 | 95.31/100 | 3.81/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	S
Informasi	16.84	16.77	0.07	16.97	-0.13	16.91	-0.07	16.97	
Penyanatan	16.84	16.76	0.08	17.13	-0.29	16.98	-0.14	17.13	
Prosedur/Alur	16.84	16.79	0.05	16.98	-0.14	16.96	-0.12	16.98	
Waktu Penyelesaian	16.19	16.72	-0.53	16.77	-0.58	16.80	-0.61	16.77	
Tarif/Biaya	16.84	16.80	0.04	17.11	-0.27	17	-0.16	17.11	
Sarana Prasarana	17.50	16.63	0.87	17.19	0.31	16.99	0.51	17.19	
Respon	16.19	16.79	-0.60	16.94	-0.75	16.94	-0.75	16.94	
Konsultasi dan Pengaduan	16.19	16.75	-0.56	16.89	-0.70	16.92	-0.73	16.89	

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

16.84/17.50 | 96.25/100 | 3.85/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

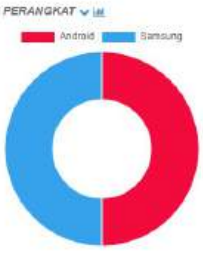


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Se
Diskriminasi	16.84	16.87	-0.03	17.18	-0.34	17.06	-0.22	17.18	
Kecurangan	16.84	16.87	-0.03	17.15	-0.31	17.12	-0.28	17.15	
Gratifikasi	16.84	16.87	-0.03	17.18	-0.34	17.12	-0.28	17.18	
Pungli	16.84	16.90	-0.06	17.16	-0.32	17.18	-0.34	17.16	
Calo	16.84	16.87	-0.03	17.24	-0.40	17.15	-0.31	17.24	

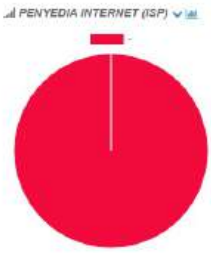
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

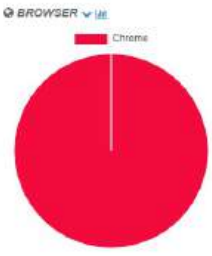
PERANGKAT



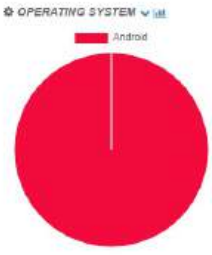
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER



OPERATING SYSTEM

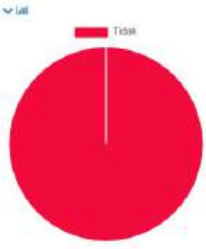


PROFIL RESPONDEN

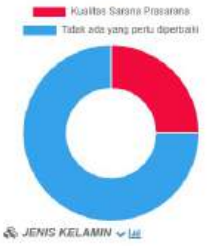
PENCACAHAN



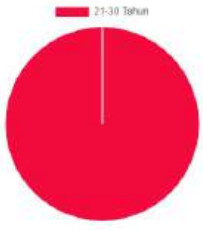
PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



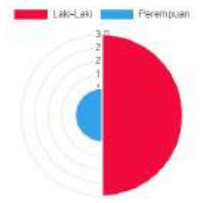
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

Survei / Hasil / Dashboard

SURVEI

- IKM/ IPK — IKM-IPK Januari 2026
- IKM/ IPK — IKM-IPK Desember 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK November 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK Oktober 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK September 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK Agustus 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK Juli 2025

1 - 20 dari 7

Copy | Share Infografis

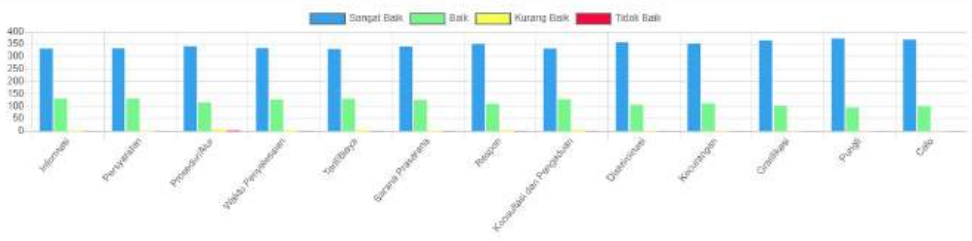
SURVEI IKM-IPK NOVEMBER 2025
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
16.69/17.50	16.88/17.50
95.39/100 | 3.82/4	96.45/100 | 3.86/4

Responden: 471

Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik

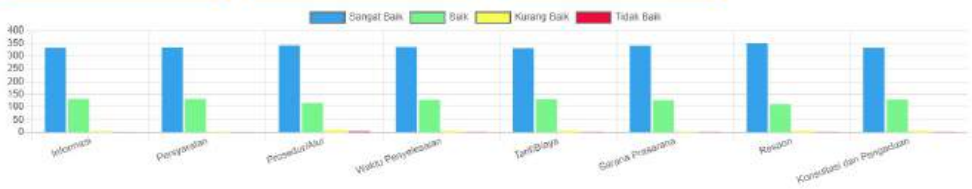
IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

16.69/17.50 | 95.39/100 | 3.82/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Informasi	16.70	16.77	-0.07	16.97	-0.27	16.91	-0.21	16.97	-
Persyaratan	16.71	16.76	-0.05	17.13	-0.42	16.98	-0.27	17.13	-
Prosedur/Alur	16.65	16.79	-0.14	16.98	-0.33	16.96	-0.31	16.98	-
Waktu Penyelesaian	16.69	16.72	-0.03	16.77	-0.08	16.80	-0.11	16.77	-
Tarif/Biaya	16.65	16.80	-0.15	17.11	-0.46	17	-0.35	17.11	-
Sarana Prasarana	16.71	16.63	0.08	17.19	-0.48	16.99	-0.28	17.19	-
Respon	16.76	16.79	-0.03	16.94	-0.18	16.94	-0.18	16.94	-
Konsultasi dan Pengaduan	16.68	16.75	-0.07	16.89	-0.21	16.92	-0.24	16.89	-

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

16.88/17.50 | 96.45/100 | 3.86/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Diskriminasi	16.84	16.87	-0.03	17.18	-0.34	17.06	-0.22	17.18	-
Kecurangan	16.81	16.87	-0.06	17.15	-0.34	17.12	-0.31	17.15	-
Gratifikasi	16.90	16.87	0.03	17.18	-0.28	17.12	-0.22	17.18	-
Pungli	16.93	16.90	0.03	17.16	-0.23	17.18	-0.25	17.16	-
Calo	16.91	16.87	0.04	17.24	-0.33	17.15	-0.24	17.24	-

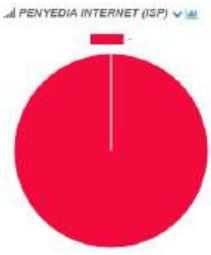
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

PERANGKAT



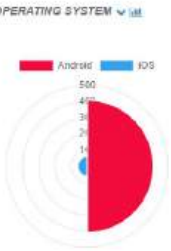
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER

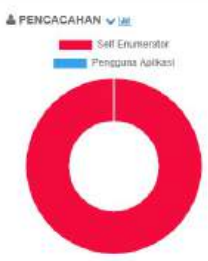


OPERATING SYSTEM



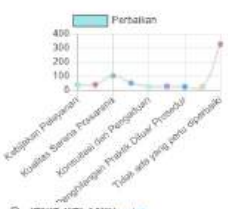
PROFIL RESPONDEN

PENCACAHAN

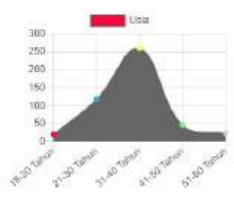


PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI

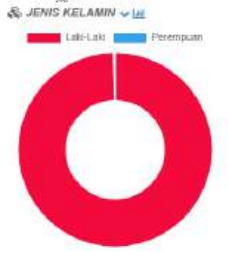
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

Survei / Hasil / Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK Januari 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Desember 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK November 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Oktober 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK September 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Agustus 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Juli 2025

1 - 20 dari 7

Copy | Share Infografis

SURVEI IKM-IPK NOVEMBER 2025
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN

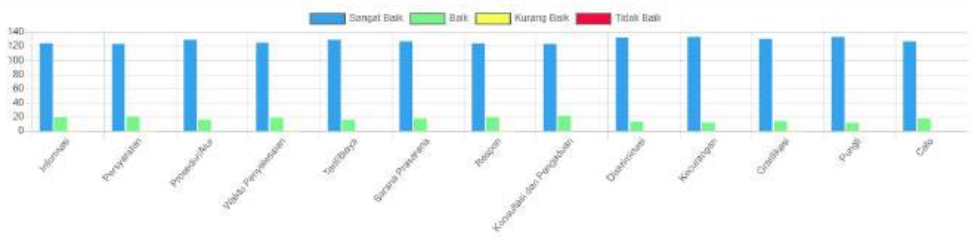
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
17.14/17.50
97.93/100 | 3.92/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
17.24/17.50
98.53/100 | 3.94/4

Responden
145

Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik

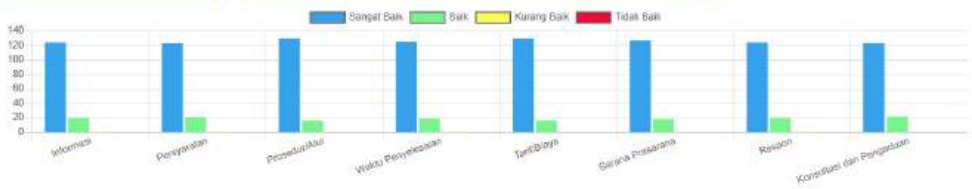
IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

17.14/17.50 | 97.93/100 | 3.92/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Informasi	17.10	16.77	0.33	16.97	0.13	16.91	0.19	16.97	
Persyaratan	17.08	16.76	0.32	17.13	-0.05	16.98	0.10	17.13	
Prosedur/Alur	17.21	16.79	0.42	16.98	0.23	16.96	0.25	16.98	
Waktu Penyelesaian	17.12	16.72	0.40	16.77	0.35	16.80	0.32	16.77	
Tarif/Biaya	17.21	16.80	0.41	17.11	0.10	17	0.21	17.11	
Sarana Prasarana	17.17	16.63	0.54	17.19	-0.02	16.99	0.18	17.19	
Respon	17.10	16.79	0.31	16.94	0.16	16.94	0.16	16.94	
Konsultasi dan Pengaduan	17.10	16.75	0.35	16.89	0.21	16.92	0.18	16.89	

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.24/17.50 | 98.53/100 | 3.94/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

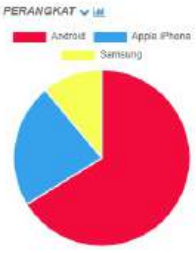


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Se
Diskriminasi	17.26	16.87	0.39	17.18	0.08	17.06	0.20	17.18	
Kecurangan	17.28	16.87	0.41	17.15	0.13	17.12	0.16	17.15	
Gratifikasi	17.21	16.87	0.34	17.18	0.03	17.12	0.09	17.18	
Pungli	17.28	16.90	0.38	17.16	0.12	17.18	0.10	17.16	
Calo	17.17	16.87	0.30	17.24	-0.07	17.15	0.02	17.24	

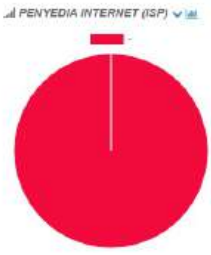
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

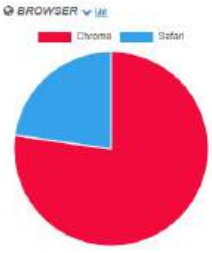
PERANGKAT



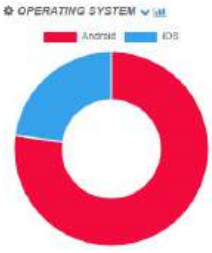
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER

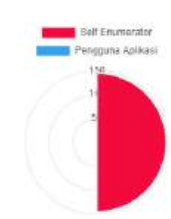


OPERATING SYSTEM

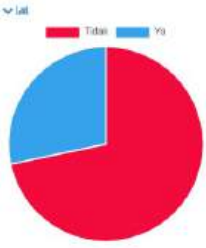


PROFIL RESPONDEN

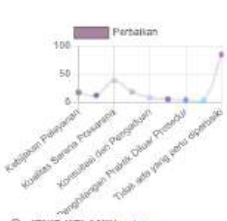
PENCACAHAN



PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



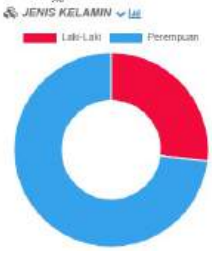
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

Survei / Hasil / Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK Januari 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Desember 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK November 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Oktober 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK September 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Agustus 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Juli 2025

1 - 20 dari 7

Copy | Share Infografis

SURVEI IKM-IPK DESEMBER 2025

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

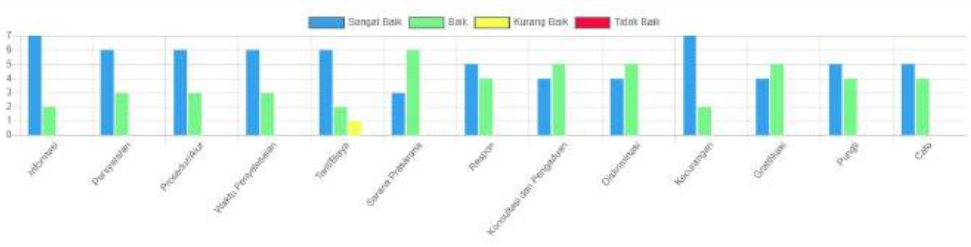
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
16.41/17.50
93.75/100 | 3.75/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
16.33/17.50
93.33/100 | 3.73/4

Responden
9

Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik

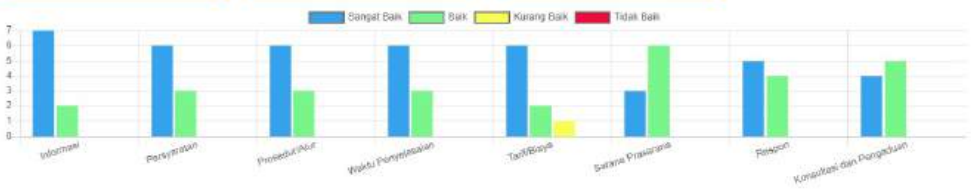
IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

16.41/17.50 | 93.75/100 | 3.75/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

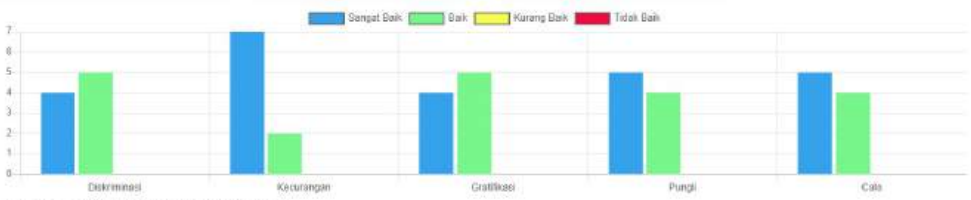


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	S
Informasi	16.92	16.81	-0.11	16.79	-0.13	16.87	-0.05	16.79	
Persyaratan	16.63	16.82	-0.19	16.76	-0.13	16.93	-0.30	16.76	
Prosedur/Alur	16.63	16.86	-0.23	16.76	-0.13	16.86	-0.23	16.76	
Waktu Penyelesaian	16.63	16.80	-0.17	16.71	-0.08	16.86	-0.23	16.71	
Tarif/Biaya	16.33	16.84	-0.51	16.71	-0.38	16.99	-0.66	16.71	
Sarana Prasarana	15.75	16.75	-1	16.54	-0.79	16.84	-1.09	16.54	
Respon	16.33	16.83	-0.50	16.64	-0.31	16.84	-0.51	16.64	
Konsultasi dan Pengaduan	16.04	16.81	-0.77	16.56	-0.52	16.85	-0.81	16.66	

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

16.33/17.50 | 93.33/100 | 3.73/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

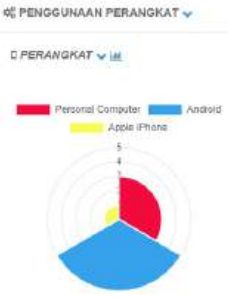


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	So
Diskriminasi	16.04	16.93	-0.89	16.66	-0.62	17.01	-0.97	16.66	
Kecurangan	16.92	16.89	0.03	16.83	0.09	17.05	-0.13	16.83	
Gratifikasi	16.04	16.91	-0.87	16.67	-0.63	17.06	-1.02	16.67	
Pungli	16.33	16.94	-0.61	16.78	-0.45	17.08	-0.75	16.78	
Calo	16.33	16.93	-0.60	16.73	-0.40	17.08	-0.75	16.73	

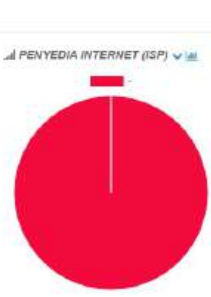
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

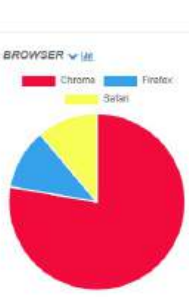
PERANGKAT



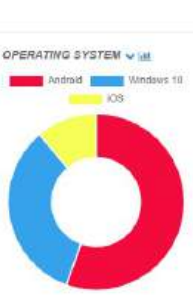
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER



OPERATING SYSTEM

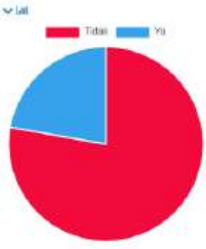


PROFIL RESPONDEN

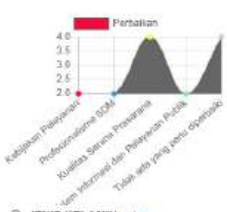
PENCACAHAN



PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



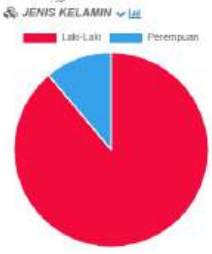
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK Januari 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Desember 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK November 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Oktober 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK September 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Agustus 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Juli 2025

1 - 20 dari 7

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK DESEMBER 2025
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN

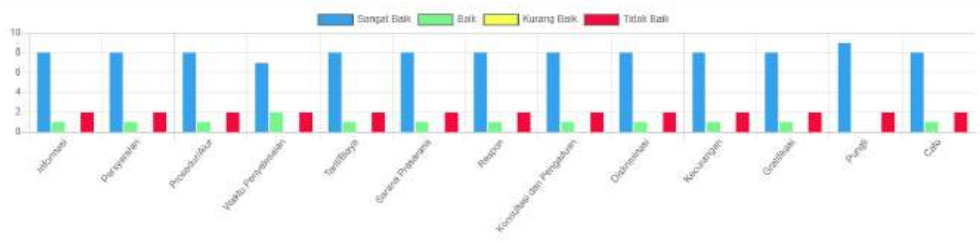
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
15.50/17.50
88.58/100 3.54/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
15.64/17.50
89.36/100 3.57/4

Responden
11

Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik

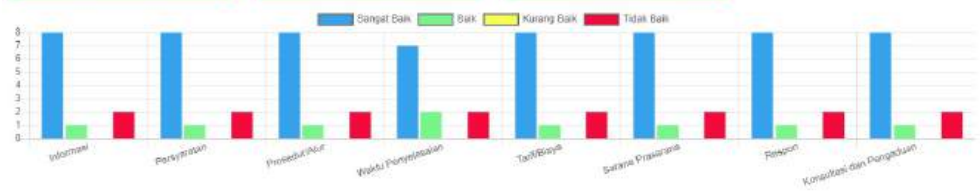
IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

15.50/17.50 | 88.58/100 | 3.54/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	S
Informasi	15.59	16.81	-1.22	16.79	-1.20	16.87	-1.28	16.79	
Persyaratan	15.59	16.82	-1.23	16.76	-1.17	16.93	-1.34	16.76	
Prosedur/Alur	15.59	16.86	-1.27	16.76	-1.17	16.86	-1.27	16.76	
Waktu Penyelesaian	15.35	16.80	-1.45	16.71	-1.36	16.86	-1.51	16.71	
Tarif/Biaya	15.59	16.84	-1.25	16.71	-1.12	16.99	-1.40	16.71	
Sarana Prasarana	15.59	16.75	-1.16	16.54	-0.95	16.84	-1.25	16.54	
Respon	15.35	16.83	-1.48	16.64	-1.29	16.84	-1.49	16.64	
Konsultasi dan Pengaduan	15.35	16.81	-1.46	16.56	-1.21	16.85	-1.50	16.66	

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

15.64/17.50 | 89.36/100 | 3.57/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

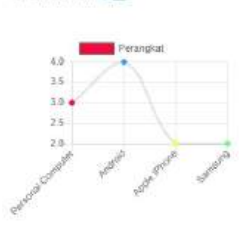


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	So
Diskriminasi	15.59	16.93	-1.34	16.66	-1.07	17.01	-1.42	16.66	
Kecurangan	15.59	16.89	-1.30	16.83	-1.24	17.05	-1.46	16.83	
Gratifikasi	15.59	16.91	-1.32	16.67	-1.08	17.06	-1.47	16.67	
Pungli	15.83	16.94	-1.11	16.78	-0.95	17.08	-1.25	16.78	
Calo	15.59	16.93	-1.34	16.73	-1.14	17.08	-1.49	16.73	

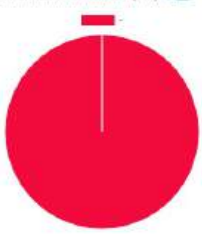
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

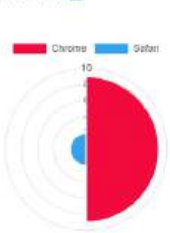
PERANGKAT



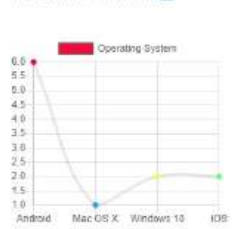
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER

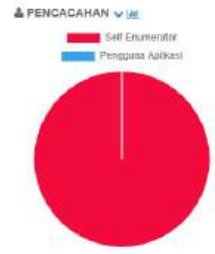


OPERATING SYSTEM

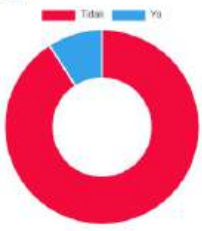


PROFIL RESPONDEN

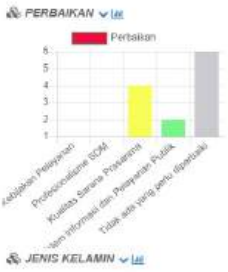
PENCACAHAN



PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



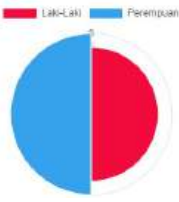
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

Survei / Hasil / Dashboard

SURVEI

- IKM/ IPK — IKM-IPK Januari 2026
- IKM/ IPK — IKM-IPK Desember 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK November 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK Oktober 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK September 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK Agustus 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK Juli 2025

1 - 20 dari 7

Copy | Share Infografis

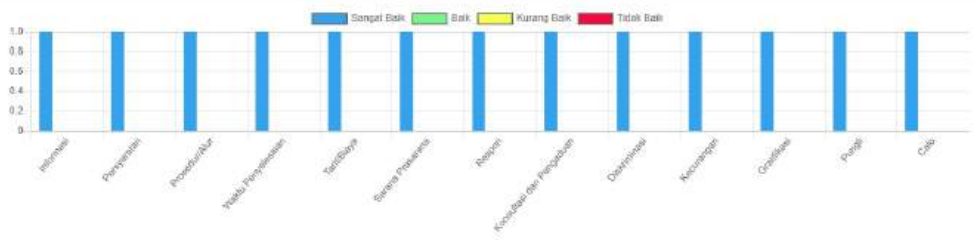
SURVEI IKM-IPK DESEMBER 2025
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
17.50/17.50 (100/100) (4/4)	17.50/17.50 (100/100) (4/4)

Responden: 1

Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik

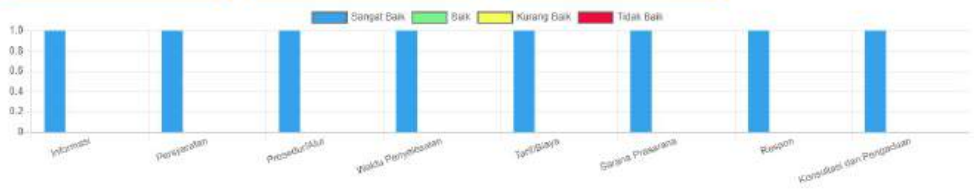
IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

17.50/17.50 | 100/100 | 4/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	S
Informasi	17.50	16.81	0.69	16.79	0.71	16.87	0.63	16.79	
Persyaratan	17.50	16.82	0.68	16.76	0.74	16.93	0.57	16.76	
Prosedur/Alur	17.50	16.86	0.64	16.76	0.74	16.86	0.64	16.76	
Waktu Penyelesaian	17.50	16.80	0.70	16.71	0.79	16.86	0.64	16.71	
Tarif/Biaya	17.50	16.84	0.66	16.71	0.79	16.99	0.51	16.71	
Sarana Prasarana	17.50	16.75	0.75	16.54	0.96	16.84	0.66	16.54	
Respon	17.50	16.83	0.67	16.64	0.86	16.84	0.66	16.64	
Konsultasi dan Pengaduan	17.50	16.81	0.69	16.56	0.94	16.85	0.65	16.56	

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.50/17.50 | 100/100 | 4/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

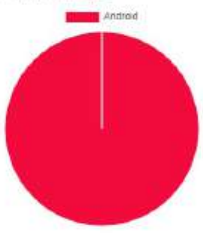


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	So
Diskriminasi	17.50	16.93	0.57	16.66	0.84	17.01	0.49	16.66	
Kecurangan	17.50	16.89	0.61	16.83	0.67	17.05	0.45	16.83	
Gratifikasi	17.50	16.91	0.59	16.67	0.83	17.06	0.44	16.67	
Pungli	17.50	16.94	0.56	16.78	0.72	17.08	0.42	16.78	
Calo	17.50	16.93	0.57	16.73	0.77	17.08	0.42	16.73	

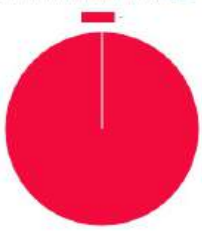
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

PERANGKAT



PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER



OPERATING SYSTEM

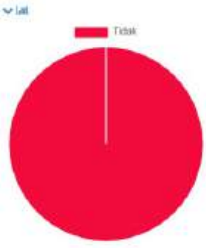


PROFIL RESPONDEN

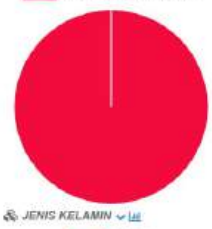
PENCACAHAN



PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

Survei / Hasil / Dashboard

SURVEI

- IKM/ IPK — IKM-IPK Januari 2026
- IKM/ IPK — IKM-IPK Desember 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK November 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK Oktober 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK September 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK Agustus 2025
- IKM/ IPK — IKM-IPK Juli 2025

1 - 20 dari 7

Copy Share Infografis

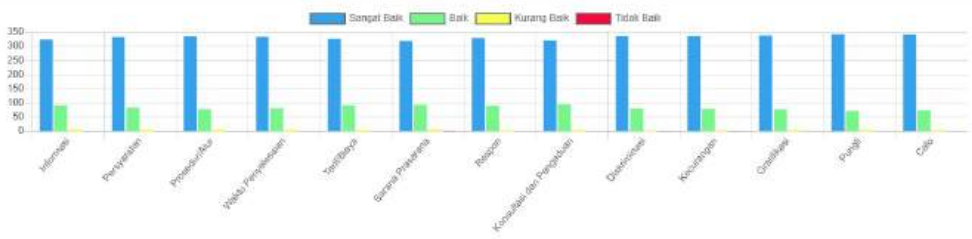
SURVEI IKM-IPK DESEMBER 2025
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
16.86/17.50	16.94/17.50
96.35/100 | 3.85/4	96.81/100 | 3.87/4

Responden: 422

Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik

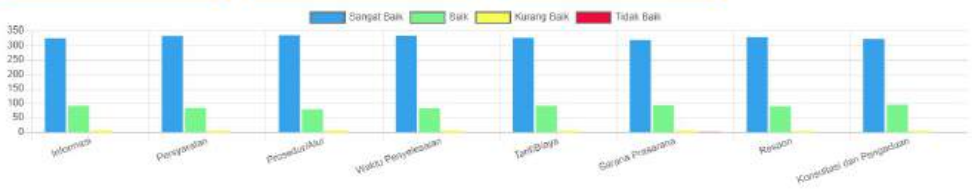
IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

16.86/17.50 | 96.35/100 | 3.85/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Informasi	16.83	16.81	0.02	16.79	0.04	16.87	-0.04	16.79	
Persyaratan	16.90	16.82	0.08	16.76	0.14	16.93	-0.03	16.76	
Prosedur/Alur	16.91	16.86	0.05	16.76	0.15	16.86	0.05	16.76	
Waktu Penyelesaian	16.90	16.80	0.10	16.71	0.19	16.86	0.04	16.71	
Tarif/Biaya	16.86	16.84	0.02	16.71	0.15	16.99	-0.13	16.71	
Sarana Prasarana	16.77	16.75	0.02	16.54	0.23	16.84	-0.07	16.54	
Respon	16.88	16.83	0.05	16.64	0.24	16.84	0.04	16.64	
Konsultasi dan Pengaduan	16.83	16.81	0.02	16.56	0.27	16.85	-0.02	16.56	

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

16.94/17.50 | 96.81/100 | 3.87/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Diskriminasi	16.93	16.93	0	16.66	0.27	17.01	-0.08	16.66	
Kecurangan	16.91	16.89	0.02	16.83	0.08	17.05	-0.14	16.83	
Gratifikasi	16.94	16.91	0.03	16.67	0.27	17.06	-0.12	16.67	
Pungli	16.97	16.94	0.03	16.78	0.19	17.08	-0.11	16.78	
Calo	16.97	16.93	0.04	16.73	0.24	17.08	-0.11	16.73	

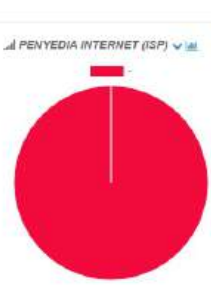
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

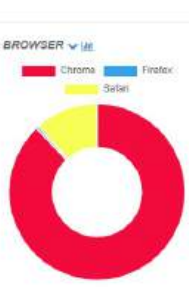
PERANGKAT



PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER



OPERATING SYSTEM

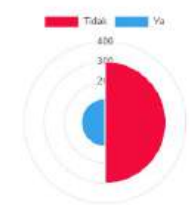


PROFIL RESPONDEN

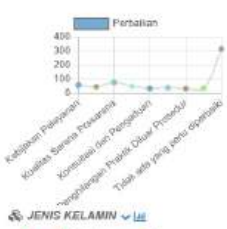
PENCACAHAN



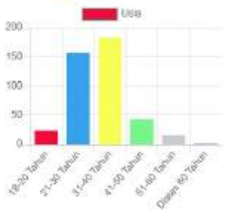
PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



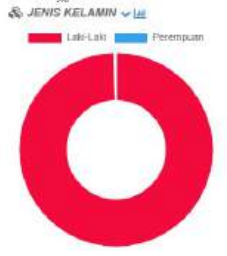
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK Januari 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Desember 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK November 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Oktober 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK September 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Agustus 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Juli 2025

1 - 20 dari 7

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK DESEMBER 2025
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN

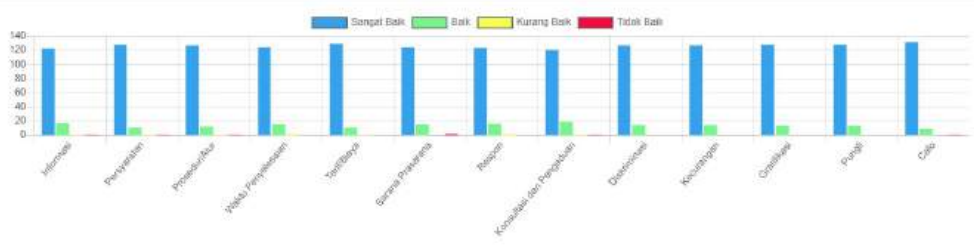
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
17.15/17.50
97.98/100 3.92/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
17.25/17.50
98.60/100 3.94/4

Responden
141

Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik

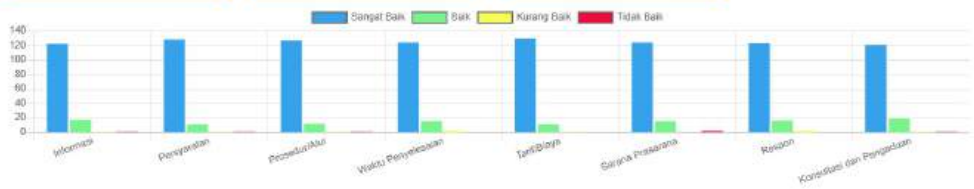
IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

17.15/17.50 | 97.98/100 | 3.92/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

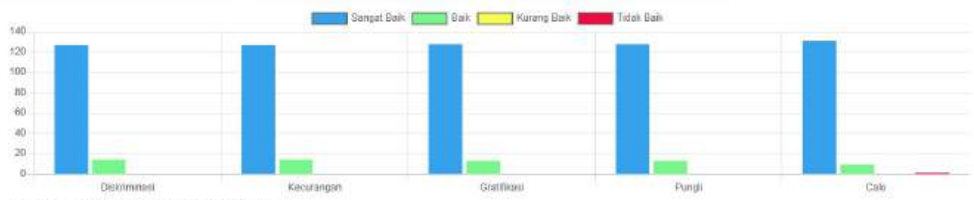


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	S
Informasi	17.05	16.81	0.28	16.79	0.30	16.87	0.22	16.79	
Persyaratan	17.20	16.82	0.38	16.76	0.44	16.93	0.27	16.76	
Prosedur/Alur	17.18	16.86	0.32	16.76	0.42	16.86	0.32	16.76	
Waktu Penyelesaian	17.15	16.80	0.35	16.71	0.44	16.86	0.29	16.71	
Tarif/Biaya	17.26	16.84	0.42	16.71	0.55	16.99	0.27	16.71	
Sarana Prasarana	17.11	16.75	0.36	16.54	0.57	16.84	0.27	16.54	
Respon	17.13	16.83	0.30	16.64	0.49	16.84	0.29	16.64	
Konsultasi dan Pengaduan	17.05	16.81	0.24	16.56	0.49	16.85	0.20	16.66	

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.25/17.50 | 98.60/100 | 3.94/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Jenis Unit Kerja (Nasional)		Lokus Provinsi/ Wilayah		Lokus Jenis Unit Kerja Provinsi Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	Selisih	Indeks	So
Diskriminasi	17.24	16.93	0.31	16.66	0.58	17.01	0.23	16.66	
Kecurangan	17.24	16.89	0.35	16.83	0.41	17.05	0.19	16.83	
Gratifikasi	17.26	16.91	0.35	16.67	0.59	17.06	0.20	16.67	
Pungli	17.26	16.94	0.32	16.78	0.48	17.08	0.18	16.78	
Calo	17.28	16.93	0.35	16.73	0.55	17.08	0.20	16.73	

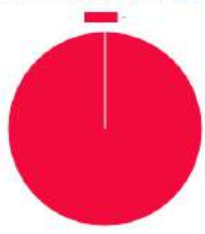
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

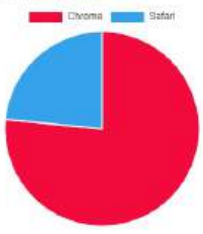
PERANGKAT



PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER



OPERATING SYSTEM

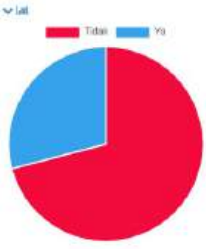


PROFIL RESPONDEN

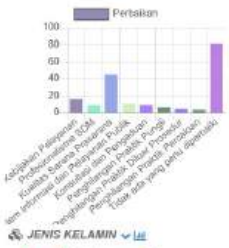
PENCACAHAN



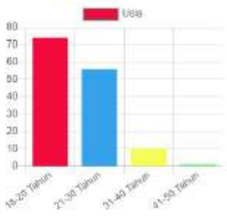
PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



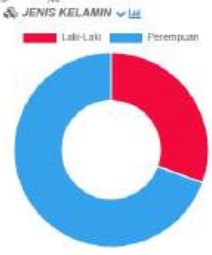
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



Dashboard

Survei / Hasil / Dashboard

SURVEI

IKM/ IPK
IKM-IPK Januari 2026

IKM/ IPK
IKM-IPK Desember 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK November 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Oktober 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK September 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Agustus 2025

IKM/ IPK
IKM-IPK Juli 2025

1 - 20 dari 7

Copy Share Infografis

SURVEI IKM-IPK DESEMBER 2025
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN PERSEPSI ANTI KORUPSI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN NGROMBO

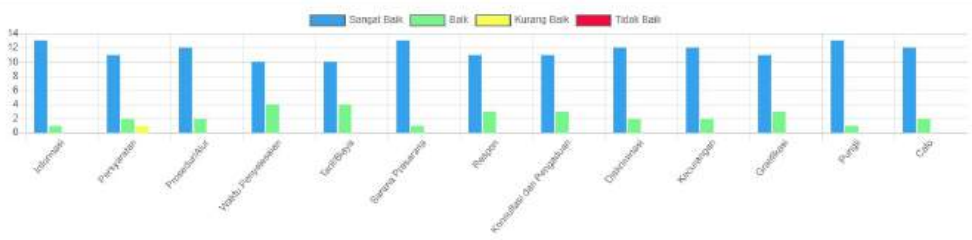
II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)
16.98/17.50
97.05/100 | 3.88/4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)
17.13/17.50
97.86/100 | 3.91/4

Responden
14

Sangat Baik | Baik | Kurang Baik | Tidak Baik

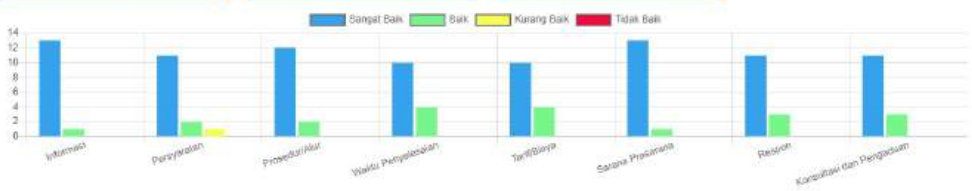
IKM/ IPK



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL

II. KUALITAS PELAYANAN (IKM)

16.98/17.50 | 97.05/100 | 3.88/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL



Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Informasi	17.31	16.81	0.50	16.89	0.42
Persyaratan	16.75	16.82	-0.07	16.81	-0.06
Prosedur/Alur	17.13	16.86	0.27	16.88	0.25
Waktu Penyelesaian	16.75	16.86	-0.05	16.86	-0.11
Tarif/Biaya	16.75	16.84	-0.09	16.87	-0.12
Sarana Prasarana	17.31	16.75	0.56	16.81	0.50
Respon	16.94	16.83	0.11	16.84	0.10
Konsultasi dan Pengaduan	16.94	16.81	0.13	16.86	0.08

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN (IPK)

17.13/17.50 | 97.86/100 | 3.91/4



UNSUR LAYANAN/ PERNYATAAN/ VARIABEL
ANALISIS GAP
ANALISIS GAP INDEKS 100
ANALISIS GAP INDEKS 4
ANALISIS GAP VARIABEL

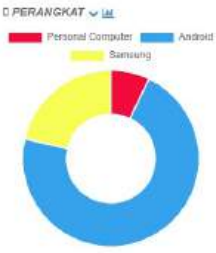


Variabel	Indeks Lokus	Lokus Nasional		Lokus Provinsi/ Wilayah	
		Indeks	Selisih	Indeks	Selisih
Diskriminasi	17.13	16.93	0.20	16.92	0.21
Kekurangan	17.13	16.89	0.24	16.89	0.24
Gratifikasi	16.94	16.91	0.03	16.96	-0.02
Pungli	17.31	16.94	0.37	16.97	0.34
Calo	17.13	16.93	0.20	16.88	0.25

ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 100
ANALISIS GAP VARIABEL INDEKS 4

PENGGUNAAN PERANGKAT

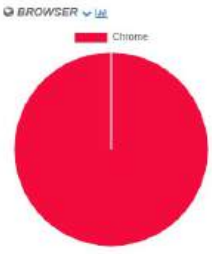
PERANGKAT



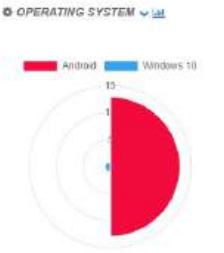
PENYEDIA INTERNET (ISP)



BROWSER

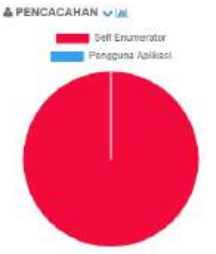


OPERATING SYSTEM

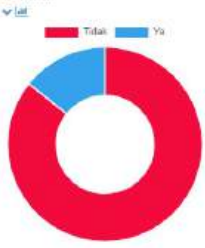


PROFIL RESPONDEN

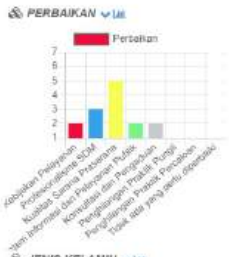
PENCACAHAN



PENGARAHAN PETUGAS/ PEGAWAI



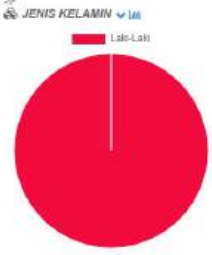
PERBAIKAN



USIA



JENIS KELAMIN



LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 3

PERSENTASE *ON TIME PERFORMANCE (OTP)* TRANSPORTASI KERETA API

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA 10110 | TEL: 0813 6001 3838 | WEBSITE: http://djka.dephub.go.id/ EMAIL: ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 011/K2.2/I/2026

Yth : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
Dari : Kasubdit Lalu Lintas
Hal : Penyampaian Data Dukung Pencapaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
Tanggal : 20 Januari 2026

Menunjuk Nota Dinas Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Nomor 0523/K2/IX/2025 tanggal 31 Desember 2025 perihal Permohonan Data Dukung Pencapaian Kinerja Bulan Triwulan IV 2025 di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, dapat kami laporkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Capaian Sementara Realisasi Perjalanan Kereta Api dibandingkan Gapeka
   Capaian secara kumulatif hingga Desember 2025 sebesar 105,90%, nilai tersebut telah memenuhi Target IKK Tahun 2025 sebesar 97,72%. Terpenuhinya Target IKU tersebut dipengaruhi oleh:
   1) Penambahan frekuensi LRT Jabodebek yang sebelumnya diprogramkan sebanyak 158 KA, sejak 11 November 2025 beroperasi sebanyak 430 KA saat *weekday* dan 270 KA saat *weekend*;
   2) Penambahan frekuensi LRT Sumsel yang sebelumnya diprogramkan sebanyak 88 KA, saat ini beroperasi sebanyak 94 KA saat *weekday* dan 102 KA saat *weekend*; dan
   3) Pengoperasian KA Tambahan pada masa libur Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026.

2. Capaian Sementara Kedatangan dan Keberangkatan KA Tepat Waktu
   Capaian secara kumulatif hingga Desember 2025 sebesar 97,70%, nilai tersebut telah memenuhi Target IKP Tahun 2025 sebesar 96,20%. Terpenuhinya Target IKU seiring dengan tingginya OTP selama Oktober s.d. Desember 2025 pada LRT Jakarta (99,98%), LRT Sumatera Selatan (99,92%), MRT Jakarta (99,81%), dan LRT Jabodebek (98,74%).

Terhadap kedua capaian sementara tersebut, akan dilakukan evaluasi pelaksanaan Gapeka pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional periode Triwulan IV Tahun 2025 sebagai verifikasi dan validasi data capaian dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disampaikan data dukung kinerja Triwulan IV Tahun 2025 di Subdirektorat Lalu Lintas sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan arahan lanjut Bapak Direktur, diucapkan terima kasih.

Awang Meindra
NIP 198105162002121003

Tembusan:
Koordinator Kelompok Tata Usaha, Direktorat LLAKA

3. PERSENTASE REALISASI PERJALANAN KA DI BANDINGKAN GAPEKA

Target Realisasi Tahun 2025

REALISASI PERJALANAN KERETA API TAHUN 2025

Bulanan			Renaksi	Program		Realisasi					
						Frekuensi				Capaian	
			Bulanan	Bulanan	Kumulatif	KA Penumpang	KA Barang	Total	Total Kumulatif	Bulanan	Kumulatif
TW 1	1	Januari	95,6%	89.201	89.201	82.002	6.398	88.400	88.400	99,10%	99,10%
	2	Februari	95,6%	77.948	167.149	76.090	5.958	82.048	170.448	105,26%	101,97%
	3	Maret	95,6%	86.518	253.667	84.652	6.068	90.720	261.168	104,86%	102,96%
TW 2	4	April	95,6%	83.355	337.022	81.933	6.124	88.057	349.225	105,64%	103,62%
	5	Mei	95,6%	85.963	422.985	84.030	6.728	90.758	439.983	105,58%	104,02%
	6	Juni	95,6%	83.315	506.300	81.676	6.270	87.946	527.929	105,56%	104,27%
TW 3	7	Juli	95,6%	86.359	592.659	85.939	6.519	92.458	620.387	107,06%	104,68%
	8	Agustus	95,6%	86.143	678.802	85.453	6.744	92.197	712.584	107,03%	104,98%
	9	September	95,6%	83.496	762.298	82.834	6.532	89.366	801.950	107,03%	105,20%
TW 4	10	Oktober	95,6%	86.371	848.669	86.826	7.010	93.836	895.786	108,64%	105,55%
	11	November	95,6%	83.452	932.121	82.992	6.788	89.780	985.566	107,58%	105,73%
	12	Desember	95,6%	86.592	1.018.713	86.659	6.641	93.300	1.078.866	107,7%	105,90%

4. PERSENTASE KA TEPAT WAKTU (KEDATANGAN & KEBERANGKATAN)

Target Tahun 2025 :

JUMLAH KEDATANGAN KERETA API TEPAT WAKTU (*ON TIME PERFORMANCE*)

BULAN		RENAKSI	REALISASI		KA BERANGKAT TEPAT				KA DATANG TEPAT				RATA RATA		PERSENTASE CAPAIAN	
		Bulanan	Barang +	Kumulatif	Barang	Penumpang	Barang +	Kumulatif	Barang	Penumpang	Barang +	Kumulatif	Berangkat +	Kumulatif	Bulanan	Kumulatif
TW 1	Januari	96,2%	88.400	88.400	6.035	81.436	87.471	87.471	5.165	79.812	84.977	84.977	86.224	86.224	97,54%	97,54%
	Februari	96,2%	82.048	170.448	5.646	75.295	80.941	168.412	4.361	73.855	78.216	163.193	79.579	165.803	96,99%	97,27%
	Maret	96,2%	90.720	261.168	5.740	84.045	89.785	258.197	4.621	82.793	87.414	250.607	88.600	254.402	97,66%	97,41%
TW 2	April	96,2%	88.057	349.225	5.830	81.406	87.236	345.433	4.937	80.504	85.441	336.048	86.339	340.741	98,05%	97,57%
	Mei	96,2%	90.758	439.983	6.416	83.758	90.174	435.607	5.376	83.287	88.663	424.711	89.419	430.159	98,52%	97,77%
	Juni	96,2%	87.946	527.929	6.059	81.345	87.404	523.011	5.222	80.850	86.072	510.783	86.738	516.897	98,63%	97,91%
TW 3	Juli	96,2%	92.458	620.387	6.214	85.466	91.680	614.691	5.238	84.941	90.179	600.962	90.930	607.827	98,35%	97,98%
	Agustus	96,2%	92.197	712.584	6.350	84.552	90.902	705.593	5.120	83.739	88.859	689.821	89.881	697.707	97,49%	97,91%
	September	96,2%	89.366	801.950	6.146	82.492	88.638	794.231	5.022	81.852	86.874	776.695	87.756	785.463	98,20%	97,94%
TW 4	Oktober	96,2%	93.836	895.786	6.697	84.915	91.612	885.843	5.718	83.910	89.628	866.323	90.620	876.083	96,57%	97,80%
	November	96,2%	89.780	985.566	6.370	82.212	88.582	974.425	5.223	81.248	86.471	952.794	87.527	963.610	97,49%	97,77%
	Desember	96,2%	93.300	1.078.866	6.243	85.162	91.405	1.065.830	5.538	83.999	89.537	1.042.331	90.471	1.054.081	97,0%	97,70%

Awang Meindra
NIP 198105162002121003

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 4

PERSENTASE PEMENUHAN TARGET ANGKUTAN KERETA API

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110
TELP: +62 813-6001- 3838
WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS
Nomor : 022/K2.3/I/2026

Yth : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
Dari : Kepala Sub Direktorat Angkutan
Hal : Penyampaian Data Dukung Pencapaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
Tanggal : 22 Januari 2026

Sehubungan dengan Nota Dinas Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Nomor: 0523/K2/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 perihal Permohonan Data Dukung Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, bersama ini kami sampaikan data dukung kinerja Triwulan IV Tahun 2025 di Subdirektorat Angkutan sebagai berikut:

1. Data Capaian Kinerja Triwulan IV 2025

Uraian	Target Triwulan IV	Realisasi Triwulan IV	Persentase
Angkutan Penumpang	519.616.302 Penumpang	551.737.151 Penumpang	**106%**
Angkutan Barang	17.145.500 Ton	18.771.553 Ton	**109%**

Rincian data angkutan terlampir.

2. Matriks Analisa Keberhasilan/Kegagalan

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Triwulan IV	Realisasi Per Desember 2025	Analisa Keberhasilan/Kegagalan
1.	Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	519.616.302 Penumpang	551.737.151 Penumpang	1. Realisasi Angkutan Penumpang KRL Jabodetabek Selama Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 349.311.251 penumpang dengan rata-rata penumpang *weekday* sebesar 1.098.911 penumpang. 2. Realisasi Angkutan Penumpang Kereta Cepat Jakarta Bandung Selama Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 6.202.393 penumpang dengan rata-rata penumpang sebesar 16.995 penumpang; 3. Realisasi Angkutan penumpang LRT Jabodebek Selama Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 28.816.787

No...

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Triwulan IV	Realisasi Per Desember 2025	Analisa Keberhasilan/Kegagalan
				penumpang dengan rata-rata penumpang *weekday* sebesar 105.671 penumpang; 4. Persentase Realisasi Angkutan Penumpang terhadap Target Penumpang pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 106%.
2.	Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	17.145.500 Ton	18.771.553 Ton	1. Realisasi Angkutan Barang Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 18.771.553 Ton, bila disandingkan dengan realisasi Triwulan IV Tahun 2024 terdapat kenaikan sebesar 595.018 Ton. Bila dibandingkan dengan program yang ada di 2025, telah mencapai target sebesar 109%. 2. Meningkatnya permintaan volume barang yang diangkut pada triwulan III mengakibatkan naiknya volume angkutan dari triwulan III, khususnya pada angkutan Batubara dan Petikemas.

3. Matriks Tindak lanjut Rekomendasi Peningkatan Kinerja Periode Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Rekomendasi Periode Sebelumnya	Tindak Lanjut
1.	Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	Mendorong Penyelenggara Sarana Perkeretaapian untuk terus meningkatkan sosialisasi/publikasi pada media sosial untuk menggunakan transportasi kereta api yang telah terintegrasi baik antarmoda maupun intermoda	1. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rencana Pengoperasian Kereta Api di Wilayah Sumatera Bagian Barat pada tanggal 8 Oktober 2025; 2. Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Integrasi Stasiun Karet dan Stasiun BNI City pada tanggal 9 Oktober 2025; 3. Telah dilaksanakan High Level Meeting Implementasi QRIS TAP fitur Tap In Tap Out di Moda Transportasi pada tanggal 27 Oktober 2025; 4. Telah dilakukan Rapat pembahasan usulan perpanjangan KA Bandara Internasional Yogyakarta (KA YIA) ke Stasiun Maguwo pada tanggal 21 November 2025

No...

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Rekomendasi Periode Sebelumnya	Tindak Lanjut
			5. Telah dilakukan rapat pembahasan Permohonan Stasiun Pemberhentian KA Pandanwangi pada tanggal 25 September 2025.
2.	Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian melakukan publikasi/sosialisasi dan aktif memberikan informasi dan gambaran angkutan barang menggunakan Kereta Api serta berbagai keunggulan yang dimiliki angkutan barang.	1. Telah dilaksanakannya Angkutan Motor Gratis Nataru 2025 pada Lintas Utara dan Lintas Tengah; 2. Telah dilakukan sosialisasi pada media sosial dengan memberikan informasi kelebihan angkutan barang dengan moda KA untuk meningkatkan pengguna transportasi angkutan barang dengan moda KA; 3. Telah melakukan koordinasi Upaya peningkatan angkutan barang dengan KA serta mendukung Penyusunan rancangan Perpres Penguatan Logistik Nasional

4. Matriks Upaya Peningkatan Kinerja

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Triwulan IV	Realisasi Per Desember 2025	Kriteria Upaya	Upaya Peningkatan Kinerja
1.	Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	519.616.302 Penumpang	551.191.016 Penumpang*)	Aktivitas	Meningkatkan fasilitas pelayanan baik di stasiun maupun dalam perjalanan kereta.
2.	Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	17.145.500 Ton	18.771.553 Ton	Aktivitas	Meningkatkan koordinasi aktif dengan Badan Usaha Penyelenggara Sarana dalam pengangkutan barang.

Atas arahan dan petunjuk lanjut Bapak Direktur diucapkan terima kasih.

Aditya Karsa
NIP 198609222008121001

REKAPITULASI JUMLAH ANGKUTAN PENUMPANG TAHUN 2025

TARGET TAHUN 2025 : 519.616.302 Pnp

PT Kereta Api Indonesia (Persero)

KA PSO (2025)

KERETA	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL
KA Ekonomi Jarak Jauh	339.670	315.175	372.014	424.133	358.737	352.146	355.435	361.381	349.335	353.103	348.806	388.149	**4.318.084**
KA Ekonomi Jarak Sedang	595.501	530.652	531.125	635.461	594.000	620.005	617.269	589.040	563.972	581.254	569.696	660.122	**7.088.097**
KA Ekonomi Jarak Dekat	412.566	388.181	282.766	477.812	417.602	408.912	428.466	349.565	343.124	355.473	393.970	487.472	**4.745.909**
KRD Ekonomi	112.895	97.339	73.050	141.247	125.801	125.094	115.838	97.520	103.339	109.545	116.956	107.201	**1.325.825**
KA Ekonomi Lebaran	-	-				-	-						**-**
TOTAL	**1.460.632**	**1.331.347**	**1.258.955**	**1.678.653**	**1.496.140**	**1.506.157**	**1.517.008**	**1.397.506**	**1.359.770**	**1.399.375**	**1.429.428**	**1.642.944**	**17.477.915**
	Triwulan I		**4.050.934**	**Triwulan II**		**4.680.950**	**Triwulan III**		**4.274.284**	**Triwulan IV**		**4.471.747**	**13.006.168**

KA KOMERSIAL (2025)

KERETA	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL
Eksekutif	1.065.697	900.285	880.660	1.276.568	1.021.793	1.232.848	1.234.049	1.076.819	1.097.751	1.082.525	1.089.332	1.412.211	**13.370.538**
Bisnis	100.989	89.043	84.960	114.097	83.843	102.566	75.881	43.447	38.876	34.067	32.259	48.654	**848.682**
Ekonomi	1.777.800	1.384.033	1.477.159	2.173.426	1.665.434	2.239.426	2.250.945	1.703.709	1.627.312	1.674.927	1.627.043	2.166.283	**21.767.497**
Lokal Eksekutif	38.067	23.852	24.355	35.970	30.735	33.560	31.385	28.211	34.779	29.292	31.125	41.863	**383.194**
Lokal Bisnis	12.900	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	**12.900**
Lokal Ekonomi	92.243	107.603	111.488	149.921	141.964	162.383	167.361	126.677	121.171	126.669	129.343	156.161	**1.592.984**
Wisata Ambarawa	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	**-**
Priority	15.896	10.056	10.256	20.993	17.936	22.775	26.748	19.684	21.013	22.525	22.282	30.062	**240.226**
TOTAL	**3.103.592**	**2.514.872**	**2.588.878**	**3.770.975**	**2.961.705**	**3.793.558**	**3.786.369**	**2.998.547**	**2.940.902**	**2.970.005**	**2.931.384**	**3.855.234**	**38.216.021**
	TRIWULAN 1		**8.207.342**	**TRIWULAN 2**		**10.526.238**	**TRIWULAN 3**		**9.725.818**	**TRIWULAN 4**		**9.756.623**	**28.459.398**

KA PERINTIS (2025) BALAI

KERETA	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL
LRT Sumsel (Bandara-DJKA)	392.423	328.361	288.953	452.566	369.690	395.151	400.951	373.463	384.793	403.889	392.086	444.155	**4.626.481**
Cut Meutia (Kutablang-Muara Satu)	5.018	8.291	299	6158	4.911	2.780	1.980	1.167	885	2.225	2.001	-	**35.715**
Lembah Anai (Bandara Intl Minangkabau-Kayu Tanam)	9.932	7.270	6.363	10.783	8.293	8.475	8.248	6.987	7.551	7.629	7.229	10.616	**99.376**
Bathara Kresna (Purwosari-Wonogiri)	12.497	17.931	12.408	17.214	16.963	16.890	16.010	12.645	12.894	12.919	14.076	17.249	**179.696**
Makassar-Parepare (Tanete Rilau - Palanro)	17.943	17.935	9.453	34.289	36.545	32.868	32.862	22.980	24.020	28.088	28.620	32.853	**318.456**
Amir Hamzah (Binjai-Besitang)	-	-		-									
Nurmala (Rantau Prapat Baru-Pondok S5)	-	-		-									

Total	**437.813**	**379.788**	**317.476**	**521.010**	**436.402**	**456.164**	**460.051**	**417.242**	**430.143**	**454.750**	**444.012**	**504.873**	**5.259.724**
	TRIWULAN 1		**1.135.077**	**TRIWULAN 2**		**1.413.576**	**TRIWULAN 3**		**1.307.436**	**TRIWULAN 4**		**1.403.635**	**3.856.089**

PT KCI

KA PSO (2025)

KERETA	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL
KRL Jabodetabek	27.936.405	27.204.191	26.973.738	27.552.083	28.561.308	28.204.967	31.400.484	28.946.724	28.741.049	31.776.933	30.373.245	31.640.124	**349.311.251**
KRL Yogyakarta	712.152	608.843	543.808	858.689	849.235	840.963	829.216	682.988	723.394	751.125	741.246	874.109	**9.015.768**
KA Lokal Wilayah I	380.881	345.130	288.934	413.893	383.710	394.123	390.165	350.216	340.265	367.364	385.190	423.627	**4.463.498**
KA Lokal Wilayah II	1.552.573	1.422.530	1.359.800	1.754.750	1.594.782	1.573.892	1.678.628	1.447.284	1.427.537	1.538.544	1.576.639	1.800.265	**18.727.224**
KA Lokal Wilayah VI	86.973	79.276	72.011	113.743	94.481	100.965	101.817	89.422	89.389	90.547	89.147	108.250	**1.116.021**
KA Lokal Wilayah VII	1.335.245	1.232.032	1.122.288	1.411.818	1.383.247	1.395.232	1.375.500	1.286.213	1.259.557	1.339.925	1.357.564	1.517.913	**16.016.534**
TOTAL	**32.004.229**	**30.892.002**	**30.360.579**	**32.104.976**	**32.866.763**	**32.510.142**	**35.775.810**	**32.802.847**	**32.581.191**	**35.864.438**	**34.523.031**	**36.364.288**	**398.650.296**
	Triwulan I		**93.256.810**	**Triwulan II**		**97.481.881**	**Triwulan III**		**101.159.848**	**Triwulan IV**		**106.751.757**	**291.898.539**

KA KOMERSIAL (2025)

KERETA	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL
KA Bandara Soetta (SHIA)	177.466	168.836	170.864	188.693	177.206	179350	204.871	212.475	205.011	219.802	216.057	226.683	**2.347.314**
TOTAL	**177.466**	**168.836**	**170.864**	**188.693**	**177.206**	**179.350**	**204.871**	**212.475**	**205.011**	**219.802**	**216.057**	**226.683**	**2.347.314**
	Triwulan I		**517.166**	**Triwulan II**		**545.249**	**Triwulan III**		**622.357**	**Triwulan IV**		**662.542**	**1.684.772**

Ket.

Tahun 2023 KA Bandara Soetta (SHIA) dikelola oleh PT. KCI

PT Railink

KA PSO (2025)

KERETA	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL
KA Bandara YIA	148.567	120.258	121.988	167.910	151.297	155.167	167.694	162.377	150.278	163.727	155.883	176.606	**1.841.752**
Srilelawangsa K3 Premium (MDN-BIJ-KBG)	206.465	192.715	166.787	214.780	203.328	203.190	199.120	176.013	176.866	193.878	169.213	188.069	**2.290.424**
Srilelawangsa Woojin (MDN-BIJ)	9.949	21.043	21.570	23.804	23.718	23.423	23.498	23.596	23.672	24.897	20.943	22.045	**262.158**
Srilelawangsa (MDN-ARB)	94.677	82.337	72.184	97.468	89.028	86.907	91.010	83.656	81.268	91466	92.920	98.778	**1.061.699**
Jumlah	**459.658**	**416.353**	**382.529**	**503.962**	**467.371**	**468.687**	**481.322**	**445.642**	**432.084**	**473.968**	**438.959**	**485.498**	**5.456.033**
	Triwulan I		**1.258.540**	**Triwulan II**		**1.440.020**	**Triwulan III**		**1.359.048**	**Triwulan IV**		**1.398.425**	**4.057.608**

KA KOMERSIAL (2025)

KERETA	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL
Yogyakarta Ekspres	81.149	81.644	68.330	98.807	77.799	85.587	94.142	88.278	82.273	87.249	79.882	98.837	**1.023.977**
Srilelawangsa (MDN-ARB-KNO)	46.379	42.157	39.920	46.943	41.706	39.641	41.331	39.725	36.931	41.063	41.868	43.724	**501.388**
Jumlah	**127.528**	**123.801**	**108.250**	**145.750**	**119.505**	**125.228**	**135.473**	**128.003**	**119.204**	**128.312**	**121.750**	**142.561**	**1.525.365**
	Triwulan I		**359.579**	**Triwulan II**		**390.483**	**Triwulan III**		**382.680**	**Triwulan IV**		**392.623**	**1.132.742**

Untuk KA Srilelawangsa pada lintas/relasi Mdn-Arb-Knm, terdapat 2 jenis kombinasi layanan yaitu PSO dan Komersial, namun demikian penjualan tetap sebagai satu KA yang sama yaitu KA Srilelawangsa.

KA Srilelawangsa dengan relasi MDN-ARB dan ARB-MDN adalah penumpang yang sama dikarenakan menggunakan KA yang sama.

KA Srilelawangsa relasi MDN-ARB = PSO

KA Srilelawangsa relasi ARB-KNM = Komersial

PT MRT

PENUMPANG MRT JAKARTA 2025

KERETA	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL
MRT J	3.579.538	3.483.799	3.219.035	3.268.690	3.692.387	3809796	4.419.821	4.001.641	3.915.980	4.487.284	4.173.621	4.398.037	**46.449.629**
Jumlah	**3.579.538**	**3.483.799**	**3.219.035**	**3.268.690**	**3.692.387**	**3.809.796**	**4.419.821**	**4.001.641**	**3.915.980**	**4.487.284**	**4.173.621**	**4.398.037**	**46.449.629**
	Triwulan I		**10.282.372**	**Triwulan II**		**10.770.873**	**Triwulan III**		**12.337.442**	**Triwulan IV**		**13.058.942**	**33.390.687**

PT LRT JAKARTA

PENUMPANG LRT JAKARTA (VELODROME - KELAPA GADING) 2025

KERETA	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL
LRT JAKARTA (Velodrome - K. Gading)	100.593	92.439	90.223	101.463	107.151	106202	121.338	120.987	126.172	121.366	119.752	128.012	**1.335.698**
Jumlah	**100.593**	**92.439**	**90.223**	**101.463**	**107.151**	**106.202**	**121.338**	**120.987**	**126.172**	**121.366**	**119.752**	**128.012**	**1.335.698**
	Triwulan I		**283.255**	**Triwulan II**		**314.816**	**Triwulan III**		**368.497**	**Triwulan IV**		**369.130**	**966.568**

PT LRT JABODEBEK

KERETA	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL
LRT Jabodebek	2.146.859	2.147.665	2.056.759	2.083.391	2.293.124	2312605	2.732.235	2.547.972	2.449.304	2.779.904	2.563.728	2.703.241	**28.816.787**
Jumlah	**2.146.859**	**2.147.665**	**2.056.759**	**2.083.391**	**2.293.124**	**2.312.605**	**2.732.235**	**2.547.972**	**2.449.304**	**2.779.904**	**2.563.728**	**2.703.241**	**28.816.787**
	Triwulan I		**6.351.283**	**Triwulan II**		**6.689.120**	**Triwulan III**		**7.729.511**	**Triwulan IV**		**8.046.873**	**20.769.914**

PT KCIC

KERETA	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	TOTAL
KCJB *)	530.974	476.579	346.207	498.795	528.831	554959	580.229	533.949	473.568	529.249	535.350	613.679	**6.202.369**
Jumlah	**530.974**	**476.579**	**346.207**	**498.795**	**528.831**	**554.959**	**580.229**	**533.949**	**473.568**	**529.249**	**535.350**	**613.679**	**6.202.369**
	Triwulan I		**1.353.760**	**Triwulan II**		**1.582.585**	**Triwulan III**		**1.587.746**	**Triwulan IV**		**1.678.278**	**4.524.091**

JUMLAH REKAPITULASI PENUMPANG

KERETA	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
Jumlah Penumpang	**44.128.882**	**42.027.481**	**40.899.755**	**44.866.358**	**45.146.585**	**45.822.848**	**50.214.527**	**45.606.811**	**45.033.329**	**49.428.453**	**47.497.072**	**51.065.050**
Jumlah	**Triwulan I**		**127.056.118**	**Triwulan II**		**135.835.791**	**Triwulan III**		**140.854.667**	**Triwulan IV**	**147.990.575**	**551.737.151**

REKAPITULASI JUMLAH ANGKUTAN BARANG TAHUN 2024

Target Tahun 2025 : 68.022.903

1. REKAPITULASI ANGKUTAN BARANG PULAU JAWA TAHUN 2025

Komoditi	Januari	Februari	Maret	TW I	April	Mei	Juni	TW II	Juli	Agustus	September	TW III	Oktober	November	Desember	TW IV	Total
BBM	138.431	126.130	143.650	408.211	152.789	147.537	145.709	446.035	152.985	151.404	150.911	455.300	160.536	150.771	165.546	476.853	1.786.399
PUPUK	3.810	1.380	1.590	6.780	2.340	4.110		6.450	360	1.440	1.080	2.880	1.620	2.490	840	4.950	21.060
SEMEN	91.520	89.720	67.280	248.520	63.800	85.240	83.640	232.680	109.440	99.400	100.800	309.640	102.320	91.187	90.480	283.987	1.074.827
BATUBARA	-	-		0				-				-	-	0		-	-
HASIL PERKEBUNAN (CPO,PULP,KAYU, LATEX)	-	-		0				-				-	-	0		-	-
PETIKEMAS	326.728	353.534	423.161	1.103.423	346.704	431.073	389.866	1.167.643	401.065	412.381	398.668	1.212.113	401.055	434.690	469.132	1.304.877	4.788.056
KARET & KLINKER	-	-	-	-	-	-	-	-				-		0		-	-
RETAIL (ONS PARCEL UTARA & SELATAN,BHP)	19.761	20.020	18.668	58.449	15.219	14.155	14.182	43.556	16.716	16.796	15.471	48.983	16.058	15.152	20.905	52.114	203.102
LIMBAH B3	0	0	0	0	1.869	2.396	1.638	5.903	1.575	2.373	756	4.704	1.554	525	0	2.079	12.687
LAINNYA (BANK INDONESIA,BEA KLB,ANGKUTAN DINAS,ANGKUTAN SATKER,MOTIS, BEA LANGSIR)	9.696	9.713	16.421	35.830	21.239	38.748	42.851	102.838	37.549	43.198	32.198	112.945	18.957	26.075	16.508	61.540	313.153
TOTAL	**589.946**	**600.497**	**670.770**	**1.861.213**	**603.961**	**723.259**	**677.886**	**2.005.106**	**719.690**	**726.992**	**699.884**	**2.146.565**	**702.100**	**720.890**	**763.410**	**2.186.400**	**8.199.284**
	Triwulan I			**1.861.213**	**Triwulan II**			**3.866.319**									

2. REKAPITULASI ANGKUTAN BARANG PULAU SUMATERA TAHUN 2025

Komoditi	Januari	Februari	Maret	TW I	988.993	Mei	Juni	TW II	Juli	Agustus	September	TW III	Oktober	November	Desember	TW IV	Total
BBM	72.937	68.703	77.743	219.383	82.880	71.985	73.135	228.000	75.216	74.042	73.745	223.003	71.300	72.400	81.460	225.160	895.548
PUPUK				0				-			-	-	-	0		-	-
SEMEN	159.959	161.079	138.996	460.034	120.346	103.200	101.033	324.579	81.964	104.756	102.568	289.288	103.494	98.356	80.043	281.893	1.355.794
BATUBARA	4.594.039	4.229.642	4.436.929	13.260.610	4.671.292	5.077.312	4.628.933	14.377.537	4.876.534	4.939.845	4.893.916	14.710.295	5.321.282	5.182.932	4.874.144	15.378.358	57.726.800
HASIL PERKEBUNAN (CPO,PULP,KAYU, LATEX)	59.514	50.417	46.169	156.100	45.308	50.514	24.813	120.635	41.075	39.768	55.593	136.436	56.810	52.964	54.854	164.628	577.799
PETIKEMAS	28.684	30.358	34.136	93.178	26.986	26.280	12.760	66.026	28.480	24.440	22.400	75.320	24.900	28.300	321.882	375.082	609.606
KARET & KLINKER	0	0	0	0	0	58.425	57.000	115.425	65.400	79.200	52.800	197.400	34.200	46200	44.975	125.375	438.200
RETAIL (ONS PARCEL UTARA & SELATAN,BHP)	630	720	745	2.095	690	357	328	1.375			372	372	368	375	720	1.463	5.305
LIMBAH B3	0	0	0	0	0	0	0	-	383	367	-	751	-	0	0	-	751
LAINNYA (BANK INDONESIA,BEA KLB,ANGKUTAN DINAS,ANGKUTAN SATKER,MOTIS, BEA LANGSIR)	1.850	2.000	2.433	6.283	19.200	2.675	2.250	24.125	7.475	12.290	16.320	36.085	13.475	14.675	5.043	33.193	99.686
TOTAL	**4.917.613**	**4.542.919**	**4.737.151**	**14.197.683**	**4.966.703**	**5.390.748**	**4.900.252**	**15.257.703**	**5.176.527**	**5.274.709**	**5.217.715**	**15.668.950**	**5.625.830**	**5.496.203**	**5.463.121**	**16.585.153**	**61.709.489**
				14.197.683				**29.455.386**									

3. JUMLAH BARANG TERANGKUT DENGAN KA TAHUN 2024

Komoditi	Januari	Februari	Maret	TW I	April	Mei	Juni	TW II	Juli	Agustus	September	TW III	Oktober	November	Desember	TW IV	Total
BBM	211.368	194.833	221.393	627.594	235.669	219.522	218.844	674.035	228.201	225.446	224.656	678.304	231.836	223.171	247.006	702.013	2.681.946
PUPUK	3.810	1.380	1.590	6.780	2.340	4.110	-	6.450	360	1.440	1.080	2.880	1.620	2.490	840	4.950	21.060
SEMEN	251.479	250.799	206.276	708.554	184.146	188.440	184.673	557.259	191.404	204.156	203.368	598.928	205.814	189.543	170.523	565.880	2.430.622
BATUBARA	4.594.039	4.229.642	4.436.929	13.260.610	4.671.292	5.077.312	4.628.933	14.377.537	4.876.534	4.939.845	4.893.916	14.710.295	5.321.282	5.182.932	4.874.144	15.378.358	57.726.800
HASIL PERKEBUNAN (CPO,PULP,KAYU, LATEX)	59.514	50.417	46.169	156.100	45.308	50.514	24.813	120.635	41.075	39.768	55.593	136.436	56.810	52.964	54.854	164.628	577.799
PETIKEMAS	355.412	383.892	457.297	1.196.601	373.690	457.353	402.626	1.233.669	429.545	436.821	421.068	1.287.433	425.955	462.990	791.014	1.679.959	5.397.662
KARET & KLINKER	-	-	-	-	-	58.425	57.000	115.425	65.400	79.200	52.800	197.400	34.200	46.200	44.975	125.375	438.200
RETAIL (ONS PARCEL UTARA & SELATAN,BHP)	20.391	20.740	19.413	60.544	15.909	14.512	14.510	44.931	16.716	16.796	15.843	49.355	16.426	15.527	21.625	53.578	208.408
LIMBAH B3			-	-	1.869	2.396	1.638	5.903	1.958	2.740	756	5.455	1.554	525		2.079	13.437
LAINNYA (BANK INDONESIA,BEA KLB,ANGKUTAN DINAS,ANGKUTAN SATKER,MOTIS, BEA LANGSIR)	11.546	11.713	18.854	42.113	40.439	41.423	45.101	126.963	45.024	55.488	48.518	149.030	32.432	40.750	21.551	94.733	412.839
TOTAL	**5.507.559**	**5.143.416**	**5.407.921**	**16.058.896**	**5.570.664**	**6.114.007**	**5.578.138**	**17.262.809**	**5.896.217**	**6.001.701**	**5.917.598**	**17.815.515**	**6.327.929**	**6.217.092**	**6.226.531**	**18.771.553**	**69.908.773**
	Triwulan I			**16.058.896**	**Triwulan II**			**33.321.705**									

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 5

TINGKAT KESELAMATAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : 0813 6001 3838
WEBSITE : https//djka.dephub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

NOTA DINAS
Nomor: 9/K53/I/2026

Yth	:	Direktur Keselamatan Perkeretaapian
Dari	:	Kepala Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan
Hal	:	Penyampaian Jumlah Data Kecelakaan Kereta Api Tahun 2025.
Tanggal	:	28 Januari 2026

Sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan dan analisis data kecelakaan kereta api, bersama ini kami sampaikan rekapitulasi data kecelakaan kereta api tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan fungsi pemantauan, evaluasi, dan peningkatan keselamatan perkeretaapian. Dapat kami laporkan sebagai berukut:

NO	HARI/ TANGGAL	OPERATOR	JENIS KECELAKAAN	URAIAN KEJADIAN	KORBAN	PENYEBAB
1	Sabtu, 15 Maret 2025	PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang	Anjlokan	KA 3100 (Barapati) anjlok di KM 381+9/0 Jalur II Emplasemen Stasiun Ujan Mas	Nihil	**Sarana**, yaitu: 1. Pegas yang terpasang pada bogie tidak terdeteksi memiliki nilai hasil pengujian pegas (Not OK); 2. Kondisi bowliner yang sudah rusak (sobek); 3. Kondisi taspot/upper terdapat indikasi tidak meratanya distribusi beban gerbong yang diteruskan ke bogie. **Prasarana,** yaitu: 1. Sebelum Titik Awal Naik (TAN) adanya mud pumping di bantalan ke-1 s.d-6 dan bantalan -24, -25 dan -26; 2. Pada titik awal naik (TAN) terdapat pertinggian jalan rel di lengkung yang berlebih yaitu 100 mm; 3. Lebar jalur di Titik Awal Naik (TAN) yaitu 1082 mm; 4. Skilu statis di TAN adalah 10 mm/3 m, pada bantalan -3 sebelum TAN adalah 14 mm/3 m dan pada bantalan -4 sebelum TAN adalah 15 mm/3 m.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	HARI/ TANGGAL	OPERATOR	JENIS KECELAKAAN	URAIAN KEJADIAN	KORBAN	PENYEBAB
2	Senin, 23 Juni 2025	PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang	Anjlokan	KA 3335F (Barasimpang) anjlok di KM 407+7/8 Emplasemen Stasiun Banjarsari.	Nihil	**Prasarana,** yaitu terdapat skilu statis sebesar 20mm/3m. **SDM**, yaitu dikarenakan tidak dipastikannya kondisi jalur KA telah aman setelah dilakukan perbaikan di Jalur III Stasiun Banjarsari.
3	Minggu, 27 Juli 2025	PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang	Anjlokan	KA **3992 (Linggapati)** anjlok di KM 389+4/5 antara Stasiun Muara Gula – Stasiun Muara Enim, jalur hulu, lengkung nomor 78A.	Nihil	**Prasarana,** yaitu: 1. Terdapat corrugation/kerutan/pola gelombang pada permukaan kepala rel; 2. Skilu statis jalan rel sebesar 30 mm/3m.
4	Selasa, 29 Juli 2025	PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divre III Palembang	Anjlokan	KA **3106 (Barapati)** anjlok di KM 377 +8/9 antara Stasiun Ujan Mas – Penanggiran jalur hulu, lengkung nomor 66A.	Nihil	**Prasarana,** yaitu 1. Terdapat corrugation/kerutan/pola gelombang pada permukaan kepala rel; 2. lebar jalur pada Titik Awal Naik (TAN) sebesar 1100mm/3m.
5	Jumat, 1 Agustus 2025	PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 3 Cirebon	Anjlokan	KA **1 (Argo Bromo Anggrek)** anjlok di KM 129+5/6 Emplasemen Stasiun Pegaden Baru.	1 Orang Luka Ringan	**Sarana,** yaitu kerusakan pada bearing roda.
6	Selasa, 5 Agustus 2025	PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta	Anjlokan	KA **1189 (Commuter Line Bogor – Jakarta Kota)** anjlok di KM 0+300/400 Emplasemen Stasiun Jakarta Kota antara wesel 23A2 dan wesel 43A1	Nihil	**Prasarana,** yaitu Adanya lebar jalur yang melebihi toleransi dan celah rel paksa yang tidak mengakomodir standar *back to back* KRL 990 mm.
7	Selasa, 5 Agustus 2025	PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta	Anjlokan	KA **S5 (Kuala Stabas)** anjlok di Km 141+1/2 Petak Jalan Stasiun Negeri Agung – Stasiun Tulung Buyut.	Nihil	**SDM,** yaitu Peletakan material rel bekas di bahu jalan rel tidak memenuhi jarak lebar dan tinggi pada standar ruang bebas sarana.
8	Rabu, 22 Oktober 2025	PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta	Anjlokan	KA **1689 (Commuter Line Rangkasbitung – Tanah Abang)** anjlok	Nihil	**SDM,** yaitu ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan perawatan oleh penyedia jasa setelah selesainya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	HARI/ TANGGAL	OPERATOR	JENIS KECELAKAAN	URAIAN KEJADIAN	KORBAN	PENYEBAB
				di KM 79+330 s/d 79+291 Emplasemen Stasiun Rangkasbitung.		pekerjaan penataan *track* pada jalur V. **Prasarana,** yaitu adanya skilu pada lengkung KM 79+330 s/d 79+291 yang melebihi toleransi yaitu sebesar 26 mm/3m.
9	Sabtu, 25 Oktober 2025	PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta	Anjlokan	KA **58F (Purwojaya)** anjlok di KM 55+9 Jalur Hulu antara Stasiun Kedunggedeh – Stasiun Lemahabang lengkung No. 11.	1 Orang Luka Ringan	**Prasarana,** yaitu: 1. Ditemukan adanya *rail buckling* pada lengkung No. 11; 2. Banyak ditemukan material balas yang memiliki sudut tidak tajam; 3. Komponen penambat E-clip dengan kondisi terkorosi dan patah pada lengkung No.11; 4. Terdapat perbedaan jarak antara bantalan pada bagian dalam dan rel bagian luar pada lengkung no. 11.
10	Sabtu, 19 November 2025	PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 8 Surabaya	Anjlokan	KA 2519 (Aksa Cargo) anjlok di KM 0+765 petak jalan Sta. Mesigit - Sta. Surabaya Pasarturi.	Nihil	**Prasarana,** yaitu kegiatan perawatan jalur pada lengkung Nomor 2 (Mulai belok 0+554 sampai dengan akhir belok 0+785 pada petak Stasiun Mesigit – Surabaya Pasarturi) berupa penggantian bantalan.

Demikian Nota Dinas ini kami sampaikan. Atas perkenan persetujuan dan arahan lanjut Bapak Direktur diucapkan terima kasih.

Riovano
NIP 198509062010121003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. PERSENTASE REALISASI PERJALANAN KA DI BANDINGKAN GAPEKA

Target Realisasi Tahun 2025

REALISASI PERJALANAN KERETA API TAHUN 2025

Bulanan			Renaksi Program	Realisasi							
			Bulanan	Bulanan	Kumulatif	Frekuensi				Capaian	
						KA Penumpang	KA Barang	Total	Total Kumulatif	Bulanan	Kumulatif
TW 1	1	Januari	95,6%	89.201	89.201	82.002	6.398	88.400	88.400	99,10%	99,10%
	2	Februari	95,6%	77.948	167.149	76.090	5.958	82.048	170.448	105,26%	101,97%
	3	Maret	95,6%	86.518	253.667	84.652	6.068	90.720	261.168	104,86%	102,96%
TW 2	4	April	95,6%	83.355	337.022	81.933	6.124	88.057	349.225	105,64%	103,62%
	5	Mei	95,6%	85.963	422.985	84.030	6.728	90.758	439.983	105,58%	104,02%
	6	Juni	95,6%	83.315	506.300	81.676	6.270	87.946	527.929	105,56%	104,27%
TW 3	7	Juli	95,6%	86.359	592.659	85.939	6.519	92.458	620.387	107,06%	104,68%
	8	Agustus	95,6%	86.143	678.802	85.453	6.744	92.197	712.584	107,03%	104,98%
	9	September	95,6%	83.496	762.298	82.834	6.532	89.366	801.950	107,03%	105,20%
TW 4	10	Oktober	95,6%	86.371	848.669	86.826	7.010	93.836	895.786	108,64%	105,55%
	11	November	95,6%	83.452	932.121	82.992	6.788	89.780	985.566	107,58%	105,73%
	12	Desember	95,6%	86.592	1.018.713	86.659	6.641	93.300	1.078.866	107,7%	105,90%

4. PERSENTASE KA TEPAT WAKTU (KEDATANGAN & KEBERANGKATAN)

Target Tahun 2025 :

JUMLAH KEDATANGAN KERETA API TEPAT WAKTU (*ON TIME PERFORMANCE*)

BULAN		RENAKSI	REALISASI		KA BERANGKAT TEPAT				KA DATANG TEPAT				RATA RATA		PERSENTASE CAPAIAN	
		Bulanan	Barang +	Kumulatif	Barang	Penumpang	Barang +	Kumulatif	Barang	Penumpang	Barang +	Kumulatif	Berangkat +	Kumulatif	Bulanan	Kumulatif
TW 1	Januari	96,2%	88.400	88.400	6.035	81.436	87.471	87.471	5.165	79.812	84.977	84.977	86.224	86.224	97,54%	97,54%
	Februari	96,2%	82.048	170.448	5.646	75.295	80.941	168.412	4.361	73.855	78.216	163.193	79.579	165.803	96,99%	97,27%
	Maret	96,2%	90.720	261.168	5.740	84.045	89.785	258.197	4.621	82.793	87.414	250.607	88.600	254.402	97,66%	97,41%
TW 2	April	96,2%	88.057	349.225	5.830	81.406	87.236	345.433	4.937	80.504	85.441	336.048	86.339	340.741	98,05%	97,57%
	Mei	96,2%	90.758	439.983	6.416	83.758	90.174	435.607	5.376	83.287	88.663	424.711	89.419	430.159	98,52%	97,77%
	Juni	96,2%	87.946	527.929	6.059	81.345	87.404	523.011	5.222	80.850	86.072	510.783	86.738	516.897	98,63%	97,91%
TW 3	Juli	96,2%	92.458	620.387	6.214	85.466	91.680	614.691	5.238	84.941	90.179	600.962	90.930	607.827	98,35%	97,98%
	Agustus	96,2%	92.197	712.584	6.350	84.552	90.902	705.593	5.120	83.739	88.859	689.821	89.881	697.707	97,49%	97,91%
	September	96,2%	89.366	801.950	6.146	82.492	88.638	794.231	5.022	81.852	86.874	776.695	87.756	785.463	98,20%	97,94%
TW 4	Oktober	96,2%	93.836	895.786	6.697	84.915	91.612	885.843	5.718	83.910	89.628	866.323	90.620	876.083	96,57%	97,80%
	November	96,2%	89.780	985.566	6.370	82.212	88.582	974.425	5.223	81.248	86.471	952.794	87.527	963.610	97,49%	97,77%
	Desember	96,2%	93.300	1.078.866	6.243	85.162	91.405	1.065.830	5.538	83.999	89.537	1.042.331	90.471	1.054.081	97,0%	97,70%

Awang Meindra

NIP 198105162002121003

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 6

PENCAPAIAN KINERJA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL

JI. MERDEKA BARAT 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3456919
3813154
3507656

FAX : (021) 3813154
TLX : 44310 DEPHUB IA
FAX :

Nomor : PS.302/5/4/ITJEN/2025

Jakarta, 20 Agustus 2025

Klasifikasi : Terbatas

Lampiran :

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025
pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Yth. Direktur Jenderal Perkeretaapian

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-ITJEN 39 Tahun 2025 tanggal 18 Juli 2025 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2024 pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan tujuan:
   a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
   b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
   c. menilai akuntabilitas kinerja;
   d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
   e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

2. Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap akuntabilitas kinerja Eselon I saja, namun juga dilakukan uji petik terhadap akuntabilitas kinerja pada beberapa Unit Kerja yaitu:
   a. Direktrorat Prasarana;
   b. Direktorat Keselamatan;
   c. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
   d. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
   e. Balai Pengujian Perkeretaapian.

3. Evaluasi dilakukan terhadap empat komponen manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

4. Dari hasil evaluasi terhadap empat komponen tersebut, Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh nilai **83,72** (**Predikat A**) dengan interpretasi "**Memuaskan**".

5. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	**24,90**
2	Pengukuran Kinerja	30,00	**25,53**
3	Pelaporan Kinerja	15,00	**12,41**
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	**20,88**
Nilai Hasil Evaluasi			**83,72**
Predikat			**A**

6. Hasil penilaian terhadap masing-masing komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dapat diuraikan sebagai berikut:
   a. Perencanaan Kinerja
      Nilai hasil evaluasi atas komponen Perencanaan Kinerja sebesar 24,90 dari nilai maksimal 30, dengan catatan belum seluruh Realisasi target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja Tahun 2024 masuk kriteria on the right track (90% s.d. 110%).
   b. Pengukuran Kinerja
      Nilai hasil evaluasi atas komponen Pengukuran Kinerja sebesar 25,53 dari nilai maksimal 30, dengan catatan pengukuran kinerja tahun 2024 belum seluruhnya dimanfaatkan menjadi dasar penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.
   c. Pelaporan Kinerja
      Nilai hasil evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja sebesar 12,41 dari nilai maksimal 15,00, dengan catatan laporan kinerja belum memuat informasi terkait perubahan kinerja organisasi.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
Nilai hasil evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja sebesar 20,88 dari nilai maksimal 25,00.

7. Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi. Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh nilai Kinerja Organisasi **101,86%** dengan predikat Istimewa, dengan hasil sebagai berikut:

NILAI AKIP TAHUN 2024 : 83,72

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK(1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3)=(1) x (100%-(2))
1	SP1 Konektivitas Jaringan Perkeretaapian Nasional Yang Diwujudkan Dalam Penyediaan Infrastruktur	Rasio Konektivitas Antar Wilayah	0,46	0,46	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
2	SP2 Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Dengan Sumber Daya Manusia, Sarana Dan Prasarana Yang Handal	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Kereta Api (rate of accident)	0,06	0,06	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
3	SP3 Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian Yang Terpercaya Dan Sesuai Kebutuhan	Persentase On Time Performance (OTP) Transportasi Kereta Api	90,5	96,19	106,29%	106,29%	0,00%	106,29%
		Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	78,8	81,65	103,62%	103,62%	0,00%	103,62%
		Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	77,8	78,73	101,20%	101,195%	0,00%	101,20%
		Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI	94	95,02	101,09%	101,09%	0,00%	101,09%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang	3,7	3,73	100,81%	100,81%	0,00%	100,81%
							Total Capaian PK	713,00%
							Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau rata-rata Capaian PK	101,86%
							Predikat PKO	ISTIMEWA

8. Seluruh Rekomendasi evaluasi AKIP tahun 2024 telah ditindaklanjuti dan dinyatakan tuntas.

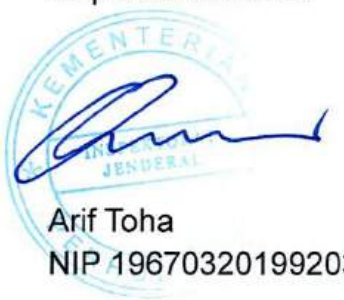
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian kami merekomendasikan sebagai berikut:

1. Target kinerja yang ditetapkan dimonitoring, dievaluasi secara berkala dan melakukan langkah langkah perbaikan yang diperlukan sehingga sesuai kriteria *on the right track* yaitu realisasi capaiaan IKU/IKK antara 90% s.d. 110%;
2. Memanfaatkan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional dan diinformasikan dalam LMCK/LKIP termasuk tindak lanjut yang tertuang didalamnya agar ditindaklanjuti;
3. Mencantumkan informasi perubahan budaya kinerja pada LKIP (semula - menjadi);

4. Melakukan monitoring secara terus menerus dan memastikan bahwa kriteria dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi AKIP telah tercantum dalam LMCK/LKIP satuan kerja di lingkungan DJKA yang tidak termasuk dalam sampel evaluasi AKIP Tahun 2025.

Demikian disampaikan hasil evaluasi akuntabilitas AKIP tahun 2025 Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Inspektur Jenderal



Arif Toha
NIP 196703201992031003

Tembusan:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Direktur Prasarana Ditjen Perkeretaapian;
3. Direktur Keselamatan Ditjen Perkeretaapian;
4. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
5. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
6. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian.

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
TAHUN 2025

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja 2025
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,90
2	Pengukuran Kinerja	30,00	25,53
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,41
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,88
Nilai Akuntabilitas Kinerja			83,72
			A

No	Catatan
1	Belum seluruh Realisasi target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja Tahun 2024 masuk kriteria on the right track (90% s.d. 110%)
2	Pengukuran kinerja tahun 2024 belum seluruhnya dimanfaatkan menjadi dasar penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional
3	Laporan kinerja belum memuat informasi terkait perubahan kinerja organisasi

No	Rekomendasi
1	Target kinerja yang ditetapkan dimonitoring, dievaluasi secara berkala dan melakukan langkah langkah perbaikan yang diperlukan sehingga sesuai kriteria on the right track yaitu realisasi capaiaan IKU/IKK antara 90% s.d. 110%
2	Memanfaatkan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional dan diinformasikan dalam LMCK/LKIP termasuk tindak lanjut yang tertuang didalamnya agar ditindaklanjuti
3	Mencantumkan informasi perubahan budaya kinerja pada LKIP (semula - menjadi)
4	Melakukan monitoring secara terus menerus dan memastikan bahwa kriteria dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi AKIP telah tercantum dalam LMCK/LKIP satuan kerja di lingkungan DJKA yang tidak termasuk dalam sampel evaluasi AKIP Tahun 2025

Menyetujui,
Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Amin Hudaya, S.T., M.T.
NIP. 197312311998031003

Tim Evaluator

Roy Bernardo Simanjuntak, S.Si.T., M.Sc. CRMO.
NIP. 198202192006041001

Aryadi Prakoso, S.T., C.Fr.A.,QIA
NIP. 198507162008121001

Aulia Widiastuti, S.T., M.T. CRMO.
NIP. 197610152010122001

Muhammad Yusuf, S.E., CGAA
NIP. 198103312008121001

Daffa Reyhan Zulfikar A., A.Md.T.
NIP. 200004042021121001

LEMBAR KERJA EVALUASI GABUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
2025

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Eselon I	Nilai Unit Kerja Sampling	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
1	**PERENCANAAN KINERJA**	**30,00**			**24,90**	**83,00%**
1.1	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	6	6,00	6,00	100,00%
1.2	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik,	9,00	7,2	7,20	7,20	80,00%
1.3	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	12	11,40	11,70	78,00%
2	**PENGUKURAN KINERJA**	**30,00**			**25,53**	**85,10%**
2.1	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	6	5,88	5,94	99,00%
2.2	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan	9,00	8,1	7,38	7,74	86,00%
2.3	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward	15,00	12	11,70	11,85	79,00%
3	**PELAPORAN KINERJA**	**15,00**			**12,41**	**82,70%**
3.1	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	3	2,76	2,88	96,00%
3.2	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan	4,50	3,6	3,60	3,60	80,00%
3.3	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam	7,50	6	5,85	5,93	79,00%
4	**EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL**	**25,00**			**20,88**	**83,50%**
4.1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,5	4,50	4,50	90,00%
4.2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6,75	6,00	6,38	85,00%
4.3	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas	12,50	10	10,00	10,00	80,00%
Nilai Akuntabilitas Kinerja			**85,15**	**82,27**	**83,72**	

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3456919
3813154
3507656

FAX : (021) 3813154
TLX : 44310 DEPHUB IA

Nomor : KP.904 /5/22/ITJEN /2025 Jakarta 24 September 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Ikhtisar Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Yth. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PANRB

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor 39 Tahun 2025 tanggal 18 Juli 2025 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2025 Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Terlampir disampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi pada masing-masing unit kerja Eselon I. Kiranya Saudara berkenan memberikan arahan selanjutnya guna peningkatan akuntabilitas kinerja secara berkesinambungan pada tahun yang akan datang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Inspektur Jenderal,

Arif Toha
NIP 196703201992031003

Tembusan:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Perhubungan.

Lampiran Surat
Nomor : KP.904/5/22/TUEN/2025
Tanggal : 29 September 2025

Hasil Evaluasi dan Rekomendasi atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 di lingkungan Kementerian Perhubungan

1. Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2025

No	Unit Kerja	Capaian Kinerja per Komponen Tahun 2025				Penilaian Kinerja	
		Perencanaan Kinerja (30%)	Pengukuran Kinerja (30%)	Pelaporan Kinerja (15%)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	2025	2024
1	Sekretariat Jenderal	23,61	24,90	11,85	20,50	80,87	80,15
2	Ditjen Hubdat	25,47	24,87	12,93	19,88	83,16	82,69
3	Ditjen Hubla	23,05	25,05	12,29	22,25	82,79	80,82
4	Ditjen Hubud	23,07	24,60	13,01	20,13	80,80	80,79
5	Ditjen Perkeretaapian	24,90	25,53	12,41	20,88	83,72	82,95
6	DJITM	25,13	23,70	11,83	19,38	80,04	77,50
7	Inspektorat Jenderal	25,20	25,20	12.60	19,50	82,50	82,30
8	BKT	22,20	25,35	12,45	20,00	80,01	79,14
9	BPSDMP	23,82	24,60	11,25	20,38	80,06	77,90

2. Rekomendasi berdasarkan hasil capaian kinerja masing-masing Unit Kerja Eselon I

   a. Sekretariat Jenderal
      1) Dalam menetapkan Target IKU/IKK yang ditetapkan pada dokumen perencanaan kinerja memperhatikan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya yang memenuhi prinsip menantang (lebih baik dari realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya);
      2) Laporan Kinerja menyajikan:
         a) Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
         b) Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja);
         c) Informasi bahwa laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
      3) Memanfaatkan Hasil Evaluasi AKIP Internal dalam rangka perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

b. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
   1) Menyusun dokumen perencanaan kinerja yang selaras dengan tugas dan fungsi Unit Kerja dengan memperhatikan capaian tahun sebelumnya dengan ukuran keberhasilan (Indikator Kinerja kegiatan) yang memenuhi kriteria SMART;
   2) Hasil pengukuran kinerja digunakan sebagai bagian dalam penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja serta menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional;
   3) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
   4) Agar melaksanakan sosialisasi penyusunan LAKIP secara terus menerus untuk mengantisipasi rotasi personil penyusun LAKIP;
   5) Agar pimpinan memahami Akuntabilitas Kinerja yang menjadi tanggungjawabnya meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
   6) Agar setiap unit kerja dapat mendokumentasikan dengan baik setiap data yang dibutuhkan dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

c. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
   1) Indikator kinerja pada unit kerja / satker belum memenuhi kriteria Spesifik *Measurable Achievable Relevance Timebound* dan *Achievable*, menantang, serta realistis;
   2) Realisasi atas indikator kinerja pada unit kerja terdapat realisasi anomali belum (*on the right track*) yang tercantum Renstra dan PK 2024. *On the Right Track* (Range 90% - 110%);
   3) Satker/UPT sampling yang telah melaksanakan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja pada satker lainnya (*Benchmark* Kinerja) yang memiliki kesamaan indikator kinerja tidak tertuang secara berkesinambungan pada dokumen Monitoring Renaksi atas PK (bulanan), Laporan Monitoring Capaian Kinerja (triwulanan) dan Laporan Kinerja (tahunan);
   4) Terdapat Satker/UPT sampling tidak menginformasikan tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*) pada dokumen Perencanaan Kinerja;
   5) Seluruh satker/UPT sampling belum sepenuhnya memaksimalkan pemanfaatan hasil evaluasi AKIP mandiri oleh Eselon I serta hasil Evaluasi AKIP Internal oleh APIP.

d. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
   1) Agar Dokumen Perencanaan Kinerja dapat dipublikasikan tepat waktu;

2) Agar target kinerja perlu ditetapkan secara menantang dan realistis, serta menunjukan peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya;
3) Memastikan dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja dipertahankan minimal lima tahun terakhir;
4) Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara mendalam sesuai dengan KM 74 Tahun 2024;
5) Menjadikan hasil pengukuran kinerja sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan peningkatan kinerja.

e. Direktorat Jenderal Perkeretaapian
1) Target kinerja yang ditetapkan dimonitoring, dievaluasi secara berkala dan melakukan langkah langkah perbaikan yang diperlukan sehingga sesuai kriteria on the right track yaitu realisasi capaiaan IKU/IKK antara 90% s.d. 110%;
2) Memanfaatkan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional dan diinformasikan dalam LMCK/LKIP termasuk tindak lanjut yang tertuang didalamnya agar ditindaklanjuti;
3) Mencantumkan informasi perubahan budaya kinerja pada LKIP (semula - menjadi);
4) Melakukan monitoring secara terus menerus dan memastikan bahwa kriteria dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi AKIP telah tercantum dalam LMCK/LKIP satuan kerja di lingkungan DJKA yang tidak termasuk dalam sampel evaluasi AKIP Tahun 2025.

f. Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda
1) Dokumen administratif, seperti Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun-tahun sebelumnya, surat pengantar laporan kinerja, harus dilampirkan secara lengkap untuk memperkuat keterlacakan dan validitas pelaporan;
2) Perlu peningkatan integrasi hasil pengukuran kinerja sebagai dasar kebijakan manajemen SDM, termasuk dalam proses penempatan, mutasi, atau penghapusan jabatan struktural/fungsional;
3) Laporan Kinerja perlu menyajikan benchmark capaian IKU/IKK dengan entitas sejenis di tingkat nasional/internasional untuk mendorong pembelajaran dan pencapaian standar lebih tinggi.

g. Inspektorat Jenderal
1) Menambahkan narasi pada manual IKU yang menjelaskan indikator apa saja yang menggunakan rumus *maximize* atau *minimize*;
2) Pimpinan lebih berperan aktif dalam melakukan monitoring capaian kinerja secara berkala dan didokumentasikan;

3) Penanggung jawab kegiatan dalam rencana aksi atas Perjanjian Kinerja agar mendokumentasikan laporan capaian kinerja setiap bulan;
4) Dalam menyusun target indikator kinerja tahun berikutnya agar mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya.

h. Badan Kebijakan Transportasi
1) Mereviu dan mengevaluasi kembali indikator kinerja di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi agar dapat memenuhi kriteria SMART-C (Spesifik, *Measurable, Achieveable, Relevance, Time bound*, dan Cukup);
2) Mereviu kembali penetapan target pada Perjanjian Kinerja untuk memastikan target kinerja dapat dicapai (*achievable*), menantang dan realistis;
3) Dalam pengukuran capaian kinerja agar data yang digunakan sesuai dengan metode pengukuran dan sumber data yang tertuang dalam manual IKU;
4) Menyusun Laporan Kinerja dan menyampaikan kepada Atasan Langsung dengan memperhatikan batas waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5) Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja dengan menyajikan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target akhir kinerja pada Renstra, analisis efisensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan dan aktivitas antar bidang/tugas fungsi lain yang berkaitan (crosscutting) dan budaya kinerja organisasi;
6) Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja baik hasil evaluasi internal Badan Kebijakan Transportasi maupun hasil evaluasi Inspektorat Jenderal dengan disertai data dukung yang relevan.

i. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
1) Memastikan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tingkat unit kerja disampaikan tepat waktu melalui laman ESR;
2) Meningkatkan komitmen pimpinan Unit Kerja untuk selalu terlibat dan berperan aktif dalam setiap rapat pencapaian kinerja sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja;
3) Pada saat penyusunan laporan kinerja agar mengidentifikasi perbandingan realisasi kinerja Unit Kerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja) dan perubahan budaya kinerja organisasi serta menyampaikanya dalam laporan kinerja;
4) Mereviu kembali penetapan target kinerja dalam dokumen perjanjian kinerja guna memastikan seluruh sasaran kinerja telah dilengkapi dengan indikator kinerja yang SMART (*Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound*) dan memenuhi kriteria menantang sehingga target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track (tidak kurang dari dari 90% atau lebih 110%);

5) Agar pimpinan unit kerja memastikan bahwa seluruh capaian IKU/ IKK dalam Perjanjian Kinerja telah didukung dengan data dukung/ dokumen yang relevan sesuai manual IKU/ IKK untuk mendukung dan mengukur capaian kinerja yang diharapkan;
6) Agar unit kerja menggunakan Informasi dalam laporan kinerja dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja;
7) Agar Unit Kerja Eselon I melakukan pembinaan secara intensif kepada unit kerja serta menyampaikan kelemahan-kelemahan implementasi SAKIP di unit kerja dengan lebih komprehensif sehingga memudahkan unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP.

Inspektur Jenderal,

Arif Toha
NIP 196703201992031003

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110
TELP : +62 813-6001-3838
WEBSITE : https://djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : PR.205/1/10/K1/DJKA/2026

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : Dua lembar

Hal : Tindak Lanjut Rapat Pembahasan Capaian Kinerja dan Reviu Konsep Laporan Kinerja Tahun 2025

Jakarta, 20 Januari 2026

Yth. Daftar Terlampir

Berdasarkan hasil rapat pembahasan capaian kinerja Triwulan IV dan reviu konsep Laporan Kinerja Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 12 s.d. 13 Januari 2026, dengan ini diminta kepada masing-masing unit kerja untuk menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepatuhan pemanfaatan aplikasi pelaporan kinerja dengan melengkapi pengisian aplikasi secara berkala dan tepat waktu sesuai ketentuan mencakup:
   a. Pengisian aplikasi e-SAKIP Reviu dengan *upload* dokumen terbaru ***secara berkala*** sesuai fitur pada aplikasi diantaranya pohon kinerja dan *cascading*, tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) internal, perencanaan kinerja (Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja), laporan monitoring rencana aksi (laporan monitoring kinerja triwulan, monitoring rencana aksi), laporan kinerja tahunan, pedoman teknis, dan dokumen lainnya yang dibutuhkan;
   b. Pengisian aplikasi e-Monev Bappenas meliputi capaian/realisasi komponen dan rincian *output*, status pelaksanaan, progres pelaksanaan, permasalahan, capaian indikator kinerja kegiatan, dan informasi/keterangan lainnya secara lengkap untuk periode Triwulan I-IV Tahun 2025 ***paling lambat tanggal 20 Januari 2026***;
   c. Pengisian aplikasi SAKTI (terkoneksi dengan aplikasi Monev Kemenkeu) meliputi partisipasi satuan kerja dan monitoring realisasi rincian *output* ***pada kesempatan pertama***;

d. Pengisian…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Pengisian aplikasi e-*Performance* secara lengkap dan tepat waktu setiap bulan ***paling lambat hari kerja kelima pada bulan berikutnya*** meliputi capaian kinerja, keterangan/analisa, rencana selanjutnya dan dokumen pendukung masing-masing indikator kinerja, termasuk pengisian aplikasi e-*Performance* Tahun 2026 sesuai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan; dan

e. Pengisian fitur Dukungan SAKIP pada Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian meliputi monitoring rencana aksi ***setiap bulan paling lambat tanggal 25 pada bulan berikutnya*** termasuk *upload* dokumentasi pelaporan kinerja secara berkala.

2. Melakukan penyusunan Laporan Monitoring Kinerja Triwulan IV dan Laporan Kinerja Tahun 2025 sesuai *outline*, substansi, dan dokumen pendukung mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan, Pedoman Penyelenggaraan SAKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2026, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (revisi terakhir), tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, serta hasil rapat pembahasan.

   Dalam penyusunan pelaporan kinerja, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti diantaranya:

   a. Menindaklanjuti hasil reviu konsep Laporan Kinerja Tahun 2025 sesuai Kertas Kerja Reviu masing-masing unit kerja yang dapat diakses pada tautan https://tinyurl.com/KertasKerjaReviuLKIN2025;

   b. Menyediakan dukungan sumber daya manusia/tim penyusun Laporan Kinerja dengan melibatkan seluruh komponen unit kerja dilengkapi mekanisme penyampaian data/informasi, penanggung jawab pengumpulan data/informasi, serta analisis/penjelasan yang diketahui oleh seluruh komponen unit kerja;

   c. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan validasi data capaian kinerja antar unit kerja (Sekretariat/Direktorat/Balai), diantaranya data realisasi angkutan kereta api (penumpang, barang), realisasi perjalanan kereta api, *Track Quality Index* (TQI), fasilitas operasi handal (elektrik, mekanik), data kecelakaan kereta api (dilengkapi indikasi awal penyebab kecelakaan), dan lainnya;

d. Mengecek…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Mengecek kembali penggunaan *manual* indikator kinerja (rumusan perhitungan, satuan, lainnya) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 162 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

e. Meningkatkan kualitas penulisan dan penyampaian substansi pada Laporan Kinerja mengacu pada kaidah bahasa yang benar sehingga memenuhi kriteria laporan yang baik; dan

f. Menyusun laporan kinerja dengan substansi yang lengkap, diantaranya:

1) Analisa keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja dengan lebih spesifik dan tidak normatif sesuai realisasi/progres kegiatan pendukung dilengkapi informasi *crosscutting* (keterhubungan sektor/unit kerja lain) dan realisasi penanganan risiko sesuai dukungan pencapaian pada masing-masing indikator kinerja, serta inovasi/upaya yang patut dihargai dalam pencapaian kinerja;
2) Analisa perbandingan capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian Rencana Strategis serta perbandingan dengan capaian 3 tahun terakhir;
3) *Benchmarking* kinerja (minimal sejumlah 50% dari jumlah indikator kinerja) dengan perbandingan kinerja pada unit kerja tingkat di atasnya/tingkat nasional/internasional/sektor lainnya yang sejenis;
4) Rekomendasi/upaya peningkatan kinerja ke depan yang rinci dan dapat dilaksanakan dengan mencakup penyesuaian strategi/kebijakan, penyesuaian aktivitas/anggaran, penyesuaian organisasi/jabatan/ pegawai;
5) Analisa efisiensi sumber daya anggaran dan sumber daya manusia, sesuai formulasi yang telah disepakati termasuk interpretasi hasil analisa serta dapat juga ditambahkan analisa penggunaan sumber daya lainnya dalam pencapaian target kinerja (sarana dan prasarana);
6) Penyampaian dukungan agenda prioritas nasional seperti pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, program prioritas nasional, proyek strategis nasional, kegiatan padat karya, dan dukungan lainnya sesuai bidang tugas;

7) Informasi...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7) Informasi perubahan/peningkatan budaya kinerja dengan format semula-menjadi serta dilengkapi keterangan/dampak/manfaat perubahan budaya kinerja;
8) Data dukung capaian kinerja yang valid dan dilengkapi persetujuan pejabat yang menjadi penanggung jawab; dan
9) Dokumentasi dan laporan pembahasan internal unit kerja guna menunjukkan kepedulian dan pemahaman dari pimpinan dan pegawai terkait pengukuran dan pelaporan kinerja termasuk dilengkapi dengan penyampaian data capaian kinerja dari sub unit kerja secara berjenjang.

Selanjutnya, Laporan Monitoring Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 agar dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian ***paling lambat tanggal 25 Januari 2026***, sedangkan Laporan Kinerja Tahun 2025 dilaporkan ***paling lambat tanggal 25 Januari 2026 untuk unit kerja Eselon III/Balai dan tanggal 30 Januari 2026 untuk unit kerja Eselon II***. Pelaporan kinerja tersebut agar juga diproses lanjut/unggah pada aplikasi e-SAKIP Reviu dan Portal Layanan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan

3. Khusus untuk masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, agar menyampaikan data dukung capaian masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025 sesuai bidang tugas dilengkapi uraian analisis keberhasilan/kegagalan dan rekomendasi/upaya peningkatan kinerja untuk periode berikutnya kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian c.q. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025.

Selain itu…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selain itu, dalam rangka menindaklanjuti penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 pada tanggal 14 Januari 2026, masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian perlu menyusun Perjanjian Kinerja Berjenjang sampai pada tingkat staf/pelaksana yang selaras dan selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perkeretaapian,



Amin Hudaya
NIP 197312311998031003

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkeretaapian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I Surat
Nomor : PR.205/1/10/K1/DJKA/2026
Tanggal : 20 Januari 2026

1. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Plt. Direktur Prasarana Perkeretaapian;
3. Plt. Direktur Sarana Perkeretaapian;
4. Direktur Keselamatan Perkeretaapian;
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
6. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
7. Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
8. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
9. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
10. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
11. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
12. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
13. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
14. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
15. Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian;
16. Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian;
17. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
18. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran II Surat
Nomor : PR.205/1/10/K1/DJKA/2026
Tanggal : 20 Januari 2026

Outline Penyusunan Laporan Kinerja

Kata Pengantar
Ringkasan Eksekutif
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar

BAB I PENDAHULUAN
1. 1 Latar Belakang
1. 2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi
1. 3 Struktur Organisasi
1. 4 Sumber Daya Manusia
1. 5 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

Berisi penjelasan organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi

Berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB II PERENCANAAN KINERJA
2. 1 Uraian Singkat Rencana Strategis
(Arah Kebijakan, Strategi, Sasaran, Target Kinerja)
2. 2 Perjanjian Kinerja (termasuk penjelasan perubahan/revisi Perjanjian Kinerja serta Analisis SMART Indikator Kinerja)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3. 1 Tahapan Pengukuran Kinerja
3. 2 Pengukuran Capaian Kinerja
A. Perbandingan realisasi kinerja terhadap target revisi PK dilengkapi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan termasuk data *crosscutting,* perhitungan matematika realisasi kinerja, realisasi penanganan risiko periode triwulan, uraian inovasi dalam pencapaian kinerja
B. Upaya peningkatan kinerja/alternatif solusi yang perlu dilakukan dilengkapi uraian pengaruh terhadap penyesuaian Strategi/Kebijakan, Aktivitas/Anggaran, Organisasi/Jabatan/Pegawai
C. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional
D. Perbandingan realisasi kinerja terhadap kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
E. Perbandingan realisasi kinerja terhadap target kinerja pada tahun bersangkutan dalam periode Renstra
F. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target nasional (jika ada);
3. 3 Dukungan Pencapaian Target RPJMN Tahun 2025-2029
3. 4 Analisis Efisiensi Sumber Daya (Anggaran dan SDM)
3. 5 Capaian Keberhasilan Lainnya
3. 6 Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja oganisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja (unit kerja, per indikator kinerja)

Evaluasi dan analisis setiap sasaran strategis dan kondisi terakhir yang dicapai yang juga mencakup efisiensi sumber daya

BAB IV PENUTUP
4. 1 Tindak Lanjut Rekomendasi pada Laporan Kinerja Sebelumnya (termasuk upaya peningkatan budaya kinerja semula-menjadi)
4. 1 Kesimpulan (diantaranya simpulan pencapaian kinerja dan prestasi unit kerja)
4. 3 Rekomendasi Peningkatan Kinerja

Berisi kesimpulan umum atas capaian kinerja dan langkah di masa akan datang untuk meningkatkan kinerja organisasi

LAMPIRAN
Lampiran I. Rencana Kinerja Tahunan
Lampiran II. Perjanjian Kerja (revisi terakhir)
Lampiran III. Komitmen Rekomendasi Peningkatan Kinerja
Lampiran IV. Monitoring Rencana Aksi
Lampiran V. Data Dukung Capaian Kinerja Yang Valid
Lampiran VI. Dokumentasi Pembahasan Kinerja di Internal Unit Kerja, termasuk nota dinas penyampaian data kinerja dari sub unit kerja

Sumber : Permenhub No. PM 85/2020, KM 74/2024, sumber lainnya (diolah)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ditjen Perkeretaapian

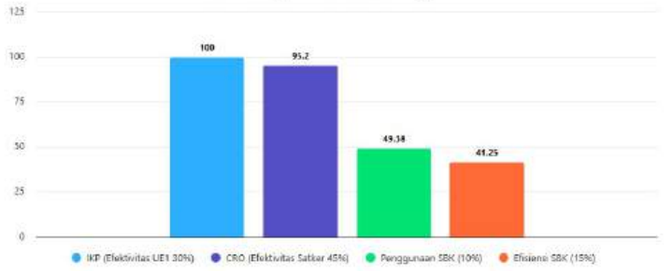
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Nilai Kinerja Anggaran

Baik



Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran



Desember

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran



Progress Rincian Output



Jumlah RO sebanyak **209** RO
- 189 RO sudah tercapai (progress = 100%)
- 16 RO dalam proses (0 < progress < 100%)
- 0 RO belum ada proses (progress = 0%)

95.65 adalah Rata-rata progress seluruh capaian RO di Satuan Kerja Ditjen perkeretaapian

Data Anomali

Kondisi	Keterangan	Jumlah RO	Persentase
Case 1	PCRO dilaporkan 0 meskipun telah ada realisasi anggaran	0	0%
Case 2	PCRO dilaporkan lebih rendah dari pada realisasi anggaran	0	0%
Case 3	PCRO 100% namun capaian fisik (RVRO) masih 0	0	0%
Case 4	PCRO 100% namun capaian fisik (RVRO) tidak mencapai target/volume DIPA	2	0.98%

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Pagu dan Realisasi Anggaran

Tahun Anggaran 2011 s.d. 2025



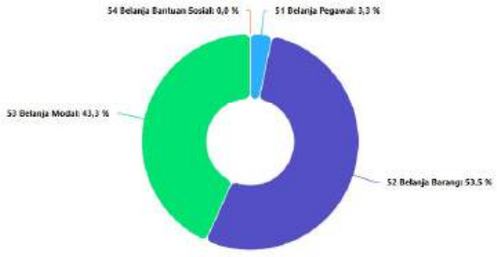
Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	255.258.712.000	246.698.649.707	96,65 %
52 Belanja Barang	4.189.962.723.000	4.019.596.700.774	95,72 %
53 Belanja Modal	3.391.995.119.000	1.208.442.425.363	35,63 %
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00 %

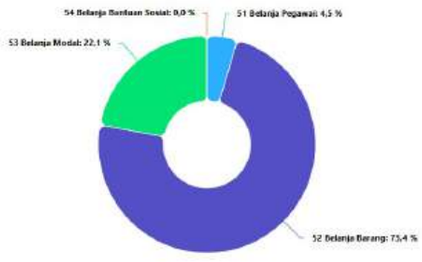
Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Komposisi Alokasi Anggaran



Komposisi Realisasi Anggaran



Partisipasi Satuan Kerja

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	440572	PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAPIAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	467035	BALAI PENGELOLA KERETA API WILAYAH SUMATERA SELATAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	467005	BALAI PENGELOLA KERETAAPI SULAWESI SELATAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	467209	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	467321	BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	467237	BALAI TEKNIK PERKERETAPIAN KELAS I SURABAYA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	467245	BALAI TEKNIK PERKERETAPIAN KELAS I MEDAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	467252	BALAI TEKNIK PERKERETAPIAN KELAS II PADANG	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Menampilkan 1 sampai 8 dari 16 entri

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DITJEN PERBENDAHARAAN

LAPORAN PERINGKAT REALISASI BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Nama Kementerian/Lembaga	Total Pagu	Total Realisasi	Persentase
1	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	12,076,160,000	12,075,398,734	99.99%
2	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	661,811,922,000	661,245,890,746	99.91%
3	BADAN PANGAN NASIONAL	15,803,137,226,000	15,660,081,560,761	99.09%
4	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	26,684,635,522,000	26,402,086,502,038	98.94%
5	MAHKAMAH AGUNG	13,145,686,448,000	12,897,975,083,173	98.12%
6	BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)	1,497,578,812,000	1,465,724,947,176	97.87%
7	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	1,596,022,676,000	1,554,975,214,738	97.43%
8	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	149,027,199,340,000	145,172,801,631,882	97.41%
9	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	3,211,692,712,000	3,110,867,452,419	96.86%
10	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	2,589,710,760,000	2,508,175,404,843	96.85%
11	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP / BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	1,328,223,318,000	1,284,234,641,119	96.69%
12	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	64,337,447,910,000	62,173,068,686,809	96.64%
13	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	135,222,498,000	130,374,907,400	96.42%
14	KEMENTERIAN AGAMA	85,686,523,822,000	81,734,694,429,909	95.39%
15	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	2,474,247,333,000	2,359,148,353,594	95.35%
16	KEMENTERIAN PARIWISATA	1,489,910,815,000	1,419,213,504,667	95.25%
17	KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	18,860,287,093,000	17,937,817,797,275	95.11%
18	KEMENTERIAN SOSIAL	112,778,901,207,000	106,995,564,788,156	94.87%
19	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	229,919,355,000	218,078,929,765	94.85%
20	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	1,464,548,473,000	1,387,864,616,458	94.76%
21	BADAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	687,451,614,000	650,710,732,522	94.66%
22	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	58,510,271,911,000	55,350,694,401,327	94.6%
23	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	343,675,663,000	323,984,494,632	94.27%
24	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	9,896,588,491,000	9,329,887,657,387	94.27%
25	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	400,000,516,000	376,849,451,491	94.21%
26	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	1,211,412,834,000	1,132,695,156,502	93.5%
27	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	230,000,000,000	214,921,317,775	93.44%
28	BADAN KARANTINA INDONESIA	1,435,925,239,000	1,340,317,724,475	93.34%
29	KOMISI PEMILIHAN UMUM	5,549,840,498,000	5,157,721,195,632	92.93%
30	KEMENTERIAN PERTAHANAN	364,198,605,815,000	338,169,336,847,001	92.85%
31	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL	436,812,997,000	403,905,784,263	92.47%
32	BADAN KEAMANAN LAUT	2,705,254,936,000	2,490,956,175,926	92.08%
33	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	6,676,151,787,000	6,134,200,152,374	91.88%
34	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	879,611,122,000	807,238,614,076	91.77%
35	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	919,179,256,000	842,439,882,646	91.65%
36	KEMENTERIAN KEHUTANAN	5,512,401,046,000	5,025,687,965,488	91.17%
37	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	2,408,834,380,000	2,190,567,811,730	90.94%
38	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	294,733,828,000	265,410,958,599	90.05%
39	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	3,327,787,877,000	2,993,261,346,339	89.95%
40	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)	374,428,347,000	336,456,506,238	89.86%
41	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	474,212,200,000	425,648,973,612	89.76%
42	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN	199,498,773,000	178,754,183,805	89.6%
43	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	6,186,400,340,000	5,485,441,268,318	88.67%
44	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	229,367,121,000	203,218,080,762	88.6%
45	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	119,998,645,988,000	105,803,788,033,001	88.17%
46	KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF / BADAN EKONOMI KREATIF	443,656,095,000	391,129,141,516	88.16%
47	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	6,980,385,915,000	6,128,365,622,558	87.79%
48	BADAN PUSAT STATISTIK	5,818,983,499,000	5,102,033,692,376	87.68%
49	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	4,409,342,193,000	3,864,333,300,513	87.64%
50	KOMISI YUDISIAL RI	184,526,343,000	161,722,222,172	87.64%
51	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	1,065,106,757,000	933,031,023,650	87.6%
52	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	1,649,445,062,000	1,440,227,038,539	87.32%
53	KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	2,457,850,244,000	2,128,043,296,124	86.58%
54	KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA	501,655,676,000	434,014,294,386	86.52%
55	KEMENTERIAN KEUANGAN	113,132,035,297,000	97,799,291,088,948	86.45%
56	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	1,897,503,971,000	1,631,393,704,789	85.98%
57	BADAN PENYELENGGARA HAJI	207,802,882,000	178,528,819,872	85.91%

58	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5,274,391,058,000	4,528,642,300,904	85.86%
59	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	165,432,848,000	141,742,346,811	85.68%
60	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	9,262,995,542,000	7,893,288,992,811	85.21%
61	BADAN INTELIJEN NEGARA	19,118,317,893,000	16,280,200,232,182	85.15%
62	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	725,812,904,000	614,533,258,040	84.67%
63	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	255,591,019,000	215,301,300,103	84.24%
64	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	156,725,426,000	131,896,115,960	84.16%
65	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	2,856,581,975,000	2,398,081,747,731	83.95%
66	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2,501,798,035,000	2,094,415,175,279	83.72%
67	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	208,429,301,000	173,078,921,550	83.04%
68	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	15,262,609,941,000	12,606,913,539,853	82.6%
69	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	10,199,160,372,000	8,408,576,913,885	82.44%
70	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1,860,621,407,000	1,530,712,988,621	82.27%
71	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAM, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	209,124,409,000	171,915,532,601	82.21%
72	KEMENTERIAN KESEHATAN	114,203,993,225,000	93,858,286,584,686	82.18%
73	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	15,951,445,508,000	13,106,713,346,691	82.17%
74	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12,672,291,550,000	10,264,434,796,571	81%
75	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	721,684,480,000	583,031,450,627	80.79%
76	LEMBAGA SANDI NEGARA	1,321,636,821,000	1,066,930,401,810	80.73%
77	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	187,075,848,000	150,283,823,526	80.33%
78	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	277,498,437,000	222,719,909,353	80.26%
79	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	267,135,531,000	213,511,982,923	79.93%
80	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	36,028,799,116,000	28,679,880,801,426	79.6%
81	KEMENTERIAN KOPERASI	1,217,754,710,000	962,201,056,507	79.01%
82	KEMENTERIAN PERTANIAN	31,930,741,034,000	25,090,387,948,007	78.58%
83	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	5,728,907,143,000	4,489,610,848,511	78.37%
84	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	392,980,127,000	307,811,485,898	78.33%
85	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	4,828,552,050,000	3,769,888,073,000	78.07%
86	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	166,711,994,000	129,922,831,992	77.93%
87	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	1,897,043,471,000	1,468,540,072,074	77.41%
88	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	4,912,096,039,000	3,768,372,722,314	76.72%
89	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	489,839,925,000	375,107,532,884	76.58%
90	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	293,795,636,000	209,902,314,212	71.45%
91	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	2,071,397,065,000	1,469,233,066,431	70.93%
92	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	2,139,864,941,000	1,504,157,781,264	70.29%
93	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	9,976,887,905,000	6,955,950,476,334	69.72%
94	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2,561,943,480,000	1,760,960,077,650	68.74%
95	KEMENTERIAN HUKUM	4,505,366,379,000	2,784,610,931,198	61.81%
96	BADAN GIZI NASIONAL	85,278,823,889,000	51,586,180,343,891	60.49%
97	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	53,687,990,000	32,072,498,735	59.74%
98	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	309,996,019,000	173,693,006,538	56.03%
99	BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL	952,024,944,000	251,744,494,348	26.44%
100	KEMENTERIAN PARIWISATA	0	0	0%
101	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	0	0	0%
102	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	0	0	0%
103	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	0	1	0%
104	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	0	0	0%

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

REALISASI BELANJA ES.1 PER JENIS BELANJA

NO	Eselon 1	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	02201 | SEKRETARIAT JENDERAL	PAGU	174,282,098,000	441,566,507,000	70,436,505,000	0	0	0	0	0	0	686,285,110,000
		REALISASI	173,191,580,927 (99.37%)	281,077,104,146 (63.65%)	26,711,866,260 (37.92%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	480,980,551,334 (70.08%)
		SISA	1,090,517,073	160,489,402,854	43,724,638,740	0	0	0	0	0	0	205,304,558,666
2	02202 | INSPEKTORAT JENDERAL	PAGU	52,029,002,000	67,356,747,000	798,038,000	0	0	0	0	0	0	120,183,787,000
		REALISASI	51,422,467,415 (98.83%)	37,931,307,144 (56.31%)	766,129,880 (96.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90,119,904,439 (74.99%)
		SISA	606,534,585	29,425,439,856	31,908,120	0	0	0	0	0	0	30,063,882,561
3	02203 | DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	PAGU	1,006,966,786,000	3,635,389,340,000	1,258,794,602,000	0	0	0	0	0	0	5,901,150,728,000
		REALISASI	992,347,063,545 (98.55%)	2,191,876,263,674 (60.29%)	619,048,271,116 (49.18%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3,803,271,598,335 (64.45%)
		SISA	14,619,722,455	1,443,513,076,326	639,746,330,884	0	0	0	0	0	0	2,097,879,129,665
4	02204 | DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	PAGU	2,222,669,315,000	4,415,955,412,000	4,502,350,713,000	0	0	0	0	0	0	11,140,975,440,000
		REALISASI	2,192,435,042,595 (98.64%)	4,342,922,204,519 (98.35%)	3,996,492,249,270 (88.76%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10,531,849,496,384 (94.53%)
		SISA	30,234,272,405	73,033,207,481	505,858,463,730	0	0	0	0	0	0	609,125,943,616
5	02205 | DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	PAGU	1,412,895,968,000	3,621,965,852,000	1,324,674,705,000	0	0	0	0	0	0	6,359,536,525,000
		REALISASI	1,389,054,572,080 (98.31%)	2,630,807,139,760 (72.63%)	1,073,781,530,869 (81.06%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5,093,643,242,709 (80.09%)
		SISA	23,841,395,920	991,158,712,240	250,893,174,131	0	0	0	0	0	0	1,265,893,282,291
6	02208 | Ditjen Perkeretaapian	PAGU	255,258,712,000	4,189,982,723,000	3,391,995,119,000	0	0	0	0	0	0	7,837,236,554,000
		REALISASI	246,698,649,707 (96.65%)	4,010,596,700,774 (95.72%)	1,208,442,425,363 (35.63%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	5,465,737,775,844 (69.74%)
		SISA	8,560,062,293	179,386,022,226	2,183,552,693,637	0	0	0	0	0	0	2,371,498,778,156
7	02211 | BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI	PAGU	47,087,041,000	75,844,364,000	2,459,864,000	0	0	0	0	0	0	125,391,269,000
		REALISASI	46,174,873,348 (98.06%)	43,539,428,237 (57.41%)	656,523,830 (26.69%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90,370,825,415 (72.07%)
		SISA	912,167,652	32,304,935,763	1,803,340,170	0	0	0	0	0	0	35,020,443,585

tanggal cetak : 22-01-26 12:01:50 oleh : KL022

8	02212 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN	PAGU REALISASI	418,962,787,000 413,953,563,077 (98.80%)	3,016,758,606,000 2,369,744,811,764 (78.55%)	229,087,800,000 212,989,758,579 (92.97%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	3,664,809,193,000 2,996,688,133,420 (81.77%)
		SISA	5,009,223,923	647,013,794,236	16,098,041,421	0	0	0	0	0	0	668,121,059,580
9	02213 | BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK	PAGU REALISASI	45,774,065,000 44,761,958,821 (97.79%)	143,305,417,000 81,088,475,136 (56.58%)	4,151,028,000 1,368,839,589 (32.98%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	193,230,510,000 127,219,273,546 (65.84%)
		SISA	1,012,106,179	62,216,941,864	2,782,188,411	0	0	0	0	0	0	66,011,236,454
GRAND TOTAL		**PAGU REALISASI**	**5,635,925,774,000 5,550,039,771,515 (98.48%)**	**19,608,124,968,000 15,989,583,435,154 (81.55%)**	**10,784,748,374,000 7,140,257,594,756 (66.21%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**36,028,799,116,000 28,679,880,801,426 (79.60%)**
		SISA	**85,886,002,485**	**3,618,541,532,846**	**3,644,490,779,244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,348,918,314,574**

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode | Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	445572 | PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	PAGU	0	10,835,086,000	0	0	0	0	0	0	0	10,835,086,000
		REALISASI	0.00%	9,651,107,679 (89.07%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9,651,107,679 (89.07%)
		SISA	0	1,183,978,321	0	0	0	0	0	0	0	1,183,978,321
2	467005 | BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	PAGU	7,350,340,000	231,372,522,000	4,586,233,000	0	0	0	0	0	0	243,309,095,000
		REALISASI	7,140,283,311 (97.14%)	213,942,307,164 (92.47%)	338,780,884 (7.39%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	221,421,371,359 (91.00%)
		SISA	210,056,689	17,430,214,836	4,247,452,116	0	0	0	0	0	0	21,887,723,641
3	467006 | BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	PAGU	15,099,567,000	346,993,536,000	265,006,954,000	0	0	0	0	0	0	627,100,057,000
		REALISASI	14,205,497,377 (94.08%)	328,813,883,853 (94.76%)	121,708,475,647 (45.93%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	464,727,856,877 (74.11%)
		SISA	894,069,623	18,179,652,147	143,298,478,353	0	0	0	0	0	0	162,372,200,123
4	467309 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	PAGU	16,496,951,000	212,043,019,000	1,114,734,878,000	0	0	0	0	0	0	1,343,274,848,000
		REALISASI	16,259,238,475 (98.56%)	184,795,275,827 (87.15%)	382,629,872,686 (34.32%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	583,684,386,988 (43.45%)
		SISA	237,712,525	27,247,743,173	732,105,005,314	0	0	0	0	0	0	759,590,461,012
5	467321 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	PAGU	20,538,115,000	143,611,344,000	969,896,733,000	0	0	0	0	0	0	1,134,046,192,000
		REALISASI	20,144,193,613 (98.08%)	134,622,674,637 (93.74%)	138,480,930,639 (14.28%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	293,247,798,889 (25.86%)
		SISA	393,921,387	8,988,669,363	831,415,802,361	0	0	0	0	0	0	840,798,393,111
6	467337 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	PAGU	15,541,045,000	161,561,903,000	123,364,288,000	0	0	0	0	0	0	300,467,236,000
		REALISASI	14,364,464,564 (92.43%)	153,532,086,904 (95.03%)	110,436,532,993 (89.52%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	278,333,084,461 (92.63%)
		SISA	1,176,580,436	8,029,816,096	12,927,755,007	0	0	0	0	0	0	22,134,151,539
7	467345 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	PAGU	17,028,649,000	57,445,731,000	562,965,835,000	0	0	0	0	0	0	637,440,215,000
		REALISASI	15,200,422,412 (89.26%)	40,803,733,386 (71.03%)	218,551,460,971 (38.82%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	274,555,616,769 (43.07%)
		SISA	1,828,226,588	16,641,997,614	344,414,374,029	0	0	0	0	0	0	362,884,598,231

8	467352 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	PAGU REALISASI	8,982,713,000 8,818,811,242 (98.18%)	38,789,298,000 27,575,059,747 (71.09%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	47,772,011,000 36,393,870,989 (76.18%)
		SISA	163,901,758	11,214,238,253	0	0	0	0	0	0	0	11,378,140,011
9	467364 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	PAGU REALISASI	13,121,685,000 12,934,589,218 (98.57%)	91,491,635,000 78,007,873,508 (85.26%)	22,058,699,000 1,920,453,382 (8.71%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	126,672,019,000 92,862,916,108 (73.31%)
		SISA	187,095,782	13,483,761,492	20,138,245,618	0	0	0	0	0	0	33,809,102,892
10	467373 | BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	PAGU REALISASI	15,757,103,000 15,611,911,647 (99.08%)	25,604,320,000 24,349,235,580 (95.10%)	2,481,540,000 2,425,339,021 (97.74%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	43,842,963,000 42,386,486,248 (96.68%)
		SISA	145,191,353	1,255,084,420	56,200,979	0	0	0	0	0	0	1,456,476,752
11	467385 | BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	PAGU REALISASI	14,024,437,000 13,930,588,652 (99.33%)	49,953,651,000 32,298,145,455 (64.66%)	26,874,629,000 6,211,019,699 (23.11%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	90,852,717,000 52,439,753,806 (57.72%)
		SISA	93,848,348	17,655,505,545	20,663,609,301	0	0	0	0	0	0	38,412,963,194
12	467462 | PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	PAGU REALISASI	0 0.00%	259,555,027,000 255,020,817,613 (98.25%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	259,555,027,000 255,020,817,613 (98.25%)
		SISA	0	4,534,209,387	0	0	0	0	0	0	0	4,534,209,387
13	467478 | PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	PAGU REALISASI	0 0.00%	24,387,687,000 22,475,343,658 (92.16%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	24,387,687,000 22,475,343,658 (92.16%)
		SISA	0	1,912,343,342	0	0	0	0	0	0	0	1,912,343,342
14	467484 | PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	PAGU REALISASI	0 0.00%	2,317,756,184,000 2,313,211,676,764 (99.80%)	234,823,033,000 81,066,625,655 (34.52%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	2,552,579,217,000 2,394,278,302,419 (93.80%)
		SISA	0	4,544,507,236	153,756,407,345	0	0	0	0	0	0	158,300,914,581
15	467504 | KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	PAGU REALISASI	92,585,048,000 90,216,846,085 (97.44%)	35,498,558,000 33,748,716,253 (95.07%)	4,520,614,000 4,468,673,937 (98.85%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	132,604,220,000 128,434,236,275 (96.86%)
		SISA	2,368,201,915	1,749,841,747	51,940,063	0	0	0	0	0	0	4,169,983,725

16	467515 | BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	PAGU REALISASI	18,733,059,000 17,871,803,111 (95.40%)	183,083,222,000 157,748,762,746 (86.16%)	60,681,683,000 35,756,628,817 (58.92%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	262,497,964,000 211,377,194,674 (80.53%)
		SISA	861,255,889	25,334,459,254	24,925,054,183	0	0	0	0	0	0	51,120,769,326
GRAND TOTAL		**PAGU REALISASI**	**255,258,712,000 246,698,649,707 (96.65%)**	**4,189,982,723,000 4,010,596,700,774 (95.72%)**	**3,391,995,119,000 1,103,994,794,331 (32.55%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**7,837,236,554,000 5,361,290,144,812 (68.41%)**
		SISA	**8,560,062,293**	**179,386,022,226**	**2,288,000,324,669**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,475,946,409,188**

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

LAPORAN TARGET & REALISASI PNBP PER AKUN (SUMBER DATA TPNBP-SPAN-SIMPONI)
TAHUN ANGGARAN 2025

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
UNIT ESELON I : **08 - Ditjen Perkeretaapian**
PERIODE LAPORAN : **JANUARI s.d. DESEMBER**

SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNBP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
445572 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN FASILITAS KESELAMATAN PERKERETAAPIAN	425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	862.000,00	862.000,00
	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	1.300.000.000,00	1.369.400.000,00	1.369.400.000,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	57.865,00	57.865,00
467005 - BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN	424119 - Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	21.099.810.000,00	24.617.872.909,00	0,00
	424312 - Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	7.213.648.000,00	748.523.772,00	0,00
	424911 - Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0,00	507.622.849,00	0,00
	424915 - Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	2.075.037,00	0,00
	424916 - Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	1.578.799,00	0,00
	424919 - Pendapatan Lain-lain BLU	0,00	200.119.327,00	0,00
	424923 - Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	1.182.168.000,00	1.146.750.800,00	0,00
	424924 - Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	361.900.000,00	0,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai	0,00	2.065,00	0,00
Total		1.246.326.325.000,00	2.022.678.845.172,00	1.780.775.561.051,00

SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNBP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
	Tahun Anggaran Yang Lalu			
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	5.673.389.313,00	411.467.566,00
467006 - BALAI PENGELOLA KERETA API SULAWESI SELATAN	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	108.000.000,00	0,00	0,00
	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	473.100.000,00	259.110.260,00	259.082.540,00
	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	26.043.191,00	0,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	313,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	92.616.128,00	92.616.128,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	12.942.687,00	12.942.687,00
	425999 - Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	2.996.612.230,00	2.996.612.230,00
467309 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I JAKARTA	425129 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	4.965.724.448,00	4.965.724.448,00
	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.334.137.000,00	5.338.117.687,00	5.481.512.687,00
	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	1.125.795.132,00	912.556.836,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	13.335.050.584,00	927.307.853,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	2.598.198.506,00	78.927.196,00
467321 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SEMARANG	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0,00	15.755.000,00	15.755.000,00
Total		1.246.326.325.000,00	2.022.678.845.172,00	1.780.775.561.051,00

SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNBP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
	425699 - Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	0,00	0,00
	425839 - Pendapatan Denda Lainnya	0,00	180.746.333,00	180.746.333,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	45.188,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	26.386.059.745,00	365.210.681,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	6.949.929.058,00	1.777.743.334,00
	425999 - Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	596.968.000,00	425.624.000,00
467337 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I SURABAYA	425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	836.938.500,00	836.938.500,00
	425129 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	8.514.500.000,00	8.514.500.000,00
	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	751.673.094,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	15.753.979.203,00	0,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	6.999.103.767,00	83.142.042,00
467345 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I MEDAN	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	80.658.000,00	80.658.000,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	1.711,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	14.684.085.450,00	1.933.235.943,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	5.022.529.370,00	1.453.085.928,00
Total		1.246.326.325.000,00	2.022.678.845.172,00	1.780.775.561.051,00

SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNBP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
	425999 - Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	260.546.752,00	258.290.752,00
467352 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG	425129 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	3.065.000.000,00	13.365.970.500,00	13.365.970.500,00
	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	93.000.000,00	0,00	0,00
	425132 - Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	24.000.000,00	0,00	0,00
	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	2.501.226,00	0,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	291,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	7.921.498.815,00	182.725.000,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	343.667.366,00	343.667.366,00
	425915 - Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00	1.286.093.340,00
	425999 - Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	223.710.000,00	223.710.000,00
467364 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PALEMBANG	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	662.409.527,00	0,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	1.835,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	6.027.492.418,00	0,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	21.772.028.250,00	65.423.960,00
467373 - BALAI PERAWATAN PERKERETAAPIAN	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	78.300.000.000,00	78.802.984.633,00	78.802.984.633,00
Total		1.246.326.325.000,00	2.022.678.845.172,00	1.780.775.561.051,00

SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNBP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
	425132 - Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	26.225.000.000,00	26.709.886.737,00	26.709.638.123,00
	425135 - Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	248.614,00
	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	1.055.060.000,00	464.101.272,00	463.860.000,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	234.546.858,00	234.546.858,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	1.330.000.175,00	1.330.000.175,00
467385 - BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN	424119 - Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	57.997.924.000,00	57.250.242.366,00	0,00
	424312 - Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	2.332.775.000,00	1.190.687.000,00	0,00
	424911 - Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0,00	1.603.215.056,00	0,00
	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	0,00	5.780.000,00	5.780.000,00
467462 - PENGEMBANGAN LALU LINTAS DAN PENINGKATAN ANGKUTAN KERETA API	425512 - Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/Track Access Charge	1.023.132.453.000,00	1.519.124.995.601,00	1.519.124.995.601,00
	425519 - Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	410.000.000,00	1.208.000.000,00	1.208.000.000,00
	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	224.474.096,00	209.898.464,00
	425839 - Pendapatan Denda Lainnya	0,00	90.134.511.018,00	90.134.511.018,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	892.620.908,00	24.000.000,00
467478 - PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SARANA PERKERETAAPIAN	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0,00	25.287.000,00	25.287.000,00
	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan	1.422.000.000,00	2.500.050.000,00	2.500.050.000,00
Total		1.246.326.325.000,00	2.022.678.845.172,00	1.780.775.561.051,00

SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNBP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
	Kalibrasi di Bidang Perhubungan			
	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	1.382.410.430,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	2.749.923.435,00	0,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	10.029.216.300,00	1,00
467484 - PENGEMBANGAN, PENINGKATAN DAN PERAWATAN PRASARANA PERKERETAAPIAN	425287 - Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	67.250.000,00	60.200.000,00	60.200.000,00
	425519 - Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	841.000.000,00	3.428.920.000,00	3.428.920.000,00
	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	6.487.980.753,00	0,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	184.510.275,00	149.061.315,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	68.016.649,00	68.016.649,00
467504 - KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	17.500.000.000,00	3.689.319.347,00	3.689.319.347,00
	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0,00	297.768,00	0,00
	425839 - Pendapatan Denda Lainnya	0,00	7.058.144,00	7.058.144,00
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	197.290.118,00	197.290.118,00
467515 - BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I BANDUNG	425151 - Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0,00	12.330.000,00	12.330.000,00
	425811 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	317.435.813,00	317.435.813,00
	425911 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai	0,00	3.890.656,00	0,00
Total		1.246.326.325.000,00	2.022.678.845.172,00	1.780.775.561.051,00

SATUAN KERJA	AKUN	TARGET - SUMBER DATA TPNBP (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SPAN (Rp)	REALISASI - SUMBER DATA SIMPONI (Rp)
	Tahun Anggaran Yang Lalu			
	425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	8.853.784.346,00	2.398.825.346,00
	425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	771.713.117,00	771.713.117,00
Total		1.246.326.325.000,00	2.022.678.845.172,00	1.780.775.561.051,00

DITJEN PERKERETAAPIAN

Rata2 Nilai IP ASN	Rata2 Kualifikasi	Rata2 Kompetensi	Rata2 Kinerja	Rata2 Disiplin
86,09	**23,56**	**31,12**	**26,41**	**5,00**
dari 100	dari 25	dari 40	dari 30	dari 5

Posisi : 23 September 2025

UNIT KERJA	RATA-RATA TOTAL	RATA-RATA KUALIFIKASI	RATA-RATA KOMPETENSI	RATA-RATA KINERJA	RATA-RATA DISIPLIN
Balai Perawatan Perkeretaapian	91,33	23,81	35,23	27,33	4,96
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	89,94	23,66	32,35	28,93	5,00
Direktorat Sarana Perkeretaapian	89,71	22,81	32,57	29,33	5,00
Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	88,95	23,77	33,78	26,39	5,00
Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	88,95	23,77	33,78	26,39	5,00
Direktorat Prasarana Perkeretaapian	88,80	23,58	31,98	28,24	5,00
Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	88,10	23,38	33,40	26,35	4,97
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	86,11	23,75	32,13	25,23	5,00
Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api	85,78	23,35	30,56	26,87	5,00
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	84,75	23,83	30,76	25,16	5,00
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	83,57	24,11	29,34	25,12	5,00
Balai Pengujian Perkeretaapian	83,30	22,20	28,41	27,69	5,00
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	82,55	23,73	29,57	24,24	5,00
Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	82,24	23,66	28,54	25,05	5,00
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	82,04	23,33	28,65	25,06	5,00
Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	82,04	23,33	28,65	25,06	5,00



Indriati
NIP 198106072005022001

LAMPIRAN VI

DOKUMENTASI DAN LAPORAN PEMBAHASAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

No. ST	:	ST-K1 DJKA 29 Tahun 2026
Lokasi	:	Jakarta

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LAPORAN
PEMBAHASAN CAPAIAN KINERJA DAN REVIU KONSEP LAPORAN KINERJA TAHUN 2025 UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
JANUARI 2026

PEMBAHASAN CAPAIAN KINERJA DAN REVIU KONSEP LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

A. DASAR PENUGASAN

1. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor PR.205/1/3/K1/DJKA/2026 tanggal 9 Januari 2026 perihal undangan rapat.
2. Surat Perintah Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian Nomor: ST-K1 DJKA 29 Tahun 2026 tanggal 9 Januari 2026.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Tempat : Hotel Yuan Garden Jakarta dan Aplikasi Zoom Meeting (Hybrid)
2. Tanggal : Senin-Selasa, 12-13 Januari 2026
3. Peserta Rapat :
   a. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB);
   b. Perwakilan Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
   c. Perwakilan Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
   d. Perwakilan Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
   e. Perwakilan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
   f. Perwakilan Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
   g. Perwakilan Direktorat Sarana Perkeretaapian;
   h. Perwakilan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian;
   i. Perwakilan Bagian SDM dan Organisasi, Setditjen Perkeretaapian;
   j. Perwakilan Bagian Hukum, Humas dan Umum, Setditjen Perkeretaapian;
   k. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta;
   l. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung;
   m. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang;
   n. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya;
   o. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan;
   p. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;

q. Perwakilan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang;
r. Perwakilan Balai Pengujian Perkeretaapian;
s. Perwakilan Balai Perawatan Perkeretaapian;
t. Perwakilan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan;
u. Perwakilan Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan;

a. Koordinator/Ketua Tim di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
b. Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

4. Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
   a. Registrasi;
   b. Materi Narasumber:
      Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 dan Evaluasi Pemanfaatan e-SAKIP Reviu;
   c. Pembahasan Capaian Kinerja dan Reviu Konsep Laporan Kinerja Tahun 2025;
   d. Pembahasan Capaian Kinerja dan Reviu Konsep Laporan Kinerja Tahun 2025 Unit Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
   e. Penyiapan Berita Acara Hasil Reviu Konsep Laporan Kinerja Tahun 2025 masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
   f. Penutup.

C. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

1. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka Pembahasan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dan Reviu Konsep Laporan Kinerja Tahun 2025.
2. Pemaparan dari Koordinator Tim Evaluasi dan Pelaporan
   a. Pemanfaatan aplikasi pelaporan kinerja
      1) Kinerja pada Triwulan III diharapkan dapat meningkat di capaian Triwulan IV atau Tahunan termasuk kepatuhan dalam pelaporanya;
      2) Pengisian e-monev Bappenas perlu dikoordinasikan dan dicek kembali terhadap indikator kinerja yang belum terisi.

b. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025

1) Disusun sebagai penjabaran pencapaian target kinerja dan unit kerja Eselon I, II dan Satuan Kerja tiap triwulan;
2) Penyusunan laporan triwulanan satker dan unit Eselon II dilakukan 20 hari setelah pelaporan aplikasi pengukuran kinerja, dan untuk unit eselon I 25 hari setelah pelaporan aplikasi pengukuran kinerja;
3) Penyusunan diharapkan dapat dilakukan secara parallel dengan capaian Triwulanan (Triwulan IV);
4) Upaya peningkatan kinerja didalamnya termasuk memuat uraian pengaruh terhadap penyesuaian strategi/kebijakan, aktivitas/anggaran, organisasi/jabatan/pegawai;
5) Capaian lainya dalam capaian kinerja triwulanan diharapkan dapat mengakomodir capaian strategis dari masing – masing unit kerja;
6) Dalam penyusunan laporan kinerja format laporan dapat menambahkan/update terkait dengan renstra terbaru.

c. Evaluasi Kinerja berdasarkan Laporan Monitoring Kinerja TW III 2025

No	Unit Kerja	Rata-Rata Capaian Kinerja Berdasarkan Laporan Monitoring Kinerja TW III (%)
1	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	104,96
2	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	103,23
3	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	102,14
4	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	102
5	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	100,28
6	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	99,85
7	Balai Pengujian Perkeretaapian	99,74
8	Balai Perawatan Perkeretaapian	99,39
9	Balai Teknik Perkeretaapian Semarang	99,17
10	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	97,91
11	Balai Teknik Perkeretaapian Medan	96,35
12	Balai Teknik Perkeretaapian Palembang	94,3
13	Balai Teknik Perkeretaapian Jakarta	93,26
14	Direktorat Sarana Perkeretaapian	90,34
15	Balai Teknik Perkeretaapian Bandung	89,01
16	Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	85,54

d. Evaluasi Kepatuhan Laporan Monitoring Kinerja TW III 2025

No	Unit Kerja	Kepatuhan Pelaporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025		
		Pemenuhan Laporan Monitoring Kinerja	Kepatuhan Pemanfaatan Aplikasi Kinerja	Rata-Rata Kepatuhan
1	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya	97,5	100	98,75
2	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	96,25	100	98,13
3	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang	96,25	100	98,13
4	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	95	92	93,5
5	Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	88,75	95,33	92,04
6	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	91,25	88,67	89,96
7	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	82,5	96	89,25
8	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung	93,75	84	88,88
9	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan	87,5	86	86,75
10	Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	90	83,33	86,67
11	Balai Perawatan Perkeretaapian	73,75	98	85,88
12	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang	85	83,33	84,17
13	Direktorat Sarana Perkeretaapian	62,5	81,33	71,92
14	Balai Pengujian Perkeretaapian	65	42	53,5
15	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	52,5	45,33	48,92

e. Reviu dilaksanakan guna melaksanakan amanah KM 74 Tahun 2024 serta tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Jenderal guna melaksanakan Reviu terhadap draft Laporan Kinerja secara konsisten. Telah dilakukan reviu LKIN dengan melaksanakan:

1) Mengecek hasil reviu dokumen LKIN Tahun 2024;

2) Mendata dokumen yang disampaikan untuk direviu;
3) Reviu terhadap mekanisme penyusunan LKIN;
4) Reviu terhadap kelengkapan format LKIN;
5) Reviu terhadap capaian kinerja Tahun 2025;
6) Memberikan saran/rekomendasi.

3. Pemaparan dari Narasumber KemenPANRB
   a. Dasar Hukum Akuntabilitas Kinerja:
      1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah "SAKIP diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran berorientasi pada hasil;
      2) Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
   b. Dalam Sistem AKIP, pelaporan kinerja bertujuan memastikan pencapaian kinerja dilaporkan secara jujur, sedangkan reviu dan evaluasi kinerja merupakan kegiatan memastikan pencapaian kinerja telah direviu dan dievaluasi;
   c. Laporan kinerja tahun 2025 menyajikan capaian dan analisis kinerja atas Perjanjian Kinerja tahun 2025. Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja perlu disahkan terlebih dahulu dengan penandatanganan oleh pihak kedua (Menteri Perhubungan);
   d. Renstra Perhubungan akan dijadikan dasar sampai dengan 2026, dan draft renstra akan menjadi evaluasi pada kegiatan tahun 2026;
   e. Siklus Sistem AKIP



f. Dalam penetapan target renstra akan dijadikan dasar dalam penetapan target harus sama atau diatas dengan target *baseline*;

g. Dalam proses perjanjian kinerja harus berdasarkan PK yang sudah di legalkan/formalkan;

h. Berikut format capaian kinerja tahunan PK:

Sasaran Program	Indikator Kinerja	2025			2025-2029	
		Target*)	Realisasi	Capaian %	Target**)	Capaian %
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)		
SP1	IK1	...	...	...	...	...
SP2	IK2	...	...	...	...	...
Dst.	IK3	...	...	...	...	...
	IK4	...	...	...	...	...
	IK5	...	...	...	...	...
	Dst.	...	...	...	...	...

*) Berdasarkan target Perjanjian Kinerja tahun 2025
**) Berdasarkan target akhir periode Renstra Tahun 2025-2029 (kumulatif 5 tahun) yang tercantum dalam Renstra unit kerja/organisasi yang telah ditetapkan

i. *Outline* Laporan Kinerja

1) *Executive Summary* (Ikhtisar Eksekutif): Menyajikan ringkasan pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK);
2) Bab I – Pendahuluan: Uraian gambaran umum unit kerja/organisasi, penekanan pada aspek strategis serta permasalahan yang dihadapi;
3) Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja: Uraian ringkasan/ikhtisar perencanaan (Renstra 2025–2029 yang telah ditetapkan) dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan;
4) Bab III – Akuntabilitas Kinerja: Uraian pencapaian sasaran-sasaran organisasi. Penyajian hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja. Narasi capaian kinerja sasaran dan masing-masing target dari Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja;
5) Bab IV – Penutup: Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah untuk mencapai target akhir tahun
6) Lampiran – Perjanjian Kinerja: Perjanjian Kinerja.
7) Tenggat waktu, yaitu 28 Februari 2026, untuk diunggah ke ESR.

j. Analisis capaian kinerja (BAB III),
    1) Capaian Kinerja: Bandingkan realisasi kinerja dengan target Perjanjian Kinerja dan Renstra, serta jelaskan dampak/outcome dari program/kegiatan;
    2) Penyebab & Solusi: Analisis keberhasilan atau kegagalan kinerja beserta alternatif solusi;
    3) *Benchmark* & Data Pendukung: Bandingkan dengan unit sejenis bila memungkinkan, lengkapi dengan foto, grafik, tabel, atau gambar;
    4) Realisasi Anggaran: Uraikan penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, termasuk efisiensi sesuai aturan yang berlaku.
k. *Benchmarking* di wajibkan semua pada Tingkat nasional.
l. Diskusi
    1) Pertanyaan: Aplikasi PSN menjadi salah satu instrumen yang digunakan oleh Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan evaluasi AKIP. Terdapat beberapa perbedaan pada ESR Tahun 2026, khususnya terkait akun baru yang belum memiliki hasil tangkapan layar (screenshot). Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan kejelasan mengenai solusi yang dapat diterapkan.

       Jawaban: Pada Tahun 2024 telah dilakukan proses pemulihan (restore) data terhadap hampir seluruh instansi di Indonesia. Data lama disimpan pada cloud Kementerian PANRB, dan data yang saat ini dapat diakses oleh instansi terbatas pada data dua tahun terakhir.
    2) Pertanyaan: Terkait kelengkapan substansi dan metode penyusunan yang mengacu pada pedoman Kementerian PANRB Tahun 2014, perlu dikonfirmasi apakah terdapat arahan khusus apabila terjadi kendala di tingkat pimpinan.

       Jawaban: Apabila dokumen dimaksud belum ditandatangani, hal tersebut akan menjadi catatan dari Kementerian PANRB. Oleh karena itu, perlu disampaikan surat kepada Biro Perencanaan agar proses penandatanganan dapat segera dilakukan. Reviu laporan dilaksanakan sesuai dengan amanat yang diberikan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)/Inspektorat, di mana secara kuantitatif laporan Inspektorat Jenderal telah dilengkapi dengan matriks reviu. Selain itu,

dalam penyusunan anggaran diupayakan agar telah mencantumkan pagu efektif.

3) Pertanyaan: Apakah target PNBP sertifikat dapat ditetapkan kurang dari 100%, mengingat dalam dokumen direktorat tertulis target sebesar 100%?

   Jawaban: Target PNBP dapat dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan dan diperbolehkan ditetapkan di bawah 100%, dengan ketentuan bahwa perhitungan dan pencapaian target harus tetap mengacu pada *baseline* yang telah ditetapkan.

4) Terkait inovasi, penilaian keberhasilan maupun kegagalan harus dilakukan secara komprehensif dan selaras, dengan satu kesepakatan antara Kementerian PANRB dan Inspektorat. Dalam konteks akuntabilitas, inovasi diarahkan melalui pendekatan kebijakan. Namun, pada tingkat unit kerja, implementasi inovasi masih menghadapi kendala, terutama karena keberadaan unit kerja teknis yang memiliki karakteristik operasional yang spesifik.

4. Pembahasan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 masing-masing unit kerja

   a. Direktorat LLAKA

No	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang dan Jaringan Jalur KA dan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian	23,00	23,00	100%	
2	Persentase Penyelesaian Kerjasama Pengembangan Infrastruktur Perkeretaapian	20,00	20,00	100%	
3	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api berdasarkan GAPEKA	95,60	95,60	100%	• Capaian terindikasi anomali dan masih menunggu data final dari operator/badan usaha. • Terkait dengan target Tahun 2026 diharapkan harus sama atau lebih

					tinggi daripada baseline
4	Persentase Pemenuhan NSPK bidang LLAKA	36,00	36,00	100%	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA	92,75	94,50	102%	Terkait dengan survey agar dikomunikasikan dengan PPTB.
6	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang Kereta Api	19,00	19,70	104%	Analisis keberhasilan akan menjadi capaian unit Ditjen Perkeretaapian/Eselon I Tingkat Kementerian Perhubungan
7	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang Kereta Api	19,00	19,28	101%	
8	Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel	2825,00	2840,00	101%	
9	Nilai AKIP Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan KA	83,50	82,60	99%	
10	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat LLAKA	13,68	13,68	100%	
11	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat LLAKA	83,00	86,48	104%	
12	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat LLAKA	100,00	100,00	100%	
13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat LLAKA	73,50	73,50	100%	

b. Dit. Prasarana

No	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Persentase pemenuhan perencanaan teknis bidang konektivitas prasarana perkeretaapian	24,14	24,14	100%	

2	Panjang jalur KA yang beroperasi	6.887	6,915	0%	Panjang jalur agar disinkronisasi/dikoordinasikan dengan Balai Teknik Perkeretaapian.
3	Persentase pemenuhan perencanaan teknis bidang pelauanan prasarana perkeretaapian	32,20	33,90	105%	
4	Kondisi jalur ka sesuai standar TQI	95,02	94,64	100%	Panjang jalur agar disinkronisasi/dikoordinasikan dengan Balai Teknik Perkeretaapian
5	Jalur KA yang menggunakan persinyalan elektrik	65,21	65,21	100%	Panjang jalur agar disinkronisasi/dikoordinasikan dengan Balai Teknik Perkeretaapian
6	Indeks Kepuasan MAsyaratak (IKM) terhadap pelayanan public yang diselenggarakan oleh Ditpras	3,89	3,90	100%	
7	Persentase pemenuhan sertifikasi kelaikan prasarana perkeretaapian	50,58	50,85	101%	
8	Persentase pemenuhan NSPK bidang prasaraana perkeretaapian	79,55	79,55	100%	
9	Nilai AKIP Ditpras	83,20	83,20	100%	
10	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Ditpras	19,00	20,00	105%	
11	Nilai Kinerja Anggaran Ditpras	85,75	82,93	97%	
12	Persentase realisasi PNBP Ditpras	100,00	100,00	100%	
13	Nilai pengawasan kearsipan internal Ditpras	78,56	85,02	108%	

c. Dit. Sarana

No	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan

1	Persentase Pemenuhan Perencanaan Teknis Bidang Konektivitas Sarana Perkeretaapian	61,806	77,78	126%	• Capaian masih anomali. Penentuan target PK Tahun 2026 menyesuaikan dengan *baseline*. • Hasil evaluasi pada Triwulan III agar dapat ditindaklanjuti (analisis keberhasilan, inovasi dalam mendukung capaian kinerja, dll).
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian	3,7	3,81	103%	
3	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kelaikan Sarana Perkeretaapian	80,24	88,85	111%	Capaian masih anomali. Penentuan target PK Tahun 2026 menyesuaikan dengan baseline dan perlu ditambahkan justifikasi
4	Persentase Pemenuhan NSPK bidang Sarana Perkeretaapian	37,03	37,03	100%	
5	Persentase Pemenuhan Sarana Perkeretaapian Milik Negara Mendukung Keselamatan	71,014	71,014	100%	
6	Persentase sarana perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti sesuai hasil Rampcheck	91	94,56	104%	
7	Persentase hasil pengawasan perawatan sarana dan tempat perawatan sarana perkeretaapian yang ditindaklanjuti	100	100	100%	
8	Nilai AKIP Direktorat Sarana Perkeretaapian	81,25	80,75	99%	
9	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko	13,5	13,5	100%	

	Direktorat Sarana Perkeretaapian				
10	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Sarana Perkeretaapian	86,7	86,01	99%	
11	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Sarana Perkeretaapian	100	126,14	126%	Capaian masih anomali. Penentuan target PK Tahun 2026 menyesuaikan dengan baseline dan perlu ditambahkan justifikasi
12	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Sarana Perkeretaapian	59,87	59,87	100%	

d. Dit. Keselamatan

No	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	3,86	3,48	90%	Dukungan RPJMN agar dapat disampaikan/dipenuhi data dukungnya. Capaian yang masih anomaly agar disampaikan justifikasinya
2	Persentase rekomendasi teknis peningkatan keamanan di perlintasan sebidang yang ditindaklanjuti	15,00	15,00	100%	
3	Persentase hasil audit sistem manajemen keselamatan (SMKP) yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan	16,66	16,66	100%	
4	Persentase rekomendasi peningkatan keselamatan penyelenggaraan dan pengoperasian Kereta Api yang ditindaklanjuti/ dimanfaatkan	15,78	16,84	107%	
5	Persentase penindakan atau penegakan hukum	5,00	5,00	100%	

	berdasarkan hasil pengawasan keselamatan perkeretaapian				
6	Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian	19,44	22,97	118%	
7	Persentase pemenuhan NSPK bidang keselamatan Perkeretaapian	88,88	90,74	102%	
8	Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	83,67	80,50	96%	
9	Tingkat penerapan manajemen risiko Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	11,00	10,50	95%	
10	Nilai kinerja anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Nilai)	85,61	85,69	100%	
11	Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DKP	100,00	105,41	105%	
12	Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	66,00	64,98	98%	

e. BTP Kelas I Jakarta

No	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Rasio Konektivitas Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	0,64	0,64	100,00%	Konektivitas belum menggunakan skema terbaru, sehingga rasio GAPEKA yang akan menjadi faktor pengali perlu disesuaikan. Rumusan perhitungan akan diselaraskan serta dilakukan

					penelaahan kembali
2	Kondisi jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2	91,51	88,29	96,48%	
3	Jalur KA yang Menggunakan Persinyalan Elektrik	98,88	99,03	100,35%	Telah dilaksanakan sinkronisasi data dengan Direktorat sebagai berikut: • Wilayah BTP Jakarta: Sinyal elektrik yang semula tercatat 63 menjadi 62 sinyal elektrik; • LRT Jabodebek: Semula perhitungannya menggunakan sinyal interlocking sejumlah 1 sinyal, kini menjadi 16 sinyal karena menggunakan jumlah stasiun sebagai dasar perhitungan.
4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api	18,76	19,36	103,20%	Realiasai kumulatif Angkutan KA sd TW IV angkutan penumpang: 449.382.763 dan angkutan barang: 2.969.648ton. Angkutan penumpang dan barang tercapai
5	Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional pada Perlintasan Sebidang	10	6,9	69,00%	Telah terjadi 27 kejadian sepanjang tahun 2025, sehingga target penurunan belum sepenuhnya tercapai (69% capaian kinerja). Perlintasan sebidang menjadi perhatian khusus, sehingga

					diperlukan upaya peningkatan dan penguatan penanganan pada periode selanjutnya
6	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	100	99,38	99,38%	Realisasi tahun 2025 terlah tejadi 5 kecelakaan KA, kumulatif keberangkatan KA s.d Desember yakni 804.088 perka
7	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	81,2	80,2	98,77%	
8	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko	15 (Target Revisi: 14)	13,5	96,43%	MR pastikan direnstra target disesuaikan
9	Nilai Kinerja Anggaran	81	86,93	107,32%	Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan monev Kemenkeu (Desember) mencapai 86,93%. Realisasi penyerapan pada aplikasi Spanint Kemenkeu s.d. Triwulan IV tercatat sebesar 43,45%. Lebih didetailkan upaya peningkatan dan analisa keberhasilannya. Target PK kedepannnya mengacu pada baseline 2025
10	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	100	103,43	103,43%	
11	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	89 (Target Revisi: 87)	87,39	100,45%	

f. BTP Kelas I Bandung

No	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan

1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian BTP Bandung	0,55	0,535	97%	Terhubung 6 lokasi dengan total 11 lokasi, rasio GAPEKA 0,97 data sementara sampai dengan evaluasi GAPEKA. Konektivitas pemanfaatannya 0,97 sudah ditambahkan penambahan kereta pada saat Nataru (data sementara menunggu evaluasi dari seksi Dit.LLAKA)
2	Jalur KA sesuai standar TQI Kategori 1 & 2 BTP Bandung	88,38	86,51	98%	97.98% data masih sementara, karena masih ada perbedaan data dengan Dit.Pras. Ada penurunan dan beberapa peningkatan TQI, rata-rata meningkat pada TW IV. Batas wilayan Balai dengan BTP Jakarta belum ada Banya, jika dengan BTP Semarang sudah ada BA. Secara angka sudah dikoordinasikan dengan Dit.Pras
3	Jalur KA menggunakan persinyalan elektrik BTP Bandung	70,65	70,65	100%	Jumlah tetap, perbandingan elektrik dengan total 62/95
4	Pemenuhan target angkutan KA di wilayah BTP Bandung	18	18,35	102%	Angkutan realisasi 101,94%, angkutan penumpang capaian sebesar 25,8jt untuk angkutan barang 245ton dengan target 250ton. IKK tidak tercapai pada angkuta

					barang, kendalanya ada pada angkutan semen. Diharapkan untuk dapat diuraikan guna laporan untuk Eselon I
5	Penurunan gangguan operasional perlintasan sebidang BTP Bandung	10	15,15	152%	TW IV sebanyak 28 kali gangguan dengan tare maks 30 kali, anomaly karena tidak terjadi gangguan perjalanan KA bulan Desember. Baseline 33 (13%) untuk tahun 2025-2029
6	Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian BTP Bandung	100	99,31	99%	Capaian 99% sampai dengan akhir tahun 2025 terdapat anjlogkan Agro Bromo Anggrek dikarenakan kerusakan prasarana
7	Nilai AKIP BTP Bandung	80,5	81,4	101%	
8	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko BTP Bandung	13,75	13,75	100%	
9	Nilai Kinerja Anggaran BTP Bandung	89,55	81,06	91%	Realisasi TW IV menggunakan data sementara capaian 91%. NKA untuk dapat dipantau sekitar tanggal 15/16 Januari
10	Realisasi PNBP BTP Bandung	100	100	100%	Realisasi PNBP 100%, pada lembar hal III DIPA 2025 tidak ada target PNBP

g. BTP Kelas I Semarang

No	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Rasio Konektivitas Wilayah Kerja BTP Semarang	0,750	0,765	102	• Rasio Simpul tidak ada penambahan yaitu sebesar 0,765 • Rasio Pemanfaatan infrastruktur KA dihitung dari realisasi perka dibanding program Gapeka.
2	Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Kerja BTP Semarang	99,073	98,995	99,92	Hasil Pengukuran Jalan Rel Menggunakan Kereta Ukur dengan total jalur terukur kategori I dan II sepanjang 1.547,156 km'sp dari panjang jalur 1.562,869 km'sp
3	Persentase Fasilitas Operasi dengan Teknologi Handal di Wilayah Kerja BTP Kelas I Semarang	87,500	87,500	100	Total persinyalandi yang telah terbangun sebanyak 120 unit dengan rincian (105 sinyal elektrik, 15 sinyal mekanik)
4	Pemenuhan Target Angkutan KA di Wilayah Kerja BTP Semarang	18,340	19,526	106,47	Realisasi angkutan KA sebanyak 32.547.690 penumpang dan 2.841.956,663 ton barang, sehingga realisasi kinerja Triwulan IV 2025 sebesar 19,526%
5	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Perintis di Wilayah Kerja BTP Semarang	100,000	100,000	100	Realisasi perjalanan kereta api perintis sebanyak 1092 perjalanan KA dari target 1.460 perjalanan KA sampai akhir Tahun 2025
6	Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan KA pada Perlintasan Sebidang di Wilayah Kerja BTP Semarang	11,765	11,765	100	• Telah terjadi 30 kejadian gangguan operasional perjalanan kereta api pada perlintasan sebidang • Keterjadian gangguan operasional agar di rincikan pada analisis keberhasilan/kegagalan pada laporan triwulan/tahunan

7	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Kerja BTP Semarang	100,000	100,000	100	Tidak terdapat kecelakaan kereta api pada periode Triwulan IV/ Zero Accident
8	Nilai AKIP BTP Semarang	82,000	82,000	100	Rencana tindak lanjut periode/kedepannya agar lebih detail dan spesifik menjelaskan rencana upaya ke depan.
9	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko BTP Semarang	10,000	10,000	100	Penerapan manajemen risiko masih menggunakan pendekatan kepada KRO/RO dan perlu adanya perbaikan penyusunan manajemen risiko pada tahun/periode berikutnya dengan mengacu kepada proses bisnis
10	Nilai Kinerja Anggaran BTP Semarang	81,000	72,259	89,21	Capaian NKA sebesar 72,259. Capaian masih rendah dikarenakan terkendala paket kegiatan sinyal yang belum terlaksana di tahun 2025 menyebabkan penyerapan terhambat dan realisasi progress tidak tercapai.
11	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	100,000	101,526	101,53	Realisasi perolehan PNBP sebesarRp.34.129.503.296 yang terdiri dari Pendapatan atas Penjualan Tiket KA Perintis sebesar Rp. 596.968.000 dan Penyewaan Forklift sebesar Rp.15.755.000.
12	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BTP Semarang	68,680	68,680	100	Telah dilakukan penilaian kearsipan Tahun 2025 dan mendapatkan nilai 68,68 (kategori Baik).

h. BTP Kelas I Surabaya

No	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah BTP Kelas I Surabaya	0,364	0,397	108,98	Termasuk PKN/PKW/Simpul Transportasi di wilayah Sulawesi Selatan
2	Persentase Pengoperasian jalur kereta api yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di wilayah BTP Kelas I Surabaya	98,10	97,58	99,47	Agar diuraikan lebih mendalam/rinci (km track yang mengalami penurunan TQI) terhadap analisa kegagalan mengingat pada tahun 2025 terdapat peningkatan 2 unit jembatan yang seharusnya dapat meningkatkan nilai TQI
3	Persentase Fasilitas Operasi dengan teknologi handal di wilayah BTP Kelas I Surabaya	37,90	37,90	100,00	Terdapat 44 unit fasilitas operasi yang berbasis elektrik (tidak termasuk IB) dengan jumlah keseluruhan 116 unit fasilitas operasi yang beroperasi (tidak termasuk IB)
4	Persentase pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah BTP Kelas I Surabaya	19,23	19,65	102,17	Realisasi Penumpang Kereta Api bulan Desember sebesar 27.917.383 pnp sedangkan realisasi angkutan barang KA sebesar 2.897.680 ton
5	Persentase penurunan kejadian gangguan operasional perjalanan kereta api pada perlintasan sebidang	-	-	-	Tidak terdapat pelayanan angkutan perintis
6	Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian di wilayah BTP Kelas I Surabaya	37,00	47,46	128,264*)	Anomali Capaian (agar dijelaskan dan diuraikan analisa keberhasilan)
7	Nilai AKIP BTP Kelas I Surabaya	100,00	99,99	99,99	S.d bulan Desember terdapat 1 kecelakaan KA

8	Tingkat penerapan manajemen risiko BTP Kelas I Surabaya	83,40	83,50	100,12	Telah disampaikan Tindaklanjut Rekomendasi atas Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Jenderal melalui Surat Kepala BTP Surabaya No.PS.302/1/1/BTP -SBY/2025 tanggal 15 Oktober 2025
9	Nilai Kinerja anggaran BTP Kelas I Surabaya	12,00	12,00	100,00	
10	Persentase realisasi penerimaan negara bukan pajak BTP Kelas I Surabaya	81,00	89,55	110,56*)	Anomali
11	Nilai pengawasan kearsipan internal BTP Kelas I Surabaya	100,00	100,00	100,00	S.d Desember 2025 perolehan PNBP sebesar Rp.9.604.880.542,-
12	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah BTP Kelas I Surabaya	69,00	66,54	96,44	

i. BTP Kelas I Medan

No	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	0,5	0,286	57,2%*)	1.Rasio konektivitas tahun 2025 yaitu 0,44 dikarenakan perhitungan belum menggunakan persentase realisasi gapeka dan PKW Lhokseumawe belum dikurangi karena force major 2.Pada 2025, Realisasi Gapeka KA PNP 90% dan gapeka KA Barang 35% sehingga realisasi gapeka 2025 = 65% serta terdapat pengurangan PKW Lhokseumawe sehingga rasio konektivitas dari 0,5 menjadi 0,44 sehingga diperolej rasio konektivitas perkeretaapian sebesar 0,286
2	Kondisi jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2 di Wilayah Balai	95,33	95,95	100,65%	Hasil Pengukuran Jalan Rel mengacu pengukuran yang dilakukan pada periode III tahun 2025, diperoleh hasil yang didapatkan 95,949% dari

	Teknik Perkeretaapian				target yang ditetapkan sebesar 95,330% dengan capaian 100,65%.
3	Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	55,35	55,35	100	Tidak ada perubahan target dan tidak ada penambahan fasop elektrik
4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	16,85	18,65	110,7	Realisasi jlh PNP tahun 2025 = 6.300.846 pnp dan barang = 804.536 ton
5	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Perintis di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	84,554	96,39	114%*)	pada rev PK kedua ditargetkan sebesar 2.635 perjalanan ka perintis dengan realisasi sebesar 2.540
6	Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	10	7,32	73,2*)	Baseline Rata2 jumlah kejadian pada periode (2020-2024) yaitu 41 kejadian Pada 2025, ditargetkan penurunan sebesar 10%, sehingga target penurunan yaitu 41*10% = 4 kejadian atau 37 kejadian gangguan Realisasi 2025 terdapat 38 kejadian , sehingga penurunan gangguan 7,32%
7	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	100	100	100	Capaian 100% tidak ada kecelakaan KA
8	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian	80,4	80,8	100,5	Capaian Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan tahun 2025 yaitu 80,80 sehingga capaian kinerja sebesar 100,5%
9	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian	15	14,5	96,67	Capaian Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan 14,5% sehingga capaian kinerja sebesar 96,67%
10	Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian	81	33,97	41,93*)	Agar segera dilakukan pengisian CRO pada aplikasi https://monev.kemenkeu.go.id/

11	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian	100	105,77	105,77	Target sampai TW 4 2025 sebesar 3.524.149.871 dengan perolehan pnbp sebesar 3.727.526.623 jadi capaian yaitu
12	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian	73,51	73,51	100	

j. BTP Kelas II Padang

No	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Padang	0,35	0,33	95,08	Perlu adanya evaluasi GAPEKA khususnya pada angkutan barang agar faktor pemanfaatan KA dapat meningkat.
2	Kondisi jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2 di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	87,34%	87,34%	100,00	Penysuaian dengan Realisasi dari Dit Prasarana
3	Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	-	-	-	
4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	18,56%	18,27%	98,43	Agar dilakukan analisa kegagalan untuk angkutan barang termasuk upaya peningkatan kinerja
5	Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Perintis di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	100,00%	99,91%	99,91	Per 1 Januari 2026, KA Perintis Lembah Anai telah berganti skema penyelenggaraan menjadi PSO.
6	Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada	10,00%	21,05%	210,53	Baseline kejadian di 2020-2024 : 23 kejadian. Jumlah kejadian 2025 : 18 kejadian, turun 21,05% (lebih besar

	Perlintasan Sebidang				dari target 2025 sebesar 10%) sehingga terdapat anomali capaian
7	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	100,00%	100,00%	100,00	Zero Acident
8	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian	82,50%	80,20%	97,21	
9	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian	11,50%	11,50%	100,00	
10	Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian	70,00%	83,52%	119,31	Terdapat perbaikan capaian Nilai Kinerja Perencanaan dan Nilai Kinerja Pelaksanaan di 2025 sehingga capaian NKA anomali
11	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian	100,00%	100,00%	100	
12	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian	72,61%	72,61%	100	

k. BTP Kelas II Palembang

No	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Padang	0,71	0,71	100,00	Terhubung : 10 Belum Terhubung : 4 Realisasi Perka : 50.216
2	Kondisi jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2 di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	93,03	97,11	104,39	Realisasi 2025: Hasil Pengukuran Periode ke III : 97,11% (Kategori I dan II)

3	Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	33,73	34,94	103,59	Jumlah Persinyalan: Elektrik : 28 Mekanik : 55 Total Persiyalan : 83 Dengan Catatan : Perlu dikoordinasikan jumlah total persinyalan pada BTP Palembang.
4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	18,46	19,39	105,01	Angkutan Penumpang: Capaian : 106,28% Angkutan Barang: Capaian : 103,80% Total Capaian: 105,01
5	Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	10,00	10,46	104,65	Realisasi : 43 Kejadian Target 2025 : Maks 45 Kejadian
6	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian	100,00	90,04	90,04	Ada 5 Kejadian anjlokan pada BTP Palembang, dan Realisasi Perka : 50.216
7	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian	81,90	80,70	98,53	Nilai Akip BTP Palembang: Perencanaan Kinerja : 25,20 Pengukuran Kinerja : 25,20 Pelaporan Kinerja : 12,30 Evaluasi Akip Internal : 18,00
8	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian	15,00	13,53	90,20	Realisasi menggunakan Penilaian MR Tahun 2024 : 13,53
9	Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian	81,00	80,10	98,88	Capaian sementara nilai NKA (per 12 Januari 2026) : 80,10 Namun terdapat catatan : Masih menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi

10	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian	100	100	100	Nilai PNBP pada BTP Palembang Tahun 2025 Rp28.461.932.030
11	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian	67,00	73,15	109,18	U nit Pengelolah : 71,67 Unit Kearsipan : 74,67 Dengan Total Nilai : 73,15

l. Balai Pengujian

No	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian	3,86	3,84	99,48	Diperlukan penjelasan detail terkait faktor ketidaktercapaian target IKK IKM di Tahun 2025, apakah karena faktor responden atau sistem? Agar dilengkapi dengan surat Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian kepada Kepala PPTB terkait hasil survei IKM.
2	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	19,76	20,621	104,36	Agar melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana pengujian sarana perkeretaapian.
3	Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	19,542	21,334	109,17	Agar melakukan sinkronisasi target Tahun 2026 dengan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.
4	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	19,284	21,038	109,10	Agar melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana pengujian prasarana perkeretaapian.
5	Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian	80,35	82,15	102,24	Rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 telah ditindaklanjuti melalui Surat Kepala Balai

					Pengujian Perkeretaapian Nomor PS.302/1/1/BP-UJI/2025 tanggal 15 Oktober 2025.
6	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengujian Perkeretaapian	16,00	16,00	100,00	Melakukan finalisasi penyusunan dokumen Manajemen Risiko Tahun 2026 termasuk Piagam Manajemen Risiko.
7	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	81,00	94,29	116,41	Pengusulan RO SBKK/SBKU saat penyusunan RKA Tahun 2027 guna memaksimalkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.
8	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengujian Perkeretaapian	100,00	99,54	99,54	Perlu dicek/konfirmasi kembali dengan data realisasi PNBP dari Bagian Perencanaan dan Keuangan. Perlu penjelasan detail atas ketidaktercapaian target kinerja PNBP Balai Pengujian Tahun 2025.
9	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Pengujian Perkeretaapian	76,50	79,45	103,86	Optimalisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI oleh seluruh pegawai.

m. Balai Perawatan

No	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Perawatan Perkeretaapian (Nilai)	3,07	3,89	125,71	Nilai IKM sudah menggunakan aplikasi 3AS Study dari PPTB dengan responden pengguna jasa di lingkungan Balai Perawatan KA
2	Persentase Sarana Perkeretaapian Milik Negara Siap Operasi (%)	100,00	80,00	80,00	Masih merupakan data sementara dan menunggu update data dari Tim Monev.
3	Presentase Pemanfaatan Sarana	85,00	85,00	100,00	Pemanfaatan berupa aset Depo KRL Solo Jebres oleh KCI

	Perkeretaaapian Milik Negara (%)				
4	Nilai AKIP Balai Perawatan Perkeretaapian (Nilai)	81,40	81,40	100,00	Rekomendasi evaluator internal telah ditindaklanjut untuk selanjutnya agar Balai Perawatan KA dapat melakukan inovasi dalam pencapaian target IKK
5	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Perawatan Perkeretaapian (Nilai)	15	13	80,00	Melakukan finalisasi penyusunan dokumen Manajemen Risiko Tahun 2026 termasuk Piagam Manajemen Risiko.
6	Nilai Kinerja Anggaran Balai Perawatan Perkeretaapian (Nilai)	84,83	86,72	102,22	Pengusulan RO SBKK/SBKU saat penyusunan RKA Tahun 2027 guna memaksimalkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.
7	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Perawatan Perkeretaapian (%)	100,00	101,86	101,86	Perlu dicek/konfirmasi kembali dengan data realisasi PNBP dari Bagian Perencanaan dan Keuangan.
8	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Perawatan Perkeretaapian (Nilai)	78,23	78,23	100,00	Optimalisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI oleh seluruh pegawai.

n. BPKARS Sumatera Selatan

No	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	19,41	20,43	105,26%	Jumlah penumpang sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebanyak 4.262.481 penumpang
2	Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api Kereta Api Ringan Sumatera Selatan Tepat Waktu	99	99,86	100,87%	Data OTP telah menggunakan rata - rata realisasi OTP dalam setahun

3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Oleh Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	3,58	3,59	100,28%	Pelaporan nilai IKM capaianya menggunakan capaian dari survey internal dari BPKARS Sumsel sebesar 3,59. Perlu adanya penyesuaian Capaian IKM dengan menggunakan rata - rata capaian antara survey PPTB dengan survey internal
4	Tingkat Keselamatan Transportasi Kereta Api Ringan Sumatera Selatan	100	100	100%	*Zero accident*
5	Nilai AKIP BPKAR Sumatera Selatan	80,50	80,95	100,56%	
6	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko BPKAR Sumatera Selatan	15	15	86%	Capaian saat ini menggunakan hasil evasluasi penilaian MR Risiko yang telah dilakukan oleh ITJEN dengan nilai capaian BPKARS Sumatera Selatan sebesar 12,9
7	Nilai Kinerja Anggaran BPKAR Sumatera Selatan	81	89,64	110,67%	Perlu dilakukan pengecekan kembali mengacu kepada aplikasi SPAN
8	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPKAR Sumatera Selatan	100	112,76	112,76	Capaian menurut dengan KAS BLU capaian sebesar 93,52% dari target yang telah ditetapkan atau sebesar Rp27.586.443.493,00. Menurut data dari aplikasi OMSPAN diperoleh capaian PNBP sebesar Rp33.259.834.871,00
9	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPKAR Sumatera Selatan	61	71,86	109,71	Capaian berdasarkan laporan akhir kearsipan internal (LAKI)

o. BPKA Sulawesi Selatan

No	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	Kondisi jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2 di Wilayah Balai Kereta Api Sulawesi Selatan	99	99	100%	Terkait rasio konektivitas, sesuai dengan Perdirjen, penyesuaian dilakukan terhadap gapeka, sehingga seharusnya terjadi pengurangan gapeka, bukan substitusi dengan skema PSO. Sebelumnya, Kereta Api Lembah Anai memiliki 12 perjalanan, sedangkan pada skema PSO yang baru hanya 6 perjalanan. Hal ini akan dikonfirmasi kembali kepada Direktorat LLAKA
2	Jalur KA yang Menggunakan Persinyalaan Elektrik di Wilayah Balai Kereta Api Sulawesi Selatan	100	100	100%	Belum terdapat peningkatan jalur yang signifikan, hanya dari IMO yang mengacu pengukuran pada period ke 3
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan (Nilai)	3,23	3,3	102%	Target penumpang dapat dicapai, sementara target angkutan barang setelah dilakukan exercise oleh Direktorat LLAKA masih terdapat ketidaksesuaian, sehingga perlu dilakukan peninjauan dan pembenahan lebih lanjut
4	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wlayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	15,72	19,12	122%	Pada tahun 2026, Kereta Api Perintis Lembah Anai tidak lagi berstatus sebagai perintis, melainkan beralih ke skema PSO. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian target penumpang untuk periode berikutnya. Sementara itu,

					anggaran pada DIPA masih tersedia; perlu ditentukan apakah akan disamakan atau disesuaikan lebih lanjut
5	Persentase Kedatangan dan Keberangkatan Kereta Api di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Tepat Waktu	94,5	92,88	96%	Baseline gangguan operasional ditetapkan berdasarkan rata-rata periode tahun 2020–2024, yaitu sebesar 23 kejadian. Pada tahun 2025 terjadi penurunan jumlah kejadian menjadi 18 kejadian (penurunan sebesar 21,5%), yang mengakibatkan tingkat capaian kinerja tercatat sebesar 210%. Kondisi tersebut menimbulkan anomali pengukuran kinerja, sehingga diperlukan penegasan apakah penetapan target tahun 2026 tetap mengacu pada baseline awal sebesar 23 kejadian atau disesuaikan menggunakan baseline realisasi tahun 2025 sebesar 18 kejadian
6	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan	100	100	100%	
7	Nilai AKIP BPKA Sulawesi Selatan	80,5	80,5	100%	
8	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko BPKA Sulawesi Selatan	11	10,25	100%	Agar dapat dikomunikasikan kekurangan yang ada saat penialian maturitas
9	Nilai Kinerja Anggaran BPKA Sulawesi Selatan	81	81,26	100,3%	NKA target 2026 minimal dari baseline 2025, jika penyerapan 2025 berkurang, target mengikuti baseline renstra

10	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPKA Sulawesi Selatan	100	109	109%	
11	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPKA Sulawesi Selatan	68	69,9	103%	

p. Pembahasan Internal Capaian Kinerja Setditjen KA

No	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
1	IKK1 Persentase Pencapaian Target Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	21,21	24,75	117	Capaian telah mencapai target
2	IKK2 Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Nilai Minimal Pembangunan Zona Integritas	6,25	6,25	100	Pada Tahun 2025, meskipun belum terdapat usulan resmi, telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Unit kerja yang memiliki fungsi pelayanan publik menjadi prioritas dan berpotensi untuk diusulkan dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
3	IKK3 Nilai Kualitas ASN Ditjen Perkeretaapian	89,00	86,09	97	• Perlu dilakukan konfirmasi kepada Biro SDMO terkait mekanisme e-pelaporan SDMO, khususnya untuk memastikan apakah memang tidak terdapat rencana ke depan mengenai penyampaian nilai dimaksud. • Nilai kinerja saat ini masih terdapat

					beberapa pegawai dengan nilai 0, yang berpotensi memengaruhi penilaian kompetensi secara keseluruhan. Bagian SDMO telah melakukan upaya pengingat, namun masih terdapat beberapa pegawai yang belum melaksanakan kewajiban pengisian, yang mayoritas berasal dari unit balai. • Terdapat dua pegawai yang masih tercatat dalam data, meskipun yang bersangkutan telah tidak aktif/keluar, sehingga berdampak pada besaran pembagi dalam perhitungan nilai. Surat Keputusan (SK) baru diterbitkan pada Tahun 2025, meskipun secara substantif kondisi tersebut telah terjadi sejak Tahun 2024
4	IKK4 Tingkat Kematangan Layanan Digital Ditjen Perkeretaapian	1,60	1,61	101	• Pengukuran tingkat kepuasan mengacu pada ISO 9001:2004 dengan bobot sebesar 60% yang terdiri atas kurang lebih 80 butir pertanyaan. • Berdasarkan hasil survei, nilai dukungan fasilitas diperoleh sebesar 1,79 dan nilai pada indikator kepuasan sebesar 1,49. Dengan demikian, hasil pembulatan

					akhir mencapai skor 1,61 dengan target yang ditetapkan sebesar 1,60 pada skala penilaian 1–5. • Kegiatan TIK sudah selesai dilaksanakan dengan pengembangan SuperApps dan Pelayanan Perizinan. Saat ini Portal sedang diajukan UAT. • Penerapan standar ISO tersebut bersifat inisiatif, mengingat hingga saat ini belum terdapat acuan maupun format baku yang ditetapkan oleh unit pusat.
5	IKK5 Persentase Penyelesaian Perjanjian/Kerja Sama dan Bantuan Hukum	80,00	90,91	114	Capaian telah mencapai target
6	IKK6 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Ditjen Perkeretaapian	90,00	96,60	107	Capaian telah mencapai target
7	IKK7 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	83,65	83,50	100	Capaian masih on the right track
8	IKK8 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	21,00	23,00	110	Capaian telah mencapai target
9	IKK9 Persentase Tindak Lanjut Temuan Auditor	90,50	91,03	101	Capaian indikator Tindak Lanjut Temuan Auditor masih dalam perhitungan.
10	IKK 10 Nilai Kinerja Anggaran	85,00	93,43	110	Capaian telah mencapai target

11	Setditjen Perkeretaapian IKK11 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	50,00	22,25	45	Capaian tidak on the right track
12	IKK12 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian	80,00	80,41	101	Capaian telah mencapai target
13	IKK13 Tingkat Kepuasan Pelayanan Perkantoran Setditjen Perkeretaapian (Nilai)	3,89	Dalam Tahap Penyusnan		Pada Triwulan IV 2025 survey pengisian kuisioner masih dalam tahap pelaksanaan.

D. KESIMPULAN

1. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka Pembahasan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dan Reviu Konsep Laporan Kinerja Tahun 2025 di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Setiap unit kerja untuk dapat menyampaikan data dukung berupa uraian data capaian, analisis keberhasilan/kegagalan dan upaya peningkatan kinerja Tahun berikutnya termasuk Nota Dinas kepada Setditjen yang ditembuskan kepada Bagian Perencanaan sebagai komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja pada setiap triwulanya;
3. Berdasarkan hasil pemantauan periode Triwulan III 2025, diperoleh bahwa unit kerja masih dalam proses/belum secara lengkap memenuhi pengisian aplikasi pelaporan kinerja yang diamanahkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (e-SAKIP reviu), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (e-Monev), Kementerian Keuangan (SAKTI/Monev Kemenkeu), Kementerian Perhubungan (e-Performance) dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Portal Layanan). Untuk itu, unit kerja perlu segera melengkapi pengisian aplikasi pelaporan kinerja sesuai batas waktu;
4. Himbauan untuk dapat segera melakukan input CRO agar dapat finalisasi NKA;

5. Perhitungan rasio konektivitas dirumuskan dengan menggunakan formula baru beserta pemanfaatannya sebagai dasar pengukuran kinerja;
6. Penyampaian dukungan pencapaian target RPJMN Tahun 2025-2029 sesuai bidang tugas;
7. Sinkronisasi data capaian kinerja antar unit kerja Sekretariat/Direktorat/Balai.

E. PENUTUP

Demikian laporan ini buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Januari 2026
Notulensi

(Tim Notulensi)

DOKUMENTASI







